PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024

BADAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana kerja Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan teknis tahunan sebagai landasan operasional program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Isi dari rencana kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024

Dalam penyusunannya, dokumen ini harus dimanfaatkan secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Demikian Perubahan Renja Tahun 2024 ini disusun dengan harapan penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 204 berlangsung dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan bersama.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

I.1 Latar Belakang 1

I.2 Landasan Hukum 1

I.3 Maksud dan Tujuan 3

I.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 5

II.1 Evaluasi Renja Bapenda sampai dengan triwulan II tahun 2024 6

II.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas & Fungsi SKPD 29

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA 31

BAB IV PENUTUP 43

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Kerja SKPD merupakan bentuk pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional. Undang-undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja SKPD) untuk penyesuaian perencanaan tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah disusun dalam Rancangan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD).

Perubahan renja Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap adalah dokumen perencanaan untuk penyesuaian perencanaan tahunan yang diawali penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, penyusunan rancangan perubahan renja yang mengacu pada Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2024-2026 dan rancangan perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Perubahan dalam Renja tahun 2024 memuat perubahan pagu anggaran program dan kegiatan, dan perubahan indikator kinerja program dan kegiatan, perubahan renja didasarkan pada hasil evaluasi renja Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap sampai dengan Triwulan II tahun 2024.

Perubahan Renja tahun 2024 disusun sebagai bahan acuan penyusunan RKA perubahan Badan pendapatan Daerah Kab.Sidrap Tahun anggaran 2024 dengan memperhatikan dimensi waktu serta permasalahan-permasalahan yang berkembang pada masa yang akan datang sehingga dapat memberikan dampak yang optimal dalam mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Kab.Sidrap "Meningkatkan Penerimaan Keuangan Daerah".

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan NasionalV(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarustamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);

I.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Adapun yang menjadi tujuan penyusunan Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 adalah :

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.
2. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada keuangan daerah, kebutuhan SKPD serta perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran anggaran kegiatan.
3. Mewujudkan pengelolaan pendapatan yang optimal, transparansi, partisipatif & akuntabel

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja SKPD

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan / bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus di evaluasi dalam pelaksanaannya, demikian halnya dengan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra SKPD merupakan indikator yang sangat penting untuk mengukur tingkat pelayanan dan kinerja SKPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan selanjutnya dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2024 terdiri dari :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten kota
   a. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   b. Administrasi keuangan perangkat daerah
   c. Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah
   d. Administrasi umum perangkat daerah
   e. Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   f. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
   g. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah
   h. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
2. Program pengelolaan pendapatan daerah
   a. Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan pencapaian Renstra s/d Triwulan II tahun 2024 dapat di lihat pada tabel II.1

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN (2018 -2023)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPENDA DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN								
..01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah**	**100 %**	**89**					
..01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**100 %**	**100**				**100**	**100**
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	6 Dok	6				6	100.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja, LKJIP))	6 Lap.	6				6	100.00
..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan monev)	12 Lap	12				12	100.00
..01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**	**100**				**100**	**100.00**
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Bulan	12				12	33.33
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	36 Bulan	36				36	100.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD	3 Lap	3				3	100.00
..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	10 Lap	10				10	100.00
..01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 Lap	1				1.00	33.33
..01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar**	**100 %**	**101.45**				**101.45**	**101.45**

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	11820	Objek Retribusi	11820				11,820	100
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	36	Bulan	34				34	94
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicetak	11820	Lembar	11820				11,820	100
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	6	Laporan	6				6	100
..01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100**	**%**	**66**				**66.00**	**66.00**
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	900	Buah	900				900	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1110	Buah	1110				1,110	100
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	39391	Blok	40900				40,900	104
..01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Yang Tersedia	144	Eksemplar	144				144	100
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Kali	220				220	73
..01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**100**	%	**100**				**100.00**	**100.00**
..01.2.07.02	Pengadaan kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan yang diadakan	1	Unit	0				-	-
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan	95	Unit	95				95	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3				3	100
..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	57 Unit	57				57	100
..01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	**100 %**	**78**				**78**	**0.78**
..01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	1200 Lembar	920				920	77
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulan	36				36	100
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 Bulan	36				36	100

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**	**71**				**71.00**	**71.00**
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan STNK Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78 Unit	78				78	100.00
..01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	6 Unit	9				9.00	150.00

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	150 Unit	25				25	16.67
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda**	**100 %**	**78.07**				**78**	**78.07**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah**	**100 %**	**75.75**				**76**	**75.75**
5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah objek pajak baru yang terdata	600 Objek pajak baru	619				619	103.17

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah perda / perbub yang tersusun	15 Dok	17				17	113.33
5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah petugas & wajib pajak yang mendapat penyuluhan	300 Orang	65				65	21.67
5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi yang tersedia	4 Aplikasi	2				2	50.00
5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah objek pajak daerah yang terdata dan terdaftar	22587 Objek pajak	11496				11,496	50.90
5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah aplikasi basis data pajak daerah yang dipelihara	9 Aplikasi	1				1	11.11

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak PBB dan BPHTB yang termutahirkan datanya	102000	Objek pajak	106870				106,870	104.77
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang ditetapkan	782124	Wajib pajak	0				-	0.00
5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Waktu penyediaan layanan dan konsultasi pajak	36	Bulan	12				12	33.33
5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah dokumen yang diteliti dan diverifikasi	23937	Dok	112825				112,825	471.34
5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang tertagih	780000	Wajib pajak	337222				337,222	43.23

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2021--2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021 - 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=5	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan pajak daerah	12 Laporan	4				4	33.33
5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pemeriksaan retribusi daerah	12 Laporan	4				4	33.33

TABEL II.b (RESTRA RPD 2024 - 2026)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA BAPENDA DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN								
..01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatkan pencapaian kinerja pemerintah	100 %		100				
..01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen dan laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %		100	15.38	0.154	15.38	15.38

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	6 Dok		8	1	13	1	16.67
..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	6 Lap.		5	1	20	1	16.67
..01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**		**100**	**28.96**	**28.96%**	**29**	**28.96**

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3,204	Org/ Bulan		1,068	788	74	788	24.59
..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3	Dok		1	1	100	1	33.33
..01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi penerimaan retribusi pasar**	**100**	**%**		**100**	**27.40**	**27.40**	**27.40**	**27.40**
..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Objek Retribusi Daerah Yang Terdata dan Terdaftar	11820	Objek Retribusi		7903	7,903	100	7,903	66.86
..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Waktu Pengolahan Data Retribusi Daerah	36	Bulan		12	6	50	6	16.67

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah SKRD Yang Dicetak	11820 Lembar		4401	4,250	97	4,250	35.96
..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	6 Laporan						
..01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100 %**		**100**	**103.77**	**104**	**103.77**	**103.77**
..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Tersedia	900 Buah		41	41	100	41	4.56
..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang Tersedia	1110 Buah		45	45	100	45	4.05
..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang Tersedia	39391 Blok		0	0	#DIV/0!	-	0.00
..01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Kali		20	24	120	24	8.00

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang diadakan**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	95	Unit		0	0	-	-	0.00
..01.2.07.09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	3	Unit		0	0	-	-	0.00
..01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor**	**100**	**%**		**100**	**50.00**	**50.00**	**50**	**50.00**
..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	36	Bulan		12	6	50	6	16.67

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	36 Bulan		12	6	50	6	16.67
..01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang terpelihara**	**100 %**		**100**	**2.44**	**2.44**	**2.44**	**2.44**
..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	78 Unit		10	1	10	1	1.28

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
..01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	6 Unit		30	0	-	-	0.00
..01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	150 Unit		1	0	-	-	0.00
5.02.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda**	**100 %**		**100**	**40.91**	**41**	**41**	**40.91**
5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah**	**100 %**		**100**	**44.36**	**44**	**44**	**44.36**

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01 .01	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah (Dokumen)	6 Dok		2	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01 .02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah (Dokumen)	15 Dok		5	8	160	8	53.33
5.02.04.2.01 .03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah (Laporan)	3 Laporan		1	1	100	1	33.33

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01 .04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah (Unit)	3 Unit		1	0	-	-	0.00
5.02.04.2.01 .05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah (Laporan)	12 Laporan		4	2	50	2	16.67
5.02.04.2.01 .06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah (Laporan)	3 Laporan		1	1	100	1	33.33

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
						Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya (Obyek Pajak)	102,000	Objek pajak		34,000	10,383	31	10,383	10.18
5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah (Dokumen)	25,101	Dok		8,367	41,040	490	41,040	163.50
5.02.04.2.01.09	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah (Dokumen)	78,000	Dok		260,000	41,656	16	41,656	53.41

	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s.d TAHUN 2024 - 2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PD S/D TAHUN BERJALAN	
					Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian program dan kegiatan s.d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9=7	10=(9/4*100)
5.02.04.2.01 .10	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah (Dokumen)	12 Dok		4	2	50	2	16.67
5.02.04.2.01 .11	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah (Laporan)	12 Lapo ran		4	2	50	2	16.67
5.02.04.2.01 .13	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (Laporan)	36 Lapo ran		4	5	125	5	13.89

nnn

II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan, yang juga tidak terlepas dari masalah gender yang merujuk kepada kesenjangan relasi antara laki-laki dan perempuan dalam mendapatkan **akses** dan **kontrol** terhadap sumber daya pembangunan, **partisipasi** dalam kegiatan pembangunan dan dalam pengambilan keputusan serta mendapatkan **manfaat** dari hasil pembanguan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 5 tahun 2019 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas pokok, Fungsi, uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan daerah, merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Badan pendapatan Daerah kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas mewujudkan pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional. Pada tahun 2023 penerimaan pajak daerah mencapai target sebesar 84.11% dan retribusi daerah khususnya pasar sebesar 83.48%, namun untuk penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023 mencapai 94.90% .Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah selaku pengelola pendapatan daerah menghadapi masalah yaitu belum tercapainya taget penerimaan pajak & retribusi daerah disebabkan karena:

1. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
2. Lemahnya perencanaan, implementasi dan pengawasan dalam otoritas penagihan pajak daerah
3. Potensi-potensi pajak yang bisa menjadi sumber pajak belum diidentikasi dengan baik

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah juga memiliki faktor penghambat dan faktor pendorong, yaitu :

1. Faktor Penghambat
    1. Masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak
    2. Masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat
    3. Kurangnya SDM
2. Faktor Pendorong
    a. Adanya inovasi untuk pengembangan dan peningkatan PAD serta pengelolaan pendapatan daerah
    b. Penyuluhan kepada masyarakat atas kebijakan tentang pajak daerah
    c. Semakin intensnya penagihan pajak daerah
    d. Peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia pengelola pajak

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BAPENDA

Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Badan Pendapatan Daerah yang berdasarkan perubahan RKPD Tahun 2024. RKPD perubahan Tahun 2024 memiliki tema " pemanfaatan pemulihan ekonomi, daya saing daerah dan tata kelola pemerintahan yang baik" dengan prioritas pembangunan : peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, penguatan sistem agrobisnis dalam mendukung pengembangan perekonomian daerah, penguatan infrastruktur dasar dan ekonomi, peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, perbaikan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, penataan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana, peningkatan aktifitas dan kualitas kehidupan sosial masyarakat yang religius berbudaya dan aman.

Penyusunan dokumen Renja perubahan Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 serta mempertimbangkan berbagai isu dan permasalahan yang mempengaruhi proses pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah tahun berjalan. Perubahan tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan upaya pencapaian target dan sasaran Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024 - 2026.

Sesuai hasil evaluasi, perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024, lebih memuat berbagai perubahan dan pergeseran anggaran tanpa adanya penambahan kegiatan. Pergeseran anggaran tersebut dilakukan akibat adanya perubahan volume kegiatan maupun optimalisasi pemanfaatan dana silpa kegiatan yang telah selesai. Pergeseran anggaran juga dimaksudkan sebagai upaya optimalisasi pengelolaan anggaran Badan Pendapatan Daerah sehingga seluruh target dan sasaran dapat tercapai.

Rumusan program dan kegiatan perubahan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdiri dari dua program yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan program pengelolaan pendapatan daerah, 9 kegiatan dan 31 sub kegiatan. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat dilihat dalam Tabel III.1 sebagai berikut :

TABEL III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN				**14,110,679,994**				**17,724.166.000**	-
1	**..01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**10,925,679,994**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**13.491.383.000**	
1.1	**..01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**20,000,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**12,410,000**	
	..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 dok	13,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 dok	7,431,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 Lap	5,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 Lap	4,979,000	
	..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan monev)	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Lap	2,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	-	0	
1.2	**..01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**9,309,800,994**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**10.557.844.000**	
	..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1068 org/bulan	9,279,800,994		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1068 org/bulan	10.537.068.200	
	..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Dok	20,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	24 Dok	20,775,800	

TABEL III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN				**14,110,679,994**				**17,724.166.000**	-
1	**..01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**10,925,679,994**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**13.491.383.000**	
1.1	**..01.2.01**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**20,000,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**12,410,000**	
	..01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (DPA, DPPA)	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 dok	13,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 dok	7,431,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	..01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Renstra, Renja)	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 Lap	5,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 Lap	4,979,000	
	..01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah (laporan monev)	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Lap	2,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	-	0	
1.2	**..01.2.02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase penyusunan dokumen laporan keuangan tepat waktu**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**9,309,800,994**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**10.557.844.000**	
	..01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1068 org/bulan	9,279,800,994		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1068 org/bulan	10.537.068.200	
	..01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Dok	20,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	24 Dok	20,775,800	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	..01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhiir tahun SKPD	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	1 Lap	2,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	-	0,00	
	..01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	4 Lap	8,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	-	0,00 -	
1.3	**..01.2.04**	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Persentase realisasi penerimaan retribusi daerah yg dikelola bapenda**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**423,779,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**233,414,500**	
	..01.2.04.04	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah data objek, subjek dan wajib retribusi daerah	Sub. Bid. PAD II	7930 Dok	393,779,000		Sub. Bid. PAD II	7903 Dok	215,722,000	
	..01.2.04.05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan data retribusi daerah	Sub. Bid. PAD II	12 Lap	10,000,000		Sub. Bid. PAD II	12 Lap	2,005,500	
	..01.2.04.06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah dokumen ketetapan retribusi daerah	Sub. Bid. PAD II	4401 Dok	10,000,000		Sub. Bid. PAD II	4401 Dok	15,687,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	..01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan Retribusi Daerah	Sub. Bid. PAD II	2 Dok	10,000,000		Sub. Bid. PAD II	-	0,00	
1.4	**..01.2.06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase pemenuhan administrasi umum kantor**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**60,000,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**603,786,500**	
	..01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangnan kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	2 paket	5,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	50 paket	3,226,000	
	..01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor Yang disediakan	Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	2 paket	5,000,000		Sub. Bag. Perencanaan & Keuangan	50 paket	4,330,000	
	..01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah palet Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 paket	25,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 paket	109,737,500	
	..01.2.06.06	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	5 Lap	25,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	50 Lap	486,473,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	**..01.2.07**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**21,000,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**22,104,000**	**-**
	..01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang diadakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	-			Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	-	0,00	
	..01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel Yang Diadakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	2,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	2 unit	16,104,000	
	..01.2.07.09	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	2,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	15 unit	8,000,000	
	..01.2.07.10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	7,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	-	0,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	..01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	10,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	-	0,00	
1.6	**..01.2.08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase pemenuhan kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**990,600,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**1,469,862,000**	
	..01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 Lap	155,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 Lap	275,000,000	
	..01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 Lap	835,600,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	12 Lap	1,194,862,000	
1.7	**..01.2.09**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Persentase barang milik daerah dalam kondisi baik**	**Sekretariat Badan**	**100%**	**100,500,000**		**Sekretariat Badan**	**100%**	**591,932,000**	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	..01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	10 unit	91,500,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	10 unit	126,474,000	
	..01.2.09.09	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	5 unit	1,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	-	0,00	
	..01.2.09.09	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	1,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	20 unit	25,508,000	-
	..01.2.09.10	Pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	2 unit	5,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	2 unit	440,000,000	-
	..01.2.09.10	Pemeliharaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	1 unit	2,000,000		Sub. Bag. Umum & Kepegawaian	-	0,00	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah & retribusi daerah yang dikelola Bapenda**	**Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian**	**100%**	**3,185,000,000**		**Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian**	**100%**	**4,232,783,000**	
2.1	**5.02.04.2.01**	**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Persentase realisasi penerimaan pajak daerah**	**Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian**	**100%**	**3,185,000,000**		**Bidang Pendapatan, Perencanaan, Pengendalian**	**100%**	**4,232,783,000**	
	5.02.04.2.01.01	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah dokumen rencana pengelolaan pajak daerah	Sub. Bid. Perencanaan	2 dok	10,000,000		Sub. Bid. Perencanaan	2 dok	3,916,000	
	5.02.04.2.01.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah kebijakan pajak daerah	Sub. Bid. Perencanaan	5 dok	410,000,000		Sub. Bid. Perencanaan	17 dok	90,119,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	1 Lap	10,000,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	1 Lap	120,320,000	
	5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasaran pengelolaan pajak daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	1 unit	10,000,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	1 unit	141,705,000	
	5.02.04.2.01.05	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran ojek pajak daerah, subjek pajak daerah dan wajib pajak daerah	Sub. Bid. PAD I	4 Lap	10,000,000		Sub. Bid. PAD I	4 Lap	96,157,000	
	5.02.04.2.01.06	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD I	1 Lap	10,000,000		Sub. Bid. PAD I	1 Lap	194,449,000	
	5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek pajak yang disesuaikan NJOPnya	Sub. Bid. PAD I	34000 objek pajak	2,620,000,000		Sub. Bid. PAD I	50000 objek pajak	3,150,437,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.2.01.08	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	Sub. Bid. PAD I	8367 dok	5,000,000		Sub. Bid. PAD I	10000 dok	15,089,000	
	5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	12 layanan	10,000,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	-	0,00	
	5.02.04.2.01.10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	Sub. Bid. PAD I	8000 dok	10,000,000		Sub. Bid. PAD I	-	0,00	
	5.02.04.2.01.11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Sub. Bid. PAD I	26000 dok	10,000,000		Sub. Bid. PAD I	300000 dok	214.436,000	
	5.02.04.2.01.13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Sub. Bid. Pengendalian	4 dok	30,000,000		Sub. Bid. Pengendalian	4 dok	70,672,000	
	5.02.04.2.01.14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Sub. Bid. Evaluasi	4 Lap	30,000,000		Sub. Bid. Evaluasi	4 Lap	62,315,000	

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Jumlah laporan perkembangan Elektronifikasi transaksi pemerintah daerah	Sub. Bid. Sistem Informasi	4 Lap	10,000,000		Sub. Bid. Sistem Informasi	10 Lap	73,168,000	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dan hasil pelaksanaan evaluasi Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 yang diharapkan memberi dampak pembangunan yang optimal terhadap pencapaian visi dan misi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu : "terwujudnya pengelolaan pendapatan daerah yang optimal, transparansi, partisipatif dan akuntabel yang didukung oleh aparat yang profesional".

Perubahan Renja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran, yang selanjutnya dimanfaatkan sebagai rujukan dalam pelaksanaan perubahan program & kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUH. YUSUF, SH.,M.Kn
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19820101 201101 1 006

PERUBAHAN
RENCANA KERJA TAHUN 2024



INSPEKTORAT DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL ii
BAB I PENDAHULUAN 1
I.1. Latar belakang 1
I.2. Landasan hukum 2
I.3. Maksud dan tujuan 3
I.4. Sistematika penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 5
II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 5
II.2. Review Terhadap Perubahan RKPD Perubahan Tahun 2024 11

BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD 16

BAB IV PENUTUP 20

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024.....	6
Tabel 2.2	Review Terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang.....	12
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Renja Tahun 2024.....	17

BAB I
PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan lembaga pengawas internal yang berkewajiban mengawal Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam bentuk pembinaan dan pengawasan. Inspektorat Daerah mempunyai tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Rencana Kerja (Renja) perubahan Inspektorat Daerah ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana perubahan tahunan, Rencana Kerja perubahan ini mempunyai arti yang strategis dalam mendukung tujuan Inspektorat Daerah mengingat bahwa :

a. Rencana Kerja Perubahan merupakan dokumen yang secara substansial penerjemah dari visi, misi, dan program PD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
b. Perubahan Renja merupakan acuan PD untuk memasukkan program kegiatan serta pagu anggaran kedalam aplikasi e-planning RKPD perubahan dan KUA PPAS serta sebagai bahan perencanaan program kegiatan yang dituangkan kedalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perubahan tahun 2024.
c. Perubahan Renja merupakan salah satu instrumen untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana capaian dan realisasi kinerja Perangkat Daerah serta capaian dan realisasi Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang telah tercapai.

I. 2. Landasan Hukum

Landasan hukum Perubahan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat.

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Inspektorat Daerah dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh personil lnspektorat Daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2024 dan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai implementasi dari visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mendukung Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Tujuan perubahan Renja Inspektorat Daerah tahun 2024 adalah :

a. Sebagai kerangka acuan dalam penyusunan RKA-DPA perubahan Inspektorat Daerah Tahun 2024.
b. Sebagai bahan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tantangan yang mungkin timbul sekaligus strategi pemecahannya dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024.
c. Memberikan sinkronisasi antara substansi dokumen perubahan RKPD Tahun 2024 dengan substansi dokumen Perubahan Renja Tahun 2024.

I.4.Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Perubahan Renja ini memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sistematika penyajian Perubahan Renja Tahun 2024 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I : **PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1. Latar Belakang
I.2. Landasan Hukum
I.3. Maksud dan Tujuan
I.4. Sistematika Penulisan

Bab II : EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah Triwulan II.

II.2 Review terhadap Perubahan RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara rancangan Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

Bab III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Bab IV : PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindaklanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

II.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Inspektorat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi pelaksanaan Renja lnspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang triwulan II tahun 2024 ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kesesuaian kegiatan pelaksanaan dibandingkan dengan perencanaannya serta mengidentifikasi masalah yang timbul pada pelaksanaan kegiatan sehingga diharapkan dapat diambil tindakan pemecah masalah, koreksi dan perbaikan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditentukan dalam renstra Inspektorat Daerah.

Diharapkan melalui perubahan Renja Inspektorat Daerah tujuan dan sasaran dapat tercapai melalui perubahan program kegiatan dan anggaran. Terkait dengan hal tersebut perubahan Renja Inspektorat Daerah ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan pengukuran kinerja sasaran dari hasil yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah selama triwulan II Tahun 2024 dan perkiraan target sampai dengan akhir tahun 2024 yang menjadi dasar pertimbangan adanya perubahan rencana kerja dan anggaran.

Hasil evaluasi pelaksanaan renja s/d triwulan II tahun 2024 Inspektorat Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja s/d Triwulan II Tahun 2024

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah	Indikator Kinerja Program	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD Tahun berjalan yang		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya efektifitas pembinaan dan pengawasan internal			Level Kapabilitas APIP (Level)	3	16.200.853.158	0	0	3	2.376.954.000																
		6.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase Tindak Lanjut Temuan (%)	95,00	7.217.152.429	0,00	0	93,00	1.899.218.500									0	424,890,000						Belum Tercapai
		6.01.02.2.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK (%)	78,00	5.840.000.000	0,00	0	70,00	1.348.218.500	0%%	159,480,000	0%%	150,380,000					0,00%	309,860,000	11,34%	309.860.000	**16,19%**	**5,31%**	Inspektorat	
		6.01.02.2.01 .0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	45	1.110.000.000	0	0	10	251.960.000	0	0	4	63.160.000					4	63.160.000	4	63.160.000	**8,89%**	**5,69%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.02.2.01 .0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	45	1.305.000.000	0	0	16	305.630.000	5	119.330.000	0	0					5	119.330.000	5	119.330.000	**11,11%**	**9,14%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.02.2.01 .0003	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	24	394.500.000	0	0	2	54.960.000	0	0	2	31.400.000					2	31.400.000	2	31.400.000	**8,33%**	**7,96%**	Inspektorat	Tercapai
		6.01.02.2.01 .0004	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	69	1.041.000.000	0	0	8	117.640.000	1	7.650.000	2	38.730.000					3	46.380.000	3	46.380.000	**4,35%**	**4,46%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.02.2.01 .0005	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	24	750.000.000	0	0	4	111.480.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.02.2.01 .0006	Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	3	845.000.000	0	0	1	357.388.500	1	16.320.000	0	0					1	16.320.000	1	16.320.000	**33,33%**	**1,93%**	Inspektorat	Tercapai

		6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	15	394.500.000	0	0	5	149.160.000	1	16.180.000	1	17.090.000					2	33.270.000	2	33.270.000	**13,33%**	**8,43%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.02.2.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan (%)	100,00	1.377.152.429	0,00	0	100,00	551.000.000	0%%	93,860,000	0%%	21,170,000					0,00%	115,030,000	10,00%	115.030.000	**10,00%**	**8,35%**	Inspektorat	
		6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	60	1.377.152.429	0	0	30	551.000.000	4	93.860.000	2	21.170.000					6	115.030.000	6	115.030.000	**10,00%**	**8,35%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.03	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah Level 2 Keatas (%)	95,00	8.983.700.729	0,00	0	65,00	477.735.500									0	21,470,000						Belum Tercapai
		6.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah yang Terlaksana (%)	90,00	984.000.000	0,00	0	90,00	166.699.500	0%%	0	0%%	0					25,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	
		6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	6	984.000.000	0	0	1	166.699.500	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.03.2.02	Pendampingan dan Asistensi	Persentase SAKIP Perangkat Daerah berkategori "BAIK" (%)	65,00	782.548.300	0,00	0	35,00	311.036.000	0%%	14,790,000	0%%	6,680,000					0,00%	21,470,000	12,50%	21.470.000	**35,71%**	**2,74%**	Inspektorat	
		6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	120	377.548.300	0	0	40	166.456.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai

		6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi	120	75.000.000	0	0	20	30.680.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	6	69.000.000	0	0	2	21.300.000	1	8.330.000	0	0					1	8.330.000	1	8.330.000	**16,67%**	**12,07%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	120	261.000.000	0	0	40	92.600.000	40	6.460.000	0	6.680.000					40	13.140.000	40	13.140.000	**33,33%**	**5,03%**	Inspektorat	Tercapai
2	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan			Nilai SAKIP (Kategori)	B	21.866.570.942	0	0	B	7.346.947.000																
		6.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	21.866.570.942	0,00	0	100,00	7.346.947.000									0	3,382,487,916						Belum Tercapai
		6.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan (Laporan)	12,00	17.027.615.942	0,00	0	12,00	5.506.116.000	0%%	852,204,164	0%%	2,176,254,279					0,00%	3,028,458,443	63,03%	3.028.458.443	**525,25%**	**17,79%**	Inspektorat	
		6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	165	17.027.615.942	0	0	55	5.506.116.000	52	852.204.164	52	2.176.254.279					104	3.028.458.443	104	3.028.458.443	**63,03%**	**17,79%**	Inspektorat	Melampaui
		6.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur (%)	100,00	1.496.000.000	0,00	0	100,00	557.495.000	0%%	0	0%%	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	
		6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	105	1.496.000.000	0	0	35	557.495.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum (Bulan)	12,00	1.666.000.000	0,00	0	12,00	532.108.000	0%%	86,180,241	0%%	154,161,018					0,00%	240,341,259	7,18%	240.341.259	**59,85%**	**14,43%**	Inspektorat	

		6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18	204.400.000	0	0	3	36.370.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36	27.600.000	0	0	3	4.630.000	0	0	0	1.500.000					0	1.500.000	0	1.500.000	**0,00%**	**5,43%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	18	109.000.000	0	0	6	41.880.000	1	1.937.500	1	1.052.000					2	2.989.500	2	2.989.500	**11,11%**	**2,74%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	210	1.325.000.000	0	0	70	449.228.000	12	84.242.741	25	151.609.018					37	235.851.759	37	235.851.759	**17,62%**	**17,80%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Diadakan (Unit)	14,00	620.000.000	0,00	0	14,00	423.155.000	0%%	0	0%%	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	
		6.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	21	190.000.000	0	0	3	171.600.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30	430.000.000	0	0	16	251.555.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Bulan)	12,00	541.955.000	0,00	0	12,00	174.959.000	0%%	30,284,061	0%%	44,911,623					0,00%	75,195,684	9,26%	75.195.684	**77,16%**	**13,87%**	Inspektorat	
		6.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36	4.500.000	0	0	4	1.540.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	208.000.000	0	0	12	66.900.000	3	16.805.361	3	12.942.923					6	29.748.284	6	29.748.284	**16,67%**	**14,30%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	329.455.000	0	0	12	106.519.000	2	13.478.700	2	31.968.700					4	45.447.400	4	45.447.400	**11,11%**	**13,79%**	Inspektorat	Belum Tercapai

		6.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan (Unit)	75,00	515.000.000	0,00	0	75,00	153.114.000	0%%	10,099,500	0%%	28,393,030					0,00%	38,492,530	6,24%	38.492.530	**8,32%**	**7,47%**	Inspektorat	
		6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75	335.000.000	0	0	22	92.794.000	7	10.099.500	5	27.393.030					12	37.492.530	12	37.492.530	**16,00%**	**11,19%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	147	50.000.000	0	0	24	10.320.000	0	0	4	1.000.000					4	1.000.000	4	1.000.000	**2,72%**	**2,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
		6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	130.000.000	0	0	1	50.000.000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Inspektorat	Belum Tercapai
Total Target (RP)									**9.723.901.000**					**Total Realisasi (RP)**						**3.828.847.916**				
Rata-rata capaian kinerja (%)																			**35,13**	**39,38**				
Predikat kinerja																			**SR**	**SR**				

II.2. Review Terhadap Rancangan Perubahan RKPD

Perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang diselaraskan dengan Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yaitu Program Penyelenggaraan Pengawasan dengan kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal, dan Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu. Anggaran disesuaikan dengan plafon pagu indikatif yang ada pada Perubahan RKPD Tahun 2024.

Penyusunan Perubahan Renja berpedoman pada renstra perubahan Inspektorat Daerah dan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024. Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024 dapat di lihat dibawah ini:

Tabel 2.2
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

SKPD : INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

No.	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Inspektorat**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**7.346.947.000**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Inspektorat**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**90%**	**7.346.947.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	*Inspektorat*	*Persentase adminstrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu*	*100%*	*5.506.116.000*	*Administrasi Keuangan Perangkat Daerah*	*Inspektorat*	*Persentase adminstrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu*	*100%*	*5.506.116.000*	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	5.506.116.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Inspektorat	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	5.506.116.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	*Inspektorat*	*Persentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu*	*100%*	*557.495.000*	*Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah*	*Inspektorat*	*Persentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu*	*100%*	*557.495.000*	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lembaga Diklat K/L/D	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	557.495.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Lembaga Diklat K/L/D	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35	557.495.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	*Inspektorat*	*Persentase pemenuhan administrasi umum*	*85%*	*532.108.000*	*Administrasi Umum Perangkat Daerah*	*Inspektorat*	*Persentase pemenuhan administrasi umum*	*85%*	*532.108.000*	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	36.370.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Inspektorat	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	36.370.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.630.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Inspektorat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.630.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	41.880.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Inspektorat	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 laporan	41.880.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	K/L/D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	449.228.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	K/L/D	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 laporan	449.228.000	

No.	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	*Inspektorat*	*Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang*	*85%*	*423.155.000*	*Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*	*Inspektorat*	*Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang*	*85%*	*423.155.000*	
	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	171.600.000	Pengadaan Mebel	Inspektorat	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	171.600.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	251.555.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	16	251.555.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Inspektorat*	*Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	90%	*174.959.000*	*Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Inspektorat*	*Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah*	90%	*174.959.000*	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1.540.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	1.540.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	66.900.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	66.900.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	106.519.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Inspektorat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	106.519.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	*Inspektorat*	*Persentase aset dalam kondisi baik*	*12 bulan*	*153.114.000*	*Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*	*Inspektorat*	*Persentase aset dalam kondisi baik*	*12 bulan*	*153.114.000*	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	92.794.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Inspektorat	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	92.794.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	10.320.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inspektorat	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	10.320.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Inspektorat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	1	50.000.000	

No.	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Inspektorat**	**Persentase tindak lanjut temuan**	**96%**	**1.899.218.500**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Inspektorat**	**Persentase tindak lanjut temuan**	**96%**	**1.899.218.500**	
	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	*Kab. Sidrap*	*Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK*	*69%*	*1.348.218.500*	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal*	*Kab. Sidrap*	*Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK*	*69%*	*1.348.218.500*	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	251.960.000	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	251.960.000	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16	305.630.000	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16	305.630.000	
	Reviu Laporan Kinerja	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	54.960.000	Reviu Laporan Kinerja	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	54.960.000	
	Reviu Laporan Keuangan	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8	117.640.000	Reviu Laporan Keuangan	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8	117.640.000	
	Pengawasan Desa	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4	111.480.000	Pengawasan Desa	*Kab. Sidrap*	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4	111.480.000	
	Kerjasama Pengawasan Internal	*Kab. Sidrap*	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	357.388.500	Kerjasama Pengawasan Internal	*Kab. Sidrap*	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	357.388.500	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Kab. Sidrap*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	149.160.000	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	*Kab. Sidrap*	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	149.160.000	
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	*Kab. Sidrap*	*Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan*	*100%*	*551.000.000*	*Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu*	*Kab. Sidrap*	*Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan*	*100%*	*551.000.000*	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	551.000.000	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Kab. Sidrap	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	551.000.000	
3	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Kab. Sidrap***	**Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas**	**35%**	**477.735.500**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	***Kab. Sidrap***	**Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas**	**35%**	**477.735.500**	

No.	Perubahan RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	*Kab. Sidrap*	*Persentase pelaksanaan PKPT*	*90%*	*166.699.500*	*Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan*	*Kab. Sidrap*	*Persentase pelaksanaan PKPT*	*90%*	*166.699.500*	
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Kab. Sidrap*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	166.699.500	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	*Kab. Sidrap*	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	166.699.500	
	Pendampingan dan Asistensi	*Kab. Sidrap*	*Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu*	100%	*311.036.000*	*Pendampingan dan Asistensi*	*Kab. Sidrap*	*Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu*	100%	*311.036.000*	
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40	166.456.000	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40	166.456.000	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20	30.680.000	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20	30.680.000	
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sidrap	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	21.300.000	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kab. Sidrap	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	21.300.000	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40	92.600.000	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Kab. Sidrap	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40	92.600.000	
Jumlah					**9.723.901.000**					**9.723.901.000**	

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PD

Rencana Program dan Kegiatan dalam perubahan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang dituangkan dalam Bab III ini, merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan. Penyusunan tersebut perlu mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan dan skala prioritas. Capaian target kinerja program dan kegiatan dimungkinkan berubah baik berkurang atau bertambah karena kondisi yang berubah dari penetapan target sebelumnya.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, maka ditentukan indikator kinerja pada program/kegiatan yang mendukungnya. Indikator kinerja program/kegiatan dimaksud harus spesifik dan jelas untuk menghindari terjadinya mis-interpretasi, fleksibel terhadap perubahan, dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan mengandung aspek-aspek yang relevan.

Rencana program dan kegiatan perubahan Renja Inspektorat Daerah secara keseluruhan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Renja Tahun 2024

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Kinerja		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6					**URUSAN PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**				**9.723.901.000**	**9.723.901.000**					**10.935.916.220**
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**				**9.723.901.000**	**9.723.901.000**					**10.935.916.220**
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase adminstrasi keuangan yang dilaksanakan tepat waktu**	**90 Persen**	**90 Persen**	**7.346.947.000**	**7.346.947.000**				**90 Persen**	**7.912.086.220**
6	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Waktu Penyediaan Pembayaran gaji dan tunjangan	12 Bulan	12 Bulan	5.506.116.000	5.506.116.000				12 Bulan	6.568.131.220
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	55	5.506.116.000	5.506.116.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		58 org/bln	6.568.131.220
6	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang naik pangkat tepat waktu	100 Persen	100 Persen	557.495.000	557.495.000				100 Persen	432.000.000
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	35	35	557.495.000	557.495.000		DAU		30 Orang	432.000.000
6	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum	85 Persen	85 Persen	532.108.000	532.108.000				85 Persen	492.000.000
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	36.370.000	36.370.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		6	34.800.000
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	4.630.000	4.630.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		12	9.200.000
6	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Makanan dan minuman tamu	6 laporan	6 laporan	41.880.000	41.880.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		6	23.000.000
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Hari Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah	70 laporan	70 laporan	449.228.000	449.228.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		70	425.000.000
6	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan BMD penunjang	85 Persen	85 Persen	423.155.000	423.155.000				85 Persen	120.000.000
6	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	40 Buah	40 Buah	171.600.000	171.600.000		DAU		3	50.000.000
6	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3	3	251.555.000	251.555.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		10	70.000.000
6	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan Jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	16	16	174.959.000	174.959.000				90 Persen	160.955.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Kinerja		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	1.540.000	1.540.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		12	1.500.000
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	66.900.000	66.900.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		12	52.000.000
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	106.519.000	106.519.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		12	107.455.000
6	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase aset dalam kondisi baik	87 Persen	87 Persen	153.114.000	153.114.000				87 Persen	139.000.000
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	22	92.794.000	92.794.000		DAU		25	95.000.000
6	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	24	24	10.320.000	10.320.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		49	14.000.000
	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	50.000.000	50.000.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		1	30.000.000
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Persentase tindak lanjut temuan**	**96 Persen**	**96 Persen**	**1.899.218.500**	**1.899.218.500**				**95 Persen**	**2.435.000.000**
6	1	2	2.01		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Persentase perangkat daerah yang bersih dari temuan penyimpangan keuangan audit BPK	69 Persen	69 Persen	1.348.218.500	1.348.218.500				69 Persen	1.940.000.000
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	10	251.960.000	251.960.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		15	370.000.000
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	16	16	305.630.000	305.630.000		DAU		15	435.000.000
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	2	2	54.960.000	54.960.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		8	131.500.000
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8	8	117.640.000	117.640.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		23	347.000.000
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	4	4	111.480.000	111.480.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		8	250.000.000
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1	1	357.388.500	357.388.500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		1	275.000.000

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
							Target Kinerja		Pagu Indikatif		Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif
							Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan					
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	5	5	149.160.000	149.160.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		5	131.500.000
6	1	2	2.02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Persentase Penyelesaian Penanganan Kasus / Pengaduan	100 Persen	100 Persen	551.000.000	551.000.000				100 Persen	495.000.000
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	30	30	551.000.000	551.000.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		20	495.000.000
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Maturitas SPIP Perangkat Daerah level 2 keatas**	**35 Persen**	**35 Persen**	**477.735.500**	**477.735.500**				**30 Persen**	**588.830.000**
6	1	3	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Persentase pelaksanaan PKPT	90 Persen	90 Persen	166.699.500	166.699.500				90 Persen	328.000.000
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	1	1	166.699.500	166.699.500	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		2	328.000.000
6	1	3	2.02		Pendampingan dan Asistensi	Persentase wajib LHKPN yang melapor tepat waktu	100 Persen	100 Persen	311.036.000	311.036.000				100 Persen	260.830.000
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	40	40	166.456.000	166.456.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		40	125.830.000
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	20	20	30.680.000	30.680.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		40	25.000.000
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	2	2	21.300.000	21.300.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		2	23.000.000
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	40	40	92.600.000	92.600.000	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAU		40	87.000.000

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini mengacu pada hasil evaluasi Rencana Kerja s/d triwulan II Tahun 2024 merupakan bagian dari rangkaian perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.

Perubahan Rencana Kerja Inspekorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah tahun 2024 -2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Semoga Perubahan Renja Inspektorat Daerah dapat memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggaraan program dan kegiatan Inspektorat Daerah sehingga Visi dapat diwujudkan dengan baik.

Pangkajene Sidenreng, 21 Agustus 2024

INSPEKTUR DAERAH
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Drs. MUSTARI KADIR, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19680119 199112 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensingkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah .

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang

tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dilakukan sebagai upaya rasionalisasi anggran. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun dan teruang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk.

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan *good governance* dan *electronic governance.*
6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri.
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

Program dan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran dan adanya bergeseran belanja pada beberapa kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022

yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

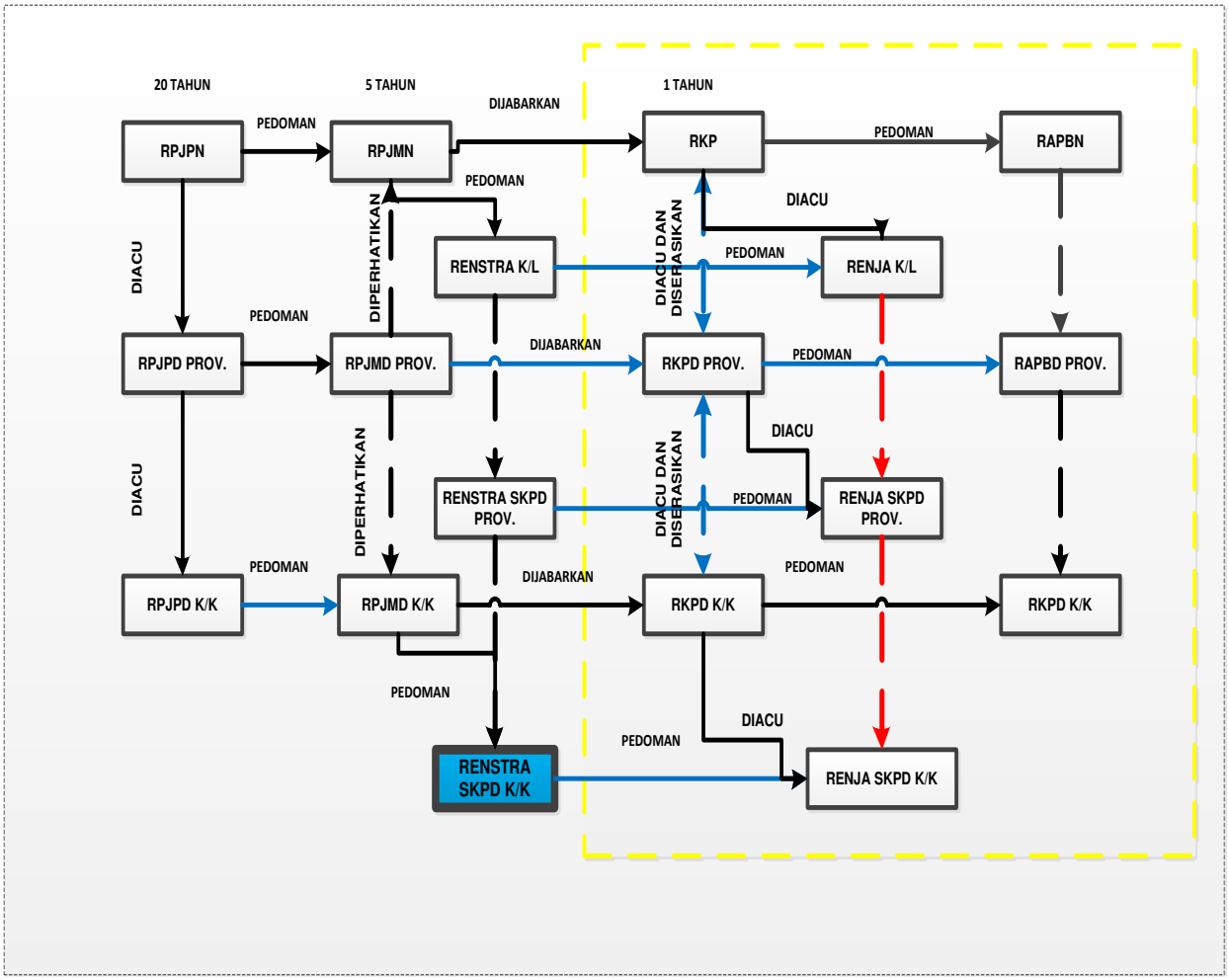
Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD

Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

a. Tahap perumusan rancangan renja OPD
b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

Keterkaitan antara rencana kerja OPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :



Gambar 1.1

Keterkaitan antara renja OPD dengan dokumen RKPD

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 adalah:

a. Undang–Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang–UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara;
d. Undang–Undang Nomor 25 tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
e. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
g. Undang–Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
i. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
j. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
k. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 15);
l. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024–2026;
m. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);
n. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 54 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun Anggaran 2016 Nomor 56);
o. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 19);

p. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor 86);
q. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 01 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Tahun Anggaran 2023 Nomor);

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN PERUBAHAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2023.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksankan oleh Bappelitbangda sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan daerah.
3. Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkesinambungan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD yang meliputi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan

dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, berisikan uraian mengenai Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Millenium Development Goalds), Tantangan dan peluang serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP, menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD

Perubahan Rencana Kerja Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Bappelitbangda. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2024.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Badan Perencanan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan.

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 terdiri dari 4 Program, 15 Kegiatan dan 42 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 6.695.405.000 dan anggaran setelah perubahan Rp. 6.845.405.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II realisasi belanja 3.060.844.496 (44.71%) dan Realiasi Fisik (49.67%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Bappelitbangda Kabupaten

Sidenreng Rappang adalah sebagai "*Pengarah".* Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Badan Perencanan Pembangunan Penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interprestasi serta strategi bagi Badan Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Perencanan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapainnya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sampai denga Triwulan II dan pencapaian Renstra Tahun 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah	Indikator Kinerj Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaProgram (Renstra OPD Tahun 2024 – 2026))	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s. d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi(%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9(5+7)	10(10/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	100		100	56.00	56.00	56.00	56.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	100		100	86.00	86.00	86.00	86.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	8		4	4	50.00	12	150.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	5		4	3	65	15	100.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4		4	2	50	4	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100		100	50	50	50	50.00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	492		490	260	50	100	100.00
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	12		12	6	50.00	12	100.00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18		12	6	50.00	12	100.00
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**	100		100	50.00	50.00	100	100.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12		12	12	50.00	12	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	100		100	50	50.00	100	100.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4		4	2	50.00	4	100.00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4		4	2.00	50.00	4	100.00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5		5	0	-	5	100.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	180		165	45.00	50.00	215	100.00
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	150		80			130	86.67
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD**	72		24	13	20.00	37	51.39
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36		12	0	-	3	8.33

	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	36		1	1	100.00	3	8.33
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	100		100	50	50.00	100	100.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	465		130	73	56.15	253	54.41
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12		**12**	6.00	50.00	18	100.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	6.00	50.00	18	100.00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	100		100	50.00	50.00	500	100.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45		**15**	**5.00**	33.33	20	44.44
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		1	1	100.00	2	66.67
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36		12	6	50.00	18	50.00
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD**	100		100	65	65.00	65	65.00
		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100		100	50.00	50.00	50	50.00
		Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100		100	50	50.00	50	50.00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada**	100		100	65	65.00	65	65.00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	100		100	66	66.00	50	50.00

	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	100		100	63.33	63.33	63	63.00
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	100		100	100.00	100.00	100	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	100		100	100	100	100	100.00
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota	100		100	100	100	100	100.00
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	100		100	100	100	100	100.00
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	10		100	66	66.00	66	100.00
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	100		50	50	100.00	50	50.00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	100		50	50	100.00	50	50.00
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah**	100		50	50	100.00	50	50.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	100		50	50	100.00	50	50.00
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	100		100	50.00	50.00	50	50.00
		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100		100	50.00	50.00	50	50.00

		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100		100	50.00	50.00	50	50.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	100		100	50.00	50.00	50	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)	40		-	-	-	10	25.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40		-	-	-	10	25.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	40				#DIV/0!	10	25.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	40		40	10	25.00	25	62.50
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	44		16	8	50.00	24	54.55
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	18				-	8	44.44
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	100				-	100	100.00

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	36		16	6	37.50	22	61.11
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA**	100		100	50.00	50.00	50	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	25		16	8	50.00	24	96.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9				-	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	100		0	-	-	100	100.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	45		15	3	20.00	18	40.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	16		8	4	50.00	12	75.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	60		0	0	-	15	25.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	99		0	0	-	13	13.13
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	132		0	0	-	13	9.85

Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	100		100	50.00	50.00	50	50.00
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132		0	0	#DIV/0!	25	18.94
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	33		0	0	#DIV/0!	12	36.36
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	20		20	10	50.00	50	250.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	15		5	2.00	40.00	7	46.67
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	22		0	-	-	22	100.00
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	22		0		-	22	100.00
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	44		44	22	-	66	50.00
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	22		44	22	-	66	500.00
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah**	3		100	45	45.00	45	45.00

	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100		100	45.00	45.00	45	45.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah**	100		100	40	40.00	40	40.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	100		100	15	15.00	15	15.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100		100	20	20.00	120	120.00
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	100		0		-	100	100.00
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	100		100	10	10.00	100	100.00
Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	100		100		-	100	100.00
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanna Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	100		100	15	15.00	115	115.00
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah**	100		100		-	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	100		100		-	-	0.00

Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah**	100		100		-	-	0.00
Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	100		100		-	-	0.00
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah**	100		100	12	12.00	12	12.00
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	100		100	15	15.00	15	15.00
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	100		100	10	10.00	10	10.00
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual	100		100		-	-	0.00

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Daerah	Indikator Kinerj Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian KinerjaProgram (Renstra OPD Tahun2024 - 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d Tahun 2023	Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s. d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Capaian Target Renstra s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Realisasi Tingkat Realisasi(%)	Realisasi Capaian Program & Kegiatan s.d tahun berjalan (n-1) Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8(7/6)	9(5=7)	10(19/4)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	100		100	56.00	56.00	56.00	56.00
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	100		100	86.00	86.00	86.00	86.00
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	24		8	4	50.00	4.00	16.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan haasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd	15		4	3	75.00	3.00	20.00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12		4	2	50.00	2.00	16.67
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	100		100	50	50.00	50.00	50.00

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN	492		490	260	53.06	260.00	52.85
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD	36		12	6	50.00	6.00	16.67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	36		12	6	50.00	6.00	16.67
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD**	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	36		12	12	100.00	12.00	33.33
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**	100		100	50	50.00	50.00	50.00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12		4	2	50.00	2.00	16.67
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12		4	2	50.00	2.00	16.67
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5			0	#DIV/0!	-	0.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	510		180	45.00	25.00	45.00	8.82
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	390		-		-	-	0.00
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD**	100		100	25.00	25.00	25.00	25.00
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	20		10	0	-	-	0.00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30		1	1	100.00	1.00	3.33

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	100		100	50	50.00	50.00	50.00
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	540		130	73	56.15	73.00	13.52
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	6.00	50.00	6.00	16.67
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	6.00	50.00	6.00	16.67
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan**	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45		15	5.00	33.33	5.00	11.11
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3		1	1	100.00	1.00	33.33
	Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36		12	6	50.00	6.00	16.67
	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD**	100		100	65	65.00	65.00	65.00
		Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
		Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	100		100	50	50.00	50.00	50.00
	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada**	100		100	65	65.00	65.00	65.00
	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	15		100	66	66.00	66.00	440.00
	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	9		3	3.00	100.00	3.00	33.33
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	6		1	1.00	100.00	1.00	16.67

	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3		1	1	100.00	1.00	33.33
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota	3		1	1	100.00	1.00	33.33
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	5,600		1,451	1,451	100.00	1,451.00	25.91
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	9		3	1	33.33	1.00	11.11
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**	100		50	50	100.00	50.00	50.00
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	12		4	2	50.00	2.00	16.67
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah**	100		50	50	100.00	50.00	50.00
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12		4	2	50.00	2.00	16.67
	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
		Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	120		-	-	-	-	0.00

		Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)							
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	120		-	-	-	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	12				-	-	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	120		40	20	50.00	20.00	16.67
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	132		16	8	50.00	8.00	6.06
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	132				-	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	132				-	-	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	132		16	8	50.00	8.00	6.06
	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA**	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72		16	8	50.00	8.00	11.11
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72		0		-	-	0.00

	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	72		0	-	-	-	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	72		0	0	-	-	0.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	72		16	8	50.00	8.00	11.11
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72		0	0	-	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	72		0	0	-	-	0.00
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	72		0	0	-	-	0.00
	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase Keselarasan antar dokumen perencanaan (RPD-Renstra, RKPD-Renja) Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**	100		100	50.00	50.00	50.00	50.00
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	36		0	0	-	-	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36		0	0	-	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	36		20	10	50.00	10.00	27.78
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur	36		5	2.00	40.00	2.00	5.56

	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	36		0	-	-	-	0.00
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36		0		-	-	0.00
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	36		44	22	50.00	22.00	61.11
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan	36		44	22	50.00	22.00	61.11
	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah**	100		100	45.00	45.00	45.00	45.00
		Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi	100		100	45.00	45.00	45.00	45.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah**	100		100	40	40.00	40.00	40.00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	3		1	15	40.00	15.00	500.00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	3		1	20	20.00	20.00	20.00
	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	3		1		-	-	0.00
	Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik	3		1	10	10.00	10.00	10.00

	Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan	3		1		-	-	0.00
	Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanna Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	3		1	15	15.00	15.00	15.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	**Persentase hasil Kelitbangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang di manfaatkan Perangkat Daerah**	100		100		-	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1		1		-	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	**Persentase hasil Kelitbangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang di manfaatkan Perangkat Daerah**	100		1		-	-	0.00
	Penelitian dan Pengembangan lingkungan hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1		1		-	-	0.00
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah**	100		100	12	12.00	12.00	12.00
	Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi	3		1	15	1,500.00	15.00	500.00
	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi	3		10	10	100.00	10.00	10.00
	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual	3		1	0	-	-	0.00

Pada tabel evaluasi hasil renja tahun 2024 s.d Triwulan II menggambarkan target kinerja renstra.

2.2. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI BAPPELITBANGDA

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan penganggaran yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, pengembangan infrastruktur dan engembangan wilayah. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati Sidenreng Rappang

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai dengan Peraturn Bupati Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Badan
2. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sekretariat yang terdiri dari:
    a. Subag Umum dan Kepegawaian
    b. Subag Perencanaan

c. Subag Keuangan

3. Unsur Pelaksana yaitu :
   a. Bidang Perencanaan Perekonomian , Sumber Daya Alam, Sosial dan Pembangunan Manusia
   b. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan dan Pemerintahan
   c. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah
   d. Bidang Perencanaan Pengendalian & Evalusi Pembangunan Daerah

Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang akan dipakai landasan penyusunan program dengan mengantisipasi perkembangan di masa mendatang, sebagai berikut

a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan;
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
d. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Kurangnya ketersediaan data dan informasi secara kuantitas dan kualitas sebagai pendukung perencanaan pembangunan.
2. Masih lemahnya koordinasi antar OPD maupun antar bidang di lingkungan internal Bappelitbangda.
3. Terbatasnya kemampuan aparatur Bappelitbangda dalam perencanaan pembangunan.
4. Perencanaan pembangunan yang belum konsisten dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.

5. Perencanaan pembangunan yang belum terpadu
6. Kurangnya pengendalian dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah mengubah pola perencanaan yang ada, dimana Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan produk perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses *bottom-up dan top down,* yang disebut dengan istilah dari *shopping list* ke *working plant*.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini, memberikan indikasi terhadap kebenaran pernyataan diatas.

Untuk dapat mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan kegiatan–kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur dan sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan *good governance*.

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan penelitian dan pengembangan daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana/prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa dan kelurahan.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangun

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi perencanaan dan pengendalian yang bersifat lintas wilayah, sektoral dan waktu yang diharapkan dapat mengakomodasi kebijakan-kebijakan pembangunan wilayah dan sektoral secara menyeluruh dalam satu kesatuan pembangunan wilayah. Tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Daerah yaitu melaksanakan tugas umum pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan ekonomi, sosial budaya, penelitian dan pembangunan, fisik dan prasarana. Sistem perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis, dan terarah merupakan sebuah keharusan untuk menghasilkan pembangunan yang berkualitas, efektif dan efisien, dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan yang terpadu, sistematis dan terarah.

Pada table berikut menyajikan Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Di Badan Perencanaan Pembangunann Penelitian Dan Pengembangan Daerah

Urusan/bidang urusan pemerintahan daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
		Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
		Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Bappelitbangda**	**100%**	**4,136,570,349**		**Bappelitbangda**	**100%**	**4,539,207,700**	ASN/Non ASN Lingkup Bappelitbangda
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**		**100%**	**21,500,349**			**100%**	**21,599,500**	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun		8 Dok	15,000,000			8 Dok	15,379,500	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja skpd yang disusun		5 Lap	3,500,000			5 Lap	3,391,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Yang Disusun		4 Lap	3,000,349			4 Lap	2,829,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah**		**100%**	**3,521,786,019.**			**100%**	**3,764,092,300.**	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan Tunjangan ASN		492/14	3,496,786,019			492/14	3,717,562,300	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Vertifikasi Keuangan SKPD		12 Dokumen	20,000,000			12 Dokumen	34,844,000	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		18 Laporan	5,000,000			12 Laporan	11,686,000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi barang nilik daerah**		100%	**4,000,000**			100%	**4,873,000**	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		12 Laporan	4,000,000			12 Laporan	4,873,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase kegiatan administrasi umum perangkat daerah**		100%	**116,400,000**			100%	**166,129,500**	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4,000,000			4 Paket	3,991,000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Paket	4,000,000			4 Paket	4,960,000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen dan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		5 Dokumen	5,400,000					
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		180 Laporan	100,000,000			180 Laporan	157,178,500	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD		12 Dokumen	3,000,000					

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan darah**		100%	**25,000,000**			100%	**59,975,000**	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		20 Paket	10,000,000			20 Paket	9,975,000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		10 Paket	15,000,000			10 Paket	50,000,000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**341,999,651**			**100%**	**384,704,400**	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		414 Laporan	5,000,000			414 Laporan	4,000,000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	72,000,000			12 Laporan	71,448,000	Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	264,999,651			12 Laporan	309,256,400	Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan**		**100%**	**105,884,330**			**100%**	**137,834,000**	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		15 Unit	29,354,000			15 Unit	35,748,000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 Unit	50,000,000			1 Unit	18,630,000	

Pemeliharaan/Rehabilitasi peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		30 Unit	26,530,330			30 Unit	83,456,000	
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	**Persentase Konsistensi Program RPD-RKPD**		**100%**	**500,000,000**			**100%**	**794,308,500**	**Perangkat Daerah & Stakeholder Terkait**
	Persentase Konsistensi Program RKPD-APBD		**100%**				**100%**		
	Persentase Rata Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah		**100%**				**100%**		
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	**Persentase tersusunnya dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan dengan Perda dan Perkada**		**100%**	**383,000,000**			**100%**	**547,070,500**	
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)		3 Dokumen	28,000,000			3 Dokumen	60,839,400	
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah		3 Dokumen	25,000,000			3 Dokumen	16,388,000	
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik		2 B Acara	40,000,000			2 B Acara	76,465,100	
Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara forum Perangkat Daerah /Lintas Perangkat Daerah		1 B Acara	20,000,000			1 B Acara	33,308,000	

Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrembang Kabupaten/Kota		1 B Acara	70,000,000			1 B Acara	105,460,000	
Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan		1451 Usulan	25,000,000			1451 Usulan	25,084,000	
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)		2 Dokumen	175,000,000			2 Dokumen	229,526,000	
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**		100%	**67,000,000**			100%	**164,860,000**	
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)		4 Masukan	67,000,000			4 Masukan	164,860,000	
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	**Persentase Pencapaian target Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah**		100%	50,000,000			100%	**82,378,000**	
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah		4 Laporan	50,000,000			4 Laporan	82,378,000	

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		100%	**400,000,000**			100%	**518,533,400**	**Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait**
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan SDA		100%				100%		
	Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		100%				100%		
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	**Persentase Kesesuaian Program Perangkat Daerah dengan Sasaran Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**		**100%**	**95,000,000**			**100%**	**178,859,000**	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD DAN RKPD)		48 Dokumen	5,000,000					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		48 Laporan	5,000,000					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan		48 Laporan	10,000,000					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan		48 Laporan	30,000,000			40 Laporan	22,833,000	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	10,000,000			16 Dokumen	18,384,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	5,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	10,000,000					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia		16 Laporan	20,000,000			16 Laporan	137,642,000	

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah**		**100%**	**155,000,000**			**100%**	**131,308,500**	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		16 Dokumen	15,000,000			16 Dokumen	97,095,500	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		16 Laporan	10,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		16 Laporan	5,000,000					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian		16 Laporan	10,000,000					
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		8 Dokumen	5,000,000			8 Dokumen	34,213,000	
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000					

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA		8 Laporan	5,000,000					
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA		8 Laporan	100,000,000					
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	**Persentase ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah**		**100%**	**150,000,000**			**100%**	**208,365,900**	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		20 Dokumen	5,000,000					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		20 Laporan	5,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur		20 Laporan	20,000,000			16 Laporan	28,167,000	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Infrastruktur		20 Laporan	45,000,000			5 Dokumen	112,629,900	

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)		52 Dokumen	5,000,000					
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		52 Laporan	5,000,000					
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		52 Laporan	20,000,000			44 Laporan	18,012,200	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD Pada Bidang Kewilayahan		52 Laporan	45,000,000			22 Dokumen	49,556,800	
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	**Persentase hasil litbang yang dimanfaatkan oleh perangkat daerah**		**100%**	**500,000,000**			**100%**	**1.023,355,000**	**Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait**
	Persentase Perangkat Daerah yang menghasilkan inovasi		**100%**				**100%**		

Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	**Persentase hasil Kelitbangan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang dimanfaatkan Perangkat Daerah**		**100%**	**400,000,000**			**100%**	**585,300,900**	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah		1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	167,654,500	-
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan		1 Laporan	100,000,000			1 Laporan	127,899,800	
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan aset daerah,reformasi birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan aset daerah,reformasi birokrasi						1 Laporan	29.999.600	
Pengelolaan data kelitbangan dan peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terekelolah dengan baik		1 Laporan	75,000,000			1Laporan	200,691,500	
Fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanna Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan		1 Laporan	50,000,000			1Laporan	59,055,500	

Perumusan Rekomendasi Atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas rencana penetapan Peraturan Basru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang diterbitkan		1 Laporan	75,000,000					
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	**Persentase hasil Inovasi yang diterapkan di daerah**		**100%**	**100,000,000**			**100%**	**438,054,100**	
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah dokumen hasil Penelitian, pengembangan dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi		1 Laporan	50,000,000			1 Laporan	198,008,800	
Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun / Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan rancang bangun /model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi		1 Laporan	25,000,000			1 Laporan	240,045,300	
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelekteual		1 Laporan	25,000,000			1 Laporan		
				5,536,570,349				**7,261,404,600**	

BAB IV

P E N U T U P

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah **Program Tahunan** Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Bappelitbangda. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Bappelitbangda Kabupaten Sidenreng Rappang.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Pitu Riawa memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Pitu Riawa masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dongi, 5 Juli 2024
CAMAT PITU RIAWA

ALI HUSAIN, S.IP., M.Si
NIP: 19710227 199202 1 002

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR ……		i
DAFTAR ISI …….		ii
DAFTAR TABEL ……..		iii
BAB I.	PENDAHULUAN ……...	
I.1.	Latar Belakang ……..	1
I.2.	Landasan Hukum …….	3
I.3.	Maksud dan Tujuan ……	6
I.4.	Sistimatika Penulisan	7
BAB II.	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ……	
II.1.	Evaluasi RENJA Kecamatan Pitu Riawa Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024……	8
II.2.	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Pitu Riawa ……	24
BAB III.	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PITU RIAWA ……	26
BAB IV.	PENUTUP ……..	35
LAMPIRAN …….		37

DAFTAR TABEL

			Halaman
Tabel II.1.a.	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kecamatan Pitu Riawa s/d triwulan II tahun 2024.....	….	11
Tabel II.1.b.	Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Kecamatan Pitu Riawa s/d triwulan II tahun 2024.....	….	16
Tabel III.1.	Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2024	….	28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Pitu Riawa mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Pitu Riawa dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Pitu Riawa. Sejajar dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Pitu Riawa 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di

lingkup Pemerintah Kecamatan Pitu Riawa dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Pitu Riawa dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
8. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
13. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Riawa tahun 2024 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
- Menjabarkan Renstra Kecamatan Pitu Riawa tahun 2024 - 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Pitu Riawa;
- Penuntun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Pitu Riawa tahun 2024.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Kecamatan Pitu Riawa Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pitu Riawa

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PITU RIAWA terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Kecamatan Pitu Riawa Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2024, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan kondisi Kecamatan Pitu Riawa disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan rencana Kerja triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan mencapai tingkat realisasi 41,67%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah

Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 40%.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan Perencanaan,penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kecamatan Pitu Riawa, Administrasi keuangan Kecamatan Pitu Riawa terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Kecamatan Pitu Riawa terdiri atas sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel,kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target Renja 32,30% dari target sebesar 100%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Kecamatan Pitu Riawa Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.a dan Tabel II.b.

Tabel II.1.a. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Pitu Riawa s/d Triwulan II tahun 2024
(RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	0	100	0	0	100	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	0	100	0	0	100	100
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	10	Urusan	10				6	100
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1	Urusan	1				2	100
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	74	%	36,0				0	0
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74	%	0				0	0
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan	2				2	100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**74**	**%**	**34,0**				**0**	**0**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	40	Lembaga kemasy.	40				40	100
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	20	Unit	20				20	100
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	60	Pokmas/Ormas	60				60	100
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	Laporan	2				2	100
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**0**				**0**	**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**0**				**0**	**0**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen	10				10	100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	Dokumen	10				10	100
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Dokumen	10				10	100
X					**X**									
X	**XX**				**XX**									
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**	**60**				**60**	**60**
X	**XX**	**01**	**2.02**		**XXX Administrasi Keuangan Kecamatan Pitu Riawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kecamatan Pitu Riawa**	**100**	**%**	**60**				**60**	**60**
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	406	Orang/Bln	406				406	100
X	XX	01	2.02	03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen	12				12	100
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Umum Kecamatan Pitu Riawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Kecamatan Pitu Riawa**	**100**	**%**	**60**				**60**	**60**
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bangunan yang Disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4	Unit	4				4	100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	102 Unit	102				102	100
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25.200 Unit	25.200				25.200	100
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17.000 Lembar	17.000				17.000	100
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	101 Kali	101				101	100
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	646 Kali	646				646	100
X	**XX**	**01**	**2.07**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100**				**100**	**100**
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	93 Unit	93				93	100
X	**XX**	**01**	**2.08**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**99,82**				**99,82**	**99,82**
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.175 Lembar	2.175				2.175	100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	36				36	100
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	36				36	100
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**96,26**				**96**	**96,26**
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	Unit	10				10	100
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35	Unit	35				35	85
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	4				4	100

Tabel II.1.b. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Pitu Riawa s/d Triwulan II tahun 2024 (RENSTRA RPD 2024-2026)

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
X	**XX**	**.1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**14,09**	**14,09**	**19,60**	**19,60**
X	**XX**	**.1**	**.202**		**Administrasi Keuangan Kecamatan Pitu Riawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kecamatan Pitu Riawa**	**100**	**%**	**100**	**100**	**14,09**	**14,09**	**19,60**	**19,60**
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	406	Org/Bln		406	174	14,29	19,71	19,71
X	XX	.1	.202	. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	Dokumen		36	15	13,89	10,42	10,42
X	**XX**	**.1**	**.206**		**Administrasi Umum Kecamatan Pitu Riawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Kecamatan Pitu Riawa**	**100**	**%**	**100**	**100**	**5,68**	**5,68**	**5,90**	**5,90**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	.1	.206	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	7	Paket		7	-	-	-	-
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	4	Paket		4	1	3,70	4,01	4,01
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2.000	Paket		2.000	650	10,83	11,94	11,94
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	17	Paket		17	7	0,12	2,75	2,75
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasiltas kunjungan tamu	12	Laporan		12	-	-	-	-
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	180	Laporan		180	70	19,44	8,07	8,07
X	**XX**	**.1**	**.208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**	**100**	**42,59**	**42,59**	**10,90**	**10,90**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	343	Laporan		343	-	-	-	-
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	36	Laporan		36	25	69,44	5,52	5,52
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan		36	21	58,33	12,71	12,71
X	**XX**	**.1**	**.209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan**	**100**	**%**	**100**	**100**	**29,17**	**29,17**	**6,48**	**6,48**
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	10	Unit		10	7	58,33	8,65	8,65
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	4	Unit		4	-	-	-	-
7	**.1**	**.2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	**.1**	**.2**	**204**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**100**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2	Laporan		2	-	-	-	-
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Laporan		2	-	-	-	-
7	**.1**	**.5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**		**100**	**13,89**	**13,89**	**10,56**	**10,56**
7	**.1**	**.5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**		**100**	**13,89**	**13,89**	**10,56**	**10,56**
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen		12	5	13,89	10,56	10,56
7	**.1**	**. 3**	**0**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**100**	**100**	**20,83**	**20,83**	**19,23**	**19,23**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	**.1**	**. 3**	**201**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**0**	**100**			**-**	**-**
7	.1	. 3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	Laporan		2	-	-	**-**	**-**
7	**.1**	**.3**	**.202**	**0**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**100**	**100**	**20,83**	**20,83**	**19,23**	**19,23**
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	100	Lembaga Kemasyarakatan		100	100	33,33	22,64	22,64
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4	Unit		4	2	33,33	25,27	25,27
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	250	Pokmas/Ormas		250	125	16,67	14,21	14,21

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2	Laporan		2	-	-	-	-
7	**.1**	**.6**	**0**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**	**100**				**-**
7	**.1**	**.6**	**.201**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**	**100**				**-**
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	10	Dokumen		10		-	-	-
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	10	Dokumen		10		-	-	-
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	10	Dokumen		10		-	-	-

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pitu Riawa

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pitu Riawa merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Pitu Riawa maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Pitu Riawa sebagai salah satu Kecamatan Pitu Riawa di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PITU RIAWA

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa dimana pada tahun 2024 menargetkan Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 63,30 (B) peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik yang dibina dengan nilai 100% .

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
X	**XX**	**.1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**2.711.178.208**	**Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**2.943.219.000**	**Kec. Pitu Riawa**
X	**XX**	**.1**	**.202**		**Administrasi Keuangan Kecamatan Pitu Riawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Kecamatan Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**1.783.755.241**	**ASN Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**2.089.070.200**	**ASN Kec. Pitu Riawa**
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec.Pitu Riawa	14 Bln	1.765.755.241	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	406 Org/Bln	2.077.070.200	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.202	. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Pitu Riawa	12 Dokumen	12.000.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	12 Dokumen	12.000.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	**XX**	**.1**	**.206**		**Administrasi Umum Kecamatan Pitu Riawa**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Kecamatan Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**301.393.467**	**ASN Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**196.588.800**	**ASN Kec. Pitu Riawa**
X	XX	.1	.206	.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec.Pitu Riawa	4 Unit	2.448.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	7 Paket	5.132.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec.Pitu Riawa	9 Paket	158.051.367	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	2 Paket	27.000.000	ASN Kec. Pitu Riawa

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec.Pitu Riawa	1.800 Paket	42.262.100	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	3.500 Paket	58.007.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec.Pitu Riawa	2.000 Paket	9.876.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	36 Paket	9.054.800	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasiltas kunjungan tamu	Kec.Pitu Riawa	12 Laporan	12.766.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	36 Laporan	5.730.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Pitu Riawa	120 Laporan	75.980.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	180 Laporan	91.665.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	**XX**	**.1**	**.208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**157.480.000**	**ASN Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**143.230.000**	**ASN Kec. Pitu Riawa**
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kec.Pitu Riawa	12 Laporan	3.000.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	343 Laporan	4.410.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kec.Pitu Riawa	12 Laporan	34.480.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	36 Laporan	18.820.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec.Pitu Riawa	12 Laporan	120.000.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	36 Laporan	120.000.000	ASN Kec. Pitu Riawa

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
X	**XX**	**.1**	**.209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**45.073.500**	**ASN Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**38.778.000**	**ASN Kec. Pitu Riawa**
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	Kec.Pitu Riawa	10 Unit	32.506.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	10 Unit	28.210.000	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec.Pitu Riawa	3 Unit	1.700.000	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	- Unit	-	ASN Kec. Pitu Riawa
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec.Pitu Riawa	4 Unit	10.867.500	ASN Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	4 Unit	10.568.000	ASN Kec. Pitu Riawa
7	**.1**	**.2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**2.056.000**	**Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**300.000**	**Kec. Pitu Riawa**
7	**.1**	**.2**	**204**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**2.056.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**300.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Pitu Riawa	10 Laporan	1.028.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	2 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Pitu Riawa	1 Laporan	1.028.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	2 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	**.1**	**.5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**50.000.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**80.000.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**
7	**.1**	**.5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**50.000.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**80.000.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Pitu Riawa	12 Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	12 Dokumen	80.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	**.1**	**.3**	**0**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**1.092.302.000**	**Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**388.784.000**	**Kec. Pitu Riawa**
7	**.1**	**.3**	**201**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**1.028.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**150.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**
7	.1	.3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Pitu Riawa	2 Laporan	1.028.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	2 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	**.1**	**.3**	**.202**	**0**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**367.308.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**388.634.000**	**Masyarakat Kec. Pitu Riawa**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Pitu Riawa	100 Laporan	4.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	100 Laporan	2.980.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec.Pitu Riawa	1.495 Pokmas/Ormas	165.000.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	4 Unit	188.224.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Pitu Riawa	250 Pokmas/Ormas	197.280.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	250 Pokmas/Ormas	197.280.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec.Pitu Riawa	2 Laporan	1.028.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	2 Laporan	150.000	Masyarakat Kec. Pitu Riawa
7	**.1**	**.6**	**0**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**3.084.000**	**Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**450.000**	**Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa**
7	**.1**	**.6**	**.201**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**3.084.000**	**Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa**	**Kec.Pitu Riawa**	**100 %**	**450.000**	**Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa**
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan	Kec.Pitu Riawa	10 Dokumen	1.028.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	10 Dokumen	150.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
						Aset Desa								
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Pitu Riawa	10 Dokumen	1.028.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	10 Dokumen	150.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Pitu Riawa	10 Dokumen	1.028.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa	Kec.Pitu Riawa	10 Dokumen	150.000	Aparatur Desa Kec. Pitu Riawa
J U M L A H									**2.711.178.208**				**2.943.219.000**	

a.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan Renstra RPD Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Pitu Riawa dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Pitu Riawa sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riawa merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Pitu Riawa;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riawa merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Pitu Riawa;
4. Kantor Kecamatan Pitu Riawa berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Pitu Riawa Tahun 2018-2023, Renstra RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Pitu Riawa ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Amparita, 5 Juli 2024

CAMAT TELLU LIMPOE

ASBUDI, S.IP

NIP: 19760411 200212 1 005

DAFTAR ISI

		Halaman
KATA PENGANTAR ……		i
DAFTAR ISI …….		ii
DAFTAR TABEL ……..		iii
BAB I.	PENDAHULUAN ……...	
I.1.	Latar Belakang ……..	1
I.2.	Landasan Hukum …….	3
I.3.	Maksud dan Tujuan ……	6
I.4.	Sistematika Penulisan	7
BAB II.	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN ……	
II.1.	Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan	8

II Tahun 2024……
II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah …… 24
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH …… 26
BAB IV. PENUTUP …….. 35
LAMPIRAN ……. 37

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1.a. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2024..... …. 11

Tabel II.1.b. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2024..... …. 16

Tabel III.1. Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2024 ..... …. 28

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, Rencana Kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Tellu Limpoe mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan

kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe. Sejajar dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di

lingkup Pemerintah Kecamatan Tellu Limpoe dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6757)
3. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, serta Tata Cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemeritahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1312);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
8. Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
13. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2024 – 2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menjabarkan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
- Menjabarkan Renstra Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2024 - 2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

- Menyiapkan acuan untuk penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe;
- Penuntun dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil pelaksanaan Rencana Kerja pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2024, meliputi pagu

indikatif dan realisasi anggaran, capaian program, kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan kondisi perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan rencana Kerja triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan mencapai tingkat realisasi 25%.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 13,64%.
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan Perencanaan,penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel,kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target Renja 25,83% dari target sebesar 100%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel II.a dan Tabel II.b.

Tabel II.1.a. (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat daerah s/d Triwulan II tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**100**				**100**	**100**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**100**				**100**	**100**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	6	Urusan	6				6	100
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	2	Urusan	2				2	100
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**74**	**%**	**100**				**100**	**100**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**74**	**%**	**100**				**100**	**100**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan	2				2	100
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**74 %**	**100**				**100**	**100**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	41 Lembaga kemasy.	41				41	100
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	24 Unit	24				24	100
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54 Pokmas/Ormas	54				54	100
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 Laporan	12				12	100
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100**				**100**	**100**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**	**100**				**100**	**100**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	6	Dokumen	6				6	100
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	6	Dokumen	6				6	100
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	Dokumen	6				6	100
X					**X**									
X	**XX**				**XX**									
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**	**99**				**60**	**60**
X	**XX**	**01**	**2.02**		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**				**60**	**60**
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1526	Orang/Bln	1.526				1.526	100
X	XX	01	2.02	03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	24	Dokumen	24				24	100
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**				**60**	**60**

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	195 Unit	195				195	100
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	94.410 Unit	94.410				94.410	100
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	149.770 Lembar	149.770				149.770	100
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	266 Kali	266				266	100
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.286 Kali	1.286				1.286	100
X	**XX**	**01**	**2.07**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 %**	**100**				**100**	**100**
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	318 Unit	318				318	100
X	**XX**	**01**	**2.08**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**99,82**				**99,82**	**99,82**
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.066 Lembar	1.066				1.066	100

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2021+2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36				36	100
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	34				34	94
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**	**96,26**				**96**	**96,26**
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	64 Unit	64				64	100
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	26 Unit	22				22	85
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 Unit	17				17	100

Tabel II.1.b. (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Kantor Camat Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
X	**XX**	**.1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**100**	**25,83**	**25,83**	**25,83**	**25,83**
X	**XX**	**.1**	**201.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**			**-**	**-**
X	.XX	.1	.201	.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	495	Dokumen		106			**-**	**-**
X	.XX	.1	.201	.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	16	Dokumen		3			**-**	**-**
X	.XX	.1	.201	.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAA-SKPD dan laporan hasil koordinasi pemyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	11	Dokumen	**-**	3	**-**	**-**	**-**	**-**
X	.XX	.1	.201	.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	13	Dokumen	**-**	4	**-**	**-**	**-**	**-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	.XX	.1	.201	.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	20	Dokumen	-	6	-	-	-	-
X	.XX	.1	.201	.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	32	Laporan	-	10	-	-	-	-
X	**XX**	**.1**	**.202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**	**54,98**	**54,98**	**54,98**	**54,98**
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1485	Org/Bln		490	270	55,10	**270,00**	**18,18**
X	XX	.1	.202	. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Dokumen		12	6	50,00	**6,00**	**50,00**
X	**XX**	**.1**	**.206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**	**6,88**	**6,88**	**6,88**	**6,88**
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	136	Paket		47	15	31,91	**15,00**	**11,03**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	51	Paket		51		-	-	-
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4.459	Paket		4.459	1.006	22,56	**1.006,00**	**22,56**
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	267.407	Paket		91.092	5.565	6,11	**5.565,00**	**2,08**
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasiltas kunjungan tamu	100	Laporan		32		-	-	-
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	557	Laporan		172	8	4,65	**8,00**	**1,44**
X	**XX**	**1**	**.207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**		**100**	**1,96**	**1,96**	**1,96**	**1,96**
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	326	Paket		89		-	-	-
X	XX	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	48	Unit		12	2	16,67	**2,00**	**4,17**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	1	.207	.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainny yang disediakan	3	Unit		1		-	-	-
X	**XX**	**.1**	**.208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**100**	**67,01**	**67,01**	**67,01**	**67,01**
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	543	Laporan		170	120	70,59	**120,00**	**22,10**
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	36	Laporan		12	5	41,67	**5,00**	**13,89**
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan		12	5	41,67	**5,00**	**13,89**
X	**XX**	**.1**	**.209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan**	**100**	**%**		**100**	**24,14**	**24,14**	**24,14**	**24,14**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	63	Unit		21	7	33,33	**7,00**	**11,11**
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	Unit		4		-	**-**	**-**
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	13	Unit		4		-	**-**	**-**
7	**.1**	**.2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**		**100**			**-**	**-**
7	**.1**	**.2**	**204**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**		**100**			**-**	**-**
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	26	Laporan		8		-	**-**	**-**
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	26	Laporan		8		-	**-**	**-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	**.1**	**.5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**		**100**	**25**	**25**	**25,00**	**25,00**
7	**.1**	**.5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**		**100**	**25,00**	**25,00**	**25,00**	**25,00**
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen		4	1	25,00	**1,00**	**8,33**
7	**.1**	**. 3**	**0**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**100**	**13,64**	**13,64**	**13,64**	**13,64**
7	**.1**	**. 3**	**201**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**100**			**-**	**-**
7	.1	. 3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26	Laporan		8		-	**-**	**-**
7	**.1**	**.3**	**.202**	**0**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**100**	**27,27**	**27,27**	**27,27**	**27,27**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21	Lembaga Kemasyarakatan		7	6	85,71	**6,00**	**28,57**
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yangTerbangun	33	Unit		11	2	18,18	**2,00**	**6,06**
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	54	Pokmas/Ormas		18	4	22,22	**4,00**	**7,41**
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	26	Laporan		8		-	**-**	**-**
7	**.1**	**.6**	**0**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**		**100**				**-**
7	**.1**	**.6**	**.201**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**		**100**				**-**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PD) s.d TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2024	
									TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA 0PD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	26 Dokumen		8		-	-	-
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	26 Dokumen		8		-	-	-
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	26 Dokumen		8		-	-	-

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Tellu Limpoe maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan

pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;

BAB III.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dimana pada tahun 2024 menargetkan Peningkatan Tata Kelola Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Kecamatan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 63,30 (B) peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik yang dibina dengan nilai 100% .

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan langsung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    2. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Kantor Camat Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**									
X	**XX**	**.1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**3.818.686.615**	**Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**3.717.101.300**	**Kec. Tellu Limpoe**
X	**XX**	**.1**	**201.**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**6.160.000**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**5.225.000**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**
X	.XX	.1	.201	.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	Kec.Tellu Limpoe	106 Dokumen	2.780.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	106 Dokumen	2.625.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	390.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	300.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKAA-SKPD dan laporan hasil koordinasi pemyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	390.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	3 Dokumen	300.000	ASN Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	.XX	.1	.201	.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	520.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	400.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	Kec.Tellu Limpoe	6 Dokumen	780.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	6 Dokumen	600.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	.XX	.1	.201	.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec.Tellu Limpoe	10 Laporan	1.300.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	10 Laporan	1.000.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	**XX**	**.1**	**.202**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**2.997.388.790**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**2.986.061.000**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**
X	XX	.1	.202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec.Tellu Limpoe	490 Org/Bln	2.985.388.790	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	490 Org/Bln	2.974.061.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.202	. 3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec.Tellu Limpoe	12 Dokumen	12.000.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	12 Dokumen	12.000.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	**XX**	**.1**	**.206**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**244.766.400**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**190.885.200**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	.1	.206	.2	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	47 Paket	3.415.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	30 Paket	3.609.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	51 Paket	11.027.200	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	10 Paket	3.406.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	3.894 Paket	118.179.400	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	1784 Paket	54.265.600	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	91.092 Paket	50.746.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	69400 Paket	46.368.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasiltas kunjungan tamu	Kec.Tellu Limpoe	32 Laporan	12.938.800	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	32 Laporan	18.384.600	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.206	.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec.Tellu Limpoe	172 Laporan	48.460.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	208 Laporan	64.852.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	**XX**	**1**	**.207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**199.261.825**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**106.578.000**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**
X	XX	1	.207	.5	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang diadakan	Kec.Tellu Limpoe	89 Paket	78.246.700	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	59 Paket	38.381.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	1	.207	.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kec.Tellu Limpoe	12 Unit	91.242.450	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Unit	68.197.000	ASN Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
X	XX	1	.207	.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainny yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	1 Unit	29.772.675	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe			ASN Kec. Tellu Limpoe
X	**XX**	**.1**	**.208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**297.065.000**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**351.176.100**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**
X	XX	.1	.208	.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	Kec.Tellu Limpoe	170 Laporan	1.700.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	170 Laporan	1.820.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.208	.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan	Kec.Tellu Limpoe	12 Laporan	48.165.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	12 Laporan	52.254.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.208	.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	12 Laporan	247.200.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	12 Laporan	297.102.100	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	**XX**	**.1**	**.209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Mendapat Pemeliharaan**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**74.044.600**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**77.176.000**	**ASN Kec. Tellu Limpoe**
X	XX	.1	.209	.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya	Kec.Tellu Limpoe	10 Unit	53.446.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	21 Unit	58.442.000	ASN Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X	XX	.1	.209	.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Kec.Tellu Limpoe	4 Unit	2.000.000	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	2 Unit	1.000.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
X	XX	.1	.209	.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	Kec.Tellu Limpoe	4 Unit	18.598.600	ASN Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	4 Unit	17.734.000	ASN Kec. Tellu Limpoe
7	**.1**	**.2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**2.080.000**	**Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.600.000**	**Kec. Tellu Limpoe**
7	**.1**	**.2**	**204**	**0**	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**2.080.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.600.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**
7	.1	.2	204	.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	1.040.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.2	204	.3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	1.040.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	**.1**	**.5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**50.000.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**80.000.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**
7	**.1**	**.5**	**201**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**50.000.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**80.000.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	4 Dokumen	80.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	**.1**	**. 3**	**0**		**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.092.302.000**	**Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.061.680.700**	**Kec. Tellu Limpoe**
7	**.1**	**. 3**	**201**	**0**	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.040.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**800.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**
7	.1	. 3	201	.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	1.040.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	**.1**	**.3**	**.202**	**0**	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.091.262.000**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**1.060.880.700**	**Masyarakat Kec. Tellu Limpoe**
7	.1	.3	.202	.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec.Tellu Limpoe	7 Laporan	16.000.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	7 Laporan	16.200.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	.202	.2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kec.Tellu Limpoe	11 Unit	574.062.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	11 Unit	554.885.700	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	.1	.3	.202	.3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang MelaksanakanPemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kec.Tellu Limpoe	18 Pokmas/Ormas	500.160.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	18 Pokmas/Ormas	488.995.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.3	.202	.4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	1.040.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Laporan	800.000	Masyarakat Kec. Tellu Limpoe
7	**.1**	**.6**	**0**		**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**3.120.000**	**Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**2.400.000**	**Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe**
7	**.1**	**.6**	**.201**	**0**	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**3.120.000**	**Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe**	**Kec.Tellu Limpoe**	**100 %**	**2.400.000**	**Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe**
7	.1	.6	.201	.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	1.040.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	800.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.6	.201	.7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	1.040.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	800.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe
7	.1	.6	.201	.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	1.040.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe	Kec.Tellu Limpoe	8 Dokumen	800.000	Aparatur Desa Kec. Tellu Limpoe

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1	2	3	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
J U M L A H					**4.966.188.615**				**4.862.782.000**	

a.

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan Renstra RPD Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Tellu Limpoe dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik-baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Tellu Limpoe;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Tellu Limpoe;
4. Kantor Kecamatan Tellu Limpoe berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Tellu Limpoe Tahun 2018-2023, Renstra RPD Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Tellu Limpoe ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang.

PERUBAHAN RENCANA KERJA
TAHUN 2024

DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

HALAMAN VERIFIKASI

Perubahan Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang
Tahun 2024

Catatan :

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rakhmat dan hidayah-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan RenjaDinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Renjatahun lalu, tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, dan rencana kerja dan pendanaan serta penutup. Penyusunan Perubahan Renjatersebut berpedoman pada RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014-2026, dan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Kami menyadari dalam penyusunan Perubahan Renjaini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rancangan rencana kerja dimaksud.

Sidenreng Rappang, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang,

[illegible]UDDIN, S.Si, M. Si., A.Pt
Pangkat : Pembina TK.1
NIP: 19760824 200901 1 002

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS KESEHATAN,

Jl. Harapan Baru Kompleks SKPD Blok A. No. 2 Kabupaten Sidenreng Rappang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN,
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR : 80/ /DINKES/2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa dengan maksud dan tujuan menjabarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terutama yang terkait dengan urusan pembangunan bidang kesehatan ke dalam Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2024;

b. bahwa Perubahan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024 disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Renja RKA/DPA dan sebagai penuntun pencapaian kinerja program dan kegiatan pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang setiap tahunnya selama tahun lima tahun ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, tentang Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
17. Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten

Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2023.

KESATU : Rencana Kerja Dinas Kesehatan tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini diterbitkan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

KETIGA : Hal-hal yang belum ditetapkan dalam keputusan ini, akan ditetapkan kemudian.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidenreng Rappang
Pada Tanggal, 6 Agustus 2024
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Sidenreng Rappang,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KESEHATAN SIDENRENG RAPPANG

[illegible]IMUDDIN, S.Si, M. Si., A.Pt
Pangkat : Pembina TK.1
NIP: 19760824 200901 1 002

DAFTAR ISI

Hal

Judul I
Halaman Verifikasi..... II
Kata Pengantar..... III
Keputauas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor / /V/2023/DINKES Tentang Rencana kerja Dinas Kesehatan, PP dan KB Kabupaten Sidenreng rappang tahun 2024..... IV
Daftar Isi VIII

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang, ... 1
1.2. Landasan Hukum, ... 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II. HASIL EVALUASI PERUBAHAN RENJAPERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan RenjaPD Tahun lalu..... 10
2.2. Analisa kinerja pelayanan PD..... 32
2.3. Isi-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi..... 38
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD..... 40
2.5. Penelahaaan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat..... 51

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional 52
3.2. Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja PD..... 59
3.3. Program dan Kegiatan..... 63

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN...... 77

BAB V. PENUTUP. 146

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Perubahan Renja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kewajiban menyusun dokumen Perubahan Renja. Dokumen Perubahan Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah, Perubahan Renja akan diverifikasi kesesuainnya terhadap RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Sidenreng Rappang dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
17. Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314); 17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

19. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renja Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1) Sebagai bahan perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Kesehatan sebagai penjabaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026

Sedangkan tujuan penyusunan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah:

1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2023

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

1. 1 Latar Belakang

   Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, proses penyusunan Renja, keterkaitan antara Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan dokumen RPD, Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan Renja K/L dan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1. 2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, kewenangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

1. 3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

1. 4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

2. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 – 2026.

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2024 – 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang SPM.

2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Kesehatan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kesehatan , permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan , dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kesehatan , dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2. 4. Review Terhadap Perubahan RKPD.

Berisikan telaah RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Kesehatan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Kesehatan dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaah terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. 2 Tujuan dan sasaran renja PD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang yang

dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kesehatan

3. 3 Program dan kegiatan

Berisikan dengan nama Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perubahan Renja Dinas Kesehatan tahun 2024.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Perubahan RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 – 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan–kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel T-C.2.9 berikut ini.

Table T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**		**100**	**92,59**	**100**	**93.00**	**100**	**100**	**93.00**	**93.00**
1.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**87.06**	**100**	**95.60**	**100**	**100**	**95.60**	**95.60**
1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**96.77**	**100**	**49.90**	**100**	**100**	**49.90**	**49.90**
1.02.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	3	99.94	1	14.26	100	100	14.26	14.26
1.02.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	3	99.55	1	53.46	100	100	53.46	53.46
1.02.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	3	94.38	1	80.92	100	100	80.92	80.92
1.02.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	3	100.00	1	83.44	100	100	83.44	83.44
1.02.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	3	88.72	1	83.47	100	100	83.47	83.47
1.02.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	3	100	1	77.05	100	100	77.05	77.05

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
.02.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	3	100	1	49,38	100	100	49,38	49,38
1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**97,34**	**100**	**94,12**	**100**	**100**	**94,12**	**94,12**
1.02.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	653	97,46	648	99,09	100	100	99,61	99,61
1.02.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	3	0	1	0	100	100	37,43	37,43
1.02.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang tersedia	3	97,21	1	95,71	100	100	99,99	99,99
1.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100**	**100**	**100**	**80,44**	**100**	**100**	**80,44**	**80,44**
1.02.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3	100	1	98,33	100	100	98,33	98,33
1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	**90,36**	**100**	**77,68**	**100**	**100**	**77,68**	**77,68**
1.02.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dok/Tim penilaian Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai yang dilaksanakan	3	0	1	100	100	100	100	100
1.02.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	1	90,36	1	70,28	100	100	70,28	70,28

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor**	**100**	**92,71**	**100**	**67,40**	**100**	**100**	**89,53**	**89,53**
1.02.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	12	100	100	100	100	100	79,86	79,86
1.02.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	3	88,27	100	31,24	100	100	83,20	83,20
1.02.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	3	0	100	100	100	100	100	100
1.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	3	100	100	98,57	100	100	92,20	92,20
1.02.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	12	99,23	100	57,51	100	100	57,51	57,51
1.02.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	12	99,77	100	91,41	100	100	91,41	91,41
1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**81,55**	**100**	**70,77**	**100**	**100**	**70,77**	**70,77**
1.02.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	12	99,92	100	86,20	100	100	86,20	86,20
1.02.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	3	79,20	100	69,55	100	100	69,55	69,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.01.2.09	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah**	**100**	**50,82**	**100**	**74,54**	**100**	**100**	**74,54**	**74,54**
1.02.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	257	48,90	100	66,07	100	100	66,07	66,07
1.02.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	257	93,49	100	98,17	100	100	98,17	98,17
1.02.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	5	91,90	100	99,23	100	100	99,23	99,23
1.02.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	3	15,85	100	45,01	100	100	45,01	45,01
1.02.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	3	82,47	100	3,61	100	100	3,61	3,61

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk**	**100**	**88,68**	**100**	**89,53**	**100**	**100**	**89,53**	**89,53**
1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia**	**100**	**94,38**	**100**	**91,36**	**100**	**100**	**91,36**	**91,36**
1.02.02.2.01.01	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	1	97,43	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.01.02	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	1	99,49	1	0	100	1	0	0
1.02.02.2.01.03	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	1	62,15	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.01.04	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	1	0	1	0	0	0	0	0
1.02.02.2.01.13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	1	98,83	1	1	100	1	1	100
1.02.02.2.01.14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	17	81,46	17	17	100	17	17	100
1.02.02.2.01.16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	55	83,31	55	55	100	55	55	100
1.02.02.2.01.17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	23	98,39	23	23	100	100	69,55	69,55

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.02.2.01.20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	5	0	100	67,45	100	100	67,45	67,45
1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**75,10**	**100**	**70,79**	**70,79**	**100**	**70,79**	**70,79**
1.02.02.2.02.01	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar		99,96	100	98,51	98,51	100	98,51	98,51
1.02.02.2.02.02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	87,13	100	14,98	14,98	100	14,98	14,98
1.02.02.2.02.03	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	100	100	41,89	41,89	100	41,89	41,89
1.02.02.2.02.04	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	67,00	100	96,25	96,25	100	96,25	96,25
1.02.02.2.02.05	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	80,50	100	55,71	55,71	100	55,71	55,71
1.02.02.2.02.06	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	24,82	100	97,10	97,10	100	97,10	97,10
1.02.02.2.02.07	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	99,29	100	98,68	98,68	100	98,68	98,68

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.02.2.02.08	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.09	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	98,19	100	99,04	99,04	100	99,04	99,04
1.02.02.2.02.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	66,49	100	17,32	17,32	100	17,32	17,32
1.02.02.2.02.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	98,98	100	6,04	6,04	100	6,04	6,04
1.02.02.2.02.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	100	86,07	100	2,26	2,26	100	2,26	2,26
1.02.02.2.02.13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	100	88,47	100	92,52	92,52	100	92,52	92,52
1.02.02.2.02.16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaks. kesehatan olah raga	100	99,56	100	59,01	59,01	100	59,01	59,01

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.02.2.02.17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakanpengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	100	82,92	100	93,27	93,27	100	93,27	93,27
1.02.02.2.02.18	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berprilaku Hidup bersih dan sehat	100	99,93	100	86,85	86,85	100	86,85	86,85
1.02.02.2.02.19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	100	98,98	100	98,61	98,61	100	98,61	98,61
1.02.02.2.02.20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	100	99,43	100	69,01	69,01	100	69,01	69,01
1.02.02.2.02.22	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	100	0	100	94,80	94,80	100	94,80	94,80
1.02.02.2.02.23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	100	97,59	100	93,52	93,52	100	93,52	93,52
1.02.02.2.02.25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	100	88,26	100	78,42	78,42	100	78,42	78,42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.02.2.02.26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	68,08	100	93,78	93,78	100	93,78	93,78
1.02.02.2.02.27	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	100	0	100	100	100	100	100	100
1.02.02.2.02.28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	100	74,50	100	98,76	98,76	100	98,76	98,76
1.02.02.2.02.34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang mendapat biaya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	100	0	100	0	0	100	0	0
1.02.02.2.02.36	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	100	14,69	100	35,42	35,42	100	35,42	35,42

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.02.2.02.37	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	100	0	100	59,69	59,69	100	59,69	59,69
1.02.02.2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**	**100**	**96,58**	**100**	**91**	**91**	**100**	**91**	**91**
1.02.02.2.03.02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	100	96,58	100	91	91	100	91	91
1.02.03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan**	**100**	**0**	**100**	**80.59**	**80.59**	**100**	**80.59**	**80.59**
1.02.03.2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitasi mendapatkan SIP**	**100**	**0**	**100**	**97.71**	**97.71**	**100**	**97.71**	**97.71**
1.02.03.2.01.02	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100	0	100	97,71	97,71	100	97,71	97,71
1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**100**	**0**	**100**	**83.52**	**83.52**	**100**	**83.52**	**83.52**
1.02.03.2.02.01	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	100	0	100	83,52	83,52	100	83,52	83,52

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**0**	**100**	**78.78**	**78.78**	**100**	**78.78**	**78.78**
1.02.03.2.03.01	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	0	100	78,78	78,78	100	78,78	78,78
1.02.04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yamg memiliki izin**	**100**	**44,03**	**100**	**36.05**	**36.05**	**100**	**36.05**	**36.05**
1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yamg memiliki izin**	**100**	**44,03**	**100**	**91.97**	**91.97**	**100**	**91.97**	**91.97**
1.02.04.2.01.01	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Sarana Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang mendapatakan Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan	100	44,03	100	91,97	91,97	100	91,97	91,97

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.04.2.02	**Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga**	**Cakupan Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapat sertifikat**	**100**	**0**	**100**	**5.51**	**5.51**	**100**	**5.51**	**5.51**
1.02.04.2.02.01	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang mendapatkan Pengendalian serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat	100	0	100	5,51	5,51	100	5,51	5,51
1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Cakupan Industri Rumah Tangga yang mendapat tindak lanjut pengawasan perizinan**	**100**	**0**	**100**	**42.55**	**42.55**	**100**	**42.55**	**42.55**
1.02.04.2.06.01	Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar yang mendapat pemeriksaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	100	0	100	42.55	42.55	100	42.55	42.55
1.02.05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	**100**	**100**	**100**	**41.02**	**41.02**	**100**	**41.02**	**41.02**
1.02.05.2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat**	**100**	**0**	**100**	**98.25**	**98.25**	**100**	**98.25**	**98.25**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
1.02.05.2.01.01	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Puskesmas yang melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	100	0	100	98.25	98.25	100	98.25	98.25
1.02.05.2.02	**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat**	**100**	**100**	**100**	**96.06**	**96.06**	**100**	**96.06**	**96.06**
1.02.05.2.02.01	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Rumah tangga yang menyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat di masyarakat	100	100	100	96.06	83,20	100	83,20	83,20
1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**100**	**100**	**100**	**0.73**	**100**	**100**	**100**	**100**
1.02.05.2.03.01	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	100	100	100	0.73	92,20	100	92,20	92,20

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**100**	**91,73**	**100**	**69,17**	**69,17**	**100**	**69,17**	**69,17**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**100**	**89,77**	**100**	**79,86**	**79,86**	**100**	**79,86**	**79,86**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)**	**100**	**80,94**	**100**	**83,20**	**83,20**	**100**	**83,20**	**83,20**
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	100	80,94	100	100	100	100	100	100
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100	0	100	92,20	92,20	100	92,20	92,20
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten**	**100**	**98,60**	**100**	**57,51**	**57,51**	**100**	**57,51**	**57,51**
2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Perumusan Parameter Kependudukan	100	0	100	91,41	91,41	100	91,41	91,41

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Penyediaan dokumen Data Kependudukan yang tersedia	100	0	100	89,53	89,53	100	89,53	89,53
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersedia	100	0	100	79,86	79,86	100	79,86	79,86
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan yang tersedia	100	0	100	83,20	83,20	100	83,20	83,20
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Ratio Akseptor KB**	**100**	**98,16**	**100**	**85.81**	**85.81**	**100**	**85.81**	**85.81**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**98,63**	**100**	**82.29**	**82.29**	**100**	**82.29**	**82.29**
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	98,92	100	71,94	71,94	100	71,94	71,94
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	100	100	99,65	99,65	100	99,65	99,65
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang menerima KIE Program KKBPK	100	98,20	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK**	**100**	**100**	**100**	**98.62**	**98.62**	**100**	**98.62**	**98.62**
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	100	0	100	97,04	97,04	100	97,04	97,04
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100	0	100	99,88	99,88	100	99,88	99,88
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	100	100	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**100**	**94,02**	**100**	**78.28**	**78.28**	**100**	**78.28**	**78.28**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	98,67	100	38,97	38,97	100	38,97	38,97
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	92,97	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	94,14	100	100	100	100	100	100
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	100	100	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompotensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi & SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100	0	100	73,72	73,72	100	73,72	73,72
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	100	97,17	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**100**	**100**	**100**	**80.58**	**80.58**	**100**	**80.58**	**80.58**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	100	100	100	80,58	80,58	100	80,58	80,58
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**100**	**87,25**	**100**	**86.72**	**86.72**	**100**	**86.72**	**86.72**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**93,54**	**100**	**86.72**	**86.72**	**100**	**86.72**	**86.72**
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	100	93,51	100	0	0	100	0	0
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan	100	0	100	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Renstra Tahun 2026 (Akhir priode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022 (Tahun 2021+2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target Program/ Kegiatan Renja SKPD Tahun Berjalan (2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian	Tingkat Capaian (%)
	2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
	Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Klg)								
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	100	97,02	100	55	55	100	55	55
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi kemasyarakatan Tk. Daerah Kab/Kota dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargaahteraan Keluarga**	**Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ASFR)**	**100**	**80,97**	**100**	**86.72**	**86.72**	**100**	**86.72**	**86.72**
2.14.04.2.02.04	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	100	80,97	100	86.72	86.72	100	86.72	86.72

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2023 yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sampai akhir Desember 2023, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 61 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah tersebut meliputi:

1. Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan.
2. Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.
3. Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD.
4. Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/ Pelatihan
5. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun
6. Persentase Ketersediaan Obat essensial di puskesmas
7. Indeks Keluarga Sehat (RPJMD)
8. Persentase Sarana Prasarana, Distribusi, Sediaan Farmasi, Perbekalan kesehatan dan produksi pangan sesuai standar.
9. Persentase Posyandu Strata Purnama dan Mandiri

10. Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD)
11. Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna
12. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
13. Persentase Balita Gizi buruk tertangani (RPJMD)
14. Persentase Desa/Keluarahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM (RPJMD)
15. Persentase TPM yang memperoleh Sertifikat Laik Syarat Kesehatan
16. Persentase Tempat-tempat umum yang dibina
17. Jumlah puskesmas terakreditasi;
18. Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
19. Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP (RPJMD)
20. Persentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 43/2019
21. Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTR
22. Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
23. Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)
24. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar (SPM)
25. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
26. Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
27. Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS)
28. Proporsi Penderita DBD yang ditangani (RPJMD)
29. Persentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (RPJMD)
30. Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85% (RPJMD)
31. Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

32. Persentase angka kasus HIV yang diobati (RPJMD)
33. Persentase penderita HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
34. Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)
35. Proporsi penderita malaria yang diobati (RPJMD)
36. Persentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RPJMD, SPM)
37. Persentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(RPJMD,SPM)
38. Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
39. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sehingga pencapaian kinerjanya diukur melalui pencapaian SPM. Tabel 2.2 menggambarkan secara rinci mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel T-C.30

Pencapaiana Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Penegendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

NO	INDIKATOR	SPM /STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
	SPM BIDANG KESEHATAN											
1	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%		100%	100%	100%	100%	77,25	-	100%	100%	
2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%		100%	100%	100%	100%	89,10	-	100%	100%	
3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%		100%	100%	100%	100%	92,51	-	100%	100%	
4	Cakupan pelayanan Kesehatan Balita	100%		100%	100%	100%	100%	81,03	-	100%	100%	
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	100%		100%	100%	100%	100%	100,00	-	100%	100%	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	100%		100%	100%	100%	100%	76,72	-	100%	100%	
7	CakupanPelayanan kesehatan pada usia lanjut	100%		100%	100%	100%	100%	82,16	-	100%	100%	
8	Cakupan Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100%		100%	100%	100%	100%	27,78	-	100%	100%	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	100%		100%	100%	100%	100%	100,00	-	100%	100%	
10	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%		100%	100%	100%	100%	100,00	-	100%	100%	
11	Cakupan Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis, dan	100%		100%	100%	100%	100%	100,00	-	100%	100%	
12	Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*) yang bersifat peningkatan/ promotif dan pencegahan/	100%		100%	100%	100%	100%	83,36	-	100%	100%	

Tabel T-C.30.a
ANALISIS CAPAIAN KINERJA TAHUN 2023

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat **(Urusan Bid. Kesehatan)**		1. Indeks Kesehatan	78,50	78,06	99.44
	1. Meningkatny apelayanan kesehatan masyarakat	2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	19	5	26.32
		3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	17,6	8	45.45
		4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	< 1	0,149	15.05
		5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	340	183	53.82
		6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	100	100	100.00
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera . **(Urusan Bid. Dalduk dan KB)**		7. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,05	2.12	103.41
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	8. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,05	2,41	117.56
	3. Meningkatny a Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	9. Ratio Akseptor KB	90	82,53	91.70

Tabel T-C.30. b
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi					Capaian (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1. Indeks Kesehatan	Indeks	75,62	76,29	76,66	76,94	78,06	98,01	98,33	98,81	99,96	99.44
2. Angka Kematian Ibu (per 100,000 kelahiran hidup)	Kasus	2	4	6	7	5	39,08	37,21	35,46	33,33	26.32
3. Angka Kematian Bayi (AKB) (per 1000 kelahiran hidup)	Per 1000 kelahiran	3,5	4	3,8	4,5	8	22,45	23,00	22,83	23,08	45.45
4. Insidensi HIV (per 1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	Per 1000 Penduduk	0,003	0,01	0,05	0,1	0,149	9,05	10,00	10,45	11,11	15.05
5. Insidensi tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 Penduduk	256	202	121	136	183	61,01	58,22	35,21	41,21	53.82
6. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100.00
7. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	%	2,14	2,28	2,16	2,14	2.12	97,27	97,02	97,46	100	103.41
8. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	Anak/ Keluarga	2,14	2,28	2,16	2,14	2,41	97,27	97,02	97,46	100	117.56
9. Ratio Akseptor KB	%	79,75	77,75	76,25	76,81	82,53	99,77	99,01	99,34	96,01	91.70

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor kesehatan, yang harus menjadi perhatian Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penentuan strategis dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan isu – isu di bidang kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, balita, remaja dan lansia
2. Peningkatan program pengendalian masalah kesehatan ibu, anak dan remaja
3. Upaya penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi
4. Peningkatan kemitraan swasta, peran lintas sektor dan pelayanan gizi masyarakat (posyandu, poskestren, poskesdes, dll)
5. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular
6. Peningkatan penanganan dan pengendalian bencana dan kejadian luar biasa (KLB)
7. Peningkatan akses air minum dan sanitasi berkualitas dan memenuhi syarat
8. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) melalui penerapan 5 pilar
9. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit bersumber binatang
10. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular langsung dan imunisasi
11. Peningkatan pengawasan dan pembinaan TTU/TPM
12. Peningkatan ketersediaan, pemerataan keterjangkauan obat dan alkes
13. Peningkatan pelayanan kefarmasian yang efektif dan efisien termasuk penggunaan obat yang rasional
14. eningkatan pengawasan obat, alkes, PKRT, oba tradisional, kosmetik dan makanan yang beredar termasuk pangan jajanan anak sekolah (PJAS)
15. Peningkatan pengawasan upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
16. Peningkatan Capaian PHBS , Sekolah, Tempat Kerja, Tempat Umum dan Sarana Kesehatan

17. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama upaya kesehatan berbasis masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor
18. Pengembangan JKN melalui :
    a. Peningkatan Fasyankes.
    b. Pemenuhan SDM kesehatan baik kualitas maupun kuantitas dan distribusinya.
19. Perbaikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan berkesinambungan
20. Peningkatan pembinaan dan pengawasan pelayanan kesehatan rujukan
21. Peningkatan sumber daya manusia kesehatan yang berkualitas dan merata
22. Peningkatan manajemen dan system informasi kesehatan
23. Peningkatan upaya pelaksanaan jaminan kesehatan nasional
24. Peningkatan pengawasan dan pengendalian kesehatan jiwa
25. Penurunan jumlah rata – rata anak perkeluarga menjadi 2 orang
26. Mengatur jarak kelahiran pada masyarakat
27. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur

Berdasarkan isu – isu tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat, kemitraan swasta dan peran lintas sektor dalam pelayanan gizi masyarakat, kesehatan ibu dan anak serta peningkatan capaian PHBS.
2. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta penanganan Bencana/KLB, Kesehatan Matra dan Survailas epidemiology dan Kualitas air minum.
3. Peningkatan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) dan pembinaan / pengawasan TTU/TPM
4. Peningkatan ketersediaan obat, alkes dan pengawasan sediaan farmasi, alkes, PKRT, dan makanan, serta upaya kesehatan tradisional dan pengembangan obat asli Indonesia
5. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur
6. Pengembangan JKN melalui :
    a. Peningkatan fasilitas yankes dan kualitas pelayanan yang menyeluruh
    b. Peningkatan SDM Kesehatan yang berkualitas dan merata
    c. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan secara menyeluruh
7. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**100**	**53,549,253,200**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		**89,21**	**51,044,154,767**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**52,421,800**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**96.77**	**50,728,000**	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	5,610,300	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	99.94	5,607,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	8,825,000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	99.55	8,785,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	14,682,500	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	94.38	13,857,500	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	6,120,000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100	6,120,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7,316,500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	88.72	6,491,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	4,900,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100	4,900,000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	4,967,500	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersedia	Sidenreng Rappang	100	4,967,500	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	46,423,225,700	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	**97,34**	45,246,156,326	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	46.373.833.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Dokumen laporan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang tersedia	Sidenreng Rappang	97,46	45,198,141,893	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	3.700.200	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	3.700.200	
	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	1.500.000	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	0	0	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	44.192.700	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	0	0	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**9.482.600**	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Daftar inventaris Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	**100%**	**3.057.000**	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	1.475.600	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	0	0	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersdia	Sidenreng Rappang	100%	4.950.000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang tersdia	Sidenreng Rappang	0	0	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	3.057.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	100%	3.057.000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**113,332,334**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan sarana dan Prasarana Kepegawaian Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	90,35	**113,332,334**	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Sidenreng Rappang	100%	125,420,000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peraturan Perundang-Undangan yang di sosialisasikan	Sidenreng Rappang	90,36	113,332,334	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor**	Sidenreng Rappang	100%	**857,567,200**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Peralatan dan Perlengkapan kantor untuk kepentingan administrasi Kantor**	Sidenreng Rappang	**92.71**	**795,049,900**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	894,400	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100.00	894,400	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	526,185,900	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	Sidenreng Rappang	88.27	464,447,900	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7,936,600	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang tersedia	Sidenreng Rappang	100.00	7,936,600	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	7,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jenis Fasilitasi Kunjungan Tamu yang tersedia	Sidenreng Rappang	99.23	6,946,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	100%	315,550,300	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah jenis Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang tersedia	Sidenreng Rappang	99.77	314,825,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**5.117.580.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**5.117.580.000**	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Sidenreng Rappang	100%	643.280.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik kantor	Sidenreng Rappang	100%	643.280.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidenreng Rappang	100%	4.474.300.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Sidenreng Rappang	100%	4.474.300.000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**484.220.500**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**484.220.500**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	Sidenreng Rappang	100%	172.500.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mendapatkan Anggaran Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Selama Satu tahun	Sidenreng Rappang	100%	172.500.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Sidenreng Rappang	100%	25.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan	Sidenreng Rappang	100%	25.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	Sidenreng Rappang	100%	88.876.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang mendapat Biaya Pemeliharaan	Sidenreng Rappang	100%	88.876.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	185.780.500	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang mendapat biaya pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	185.780.500	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	12.064.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang mendapat biaya Pemeliharaan/Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	12.064.000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	**Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk**		**100%**	**47.600.006.919**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk**		**100%**	**47.600.006.919**	
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia**		**100%**	**37.052.239.819**	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang tersedia**		**100%**	**37.052.239.819**	
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Kec. Dua Pitue	1 Unit	5.496.456.000	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya yang terbangun	Kec. Dua Pitue	1 Unit	15.496.456.000	
	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	3.408.851.800	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang terbangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	3.408.851.800	
	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Sidenreng Rappang	1 unit	460.243.850	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang di bangun	Sidenreng Rappang	1 unit	460.243.850	
	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	752.911.000	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang dibangun	Sidenreng Rappang	3 Unit	752.911.000	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Sidenreng Rappang	5 ipal	6.042.750.000	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tersedia	Sidenreng Rappang	5 ipal	6.042.750.000	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.798.271.234	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat tambahan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.798.271.234	
	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Sidenreng Rappang	130 Jenis Obat	.060.623.900	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Jenis Obat dan Vaksin yang tersedia	Sidenreng Rappang	130 Jenis Obat	3.060.623.900	
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Sidenreng Rappang	25 Jenis BHP	.995.862.035	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah jenis Bahan Habis Pakai yang tersedia	Sidenreng Rappang	25 Jenis BHP	1.995.862.035	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	5 PKM	19.100.000	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Kab. Sidenreng Rappang	5 PKM	19.100.000	
	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Sidenreng Rappang	14 PKM	17.170.000	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang mendapat Pemeliharaan Rutin dan Berkala alat kesehatan/Alat Penunjang Medik	Kab. Sidenreng Rappang	14 PKM	17.170.000	
	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**10.451.842.100**	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**10.451.842.100**	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.945 ibu hamil	55.803.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.945 ibu hamil	55.803.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	6.608 Ibu Bersalin	27.747.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	6.608 Ibu Bersalin	27.747.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.403 Bayi	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.403 Bayi	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	24.902 Balita	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	24.902 Balita	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	54.192 siswa	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	54.192 siswa	5.000.000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	193.400 orang	19.458.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	193.400 orang	19.458.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	20.808 Usia Lanjut	555.550.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk Usia Lanjut yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	20.808 Usia Lanjut	555.550.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	17.592 Orang	25.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	17.592 Orang	25.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	2.734 Orang	576.576.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	2.734 Orang	576.576.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	600 Orang	1.910.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa Berat yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	600 Orang	1.910.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.725 orang	1.380.326.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Tuberkulosis yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	5.725 orang	1.380.326.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	7.677 orang	117.069.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV yang mendapat Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Sidenreng Rappang	7.677 orang	117.069.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah Puskesmas pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) yang melakukan Pelayanan Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Sidenreng Rappang	40159 Orang	464.032.200	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Gizi masyarakat	Sidenreng Rappang	40159 Orang	464.032.200	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	Sidenreng Rappang	55 Pos UKK 14 Puskesmas	23.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah pos UKK yang terbentuk Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan kerja dasar Jumlah puskesmas yang melaksanakan kesehatan olah raga	Sidenreng Rappang	55 Pos UKK 14 Puskesmas	23.000.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	Sidenreng Rappang	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	313.100.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-Jumlah desa/kelurahan STBM - Jumlah fasyankes yang melaksanakan pengelolaan limbah medis -Jumlah penduduk yang menggunakan air minum sehat	Sidenreng Rappang	1 desa 17 fasyankes 270000 jiwa	313.100.000	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berprilaku Hidup bersih dan sehat	Sidenreng Rappang	41.483 rumah tangga	471.740.000	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Rumah tangga berprilaku Hidup bersih dan sehat	Sidenreng Rappang	41.483 rumah tangga	471.740.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Puskesmas yang menyelenggaran Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	58.165.000	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM	58.165.000	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	Sidenreng Rappang	200 Orang	113.527.500	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah orang dengan masalah jiwa dan NAPZA mendapat pelayanan kesehatan	Sidenreng Rappang	200 Orang	113.527.500	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah Puskesmas yang melakukan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Sidenreng Rappang	14 PKM	5.000.000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sidenreng Rappang	17.919 orang	35.138.000	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Orang yang mendapat Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Sidenreng Rappang	17.919 orang	35.138.000	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sidenreng Rappang	14.500 Orang	5.918.488.000	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah orang yang mendapat Jaminan Kesehatan Masyarakat	Sidenreng Rappang	14.500 Orang	5.918.488.000	
	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Sidenreng Rappang	1.400 orang	29.000.000	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Jumlah orang yang mendapatkan pemeriksaan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	Sidenreng Rappang	1.400 orang	29.000.000	
	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Puskesmas yang melakukan pengambilan dan pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Sidenreng Rappang	14 PKM	10.000.000	
	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sidenreng Rappang	11 Kec.	4.040.000	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan yang menyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Sidenreng Rappang	11 Kec.	4.040.000	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	Sidenreng Rappang	8 PKM	24.330.200	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitas Kesehatan/Puskesmas di Kabupaten yang sudah terakreditasi	Sidenreng Rappang	8 PKM	24.330.200	
	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sidenreng Rappang	14 PKM	122.842.200	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Puseksmas yang melakukan investigasi awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Sidenreng Rappang	14 PKM	122.842.200	
	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Sidenreng Rappang	14 PKM	50.000.000	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Jumlah Puskesmas yang melaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah	Sidenreng Rappang	14 PKM	50.000.000	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Sidenreng Rappang	17 Unit	10.000.000	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah perangkat Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang tersedia	Sidenreng Rappang	17 Unit	10.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	**Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**		**100%**	**75.925.000**	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Cakupan Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**		**100%**	**75.925.000**	
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	5.050.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan OP yang melakukan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	5.050.000	
	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	30.875.000	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang tersedia	Sidenreng Rappang	14 PKM 1 Dinkes	30.875.000	
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Memdapat Pembinaan dan Pengawasan**		**100%**	**20.000.000**	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah yang Memdapat Pembinaan dan Pengawasan**		**100%**	**20.000.000**	
	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sidenreng Rappang	14 Unit	20.000.000	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas yang melakukan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Sidenreng Rappang	14 Unit	20.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	**Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan**		**100%**	**249.567.900**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan**		**100%**	**249.567.900**	
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitasi mendapatkan SIP**		**85%**	**33.510.000**	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitasi mendapatkan SIP**		**85%**	**33.510.000**	

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehat	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sidenreng Rappang	400 Orang	33.510.000	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehat	Jumlah tenaga kesehatan mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Sidenreng Rappang	400 Orang	33.510.000	
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**100%**	129.778.200	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**		**100%**	**129.778.200**	
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	Sidenreng Rappang	50 orang	129.778.200	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah tenaga kesehatan yang di butuhkan dalam rangka distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan di fasilitas kesehatan	Sidenreng Rappang	50 orang	**129.778.200**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	86.279.700	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**		**100%**	**86.279.700**	
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang	2.225 orang	86.279.700	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang	2.225 orang	**86.279.700**	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel T-C .32
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

No	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran Volume	Catatan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	Dusun II amessangeng, Kab. Sidenreng Rappang	MESIN FOGGING (ALAT SEMPROT NYAMUK)	1 Unit	Pengadaan /Pengembangan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
		Dusun I Larumpu, Kab. Sidenreng Rappang	Pemeliharaan Saran dan Prasarana PUSTU	1 Unit	Rehabilitasi Puskesmas Pembantu (PUSTU)
		Panreng Rijang & Panreng Lautang, Kab. Sidenreng Rappang	Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terhadap kesehatan jiwa dan Bahaya NARKOBA	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
		Lingkungan Cilellang dan Orai Salo, Kab. Sidenreng Rappang	Penyuluhan dan Pencegahan Penyakit Menular Terhadap Masyarakat	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
		lingkungan 3 Wala & Lingkungan 7 botto libu, Kab. Sidenreng Rappang	Sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) terhadap resiko Terinfeksi HIV	1 Unit	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
		jl pendidikan lingkungan 2 salopalakka, Kab. Sidenreng Rappang	Pelayanan Kesehatan bergerak	1 Unit	Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
2.	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	Makkawarue, Kab. Sidenreng Rappang	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat (GERMAS) di Masyarakat	1 Unit	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
		Dusun Mario, Kab. Sidenreng Rappang	Pelatihan Kader Posyandu	1 Unit	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Dalam Program Pembangunan Kesehatan, Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional) maka seyogyanya semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ini, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi dan kemudian dijabrakan kembali menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten maupun kota, tentunya yang disesuaikan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempatnya.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong"*. Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara KesatuanTerwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. *Menurunkan angka kematian ibu dan bayi*

   Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan kesehatan, dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. *Menurunkan angka stunting pada balita*

   Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. *Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional*

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun dem ikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. *Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.*

   Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat kesehatan, pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk

mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

a. Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif

b. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut :

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	Meningkatnya pencegahan dan pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		Terjaminnya pembiayaan kesehatan

No	TUJUAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	Meningatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Tabel 3.3.
Permasalahan Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten berdasarkan Sasaran Renstra Kementrian Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong keberhasilan dan penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementrian	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	Menurunnya diparitas status kesehatan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial	Masih tingginya angka kematian ibu (MMR), prevalensi gizi kurang dan gizi buruk, cakupan pertolongan persalinan masih rendah	- Kurangnya ketrampilan bidan dalam penanganan bayi baru lahir yang bermasalah - Terlambat penemuan kasus - Penanganan kasus belum adekuat - Orang tua kuran kooperatif	- Digalakkannya kemitraan bidan dan dukun - Pemantauan ketat melalui call centre dinas kesehatan - Adanya jampersal - Adanya PMT bagi gizi buruk - Pelaksanaan posyandu yang maksimal - Adanya Program keluarga sadar gizi
2	Seluruh Kabupaten/Kota melaksanakan standar Pelayanan Minimal	Dari beberapa Indikator SPM, Masih ada beberapa indicator yang belum mencapai standart	- Masih rendahnya kualitas pendidikan nakes - Terbatasnya jumlah dan jenis nakes dan Penyebaran yang belum merata - Kurangnya pembiayaan di bidang kes. - Kurangnya pemenuhan alat dan perbekalan kesehatan	- Adanya dana BOK dan JKN

B. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 – 2026

Renstra Dinkes Provinsi Sulawesi Selatan satu misinya adalah akses pelayanan kesehatan. Dan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan kemudian menjabarkannya dalam VISI "***Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif Dan Berkarakter***"

Misinya :

1. Mewujudkan Pemerintahan yang Berorientasi Melayani dan Inovatif
2. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Aksesibel
3. Mewujudkan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru yang Produktif
4. Mewujudkan Kualitas Manusia yang Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter
5. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan

Adapun tujuan yang ingin di capai oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KBProvinsi Sulawesi Selatan berdasarkan perencanaan strategis dalam jangka waktu lima tahun adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang kompetitif, inklusif dan berkarakter, dengan berdasarkan dengan tujuan strategis yang di jabarkan dalam sasaran strategis perencanaan jangka menengah yakni "meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat"

Isu strategisnya Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan adalah:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
2. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pencegahan dan Pengendalian Pandemi Kesehatan
4. Pencapaian SPM dan Sustainable Development Goals (SDGs)
5. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan Prevalensi Balita Stunting
6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
7. Era Revolusi Industri 4.0 (Era Digital / Teknologi Informasi

C. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) DAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Salah satu indikator kesejahteraan penduduk suatu daerah adalah kondisi kesehatan masyarakatnya. Penitikberatan pembangunan bidang kesehatan melalui pendekatan preventif, tidak hanya kuratif, melalui peningkatan kesehatan masyarakat dan lingkungan diantaranya dengan perluasan penyediaan air bersih, pengurangan wilayah kumuh sehingga secara keseluruhan dapat meningkatkan angka harapan hidup dari 68,69 tahun pada tahun 2016 menjadi 69,15 tahun pada tahun 2019, dan pencapaian keseluruhan sasaran SDGs tahun 2025. Perubahan dibidang kesehatan diperlukan mengingat adanya fenomena utama yang mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan, antara lain Perubahan-perubahan mendasar pada dinamika kependudukan yang mendorong transisi demografis dan epidemiologi, tantangan global sebagai akibat kebijakan perdagangan bebas serta pesatnya revolusi dalam bidang informasi, telekomunikasi dan transparansi, temuantemuan substansial dalam ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran yang membuka cakrawala baru dalam memandang proses hidup, sehat, sakit dan mati, perubahan lingkungan mempengaruhi derajat dan upaya kesehatan, demokratisasi disegala bidang yang menuntut pemberdayaan dan kemitraan dalam pembangunan kesehatan.

Memasuki abad ke 21 yang merupakan era persaingan bebas antar bangsa, sektor kesehatan harus mampu meningkatkan derajat kesehatan yang nantinya akan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, dan pada akhirnya akan mempertajam daya saing bangsa. Oleh karena itu pembangunan kesehatan membutuhkan suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi, potensi permasalahan dan kebutuhan nyata daerah serta aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang. Karena tujuan umum dari pembangunan kesehatan adalah terciptanya perilaku dan lingkungan yang sehat dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat yang mandiri dalam memelihara kesehatan, sehingga terbentuk sumber daya manusia yang sehat, kreatif dan produktif untuk menunjang pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pembangunan pelayanan kesehatan harus terus ditingkatkan dan berkualitas ditujukan pada perbaikan gizi, angka harapan hidup, penurunan angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Permasalahan lain yang sangat perlu diperhatikan dan terus dibudayakan adalah kebiasaan masyarakat untuk tetap hidup sehat, bersih serta peduli terhadap lingkungan tempat tinggal, penyediaan air bersih, jamban keluarga pembuangan sampah maupun limbah dan meningkatkan mutu lingkungan hidup masyarakat dalam mencapai kualitas sumber daya manusia yang prima. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui berbagai macam program dan memperluas jangkauan pelayanan kesehatan secara merata dan terjangkau oleh masyarakat.

Masalah keterbatasan sarana dan prasarana pembangunan kesehatan merupakan tantangan yang harus segera diprioritaskan khususnya kelompok yang paling rentan terhadap gangguan kesehatan dan gizi yaitu anak bayi, anak usia balita, ibu hamil dan ibu menyusui. Selanjutnya untuk meningkatkan upaya pentingnya hidup sehat salah satu program yang harus dijalankan adalah peningkatan penggunaan air bersih untuk minum (air kemasan, leding, pompa sumur dalam, sumur terlindungi dan mata air terlindung).

Sasaran pembangunan kesehatan yang diinginkan pada masa yang akan datang adalah; meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat, meningkatnya status gizi dan kesehatan masyarakat, terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat, dan tertanggulanginya wabah penyakit menular dan kejadian luar biasa, meningkatnya pembinaan dan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya yang beredar dalam lingkungan masyarakat, meningkatnya manajemen pembangunan kesehatan, terwujudnya tenaga kesehatan yang berdaya guna dan berhasil guna dan tersedianya sarana dan prasarana dan dukungan logistik yang memadai.

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang memprioritaskan upaya promotif dan preventif yang dipadukan secara seimbang dengan upaya kuratif dan rehabilitatif. Perhatian khusus

diberikan pelayanan kesehatan penduduk miskin, daerahtertinggal dan daerah bencana, dengan memperhatikan kesetaraan gender.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB.

Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun renstra perangkat daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional

Serta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan* dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam Tema RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah "*Penguatan Daya Saing daerah Untuk Mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi*"

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan strategisnya langsung ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan Prioritas dan sasaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Prioritas merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap sasaran yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari prioritas dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai prioritas, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan Prioritas dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KBKabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 ini mengacu pada Prioritas dan sasaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, pada prioritas 4 dan sasaran 3 yaitu :

Priritas 4 : Peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia

Dalam rangka mewujudkan Tema Pembangunan RKPD tahun 2024 yakni Penguatan Daya saing Daerah Untuk mendukung Transformasi Sosial dan Ekonomi, maka ditetapkan tujuan strategis berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan yaitu : "*Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat"* yang optimal dengan indikator tujuan "*meningkatnya indeks kesehatan"* bagi masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu " *Terwujudnya keluarga sejahtera"* dengan indikator tujuan *" Indeks pembangunan keluarga (Bangga)* Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Sasaran Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 1 (Satu) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang yakni tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Kesehatan, Pengendalaian Penduduk dan KB yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, maka ada 2 (dua) sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut :

1. ***Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan***
   a. *Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan* dengan indikator sasaran sebagai berikut *:*
      1. Usia Harapan Hidup (UHH)
      2. Angka Kematian Ibu per 100. 000 kelahiran hidup
      3. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
2. ***Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendaian Penduduk dan KB***
   a. *Sasaran 2 :Menurunnya Angka Kelahiran Total* dengan indikator sasaran sebagai berikut :
      1. Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total

Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka pendek Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel TC- 3.2.a
Tujuan, Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025 dan Estmasi Maju Tahun 2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2023	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
					2025	2026
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
URUSAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN						
1. Meningkatnya Derajat kesehatan masyarakat		1. Indeks Kesehatan	Indeks	78,06	77,75	77,95
	1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	70.74	70,60	70,80
		3. Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Per 100.000 Penduduk	5	5	4
		4. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Per 1000 Penduduk	17.6	16,9	16,5
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
2. Terwujudnya keluarga Sejahtera		5. Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	indeks	58,20	60	61
	2. Menurunnya Angka Kelahiran Total	6. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata jumlah anak	2,07	2,05	2,05

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan.

3.3. PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. *Program :*

   PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

2. *Kegiatan :*

   1) *Kegiatan 1* : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan

      1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      5. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
      7. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   2) *Kegiatan 2* : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

      Sub Kegiatan

      1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
      3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
      4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
      6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
      7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3) *Kegiatan 3* : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
3. Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
4. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
5. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
6. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
7. Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

4) *Kegiatan 4* : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
2. Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah
3. Pengolahan Data Retribusi Daerah
4. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah

5) *Kegiatan 5* : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
6. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
7. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
8. Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
9. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
10. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

6) *Kegiatan 6* : Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Fasilitasi Kunjungan Tamu

7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
8. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

7) *Kegiatan 7* : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan

1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Pengadaan Mebel
4. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

8) *Kegiatan 8* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

9) *Kegiatan 9* : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar
4. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
5. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
6. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

B. Program dan Kegiatan Prioritas (Bidang Kesehatan)

1. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

1) *Kegiatan 1* : Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2. Pembangunan Puskesmas
3. Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4. Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5. Pengembangan Rumah sakit
6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah sakit
7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
9. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
10. Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
11. Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
12. Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
13. Pengadaan Obat, Vaksin
14. Pengadaan Bahan Habis Pakai
15. Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
17. Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
18. Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
19. Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya

2) *Kegiatan 2* : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

4. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
13. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
14. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
15. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
16. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
17. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
18. Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
19. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
20. Pengelolaan Surveilans Kesehatan
21. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
22. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
23. Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus
24. Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
25. Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
26. Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
27. Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
28. Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
29. Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
30. Operasional Pelayanan Rumah Sakit
31. Operasional Pelayanan Puskesmas
32. Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
33. Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota

34. Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
35. Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
36. Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
37. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga
38. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
39. Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
40. Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
41. Pengelolaan Kawasan tanpa rokok

3) *Kegiatan 3* : Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi

Sub Kegiatan :

1. Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
2. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
3. Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet

4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
2. Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
4. Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan

2. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan

2) *Kegiatan 2* : Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
2. Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar
3. Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan

3) *Kegiatan 3* : Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

1) *Kegiatan 1* : Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
3. Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

2) *Kegiatan 2* : Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga.

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
2. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga

3) *Kegiatan 3* : Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor PIRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

4) *Kegiatan 4* : Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)

5) *Kegiatan 5* : Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

Sub Kegiatan :

1. Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan

6) *Kegiatan 6* : Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga

Sub Kegiatan :

1. Pemeriksaan Post Market pada Produk MakananMinuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Industri Rumah Tangga

4. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

1) *Kegiatan 1* : Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat

2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat

3) *Kegiatan 3* : Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

C. Bidang Urusan Pengendalian Penduduk Dan KB

5. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1) *Kegiatan 1* : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota

3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
5. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
6. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal
7. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
8. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
9. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
10. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
11. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
12. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
13. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
14. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
15. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Perumusan Parameter Kependudukan
2. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
3. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4. Pemetaan Kependudukan
5. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan

6. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
7. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
8. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
10. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

6. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
8. Pengendalian Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3) *Kegiatan 3* : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
7. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
8. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
9. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
10. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
11. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
12. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
13. Peningkatan Kesertaan KB Pria

4) *Kegiatan 4* : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

Sub Kegiatan

1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
4. Pembinaan Terpadu Kampung KB

7. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
8. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
9. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
10. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
11. Advokasi dan Promosi IPK
12. Sosialisasi IPK
13. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perubahan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang kesehatan dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas Kesehatan, pengendalian penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
2. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program, 32 kegiatan dan 213 Sub kegiatan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2024 sebesar Rp. 320.434.744.175,- yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana termuat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Table T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Perubahan Rencana Kerja Dina Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan KB Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
	DINAS KESEHATAN				**140.174.010.000,00**	**164.322.532.339,00**			
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**				**129.090.650.300,00**	**158.608.300.789,00**			
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**				**129.090.650.300,00**	**158.608.300.789,00**			
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**86.380.402.845,00**	**115.455.656.986,00**			
1 02 01 2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**60.000.000,00**	**327.700.300,00**			
1 02 01 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	3 Dokumen	31.471.800,00	242.194.300,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	5.275.000,00	45.353.000,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	3.238.200,00	7.263.200,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	6.656.000,00	6.656.000,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	6.781.000,00	12.805.800,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	3 Laporan	3.853.000,00	3.853.000,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan	3 Laporan	2.725.000,00	9.575.000,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**73.421.238.745,00**	**103.695.421.086,00**			
1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1205 Orang/bulan	1205 Orang/bulan	73.352.208.945,00	103.596.391.786,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan	3 Laporan	69.029.800,00	99.029.300,00	Kab. Sidenreng Rappang,	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**17.460.000,00**	**17.460.000,00**			
1 02 01 2.03 0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03 0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.03 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan	3 Laporan	4.960.000,00	4.960.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**37.390.000,00**	**17.970.000,00**			
1 02 01 2.05 0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen	3 Dokumen	25.000.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.05 0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen	3 Dokumen	12.390.000,00	17.970.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**	**592.561.100,00**	**884.919.300,00**			
1 02 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	1.000.000,00	1.173.200,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	310.886.000,00	247.016.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	16 Paket	5.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	17 Paket	5.710.600,00	5.710.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	16 Laporan	16 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 Laporan	16 Laporan	249.964.500,00	596.019.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	16 Dokumen	16 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**5.334.470.000,00**	**5.643.034.000,00**			
1 02 01 2.07 0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	3.265.970.000,00	3.265.970.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	-	50.635.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	133.500.000,00	305.829.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit	3 Unit	1.935.000.000,00	2.020.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Fisik-Bidang Kes dan KB-Reguler-Pelayanan Kes. Dasar	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**	**6.537.180.000,00**	**4.307.480.000,00**			
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	17 Laporan	17 Laporan	750.780.000,00	750.780.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan	4 Laporan	5.786.400.000,00	3.556.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**	**380.103.000,00**	**561.672.300,00**			
1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit	10 Unit	155.000.000,00	230.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	257 Unit	257 Unit	40.112.000,00	40.112.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit	3 Unit	5.000.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit	5 Unit	75.000.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	3 Unit	9.999.000,00	159.999.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.09 0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	44.992.000,00	81.561.300,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 01 2.09 0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP**	**100 %**	**100 %**	**41.218.598.455,00**	**41.676.140.803,00**			
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP yang Tersedia**	**100 %**	**100 %**	**26.995.342.215,00**	**27.145.409.963,00**			
1 02 02 2.01 0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	1 Unit	2.500.000.000,00	4.888.569.441,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1 Unit	1 Unit	350.000.000,00	367.893.148,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	17 Unit	17 Unit	17.001.760.531,00	14.639.649.614,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.01 0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	5 Unit	5 Unit	68.600.000,00	129.516.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	55 Paket	55 Paket	7.024.713.684,00	7.069.513.760,00	Kab. Sidenreng Rappang	BOK Dinas-BOK Kabupaten/ Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.01 0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	14 Paket	14 Paket	50.268.000,00	50.268.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**100%**	**13.315.697.840,00**	**13.830.251.640,00**			
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5958 Orang	5958 Orang	33.000.000,00	24.422.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6700 Orang	6700 Orang	25.000.000,00	22.700.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	5414 Orang	5414 Orang	396.652.875,00	83.098.875,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	24952 Orang	24952 Orang	25.000.000,00	16.801.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	54670 Orang	54670 Orang	25.000.000,00	17.244.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	194892 Orang	194892 Orang	24.999.900,00	22.414.400,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20907 Orang	20907 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17810 Orang	17810 Orang	24.999.000,00	17.673.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kes	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	2768 Orang	2768 Orang	158.724.500,00	158.724.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	550 Orang	550 Orang	24.999.600,00	24.999.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5839 Orang	5839 Orang	468.970.900,00	467.582.900,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	7663 Orang	7663 Orang	17.454.000,00	15.870.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	40.023.000,00	185.024.800,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kes.	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	1 Dokumen	518.949.900,00	517.909.900,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	336.179.000,00	340.739.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	4.160.000,00	4.160.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	51.020.000,00	250.880.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	220 Orang	220 Orang	48.200.000,00	98.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab./Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2 Dokumen	2 Dokumen	689.908.125,00	969.593.125,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab./Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	2 Dokumen	2 Dokumen	9.904.287.000,00	9.904.287.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Pajak Rokok	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	10 Paket	10 Paket	4.550.000,00	4.550.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab./Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	2 Dokumen	2 Dokumen	29.999.800,00	29.999.800,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	9.500.900,00	204.438.900,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	2 Laporan	2 Laporan	192.920.000,00	192.920.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab./Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	890 Orang	890 Orang	38.446.340,00	38.446.340,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab/Kota	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen	1 Dokumen	199.753.000,00	194.572.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**Cakupan Puskesmas dan OPD yang melakukan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan**	**100%**	**100%**	**479.133.300,00**	**479.133.100,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	17 Dokumen	17 Dokumen	479.133.300,00	479.133.100,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04	**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah izin rumah sakit kelas C, D dan fasilitas falayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang terbit**	**100%**	**100%**	**428.425.100,00**	**221.346.100,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.04 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	17 Unit	17 Unit	15.050.000,00	15.050.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	17 Unit	17 Unit	201.010.000,00	139.665.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan	16 Unit	16 Unit	185.087.600,00	39.353.600,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan
1 02 02 2.04 0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	1 Dokumen	1 Dokumen	27.277.500,00	27.277.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan**	**100%**	**100%**	**1.058.082.000,00**	**1.030.936.000,00**	-	-	**-**
1 02 03 2.01	**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang memiliki STR di fasilitasi mendapatkan SIP**	**100%**	**100%**	**3.060.000,00**	**3.000.000,00**	-	-	**-**
1 02 03 2.01 0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	3.060.000,00	3.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kab,/Kota**	**Persentase tenaga kesehatan yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan**	**100%**	**100%**	**278.293.000,00**	**141.937.000,00**	-	-	**-**
1 02 03 2.02 0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	4.774.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.02 0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	4 Dokumen	4 Dokumen	273.293.000,00	137.163.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	-DAU DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab./Kota	Dinas Kesehatan
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan tenaga Kesehatan yang mendapatkan Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis SDMK Tingkat Daerah Kab./Kota**	**100%**	**100%**	**776.729.000,00**	**885.999.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	90 Orang	90 Orang	776.729.000,00	885.999.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kab./Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 04	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang Memiliki Izin**	**100%**	**100%**	**371.648.000,00**	**371.648.000,00**			
1 02 04 2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Cakupan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Yamg Memiliki Izin**	**100%**	**100%**	**69.247.000,00**	**69.247.000,00**			
1 02 04 2.01 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	1 Dokumen	1 Dokumen	69.247.000,00	69.247.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 04 2.03	**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Pengawasan Dan Sertifikt Produksi Pangan, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga**	**100%**	**100%**	**125.387.000,00**	**137.387.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 04 2.03 0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	1 Dokumen	1 Dokumen	125.387.000,00	137.387.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 04 2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Cakupan Industri Rumah Tangga Yang Mendapat Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan**	**100%**	**100%**	**165.014.000,00**	**165.014.000,00**	-	-	-
1 02 04 2.06 0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	100 Unit	100 Unit	165.014.000,00	165.014.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Non Fisik DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Cakupan Rumah Tangga Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)**	**75%**	**-**	**73.919.000,00**	**73.919.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.01	**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Puskesmas Yang Melakukan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan Pemberdayaan Masyarakat**	**-**	**-**	**38.860.000,00**	**38.860.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.01 0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	1 Dokumen	1 Dokumen	38.860.000,00	38.860.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Peserta Bimbingan Teknis Dan Supervisi Pengembangan Dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)**	**-**	**-**	**35.059.000,00**	**35.059.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen	1 Dokumen	35.059.000,00	35.059.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KB**				**11.083.359.700,00**	**5.714.231.550,00**			
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**11.083.359.700,00**	**5.714.231.550,00**	-	-	-
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	-	-	-	**11.083.359.700,00**	**5.714.231.550,00**	-	-	-
2 14 02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun**	**22,10 Thn**	**22,10 Thn**	**288.533.700,00**	**22.530.800,00**	-	-	-
2 14 02 2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)**	**100%**	**100%**	**61.814.000,00**	-	-	-	-
2 14 02 2.01 0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Kegiatan	1 Kegiatan	61.814.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 02 2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten**	**100%**	**100%**	**226.719.700,00**	**22.530.800,00**	-	-	-
2 14 02 2.02 0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya	1 Dokumen	1 Dokumen	9.719.900,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2 14 02 2.02 0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	1 Laporan	1 Laporan	84.000.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 02 2.02 0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	1 Dokumen	1 Dokumen	121.000.000,00	16.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 02 2.02 0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	1 Dokumen	1 Dokumen	11.999.800,00	6.030.800,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	-	-	-	**8.936.086.000,00**	**4.880.140.750,00**	-	-	-
2 14 03 2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**	-	-	-	**989.662.000,00**	**919.648.000,00**	-	-	-
2 14 03 2.01 0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	1 Laporan	1 Laporan	545.501.000,00	545.501.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.01 0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	1 Dokumen	1 Dokumen	100.001.000,00	29.991.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2 14 03 2.01 0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	11 Organisasi	11 Organisasi	344.160.000,00	344.156.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**-**	**-**	**-**	**318.000.000,00**	**190.800.000,00**	**-**	-	**-**
2 14 03 2.02 0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	45 Orang	45 Orang	318.000.000,00	190.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**5.335.860.500,00**	**2.230.829.750,00**	**-**	-	**-**
2 14 03 2.03 0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	15.351.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.03 0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	45 Orang	45 Orang	466.774.500,00	466.790.500,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.03 0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	11 Unit	11 Unit	4.836.998.000,00	1.764.039.250,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2 14 03 2.03 0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	1 Laporan	1 Laporan	16.737.000,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	-	-	-	**2.292.563.500,00**	**1.538.863.000,00**	-	-	-
2 14 03 2.04 0001	Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	11 Organisasi	11 Organisasi	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.04 0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	1 Dokumen	1 Dokumen	3.700.500,00	-	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.04 0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	11 Unit	11 Unit	1.500.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 03 2.04 0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	11 Kampung	11 Kampung	786.223.000,00	786.223.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2 14 04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	-	-	-	**1.858.740.000,00**	**811.560.000,00**	-	-	-
2 14 04 2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-	**302.640.000,00**	**302.640.000,00**	-	-	-
2 14 04 2.01 0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia	11 Unit	11 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 04 2.01 0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	2 Laporan	2 Laporan	2.640.000,00	2.640.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
2 14 04 2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	-	-	-	**1.556.100.000,00**	**508.920.000,00**	-	-	-
2 14 04 2.02 0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/ Balita)	11 laporan	11 laporan	741.000.000,00	296.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2 14 04 2.02 0006	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/ Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/ kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan	11 laporan	11 laporan	815.100.000,00	212.520.000,00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	Dinas Kesehatan
	RSUD NENE MALLOMO	-	-	-	**86.773.812.000,00**	**67.797.682.000,00**	-	-	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**86.773.812.000,00**	**67.797.682.000,00**	-	-	**-**
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**86.773.812.000,00**	**67.797.682.000,00**	-	-	**-**
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**84.363.949.000,00**	**66.078.871.660,00**	-	-	**-**
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	**22.063.130.000,00**	**22.063.130.000,00**	-	-	**-**
1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	22.063.130.000,00	0,00	Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 01 2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	-	-	-	**177.551.000,00**	**177.551.000,00**	-	-	**-**
1 02 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	147.551.000,00	92.667.000,00	Maritengngae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 01 2.06 0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Maritengngae, Rijang Pitu	Pajak Daerah	RSUD Nene Mallomo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**4.302.168.000,00**	**4.302.168.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	1.076.568.000,00	1.089.137.660,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	3.225.600.000,00	1.573.200.000,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 01 2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**-**	**-**	**-**	**21.100.000,00**	**21.100.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 01 2.09 0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**-**	**-**	**57.800.000.000,00**	**63.272.767.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	57.800.000.000,00	63.272.767.000,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.749.863.000,00**	**1.678.810.340,00**	**-**	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**1.499.980.000,00**	**1.499.980.000,00**			RSUD Nene Mallomo
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	1.499.980.000,00	1.498.810.340,00	Marikengae, Rijang Pitu	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	RSUD Nene Mallomo
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**249.883.000,00**	**249.883.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	249.883.000,00	180.000.000,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 03	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**660.000.000,00**	**40.000.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 03 2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**360.000.000,00**	**360.000.000,00**			
1 02 03 2.02 0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-	-	360.000.000,00	0,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
1 02 03 2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kab/Kota**	**-**	**-**	**-**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**-**	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 03 2.03 0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	-	-	300.000.000,00	40.000.000,00	Marikengae, Rijang Pitu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	RSUD Nene Mallomo
	RSUD ARIFIN NU'MANG	-	-	-	**51.511.945.000,00**	**49.425.428.747,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**51.511.945.000,00**	**49.425.428.747,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**51.511.945.000,00**	**49.425.428.747,00**	-	-	-
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**48.361.945.000,00**	**46.275.428.747,00**	-	-	-
1 02 01 2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	-	-	-	**15.782.145.000,00**	**15.782.145.000,00**	-	-	-
1 02 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	15.782.145.000,00	10.928.628.747,00	Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RSUD Arifin Nu'Man
1 02 01 2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	-	-	-	**2.952.400.000,00**	**2.952.400.000,00**	-	-	-
1 02 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	-	650.000.000,00	630.000.000,00	Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RSUD Arifin Nu'Man
1 02 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	-	2.302.400.000,00	1.591.800.000,00	Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RSUD Arifin Nu'Man
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-	**29.627.400.000,00**	**29.627.400.000,00**	-	-	-
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	29.627.400.000,00	33.125.000.000,00	Panca Rijang, Rappang	Pendapatan dari BLUD	RSUD Arifin Nu'Man

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**3.150.000.000,00**	**3.150.000.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**3.150.000.000,00**	**3.150.000.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.01 0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	-	-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus Fisik	RSUD Arifin Nu'Man
1 02 02 2.01 0022	Pengembangan Rumah Sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-	-	1.650.000.000,00	1.650.000.000,00	Panca Rijang, Rappang	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	RSUD Arifin Nu'Man
	UPT PUSKESMAS BELAWAE	**-**	**-**	**-**	**1.024.927.000,00**	**1.514.857.527,00**	**-**	-	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**-**	**-**	**-**	**1.024.927.000,00**	**1.514.857.527,00**	**-**	-	**-**
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**1.024.927.000,00**	**1.514.857.527,00**	**-**	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.011.749.500,00**	**1.501.680.027,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**977.857.000,00**	**977.857.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	23.760.000,00	23.760.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	26.676.000,00	26.676.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	22.800.000,00	22.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	9.900.000,00	9.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	750.000,00	750.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	141.915.000,00	141.915.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	14.400.000,00	15.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	53.010.000,00	55.612.200,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	131.700.000,00	177.900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	325.000.000,00	435.580.527,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	122.586.000,00	480.426.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1.500.000,00	1.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	12.600.000,00	18.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	900.000,00	900.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	84.960.000,00	84.960.000,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**33.892.500,00**	**33.892.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	33.892.500,00	300,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**13.177.500,00**	**13.177.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**13.177.500,00**	**13.177.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	13.177.500,00	13.177.500,00	Kab. Sidenreng Rappang Pitu Raise	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Belawae
	UPT PUSKESMAS KULO	**-**	**-**	**-**	**1.778.838.000,00**	**2.168.807.582,00**	**-**	-	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**-**	**-**	**-**	**1.778.838.000,00**	**2.168.807.582,00**	**-**	-	**-**
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**1.778.838.000,00**	**2.168.807.582,00**	**-**	-	**-**
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**1.019.820.000,00**	**1.131.539.582,00**	**-**	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**-**	**-**	**1.019.820.000,00**	**1.019.820.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.019.820.000,00	1.131.539.582,00		Pendapatan dari BLUD	PKM Kulo
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**751.233.000,00**	**1.029.483.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**704.830.000,00**	**704.830.000,00**			
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	43.920.000,00	43.920.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	6.530.000,00	170.430.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	9.600.000,00	9.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	173.275.000,00	173.275.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	5.400.000,00	10.200.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	49.624.000,00	49.537.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	130.700.000,00	146.300.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	0,00	114.350.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	135.061.000,00	160.651.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	900.000,00	1.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	10.400.000,00	10.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	103.720.000,00	103.720.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**46.403.000,00**	**46.403.000,00**	**-**	-	
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	46.403.000,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo,	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**7.785.000,00**	**7.785.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**7.785.000,00**	**7.785.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	7.785.000,00	7.785.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Kulo, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Kulo
	UPT PUSKESMAS PANGKAJENE	-	-	-	**4.449.220.000,00**	**5.729.591.801,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**882.187.000,00**	**1.590.144.000,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**882.187.000,00**	**1.590.144.000,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**873.972.500,00**	**1.581.929.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**826.352.000,00**	**826.352.000,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	0,00	60.390.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	8.716.500,00	8.790.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	50.300.000,00	50.300.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	12.800.000,00	12.800.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	209.446.000,00	209.573.500,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	8.700.000,00	8.700.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	24.007.500,00	25.133.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	146.000.000,00	152.000.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	0,00	235.200.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKM Pangkajene

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	155.662.000,00	669.013.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	5.430.000,00	5.430.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	600.000,00	300.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	2.200.000,00	2.200.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	175.090.000,00	114.700.000,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**47.620.500,00**	**47.620.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	47.620.500,00	0,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**8.214.500,00**	**8.214.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**8.214.500,00**	**8.214.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	8.214.500,00	8.214.500,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Pangkajene
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**3.567.033.000,00**	**4.139.447.801,00**	-	-	-
2 14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**	-	-	-	**3.567.033.000,00**	**4.139.447.801,00**	-	-	-
2 14 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**3.567.033.000,00**	**4.139.447.801,00**	-	-	-
2 14 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-	**3.567.033.000,00**	**3.567.033.000,00**	-	-	-
2 14 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	3.567.033.000,00	4.139.447.801,00	Maritengngae, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	PKM Pangkajene

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	UPT PUSKESMAS LAWAWOI	-	-	-	**2.789.437.000,00**	**3.706.769.500,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**2.789.437.000,00**	**3.706.769.500,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**2.789.437.000,00**	**3.706.769.500,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**2.789.437.000,00**	**3.706.769.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**2.765.264.500,00**	**2.765.264.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	22.875.000,00	22.875.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	5.765.000,00	5.892.500,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	52.500.000,00	52.500.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	19.000.000,00	19.000.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	13.500.000,00	13.500.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	335.515.500,00	338.596.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	13.400.000,00	13.400.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	22.186.500,00	22.233.500,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	141.600.000,00	145.200.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	1.862.090.000,00	2.244.199.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	158.132.500,00	175.850.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2.000.000,00	513.051.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	97.700.000,00	97.300.000,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**24.172.500,00**	**24.172.500,00**		-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	24.172.500,00	24.172.500,00	Watang Pulu, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lawawoi
	UPT PUSKESMAS MANISA	**-**	**-**	**-**	**1.197.350.000,00**	**1.495.094.800,00**	**-**	-	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**-**	**-**	**-**	**1.197.350.000,00**	**1.495.094.800,00**	**-**	-	**-**
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**1.197.350.000,00**	**1.495.094.800,00**	**-**	-	**-**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.184.290.000,00**	**1.482.034.800,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**1.127.265.700,00**	**1.127.265.700,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	18.562.500,00	18.562.500,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	20.490.000,00	20.490.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	1.200.000,00	1.200.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	124.025.000,00	124.025.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	6.600.000,00	6.600.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	45.870.200,00	45.983.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	109.300.000,00	259.000.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	547.000.000,00	610.299.800,00	Baranti, Semua Kel/Desa	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	119.188.000,00	167.598.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	100.000,00	91.800.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	3.600.000,00	3.600.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	74.130.000,00	75.676.500,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**57.024.300,00**	**57.024.300,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	57.024.300,00	0,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**13.060.000,00**	**13.060.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**13.060.000,00**	**13.060.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	13.060.000,00	13.060.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Manisa

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	UPT PUSKESMAS BILOKKA	-	-	-	**2.441.214.000,00**	**3.010.425.386,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**970.517.000,00**	**1.222.210.200,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**970.517.000,00**	**1.222.210.200,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**957.157.000,00**	**1.208.850.200,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**923.306.500,00**	**923.306.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	36.750.000,00	36.750.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	2.515.000,00	2.515.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	54.300.000,00	54.300.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	7.000.000,00	7.000.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	209.032.000,00	209.032.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	23.689.500,00	26.408.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	132.800.000,00	136.200.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	184.303.000,00	300.560.200,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	141.917.000,00	303.185.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	5.000.000,00	6.900.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	6.800.000,00	6.800.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	12.600.000,00	12.600.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	73.400.000,00	73.400.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**33.850.500,00**	**33.850.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	33.850.500,00	0,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**13.360.000,00**	**13.360.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**13.360.000,00**	**13.360.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	13.360.000,00	13.360.000,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Bilokka
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**-**	**-**	**-**	**1.470.697.000,00**	**1.788.215.186,00**	**-**	-	**-**
2 14 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**	**-**	**-**	**-**	**1.470.697.000,00**	**1.788.215.186,00**	**-**	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
2 14 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**-**	**-**	**1.470.697.000,00**	**1.470.697.000,00**	**-**	-	**-**
2 14 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.470.697.000,00	1.788.215.186,00	Panca Lautan, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	PKM Bilokka
	UPT PUSKESMAS LANCIRANG	**-**	**-**	**-**	**1.432.632.000,00**	**1.949.630.000,00**	**-**	**-**	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	**-**	**-**	**-**	**1.432.632.000,00**	**1.949.630.000,00**	**-**	-	**-**
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**1.432.632.000,00**	**1.949.630.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**1.420.954.500,00**	**1.937.952.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**1.420.954.500,00**	**1.420.954.500,00**	**-**	-	**-**
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	13.725.000,00	19.725.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	17.825.000,00	17.825.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	38.000.000,00	38.000.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	18.000.000,00	18.000.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	9.000.000,00	9.000.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	174.141.000,00	174.141.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	5.400.000,00	7.173.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	16.469.400,00	17.154.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	111.500.000,00	118.600.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	792.000.000,00	1.040.725.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	126.194.100,00	379.309.500,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	500.000,00	100.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	8.800.000,00	8.800.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	75.000.000,00	75.000.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**11.677.500,00**	**11.677.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**11.677.500,00**	**11.677.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	11.677.500,00	11.677.500,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Lancirang
	UPT PUSKESMAS BARANTI	-	-	-	**1.851.487.000,00**	**2.422.413.066,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**1.851.487.000,00**	**2.422.413.066,00**	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**1.851.487.000,00**	**2.422.413.066,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**1.844.957.000,00**	**2.415.883.066,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**1.844.802.500,00**	**1.844.802.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	32.940.000,00	32.940.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	8.090.000,00	8.090.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	39.000.000,00	39.000.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	8.800.000,00	8.800.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	213.967.500,00	213.967.500,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	5.400.000,00	5.400.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	27.498.000,00	27.588.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	148.000.000,00	308.000.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	1.097.093.000,00	1.475.530.566,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	134.874.000,00	167.427.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	10.800.000,00	10.800.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	89.540.000,00	89.540.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
1 02 02 2.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	154.500,00	154.500,00	Baranti, Semua Kel/Desa	-	PKM Baranti
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	154.500,00	0,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**6.530.000,00**	**6.530.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**6.530.000,00**	**6.530.000,00**	-	-	-
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	6.530.000,00	6.530.000,00	Baranti, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Baranti
	UPT PUSKESMAS BARUKKU	-	-	-	**1.829.801.000,00**	**2.335.847.800,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**1.829.801.000,00**	**2.335.847.800,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**1.829.801.000,00**	**2.335.847.800,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**1.754.901.000,00**	**2.287.901.300,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**1.740.122.500,00**	**1.740.122.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	55.500.000,00	52.000.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	12.487.500,00	11.937.500,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	28.800.000,00	41.070.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	16.650.000,00	17.100.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	400.000,00	400.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	248.989.000,00	248.989.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	7.440.000,00	9.000.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	37.188.000,00	32.279.800,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	122.340.000,00	144.200.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	854.448.000,00	1.015.168.800,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Barukku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	167.930.000,00	527.956.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	16.200.000,00	16.500.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	9.750.000,00	10.200.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	3.330.000,00	4.500.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	158.670.000,00	156.600.000,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**14.778.500,00**	**14.778.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	14.778.500,00	200,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**74.900.000,00**	**47.946.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab./Kota**	**-**	**-**	**-**	**74.900.000,00**	**74.900.000,00**	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	74.900.000,00	47.946.500,00	Pitu Raise, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Barukku
	UPT PUSKESMAS DONGI	-	-	-	**1.437.449.000,00**	**2.106.541.959,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**1.437.449.000,00**	**2.106.541.959,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**1.437.449.000,00**	**2.106.541.959,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**1.431.674.000,00**	**2.100.766.959,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**1.414.211.000,00**	**1.414.211.000,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	34.860.000,00	34.860.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	8.328.500,00	8.328.500,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	24.750.000,00	24.750.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	16.350.000,00	16.350.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	146.525.000,00	146.525.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	14.990.000,00	14.990.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	33.667.000,00	33.823.500,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	101.350.000,00	584.460.200,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	836.327.000,00	1.022.309.759,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	113.053.500,00	130.360.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	3.150.000,00	3.150.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	5.300.000,00	5.300.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	2.600.000,00	2.600.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	65.460.000,00	65.460.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	-	**-**	**-**	**17.463.000,00**	**17.463.000,00**	-	-	**-**
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	17.463.000,00	0,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	**-**	**-**	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	-	-	**-**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	**-**	**-**	**5.775.000,00**	**5.775.000,00**	-	-	**-**
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	5.775.000,00	5.775.000,00	Pitu Riawa, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Dongi

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	UPT PUSKESMAS TANRU TEDONG	-	-	-	**3.412.141.000,00**	**4.018.508.620,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**3.412.141.000,00**	**4.018.508.620,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**3.412.141.000,00**	**4.018.508.620,00**	-	-	-
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB./KOTA**	-	-	-	**2.500.000.000,00**	**2.697.730.220,00**	-	-	-
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	-	-	-
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	2.500.000.000,00	2.697.730.220,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	PKM Tanru Tedong
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**912.141.000,00**	**1.310.355.900,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**				**912.141.000,00**	**912.141.000,00**			
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	148.610.000,00	26.190.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	0,00	21.600.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	58.215.000,00	0,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	45.000.000,00	46.500.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	14.500.000,00	0,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	22.800.000,00	17.800.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	3.600.000,00	12.800.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	286.411.000,00	250.517.500,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	38.900.000,00	7.000.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	11.500.000,00	25.170.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	123.900.000,00	164.000.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	0,00	123.200.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	158.705.000,00	444.078.400,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	0,00	100.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	0,00	5.000.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	0,00	5.000.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	0,00	161.400.000,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**10.422.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kab./Kota**	**-**	**-**	**-**	**0,00**	**10.422.500,00**	-	-	-
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	0,00	10.422.500,00	Dua Pitue, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Tanru Tedong

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	UPT PUSKESMAS EMPAGAE	-	-	-	**1.798.625.000,00**	**2.400.350.122,00**	-	-	-
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**1.798.625.000,00**	**2.400.350.122,00**	-	-	-
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**1.798.625.000,00**	**2.400.350.122,00**	-	-	-
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**1.787.422.000,00**	**2.389.147.122,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**1.786.772.000,00**	**1.786.772.000,00**	-	-	-
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	26.800.000,00	73.700.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	4.520.000,00	4.520.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	33.000.000,00	66.000.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	12.800.000,00	25.600.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	199.286.000,00	199.286.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	6.200.000,00	6.200.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	28.295.000,00	63.635.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	128.100.000,00	210.700.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	1.066.163.000,00	1.355.168.122,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	131.708.000,00	148.638.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	1.000.000,00	1.000.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	8.000.000,00	8.000.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelay. Kes. sesuai standar	-	-	7.200.000,00	7.200.000,00	WT. Sidenreng Semua Kel	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	14.400.000,00	48.000.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	111.300.000,00	163.500.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**650.000,00**	**650.000,00**	**-**	-	
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	650.000,00	0,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**11.203.000,00**	**11.203.000,00**	**-**	-	
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**11.203.000,00**	**11.203.000,00**	**-**	-	**-**
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	11.203.000,00	11.203.000,00	WT. Sidenreng, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Empagae
	UPT PUSKESMAS RAPPANG	**-**	**-**	**-**	**2.293.588.000,00**	**2.754.252.837,00**	**-**	-	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	-	-	**2.293.588.000,00**	**2.754.252.837,00**	-	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	-	-	-	**2.293.588.000,00**	**2.754.252.837,00**	-	-	-
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	-	-	-	**1.539.476.000,00**	**1.753.820.337,00**	-	-	-
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	-	-	-	**1.539.476.000,00**	**1.539.476.000,00**	-	-	-
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.539.476.000,00	1.753.820.337,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	Pendapatan dari BLUD	PKM Rappang
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	-	-	-	**750.870.500,00**	**995.357.500,00**	-	-	-
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	-	-	**750.870.500,00**	**750.870.500,00**	**0**	**0**	**0**
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	30.800.000,00	30.800.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	5.777.000,00	5.777.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	21.000.000,00	21.000.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	7.200.000,00	12.000.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	4.800.000,00	4.000.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	200.568.500,00	200.568.500,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	24.600.000,00	24.600.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	19.220.000,00	18.820.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	141.100.000,00	153.603.500,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	0,00	53.850.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	133.923.000,00	136.983.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	-	33.682.000,00	3.585.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	500.000,00	192.970.500,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	7.200.000,00	12.000.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	6.800.000,00	7.600.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	14.400.000,00	14.400.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	99.300.000,00	102.800.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	-	**-**	**-**	**3.241.500,00**	**5.075.000,00**	-	-	**-**
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	-	**-**	**-**	**3.241.500,00**	**3.241.500,00**	-	-	**-**
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	3.241.500,00	5.075.000,00	Panca Rijang, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	PKM Rappang
	UPT PUSKESMAS AMPARITA	-	**-**	**-**	**2.399.391.000,00**	**3.276.010.089,00**	-	-	**-**
1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**	-	**-**	**-**	**2.399.391.000,00**	**3.276.010.089,00**	-	-	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**2.399.391.000,00**	**3.276.010.089,00**	**-**	**-**	**-**
1 02 01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**-**	**-**	**-**	**1.518.755.000,00**	**1.841.361.589,00**	**-**	**-**	**-**
1 02 01 2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**-**	**-**	**-**	**1.518.755.000,00**	**1.518.755.000,00**	**-**	**-**	**-**
1 02 01 2.10 0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	-	1.518.755.000,00	1.841.361.589,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	Pajak Rokok-Pembayaran Iuran JKN	PKM Amparita
1 02 02	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**-**	**-**	**-**	**871.971.000,00**	**1.425.983.500,00**	**-**	**-**	**-**
1 02 02 2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**871.331.000,00**	**871.331.000,00**	**-**	**-**	**-**
1 02 02 2.02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	142.070.000,00	36.450.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	8.290.000,00	8.290.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	19.872.000,00	0,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	-	35.800.000,00	46.600.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	8.100.000,00	11.700.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	-	4.800.000,00	4.800.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	-	313.751.000,00	317.351.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	-	27.000.000,00	46.800.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	-	45.000.000,00	93.900.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	-	80.500.000,00	204.100.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	-	-	0,00	182.950.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	-	149.048.000,00	154.870.500,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	-	500.000,00	7.300.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 02 2.02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	30.000.000,00	34.500.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	-	1.200.000,00	12.000.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	-	5.400.000,00	21.600.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	-	0,00	242.772.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 02 2.03	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi**	**-**	**-**	**-**	**640.000,00**	**640.000,00**			
1 02 02 2.03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	-	640.000,00	0,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
1 02 05	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**-**	**-**	**-**	**8.665.000,00**	**8.665.000,00**			
1 02 05 2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**-**	**-**	**-**	**8.665.000,00**	**8.665.000,00**			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2024						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Target Kinerja		Target Kinerja		Lokasi	Sumber Dana	
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1 02 05 2.03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	-	8.665.000,00	8.665.000,00	Tellu Limpoe, Semua Kel/Desa	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	PKM Amparita
	JUMLAH :		**-**	**-**	**308.595.867.000,00**	**320.434.744.175,00**			

BAB V.

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Draft Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan kesehatan dan pengendalian penduduk tahun 2024.

4.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan awal Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan serta sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

4.2. Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

4.3. Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan dan Pengendalian penduduk yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan dan pengendalian penduduk yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Kesehatan, Pengendalian

Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesehatan dan pengendalian penduduk di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

CATATAN

CATATAN

DINAS
PERPUSTAKAAN
& KEARSIPAN

PERUBAHAN

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
TAHUN 2024

Lorem ipsum dolor sit amet
consectetuer adipiscing elit.
Aenean commodo ligula

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kita panjatkan kehadirat Allah S.W.T atas limpahan Rahmat, Taufiq dan Karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, disusun berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan Rencana Kerja berfungsi sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan, yang kandungan pokoknya meliputi visi, misi, kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang menjadi pedoman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun kedepan.

Semoga Perubahan Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintaha, khususnya dalam pengembangan Kearsipan dan Perpustakaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

Kepala Dinas,

AHMAD, SP., M. Si
Pangkat. Pembina Utama Muda
NIP. 197106041998031019

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
BAB. I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 4
1.3 Maksud dan Tujuan 6
I.4 Sistematika Penulisan 7
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU 9
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Lalu dan Capaian Renstra 9
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 40
BAB. III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 51
3.1. Program dan Kegiatan 51
1 Program 51
2 Kegiatan 51
BAB. IV PENUTUP 65
4.1. Catatan Penting 65
4.2. Kaidah Pelaksanaan 65
4.3. Rencana Tindak Lanjut. 69

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Tahun 2021	11
Tabel 2.2	Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	40
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025	84

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Keberadaan dokumen rencana kerja disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Rencana Strategis Perangkat Daerah, sehingga Renja merupakan satu kesatuan yang lengkap terkait dengan ketersediaan dokumen perencanaan dan perencanaan pembangunan.

Setiap perangkat Daerah berupaya menyusun Renja dengan kualitas yang baik, oleh karena itu salah satu apek penting yang perlu diperhatikan adalah keterkaitan secara konsisten dan sinergis antara muatan materi Renja dengan dokumen perencanaan lainnya secara komperehensif. Sehingga Renja Perangkat Daerah secara konkrit dapat memberikan landasan hukum serta dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen yang tidak terlepaskan dalam rangka mencapai tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Perangkat Daerah Kabupaten berkewajiban untuk meyusun renja sesuai dengan peran dan kewenangannya sebagaimana telah diatur dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan yaitu penyelenggaraan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan sebagai urusan Pemerintahan Konkuren yang diserahkan ke Daerah dan menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang melakukan penyusunan Renja tahun 2024 yang berisi kebijakan serta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan secara langsung dengan penganggaran sesuai pagu indikatif berdasarkan kerangka kebijakan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, RKPD Provinsi Sulawesi Selatan dan RKPD Perpusnas RI dan ANRI tahun 2024 yang bersumber dari APBD kabupaten

Sidenreng Rappang, APBD Provinsi Sulawesi Selatan dan APBD Perpusnas RI dan ANRI.

Dokumen Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sidenreng Rappang, oleh karena itu Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dengan memperhatikan RPJMN, Renstra Perpusnas RI dan ANRI Tahun 2020-2024, RPJMD dan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023, di samping itu berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2011-2031 serta hasil evaluasi RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021-2023.

Dalam rangka mewujudkan perencanaan yang akuntabel maka perlu disusun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mengamanatkan bahwa setiap daerah diwajibkan untuk menyusun perencanaan pembangunan daerah untuk Rencana Jangka Panjang Pembangunan Daerah 20 tahun (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah jangka pendek 1 tahun. Hal ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah., tata cara Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah Daerah Hal tersebut pulalah yang mendasari penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Sebagai suatu dokumen resmi perencanaan daerah dan perencanaan Perangkat Daerah, mempunyai kedudukan yang

strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Rencana Kerja merupakan penjabaran Rencana Strategis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan *good government* dalam sebuah organisasi akan menjadi *competitive advantage* bagi penyelenggara dimata publik. Di sisi lain, terselenggaranya Kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai sebuah organisasi publik menyadari sepenuhnya akan kondisi di atas. Agar kerangka kegiatan pembangunan dapat terarah, terpadu dan menyeluruh dan berlangsung secara berkesinambungan maka, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang berusaha mengembangkan mekanisme penyusunan Rencana Kerja secara Proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja yang disusun merupakan hasil analisis dan evaluasi realisasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya. Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026. Rencana Kerja merupakan salah satu proses kegiatan perencanaan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
11. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, Nomor 13);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, Nomor 16);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025, Nomor 14);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 71);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Memberikan Arah dan pedoman bagi Dinas Perustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pelayanan, sehingga sasaran, tujuan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tersebut dapat tercapai;
2. Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Perpustakaan da Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, melalui perencanaan, pengukuran dan evaluasi kinerja terhadap kebijaksanaan, program dan kegiatan yang dilaksanakan;

3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan *(stakeholders)* tentang rencana kegiatan tahunan Dinas Perpustakaan da Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya pembangunan yang efektif dan efisien.

Sedangkan Tujuan khusus penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 adalah :

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan serta mempertajam skala prioritas program dan kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan .
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024 dan landasan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tahun 2024.
3. Agar seluruh urusan/program/sasaran kegiatan dapat sejalan dengan target kinerja Rencana Strategis 2024-2026, Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026.
4. Rencana Kerja merupakan sarana bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan kabupaten Sidenreng Rappang untuk membuat suatu Program/Kegiatan yang berbasis pada Kepentingan Masyarakat.
5. Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Tahun sebelumnya sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja *(Performance Gap)* bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan

dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan secara singkat masing-masing bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, menjelaskan secara ringkas Latar Belakang Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kabupaten Sidenreng Rappang, Landasan Hukum, menjabarkan maksud dan tujuan penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 dan Sistematika Penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN LALU, menjelaskan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan yang berbasis kepada masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, menjelaskan tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan selama 1 (satu) Tahun Periode Tahun 2025.

BAB IV PENUTUP, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 ini menguraikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA s.d TRIWULAN II TAHUN 2024

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024.

2.1 Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan target dan realisasi kinerja program dan kegiatan serta untuk menganalisis perencanaan kebutuhan pada tahun 2024, sangat dibutuhkan evaluasi Renja dengan cara melakukan perbandingan data antara target capaian kinerja Renstra sampai dengan periode akhir renstra, dibandingkan dengan data realisasi target dan realisasi kinerja hasil program dan kegiatan selama 3 (tiga) tahun. Adapun yang akan dikaji (review) terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 adalah Evaluasi Renstra Perubahan Tahun 2021-2023 dan Renstra RPD Tahun 2024-2026 dalam hal pelaksanaan Renja Tahun 2024.

Evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang disusun juga ditujukan memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan 1 (satu) tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Renja dipandang sebagai berikut :

1. Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

2. Gambaran visi, misi, persepsi, interprestasi serta strategi bagi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
3. Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Evaluasi Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappag secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapainnya (Kebijakan dan program).

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang telah melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab organisasi. Dari 5 (lima) sasaran yang telah ditetapkan, sebagian telah mencapai target kinerja yang diharapkan. Hal ini terlihat dari capaian sasaran diukur dari tercapainya kondisi yang ingin diwujudkan pada tingkat *outcome*.

Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2021-2023 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026 dan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024, maka capaian kinerja sasaran strategis secara kuantitatif dapat dilihat pada Tabel II.1.a dan Tabel II.1.b berikut;

Tabel II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d. Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**	**100 %**				**100 %**	**100 %**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinejra Perangkat Daerah**	**100 %**	**100 %**				**100 %**	**100 %**
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	6 dok				6 dok	100 %
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 dok				3 dok	100%
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen	3 dok				3 dok	100%
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 dok				3 dok	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen	3 dok				3 dok	100%
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan				3 laporan	100%
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan	3 laporan				3 laporan	100%
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**	**100 %**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 org/bln	308 org/bln				308 org/bln	100%
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan				3 laporan	100%
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Nilai Perilaku Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN**	**100 %**	**100%**				**100%**	**1005**
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 dokumen	36 dokumen				36 dokumen	100%
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	18 paket				18 paket	100%
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	3 paket	-	-	-	3 paket	50%
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	9 paket				9 paket	100%
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan				12 laporan	100%
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 dokumen	100 dokumen	-	-	-	100 dokumen	100%
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	-	-			
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Miilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	27 unit				100%	100%
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit				6 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit				12 unit	100%
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit				18 unit	100%
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun** **Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan** **Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk** **Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk**	**60,00%** **7,09%** **Rasio** **Rasio**	**37,07%** **%** **Rasio** **Rasio**				**37,07%** **%** **Rasio** **Rasio**	**61,37%** **%** **%** **%**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat**	**60,00%**	**%**				**%**	**%**
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3 layanan	3 layanan				3 layanan	100%
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional	30 perpus	30 perpus				30 perpus	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya							
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 eks	-				eks	%
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	300 perpus	450 perpus				450 perpus	%
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 perpus	15 perpus				15 perpus	100%
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 orang	150 orang	-	-	-	Orang	%
2.23.02.3.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 layanan	6 layanan	-	-	-	6 layanan	100%
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	9.000 eks	eks				5.000 Eks	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	9.000 eks	Eks				Eks	%
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen	3 dokumen	-	-	-	3 dokumen	100%
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten**	**100%**	**100%**				100%	100%
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	33 lokus	33 lokus	-	-	-	33 lokus	100%
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	11 orang	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakaan	-					
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 orang	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**200**	**66,66**
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100,00**	**200**	**66,66**
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarkat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20	-	20	10	50,00		
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20	-	20	10	50,00	20	100,00
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional**	**85,00%**	**85%**				**75%**	**88,23%**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Aktif dan In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	90 berka	-	20	20	100,00	45	50,00
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	3 laporan	-	20	20			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik**	**100%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,33**	**33,33**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah dan Jenis Arsip Statis yang Diakuisisi, Diolah, Dipreservasi dan Diakses	195 box	-	-	-	-	150	76,92
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**66,66**	**66,66**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Sarana Layanan Informasi Kearsipan yang Diadakan	2	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek/Diklat Kearsipan	orang	-	200	200	100.00	200	28,57
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**33,33**	**33,33**
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Sesuai NSPK**	**100%**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**33,33**	**33,33**
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan	180 arsip	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	(sepuluh) Tahun	Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun							
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	180 berkas	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK**	**100,00**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**33,33**	**33,33**
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30	-	-	-	-	-	-
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK**	**90,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.04.2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2021 s.d. 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2021 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2023	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapka	4	-	-	-	-	-	-

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

Tabel 2.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dan Pencapaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d. Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2	**Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
2.23	**Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan**								
2.23.01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**100 %**					**50%**	**50%**
2.23.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinejra Perangkat Daerah**	**100 %**					**50%**	**50%**
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen					2 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokmen	33,33%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen					1 dokumen	33,33%
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan					1 laporan	33,33%
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 laporan						
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan Akhir Tahun**	**100 %**					**100%**	**100%**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	308 org/bln					184	59,74
2.23.01.2.02.0005	**Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan					3 laporan	100%
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat**	**Rata-Rata Nilai Perilaku**	**100 %**					**100%**	**1005**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	Daerah	**Pegawai Perangkat Daerah Berdasarkan Penilaian Kinerja ASN**							
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	36 dokumen	36 dokumen				36 dokumen	100%
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	18 paket	18 paket				18 paket	100%
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	3 paket	-	-	-	3 paket	50%
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 paket	9 paket				9 paket	100%
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan				12 laporan	100%
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.06.0010	**Penatausahaan Arsip Dinamis pada**	Jumlah Dokumen	100	100	-	-	-	100 dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	dokumen	dokumen					
2.23.01.2.06.0011	**Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD**	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	100	100	-	-			
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.07.0005	**Pengadaan Mebel**	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.07.0010	**Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**	**Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.08.0001	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyura	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.08.0003	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Perlengkapan Kantor yang Disediakan							
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Miilik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik**	**100%**	**100%**				**100%**	**100%**
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	umlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	27 unit	27 unit				100%	100%
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 unit	6 unit				6 unit	100%
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 unit	12 unit				12 unit	100%
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	3 unit				3 unit	100%
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	18 unit	18 unit				18 unit	100%
2.23.02	**Program Pembinaan Perpustakaan**	**Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun**	**60,00%**	**37,07%**				**37,07%**	**61,37%**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan **Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk** **Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk**	**7,09%** **Rasio** **Rasio**	**%**				**%** **Rasio** **Rasio**	**%** **%** **%**
2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat**	**60,00%**					**%**	**%**
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	3 layanan					3 layanan	100%
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	30 perpus					30 perpus	100%
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	10 eks					eks	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	300 perpus					450 perpus	%
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	15 perpus					15 perpus	100%
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150 orang		-	-	-	Orang	%
2.23.02.3.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	6 layanan		-	-	-	6 layanan	100%
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	9.000 eks					Eks	%
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk	9.000 eks					Eks	%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan							
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	3 dokumen		-	-	-	3 dokumen	100%
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten**	**100%**					100%	100%
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	33 lokus		-	-	-	33 lokus	100%
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	11 orang	-	-	-	-	-	-
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	1 perpustakaan	-					
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	1 orang	-					

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**100**					**200**	**66,66**
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan**	**100**					**200**	**66,66**
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarkat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20	-	20	10	50,00		
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20	-	20	10	50,00	20	100,00
2.24	**Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan**								
2.24.02	**Program Pengelolaan Arsip**	**Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional**	**85,00**	**-**	**65,00**	**38,46**	**84,80**	**75,00**	**88,23**
2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Aktif dan In-Aktif yang Telah Dibuatkan Daftar Arsip**	**100,00**	**-**	**100**	**75**	**75,00**	**100**	**58,33**
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	90	-	20	20	100,00	45	50,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	90	-	20	20			
2.24.02.2.02	**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Arsip Statis yang Telah Dibuatkan Daftar Sarana Temu Balik**	**100**	**-**	**-**	**-**	**-**	**33,33**	**33,33**
2.24.02.2.02.02	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	Jumlah dan Jenis Arsip Statis yang Diakuisisi, Diolah, Dipreservasi dan Diakses	195	-	-	-	-	150	76,92
2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Arsip yang Dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**66,66**	**66,66**
2.24.02.2.03.01	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah Sarana Layanan Informasi Kearsipan yang Diadakan	2	-	-	-	-	-	-
2.24.02.2.03.02	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Sosialisasi/Bimtek/Diklat Kearsipan	700	-	200	200	100.00	200	28,57
2.24.03	**Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip**	**Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**33,33**	**33,33**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang Sesuai NSPK**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**33,33**	**33,33**
2.24.03.2.01.0001	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	180	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.01.0002	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	180	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.02	**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip dari Bencana dengan NSPK**	**100**	**-**	**100**	**100**			
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	180	-	-	-			
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	180	-	-	-			
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah yang Digabung dan/atau**	**100,00**	**-**	**100**	**100**	**100,00**	**33,33**	**33,33**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	Desa/Kelurahan	**Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kabupaten dengan NSPK**							
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	30	-	-	-	-	-	-
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media dengan NSPK**	**100,00**	**-**	**100**	**100**	**100,00**		
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	30	-	-	-	-		
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan	30	-	-	-	-		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
		Keabsahan Arsip							
2.24.03.2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK**	**100,00**	**-**	**100**	**100**	**100,00**		
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	30	-	-	-	-		
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	30	-	-	-	-		
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	30	-	-	-	-		
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK**	**90,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.04.2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK**	**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disusun dan Ditetapka	4	-	-	-	-	-	-
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan	4	-	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program *(intermediate outcomes)*/ Kegiatan *(outcomes)dan Sub Kegiatan (output)*	Target Kinerja Capaian Program Perubahan Renstra Tahun 2024 s.d. 2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s.d. Tahun 2024	
					Target Renja Tahun 2024	Realisasi Renja Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d. Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	Tertutup	Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup							

Sumber : Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai Tabel II.1.a dan Tabel II.1.B di atas, untuk urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar bidang perpustakaan dan kearsipan telah mempunyai program, kegiatan dan sub kegiatan dan indikator cukup jelas (SMART)

Adapun lebih rincinya akan diuraikan sebagai berikut :

1. **Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.**

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1.c
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Porgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja s.d Tahun 2024

Indikator Program, *(outcome), (intermediate outcome)* Sub Kegiatan *(output)*		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.	INDIKATOR PROGRAM:				
1.1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	35,00	26,44	75,54
1.2	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persen	5,91	7,04	119,12
1.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.1	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	35,00	25,44	75,54
1.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.1.1	Jumlah dan Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	1	1	100,00
1.1.2	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00
1.1.3	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dibina	Unit	50	50	100.00
1.1.4	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Khusus yang Dibina	Unit	22	22	100.00
1.1.5	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Dihibahkan	Eksamplar	1.000	1.000	100,00
1.1.6	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diadakan dan Diolah	Eksamplar	2.000	2.000	100.00
1.2	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.2	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30,00	-	-
1.2.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.2.1	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	200	-	-

Indikator Program, *(outcome), (intermediate outcome)* Sub Kegiatan *(output)*		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
2.	INDIKATOR PROGRAM:				
2.1.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
2.1	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
2.1.1	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	28	28	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

2. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1.c
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Porgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang memenuhi target kinerja s.d Tahun 2024

Indikator Program, *(outcome), (intermediate outcome)* Sub Kegiatan *(output)*		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.	INDIKATOR PROGRAM:				
1.1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	35,00	26,44	75,54
1.2	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persen	5,91	7,04	119,12
1.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.1	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	35,00	25,44	75,54
1.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.1.1	Jumlah dan Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	1	1	100,00
1.1.2	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00
1.1.3	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dibina	Unit	50	50	100.00
1.1.4	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Khusus yang Dibina	Unit	22	22	100.00
1.1.5	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Dihibahkan	Eksamplar	1.000	1.000	100,00
1.1.6	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diadakan dan Diolah	Eksamplar	2.000	2.000	100.00
1.2	INDIKATOR KEGIATAN:				

Indikator Program, *(outcome), (intermediate outcome)* Sub Kegiatan *(output)*		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.2	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30,00	-	-
1.2.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.2.1	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	200	-	-
2.	INDIKATOR PROGRAM:				
2.1.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
2.1	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
2.1.1	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	28	28	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

3. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel II.1.c
Target dan Realisasi Indikator Kinerja Porgram, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang melebihi target kinerja s.d Tahun 2024

Indikator Program, *(outcome), (intermediate outcome)* Sub Kegiatan *(output)*		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.	INDIKATOR PROGRAM:				
1.1.	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Persen	35,00	26,44	75,54
1.2	Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional	Persen	5,91	7,04	119,12
1.1	INDIKATOR KEGIATAN:				
1.1	Persentase Pemanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Persen	35,00	25,44	75,54
1.1.1	INDIKATOR SUB KEGIATAN:				
1.1.1	Jumlah dan Jenis Layanan Perpustakaan Elektronik yang dikembangkan dan dipelihara	Aplikasi	1	1	100,00
1.1.2	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dikembangkan	Unit	2	2	100,00
1.1.3	Jumlah dan Jenis Perpustakaan yang Dibina	Unit	50	50	100.00

Indikator Program, *(outcome), (intermediate outcome)* Sub Kegiatan *(output)*		Satuan	Target	Realisasi	Capain (%)
1		2	3	4	5
1.1.4	Jumlah dan Jenis Perpustakaan Khusus yang Dibina	Unit	22	22	100.00
1.1.5	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Dihibahkan	Eksamplar	1.000	1.000	100,00
1.1.6	Jumlah dan Jenis Bahan Pustaka yang Diadakan dan Diolah	Eksamplar	2.000	2.000	100.00
1.2	**INDIKATOR KEGIATAN:**				
1.2	Cakupan Layanan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persen	30,00	-	-
1.2.1	**INDIKATOR SUB KEGIATAN:**				
1.2.1	Jumlah Peserta Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Orang	200	-	-
2.	**INDIKATOR PROGRAM:**				
2.1.	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1	**INDIKATOR KEGIATAN:**				
2.1	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan	Persen	100	100	100
2.1.1	**INDIKATOR SUB KEGIATAN:**				
2.1.1	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan dan Didayagunakan	Naskah	28	28	100

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegatan

   Target tidak disesuaikan dengan jumlah anggaran
   Jadwal tidak dapat ditentukan
   Jumlah arsip yang perkirakan terdapat perbedaan
   Perencanaan dan penganggaran yang bersinergi dan sinkron

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

   Tidak tercapainya target kinerja program
   Kinerja dinas tidak sesuai dengan apa yang direncanakan
   Mempengaruhi nilai SAKIP Dinas
   Pencapaian program renstra maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dapat terencana dan teranggarkan, sehingga atat kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

   Penganggaran disesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan
   Anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan
   Anggaran disesuaikan dengan kapasitas sdm

Perencanaan dan penganggaran di sesuaikan dan disinkronkan dengan target
Peningkatan kapasitas aparatur perencanaan, penganggaran dan bidang teknis

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun pada Tahun 2021 s.d. 2024 dalam dalam hal capaian kinerja mengalami peningkatan. Perumusan Capaian kinerja tersebut dilakukan koordinasi dan sinergi dengan program dan kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi dan Perpusnas Republik Indonesia serta Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).

Proses Pencapaian Kinerja pembangunan daerah khususnya urusan perpustakaan dan kearsipan di Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan dengan pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan ekternal dilakukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas layanan perpustakaan, baik kapasitas dan aksesbilitas;
2. Peningkatan gemar membaca;
3. Penguatan tertib arsip;
4. Pembentukan Jaringan Informasi Kearsipan Daerah;
5. Pelaksanaan koordinasi daan konsultasi dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip dengan instansi pemerintah/daerah;
6. Pengembangan pendataan dan pengelolaan arsip;

Adapun pendekatan internal dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Membangun pusat data perpustakaan dan kearsipan yang berisi jumlah lembaga dan sumber daya secara up to date sebagai bahan pembinaan;

2. Membangun sistem layanan perpustakaan dan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
3. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi dan kerjasama dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi.

2. Permasalahan dan hambatan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Sebelum menguraikan permasalahan dan hambatan dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah akan diuraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, Peraturan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.

Tugas Pokok dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan urusan bidang kearsipan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan
3. Pelakanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan.

4. Pelaksanaan administrasi Dinas dan.
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sedangkan Uraian Tugas Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan program kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan berdasarkan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. Mendistribusikan dan Mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
3. Memantau, membina dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. Mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
5. Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Dinas dengan SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
7. Melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan keepegawaian lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
8. Merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
9. Menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan;
10. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengolahan, layanan dan pelestarian bahan perpustakaan;
11. Merumuskan kebijakan bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca;
12. Merumuskan bidang pengelolaan kearsipan;

13. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
14. Mengkonsultasikan dan mengoordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
15. Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah atau nonpemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi;
16. Melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan dan
18. Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai struktur organisasi yang tercantum dalam susunan perangkat dan tata kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas.
2. Sekretariat, terdiri dari:
   (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
   (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Pengolahan, Layanan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, terdiri dari:
4. Bidang Pengembangan Perpustakaan dan Pembudayaan Kegemaran Membaca, terdiri dari:
5. Bidang Kearsipan, terdiri dari:

6. Jabatan Fungsional.

Berdasarkan hasil analisis permasalahan untuk masing-masing urusan sesuai dengan kondisi obyektif pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang dan analisis lingkungan strategis periode sebelumnya, maka identifikasi permasalahan-permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

Urusan Perpustakaan

a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung perpustakaan;
b. Minimnya pendanaan untuk pengembangan perpustakaan
c. Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan
d. Belum adanya Tenaga Fungsional Pustakawan
e. Terbatasnya bahan pustaka dan kurang bervariasi
f. Masih rendahnya profesionalisme dan kompetensi pengelola perpustakaan
g. Masih rendahnya kualitas layanan perpustakaan berbasis teknolgi informasi dan komunikasi
h. Rendahnya Minat dan Budaya Baca di masyarakat.

Urusan Kearsipan

a. Kurangnya Sarana dan prasarana pengelolaan dan penyimpanan arsip.
b. Rendahnya Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya arsip.
c. Belum tertatanya arsip-arsip yag berada di OPD sesuai kaidah kearsipan.
d. Belum terlaksananya sistem kearsipan di setiap OPD.
e. Belum terwujudnya unit kearsipan di setiap SKPD, sesuai amanah UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
f. Image Penempatan pegawai pada kearsipan dipandang relatif rendah.

g. Masih rendahnya Profesionalisme dan kompetensi pengelola kearsipan.

h. Masih rendahnya alokasi anggaran untuk pengembangan kearsipan.

i. Masih rendahnya kualitas layanan kearsipan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

j. Belum optimalnya Pembinaan kearsipan di SKPD yang disebabkan oleh kurangnya Tenaga Fungsional Kearsipan (Arsiparis).

3. Dampak Pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap pencapaian visi dan misi Bupati, NSPK, SPM dan SDGs *(Suistanable Development Goals)*

Permasalahan dan hambatan tersebut di atas secara tidak langsung akan berdampak terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Sidenreng Rappang khususnya Misi I yaitu Meningkatkan aksesbilitas dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan. Misi ini terkait dengan peningkatan minat dan budaya baca masyarakat. Pencapaian Misi I akan bermanfaat apabila minat dan budaya baca masyarakat. Peningkatan kualitas hidup masyarakat akan berdampak ketika indeks atau nilai budaya baca meningkat. Pendekatan Kualitas hidup masyarakat perlu dikaji dalam berbagai aspek kehidupan baik dari segi ekonomi, politik, agama maupun hal lain yang terkait dengan kehidupan bermasyarakat. Di samping itu akan berdampak pula pada pencapaian Program Perpusnas RI yaitu peningkatan minat dan budaya baca akan menurun yang berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pada semua aspek kehidupan dan Program ANRI yaitu pengelolaan Kearsipan tidak berjalan optimal yang ujung-ujungnya berdampak proses akuntabilitas pengelolaan kearsipan secara nasional.

4. Tantangan dan Peluang Peningkatan Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Analisis terhadap Renja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), Renstra Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Propinsi Sulawesi Selatan, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS, yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan dalam urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan Lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Lima Tahun mendatang.

Analisis atas kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Kekuatan (strengths)

a. Bertambahnya Jumlah Perpustakaan pada perguruan Tinggi dan adanya beberapa penggiat literasi, perpustakaan Masjid serta Taman Bacaan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berimplikasi pada meningkatnya pilihan tempat berkunjung bagi masyarakat. Asumsinya, semakin banyak pilihan kunjungan akan berdampak pada meningkatnya kunjungan dan minat baca masyarakat.
b. Jumlah Khasanah arsip yang mendukung percepatan pembangunan disemua sektor.
c. Tersebarnya perpustakaan di kecamatan, desa, kelurahan dan perpustakaan keliling.

Kelemahan (weaknesses)

a. Belum adanya layanan perpustakaan yang berstandar Nasional
b. Masih rendahnya minat baca kunjung masyarakat ke Perpustakaan
c. Belum tercipta sinergitas antar pustakawan, penggiat literasi dan pemerhati minat baca
d. Kurang SDM Kearsipan dari kuantitas dan kualitas

e. Belum maksimalnya perhatian atas fungsi dan urgensi arsip
f. Belum adanya Jaringan Informasi Sistem Kearsipan

Tantangan (threats)

a. Masih rendahnya minat dan budaya baca masyarakat
b. Bidang kearsipan tidak secara langsung menyetuh kebutuhan dasar manusia.
c. Keberadaan Lembaga Perpustakaan belum dipandanag sebagai pendukung utama peningkatan pendidikan dan lembaga kearsipan belum dpandang sebagai sumber referensi, informasi dan penelitian.
d. Keterbatasan Sumber Daya Perpustakaan dan Kearsipan
e. Profesionalisme tenaga perpustakaan dan kearsipan masih rendah.

Peluang (opportunities)

a. Besarnya komitmen pemerintah dalam peningkatan dan pengembangan peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.
b. Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan perpustakaan dan kearsipan.
c. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap bahan bacaan.
d. Adanya Mobil Perpustakaan Keliling yang mudah diakses oleh masyarakat.
e. Desentralisasi dan otonomi daerah;
f. Perkembangan teknologi;
g. Keterbukaan infromasi.

5. Formulasi/Penentuan Isu-Isu Penting dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas.

Dalam menentukan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang ada beberapa hal yang dijadikan acuan antara lain :

a. Gambaran Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan. Sebagai organisasi pelayanan publik, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan memberikan pelayanan prima, sehingga semua pihak yang berkepentingan terhadap Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merasa puas atas pelayanan kepada pemustaka. Di dalam melaksanakan tugas untuk memberikan pelayanan prima tentunya tidak lepas dari adanya hambatan maupun tantangan, namun berbagai upaya dilakukan dalam rangka pembenahan dan pengembangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan untuk menjadi sumber informasi, agen perubahan dan pusat peradaban.

b. Sasaran Jangka Menengah pada Renstra Kementerian/Lembaga/OPD Provinsi.

Dalam menyusun Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang, tentunya tidak lepas dari Renstra Lembaga Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan. Renstra PNRI, ANRI dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan menjadi acuan bagi Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sesuai Uraian tersebut di atas maka dapat ditentukan isu-isu strategis yang akan dilaksanakan dalam periode Renja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1) Pemetaan kondisi perpustakaan lingkup Kabupaten Sidenreng Rappang perlu mendapatkan prioritas agar dapat diketahui permasalahan dan solusi pengembangan perpustakaan tersebut.
2) Program budaya baca masyarakat Sidenreng Rappang. Rendahnya minat baca akibat dari persoalan literasi perlu segera dibangun melalui sinergi dengan institusi Pendidikan dan para penggiat literasi serta pemerhati pengembangan minat dan budaya baca
3) Peningkatan budaya gemar membaca melalui penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat
4) Peningkatan kualitas layanan perpustakaan yang berbasis teknologi informasi baik dari segi portal web, sistem layanan dan partisipasi dalam media sosial.
5) Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Perpustakaan dan kearsipan
6) Peningkatan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan untuk memenuhi keinginan dan kebutukan pemustaka dan pengguna arsip.
7) Peningkatan penataan dan pengelolaan kearsipan secara professional.
8) Pembangunan Depo Arsip sesuai standar tipologi.
9) Peningkatan Penyelenggaraan Kearsipan lingkup Pemerintah daerah.

Di samping itu isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Pengelolaan Arsip secara Baku bagi semua Instansi Pemerintah dan swasta perlu pengembangan.
2. Pengelolah Arsip perlu peningkatan Sumber Daya dan Pemahaman yang lebih mendalam dalam proses Pengembangan Kearsipan.
3. Menjadikan Kantor Arsip sebagai pusat informasi yang handal dan berbasis teknologi
4. Peningkatan Minat Baca pada para Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat pada umumnya perlu penanganan yang lebih komprehensif.
5. Perlunya Pengembangan Umum Daerah, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa/Kelurahan
6. Setiap Rumah Tangga selayaknya memiliki Perpustakaan keluarga
7. Peningkatan Minat Baca dalam keluarga perlu penanganan yang lebih komprehensif.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Program pada dasarnya merupakan upaya implementasi strategi organisasi yang sekaligus merupakan penjabaran rinci tentang langkah yang diambil untuk menjabarkan kebijakan termasuk didalamnya proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang akan digunakan.

Dalam rangka mengimplementasikan dan melaksanakan kebijakan serta mengatasi permasalahan yang terjadi dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang merencanakan dan merumuskan Perubahan Rencana Kerja (Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif) sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan penjabaran kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Adapun program yang dirumuskan untuk mendukung kebijakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
b. Program Pembinaan Perpustakaan
c. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno
d. Program Pengelolaan Arsip
e. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

2. Kegiatan

Kegiatan pada dasarnya merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan untuk menghasilkan keluaran *(ouput)* dalam rangka mencapai hasil *(outcome)* suatu program.

Dalam rangka menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merencanakan Kegiatan sebagai berikut :

a. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
e. Administrasi Umum Perangkat Daerah
f. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
g. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
h. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
j. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
k. Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota
l. Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
m. Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota
n. Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota
o. Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota
p. Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun
q. Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota
r. Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan
s. Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota

t. Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota.

Adapun Tabel Perubahan Rencana Kerja (Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Indikator Kinerja dan Pendanaan Indikatif) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.1 sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				7.277.191.928				4.791.249.000	
2.23	Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				7.177.191.928				4.751.249.000	
2.23.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pangsid	100%	3.877.191.928	ASN/ NON ASN	Pangsid	100%	3.877.191.928	ASN/ NON ASN
2.23.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinejra Perangkat Daerah	Pangsid	100%	14.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	100%	14.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangsid	2 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	2 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan	Pangsid	1 dokumen	2.000.0000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Laporan Hasil Koodinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD								
2.23.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Laporan Keuangan**	**Pangsid**	**100%**	**2.015.771.928**	**ASN/NON ASN**	**Pangsid**	**100%**	**2.120.949.000**	**ASN/NON ASN**
2.23.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangsid	308 org/bln	2.013.771.928	ASN/NON ASN	Pangsid	308 org/bln	2.120.949.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangsid	1 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Rata-Rata Nilai Perilaku**	**Pangsid**	**100%**	**5.000.000**	**ASN/NON ASN**	**Pangsid**	**100%**	**5.850.000**	**ASN/NON ASN**
2.23.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Pangsid	1 dokumen	3,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	2.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Pangsid	1 dokuemn	2,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	3.850.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pangsid**	**100%**	**517.420.000**	**ASN/NON ASN**	**Pangsid**	**100%**	**110.150.000**	**ASN/NON ASN**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangsid	6 paket	50,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 paket	3.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan kantor yang Disediakan	Pangsid	6 paket	50,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 paket	15.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pangsid	6 paket	50.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 paket	5,000,000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi KunjunganTamu	Pangsid	12 laporan	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 laporan	2.150.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangsid	24 laporan	61.420.000	ASN/NON ASN	Pangsid	24 laporan	85.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Pangsid	1 dokumen	1,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	1 dokumen	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasisi Elektronik pada SKPD	Pangsid	2 dokumen	300.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	2 dokumen	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pangsid**	**100%**	**1.050.000.000**	ASN/NON ASN	**Pangsid**	**100%**	**0**	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel Yang Disediakan	**Pangsid**	**6 unit**	**300,000,000**	ASN/NON ASN	**Pangsid**	4 unit	**0**	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnaya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakam	Pangsid	4 unit	500.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	4 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pangsid	6 unit	250.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	6 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan**	**Pangsid**	**100%**	**125.000.000**	ASN/NON ASN	**Pangsid**	**100%**	**153.500.000**	ASN/NON ASN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pemerintah Daerah								
2.23.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangsid	12 laporan	3,000,000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pangsid	12 laporan	90.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 lapora	75.500.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Pangsid	4 laporan	2.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	4 laporan	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Pangsid	12 laporan	30.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 laporan	78.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pangsid**	**100%**	**150.000.000**	ASN/NON ASN	**Pangsid**	**100%**	**97.920.000**	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Pangsid	12 unit	130.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 unit	57.920.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangsid	2 unit	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	2 unit	0	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangsid	12 unit	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 unit	5.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangsid	2 unit	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	2 unit	35.000.000	ASN/NON ASN
2.23.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangsid	12 unit	5.000.000	ASN/NON ASN	Pangsid	12 unit	0	ASN/NON ASN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.23.02	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase Pengunjung Perpustakaan per Tahun	Sidrap	50,76%	3.270.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	60,00%	2.418.880.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
		Persentase Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Sidrap	75,20%		MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	5,09%		MASYARAKAT SECARA UMUM
		Rasio Ketercukupan Tenaga Perpustakaan dengan Penduduk	Sidrap	Rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	Rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM
		Rasio Ketercukupan Koleksi Perpustakaan dengan Penduduk	Sidrap	1,60 rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	1,70 rasio		MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketermanfaatan Perpustakaan oleh Masyarakat	Sidrap	60%	2.860.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	60%	2.131.181.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM: Information Technology Service Management)	Sidrap	2 layanan	200.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	2 layanan	300.000.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Sidrap	10 perpustakaan	700.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	10 perpustakaan	1.020.656.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Daerah Tingkat Kabupaten/Kotai yang Dikembangkan	Sidrap	10 eksemplar	10.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	10 eksemplar	55.000.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada	Jumlah Perpustakaan pada	Sidrap	100	600.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	100	12.537.000	PERPUSTAKAA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan		perpustakaan		SD/MI, SMP/MTs		perpustakaan		N SD/MI, SMP/MTs
2.23.02.2.01.0005	Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Sidrap	6 perpustakaan	300.000.000	PERPUSTAKAAN KHUSUS	Sidrap	6 perpustakaan	10.000.000	PERPUSTAKAAN KHUSUS
2.23.02.2.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 orang	200.000.000	PUSTAKAWAN DAN TENAGA PERPUSTAKAAN	Sidrap	100 orang	0	PUSTAKAWAN DAN TENAGA PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	Sidrap	1 layanan	50.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	1 layanan	53.825.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0008	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	Sidrap	5.000 eks.	650.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	5.000 eks.	461.100.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Sidrap	5.000 eks.	50.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	5.000 eks.	200.000.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	1 dok.	100.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	1 dokumen	18.063.000	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca**	**Persentase Ketermanfaatan**	**Sidrap**	**100,00**	**410.000.000**	**MASYARAKAT**	**Sidrap**	**100,00**	**87.699.000**	**MASYARAKAT**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Perpustakaan oleh Masyarakat**				SECARA UMUM				SECARA UMUM
2.23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan serta Masyarakat	Sidrap	11 lokus	275.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	11 lokus	25.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang mendapatkan Penghargaan GBGM Tingkat Kabupaten/Kota	Sidrap	11 org	35.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	**11 orang**	**0**	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasisi Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	Sidrap	4 perpustakaan	50.000.000	PERPUSTAKAAN	Sidrap	**4 perpustakaan**	**62.699.000**	PERPUSTAKAAN
2.23.02.2.02.0005	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	Sidrap	11 org	50.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	11 orang	0	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03	**Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno**	**Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dilestarikan**	**Sidrap**	**100**	**30.000.000**	MASYARAKAT SECARA UMUM	**Sidrap**	**100%**	**30.000.000**	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan**	**Sidrap**	**100%**	**30.000.000**	MASYARAKAT SECARA UMUM	**Sidrap**	**100%**	**30.000.000**	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03.2.01.0001	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Sidrap	4 orang	15.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	4 orang	30.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM
2.23.03.2.01.0002	Pengembangan,Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dilmiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dkembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Sidrap	25 eksemplar	15.000.000	MASYARAKAT SECARA UMUM	Sidrap	25 eksemplar	0	MASYARAKAT SECARA UMUM

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.24.02	Program Pengelolaan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja,Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Sidrap	85%	70.000.000	OPD	Sidrap	85%	40.000.000	OPD
2.24.02.2.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten Kota	Persentase Arsip Aktif dan In-Aktif yang telah dibuatkan Daftar Arsip	Sidrap	90%	70.000.000	OPD	Sidrap	90%	40.000.000	OPD
2.24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	Pangsid	100 berkas	20.000.000	OPD	Pangsid	100 berkas	10.973.000	OPD
2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Sidrap	1 laporan	50.000.000	OPD	Sidrap	1 laporan	29.027.000	OPD
2.24.03	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	Tingkat Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja,Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Sidrap	60%	20.000.000	OPD	Sidrap	60%	0	OPD
2.24.03.2.01	Pemusnahan Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Tingkat Kesesuaian Kegiatan Pemusnahan Arsip yang sesuai NSPK	Sidrap	100%	10.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD
2.24.03.2.01.0003	Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	Sidrap	100 berkas	5.000.000	OPD	Sidrap	100 berkas	0	OPD
2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 *(Sepuluh)* Tahun	Sidrap	100 arsip	5.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/ Kota	Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK	Sidrap	100%	2.000.000	OPD	Sidrap	100%	0	OPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.24.03.2.02.0001	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Sidrap	1 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	1 arsip	0	OPD
2.24.03.2.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Sidrap	1 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	1 arsip	0	OPD
2.24.03.2.03	**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang di gabung dan/atau Dibubarkan dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip PD yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah kecmatan dan desa/kelurahan dengan NSPK**	**Sidrap**	**100%**	**3.000.000**	**OPD**	**Sidrap**	**100%**	0	**OPD**
2.24.03.2.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 daftar	2.000.000	OPD	Sidrap	100 daftar	0	OPD
2.24.03.2.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.04	**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Tingkat kesesuaian kegiatan Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Media dengan NSPK**	**Sidrap**	**100%**	**2.000.000**	**OPD**	**Sidrap**	**100%**	0	**OPD**
2.24.03.2.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai	Jumlah Daftar Auntensisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Keabsahan Arsip yang Dinilai dan dItetapkan								
2.24.03.2.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.05	**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Tingkat kesesuaian kegiatan Pencarian Arsip Statis dengan NSPK**	**Sidrap**	**100%**	**3.000.000**	**OPD**	**Sidrap**	**100%**	0	**OPD**
2.24.03.2.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autenttisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilain dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.03.2.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	Sidrap	100 arsip	1.000.000	OPD	Sidrap	100 arsip	0	OPD
2.24.04	**Program Perizinan Penggunaan Arsip**	**Tingkat Kesesuian Kegiatan Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup dengan NSPK**	**Sidrap**	**100%**	**10.000.000**	**OPD**	**Sidrap**	**100%**	0	**OPD**
2.24.04.2.01	**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Cakupan pelayanan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup**	**Sidrap**	**100%**	**10.000.000**	**OPD**	**Sidrap**	**100%**	0	**OPD**
2.24.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat	Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutp yang	Sidrap	24 SOP	5.000.000	OPD	Sidrap	24 SOP	0	OPD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Tertutup	Disusun dan Ditetapkan								
2.24.04.2.01.0002	Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Sidrap	12 arsip	5.000.000	OPD	Sidrap	12 arsip	0	OPD

BAB IV
P E N U T U P

Bab Penutup Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terbagi menjadi 3 (tiaa) sub bab yaitu : Kaidah Pelaksanaan, Catatan Penting dan Rencana Tindak Lanjut.

4.1 Catatan Penting

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 merupakan suatu dokumen perencanaan pembanguan daerah yang diisyaratkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja, yang selanjutnya disebut Renja, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Startegis (Renstra) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat Rancangan perubahan rencana kerja dan pedanaannya baik yang dilaksanakan langsung oleh Perangkat Daerah maupun yang ditempuh dengan partisipasi masyarakat dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (P-RKPD).

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan publik/masyarakat.

4.2 Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan

pembangunan tahunan perangkat daerah yang merupakan tahun ke 1 (pertama) dari tahapan pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026 Dalam rangka meningkatkan kinerja Perangkat Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan maka proses penyusunannya Renja berlandaskan pada prioritas pembangunan yang akan mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Renja Arsip Nasional Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Renstra Perpusnas RI dan ANRI 2020- 2024, Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2000-2025 dan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026. Keterkaitan antara dokumen-dokumen ini sangat erat dimana kedudukan dokumen yang lebih tinggi ini masih bersifat makro dan dalam peraturan yang ada dokumen yang lebih tinggi menjadi dasar pijakan dalam penjabaran dokumen lainnya secara operasional.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang berfungsi sebagai landasan, pedoman dan acuan resmi bagi Perangkat Daerah sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Adapun fungsi Renja lainnya adalah sebagai bahan evaluasi RKA yang mana untuk memastikan DPA telah disusun berlandaskan Renja dan juga sebagai acuan/pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun dan melaksanakan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan-penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya sadar dan terencana yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah, upaya tersebut pada akhirnya ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan kesejahteraan

masyarakat. Untuk mempercepat capaian target pembangunan maka harus memperhatikan kunci sukses pembangunan Daerah,

Kunci sukses pembangunan daerah adalah perencanaan yang baik, berkualitas , akuntabel dan benar benar dijadikan dasar pelaksanaan. Kualitas suatu rencana pembangunan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasarat dokumen tersebut ditaati oleh seluruh pemangku kepentingan dengan dilandasi oleh komitmen dan konsistensi kebijakan yang tinggi serta menjadi acuan proses selanjutnya. Selain hal tersebut diatas juga diperlukan adanya sikap, mental, tekad, semangat, kejujuran dan disiplin kerja yang tinggi bagi para pelaku pembangunan dan penyelenggara Pemerintah Daerah.

Renjana Kerja sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, berisi tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah dan rencana kerja, pendanaan/pagu indikatif dan prakiraan maju. Dalam rangka keterbukaan dandan transparasi informasi publik, maka Renja agar dipublikasikan dengan tujuan diketahui oleh semua pihak.

Untuk menjamin agar program dan kegiatan masing-masing OPD pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dan dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi alokasi sumberdaya serta meningkatkan transparasi dan akuntabilitas pengelolaan program pembangunan, maka diperlukan instrumen pengendalian dan evaluasi.

Adapun Instrumen pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Dalam tata cara pengendalian tersebut dapat disajikan program dan kegiatan yang sudah direncanakan dengan target target tertentu dan bagaimana pelaksanaan program dan kegiatan tersebut oleh masing masing OPD dan yang dievaluasi tidak hanya kesesuaian antara rencana dengan pelaksanaan saja, akan tetapi mencakup juga tingkat capaian kinerja pada setiap tahapan

pelaksanaannya. Pada tata cara pengendalian tersebut menempatkan OPD pada posisi strategis, dimana OPD mempunyai kewenangan untuk melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dilaksanakan sendiri dan diharapkan apabila terjadi ketidak sesuaian dapat segera diambil langkah tindak lanjut sebagai upaya preventif dan korektif sebelum pelaksanaan program dan kegiatan tersebut menyimpang, sehingga dalam hal ini kemandirian OPD dalam memahami setiap proses dan langkah pengendalian menjadi suatu hal yang penting.

Sehubungan dengan tata cara pengendalian tersebut di atas maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Untuk mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan setiap program dalam rangka koordinasi perencanaan, masing-masing bidang teknis agar menyempurnakan PerubahanRencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2024.
2. Perangkat Daerah dan masyarakat termasuk didalamnya dunia usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang ada di Renja Tahun 2024 dengan sebaik baiknya.
3. Masyarakat luas dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan.
4. Untuk menjaga efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program, wajib melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil- hasil pemantauan secara berkala kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.
5. Pada akhir tahun anggaran 2024, wajib melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian sasaran kegiatan yang sudah ditetapkan, kesesuaian dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, kesesuaian dengan target Renstra serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundangan kesesuaian dengan target Renstra serta kesesuaian dengan ketentuan peraturan

perundangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan peraturan lainnya.

4.3 Rencana Tindak Lanjut

Perubahan Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif dan berbasis pada kepentingan publik/masyarakat.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, diupayakan pelaksanaannya dapat sinergis dengan prioritas-prioritas pembangunan Nasional. Dalam rangka sinergitas dan mengingat kemampuan keuangan daerah sangat terbatas, maka untuk melaksanakan hal tersebut ditempuh dengan cara sharing pembiayaan pembangunan dengan Pemerintah Pusat berupa pendanaan dari APBN maupun sumber dana lainnya.

Kerja keras, semangat, komitmen, partisipasi, konsistensi dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sangat diperlukan dalam pelaksanaan rencana pembangunan daerah, sehingga masing-masing dapat berperan dan bertanggungjawab terhadap proses, hasil dan kinerja pembangunan sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.

Semoga Penyusunan Perubahan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat.

Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

Pangkajene Sidenreng, 8 Juli 2024

Kepala Dinas,

AHMAD, SP., M. Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 197106041998031019



DINAS PERPUSTAKAAN DAN KERASIPAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang.

Perencanaan yang strategis diperlukan dalam menetapkan program maupun kegiatan yang akan direalisasikan di tahun ini. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS. Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Perubahan atas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya di latar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dan perubahan ini juga turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan hukum agar kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun alasan hukum dalam penyusunan perubahan renja adalah:

a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
h) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
i) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
j) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
k) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas.
l) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor XX Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan rencana kerja di tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah di tetapkan sebelumnya, baik dari segi program, kegiatan maupun target kinerjanya, Sehingga tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup bisa terealisasi dengan optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan /bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel III.1.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksananaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 terdiri dari 3 Program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar **Rp. 11.181.758.000,-** dengan rincian belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.482.148.000,-** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 8.600.984.900,-** dan belanja modal **Rp. 1.735.746.100,-**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdiri :

1. **Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50%.
   2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 25%.
   3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%.
   4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 35%
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 40%
7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,25%
8) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
9) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 40%
10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,32%
12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 25%
13) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 24%

14) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 30%
15) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 45%
16) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
17) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 60% yang terealisasi 48%
18) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 72% yang terealisasi 45%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. **Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:**
   1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatannnya.
   2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
   3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
   4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD**

   Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yaitu :
   a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
   b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
   c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:**
   a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.

b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupuh SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja capaian program (Renstra Pertangkat Daerah) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Targer Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasii Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7)	10=9/4*100)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

2	**1 1**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan**	100	100	100	50	50	100	100
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 1**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan**	100	100	100	50	50	100	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	3	1	0.3	4	44
2	1 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	1	1	1	4	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	1	0,5	3	100

2	1 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1	1	2	33.3
2	1 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	0	0	2	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	5	1	0,2	6	40
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Administrasi Keuangan**	100	100	100	25	25	100	100

2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2800	12	14	3	0,53	15	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	7	1	0	0	7	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	13	20	5	0,25	18	30
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100	100	100	20	20	100	100

2	1 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	453	151	151	9	0,0596026 5	160	714
2	1 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerash dan keluar Daerah	600	135	200	30	0,58	165	314
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100	100	100	20	20	100	100
2	1 1	0 1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30		10	0	0	0	0
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	100	100	35	35	100	100
2	1 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050		350	50	0,143	100	28,57
2	1 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41

2	1 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	100	100	40	40	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	100	0	0	12	12
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	53	100	0	0	53	143

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	1	100	0	0	1	1
2	1 1	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	24	100	0	0	24	24
2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	**1 1**	**0 2**	**2.0 1**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH**	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	1 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	1	2	0	0	1	50

2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup**	100	40	100	40	40	80	100
2	**1 1**	**0 3**	**2.0 1**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**	100	100	100	40	40	100	100
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	1	2	0	0	1	16.6
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	6		2	0	0	1	50
2	**1 1**	**0 3**	**2.0 2**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	100	100	100	0	0	100	100

2	1 1	0 3	2.0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3	2	1	0	0	2	66
2	1 1	0 3	2.0 2	0 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6	0	1	0	0	0	181,2
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan**	20	18	18,19	0,32	1,76	18,32	100
2	**1 1**	**0 4**	**2.0 1**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	100	100	100	0,32	0,32	100	100
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24	1	8	11,75	147	12,75	42,2

					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	0	1	0	0	0	0
2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	100	100	30	49	100	100	100
2	**1 1**	**0 5**	**2.0 1**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**	100	100	0,25	25	100	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	4	5	0	0	4	26

2	**1 1**	**0 5**	**2.0 1**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah**	100	100	100	24	24	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	15		5	3	0,6	3	20

2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	100	100	100	30	30	100	100
	1 1	**0 6**	**2.0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin**	100	100	100	30	30	100	100
2	1 1	0 6	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56		24	0	0	0	0

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150	36	50	11	0,31	47	1,31
2	**11**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	100	100	100	45	45	100	100
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**	100	100	100	45	45	100	100

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3	0	1	0	0	0	0
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	100	100	100	100	100	200	100
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup**	100	100	100	0	0	100	100
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang	48	16	5	0	0	100	50

					Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							
2	**1 1**	**1 0**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**	100	100	100	48	48	100	100
2	**1 1**	**1 0**	**2.0 1**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan**	100	100	60	48	80	100	100
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	15	0	10	7	0,7	7	46

2	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Peresentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota**	100	70	73	45	61,64	100	100
2	**1 1**	**1 1**	**2.0 1**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah**	100	100	72	45	62,5	100	100
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	24	0	1	6	0,67	6	33,3
2	1 1	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	74	0	24	0	0	0	0,22

2	1 1	1 1	2.0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4	3	0	0	0	3	75

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Partisipasi/minat atau kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Kapasitas TPA sudah over
3. Terjadi Hambatan Aliran Air Buangan pada Saluran Drainase Sampah, Gulma dan Sedimen yang menghambat aliran air buangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat
4. Sosialisasi tentang kriteria penilaian adipura
5. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam program penanaman pohon
6. Kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
7. Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2024 program dan kegiatan berdasarkan pada RPJMD Perubahan 2019-2023 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel III.I adalah sebagai berikut:

1. **Program Dinas Lingkungan Hidup adalah :**
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
    e. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
    h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    j. Program Pengelolaan Persampahan

2. **Kegiatan**

    Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Lingkungan Hidup merencanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

    a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
   a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
   a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
   b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
   a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2) Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
   b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
   a) Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

j. Program Pengelolaan Persampahan

1) Pengelolaan Sampah

a) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali

b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n**	**100%**	**4.504.625.600**			**100%**	**4.562.500.600**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan**		100%	51.770.100			100%	48.259.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	

2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	

2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Dokumen	4.270.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Dokumen	4.270.100	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Laporan	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Laporan	16.489.000	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Administrasi Keuangan**		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	

2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	7 Paket	3.402.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	7 Paket	3.402.000	

							Kelurahan				Kelurahan			
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerash dan keluar Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**		100%	21.125.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	61.386.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	21.125.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	61.386.000	

2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	400 Laporan	5.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	400 Laporan	5.000.000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	74.040.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	74.040.000	

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	315.320.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	315.320.000	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		100%	204.070.000			100%	204.070.000	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	42.400.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	42.400.000	

2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 Unit	130.203.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 Unit	130.203.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	15.000.000	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan alat dan mesin lainnya		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	28 Unit	16.467.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	28 Unit	16.467.000	

2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**		100%	115.725.000	Masyarakat		100%	615.725.000	Masyarakat
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH**		100%	115.725.000			100 Persen	115.725.000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	115.725.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	115.725.000	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraa n KLHS**		100%	170.000.000			100 Persen	500.000.000	

.	1 1	0 2	2. 0 2	0 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000	
2	1 1	0 3	2. 0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000	
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup**		60%	122.959.600			60%	90.709.600	

2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**		100%	80.000.000			100%	48.594.000	
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60.000.000			2 Dokumen	28.594.000	

2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**		100%	42.959.600			100%	42.115.600	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 laporan	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 Laporan	21.612.500	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 Titik	22.959.600		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Titik	20.503.100	

2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan**		20%	1.484.781.600			20%	1.484.781.600	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		100%	1.484.781.600			100%	1.484.781.600	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100	
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	3 Lokasi	22.069.500		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	1 Lokasi	22.069.500	

							Kelurahan				Kelurahan			
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	88 Persen	30.000.100			88 Persen	30.000.100	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100%	5.000.100			100%	5.000.100	

2	11	05	2.01	01	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Laporan	5.000.100		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Laporan	5.000.100	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah**		100%	25.000.000	Usaha/Kegiat an		100%	25.000.000	Usaha/Ke giatan

2	11	05	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000	

2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**		100%	45.000.000			100%	45.000.000	
2	**1 1**	**0 6**	**2. 0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin**		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan

2	1 1	0 6	2. 0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	20.000.000	
2	1 1	0 6	2. 0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	35 Laporan	25.000.000			50 Laporan	25.000.000	

2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD**	100%	15.000.000			100%	15.000.000	
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**		100%	15.000.000	Masyarakat		100%	15.000.000	Masyarakat

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**		100%	74.937.500			100%	74.937.500	

2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup**		100%	74.937.500			100%	74.937.500	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Entitas	74.937.500		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Entitas	74.937.500	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**		60%	25.000.000			60%	25.000.000	

2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan**		100%	25.000.000	Masyarakat		100%	25.000.000	Masyarakat
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Dokumen	25.000.000	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kot a yang Ditindaklanjuti/ Ditangani**		72,50%	7.034.077.6 00			72,50%	7.029.577.6 00	

2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah**		100%	7.034.077.600			100%	7.029.577.600	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	1.695.390.700		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.529 Ton	1.676.259.700	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.673.992.900		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.688.623.900	

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Unit	1.664.694.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Unit	1.664.694.000	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan bidang LIngkungan Hidup sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19690507 199903 1 010

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Dua Pitue memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tanrutedong, 06 Agustus 2024
CAMAT DUA PITUE

ANDI SAMMANG, SH. MH
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP : 19711030 200212 1 005

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 2

I.3. Maksud dan Tujuan . 4

I.4. Sistimatika Penulisan 5

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 6

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 18

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan 21

BAB IV. PENUTUP 26

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Dua Pitue mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Dua Pitue dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004, Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4700);
4. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabuoaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat Daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Adapun tujuan disusunnya Rancangan Perubahan RKPD tahun 2024 adalah untuk:

1. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja (Renja) PD Tahun 2024;
2. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
3. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
4. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan maupun perubahan target capaian indikator makro, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2024, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 12 %.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum terdiri atas kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan yaitu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan telah mencapai tingkat realisasi 65% dari target 100 %.
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub

kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 50% dari target 100 % .

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 25 % dari target 100 %.
5. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang

urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 75 % dari target 100 %.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja program/kegiatan:

1. Pelimpahan sebagaian kewengangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis;
2. Lemahnya pembinaan/koordinasi aparatur, kelurahan tentang kebijakan pemerintah kabupaten;
3. Terlambatnya proses pencairan anggaran program kegiatan yang terkait;
4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanan pembangunan;

Bertitik tolak dari pengertian isu di atas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue, maka isu strategis yang berkembang terhadap Kecamatan Dua Pitue berhasil di observasi dan dihimpun fenomenanya sebagai kebijakan/tindakan perencanaan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor penyebab tersebut sebagai berikut;

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenganan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;

2. Pelayanan prima, kantor kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;
3. Peningkatan kualitas aparatur dan sarana prasarana penunjang. Keberadaan aparatur dan sarana prasarana penunjang merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur dan sarana prasarana penunjang yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dan peningkatan jumlah dan kualitas sarana prasarana penunjang.
4. Peningkatan akses ketetapan waktu dan transparansi pengelolaan keuangan daerah

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel II.1a**.

Tabel II.1a. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Dua Pitue s/d Triwulan II tahun 2024

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2024/REALISASI 2021-2023		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2023	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**6**				**6**	**6**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**6**				**6**	**6**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	10	Urs	10				10	100
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Urs	1				1	100

7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**17,5**				**18**	**18**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**5**				**5**	**5**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	5	Laporan	5				5	100
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**30,0**				**30**	**30**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	200	Lembaga masyrakat	100				100	50
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	8	unit	8				8	100
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10	Org	10				10	100
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan	2				2	100
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**5**				**5**	**5**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**5**				**5**	**5**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Desa	5				5	63
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Desa	5				5	63
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Desa	5				5	63
X					**X**									

X	**XX**				**XX**									
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**	**19**				**19**	**19**
X	XX	01	2.02		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**13**				**13**	**13**
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14	Bln	14				14	100
X	XX	01	2.02	03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	Bln	12				12	100
X	XX	01	2.06		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**27**				**27**	**27**
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14	Bln	12				0	54
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	28	Unit	15				15	54
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	40	Unit	20				20	50
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	-	Unit	0				0	0
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	-	Unit	0				0	0
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	-	Kali	0				0	0
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	140	Kali	140				140	100
X	XX	01	2.07		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**	**6**				**6**	**6**
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	0	Unit	0				0	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	12	Unit	12				12	20

X	XX	01	2.08		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**41**				**41**	**41**
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	700	lbr	100				100	14
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bln	12				12	33
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	36	Bln	12				12	33
X	XX	01	2.09		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**6**				**6**	**6**
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11	Unit	5				5	27
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15	Unit	10				10	67
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit	2				2	30

Tabel II.1b. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Kantor Kecamatan Dua Pitue s/d Triwulan II tahun 2024

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOMES)/ KEGIATAN (INTERMEDIT OUTCOMES)/ SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA OPD) TAHUN 2024/REALISASI 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD S/D TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RESTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN 2023	
										TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	REALISASI RENJA OPD TAHUN 2024	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2024	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RESTRA (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**		**8**	**4**	**50**	**8**	**8**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**		**8**	**4**	**50**	**8**	**8**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	27	Laporan		8	4	50	4	15
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	33	Laporan		8	4	50	4	12

7	**.1**	**.5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100	%		**13,5**	**8,0**	**59**	**14**	**14**
7	.1	.5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	100	%		**12**	**8**	**67**	**12**	**12**
7	.1	.5	201	.8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12	Dokumen		12	8	67	8	67
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**15,0**	**7,5**	**50**	**15**	**15**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**2**	**1**	**50**	**2**	**2**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan		2	1	50	1	50
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**28,0**	**14,0**	**13**	**28**	**28**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan Pembangunan	2	Lembaga masyrakat		3	2	50	2	75
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	6	unit		7	4	50	4	58
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100	Org		100	50	50	50	50
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	2	Laporan		2	1	50	1	17
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**		**8**	**2**	**25**	**8**	**8**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**		**8**	**2**	**25**	**8**	**8**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	8	Dokumen		8	2	25	2	8

7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	8	Dokumen		8	2	25	2	8
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	8	Dokumen		8	2	25	2	8
X					**X**									
X	**XX**				**XX**									
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**		**23**	**12**	**50**	**23**	**23**
X	XX	01	2.02		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	434	org/Bln		392	196	50	196	45
X	XX	01	2.06		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**47**	**24**	**43**	**47**	**47**
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	Paket		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	18	Paket		2	1	50	1	6
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	3	Paket		3	2	50	2	50
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	100	Paket		100	50	0	50	50
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	100	Paket		100	50	50	50	50
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12	Bulan		12	6	50	6	50
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100	Laporan		100	50	50	50	50
X	XX	01	2.07		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**		**3**	**2**	**25**	**3**	**3**

X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	3	Paket		3	2	0	2	0
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	3	Paket		3	2	50	2	10
X	**XX**	**01**	**2.08**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**58**	**29**	**50**	**58**	**58**
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	700	Laporan		150	75	50	75	11
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Laporan		12	6	50	6	17
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	36	Laporan		12	6	50	6	17
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**8**	**4**	**50**	**8**	**8**
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	11	Unit		11	6	50	6	30
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	15	Unit		10	5	50	5	33
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	4	Unit		4	2	50	2	30

\

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Dua Pitue maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah

di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat;

d) Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sabagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur. Pemerintah Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Watang Pulu mempunyai fungsi:

a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.

d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program Kegiatan

Penyusunan program dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Dua Pitue dimana pada tahun 2025 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Predikat Nilai SAKIP dengan nilai 58,80 (CC), persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, persentase pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, dan persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan baik dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan lansung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum
    3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.1. **Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024**

OPD : KANTOR KECAMATAN DUA PITUE

Lembar : 1 dari 4

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**900.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**900.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**900.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**900.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Dua Pitue	8 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	8 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Dua Pitue	8 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	8 Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**50.000.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**80.000.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**50.000.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**100 %**	**80.000.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**

7	01	05	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Dua Pitue	11	Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	12	Laporan	80.000.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	**01**	**03**	**0**	**0**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**384.024.600**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**384.024.600**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**450.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**450.000**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Dua Pitue	2	Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	2	Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**383.574.600**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**	**Kec. Dua Pitue**	**152**	**%**	**383.574.600**	**Masyarakat Kec. Dua PituE**
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan	Kec. Dua Pitue									
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kec. Dua Pitue	2	unit	180.084.600	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	7	unit	180.084.600	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	Kec. Dua Pitue	89	Pokmas/Ormas	203.040.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	100	Pokmas/ormas	203.040.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah kelurahan yang dievaluasi	Kec. Dua Pitue	2	Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE	Kec. Dua Pitue	2	Laporan	450.000	Masyarakat Kec. Dua PituE
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**1.350.000**	**Aparatur Desa Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**1.350.000**	**Aparatur Desa Kec. Dua Pitue**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**1.350.000**	**Aparatur Desa Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**1.350.000**	**Aparatur Desa Kec. Dua Pitue**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue

7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	8	Dokumen	450.000	Aparatur Desa Kec. Dua Pitue
X					**X**											
X	**XX**				**XX**											
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**2.364.025.400**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**2.364.025.400**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	**XX**	**01**	**2.02**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**494.500**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**494.500**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	XX	01	2.02	03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinrja SKPD	Kec. Dua Pitue	1	Laporan	494.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	1	Laporan	494.500	ASN Kec. Dua Pitue
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**1.916.023.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**1.916.023.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Dua Pitue	392	Org/ Bulan	1.916.023.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	392	Org	1.916.023.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**193.825.900**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**193.825.900**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	XX	01	2.06	01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Dua Pitue	12	Paket	421.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12	Paket	421.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	24	Paket	49.799.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	17	Paket	49.799.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Dua Pitue									
X	XX	01	2.06	04	XXX Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	124	Paket	45.697.800	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100	unit	45.697.800	ASN Kec. Dua Pitue

X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Dua Pitue	124	Paket	6.189.600	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100	bln	6.189.600	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Dua Pitue	100	Laporan	20.000.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100	kali	20.000.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Dua Pitue	100	Laporan	71.718.500	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100	Laporan	71.718.500	ASN Kec. Dua Pitue
X	**XX**	**01**	**2.07**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**19.813.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**19.813.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kec. Dua Pitue	2	unit	19.813.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	2	unit	19.813.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.07	10	XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan yang diadakan	Kec. Dua Pitue									
X	**XX**	**01**	**2.08**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**190.336.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**190.336.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Dua Pitue	124	Laporan	4.144.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	100	Laporan	4.144.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Dua Pitue	36	Laporan	60.192.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	36	Laporan	60.192.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Dua Pitue	36	Laporan	126.000.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	12	Laporan	126.000.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**43.533.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**	**Kec. Dua Pitue**	**100**	**%**	**43.533.000**	**ASN Kec. Dua Pitue**
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua Pitue	17	unit	33.580.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	10	unit	33.580.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Dua Pitue	10	unit	4.054.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	10	unit	4.054.000	ASN Kec. Dua Pitue
X	XX	01	2.09	09	XXX Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kec. Dua Pitue	5	unit	5.899.000	ASN Kec. Dua Pitue	Kec. Dua Pitue	4	unit	5.899.000	ASN Kec. Dua Pitue
J U M L A H										**2.800.300.000**					**2.830.300.000**	

BAB IV
PENUTUP

Pada dasarnya seluruh program-program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Dua Pitue dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Dua Pitue.

Perencanaan ini dibuat secara partisifatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholders (pihak yang terkait dan berkepentingan) dikecamatan Dua Pitue. Ruang lingkup perencanaan Pembangunan di kecamatan Dua Pitue ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Strategis (Renstra) dan memperbaiki kejanggalan pada renja di awal tahun maka dilaksanakan Perubahan rencana Kerja (Renja) tahun 2024 pada triwulan II tahun berjalan, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini :

1. Penetapan Status Hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis kesemua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komintmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi Renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggungjawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan didalam Renstra yang sudah dibuat
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikator yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam arti semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi Renstra kesemua pihak

untuk memastikan semua pihak berjalan kearah yang sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan direncana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat.
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Dua Pitue ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Pada hakekatnya perencanaan pembangunan merupakan proses perumusan keputusan dari berbagai alternatif. Berasal dari data dan informasi faktual kemudian menjadi sumber untuk menentukan tujuan yang akan dicapai. Tujuan itu adalah meningkatnya kesejahteraan rakyat yang hanya dapat dicapai melalui tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang spesifik, terukur dan tepat waktu. Perencanaan yang baik dan berkualitas mengadopsi 4 (empat) pendekatan, yaitu pendekatan teknokratis, politis, partisipatif dan Top-Down/Bottom-Up. Pelaksanaan pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun pertama dari pelaksanaan RPJMD Tahun 2024-2026.

Untuk menjamin keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan tahun berjalan, maka perlu disusun Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dan juga merupakan acuan dalam menyempurnakan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024.

Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran diawali dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah, yang ditetapkan dalam beberapa program dan beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

I.2 LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang –undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6542);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan 3Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

17. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 24);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018- 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
21. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Nomor 36)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

RKPD merupakan penjabaran RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2005-2025, dengan mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 serta berpedoman pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 dan Peraturan Daerah

Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Penyusunan Perubahan RKPD ditujukan sebagai upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Oleh karena itu, substansi dokumen ini harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten/kota sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai pedoman untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Tahun 2024, penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2024.

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah mewujudkan konsistensi dan sinergi perencanaan dan penganggaran Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan

dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hubungan Antar Dokumen menjelaskan hubungan Perubahan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya

1.4. Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 .

1.5. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Sekretariat DPRD, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Sekretariat DPRD Tahun 2024 dan Capaian RENSTRA Sekretariat DPRD 2024-2026

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II Sekretariat DPRD Tahun 2024 , mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapian target RENSTRA Sekretariat DPRD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Berisikan uraian mengenai perkembangan tingkat kinerja pelayanan permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam

peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi Program dan kegiatan yang telah ditetapkan dan Pendanaannya

Bab IV Penutup

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II SEKRETARIAT DPRD KAB. SIDRAP TAHUN 2024

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 343 ayat 1 menyatakan bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Selanjutnya dijelaskan pula bahwa Perubahan RKPD menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah dan dapat dilakukan penambahan dan/atau pengurangan kegiatan perangkat Daerah serta target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah. Sedangkan untuk penambahan program karena adanya kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

Hasil pelaksanaan RKPD pada tahun berjalan menjadi sangat penting untuk menilai apakah perlu dilakukan penambahan atau pengurangan kegiatan, pagu indikatif serta pergeseran anggaran dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Triwulan II Tahun 2024, meliputi pagu indikatif dan realisasi anggaran, capaian program kegiatan dan sub kegiatan, capaian kinerja pendanaan, serta rata-rata capaian keluaran dan predikat kinerja yang disajikan berdasarkan perangkat daerah disertai permasalahan, upaya penyelesaian dan rekomendasi pelaksanaan RKPD triwulan selanjutnya

Dari capaian kinerja Triwulan II Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah. Hal ini dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang

dialokasikan pada triwulan II, pelaksanaannya tertunda pada triwulan III dan atau IV . Untuk lebih jelasnya mengenai Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Kab. Sidrap s/d Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 1

No	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPDTahun lalu (2023)		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPDTahun berjalan yang dievaluasi (2024)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPDyang Dievaluasi		Realisasi kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (Ahkir Tahun pelaksanaan Renja OPD)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (%)		Unit OPD penanggung jawab	Status Capaian Kinerja Tahun Berjalan 2024
											I		II		III		IV									
1	2	3	4	5	6		7		8		9		10		11		12		13=9+10+11+12		14=7+13		15=14/6x100			
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD			Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu (%)	100	27,983,024,091	0	0	100	12,041,988,500																
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD (%)	100,00	27.983.024.091	0,00	0	100,00	12.041.988.500									0	6,926,250,305						Belum Tercapai
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya (%)	100,00	1.993.544.000	0,00	0	100,00	580.880.000	0%%	0	0%%	165,441,996					0,00%	165,441,996	4,17%	165.441.996	**4,17%**	**8,30%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	313,930,000	0	0	1	83,136,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	249,408,000	0	0	1	97,607,000	0	0	0	8,432,592					0	8,432,592	0	8,432,592	**0,00%**	**3,38%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	1,420,206,000	0	0	4	368,767,000	2	0	0	157,009,404					2	157,009,404	2	157,009,404	**16,67%**	**11,06%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	10,000,000	0	0	1	31,370,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana (%)	100,00	651.000.000	0,00	0	100,00	217.000.000	0%%	0	0%%	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	139,500,000	0	0	1	46,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	142,500,000	0	0	1	47,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	193,500,000	0	0	1	64,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana (%)	100,00	443.211.000	0,00	0	100,00	147.737.000	0%%	0	0%%	67,499,500					0,00%	67,499,500	20,83%	67.499.500	**20,83%**	**15,23%**	Sekretariat DPRD	

		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	50,127,000	0	0	1	16,709,000	0	0	1	13,231,000					1	13,231,000	1	13,231,000	**33,33%**	**26,39%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	32,625,000	0	0	1	10,875,000	0	0	1	7,732,000					1	7,732,000	1	7,732,000	**33,33%**	**23,70%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	52,686,000	0	0	1	17,562,000	0	0	1	13,388,000					1	13,388,000	1	13,388,000	**33,33%**	**25,41%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	32,625,000	0	0	1	10,875,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	32,400,000	0	0	1	10,800,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasi Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	30,000,000	0	0	1	10,000,000	0	0	1	4,312,500					1	4,312,500	1	4,312,500	**33,33%**	**14,38%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
1	Meningkatnya fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD			Persentase pelaksanaan program kerja tepat waktu (%)	100	27,983,024,091	0	0	100	12,041,988,500																
		4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang Disahkan Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD (%)	100,00	27.983.024.091	0,00	0	100,00	12.041.988.500									0	6,926,250,305						Belum Tercapai
		4.02.02.2.01	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya (%)	100,00	1.993.544.000	0,00	0	100,00	580.880.000	0%%	0	0%%	165,441,996					0,00%	165,441,996	4,17%	165.441.996	**4,17%**	**8,30%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	3	313,930,000	0	0	1	83,136,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	3	249,408,000	0	0	1	97,607,000	0	0	0	8,432,592					0	8,432,592	0	8,432,592	**0,00%**	**3,38%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	12	1,420,206,000	0	0	4	368,767,000	2	0	0	157,009,404					2	157,009,404	2	157,009,404	**16,67%**	**11,06%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1	10,000,000	0	0	1	31,370,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana (%)	100,00	651.000.000	0,00	0	100,00	217.000.000	0%%	0	0%%	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

			Perubahan PPAS	KUA dan Perubahan PPAS																					
		4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	3	139,500,000	0	0	1	46,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	3	142,500,000	0	0	1	47,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	3	58,500,000	0	0	1	19,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3	193,500,000	0	0	1	64,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana (%)	100,00	443.211.000	0,00	0	100,00	147.737.000	0%%	0	0%%	67,499,500					0,00%	67,499,500	20,83%	67.499.500	**20,83%**	**15,23%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3	50,127,000	0	0	1	16,709,000	0	0	1	13,231,000					1	13,231,000	1	13,231,000	**33,33%**	**26,39%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3	32,625,000	0	0	1	10,875,000	0	0	1	7,732,000					1	7,732,000	1	7,732,000	**33,33%**	**23,70%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	3	52,686,000	0	0	1	17,562,000	0	0	1	13,388,000					1	13,388,000	1	13,388,000	**33,33%**	**25,41%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3	32,625,000	0	0	1	10,875,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3	32,400,000	0	0	1	10,800,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	3	30,000,000	0	0	1	10,000,000	0	0	1	4,312,500					1	4,312,500	1	4,312,500	**33,33%**	**14,38%**	Sekretariat DPRD	Tercapai

		4.02.02.2.03.0007	Pengawasan PenggunaanAnggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	3	52,500,000	0	0	1	17,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.03.0008	Pembahasan LaporanKeterangan Pertanggungjawaba nKepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	3	160,248,000	0	0	1	53,416,000	0	0	1	28,836,000					1	28,836,000	1	28,836,000	**33,33%**	**17,99%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.02.2.04	Peningkatan Kapasitas DPRD	Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya (%)	100,00	8.348.563.000	0,00	0	100,00	1.635.911.000	0%%	0	0%%	237,203,000					0,00%	237,203,000	0,00%	237.203.000	**0,00%**	**2,84%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.04.0001	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD	1	175,000,000	0	0	1	280,000,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	12	2,100,000,000	0	0	4	1,100,000,000	0	0	0	200,000,000					0	200,000,000	0	200,000,000	**0,00%**	**9,52%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	21	378,000,000	0	0	7	126,000,000	0	0	0	31,500,000					0	31,500,000	0	31,500,000	**0,00%**	**8,33%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	3	112,485,000	0	0	1	17,490,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	6	5,583,078,000	0	0	2	112,421,000	0	0	0	5,703,000					0	5,703,000	0	5,703,000	**0,00%**	**0,10%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Persentase penyerapan danpenghimpunan aspirasi masyarakat (%)	100,00	5.713.712.000	0,00	0	100,00	2.445.600.000	0%%	1,064,795,000	0%%	1,039,491,991					0,00%	2,104,286,991	20,37%	2.104.286.991	**20,37%**	**36,83%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	36	941,894,000	0	0	12	311,100,000	5	0	1	17,830,000					6	17,830,000	6	17,830,000	**16,67%**	**1,89%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	315	45,000,000	0	0	105	10,385,000	0	0	70	7,722,000					70	7,722,000	70	7,722,000	**22,22%**	**17,16%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	9	4,726,818,000	0	0	3	2,124,115,000	1	1,064,795,000	1	1,013,939,991					2	2,078,734,991	2	2,078,734,991	**22,22%**	**43,98%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Persentase Penyusunan danPengawasan Kode Etik yang difasilitasi (%)	100,00	10.000.000	0,00	0	100,00	8.945.000	0%%	0	0%%	0					0,00%	0	0,00%	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1	10,000,000	0	0	1	8,945,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.02.2.08	Fasilitasi Tugas DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana (%)	100,00	10.822.994.091	0,00	0	100,00	7.005.915.500	0%%	1,767,130,696	0%%	2,584,688,122					25,00%	4,351,818,818	16,67%	4.351.818.818	**16,67%**	**40,21%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	36	10,822,994,091	0	0	12	7,005,915,500	3	1,767,130,696	3	2,584,688,122					6	4,351,818,818	6	4,351,818,818	**16,67%**	**40,21%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
2	Meningkatkan Tata Kelola kinerja dan keuangan			Predikat Nilai SAKIP (Predikat)	BB	58,845,748,894	0	0	C	26,770,313,500															
		4.02.01	PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00	58.845.748.894	0,00	0	100,00	26.770.313.500									0	9,898,738,440						Belum Tercapai
		4.02.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah (%)	100,00	90.627.000	0,00	0	100,00	32.375.000	0%%	0	0%%	9,497,700					0,00%	9,497,700	16,67%	9.497.700	**16,67%**	**10,48%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen PerencanaanPerangkat Daerah	3	18,000,000	0	0	8	6,000,000	0	0	1	4,021,000					1	4,021,000	1	4,021,000	**33,33%**	**22,34%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan DokumenRKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	19,602,000	0	0	1	6,540,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

		4.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3	19,500,000	0	0	1	6,500,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	7,800,000	0	0	1	3,680,000	0	0	1	3,680,000					1	3,680,000	1	3,680,000	**33,33%**	**47,18%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan HasilKoordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3	8,505,000	0	0	1	3,915,000	0	0	0	0					0	0	0	0	**0,00%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan PajakKendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	136,980,000	0	0	15	11,718,000	0	0	13	0					13	0	13	0	**16,67%**	**0,00%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	78	673,440,000	0	0	18	213,044,000	0	0	13	30,466,000					13	30,466,000	13	30,466,000	**16,67%**	**4,52%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	804,336,000	0	0	1	256,900,000	0	0	1	57,117,000					1	57,117,000	1	57,117,000	**8,33%**	**7,10%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD (%)	100,00	39.755.757.000	0,00	0	100,00	18.796.980.000	0%%	2,317,501,529	0%%	5,142,213,836					0,00%	7,459,715,365	26,67%	7.459.715.365	**26,67%**	**18,76%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	105	38,464,257,000	0	0	35	17,147,980,000	3	2,317,501,529	32	4,671,113,836					35	6,988,615,365	35	6,988,615,365	**33,33%**	**18,17%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	15	682,500,000	0	0	5	1,439,000,000	0	0	2	271,600,000					2	271,600,000	2	271,600,000	**13,33%**	**39,79%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	105	609,000,000	0	0	35	210,000,000	0	0	35	199,500,000					35	199,500,000	35	199,500,000	**33,33%**	**32,76%**	Sekretariat DPRD	Tercapai
		4.02.01.2.16	Layanan Administrasi DPRD	Cakupan Layanan Administrasi DPRD (%)	100,00	3.312.000.000	0,00	0	100,00	1.056.500.000	0%%	0	0%%	261,396,288					50,00%	261,396,288	16,67%	261.396.288	**16,67%**	**7,89%**	Sekretariat DPRD	
		4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan KonsultasiDPRD	36	450,000,000	0	0	12	126,500,000	6	0	0	29,749,288					6	29,749,288	6	29,749,288	**16,67%**	**6,61%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai
		4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	108	2,862,000,000	0	0	36	930,000,000	18	0	0	231,647,000					18	231,647,000	18	231,647,000	**16,67%**	**8,09%**	Sekretariat DPRD	Belum Tercapai

II.1.1 Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Realisasi program/kegiatan di tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah :

1. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
   - Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
   - Pembahasan Kebijakan Anggaran
   - Peningkatan Kapasitas DPRD
   - Penyerapan dan Penghimpun aspirasi masyarakat
   - Fasilitasi Tugas DPRD
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten
   - Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Barang milik daerah pada perangkat daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah

II.1.2 Realisasi Program/Kegiatan yang memenuhi Target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Adapun Program kegiatan yang memenuhi target kinerja di Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
  - Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DPRD

II.1.3 Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2024 dan di akhir triwulan II tahun 2024 tidak ada yang melebihi target kinerja. Sekretariat DPRD memiliki rata-rata capaian kinerja rendah dan rata-rata capaian anggaran sangat rendah.

II.1.4 Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program kegiatan.

Adapun Penyebab tidak tercapainya target kinerja di akhir tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Program Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dengan kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD, Pembahasan Kebijakan Anggaran,. Kegiatannya tidak terlaksana dikarenakan padatnya kegiatan Anggota DPRD serta kegiatannya ditunda dan dilaksanakan pada Triwulan II.

II.1.5 Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dampak yang timbul terhadap capaian program yang terdapat dalam Renstra Perangkat Daerah adalah :

a. Terdapat kegiatan yang capaian kinerjanya nol dikarenakan adanya perubahan jadwal pelaksanaan kegiatan
b. Penyerapan anggaran tidak seoptimal capaian kinerja dikarenakan nilai realisasi belanja lebih kecil dari pagu anggaran dalam DPA (pelaksanaan kegiatan berdasarkan riil cost)

II.1.6 Kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor tersebut.

Dalam rangka efektifitas realisasi anggaran dalam pencapaian target kinerja sesuai yang telah direncanakan sebelumnya, maka kebijakan yang diambil untuk meminimalisasi penyebab tidak tercapainya target kinerja adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan kegiatan yang belum terealisasi pada triwulan berikutnya berdasarkan alokasi anggaran dalam DPA
b. Mengalokasikan anggaran dan waktu pelaksanaan kegiatan dengan tepat pada DPA sesuai dengan skala prioritas, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal
c. Meningkatkan persentase Pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan rapat-rapat
d. Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
e. Mengatur jadwal pelaksaan rapat-rapat yang lebih efektif

II. 2 Isu –isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

II.2.1 Analisa Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang menguji indikator yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Sekretariat. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD. Sedangkan fungsi Seketariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11 Tahun 2008, sebagai berikut :

a. Penyelenggara administrasi Kesekretariatan DPRD
b. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan
c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
e. Dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Secara umum tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai fasilitator kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD telah berfungsi dengan baik, yang terlihat dari hasil capaian kinerja penyelenggaraan seluruh kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD. Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat dari indikator kinerja;

- Persentase Fasilitasi Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah yang disahkan menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD

II.2.2 Isu-isu Strategis Penyelenggara Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kab. Sidrap

Dalam rangka memfasilitasi penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi DPRD, diperlukan peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan pada Sekretariat DPRD Kab. Sidrap meliputi kapasitas SDM, sarana dan

prasarana serta sistem pelayanan dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku, meliputi :

1) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal, diklat fungsional dan struktural serta bimbingan teknis/kursus-kursus singkat.
2) Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kegiatan dalam memfasilitasi tugas dan fungsi DPRD.
3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi.
4) Peningkatan kualitas perencanaan dalam penyusunan / perancangan peraturan daerah, peraturan DPRD dan Keputusan DPRD.

Dalam proses penyusunan rencana pembangunan perlu dilengkapi dengan analisis dan indentifikasi isu-isu strategis guna meningkatkan prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawaban. Isu-isu strategis yang diuraikan dalam Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang ini merupakan isu-isu srategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD yang pada dasarnya terdiri dari potensi, peluang dan tantangan sebagai suatu kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan yang akan disusun karena dampaknya yang signifikan bagi Sekretariat DPRD dimasa yang akan datang. Isu isu strategis yang dapat diidentifikasi dalam Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu dalam upaya memberikan pelayanan yang maksimal dapat dirasakan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat keterbatasan sumber daya manusia yang professional dan terbatasnya sarana dan prasarana pendukung.

Sejalan dengan hal tersebut, maka dapat ditentukan isi-isu strategis yaitu sebagai berikut :

a. Masih banyak Rapat-rapat DPRD yang dilaksanakan tidak tepat waktu.
b. Manajemen penentuan jadwal rapat belum dilakukan secara baik

II.2.3. Dampak Terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Telah dilaksanakan Penyusunan rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kab. Sidrap yang merupakan penjabaran yang lebih detail terhadap perencanaan Pembangunan Daerah sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra maupun Renja sejalan dengan Rencana Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten tahun 2024–2026, dengan demikian sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat mencerminkan misi Pemerintahan Kabupaten yaitu Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Mendukung Kelancaran Tugas Dan Fungsi DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

II.2.4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah

Beberapa hal yang menjadi Tantangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau menfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Tuntutan Pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan kebutuhan tugas-tugas DPRD;
2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang Profesional, Ketersediaan sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai;
3. Pelaksanaan Rencana Kerja DPRD dan Kegiatan-kegiatan DPRD yang bersifat Tentatif
4. Perubahan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh pada Kode Etik dan tata tertib DPRD;
5. Kebutuhan peningkatan peran dan koordinasi Internal dan Eksternal antar Perangkat Daerah ;
6. Peningkatan supremasi hukum.

Beberapa hal yang menjadi peluang bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam memberikan pelayanan atau menfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD adalah :

1. Kerjasama dengan Perangkat Daerah, Instansi terkait, Anggota Forkopimda untuk dialog atau dengar pendapat dalam hal penerimaan Aspirasi dari masyarakat;
2. Komitmen Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Jadwal Program Pembentukan Peraturan Daerah (PROPPERDA) yang disusun oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah;
3. Terbukanya kesempatan pengembangan dan peningkatan kualitas SDM melalui Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan;
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang menjadi penunjang pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
5. Perkembangan Teknologi

II.2.5. Isu-isu penting dan catatan strategis dalam perumusan program dan kegiatan

Isu-isu penting dan catata strategis yang terkait dengan dinamika lingkungan serta dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga sistem pendukung DPRD, maka menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan dalam satu tahun kedepan adalah :

1. Menyelenggarakan Administrasi Kesekretariatan

   Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD diperlukan sistem administrasi yang sesuai dengan peraturan perundang undangan dan mengikuti perkembangan teknologi, dengan mengikuti perkembangan teknologi diharapkan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara lebih efisien dan efektif.

2. Pemantapan Peran Sekretariat DPRD sebagai Fasilitator dan Mediator Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.

   Peran Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD perlu lebih ditingkatkan, Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang harus selalu mengambil sikap proaktif dalam berkomunikasi dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga legislatif guna mewujudkan sinersitas kelembagaan di daerah.

3. Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Lembaga yang bersih, transparan dan akuntabel.

   Dalam rangka perencanaan dan pengelolaan keuangan yang berbasis kinerja perlu disusun secara transparan dan berkoordinaasi dengan Badan Anggaran DPRD serta dilaksanakan secara transparan dengan demikian, perencanaan dan pengelolaan keuangan akan lebih berorientasi menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Sekretariat DPRD dalam mewujudkan Sasaran memiliki Program Rutin dan Program Pendukung. Program Rutin yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan terbagi dalam 10 kegiatan, Program. Untuk Program diluar program rutin yaitu Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD terdiri dari 6 kegiatan. Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel III. 1
Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program /Kegiatan /SubKegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
	SEKRETARIAT DPRD					**28.449.440.938**				**Persen**	**41.312.302.000**	
	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	**Cakupan Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD**		**100**	**Persen**	**8.744.508.000**			**100**	**Persen**	**14.542.196.500**	
4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Cakupan Peraturan Daerah yang difasilitasi Pembahasannya**	**Pangkajene**	**100**	**Persen**	**663.538.000**		Pangkajene	**100**	Dok	**580.880.000**	
4.02.02.2.01.01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah dokumen hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Pangkajene	1	Dok	83.136.000		Pangkajene	1	Dok	83.136.000	
4.02.02.2.01.02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Pangkajene	1	Dok	100.000.000		Pangkajene	1	Dok	97.607.000	
4.02.02.2.01.04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen hasil Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang difasilitasi	Pangkajene	4	Dok	473.402.000		Pangkajene	4	Dok	368.767.000	

4.02.02.2.01.05	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata tertib DPRD yang disusun	Pangkajene	1	Dok	10.000.000		Pangkajene	1	Dok	31.370.000	
4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Persentase Pembahasan Kebijakan anggaran yang terlaksana**		**100**	**Persen**	**217.000.000**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**217.000.000**	
4.02.02.2.02.01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Pangkajene	1	Dok	19.500.000		Pangkajene	1	Dok	19.500.000	
4.02.02.2.02.02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan PPAS	Pangkajene	1	Dok	19.500.000		Pangkajene	1	Dok	19.500.000	
4.02.02.2.02.03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Pangkajene	1	Dok	46.500.000		Pangkajene	1	Dok	46.500.000	
4.02.02.2.02.04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Pangkajene	1	Dok	47.500.000		Pangkajene	1	Dok	47.500.000	
4.02.02.2.02.05	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Dokumen Hasil pembahasan Laporan Semester yang terlaksana	Pangkajene	1	Dok	19.500.000		Pangkajene	1	Dok	19.500.000	
4.02.02.2.02.06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Pangkajene	1	Dok	64.500.000		Pangkajene	1	Dok	64.500.000	
4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Persentase pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah yang terlaksana**		**100**	**Persen**	**147.737.000**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**147.737.000**	
4.02.02.2.03.01	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Pangkajene	1	Laporan	16.709.000		Pangkajene	1	Laporan	16.709.000	

4.02.02.2.03.02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Pangkajene	1	Laporan	10.875.000		Pangkajene	1	Laporan	10.875.000	
4.02.02.2.03.03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Pangkajene	1	Laporan	17.562.000		Pangkajene	1	Laporan	17.562.000	
4.02.02.2.03.04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Pangkajene	1	Laporan	10.875.000		Pangkajene	1	Laporan	10.875.000	
4.02.02.2.03.05	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Pangkajene	1	Laporan	10.800.000		Pangkajene	1	Laporan	10.800.000	
4.02.02.2.03.06	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Pangkajene	1	Laporan	10.000.000		Pangkajene	1	Laporan	10.000.000	
4.02.02.2.03.07	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Pengawasan Penggunaan Anggaran	Pangkajene	1	**Persen**	17.500.000		Pangkajene	1	**Persen**	17.500.000	
4.02.02.2.03.08	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Laporan hasil Pembahasan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Pangkajene	1	Dok	53.416.000		Pangkajene	1	Dok	53.416.000	
4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Anggota DPRD yang meningkat Kapasitasnya**		**100**	**Persen**	**2.899.521.000**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**1.635.911.000**	
4.02.02.2.04.01	Orientasi DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Orientasi DPRD	Pangkajene	1	Dok	175.000.000		Pangkajene	6	Dok	280.000.000	

4.02.02.2.04.02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	Pangk ajene	4	Dok	700.000.000		Pangka jene	6	Dok	1.100.000.000	
4.02.02.2.04.03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk Hukum Daerah, Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Pangk ajene	4	Dok	1.861.026.000		Pangka jene	2	Dok	112.421.000	
4.02.02.2.04.05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga ahli Fraksi	Pangk ajene	7	orang	126.000.000		Pangka jene	7	orang	126.000.000	
4.02.02.2.04.04	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	Pangk ajene	1	Dok	17.490.000		Pangka jene	1	Dok	17.490.000	
4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat**		**100**	**Persen**	**1.861.026.000**		Pangka jene	**100**	**Persen**	**2.445.600.000**	
4.02.02.2.05.01	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Pangk ajene	12	Laporan	311.894.000		Pangka jene	12	Lapor an	311.100.000	
4.02.02.2.05.02	Penyusunan PokokPokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disusun	Pangk ajene	105	Dok	15.000.000		Pangka jene	105	Dok	10.385.000	
4.02.02.2.05.03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan Reses	Pangk ajene	3	Dok	1.476.818.000		Pangka jene	3	Dok	2.124.115.000	
4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD yang terlaksana**		**100**	**Persen**	**10.000.000**			**100**	**Persen**	**8.945.000**	
4.02.02.2.06.01	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Kode Etik DPRD	Pangk ajene	1	Laporan	10.000.000		Pangka jene	1	Lapor an	8.945.000	
4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD yang terlaksana**		**100**	**Persen**	**7.005.915.500**			**100**	**Persen**	**9.506.123.500**	
4.02.02.2.08.01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen hasil koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Tugas DPRD	Pangk ajene	12	Dok	3.000.000.000		Pangka jene	36	Dok	9.506.123.500	

..01	**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terlaksana**		**100**	**Persen**	**19.704.932.938**			**100**	**Persen**	**26.770.105.500**	
..01.2.01	**XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**30.209.000**			**100**	**Persen**	**32.375.000**	
..01.2.01.01	XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene	1	Dok	6.000.000		Pangkajene	1	Dok	6.000.000	
..01.2.01.02	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	6.534.000		Pangkajene	1	Dok	6.540.000	
..01.2.01.03	XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	6.500.000		Pangkajene	1	Dok	6.500.000	
..01.2.01.04	XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.600.000		Pangkajene	1	Dok	3.680.000	
..01.2.01.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene	1	Dok	2.835.000		Pangkajene	1	Dok	3.915.000	

..01.2.01.06	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan laporan hasil laporan capaian kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene	1	Laporan	5.740.000		Pangkajene	1	Laporan	5.740.000	
..01.2.02	**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**Persen**	**2.801.727.938**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**2.474.780.000**	
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Pangkajene	28	Orang	2.787.257.938		Pangkajene	28	Orang	2.458.835.000	
..01.2.02.03	XXX Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pangkajene	12	Dok	8.000.000		Pangkajene	12	Dok	9.475.000	
..01.2.02.05	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir Tahun SKPD	Pangkajene	1	Laporan	2.000.000		Pangkajene	1	Laporan	2.000.000	
..01.2.02.07	XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Pangkajene	12	Laporan	4.470.000		Pangkajene	12	Laporan	4.470.000	
..01.2.05	**XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**			**Persen**	**150.000.000**		Pangkajene		**Persen**	**250.000.000**	

..01.2.05.11	XXX Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan PerundangUndangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Pangkajene	30	orang	150.000.000		Pangkajene	30	orang	250.000.000	
..01.2.06	**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**			**Persen**	**542.352.000**		Pangkajene		**Persen**	**922.630.000**	
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor yang disediakan	Pangkajene	12	Paket	57.054.000		Pangkajene	12	Paket	57.054.000	
..01.2.06.02	XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pangkajene	12		-		Pangkajene	12		-	
..01.2.06.03	XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Pangkajene	12	Paket	50.000.000		Pangkajene	12	Paket	490.970.000	
..01.2.06.05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Pangkajene	12	Laporan	85.616.000		Pangkajene	12	Laporan	122.971.000	
..01.2.06.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan Fasilitasi kunjungan tamu	Pangkajene	12	Laporan	279.682.000		Pangkajene	12	Laporan	251.635.000	
..01.2.07	**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah**		**100**	**Persen**	**15.000.000**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**324.045.000**	
..01.2.07.06	XXX Pengadaan Peralatan dan mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan mesin Lainnya yang disediakan	Pangkajene	35	Unit	15.000.000		Pangkajene	10	Unit	324.045.000	
..01.2.08	**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Urusan Pemerintah Daerah**			**Persen**	**2.100.274.500**		Pangkajene		**Persen**	**2.431.133.500**	

..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Pangkajene	12	Laporan	20.000.000		Pangkajene	12	Laporan	30.000.000	
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Pangkajene	36	Laporan	367.813.000		Pangkajene	36	Laporan	318.640.000	
..01.2.08.03	XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Pangkajene	12	Laporan	76.010.000		Pangkajene	12	Laporan	59.750.000	
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Pangkajene	12	Laporan	750.000.000		Pangkajene	12	Laporan	2.022.743.500	
..01.2.09	**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**Persen**	**481.662.000**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**481.662.000**	
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan pereorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Pangkajene	26	Unit	45.660.000		Pangkajene	26	Unit	11.718.000	
..01.2.09.02	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Pangkajene	26	Unit	224.480.000		Pangkajene	26	Unit	213.044.000	
	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pangkajene	4	Unit	268.112.000		Pangkajene	4	Unit	256.900.000	

..01.2.15	**XXX Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Cakupan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**		**100**	**Persen**	**13.258.919.000**		Pangkajene	**100**	**Persen**	**18.796.980.000**	
..01.2.15.01	XXX Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Pangkajene	35	Orang/ Bulan	12.821.419.000		Pangkajene	35	Orang / Bulan	17.147.980.000	
..01.2.15.02	XXX Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah paket Pakaian dinas dan atribut DPRD yang disediakan	Pangkajene	5	Paket	227.500.000		Pangkajene	5	Paket	1.439.000.000	
..01.2.15.03	XXX Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check Up DPRD	Pangkajene	35	Orang	210.000.000		Pangkajene	35	Orang	210.000.000	
..01.2.16	**XXX Layanan Administrasi DPRD**	**Cakupan Layanan Administrasi DPRD**			**Persen**	**1.056.500.000**		Pangkajene		**Persen**	**1.056.500.000**	
..01.2.16.03	XXX Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah laporan hasil Fasilitasi Rapat koordinasi dan konsultasi DPRD	Pangkajene	12	laporan	126.500.000		Pangkajene	12	laporan	126.500.000	
..01.2.16.04	XXX Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang disediakan	Pangkajene	36	paket	930.000.000		Pangkajene	36	paket	930.000.000	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun2024 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan Perubahan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2024.

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan ini juga merupakan pedoman menuju kebersamaan dan gotong royong dalam melaksanakan kegiatan tahun 2024 yang pada akhirnya diharapkan dapat mewujudkan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkualitas, partisipatif, mandiri dan sejahtera.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mohon masukan untuk perbaikan penyusunan Rencana Kerja ini, seandainya Renja Perubahan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disusun ini masih jauh dari sempurna untuk itu kritik dan masukan sangat diharapkan untuk perbaikan penyusunan Renja tahun berikutnya.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan dan pelaksanaan Program Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sidenreng Rappang, 22 Agustus 2024

SEKRETARIS DPRD KAB. SIDRAP

A.MUH. FAISAL, SH, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV/c
NIP : 19650809 199403 1 006

Kasman101983

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas limpahan karunia-Nya sehingga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun dan memuat rencana kegiatan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan sesuai dengan prioritas agar terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsi serta isu–isu yang dapat segera ditangani dalam upaya menjabarkan Visi, Misi dan program kerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026.

Pangkajene Sidenreng, 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN , S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199009 1 002

DAFTAR ISI

KATAPENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar belakang …….. 1

1.2 Landasan Hukum..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan..... 9

1.4 Sistimatika Penulisan…… 10

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 12

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun Lalu dan Capaian Renstra 12

2.2 Perangkat Daerah..... 24

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD……. 31

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD……. 33

Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat……

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 35

3.1 Program dan Kegiatan……. 35

3.2 Pendanaan Perangkat Daerah……..……. 43

BAB IV PENUTUP..... 58

DAFTAR TABEL

Tabel II.a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil S/D Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang (**Renstra Perubahan 2018-2023)**	15
Tabel II.b	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil S/D Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang **(Renstra RPD 2024 – 2026)**	20
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	47

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sejalan dengan kondisi objektif saat ini serta antisipasi peluang dan tantangan dalam perspektif kedepan sesuai dengan tugas utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu salah satu elemen dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Kebijakan prioritas program dan kegiatan pada dasarnya diarahkan pada meningkatnya kesejahteraan rakyat dan pengurangan kemiskinan melalui perbaikan pelayanan publik.

Pembangunan Indonesia merupakan pembangunan yang menyeluruh dan terencana, untuk itu dalam rangka pencapian tujuan pembangunan diharapkan dapat tersusun dengan baik dan bertahap sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan penyusunan Rencana Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD); dan Rencana Pembangunan Tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan (RKP). Berdasarkan hal tersebut, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyusun Rancangan Perubahan Rencana

Kerja Pemerintah Daerah yang akan dijadikan acuan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kedepan. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disebut sebagai RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024–2026 yang memuat tentang kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang menjadi prioritas dan indikasi kegiatan khusus dijadikan pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai upaya pencapaian pelaksanaan kinerja untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Terkait dengan fungsinya maka administrasi kependudukan mempunyai 3 (tiga) fungsi signifikan, yaitu **fungsi hukum** (Pengakuan Negara terhadap identitas seseorang atau anak yang diwujudkan dalam Akta Kelahiran), **fungsi statistik** (menyediakan data penduduk yang meliputi jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah perpindahan penduduk di dalam dan luar kabupaten, jumlah pindah datang dari luar kabupaten, data penduduk berdasarkan kelompok umur, tingkat pendidikan, agama), **fungsi kerjasama kelembagaan** (menyediakan data-data penduduk bagi pihak-pihak atau institusi-institusi yang berkepentingan).

Tuntutan persaingan dan kualitas pelayanan sebagai bentuk tantangan di masa yang akan datang,merupakan bagan yang telah diatur dalam Undang-Undang nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diperlukan perencanaan yang signifikan agar data base Administrasi Kependudukan dapat ditingkatkan akurasinya, peningkatan sistem pelayanan yang baik dan bermutu, sehngga akan mendapat kepercayaan dari masyarakat. Berdasarkan hal tersebut Admininstrasi Kependudukan merupakan bagian dari wujud komitmen Nasional dalam membangun peradaban baru tentang Administrasi Kependudukan, sebagai sistem yang komprehensif bagian dari tata pemerintahan, sehingga harus ditinggalkan pendapat konvensional bahwa Administrasi Kependudukan hanya berkaitan penerbitan administrasi berharga semata berupa apa yang disebut Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Pecatatan Sipil.

Pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah tentang pengelolaan admnistrasi kependudukan merupakan tanggung jawab penuh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pelaksanaan yang dberikan kewenangan desentralisasi berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 16 Tahun 2012, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. **Tugas pokok** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dmaksud adalah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas pokok penyelenggaraan Pemerintahan adminstrasi, organisasi dan tata laksana serta memberkan pelayananan admnistrasi kepada seluruh perangkat Daerah. Adapun **fungsi** Dinas Kependudukan dan Pencaatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

a. Menyusun rencana strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.
b. Perumusan kebijakan teknis, penyusunan program dan kegiatan di bidang Kependudukan, Pencatatan Sipil, Pengolahan Data, Perpindahan

Penduduk,Pendataan Kelahiran, Kematian serta Pencatatan Perkawinan, Perceraian, Perubahan Akta dan Pengangkatan Anak.

c. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.
d. Pemberian pelayanan umum di Bidang Kependudukan, Bidang Pencatatan Sipil serta Bidang Data dan Informasi.

1. 2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ; 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah beserta masyarakatnya;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 24 tahun 2013

5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96;
10. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
11. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Pnduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan perubahan Presiden Nomor 35 Tahun 2010;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Pendokumentasian Hasil Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 68 tahun 2012 tentang tata Cara Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 40 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Proyeksi Penduduk di Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009, tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam kerangka Sistem Informasi Administrasi Kepeendudukan (SIAK) (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 03);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten SIdenreng Rappang Tahun 2023
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024 – 2026 Kabupaten Sidenreng Rappang
20. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor ….. Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabuppaten Sidenreng Rappang Tahun 2025
21. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
22. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
23. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
24. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

25. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6514);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentan Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, (Lembaran Daerah Provinsi Sulawsesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);

33. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 13);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
35. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
37. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 adalah :

1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan program dan kegiatan antara daerah dengan provinsi serta Pusat.
2. Penjabaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) dengan memperhatikan hasil evaluasi terhadap pencapaian kinerja tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Memantapkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mencapai Visi, misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mewujudkan Pemerintahan yang lebih baik (Good Governance)

Tujuan rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yang diharapkan adalah :

1. Memberikan pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.
2. Mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dicanangkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah.

1. 4 Sistimatika Penulisan

Sistimatka penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 seperti uraian berikut ini :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistimatika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
2.2.Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD
2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Program dan Kegiatan
3.2 Pendanaan Perangkat Daerah
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUSI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024 Pelaksanaan Renja

Penerapan kebijakan penyelenggaraan dan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang disusun dalam rencana kerja dan Rencana strategis. Kebijakan tahun lalu masih bersifat statis yang bertolak hanya pada konsep bagaimana memaksimalkan dan mengefektifkan pelayanan Administrasi Kependudukan dan konsentrasi pada penerapan KTP Elektronik, serta bagaimana upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu " *Terwujudnya Kesiapan Sistem administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Kerangka Kelancaran Efesiensi dan Efektivitas Pelayanan administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang ".*

Adapun misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebaga berikut :

a. Menyatukan komitmen dan persepsi aparatur.
b. Meningkatkan profesionalisme aparatur.
c. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan
d. Meningkatkan pelayanan akta catatan spil.
e. Menyiapkan data base yang akurat dan komprehensif.

Terkait dengan visi dan misi yang diemban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah berupaya dan bekerja keras mencapai sasaran yang telah ditetapkan, yakni :

a. Terciptanya fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang efektif.
b. Terciptanya data base kependudukan dan Pencatatan sipil.

c. Terwujudnya monitoring dan evaluasi program kegiatan
d. Terciptanya tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana strategis telah diupayakan untuk mendukung pelaksanaan penataan administrasi kependudukan secara Nasional, berupa:

- Pencapaian Pelayanan pendaftaran Penduduk melalui perekaman data penduduk untuk KTP-el dan pencatatan sipil sesuai pengembangan sistem administrasi kependudukan yang telah ditetapkan.
- Regulasi sistem pelayanan yang baik dan bermutu serta berpihak kepada masyarakat dan tidak terlalu membebani pihak yang berkepentingan pada adminstrasi kependudukan dan catatan sipil, sesuai dengan Data base yang sudah tersedia dan akan terus diupayakan untuk dikembangkan menjadi data yang berkelanjutan yang dikelolah berdasarkan keragaman dan kedinamisan penduduk secara Nasional.
- Mengupayakan sistem untuk mendukung kinerja yang berkualitas, efesien dan efektif pada pelaksanaan tugas – tugas yang yang akan datang, maka perlu suatu upaya yang terencana agar dapat menghaslkan suatu hasil yang berkualitas dan memuaskan serta diharapkan akan mencapai prestasi yang dapat menjadi konsep percontohan bagi semua pihak.
- Peningkatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman tentang administrasi kependudukan dalam rangka pencapaian tertib administrasi kependudukan.

Penyusunan rencana kerja harus senantiasa memperhatikan capaian yang pernah didapatkan pada tahun – tahun sebelumnya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program kegiatan sebagaimana telah datur dan diamanatkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Adapun evaluasi terhadap Renja sampai dengan Triwulan II Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 meliputi :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Capaian pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar 43,42 % dan perkiraan capaian target kinerja tahun 2024 sebesar 100%. Capaian kinerja ini agak rendah dibanding target yang telah ditetapkan karena adanya kendala waktu, dimana jadwal perubahan anggaran agak terlambat sehingga proses penyelesaian juga ikut terhambat di akhir tahun. Selain itu besaran anggaran yang dipersiapkan untuk mendukung percepatan penerbitan dokumen kependudukan untuk pengadaan blangko, yang bersumber dari dana APBD 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pelaksanaan program kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 dan Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun sampai dengan triwulan II , dapat dilihat pada tabel II 1.

Tabel II.1 a (Renstra Perubahan 2018-2023)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d 2021 - 2023		Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=5*	*10=(9/4*100)*
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***%***	***100***	***100***				***100***	***100***
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***%***	***100***	***100***				***100***	***100***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan	36	274				*274*	*761*

	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**100**				***100***	***100***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	25	25				***25***	*100*
	koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	orang	33.000	12.488				***12.488***	*38*
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	buku	1.050	300				***300***	*29*
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	orang	3.900	1628				***1628***	*42*
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi perkantoran**	**%**	**100**	**100**				***100***	***100***
	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	bulan	36	0				***0***	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	bulan	33	33				***33***	*100*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan	lembar	4500	2875				***2875***	*64*
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	buah	120	69				***69***	*58*

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	set	270	90				***90***	*33*
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga	180	135	327				***327***	*242*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	kali	660	531				***531***	*80*
	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**				***100***	***100***
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliahara	unit	69	48				***48***	*70*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	30	35				***35***	*117*
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**100**				***100***	***100***
	Penyediaan surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	lembar	3000	675				***675***	*23*
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	bulan	36	36				***36***	*100*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	bulan	36	36				***36***	*100*

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	bulan	36	36				***36***	*100*
	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	***Persentase Perekaman KTP elektronik***	***%***	***100***	**100**				***100***	***100***
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase dokumen pendaftaran penduduk**	**%**	**100**	100				***100***	***100***
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	alat	37	48				***48***	*130*
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	alat/Kec	11	24				***24***	*218*
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftran Penduduk	Lap	72	108				***108***	*150*
	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	***Persentase Kepemilikan akta kelahiran***	***%***	***100***	0				***0***	***-***
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**%**	**100**	0				***0***	***-***
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Terjalinnya koordinasi antar lembaga	lembaga	8	0				***0***	-
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**%**	**100**	**100**				***100***	***100***
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah orang yang memilki dokumen	orang	2700	0				***0***	-
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah orang yang memilki dokumen	orang	19.900	0				***0***	-

	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	***Persentase OPD yang telah memamfaatkan data kepedundukan berdasarkan perjanjian kerjasama***	***%***	***48,48***	48,48				***48***	***100***
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Data Base Kependudukan**	**%**	**100**	**100**				***100***	***100***
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah data Kab. Yang Tersaji	Kec.	33	33				***33***	*100*
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi**	**%**	**100**	100				***100***	***100***
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data yang Akurat	Bulan	24	24				***24***	*100*
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	jumlah alat untuk mencetak dokumen kependudukan	unit	38	38				***38***	*100*

Tabel II.1 b (Renstra RPD 2024 - 2026)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Dearah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*
	URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP								
1	***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA***	***Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***% 100***		***100***	***50***	***50,00***	***50,00***	***50,00***
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***% 100***		***100***	***50***	***50,00***	***50***	***50,00***
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	orang /bulan 756		252	126	***50,00***	*126*	*16,67*

	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	27		9	5	***55,56***	***5***	*18,52*
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi perkantoran**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***
	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	36		0	0	0,00	***0***	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	36		12	6	50,00	***6***	*16,67*
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah paket cetakan dan penggandaan	Paket	4500		0	0	0,00	***0***	-
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	12		4	2	50,00	***2***	*16,67*
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	270		0	0	0,00	***0***	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Paket	4		4	2	50,00	***2***	*50,00*
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	660		220	85	38,64	***85***	*12,88*
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**		**100**	**50**	50,00	***50***	*50,00*
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit	3		1	0	0,00	***0***	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	unit	3		18	0	0,00	***0***	-

	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**		**100**	**50**	**100,00**	***50***	***50,00***
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliahara	unit	69		23	8	***34,78***	***8***	*11,59*
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	30		15	6	*40,00*	***6***	*20,00*
	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**		**100**	**50**	**100,00**	***50***	***50,00***
	Penyediaan surat menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Laporan	36		0	0	***0,00***	***0***	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Laporan	36		12	6	***50,00***	***6***	*16,67*
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Laporan	36		12	6	***50,00***	***6***	*16,67*
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	36		12	6	***50,00***	***6***	*16,67*
2.	***PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK***	***Persentase Perekaman KTP elektronik***	***%***	***100***		***99,40***		***0,00***	***0***	***-***
	Kegiatan : Pelayanan Pendaftaran Penduduk	**Persentase dokumen pendaftaran penduduk**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	laporan	216		36	18	*50,00*	*18*	*8,33*

	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	dokumen	72		24	12	*50,00*	*12*	*16,67*
	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftran Penduduk	laporan	108		24	12	*50,00*	*12*	*11,11*
3.	***PROGRAM PENCATATAN SIPIL***	***Persentase Kepemilikan akta kelahiran***	***%***	***100***		**95,00**		***0,00***	***0***	**-**
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	laporan	36		12	6	*50,00*	*6*	*16,67*
	Kegiatan : Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	dok	8100		2000	965	*48,25*	*965*	*11,91*
	Peningkatan Dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	layanan	18		6	4	*66,67*	*4*	*22,22*
4.	***PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN***	***Persentase OPD yang telah memamfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama***	***%***	***48,48***		**14,70**		***0,00***	***0***	**-**
	Kegiatan : Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	**Persentase Data Base Kependudukan**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Dokumen	36		12	6	*50,00*	*6*	*16,67*
	Kegiatan : Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi**	**%**	**100**		**100**	**50**	***50,00***	***50***	***50,00***
	Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Dokumen	36		12	6	*50,00*	*6*	*16,67*
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dokumen	9		3	1	*33,33*	*1*	*11,11*

Adapun realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Target 40 buah dan realisasi kinerja 26 buah atau tercapai 65%.
   - Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, target kinerja 220 kali, realisasi capaian kinerja 210 kali, atau 95,45%

b. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Surat Menyurat, target kinerja 1.500 lembar dan capaian kinerja 675 lembar atau 45,00 %.

c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah
   - Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya, target kinerja 23 unit dan realisasi kinerja 13 unit atau 56,52 %
   - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, target kinerja 10 unit dan realisasi capaian kinerja 9 unit atau sekitar 90%.

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   - Pendaftaran penduduk Non Permanen dan rentan administrasi kependudukan, yaitu jumlah alat perekaman KTP-el yang berjumlah 4 unit untuk 4 Kecamatan, tidak terealisasi atau 0 %

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, capaian kinerja 24 unit target realisasi capaian 21 unit atau 87,50 %.

Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut :

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Penyediaan gaji dan Tunjangan, target 12 bulan dan capaian kinerja 12 bulan jadi 100 %

b. Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah
   - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, target 8 dokumen dan capaian 8 dokumen, jadi 100 %

c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Fasilitasi kunjungan tamu, target 11 kali kunjungan, capaian kinerja 11 kali, capaian kinerja 100 %

d. Penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Komunikasi, sumberdaya air dan listrik, target 12 bulan dan realisasai capaian kinerja 12 bulan atau 100 %.
   - Peyediaan jasa peralatan dan Perelengkapan kantor, target kinerja 12 bulan dan capaian kinerja 12 bulan atau 100%.
   - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor, target kinerja 12 bulan dan capaian kinerja 12 bulan atau 100%.

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
   - Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, yaitu penerbitan dokumen kependudukan KTP, KIA dan KK target kinerja untuk 11 Kecamatan dan realisasi realisasi 11 kecamatan atau kinerja 100%.
   - Pencatatan dan Pelaporan peristiwa kependudukan, target pelaporan peristiwa 36 laporan dan realisasi kinerja 36 laporan atau terealisasi 100 %

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

a. Penylenggaraan Pencatatan Sipil
   - Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kab/Kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil, realisasi kiinerja pada 3 lembaga 100 %.

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

a. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
   - Pengolahan dan Penyajian Data, capaian kinerja pengelolaan data, target untuk 11 Kecamatan dan capaian kinerja 11 Kecamatan terealisasi 100%.

b. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Penyajian Data Kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Target kinerja 12 bulan dan capaian kinerja 12 bulan laporan 100 %.

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil keluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut:

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA

a. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Penyediaan peralatan rumah tangga, target 45 buah capaian kinerja 155 buah, capaian kinerja 344 %

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

a. Pelayanan Pencatatan Sipil
   - Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting. Capaian Kinerja Penerbitan akta target kinerja 1.300 orang dan tercapai kinerja 1.565 orang jadi terealisasi 120 %.
   - Peningkatan dalam pelayanan pencatatan sipil, kinerja penerbitan akta 100 % dari target kinerja 11.000 orang capaian kinerja 11.057 orang atau 100,52%.

Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, adalah sebagai berikut:

- Sub kegiatan: Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Pemeliharaan Barang Milik

Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah, Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya, Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, terdapat pengajuan SPJ namun tidak terbayar hingga batas akhir pembayaran.

- Sub kegiatan: Pendaftaran penduduk Non Permanen dan rentan administrasi kependudukan, diperuntukkan untuk memudahkan masyarakat melakukan perekaman KTP-el di Kecamatan, yaitu jumlah alat perekaman KTP-el yang berjumlah 4 unit untuk 4 Kecamatan, tidak terealisasi pengadaan barang karena kontrak sudah diajukan namun tidak realisasi sampai batas akhir pembayaran.
- Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, target kinerja 24 unit target realisasi capaian 21 unit, dimana diperuntukkan untuk service dan maintenance sarana electronic.

Kebijakan / tindakan perencanaan dan penyelenggaraan yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab:

- Melakukan belanja barang operasional kantor lebih cepat dan melakukan proses pengajuan berkas pertanggungjawaban lebih awal.
- Melakukan perekaman di kantor dan menghimbau masyarakat yang belum mendapatkan wilayah Kecamatannya untuk melakukan perekaman di Kecamatan terdekat yang sudah tersedia alat perekaman.
- Melakukan antisipasi anggarannya diletakkan diawal-awal waktu dan mempercepat proses administrasi dari pihak III service dan maintenance sarana dan prasarana elektronik pelayanan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.2.1. Dukungan Sumber Daya Manusia

Suatu organisasi akan sukses bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup dalam hal kuantitas dan kualitas. Dukungan Sumber daya manusia menjadi modal utama Dalam rangka merealisasikan setiap

program dan kegiatan SKPD, dan menjadi modal utama dalam pelaksanaannya sehingga aparatur Pemerintah perlu diposisikan pada setiap SKPD menyesuaikan dengan tingkat kebutuhan masing-masing SKPD. Hal ini menjadi salah satu elemen dasar untuk mencapai tingkat capaian kinerja yang lebih maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu instansi yang diberikan kewenangan dan tanggung jawab dalam hal pengelolaan sumber daya dan kebijakan Pemerintah, masih memerlukan dukungan sumber daya manusia aparatur Pemerintah.

- Dari jumlah PNS yang ada masih sangat dibutuhkan tambahan PNS untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini tidak seimbang mengingat volume pekerjaan sangat besar dan kadang bertumpuk.
- Kebutuhan tenaga komputer PNS untuk tingkat Administrator data base dan pengelolaan keamanan data penduduk masih sangat dibutuhkan.
- Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja dan kualitas layanan.

Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat.
   a. Sub. Bagian perencanaan.
   b. Sub. Bagian Keuangan.
   c. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
3) Bidang Pelayanan penduduk
   d. Seksi Identitas penduduk
   e. Seksi pindah Datang penduduk
   f. Seksi Pendataan Penduduk
4) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil
   g. Seksi kelahiran
   h. Seksi Perkawinan dan Penceraian

i. Seksi perubahan status anak, kewarganegaraan dan Kematian

5) Bidang Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan da Pemanfaatan Data

a. Seksi Pengolahan dan penyajian data
b. Seksi Kerjasama dan inovasi pelayanan
c. Seksi system informasi administrasi kependudukan
d. Jabatan fungsional

Sumber daya manusia tersebut diatas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dibantu oleh staf yang merupakan ujung tombak pelaksanaan pelayanan masyarakat.

Adapun produk pelayanan yang ada pada Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil antara lain :

1) Pelayanan Pengurusan Adminstrasi kependudukan
2) Pelayanan pengurusan Pencatatan Sipil
3) Pemanfaatan data kependudukan

2.2.2 Kondisi Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang masih sangat kurang, baik dalam hal kualitas maupun kuantitas dan masih sangat jauh dari kondisi yang diharapkan untuk mendukung program Nasional penataan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Sehingga pencapaian tujuan dan sasaran berjalan lambat. Sebagai instansi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat belum dapat memberikan pelayanan prima. Untuk mendukung system pelayanan yang cepat dan bermutu maka diharapkan kebutuhan sarana dan prasarana yang cukup dan memadai dapat terpenuhi untuk merealisasikan hal tersebut.Adapun Program instruksional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Selaku Lembaga teknhis yang menangani pelayanan dasar kebutuhan masyarakat melakukan kewenangan Sesuai Standar Pelayanan Minimal yaitu :

a. Pelayanan Pendaftaran Penduduk melayani 17(tujuh belas) jenis pelayanan yaitu :

- Biodata penduduk
- Kartu Keluarga
- Kartu Tanda penduduk
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Pindah datang
- Surat Keterangan Pindah Keluar Negri
- Surat keterangan Datang dari luar Negeri
- Surat Keterangan Tempat Tinggal
- Surat Keterangan Kelahiran
- Surat Keterangan Lahir Mati
- Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan
- Surat Keterangan Pembatalan Perceraian
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan pengangkatan Anak
- Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan indonesia
- Surat Keteranagan Pengganti Tanda Identitas
- Surat Keterangan Pencatatan Sipil
- Kartu identitas anak

b. Pelayanan Pencatatan Sipil Melayani 8 (delapan) jenis Pelayanan yaitu :

- Akta Kelahiran
- Akta Perkawinan
- Akta Perceraian
- Akta Kematian
- Pengakuaan dan Pengesahan Anak
- Pencatatan Perubahan Nama dan Status
- Perubahan dan Pembatalan Akta
- Legalisir Kutipan Akta Catatan Sipil

2.2.3 Dampaknya terhadap pencapaian

Dalam perencanaan pembangunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengemban tugas

sebagai instansi pelayanan yang berperan menata administrasi kependudukan di Kabupaten Sidenreng Rappang. Diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja administrasi kependudukan, meningkatkan pelayanan bidang kependudukan, meningkatkan kebijakan positif bidang kependudukan dan meningkatkan pelayanan bidang catatan sipil. Tentu saja apabila dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan dan akan direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penjabaran kebijakan Pemerintah guna mengoperasionalkan ke tingkat pelaksanaan, maka perlu perencanan disusun dalam bentuk program dan kegiatan.Sehingga nantinya pencapaian tujuan dapat terwujud. Namun dalam menjalankan program / kegiatan tersebut tidak terlepas dari hamabatan dan tantangann yang bersifat internal dan eksternal.Untuk itu dibutuhkan kebijakan untuk tetap berpijak pada tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kemudian untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat yang kewenangannya telah dilimpahkan kepada Pemerintah Kabupaten / Kota dalam hal penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik. Dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pecatatan Sipil telah mempersiapkan kebijakan untuk mendukung dan mensukseskan program Pemerintah Pusat tersebut. Program strategis ini dibuat dalam rangka pencapaian sasaran secara bertahap, terarah dan berkelanjutan. Harapan yang sangat besar bertumpu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk mendukung kebijakan Pemerintah Pusat, sehingga diharapkan dalam penggunaan anggaran tidak terjadi kebijakan yang tumpang tindih yang dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh dalam rangka mensukseskan pelaksanaannya di masing-masing Kabupaten / Kota adalah dengan menganggarkan program kegiatan pada tahun yang akan datang dimana di arahkan untuk mendukung pelaksanaannya agar dapat berjalan lancar seperti pengadaan sarana dan prasarana peralatan pencetakan KTP elektronik, mempersiapkan blangko, peningkatan SDM serta dana konsultasi

/ kordinasi agar tetap berjalan sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Adapun solusi dan masukan yang diharapkan pada perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk tahun 2023 adalah perencanaan kegiatan harus melihat hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut dengan tidak melihat berapa besar anggaran yang akan disediakan untuk program kegiatan. Untuk itu diharapkan ditingkatkan anggaran dalam hal :

a. Anggaran instruksional yakni untuk pengadaan sarana pendukung pencetakan print out KTP-el seperti : tinta, perangkat pencetakan, perangkat komputer bagi administrasi data base dsb.
b. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran seperti pengatur suhu ruangan, meja kerja, note book yang memadai agar stabilitas pelayanan setiap hari dapat berjalan dengan semestinya.
c. Pengadaan kendaraan operasional roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) bagi pejabat eselon yang ada, yang dmaksudkan untuk efesiensi dan efektfitas pekerjaan.
d. Pengadaan mobil unit pelayanan keliling, yang dapat menjangkau wilayah kecamatan, desa/kelurahan dan wilayah terpencil dengan perangkat mobile dan anggaran pendukung aktifitas pelayanan.
e. Sosilisasi dan penyuluhan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentngnya kepemilikan dokumen kependudukan.
f. Pengadaan sarana dan prasarana alam rangka memberkan kemudahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mendekatkan pelayanan di setiap kecamatan.

2.2.4 Tantangan dan Peluang

Adapun tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD serta Isu-isu berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun yang direncanakan adalah capaian kinerja program kegiatan dengan melihat sejauhmana masukan, hasil dan dampak dari program kegiatan tersebut.

Hasil analisis terhadap evaluasi pelaksanaan ditemui beberapa **tantangan** yang di hadapi oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil

Kabupaten Sidenreng Rappang beberapa tahun kedepan dalam pengembangan pelayanan antara lain :

1. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 yang mengalami perubahan substansi yang mendasar yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan sejalan dengan tuntutan pelayanan yang professional, memenuhi standar teknologi informasi, dinamis, tertib dan tidak diskriminatif. Hal ini sangat perlu disosialisasikan untuk mencapai standar pelayanan minimal menuju pelayanan prima yang menyeluruh seingga semua permasalahan dapat teratasi.
2. Kebutuhan pemanfaatan data yang semakin mendesak untuk kepentingan layanan public.
3. Tingginya tuntutan masyarakat untuk mendapatkan layanan yang cepat, efektif dan efesien.
4. Ketersediaan blangko KTP el masih sangat terbatas, karena pengadaan masih di pusat. Keterbatasan ini karena masih sangat bergantung pada Kementerian Dalam Negeri.
5. Ketersedian sarana dan prasarana pendukung untuk kelancaran pelayanan. Dimana kebutuhan mendasar untuk mengefektifkan layanan masih sangat terbatas.

Selanjutnya beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan terkait dengan tugas dan fungsi, kondisi wilayah dan perubahan iklim politik ditemukan beberapa peluang yang dapat ditangkap oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dalam pengembangan pelayanan antara lain:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, melalui pemberian layanan perekaman dan pencetakan pada 7 (Tujuh) Kecamatan.
2. Perkembangan tekhnologi informasi yang sangat cepat dan mudah di akses bagi siapapun. Memberikan harapan utnuk memberikan layanan online

3. Terdapatnya aturan Lex specialis (aturan khusus) pada pasal 83.A Undang-undang nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dimana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Pejabat pada unit kerja yang menangani urusan administrasi kependudukan di Provinsi, Kabupaten/Kota. Dimana diharapkan untuk tetap menjaga integritas dan komitmen penyelenggaraan administrasi kependudkan untuk tetap pada peningkatan kualitas layanan.

2.2.5 Formulasi Isu-isu penting / rekomendasi untuk tindak lanjut

Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara bertahap mengimplementasikan program penataan administrasi kependudukan secara khusus dimaksudkan untuk mengoperasionalkan prioritas pelayanan serta mengembangkan Sistem Informasi Administrasi kependudukan (SIAK) yang berbasis elektronik dalam mendukung pembangunan dalam pelayanan dasar masyarakat sehingga mencapai RPD 2024–2026.

Program yang diharapkan dapat dilaksanakan dalam menata administrasi kependudukan baik strategis maupun prioritas bagi SKPD adalah :

- Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terdiri dari (membangun informasi, updating dan pemeliharaan).
- Pengembangan tertib data base kependududkan.
- Penyediaan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.
- Koordinasi antar pelaksana kebijakan kependudukan.
- Peningkatan kapasitas apaatur Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Sidenreng Rappang
- Makin intensnya sosilisasi kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Penyusunan kebijakan kependudukan dan catatan sipil.
- Pelaporan
- Monitoring dan Evaluasi

2.3 Review Terhadap rancangan Awal RKPD

Proses yang dilakukan dengan memaksimalkan program kegiatan pada masing – masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya sebgai pelaksana, antara lain :

Bidang Administrasi kependudukan, berupaya :

- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adminitrasi kependudukan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang Pencatatan Sipil, berupaya :

- Peningkatan pelayanan catatan sipil
- Penertiban dokumen akta pencatatan sipil,
- Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan,
- Menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya adminitrasi catatan sipil,
- Menerbitkan dokumen kependudukan, Penyimpanan dan Pemeliharaan dokumen.

Bidang data dan Informasi, berupaya :

- Mampu memberikan akses informasi yang akurat dan akuntabel,
- Pelayanan keliling untuk memudahkan akses layanan bagi masyarakat.
- Penyediaan perangkat keras dan perangkat jaringan,
- Pemutakhiran data base kependudukan,
- Sosialisasi kepada masyarakat tentang tertib administrasi kependudukan,
- Penyusunan profil dan data base
- Penyusunan data agregat kependudukan

Kelemahan pelaksanaan program kegiatan masih dhadapkan pada kondisi dimana rancangan awal dan rancangan tahun berjalan selama ini hanyalah mengikuti pola minimal kegiatan agar kesinambungan program

tetap berjalan, namun terbatas pada pelayanan apa yang dibutuhkan masyarakat. Belum pada bagaimana memberikan kepuasan dan kenyamanan kepada masyarakat.

Dilain pihak program Administrasi Kependudukan dan Pecatatan Sipil belum dapat menerapkan secara terbuka penerapan sistem pelayanan secara modern menuju 3 (tiga) tertib. Salah satunya kendala yang muncul adalah ketersediaan alur pelayanan belum tertata sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat belum dapat mengikuti aturan dan tata cara pelayanan secara tertib untuk dapat menerbitkan administrasi kependudukan secara tepat waktu. Selain itu dukungan sarana dan prasarana yang masih terbatas serta dukungan sumber daya manusia yang belum memadai,belum cukup kuantitas dan kualitas dalam memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat.

Rencana kerja yang telah disusun kadang terhambat oleh lambatnya informasi kebijakan dari Pemerintah Pusat sampai ke masing – masing Kabupaten Kota. Sehingga kadang – kadang Kabupaten / Kota menganggap bahwa program kegiatan tertentu menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, ternyata hal tersebut menjadi yang sebaliknya dan sudah terlambat untuk dianggarkan lagi oleh masing – masing kabupaten kota dan ini akan menghambat kegiatan tertentu.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang secara umum diarahkan untuk :

- Menciptakan good governance
- Memberikan pelayanan prima
- Menata administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Akurasi dan tertib data base

2.4 Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Untuk memenuhi keinginan dari Undang–Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan, maka peningkatan pelayanan

publik di bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih cepat dan tidak dipungut biaya untuk masyarakat di wujudkan dalam bentuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk, penerbitan Kartu Keluarga, serta semua pengurusan dokumen kependudukan dan pelayanan penerbitan dokumen pencatatan sipil. Lebih jauh lagi akan ditempuh upaya–upaya yang lebih dengan terus meningkatkan pelayanan dalam bentuk perekaman dan penjemputan berkas/ dokumen masyarakat langsung ke wilayah yang bersangkutan. Upaya tersebut diharapkan dengan adanya bantuan kendaraan dengan menyiapkan unit mobil keliling dengan perlengkapan dan sarana pendukung alat cetak, jaringan, input data dan lain sebagainya.

Perbaikan pelayanan dilakukan dengan penyederhanaan prosedur, kepastian tarif (Gratis), kecepatan pelayanan dilakukan dengan modernisasi dan penerapan teknologi berbasis elektronik serta mempersingkat waktu. Diharapkan setiap permohonan dokumen dapat segera diselesaikan pada hari itu juga, untuk memberikan kemudahan dan menghindari penumpukan berkas pemohon.

Sehingga beberapa tahun ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak langsung mengakomodir usulan program dan kegiatan secara fisik yang di usulkan oleh masyarakat, yang dilakukan adalah selalu meningkatkan pelayanan terus menerus sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat yaitu dengan memberikan kepuasan dalam bentuk pelayanan prima. Untuk pengisian tabel tidak ada karena tidak ada usulan kegiatan pada Musrembang Kabupate

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 menargetkan peningkat kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu indeks kepuasan Masyarakat (IKM).

Program kegiatan dalam rencana kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan daerah sebagai beikut :

A. Program dan Urusan Dinas

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	**INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG**
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
- Sub. Kegiatan: Penyusunan Dokumen perangkat Daerah	Jumlah penyusunan perencanaan perangkat daerah
- Sub. Kegiatan: koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD
- Sub. Kegiatan: Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Sub. Kegiatan: Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan evaluasi kinerja perangkat daerah
Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
- Sub. Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Akhir Tahun SK	Jumlah Laporan Keuangan Tahun SKPD DAN Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG
- Sub. Kegiatan: Penyediaan gaji dan tunjungan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN
Kegiatan: Administrasi umum perangkat daerah	**Cakupan Administrasi umum perangkat daerah**
- Sub. Kegiatan: Dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik pada SKPD
- Sub. Kegiatan: Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket Bahan Logistik Kantor yang Disediahkan
- Sub .Kegiatan : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediahkan
- Sub. Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket peralatan rumah tangga yang disediahkan
- Sub . Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
- Sub. Kegiatan: Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan
- Sub Kegiatan: pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- Sub Kegiatan: sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang sosialisasi peraturan perundang-undangan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**cakupan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- Sub Kegiatan: pengadaan kendaraan dinas Operasional atau lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
- Sub Kegiatan: pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Kegiatan: Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	**cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah**
- Sub. Kegiatan: Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan
- Sub. Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat
Kegiatan: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG
- Sub Kegiatan: pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: pemeliharaan/ rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi
- Sub Kegiatan: Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan jasa perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya
- Sub Kegiatan: penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas opearsional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapanganyang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya
PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
Kegiatan : Pelayanan pendaftaran penduduk	**Persentase Dokumen Pelayanan pendaftaran penduduk**
- Sub Kegiatan : Pencatatan atau pelaporan peristiwa kependudukan	Jumlah laporan pencatatan atas peristiwa kependudukan
- Sub. Kegiatan : pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan : peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah Laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk
- Kegiatan: Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	**Persentase pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk**
- Sub Kegiatan: bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan bimbingan teknis terkait pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan : pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG
- **Kegiatan: penataan pendaftaran penduduk**	**Persentase penataan pendaftaran penduduk**
- Sub Kegiatan : pengadaan Dokumen kependudukan selain belangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain belangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan
- **Kegiatan: Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Persentase Penyelenggaraan Pendataran Penduduk**
- Sub Kegiatan: Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil fasilitasi pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: Koordinasi atar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/ kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di Kabupaten/Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk
- Sub Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah data kependudukan terkait pendaftaran penduduk yang dimamfaatkan
- Sub Kegiatan: sosialisasi pendaftaran pendudu	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
Kegiatan: Pelayanan Pencatatan Sipil	**Persentase Pelayanan Pencatatan Sipil**
- Sub. Kegiatan: Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
- Sub. Kegiatan: Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil	**Persentase pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
- Sub. Kegiatan: bimbingan teknis terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil bimbingan teknis terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG
Kegiatan: Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil	Jumlah Hasil Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan di kab/kota dalam penerbitan pelayanan pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan: koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah,talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam	Jumlah laporan hasil koordinasi dengan kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota dan pengadilan agama yang berkaitan dengan pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil	Jumlah dokumen hasil pemamfaatan data kependudukan terkait pencatatan sipil
- Sub. Kegiatan : sosialisasi terkait Pencatatan sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait pencatatan sipil
Kegiatan: Program pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase OPD yang telah memamfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**
Kegiatan: pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	**Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya**
- Sub. Kegiatan: Bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan	Jumlah lap. Hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data kependudukan

PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB.KEG
Kegiatan: Pengumpulan Pengeloaan Informasi Administrasi Kependudukan dan pemamfaatan dan penyajian database kependudukan	**Persentase database kependudukan sidrap**
- Sub. Kegiatan: kerjasama pemamfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen kerjasama pemanfaatan data
- Sub. Kegiatan: pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen dan kependudukan yang diolah dan disajikan
Kegiatan: Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	**Persentase pengelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrasi**
- Sub. Kegiatan: Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabupaten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah di kabuapten/kota dalam penertiban pengelolaan informasi administrasi kependudukan
- Sub. Kegiatan: penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Jumlah data kependudukan yang akurat dan dapat dipertanggun jawabkan
- Sub. Kegiatan: penyelenggaraan pemamfaatan data kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan
- Sub. Kegiatan: sosialisasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi informasi administrasi kependudukan

3.2. Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana kerja Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penjabaran RPJMD untuk jangka waktu satu tahun memuat berbagai rencana kerja program kegiatan. Rencana kerja merupakan acuan dalam menyempurnakan rencana kerja SKPD untuk tahun yang sama. Proses penyusunan dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dalam proses penyusunannya untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sidenreng Rappang dalam penjabaran dan implementasi rencana kerja mendapat dukungan dana yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAU) yang berasal dari Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan adalah :

1. Program dan kegiatan Rutin tahunan.
2. Program dan Kegiatan yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan
3. Program dan Kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat dan menjadi skala prioritas di masing-masing Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang dijelaskan lebih rinci pada Tabel Rencana Program dan (*Tabel III.1*)

Tabel III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Sidrap

Kode						Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGRAN 2024							
								SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
								LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Kelompok Penerima Manfaat	LOKASI	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Kelompok Penerima Manfaat
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
URUSAN PEMERINTAH BIDANG ADM. KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. SIDRAP										**3.131.152.696**				**4.235.756.000**	
2.	**12.**	**01**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**2.481.152.696**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**3.116.921.000**	**Pegawai Disdukcapil**
2.	**12.**	**01**	**.2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**5.000.000**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**46.520.500**	**Pegawai Disdukcapil**
2.	12.	01	.2	01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	9 dokumen	5.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	9 dokumen	46.520.500	Pegawai Disdukcapil

						koordinasi dan penyusunan dokumen RKA - SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laoran hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahana RKA-SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil
						Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhisar realisasi kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	6	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah laoranEvaluasi kinerja perangkat daerah	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2.	**12.**	**01**	**.2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**1.889.192.696**	**ASN DISDUKCAPIL**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**2.103.800.000**	**ASN DISDUKCAPIL**
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Lapporan keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	ASN DISDUKCAPIL	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	ASN DISDUKCAPIL
2.	12.	01	.2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	252	Orang/ bulan	1.889.192.696	ASN DISDUKCAPIL	Kab. Sidenreng Rappang	252	Orang/ bulan	2.103.800.000	ASN DISDUKCAPIL
2.	**12.**	**01**	**.2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**12.500.000**	**Pegawai Disdukcapil**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**275.425.000**	**Pegawai Disdukcapil**

						Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Ddokumen dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	2.500.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	6.637.000	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	2.500.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	2.500.000	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Paket	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	2.500.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	4	Paket	2.500.000	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	220	Laporan	5.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	220	Laporan	263.788.000	ASN DISDUKCAPIL

2.	**12.**	**01**	**.2**	**05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**150.000.000**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**
						Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Pegawai Disdukcapil
						Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kab. Sidenreng Rappang	0	orang	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	orang	0	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Pegawai Disdukcapil
						Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Sidenreng Rappang	24	orang	75.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	24	orang	0	Pegawai Disdukcapil
						Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah oarang mengikuti Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kab. Sidenreng Rappang	24	orang	75.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	24	orang	0	Pegawai Disdukcapil
2.	**12.**	**01**	**.2**	**07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**2.000.000**	**Pegawai Disdukcapil**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**190.646.000**	**Pegawai Disdukcapil**
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Unit	**0**	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Unit	**0**	Pegawai Disdukcapil

2.	12.	01	.2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1	unit	1.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	1	unit	4.146.000	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1	unit	1.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	18	unit	186.500.000	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil
2.	**12.**	**01**	**.2**	**08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**364.120.000**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**417.666.500**	**Pegawai Disdukcapil**
2.	12.	01	.2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	39.980.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	68.252.000	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	323.640.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	307.762.500	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	500.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	41.652.000	Pegawai Disdukcapil

						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2.	**12.**	**01**	**.2**	**09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**58.340.000**	**Pegawai Disdukcapil**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**82.863.000**	**Pegawai Disdukcapil**
2.	12.	01	.2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan dan Mesin Lainnya yang dipeliahara	Kab. Sidenreng Rappang	23	Unit	5.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	23	Unit	20.840.000	Pegawai Disdukcapil
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabiltasi	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil
2.	12.	01	.2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Jasa perorangan dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	10	unit	53.340.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	15	unit	62.023.000	Pegawai Disdukcapil
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipeliahara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	unit	0	Pegawai Disdukcapil

2	**12**	**02**				**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**Persentase Perekaman KTP elektronik**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**99,4**	**Persen**	**600.000.000**	**Masyarakat Kab Sidrap**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**99,4**	**Persen**	**930.953.000**	**Masyarakat Kab Sidrap**
2	**12**	**02**	**2**	**01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**persentase dokumen Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**600.000.000**	**Pegawai Disdukcapil**	Kab. Sidenreng Rappang	**100**	**Persen**	**930.953.000**	**Pegawai Disdukcapil**
2	12	02	2	01	0006	Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Laporan Pencatatan Atas Peristiwa Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	72	laporan	50.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	24	laporan	22.954.000	Pegawai Disdukcapil
2	12	02	2	01	0001	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	24	Dokumen	50.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	24	Dokumen	568.992.000	Pegawai Disdukcapil
2	12	02	2	01	0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapora Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	36	Laporan	500.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	36	Laporan	339.007.000	Pegawai Disdukcapil
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	Kab. Sidenreng Rappang	**0**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**	Kab. Sidenreng Rappang	**0**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**
						Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Bimbingan teknis terkait Pendaftran Penduuduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil

						Penataan Pendaftaran Penduduk	**persentase pelaksanaan pendaftaran penduduk**	Kab. Sidenreng Rappang	**0**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**	Kab. Sidenreng Rappang	**0**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan Kebutuhan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	0	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	0	Masyarakat Kab Sidrap
						Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	**Persentase Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**0**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**0**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**
						Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Lapran Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Data Kependudukan Terkait Pendaftran Penduduk yang dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	0	Pegawai Disdukcapil
						Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi Pendaftaran Penduduk	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil

2	**.12**	**.03**				**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**Persentase Kepemilikan akta kelahiran**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**95**	**Persen**	**25.000.000**	**Masyarakat Kab. Sidrap**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**95**	**Persen**	**94.822.000**	**Masyarakat Kab. Sidrap**
2	**12**	**03**	**02**	**01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Persentase dokumen Pelayanan Pencatatan Sipil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**16.000.000**	**Masyarakat Kab. Sidrap**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**73.000.000**	**Masyarakat Kab. Sidrap**
2	12	03	02	01	0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Sidenreng Rappang	2.700	dokumen	8.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	2.000	dokumen	40.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap
						Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0	Paket	0	Masyarakat Kab. Sidrap
2	12	03	02	01	0006	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan	Kab. Sidenreng Rappang	6	Layanan	8.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	6	Layanan	33.000.000	Masyarakat Kab. Sidrap
						Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**0**	**Pegawai Disdukcapil**
						Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil

						Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan yang Telah Dilakukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	**12**	**03**	**02**	**02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Persentase Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**9.000.000**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**21.822.000**	**Pegawai Disdukcapil**
2	12	03	02	02	0003	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	9.000.000	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	12	Laporan	21.822.000	Pegawai Disdukcapil
						Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	3	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
						Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan Terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Dokumen	0	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	13.950	Dokumen	0	Masyarakat Kab. Sidrap

						Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan hasil Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Masyarakat Kab. Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Masyarakat Kab. Sidrap
2	**12**	**04**				**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**14,7**	**Persen**	**25.000.000**	**Masyarakat Kab Sidrap/opd**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**14,7**	**Persen**	**93.060.000**	**Masyarakat Kab Sidrap/opd**
						Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	**Persentase pembinaan petugas/operator dalam menjalankan tugasnya**	Kab. Sidenreng Rappang	**0**	**Persen**	**0**	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	**0**	**Persen**	**0**	Pegawai Disdukcapil
						Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Lap. Hasil Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	**12**	**04**	**02**	**01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**	**Persentase database kependudukan sidrap**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**8.000.000**	**Pegawai Disdukcapil**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**30.033.000**	**Masyarakat Kab Sidrap/opd**
						Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja sama Pemafaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Masyarakat Kab Sidrap/opd	Kab. Sidenreng Rappang	0	dokumen	0	Masyarakat Kab Sidrap/opd

2	12	04	02	01	0001	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen dan Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Kab. Sidenreng Rappang	12	dokumen	8.000.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	12	dokumen	30.033.000	Masyarakat Kab Sidrap
2	**12**	**04**	**02**	**01**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**Persentase pelaksanaan pegelolaan administrasi kependudukan yang memenuhi standar pelayanan/kepuasan masyarakat untuk pelayanan administrsi**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**17.000.000**	Masyarakat Kab Sidrap	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100**	**Persen**	**63.027.000**	Masyarakat Kab Sidrap
						Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penerbitan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Pegawai Disdukcapil
2	12	04	02	01	0008	Penyajian Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Sidenreng Rappang	12	Dokumen	8.000.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	12	Dokumen	16.388.000	Masyarakat Kab Sidrap
2	12	04	02	01	0004	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	3	Dokumen	9.000.000	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	3	Dokumen	46.639.000	Masyarakat Kab Sidrap

						Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Infromasi Administrasi Kependudukan	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Masyarakat Kab Sidrap	Kab. Sidenreng Rappang	0	Laporan	0	Masyarakat Kab Sidrap

BAB IV
PENUTUP

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dalam rangka pencapaian dan peningkatan kualitas kinerja merencanakan akan melaksanakan 4 (Empat) program dan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan dan 21 (dua puluh satu)Sub Kegiatan untuk mendukung Program Pemerintah Pusat dalam hal Penataan administrasi kependudukan dan Pemenuhan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil serta penerapan kepemilikan KTP-el. Selain itu jugauntuk mewujudkan pelayanan yang lebih mengarahkan pada pencapaian visi dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang. Penjabaran dari tugas dan fungsi dijabarkan dalam bentuk pelaksanaan program kegiatan, untuk tahun 2024 sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pendaftran Penduduk
3. Program Pencatatan Sipil
4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan Program dan kegiatan yang akan dicapai satu tahun ke depan, dengan harapan pelaksanaan program kegiatan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan serta evaluasi lebih maksimal, sehingga memberikan hasil yang optimal bagi pembangunan masyarakat Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, bebas dari kemiskinan sehingga dapat melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal yang dapat membangun kesejahteraan masyarakat Indonesia dan khususnya Kabupaten Sidenrang Rappang kedepan.

Untuk mencapai keberhasilan terhadap capaian kinerja sebagaimana yang diharapkan, maka faktor yang memungkinkan sangat berpengaruh

terhadap tingkat capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain :

- Meningkatnya kemampuan aparat
- Meningkatnya tertib administrasi
- Tersedianya sarana dan prasarana.
- Munculnya respon positif dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan.
- Terpenuhinya alokasi anggaran, khususnya dalam memberikan pelayanan jemput bola dalam rangka mendekatkan diri kepada masyarakat.
- Terpenuhinya hak kepemilikan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil abupaten Sidenreng Rappang dibuat untuk dipergunakan sebagai bahan kajian dan pedoman dalam mengimplementasikan pelaksanaan tugas–tugas dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Pangkajene Sidenreng, 01 Agustus 2024

KEPALA DINAS

PATAHANGI NURDIN, S.IP
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19691220 199009 1 002

RENCANA KERJA PERUBAHAN(RENJA-P)

TAHUN 2024

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Landasan Hukum.....4

1.3 Maksud dan Tujuan.....6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....8

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II 19

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 22

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN 49

BAB IV PENUTUP 67

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Renstra Perubahan 2018-2023) 9

Tabel II.1.b Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (RPD 2024-2026) 21

Tabel III Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 28

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang disingkat Renja Perubahan Perangkat Daerah (PD) adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana Program/Kegiatan yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai tolak ukur pencapaian kinerja dalam kurun waktu satu tahun. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang serta Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah.

Perumusan Program dan Kegiatan serta penganggaran mengacu pada pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan pencapaian sasaran pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Renja Perubahan 2024 ini disusun berdasarkan Renstra DPMPTSP 2024-2026. Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanan Anggaran (DPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

I.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam menyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dimaksud;

1. Untuk memberikan arahan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2024 yang akan dibiayai dengan APBD dan sumber-sumber biaya lainnya.
2. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan selama tahun 2024 yang mencakup rencana capaian kinerja (target), untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (Renja-Perubahan) DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah ;

1. Sebagai landasan atas acuan perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Menguraikan secara strategis tahapan target yang akan dicapai dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan, berdasarkan isu-isu aktual/strategis yang dihadapi.
3. Menjadi acuan penilaian kinerja pelaksanaan program/kegiatan.

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Perubahan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu tersebut. Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan sesuai target kinerja dalam Renja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 didasarkan pada Renstra DPMPTSP Tahun 2021-2023 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, untuk mengetahui :

a. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi taget kinerja program/kegiatan;
b. Implikasi yang timbul tehadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
c. Kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Hasil Kinerja Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada Tabel II.1 sebagai berikut :

Tabel II.1. a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	200	%	200				200	100
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	200	%	200				200	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.01.0001			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3				3	100
2.18.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen	3				3	100
2.18.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen	3				3	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan	3				3	100
2.18.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah	3	%	101				101	3366,667

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.02.0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Org/Bln	55				55	100
2.18.01.2.02.0005			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	2				2	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	24	Bulan	24				24	100
2.18.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	Paket	65				65	100
2.18.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5	Paket	5				5	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33	Paket	33				33	100
2.18.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Laporan	7				7	100
2.18.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90	Laporan	86				86	95,55556

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Bulan	24				24	100
2.18.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	677	Laporan	666				666	98,37518
2.18.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	36				36	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Laporan	6				6	100
2.18.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12				12	100
2.18.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	200	%	177				177	88,5

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	22	Unit	16				16	72,72727
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	100	%	100				100	100
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	2	Dokumen	1				1	50

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.02.2.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen	1				1	100
2.18.02.2.01.0004			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1	Dokumen	1				1	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.02.2.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	12	Dokumen	12				12	100
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	20	Dokumen	20				20	100
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	100	%	100				100	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	12	Kegiatan	12				12	100
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1	Dokumen	1				1	100
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	93	%	81				81	87,09677

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.04.2.01		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	10591	Izin	10906				10906	102,9742
2.18.04.2.01.0006			Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	10591	Pelaku Usaha	10906				10906	102,9742

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.04.2.01.0007			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	300	Pelaku Usaha	255				255	96

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.04.2.01.0008			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	300	Kegiatan Usaha	255				255	96
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL			Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	180		184				184	102,2222

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	225	Pelaku Usaha	268				268	119,1111
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	#VALUE!	Pelaku Usaha	#VALUE!				#VALUE!	#VALUE!

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.05.2.01.0006			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	12	Kegiatan Usaha	12				12	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2		3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL		Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	200	%	200				200	100
2.18.06.2.01		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12	Dokumen	12				12	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
2.18.06.2.01.0002			Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen	12				12	100

Tabel II.1. b (RPD 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

NAMA OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300	%		100	50	50	50	20
2.18.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan	300	%		100	50	50	50	20
2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen		1	1	100	1	33

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.01.2.01.0002			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen		1	1	100	1	33
2.18.01.2.01.0004			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen		1	1	100	1	33
2.18.01.2.01.0006			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	Laporan		1	1	1	1	100

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah	300	%		100	50	50	50	20
2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55	Org/Bln		19	19	100	19	34
2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan		1	1	100	1	33
2.18.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Waktu Pelaksanaan Administrasi Umum	24	Bulan		12	6	50	6	20

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.01.2.06.0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	65	Paket		37	33	89	33	35
2.18.01.2.06.0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	Paket		26	18	69	18	50
2.18.01.2.06.0003			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33	Paket		11	5	45	5	20
2.18.01.2.06.0008			Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7	Laporan		5	3	60	3	100
2.18.01.2.06.0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150	Laporan		25	18	50	86	16

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	24	Bulan		12	6	50	50	16
2.18.01.2.08.0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	677	Laporan		130	56	50	50	16
2.18.01.2.08.0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan		12	6	50	50	16
2.18.01.2.08.0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15	Laporan		5	4	70	70	16
2.18.01.2.08.0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan		12	6	50	50	16

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	300	%		100	50	50	50	16
2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	39	Unit		13	10	80	80	16
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase Perencanaan Investasi yang Ditindaklanjuti	300	%		100	50	50	50	16
2.18.02.2.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perda yang Diterbitkan	2	Dokumen		2	0	0	0	0

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.02.2.01.0001			Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1	Dokumen		1	0	0	0	0
2.18.02.2.01.0004			Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	3	Dokumen		1	1	1	1	16
2.18.02.2.02		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi dan Peluang Usaha di Daerah	36	Dokumen		12	6	50	50	20

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.02.2.02.0004	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	36	Dokumen		12	6	50	50	20
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Promosi Penanaman Modal yang Dilaksanakan	300	%		100	50	50	50	16
2.18.03.2.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota	6	Kegiatan		2	0	0	0	0
2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	3	Dokumen		1	0	0	0	0

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Izin yang Diterbitkan Sesuai SOP	93	%		80	40	40	40	16
2.18.04.2.01	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Izin yang Terbit dengan Tepat Waktu Sesuai dengan SOP	15591	Izin		5100	2530	50	2530	16
2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	15591	Pelaku Usaha		5100	2530	50	2530	16

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.04.2.01.0007			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	120	Pelaku Usaha		18	10	51	10	8
2.18.04.2.01.0008			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko	Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha	750	Kegiatan Usaha		250	215	87	215	28

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	270	Persen		95	45	45	45	16
2.18.05.2.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Yang Taat Terhadap Ketentuan Peraturan Penanaman Modal	750	Pelaku Usaha		250	215	87	215	28
2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	750	Pelaku Usaha		250	215	87	215	28

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.05.2.01.0006			Pengawasan Penanaman Modal	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	90	Kegiatan Usaha		30	15	50	15	16
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL			Persentase Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yang Dapat Diakses	300	%		100	50	50	50	16

KODE	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2024-2026	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024-2026)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8=(7/6)	9=5	10
2.18.06.2.01	Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyajian Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	12	Dokumen		4	2	50	2	16
2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12	Dokumen		4	2	50	2	16

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Dengan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang serta untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang, kegiatan yang direncanakan ke depan harus diarahkan dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsiDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai lembaga penanaman modal dan penyelenggara pelayanan perizinan dengan tugas dan fungsi adalah :

a. Merumuskan kebijakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
d. Pelaksanaan administrasi dinas; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

Renja yang disusun oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan langkah awal untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan. Dalam penyusunan Renja ini perlu dilakukan analisis terhadap lingkungan baik internal maupun eksternal dengan pendekatan analisis SWOT. Berdasarkan pengamatan terhadap kondisi internal *(Strengths and Weaknesses)* dan kondisi eksternal *(Oppurtunities and Threats)* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Analisis Lingkungan Internal
    1.1. Kekuatan (Strengths)
        a. Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
        b. Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin.
    1.2. Kelemahan (Weaknesses)
        a. Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;
        b. Koordinasi dengan investor belum optimal;
        c. Belum tersedianya instrumen pendukung penanganan penanaman modal dan perizinan.
2. Analisis Lingkungan Eksternal
    1.1 Kesempatan (Oppurtunities)
        a. Laju pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dengan banyaknya potensi investasi yang belum tergali
        b. Adanya kebijakan pemerintah untuk menertibkan setiap kegiatan/usaha masyarakat
        c. Dukungan dari visi pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menjadikan Sidenreng Rappang sebagai pusat agribisnis modern
    1.2 Ancaman (Threats)
        a. Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
        b. Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
        c. Sikap masyarakat yang kurang antusias terhadap pengembangan Penanaman Modal dan Perizinan
        d. Persaingan investasi dengan Kabupaten lain semakin ketat

Dengan mempergunakan analisis SWOT, maka strategi yang dapat dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan dengan melakukan kebijakan sebagai berikut :

1) Peningkatan promosi

   Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan terupdate, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.

2) Penyempurnaan regulasi

   Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan yang kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

3) Peningkatan pemanfaatan teknologi berbasis IT

   Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalammemudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakatterhadap teknologi tersebut.

4) Peningkatan SDM pelayanan

   Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal;

5) Peningkatan sarana prasarana

   Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.

6) Peningkatan kapasitas kelembagaan

Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkanpelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar OperasionalPelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

3. Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
   a. Adanya motivasi yang tinggi dari staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan tetap berupaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme.
   b. Adanya stabilitas keamanan yang kondusif untuk meningkatkan minat investor dan pengusaha
   c. Adanya koordinasi yang baik anat instansi terkait
   d. Adanya dukungan dari masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan investasi.

4. Isu – isu Strategis

Terdapat isu-isu penting yang berpengaruh kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah hal-hal sebagai berikut :

a. Citra pelayanan yang dianggap masih berbelit-belit, sulit diakses, memiliki prosedur yang sangat rumit serta tidak adanya kepastian waktu dan keterbukaan biaya pelayanan;
b. Masih minimnya sosialisasi dan informasi pelayanan perizinan;
c. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang perizinan;
d. Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan;
e. Anggapan bahwa pengurusan izin hanya untuk masyarakat yang ada di perkotaan;

f. Masyarakat yang tersebar jauh dari pusat pelayanan perizinan.

Dalam Pelayanan Perizinan, ada dua paradigma utama yang perlu dilakukan, yaitu :

a. Reformasi regulasi perizinan, saat ini perizinan usaha sangat banyak dan tumpang tindih.
b. Reformasi birokrasi perizinan, saat ini persyaratan pengurusan perizinan sangat banyak, tumpang tindih dan menyangkut banyak instansi teknis sehingga prosedur pelayanan tidak efisien.

Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan birokrasi penyelenggaraan perizinan dalam bentuk :

a. Pemangkasan tahapan dan prosedur, baik lintas instansi maupun dalam instansi.
b. Pemangkasan biaya, hal ini dapat dilakukan apabila prosedur juga dipangkas.
c. Pengurangan jumlah persyaratan, jumlah persyaratan dapat dikurangi dan satu jenis persyaratan sudah dapat digunakan untuk berbagai izin yang diperlukan.
d. Pengurangan jumlah paraf dan tanda tangan
e. Pengurangan waktu pemprosesan, dengan sistem dan prosedur yang disederhanakan sehingga pemangkasan waktu pemprosesan mendapat pertimbangan utama.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana kerja Perubahan (Renja Perubahan) dan Pendanaan tahun 2024 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah maupun untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah.

Renja dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan usulan program/ kegiatan Tahun 2024 sebagai berikut:

4.1 Program dan Kegiatam

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
   1.1 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota
2 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Modalogram Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
   2.1 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pelayanan Penanaman Modal
   3.1 Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota
4. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
   4.1 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
5 Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal

5.1 Pengelolaan Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
   6.1 Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   6.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   6.3 Administrasi Umum Perangkat Daerah
   6.4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   6.5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2024 ini merupakan rencana kerja tahun 2024 dan prakiraan maju tahun 2025 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintumasih terdapat beberapa kekurangan yang akan menjadi bahan di tahun berikutnya, sehingga akan menjadi perhatian untuk dapat disempurnakan mengingat Renja ini akan menjadi pedoman penyusunan RKA dan DPA tahun 2024.

Renja menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Renja ini dapat dilaksanakan dan mencapai tujuannya bila dilakukan dengan komitmen yang tinggi, kerja sama tim dan bekerja dengan niat tulus ikhlas dengan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya yang kita miliki. Dukungan dan partisipasi aktif seluruh pejabat dan staf serta masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang kita perlukan agar kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar sehingga visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintudapat terwujud.

Demikian Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 ini dibuat dan diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program dankegiatan padaDinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga seluruh program dan kegiatan akan dapat dicapaisecara terukur, terarah, efektif dan efisien.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu PintuKabupaten
Sidenreng Rappang

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19741231 199003 1 126



RENCANA KERJA
TAHUN 2024

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyusunan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Renja Kementerian/Lembaga terkait, Renja Perangkat Daerah Provinsi, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Rancangan awal Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sebagai Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai kewajiban menyusun dokumen Rancangan awal Renja. Dokumen Rancangan awal Renja tersebut merupakan bahan acuan bagi pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja tersebut juga sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang serta perencanaan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang di tahun mendatang.

Dalam proses penyusunannya, sebelum ditetapkan menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rancangan awal Renja akan diverifikasi kesesuainnya terhadap RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Setelah disempurnakan dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang, maka Renja Perangkat Daerah tersebut mendapat pengesahan oleh Bupati Sidenreng Rappang dan selanjutnya ditetapkan menjadi Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggunjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4693);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011, Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Dearah (RPJPD Propinsi Sulawsesi

Selatan Tahun 2008-2028) (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015, Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5).

Maksud dan Tujuan

Rancangan awal Renja selaku Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan maksud:

1) Sebagai bahan perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024.
2) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan terhadap capaian indikator kinerja program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai penjabaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026

Sedangkan tujuan penyusunan Rancangan awal Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga BerencanaKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah:

1) Merumuskan program, dan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
2) Mewujudkan sinergitas dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;
3) Menciptakan efisiensi sumber daya dalam perencanaan pembangunan daerah;
4) Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program tahunan daerah;
5) Sebagai acuan dalam penyusunan program prioritas tahun 2023

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 129, sebagai berikut:

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.

1. 1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 - 2026.

   Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun berjalan (Tahun 2023). Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024 - 2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan

2. 2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

   Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2019 tentang SPM.

2. 3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

   Berisikan tentang tingkat kinerja pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan hal kritis yang terkait

dengan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun 2024.

2. 4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Berisikan telaah RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan kebutuhan anggaran program dan kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

2. 5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah lainnya yang langsung ditujukan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3. 1 Telaah terhadap kebijakan nasional

Berisikan penelaahan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. 2 Tujuan dan sasaran renja PD

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Sidenreng Rappang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

3. 3 Program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif maupun kombinasi keduanya, serta perumusan program dan kegiatan digambarkan dengan tabel.

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun apabila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaanya serta rencana tindak lanjut.

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu Dinasn Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018 - 2023.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2022 dimaksudkan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan program dankegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi. Hasil evaluasi tersebut sangat penting untuk menilai keberhasilan suatu perencanaan pembangunan yang telah dilaksanakan dan sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan-kebijakan perencanaan pembangunan di tahun-tahun mendatang.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang dan/atau realisasi APBD untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Pokok-pokok materi yang disajikan dalam evaluasi adalah:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi setiap program/kegiatan berdasarkan formulir evaluasi pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 disajikan pada tabel T-C.2.9 berikut ini.

Table T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**		**100**	**0**	**100**	**69,17**	**69,17**	**100**	**69,17**	**69,17**
2.14.02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**Total Fertility Rate (TFR)**	**100**	**0**	**100**	**79,86**	**79,86**	**100**	**79,86**	**79,86**
2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)**	**100**	**0**	**100**	**83,20**	**83,20**	**100**	**83,20**	**83,20**
2.14.02.2.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	Jumlah OPD yang terlibat dalam Keserasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.02.2.01.02	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang terlibat dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	100	0	100	92,20	92,20	100	92,20	92,20
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten**	**100**	**0**	**100**	**57,51**	**57,51**	**100**	**57,51**	**57,51**

2.14.02.2.02.01	Perumusan Parameter Kependudukan	Jumlah OPD yang terlibat dalam Perumusan Parameter Kependudukan	100	0	100	91,41	91,41	100	91,41	91,41

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.02.2.02.02	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah Penyediaan dokumen Data Kependudukan yang tersedia	100	0	100	89,53	89,53	100	89,53	89,53
2.14.02.2.02.03	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga yang tersedia	100	0	100	79,86	79,86	100	79,86	79,86
2.14.02.2.02.04	Pemetaan Kependudukan	Jumlah Dokumen Pemetaan Kependudukan yang tersedia	100	0	100	83,20	83,20	100	83,20	83,20
			100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Ratio Akseptor KB**	**100**	**0**	**100**	**85.81**	**85.81**	**100**	**85.81**	**85.81**
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**100**	**0**	**100**	**82.29**	**82.29**	**100**	**82.29**	**82.29**
2.14.03.2.01.01	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Balai KB yang memberikan advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	100	0	100	71,94	71,94	100	71,94	71,94
2.14.03.2.01.02	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Balai KB yang memberikan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal	100	0	100	99,65	99,65	100	99,65	99,65
2.14.03.2.01.03	Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK	Jumlah Balai KB yang menerima KIE Program KKBPK	100	0	100	100	100	100	100	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK**	**100**	**0**	**100**	**98.62**	**98.62**	**100**	**98.62**	**98.62**
2.14.03.2.02.01	Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah PKB PLKB melakukan Pembinaan oleh penyuluh Lapangan KB (PLKB) terhadap kader IMP dan Program KKBPK	100	0	100	97,04	97,04	100	97,04	97,04
2.14.03.2.02.02	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai KB yang mendapatkan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	100	0	100	99,88	99,88	100	99,88	99,88
2.14.03.2.02.03	Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/ Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	Jumlah PKB yang mendapatkan Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.02.04	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) yang dimanfaatkan dalam Program KKBPK	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**cakupan fasilitas kesehatan yang mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**100**	**0**	**100**	**78.28**	**78.28**	**100**	**78.28**	**78.28**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.03.01	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Faskes yang mendapatkan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	100	0	100	38,97	38,97	100	38,97	38,97
2.14.03.2.03.02	Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan pelatihan dan pembinaan Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.03	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang diberikan penyuluhan untuk menggunakan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.06	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Faskes yang mendapatkan Sarana Penunjang Pelayanan KB	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.03.2.03.08	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya yang mendapatkan Peningkatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.03.2.03.09	Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan yang mendapatkan Peningkatan kompotensi SDM Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak Hak Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.10	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Faskes yang mendapatkan Peningkatan Kompetensi & SDM Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.03.11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Faskes yang mendapatkan Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	100	0	100	73,72	73,72	100	73,72	73,72
2.14.03.2.03.13	Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Balai KB yang memberikan penyuluhan Kesertaan KB Pria (MOP)	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	100	0	100	**80.58**	**80.58**	100	**80.58**	**80.58**
2.14.03.2.04.04	Pembinaan Terpadu Kampung KB	Jumlah Kampung KB Yang di jadikan lokasi pembinaan Terpadu Kampung KB	100	0	100	80,58	80,58	100	80,58	80,58

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Indeks Pembangunan Keluarga**	**100**	**0**	**100**	**86.72**	**86.72**	**100**	**86.72**	**86.72**
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**100**	**0**	**100**	**86.72**	**86.72**	**100**	**86.72**	**86.72**
2.14.04.2.01.01	Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah desa/kelurahan membentuk kelompok tribina dan UPPKS	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.04.2.01.07	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan promosi dan sosialisasi kelompok kegiatan ketahanan keluarga & UPPKS	100	0	100	0	0	100	0	0
2.14.04.2.01.08	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Kelompok yang di tempati pelaksanaan Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Klg)	100	0	100	0	0	100	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program Renstra Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program/ kegiatan Renja SKPD Tahun 2022	Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s/d tahun 2022	
					Target Renja Tahun 2022	Realisasi Renja Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9*	*10= (5+7+9)*	*11=(10/4)*
2.14.04.2.01.12	Sosialisasi IPK	Jumlah Kecamatan yang mendapatkan sosialisasi IPK	100	0	100	100	100	100	100	100
2.14.04.2.01.13	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	Jumlah kecamatan yang melakukan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK	100	0	100	55	55	100	55	55

Dari program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang sampai akhir Desember 2022, semua program/kegiatan yang dilaksanakan sudah memenuhi target. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua program/kegiatan dapat berjalan dengan baik sesuai rencana.

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 61 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, susunan, Organisasi, Tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana serta pengelolaan anggaran program dan kegiatan. Hal tersebut dalam rangka mewujudkan peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan.

Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan kinerja perangkat daerah tersebut meliputi:

1. Terpenuhinya administrasi perkantoran setiap bulan.
2. Terpenuhinya sarpras sesuai kebutuhan.
3. Persentase tingkat kedisiplinan pegawai OPD.
4. Persentase Aparat yang telah mengikuti Diklat/Pendidikan/ Pelatihan
5. Persentase dokumen perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang tersusun
6. Persentase Ketersediaan Obat essensial di puskesmas
7. Indeks Keluarga Sehat (RPJMD)
8. Persentase Sarana Prasarana, Distribusi, Sediaan Farmasi, Perbekalan kesehatan dan produksi pangan sesuai standar.
9. Persentase Posyandu Strata Purnama dan Mandiri

10. Persentase PHBS Rumah Tangga Strata Utama dan Paripurna (RPJMD)
11. Persentase PHBS Institusi Pendidikan Strata Utama dan Paripurna
12. Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
13. Persentase Balita Gizi buruk tertangani (RPJMD)
14. Persentase Desa/Keluarahan yang melaksanakan 5 Pilar STBM (RPJMD)
15. Persentase TPM yang memperoleh Sertifikat Laik Syarat Kesehatan
16. Persentase Tempat-tempat umum yang dibina
17. Jumlah puskesmas terakreditasi;
18. Cakupan penduduk miskin non kuota yang mempunyai Jaminan Pemeliharaan Kesehatan
19. Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTP (RPJMD)
20. Persentase fasilitas bangunan, sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya sesuai standar permenkes 43/2019
21. Persentase masyarakat miskin sakit yang tertangani di FKTR
22. Persentase Lansia mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
23. Ibu Hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar (SPM)
24. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan pesalinan sesuai standar (SPM)
25. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
26. Persentase Balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (SPM)
27. Persentase Puskesmas yang menggunakan Sistem Informasi Kesehatan Puskesmas (SIMPUS)
28. Proporsi Penderita DBD yang ditangani (RPJMD)
29. Persentase bayi yang memperoleh imunisasi dasar lengkap (RPJMD)
30. Angka keberhasilan pengobatan TB paru BTA positif minimal 85% (RPJMD)
31. Persentase Terduga TB Paru yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

32. Persentase angka kasus HIV yang diobati (RPJMD)
33. Persentase penderita HIV yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
34. Cakupan penemuan suspek Acute Flaccid Paralysis (Surveilans AFP) atau lumpuh layuh mendadak bukan karena ruda paksa dan usia dibawah 15 tahun (RPJMD)
35. Proporsi penderita malaria yang diobati (RPJMD)
36. Persentase orang dengan penyakit HT yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (RPJMD, SPM)
37. Persentase orang dengan penyakit DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar(RPJMD,SPM)
38. Persentase Orang usia 15-59 Tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)
39. Persentase Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar (SPM)

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan pengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang sehingga pencapaian kinerjanya diukur melalui pencapaian SPM. Tabel 2.2 menggambarkan secara rinci mengenai pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Tabel T-C.30.a
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1. Terwujudnya keluarga Sejahtera . **(Urusan Bid. Dalduk dan KB)**		1. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	2,08	2,14	100
	1. Menurunnya Angka Kelahiran Total	2. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	2,2	2,14	100
	2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern	3. Ratio Akseptor KB	55,30	76,81	96,01

Tabel T-C.30. b
PERKEMBANGAN PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Realisasi				Capaian (%)			
		2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
1. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	%	2,14	2,28	2,16	2,14	97,27	97,02	97,46	100
2. Rata-rata jumlah anak per keluarga pasangan usia subur	Anak/ Keluarga	2,14	2,28	2,16	2,14	97,27	97,02	97,46	100
3. Ratio Akseptor KB	%	79,75	77,75	76,25	76,81	99,77	99,01	99,34	96,01

Sumber Data : Perubahan RENSTRA 2018-2023 Dinkes, Dalduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang

Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang

Dari beberapa isu yang saat ini berkembang, ada beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor yang harus menjadi perhatian Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penentuan strategis dan kebijakan untuk mewujudkan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rumusan isu - isu di bidang Pengendalian Penduduk dan KB di Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain :

1. Penurunan jumlah rata - rata anak perkeluarga menjadi 2 orang
2. Mengatur jarak kelahiran pada masyarakat
3. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur

Berdasarkan isu - isu tersebut dapat dijadikan sebagai isu strategis sebagai berikut :

1. Peningkatan pemakaian alat kontrasepsi pada pasangan usia subur
2. Pengembangan JKN melalui :
    a. Peningkatan fasilitas yankes dan kualitas pelayanan yang menyeluruh
    b. Peningkatan SDM Kesehatan yang berkualitas dan merata
    c. Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan secara menyeluruh
3. Peningkatan manajemen dan sistem informasi kesehatan serta sinkronisasi perencanaan dan kebijakan antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.

Tabel T-C.31
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024
PROVINSI SULAWESI SELATAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NO	TARGET CAPAIAN					REALISASI CAPAIAN					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA Lokasi	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan	Indikator KINERJA	Lokasi	Realisasi Target	Pagu	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Sidenreng Rappang	**100**	**150.007.500**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Presentase Kelengkapan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Sidenreng Rappang	**46%**	**69.750.000**	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	**103.194.500**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Sidenreng Rappang	**51%**	**52.500.000**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang di Sediakan	Sidenreng Rappang	100%	**103.194.500**	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang di Sediakan	Sidenreng Rappang	51%	**52.500.000**	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sidenreng Rappang	100%	17.250.000	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Sidenreng Rappang	**100%**	17.250.000	
	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	Sidenreng Rappang	100%	17.250.000	Penyediaan Jasa Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang di Sediakan	Sidenreng Rappang	100%	17.250.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**29.563.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Jasa Penunjang dan Pemeliharaan Aset Pemerintah Daerah**	**Sidenreng Rappang**	**0**	**0**	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/Di Rehabilitasi	Sidenreng Rappang	100%	29.563.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN yang melakukan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang	0	0	

	Program Pengendalian Penduduk	**Cakupan Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok Umur 25-49 Tahun**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**280.526.400**	**Program Pengendalian Penduduk**	**Cakupan Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok Umur 25-49 Tahun**	**Sidenreng Rappang**	**85%**	**237.934.150**	
	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	**Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**78.415.700**	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**Cakupan OPD yang terlibat dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)**	**Sidenreng Rappang**	**61%**	**48.121.750**	
	Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokuman Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang	100%	**40.000.000**	Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokuman Penyusunan Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang	**33,6%**	**13.440.000**	
	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan. Dan Keluarga Berencana)	Sidenreng Rappang	100%	**38.415.700**	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan. Dan Keluarga Berencana)	Sidenreng Rappang	**90%**	**34.681.750**	
	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab./Kota	**Cakupan OPD yang terlibat Perumusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk tingkat**	Sidenreng Rappang	100%	**202.110.700**	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kab./Kota**	**Cakupan OPD yang terlibat Perumusan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk tingkat**	Sidenreng Rappang	**94%**	**189.812.400**	
	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Sidenreng Rappang	100%	9.719.900	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedia	Sidenreng Rappang	90%	8.752.400	
	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data	Sidenreng Rappang	100%	84.000.000	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Sidenreng Rappang	**100%**	84.000.000	

		Keluarga									
	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sidenreng Rappang	100%	104. 220.00	Pengelolaan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen Pengelolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Sidenreng Rappang	89%	93.220.000	
	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Sidenreng Rappang	100%	4.170.800	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Jumlah Dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	Sidenreng Rappang	92%	3.840.000	
	Program Keluarga Berencana	**Cakupan Persentase pemakaian Kontasepsi Modern (Modern Contraceptive prevalence)**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**6.553.515.100**	**Program Keluarga Berencana**	**Cakupan Persentase pemakaian Kontasepsi Modern (Modern Contraceptive prevalence)**	**Sidenreng Rappang**	**69%**	**4.524.301.120**	
	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**625.033.000**	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Sidenreng Rappang**	**79%**	**491.677.600**	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencan)	Sidenreng Rappang	100%	**293.043.500**	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencan)	Sidenreng Rappang	80%	235.238.5550	
	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Sidenreng Rappang	100%	70.950.000	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Cetak dan Elektronik Serta Media Luar Ruang	Sidenreng Rappang	100%	70.950.000	
	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sidenreng Rappang	100%	261.039.500	Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Advokasi Program Bangga Kencana Oleh Pokja Advokasi Kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Sidenreng Rappang	71%	185.560.000	

	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	**Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**135.300.000**	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**135.300.000**	
	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Sidenreng Rappang	100%	135.300.000	Pergerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)		Sidenreng Rappang	100%	135.300.000	
	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**3.865.445.100**	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Fasilitas Kesehatan Yang Mendapatkan Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB**	**Sidenreng Rappang**	**93%**	**3.579.711.260**	
	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penujang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Sidenreng Rappang	100%	15.350.000	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB Ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penujang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Sidenreng Rappang	88%	13.440.000	
	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengguna MKJP di Faskes dan Jaringannya	Sidenreng Rappang	100%	277.293.500	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Laporan Meningkatnya Pengguna MKJP di Faskes dan Jaringannya	Sidenreng Rappang	57%	157.077.750	
	Penyediaan Saran Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laoran Penyediaan Saran Penunjang Pelayanan KB	Sidenreng Rappang	100%	3.556.065.600	Penyediaan Saran Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Laoran Penyediaan Saran Penunjang Pelayanan KB	Sidenreng Rappang	95%	3.395.020.260	
	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Sidenreng Rappang	100%	16.736.000	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah laporan hasil pembinaan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Sidenreng Rappang	85%	14.173.250	
	Pemberdayaan dan Penigkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB	**Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan BerKB**	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**1.927.737.000**	**Pemberdayaan dan Penigkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**Cakupan Kader yang ikut dalam Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesetaraan BerKB**	**Sidenreng Rappang**	**23%**	**452.912.260**	
	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sidenreng Rappang	100%	3.700.500	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Laporan Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Sidenreng Rappang	98%	3.624.000	

	Fassilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Sidenreng Rappang	100%	1.261.878.000	Fassilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB	Sidenreng Rappang	19%	241.979.750	
	Pelaksanaan dan Pengelongelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkulitas	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana)	Sidenreng Rappang	100%	662.158.800	Pelaksanaan dan Pengelongelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkulitas	Jumlah kampung keluarga berkualitas yang mengikuti pelaksanaan dan pengelolaan program bangga kencana (Pembangunan keluarga, Kependudukan, dan Keluarga berencana)	Sidenreng Rappang	31%	207.308.510	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR)	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**1.346.850.000**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate / ASFR)	**Sidenreng Rappang**	**92**	**1.236.480.000**	
	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Cakupan Desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**300.000.000**	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Cakupan Desa/Kelurahan yang ikut dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Sidenreng Rappang**	**78%**	**232.750.000**	
	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluaarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Tersedia	Sidenreng Rappang	100%	300.000.000	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluaarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang Tersedia	Sidenreng Rappang	78%	300.000.000	
	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Sidenreng Rappang**	**100%**	**1.046.850.000**	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dan Pembangunan Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	**Sidenreng Rappang**	**96%**	**1.003.730.000**	
	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Sidenreng Rappang	100%	444.600.000	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Sidenreng Rappang	100%	444.600.000	
	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon	Jumlah keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon	Sidenreng Rappang	100%	602.250.000	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon	Jumlah keluarga Beresiko Stunting (Termasuk remaja calon pengantin/calon PUS,	Sidenreng Rappang	93%	559.130.000	

	PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	pengantin/calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				
	JUMLAH				**8.330.899.000**				**73%**	**6.068.465.270**	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024

.

BAB III.
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

A. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan Tahun 2020 - 2024

Dalam Program Pembangunan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah Standar Nasional (berlaku Umum secara Nasional) maka seyogyanya semua Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten harus menjabarkan kembali Rencana Strategis Kementerian Kesehatan ini, menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Propinsi dan kemudian dijabrakan kembali menjadi Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten maupun kota, tentunya yang disesuaikan atau diturunkan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi setempatnya.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2020- 2024 tidak ada visi dan misi, namun mengikuti visi dan misi Presiden Republik Indonesia yaitu *"Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong".* Dalam rangka mencapai terwujudnya Visi Presiden maka telah ditetapkan 9 (sembilan) Misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara KesatuanTerwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. *Menurunkan angka kematian ibu dan bayi*

   Angka kematian ibu (maternal mortality rate) dan angka kematian bayi (infant mortality rate) merupakan indikator sensitif untuk mengukur keberhasilan pencapaian pembangunan dan juga sekaligus mengukur pencapaian indeks modal manusia. Pemerintah telah menetapkan penurunan angka kematian ibu sebagai major project, yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

2. *Menurunkan angka stunting pada balita*

   Proporsi balita stunting sangat penting sebagai parameter pembangunan modal manusia. Seperti halnya penurunan angka kematian ibu, pemerintah juga telah menetapkan percepatan penurunan stunting sebagai major project yang harus digarap dengan langkah-langkah strategis, efektif dan efisien.

3. *Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional*

   Sebagaimana diketahui bersama, program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah mampu memperbaiki akses pelayanan kesehatan baik ke FKTP maupun FKRTL dan juga telah memperbaiki keadilan (ekualitas) pelayanan kesehatan antar kelompok masyarakat. Namun dem ikian, pembiayaan JKN selama lima tahun terakhir telah mengalami ketidakseimbangan antara pengeluaran dan pemasukan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi JKN, Kementerian Kesehatan memiliki peran sentral dalam kendali mutu dan kendali biaya (cost containment).

4. *Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.*

   Sesuai dengan peta jalan kemandirian farmasi dan alat pemerintah telah bertekad untuk meningkatkan industri bahan baku obat dan juga peningkatan produksi alat kesehatan dalam negeri. Agar produksi dalam negeri ini dapat diserap oleh pasar, pemerintah harus melakukan langkah-langkah strategis untuk

mendorong penggunaan obat dan alat kesehatan produksi dalam negeri.

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

A. Tujuan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB.

Perencanaan Tahun 2024-2026 adalah periode perencanaan pembangunan yang sedikit berbeda, karena Rencana Pembangunan Jangka Menengah disusun dengan periode 3 (tiga) tahun saja Tahun 2024-2026 dan bukan merupakan penjabaran dari janji politik kepala daerah dan wakil kepala daerah, hal tersebut disebabkan karena telah berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah periode RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023, sementara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baru akan dilaksanakan serentak pada Tahun 2024.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, maka disusun renstra perangkat daerah dengan berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dengan tujuan untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan nasional

Serta Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. *Rencana Strategis Perangkat Daerah dimaksud memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan* dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dengan memperhatikan uraian diatas maka Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra tidak lagi memasukkan visi dan misi karena mengikuti visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana tertuang dalam RPJPD Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2024-2026 adalah " *Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai Salah Satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025"*

Oleh karena itu dalam hal ini setiap Perangkat Daerah harus menjabarkan perencanaan strategisnya langsung ke dalam tujuan, sasaran, dan program serta kegiatannya sesuai dengan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap sasaran yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan dalam bentuk terakhir dan akan dapat dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan, oleh karena itu sasaran ditetapkan dan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dalam menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah pada penyusunan Rencana kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 ini mengacu pada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024-2026, pada tujuan 2 dan sasaran 3 yaitu :

Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Sasaran 3 : Meningkatkan kualitas Sumber Daya manusia

Dalam rangka mewujudkan tujuan RPD yakni Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka ditetapkan tujuan strategis berdasarkan urusan pemerintahan :

1. Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana yaitu " *Terwujudnya keluarga sejahtera"* dengan indikator tujuan *" Indeks pembangunan keluarga (Bangga)* Penduduk Kabupaten Sidenreng Rappang.

B. Sasaran Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan KB.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indikator kinerja atau tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan selama 1 (Satu) tahun. Setiap sasaran mencerminkan indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun mendatang yakni tahun 2024.

Dalam rangka mencapai tujuan jangka menengah Dinas Pengendalaian Penduduk dan KB yaitu Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan indikator meningkatnya Angka Harapan Hidup, maka ada 2 (dua) sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut :

1. Sasaran Strategis Urusan Pemerintahan Bidang Pengendaian Penduduk dan KB

a. *Sasaran 2 :Menurunnya Angka Kelahiran Total* dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Total fertility rate (TFR) atau angka kelahiran total

Mengacu uraian di atas maka pernyataan tujuan dan sasaran jangka pendek Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel TC- 3.2.a
Tujuan, Sasaran Rencana Kerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KBKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan Estmasi Maju Tahun 2025

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	Satuan	Kondisi awal 2022	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE	
					2024	2025
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
URUSAN PEMERINTAH BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						
Terwujudnya keluarga Sejahtera		1. Indeks Pembangunan Keluarga (Bangga)	indeks	58,20	60	61
	Menurunnya Angka Kelahiran Total	2. Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total	Rata-rata jumlah anak	2,07	2	2

Pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rencana kerja Perangkat Daerah sebagaimana tabel diatas diselaraskan dengan pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian kesehatan atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan kesehatan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkesinambungan.

PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

1. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

1) *Kegiatan 1* : Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk

Sub Kegiatan :

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK)
2. Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota
3. Dukungan Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan
4. Pelaksanaan Survei/Pendataan Indeks Pengetahuan Masyarakat tentang Kependudukan
5. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
6. Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal

7. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
8. Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota
9. Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal
10. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal
11. Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Informal di Kelompok Kegiatan Masyarakat Binaan
12. Advokasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan
13. Sosialisasi Tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan Kepada Pemangku Kepentingan
14. Pelaksanaan Sarasehan Hasil Pemutakhiran Data Keluarga
15. Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

1. Perumusan Parameter Kependudukan
2. Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan
3. Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
4. Pemetaan Kependudukan
5. Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan
6. Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan
7. Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kerentanan Dampak Kependudukan (Early Warning System/Peringatan Dini)
8. Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain
9. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga
10. Pemanfaatan Data Hasil Pemutakhiran Data Keluarga

11. Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
12. Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga
13. Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal

Sub Kegiatan :

1. Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja
2. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK sesuai Kearifan Budaya Lokal
3. Penyediaan dan Distribusi Sarana KIE Program KKBPK
4. Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang
5. Penggunaan Media Massa Cetak, Elektronik dan Media Lainnya sesuai Kearifan Budaya Lokal Dalam Pencitraan Program KKBPK
6. Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)
7. Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK
8. Pengendalian Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)

Sub Kegiatan

1. Pembinaan IMP dan Program KKBPK di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB
2. Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB
3. Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)
4. Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)

3) *Kegiatan 3* : Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan

1. Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya
2. Peningkatan Kompetensi Pengelola dan Petugas Logistik Alat dan Obat Kontrasepsi serta Sarana Penunjang Pelayanan KB
3. Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
4. Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP
5. Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB
6. Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB
7. Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB
8. Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya
9. Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta HakHak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan
10. Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
11. Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak
12. Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan dan Pasca Keguguran
13. Peningkatan Kesertaan KB Pria

4) *Kegiatan 4* : Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB

Sub Kegiatan

1. Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB
2. Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB
3. Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB
4. Pembinaan Terpadu Kampung KB

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

1) *Kegiatan 1* : Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)
2. Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
5. Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
6. Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
7. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
8. Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)
9. Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK
10. Penyediaan dan Pengembangan Materi IPK
11. Advokasi dan Promosi IPK
12. Sosialisasi IPK

13. Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian IPK
14. Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK

2) *Kegiatan 2* : Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sub Kegiatan

1. Penguatan Kebijakan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
2. Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
3. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIKR dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
4. Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2023

.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan program/kegiatan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluaraga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunan antara lain:

1. Ketersediaan data dan infomasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan bidang kesehatan;
2. Keserasian dan keterpaduan pembangunan bidang pengendalian Penduduk dan KB dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026 dan hasil review Rencana Strategis Dinas pengendalian penduduk dan KB Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026;
3. Penerapan anggaran kinerja dalam rangka peningkatan efisien dan efektifitas pelaksanaan program/kegiatan;

Secara garis besar rumusan program/kegiatan Rencana Kerja (Renja) Dinas Keseh Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Program/kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan program/kegiatan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas dan akses pelayanan kesehatan.
2. Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 adalah sebanyak 8 program, 32 kegiatan dan 213 Sub kegiatan di Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
3. Jumlah kebutuhan dana/pagu indikatif dalam pelaksanaan Program/Kegiatan Renja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebesar

Rp. ***8.330.899.000***,- yang bersumber dari dana APBN dan APBD Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Program dan kegiatan Renja Dinas Pengendalian PendudukDan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disertai dengan indikator kegiatan serta sumber pendanaan adalah sebagaimana termuat pada tabel T-C.33 berikut ini :

Table T-C.33.

Rumusan Rencana Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Dinas Pengendalian Penduduk Dan Kb Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA			73%	8.330.899.000					7.557.069.000	
2.14.02	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Median usia kawin pertama perempuan (MUKP) pada kelompok umur 25-49 Tahun	Tahun	85%	280.526.400				100%	337.177.000	
2.14.02.2.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Cakupan OPD Yang Terlibat Dalam Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga (Program KKBPK) (%)"	%	100	78.415.700				100	40.640.500	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.02.2.01.0002	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kab./Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota (Dokumen)"	Dokumen	1	40.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		0	0	DPPKB
2.14.02.2.01.0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal	"Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal (Satuan Pendidikan)"	Satuan Pendidikan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	12.115.500	DPPKB
2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian ProgramBangga Kencana	"Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kegiatan)"	Kegiatan	1	38.415.700	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOKKB)		10	28.525.000	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian PendudukCakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan OPD yang terlibat Perumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk tingkat kabupaten**	**%**	**100**	**202.110.700**				**100**	296.536.500	DPPKB
2.14.02.2.02.0009	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	Jumlah Pertemuan tentang Program Sistem informasi keluarga (SIGA)	Laporan	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	62.022.000	DPPKB
2.14.02.2.02.0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Keluarga	Dokumen	1	9.719.900	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		0	0	DPPKB
2.14.02.2.02.0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Dokumen pencatatan data keluarga dan pengumpulan Data Keluarga yang tersedia	Laporan	1	84.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	65.200.000	DPPKB
2.14.02.2.02.0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Dokumen dalam pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB yang tersedia	Dokumen	1	104.220.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	132.000.000	DPPKB
2.14.02.2.02.0015	Pembentukan dan Operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk (Unit)"	Unit	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	1.170.000	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.02.2.02.0016	Pelaksanaan Sistem Peringatan Dini Pengendalian Penduduk ditingkat kabupaten/kota	Terlaksananya sistem peringatan dini pengendalian penduduk (Laporan)"	Laporan	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	16.782.000	DPPKB
2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatandan Pelaporan Program Bangga Kencana	"Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana (Laporan)"	Laporan	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	19.362.500	DPPKB
2.14.02.2.02.0019	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)	"Jumlah dokumen Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) (Dokumen)"	Dokumen	1	4.170.800	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	0	DPPKB
2.14.03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**Persentase pemakaian kontrasepsi modern (Modern Contraceptive prevalence Rate/mCPR)**	**Persen**	**100**	**6.553.515.100**				**100**	**2.197.233.000**	
2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukdan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**Cakupan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**	**%**	**100**	**625.033.000**				**100**	**889.850.000**	
2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasionaldan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Laporan)	Laporan	1	293.043.500	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	537.900.000	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok) Laporan)	Laporan	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	132.000.000	DPPKB
2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang (Dokumen)	Dokumen	1	70.950.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	120.000.000	DPPKB
2.14.03.2.01.0014	Advokasi Program Bangga kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja (Organisasi)	Organisasi	1	261.039.500	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		1	99.950.000	DPPKB
2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**	**Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) yang melaksanakan pembinaan IMP dan Program KKBPK**	**%**	**100**	**135.300.000**				**100**	**265.000.000**	
2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi MasyarakatPedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (Orang)	Orang	106	135.300.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		106	265.000.000	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub kegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11
2.14.03.2.03	**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) Yang Melaksanakan Pembinaan IMP Dan Program KKBPK (%)"**	**%**	**100**	**3.865.445,100**				**100**	**550.758.000**	
2.14.03.2.03.0001	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Laporan	1	15.350.00	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		1	17.100.000	DPPKB
2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (Orang)	Orang	45	227.293.500	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		45	511.608.000	DPPKB
2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB (Unit)	Unit	11	3.556.065.600	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		0	0	DPPKB
2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya (Laporan)	Laporan	1	16.736.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		1	22.050.000	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.03.2.04	**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan BerKB**	**Cakupan Kader Yang Ikut Dalam Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Dan Mitra Kerja Lainnya Dalam Pelaksanaan Pelayanan Dan Pembinaan Kesertaan Berkb (%)"**	**%**	**100**	**1.927.737.000**				**100**	**491.625.000**	
2.14.03.2.04.0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB (Dokumen)	Dokumen	1	3.700.500	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		0	0	DPPKB
2.14.03.2.04.0005	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah DASHAT di Kampung KB (Unit)	Unit	11	1.261.878.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB		1	346.500.000	DPPKB
2.14.03.2.04.0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) (Kampung)	Kampung	50	662.158.500	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		106	145.125.000	DPPKB
2.14.04	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**	**Angka kelahiran remaja umur 15-19 Tahun (Age Spesific Fertility Rate/ ASFR)**	**Nilai**	**9**	**1.346.850.000**				**8**	**1.910.780.200**	
2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan Desa/Kelurahan Yang Ikut Dalam Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga (%)"**	**%**	**100**	**300.000.000**				**100**	**249.907.900**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.04.2.01.0008	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) (Laporan)	Laporan	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	11.303.900	DPPKB
2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) (Laporan / Dokumen)	Lapora/ Dokumen	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	86.220.000	DPPKB
2.14.04.2.01.0017	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Laporan)	Laporan	1	0	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	31.048.000	DPPKB

Kode	Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Subkegiatan	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Satuan Target	Target 2024	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana		Target	Pagu Indikatif	
1	*2*	*3*	*4*		*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.14.04.2.01.0018	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia (Unit)	unit	20	300.000.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	110.336.000	DPPKB
2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi PencapaianiBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) (Laporan)	Laporan	0	0	Kab. Sidenreng Rappang	Dana Alokasi Umum (DAU)		1	11.000.000	DPPKB
2.14.04.2.02	**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**	**Cakupan kelompok kemasyarakatan yang ikut dalam pelaksanaan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga**	**%**	**100**	**1.046.850.000**				**100**	**1.660.872.300**	
2.14.04.2.02.0003	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (Organisasi)	Organisasi	**0**	0	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	30.672.300	DPPKB

2.14.04.2.02.0005	Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk Remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita	Laporan	11	444.600.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	741.000.000	DPPKB
2.14.04.2.02.0006	Pendfampingan Keluuarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita)	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca Salin/Kelahiran, Baduta/Balita) Yang Mendapat Pendampingan	Laporan	11	602.250.000	Kab. Sidenreng Rappang	DAK Non Fisik (BOK KB)		1	889.200.000	DPPKB
	Total				**8.330.899.000**					**7.232.136.000**	

BAB V

PENUTUP

RENCANA KERJA

DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
TAHUN 2024

.

BAB V.

PENUTUP

Rancangan awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan rencana kerja tahunan yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan Draft Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Renja ini merupakan dokumen rencana operasional pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024, guna mendukung pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan kesehatan dan pengendalian penduduk tahun 2024.

Catatan Penting Dalam Penyusunan Rancangan awal Renja

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan maka program, kegiatan serta sub kegiatan harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan bidang kesehatan dan pengendalian penduduk yang tertuang dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024. Optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang harus ada keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik antar kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebagai berikut:

1. Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, pelaksanaan setiap program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Sulawesi Selatan, maupun APBN, harus memperhatikan/ mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya.
2. Renja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Rencana Tindak Lanjut

1. Perlu penguatan kelembagaan dan peran masing-masing stakeholder dalam pembangunan kesehatan
2. Perlunya komitmen kuat dalam pengawalan upaya-upaya pembangunan kesehatan dan Pengendalian penduduk yang masih memerlukan upaya keras
3. Perlunya upaya sinkronisasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan terutama untuk pencapaian indikator standar pelayanan minimal (SPM) Bidang Kesehatan
4. Diperlukannya kebijakan strategis dan inovatif dalam penyelarasan penyelesaian permasalahan kesehatan dengan keterlibatan berbagai pihak, sesuai dengan kewenangan, aturan dan dapat dipertanggungjawabkan
5. Perlunya monitoring dan evaluasi dalam implementasi Rencana Kerja Pembangunan Kesehatan dan pengendalian penduduk yang telah diusulkan dan ditetapkan
6. Meningkatkan peran serta masyarakat, baik dalam proses perencanaan maupun penganggaran, dan pelaksanaan di masyarakat sehingga transparansi akan lebih terwujud.

Rancangan awal Rencana Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023, selain menjadi acuan pelaksanaan kegiatan tahun 2023 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana kerja di bidang kesehatan dan pengendalian penduduk di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yanglebih baik di masa yang akan datang.

CATATAN

CATATAN

Rencana Kerja

Dinas Pengendalian Penduduk dan KBKabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Editing
oleh
Bagian Perencanaan
Sekretariat
Dinas Pengendalian Penduduk dan KBKabupaten
Sidenreng Rappang
Tahun 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat-NYA Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat kami rampungkan.

Kami sangat menyadari bahwa Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan penyusunan RENJA agar dapat dijadikan sebagai pedoman dan dasar penilaian pencapaian tujuan dan tugas pokok Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Semoga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini bermanfaat bagi pembangunan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

M. ARSUL, S.IP., Msi.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19731123 199302 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
DAFTAR TABEL iv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4
BAB II EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN .. 8
2.1 Evaluasi Renja sampai dengan triwulan II tahun 2024 8
2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi 20
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 21
BAB IV PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.a	(RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwuln II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	8
Tabel II. 1.b	(RENSTRA RPD 2024-2026) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwuln II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	15
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang	23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Sidrap merupakan penyelenggara urusan pemerintahan dalam bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memerlukan perencanaan yang strategis. perencanaan tersebut tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026.

Telah disusun Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024-2026 yang kemudian akan di jabarkan melalui rencana kerja pada tiap tahunnya. Tahun 2024 diperlukan perencanaan rencana kerja untuk satu tahun kedepan yang biasa disebut Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD). Renja SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut:

- Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2024.
- Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Terselenggaranya kegiatan perlu ada sinergi antara semua *stake holder* dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga pelaksanaan program dan kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kab. Sidenreng Rappang didasari oleh:

a) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

b) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
d) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
e) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomr 116);
f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

g) Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 09 dan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan kerukunan umat beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat beragama, dan Pembangunan rumah Ibadat;
h) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah;
i) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Orang Asing dan Organisasi Masyarakat Asing di daerah;
k) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
l) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemerintah Daerah dalam Rangka Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai pancasila;
m) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pedoman Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Daerah;
n) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

o) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan;
p) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Konflik Sosial;
q) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
r) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
s) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 58 Tahun 2017 tentang Kerjasama Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Badan atau Lembaga dalam Bidang Politik dan Pemerintahan Umum;
t) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
u) Permendagri Nomor 46 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2018 tentang kewaspadaan dini daerah;
v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
w) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
x) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas;
y) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana kerja ini di susun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD Tahun 2024 dan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024-2026, dengan tujuan sebagai berikut:

a) Menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan RAPBD Tahun 2024,
b) Menjadi penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selama 1 tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

PENDAHULUAN, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Pada bab ini terdiri atas:

- Latar Belakang

  Mengemukakan tentang Latar Belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- Landasan Hukum

  Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- Maksud dan Tujuan

  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- Sistematika Penulisan

  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, terdiri atas:

- Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

  Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Samapi dengan Triwulan II Tahun 2024

  Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

  1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

❖ Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:
1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

RENCANA KERJA DAN PENDAAN PERANGKAT DAERAH, terdiri atas:

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

PENUTUP, berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Pencapaian pelaksanaan rencana kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tahun 2023 menjadi salahsatu dasar pertimbangan dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran untuk tahun 2024.

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

(1) Realisasi Program/ kegitan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah.
- ✓ Administrasi Umum Perangkat
- ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- ✓ Perumusan Kebijakan dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebebangsaan
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

(2) Realisasi Program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- ✓ Administrasi Keuangan Perangkat
- ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

(3) Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/ Keluaran yang direncanakan

- ✓ Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah
- ✓ Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

(4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapaianya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- ✓ Kurangnya dana

(5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daearah; dan

(6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

- ✓ Penyediaan anggaran kegiatan yang cukup agar target kinerja dapat tercapai sepenuhnya
- ✓ Monitoring dan mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun berjalan (realisasi capaian kinerja dan penyerapan anggaran

Terdapat beberapa kegiatan yang belum memenuhi target capaian kinerja renja pada tahun 2024 dikarenakan realisasi kinerja pada beberapa kegiatan tersebut menyesuaikan kondisi kebutuhan pada tahun berjalan.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak berpengaruh signifikan dikarenakan target-target yang tidak tercapai merupakan program kegiatan rutin.

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan lebih mempertimbangkan besaran kebutuhan dan kemampuan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Secara rinci evaluasi realisasi tersebut dapat dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

TABEL II.1 a (PERUBAHAN RENSTRA RPD 2024-2026)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2021+2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6		7	8 = (7/6)	9 = 5	10 = (9/4*100)
8					**URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**										
8	01				**BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**										
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%	100					100	
8	01	01	2.01		**Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	100	%	100					100	
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	1					1	50
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	2					2	50

8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	1					1	50
8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	4	Dokumen	2					2	50
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8	Laporan	6					6	75
8	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	%	100					100	100
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42	Orang/ Bulan	28					28	66,67
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan	2					2	66,67
8	01	01	2.02	07	Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	8	Laporan	4					4	50
8	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%	100					100	100
8	01	01	2.06	01	Penyediaana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	157	Paket	89					89	56,68
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300	Laporan	200					200	66,67
8	01	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	100	%						0	0
8	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	24	Unit	19					19	79,16
8	01	01	2.08		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%						0	0
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Persedian Jasa Surat Menyurat	615	Laporan	395					395	64,23

8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan	24					24	66,67
8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan	24					24	66,67
8	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100	%						0	0
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	32	Unit	21					21	65,625
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27	Unit	16					16	59,26
8	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	Unit	0					0	0
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	44	Unit	29					29	65,91
8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan**		%						0	
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa		%						0	
8	01	02	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	240	Orang	240					240	100
8	01	02	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	100	Orang	50					50	50

8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik**		%							0	
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pwmilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula		%							0	
8	01	03	2.01	04	Pelaksanaan Koordinasi di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemanatauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilandan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	154	Orang	154					154	100
8	01	04			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase Organisasi Masyarakat yang Diberdayakan**		%							0	
8	01	04	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat	Persentase Pemberdayaan dan pengawasan Organisasi Masyarakat		%							0	
8	01	04	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di daerah	12	Laporan	8					8	66,67

8	01	05			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**		%							0	
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya		%							0	
8	01	05	2.01	03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahguaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	250	Oarang	170					170	68
8	01	05	2.01	05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahguaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba, fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	4	Laporan	2					2	50
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENAGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100	%							0	0
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	100	%							0	0
8	01	06	2.01	06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	36	Dokumen	24						24	66,67

TABEL II.1.b (RENSTRA RPD 2018-2023)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSNAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (6/7)	9 = 7	10 = (9/4*100)
8					**URUSAN UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**									
8	01				**BIDANG URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**									
8	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%		100				
8	01	01	2.01		**Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	100	%		100				
8	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen		1	1	100	1	33,33
8	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen		2	1	50	1	16,67
8	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen		1	1	100	1	33,33

8	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	6	Dokumen		2	0	0	0	0
8	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12	Laporan		4	0	0	0	0
8	01	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	100	%		100				
8	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	300	Orang/ Bulan		252	99	0,39	99	13,09
8	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	Laporan		1	0	0	0	0
8	01	01	2.02	07	Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	14	Laporan		4	1	0,25	1	8,33
8	01	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	100	%		100				
8	01	01	2.06	01	Penyediaana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	70	Paket		20	5	0,07	5	7,14
8	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	373	Laporan		122	4	0,01	4	1,07
8	01	01	2.08		**Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100	%		100				
8	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Persedian Jasa Surat Menyurat	390	Laporan		120	50	0,41	50	12,82
8	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Laporan		12	6	0,5	6	16,67

8	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	Laporan		12	5	0,41	5	13,89
8	01	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	100	%		100				
8	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	33	Unit		11	1	0,03	1	3,03
8	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33	Unit		11	2	0,06	2	6,06
8	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	Unit		15	1	0,02	1	2,22
8	01	02			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan**	90	%		50		0	0	0
8	01	02	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	90	%		50		0	0	0
8	01	02	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	180	Orang		50	50	0,27	50	27,77
8	01	02	2.01	0008	Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	240	Orang		70	40	0,16	40	16,67
8	01	03			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik**	100	%		90		0	0	0
8	01	03	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pwmilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula	100	%		90		0	0	0

8	01	03	2.01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	35	Orang		13	0	0	0	0
8	01	05			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	90	%		85		0	0	0
8	01	05	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	90	%		85		0	0	0
8	01	05	2.01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahguaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1890	Orang		630	0	0	0	0
8	01	05	2.01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahguaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	9	Laporan		3	3	0,33	3	33,33
8	01	06			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENAGANAN KONFLIK SOSIAL**	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	100	%		100		0	0	0
8	01	06	2.01		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	100	%		100		0	0	0

8	01	06	2.01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	720	Orang		240	0	0	0	0
8	01	06	2.01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	12	Dokumen		12	5	0,41	5	41,67

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu-isu penting yang timbul dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yaitu:

A. Bidang Politik dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

1. Rendahnya pendidikan politik bagi kaum pemilih pemula dan kaum marjinal,
2. Keterwakilan perempuan dalam parlemen masih rendah,
3. Rendahnya pengetahuan masyarakat terkait undang-undang ormas,
4. Belum optimalnya pendataan ormas mengakibatkan rendahnya pengawaasan terhadap ormas.

B. Bidang Kesatuan Bangsa

1. Sengketa lahan HGU di beberapa wilayah
2. Kelangkaan gas elpiji tabung 3 kg
3. Peredaran dan penyalahgunaan narkoba masih tinggi
4. Unjuk rasa/aksi damai yang dapat menjadi potensi konflik
5. Rendahnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat yang mengakibatkan belum maksimalnya kesadaran bela negara masyarakat

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan batu/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dengan menganalisis target capaian di tahun triwulan II tahun 20204 maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan rencana kegiatan di tahun anggaran 2024 agar target realisasi kinerja program/kegiatan dapat tercapai.

Perubahan/Penambahan, Pergeseran Program dan Kegiatan renja tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Perangkat Daerah : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
					25.752.369.000				**25.798.185.000**	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100 %	**2.172.369.000**				**2.172.369.000**	
	Perencanaa, Penganggaran, dan Evaluasi Kenerja Perangkat Daerah	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	Kab. Sidrap	100 %	12.000.000		Kab. Sidrap	100 %	12.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-RKPD	Jumlah Dokumen RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dok	2.000.000		Kab. Sidrap	1 Dok	2.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-RKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	2 Dok	3.000.000		Kab. Sidrap	2 Dok	3.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dok	2.000.000		Kab. Sidrap	1 Dok	2.000.000	

					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD	Kab. Sidrap	2	Dok	3.000.000		Kab. Sidrap	2 Dok	3.000.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidrap	4	Lap	2.000.000		Kab. Sidrap	4 Lap	2.000.000	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Kab. Sidrap	100	%	1.716.320.000		Kab. Sidrap	100 %	1.719.920.000	
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	252	Orang/Bln	1.711.320.000		Kab. Sidrap	252 Orang/Bln	1.711.320.000	
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Sidrap	0	Lap	-		Kab. Sidrap	0 Lap	-	
					Koordiansi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran/SKPDdan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Sidrap	4	Lap	5.000.000		Kab. Sidrap	4 Lap	8.600.000	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Kab. Sidrap	100	%	156.924.000		Kab. Sidrap	100 %	171.042.500	
					Penyediaana Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Disediakan	Kab. Sidrap	20	Paket	5.085.000		Kab. Sidrap	20 Paket	5.107.000	
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	122	Lap	151.839.000		Kab. Sidrap	122 Lap	165.935.500	
					Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Kab. Sidrap	100	%	192.660.000		Kab. Sidrap	100 %	189.609.500	
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Persedian Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	120	Lap	3.780.000		Kab. Sidrap	120 Lap	3.780.000	
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Lap	30.000.000		Kab. Sidrap	12 Lap	26.400.000	

					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Lap	158.880.000		Kab. Sidrap	12	lap	159.429.500	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	Kab. Sidrap	100	%	94.465.000		Kab. Sidrap	100	%	79.797.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan PeroranganDinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kab. Sidrap	11	Unit	74.386.000		Kab. Sidrap	11	Unit	69.386.000	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidrap	11	Unit	3.865.000		Kab. Sidrap	11	Unit	2.665.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidrap	15	Unit	16.214.000		Kab. Sidrap	15	Unit	7.746.000	
					PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	**Persentase Masyarakat yang Mendapatkan Penyuluhan Wawasan Kebangsaan**	Kab. Sidrap	50	Persen	360.000.000		Kab. Sidrap	50	Persen	373.750.000	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Capaian Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa	Kab. Sidrap	50	Persen	360.000.000		Kab. Sidrap	50	Persen	373.750.000	
					Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembaruan Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Kab. Sidrap	50	Orang	30.000.000		Kab. Sidrap	50	Orang	30.000.000	
					Pembentukan Paskibraka	Jumlah Paskibraka	Kab. Sidrap	70	Orang	330.000.000		Kab. Sidrap	70	Orang	343.750.000	
					PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	**Persentase Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Partai Politik**	Kab. Sidrap	90	Persen	22.340.000.000		Kab. Sidrap	90	Persen	22.370.816.000	

					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pwmilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantapan Situasi Politik	Persentase Masyarakat dan Partai Politik yang Mendapatkan Sosialisasi dan pendidikan pemilih pemula	Kab. Sidrap	90 Persen	22.340.000.000		Kab. Sidrap	90 Persen	22.370.816.000	
					Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik,Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,Perwakilan dan Partai Politik,Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Kab. Sidrap	13 Dok	22.340.000.000		Kab. Sidrap	13 Dok	22.370.816.000	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	**Persentase pembinaan dan Pengembangan Ketahanan ekonomi, sosial dan budaya**	Kab. Sidrap	90 Persen	180.000.000		Kab. Sidrap	90 Persen	166.250.000	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Kab. Sidrap	90 Persen	180.000.000		Kab. Sidrap	90 Persen	166.250.000	
					Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahguaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beraagama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidrap	630 Orang	150.000.000		Kab. Sidrap	250 Orang	136.250.000	
					Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Ketahanan, Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fassilitasi pencegahan Penyalahguaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kab. Sidrap	3 Laporan	30.000.000		Kab. Sidrap	3 lap	30.000.000	

					PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENAGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase koordinasi pimpinan daerah dan tim dalam rangka cegah dan deteksi dini konflik dalam daerah	Kab. Sidrap	100 Persen	700.000.000		Kab. Sidrap	100 Persen	715.000.000	
					Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan konflik sosial	Kab. Sidrap	100 Persen	700.000.000		Kab. Sidrap	100 Persen	715.000.000	
					Pelaksanan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah orang yang mengikuti Pelaksanana Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama intelejen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penangan	Kab. Sidrap	240 Orang	50.000.000		Kab. Sidrap	240 Orang	50.000.000	
					Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	12 Laporan	650.000.000		Kab. Sidrap	12 Lap	665.000.000	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis 2024 - 2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Penyusunan dokumen ini diharapkan akan menjadi acuan dalam pencapaian target-target kinerja yang telah ditentukan, termasuk pemenuhan target tujuan strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yaitu: "Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Kondisif dan Demokratis".

Arah kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2024 yaitu: meningkatkan peran konflik dalam rangka deteksi dini, menanamkan rasa cinta tanah air dan bela negara kepada masyarakat, mengoptimalkan pengawasan dan pemberdayaan ormas serta meningkatkan pendidikan dan fasilitasi politik bagi masyarakat dan partai politik. Arah kebijakan ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2024.

Semoga penyusunan renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian target kinerja dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan serta harapan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
Kepala Badan Kesatuan Bangsa & Politik,

M. ARSUL, S.IP., M.Si.
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP : 19731123 199302 1 002

KATA PENGANTAR

Komunikasi informatika sebagai sarana interaksi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam lingkup pemerintahan kabupaten memegang peran penting dalam mendukung aktivitas sosial ekonomi. Penyelenggaraan pelayanan komunikasi dan informatika telah mampu menghubungkan wilayah sebagai satu kesatuan dan mendistribusikan informasi pembangunan ke seluruh wilayah. Namun demikian, selain keberhasilan yang telah dicapai, masih banyak tantangan yang dihadapi untuk pembangunan kedepan sejalan dengan perubahan dan dinamika lingkungan strategis, sementara disisi lain transportasi terus dituntut untuk melaksanakan fungsi penunjang dan pendorong aktivitas sosial ekonomi ke seluruh pelosok.

Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit di Lingkungan Dinas, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Tugas pokok dan komunikasi dan informatika tersebut diselenggarakan dalam rangka mendukung langkah langkah pengembangan pembangunan guna mewujudkan kemajuan disegala bidang melalui kegiatan distribusi barang jasa dan mobilitas manusia ke seluruh pelosok dan inter wilayah kabupaten, serta aktivitas interaksi sosial ekonomi.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Dalam Penyajian ini kami telah berupaya untuk dapat menyusunnya dengan baik dan semaksimal mungkin, namun segala keterbatasan yang dimiliki sehingga mungkin hasil yang dapat di capai belum seperti yang diharapkan.

Atas segala kekurangan tak lupa dimohon maaf dan semoga Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2024 ini bermanfaat bagi kita semua.

Pangkajene Sidenreng, 2024

Kepala Dinas,

H.BACHTIAR, S.Hi.M.Si
Pangkat: Pembina Tk.I
Nip. 19710122 199203 1 003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iv

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang..... 1

I.2. Landasan Hukum..... 2

I.3. Maksud dan Tujuan 4

I.4. Sistematika Penulisan..... 5

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi Pelaksaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatik.....10

II.2. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatik.....12

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP..... 22

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perkembangan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang begitu pesat dalam satu dasawarsa terakhir telah membawa implikasi kepada pesatnya pertumbuhan penduduk, tenaga kerja, ekonomi, pembangunan sarana dan prasarana, pembangunan kegiatan industri, perdagangan dan jasa serta pariwisata yang telah membawa pengaruh yang sangat besar terhadap wilayah sekitarnya. Perkembangan sektor-sektor tersebut merupakan fakor yang dominan mempengaruhi perkembangan sektor perhubungan di Kabupaten Sidenreng Rappang yang didukung oleh sektor komunikasi dan informatika yang handal.

Penyelenggaraan sektor komunikasi dan informatika di Kabupaten Sidenreng Rappang dipandang perlu untuk melakukan pengaturan/ penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian agar pelaksanaannya dapat berjalan aman, lancar dan tertib, hal ini sejalan dengan kebijakan yang tertuang dalam Undang-Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang No.23 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya memerlukan sebuah kebijakan sebagai petunjuk, penentu arah, sasaran dan tujuan agar pembangunan sektor komunikasi dan informatika dapat dilakukan dengan baik, kebijakan ini dapat diwujudkan dalam sebuah rencana kerja secara proporsional dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Perubahan Renja yang disusun merupakan hasil analisis dan Evaluasi Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2023.

I.2. Landasan Hukum

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menghendaki arah dan tujuan kebijakan pembangunan daerah lebih banyak diletakkan pada kewenangan dan tanggung jawab pemerintah daerah beserta masyarakat. Pendelegasian suatu kewenangan penyelenggaraan pemerintah dari pusat ke daerah secara internal akan diikuti pengaturan dalam aspek pembiayaan yang diatur dalam penimbangan keuangan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah memegang peranan penting dan memiliki tugas serta fungsi yang penting pula dalam pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan rakyatnya.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan dokumen perencanaan taktis – strategis menyebarkan potret permasalahan pembangunan untuk memecahkan permasalahan sektor komunikasi dan informatika secara terencana dan bertahap melalui sumber pembiayaan APBD dengan mengutamakan kewenangan yang wajib disusun sesuai prioritas dan kebutuhan daerah.

Landasan hukum yang lain yang mengatur penyelenggaraan pemerintah di daerah adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang Undang No. 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 No. 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Permendagri No.86/2017 tentang pelaksanaan PP No.8 2008
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancanngan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Tahun 2016, Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

12. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
14. Pearuran Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13)

I.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Renja ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Draft Awal Rencana Kerja sebagai bagian integral dari Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu sistem Penyusunan Rencana Kerja yang efektif dan efisien .

Esensi dari sistem Perubahan Renja bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang adalah perwujudan dari implementasi sistem Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. Penyusunan Perubahan Renja Tahun Anggaran 2023 ini tidak lepas dari Evaluasi Pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan II.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Sebagai acuan Diskominfo dalam rangka untuk terlaksananya RKPD berkenaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah.
2. Untuk merumuskan program dan kegiatan Diskominfo Kab. Sidrap selama tahun 2023
3. Pedoman penyusunan RKA Perubahan Dinas Komunikasi dan Informatika

I.4. Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja ***(Performance Gap)*** bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika Penulisan Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat diuraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

Perubahan Renja tahun 2024 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I 1. Latar belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dan proses penyusunan perubahan Renja.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya

yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD

I.4 Sistematika

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

3.1. Evaluasi Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Pokok –pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncakanan;
4. Faktor –faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya, atau melebihi target kinerja program / kegiatan
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi SKPD

Berisikan uaraian mengenai:

1. Sejauahmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs *(Millenium Development Goals);*
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat urusan / bidang , urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi pelaksanaan penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan triwulan II tahun berkenaan adalah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas melaksanakan Program dan Kegiatan yang telah direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan.**

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan sampai pada triwulan II tahun 2024 Program Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamnan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dari 2 laporan tidak memenuhi target kinerja

- Faktor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan
- Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD : tidak tercapaiannya target kinerja program
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut: anggaran dan target kinerja disesuaikan dengan kebutuhan

2. **Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.**

- Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan nama doamain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat ditetapkan oleh Pusat dan Sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan penatalaksanaan dan pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam penyelnggaraan pemerintah darerah kab/ kota dari target 10 dokumen dan terealisasi 10 atau 100%
- Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan e-goverment dalam Penyelnggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dari target 1 dokumen dan terealisasi 1 dokumen atau 100%
- Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Pengelolaan Pusat data pemerintah daerah dari target 1 unit dan terealisasi 1 unit atau 100%

- Program pengelolaan Aplikasi Informatika Kegiatan Pengelolaan E-goverment di lingkup pemerintah daerah kabupaten / kota pada sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik dari target 5 unit dan terealisasi 5 unit atau 100%
- Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota kegiatan Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah pada sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD dari target 2 dokumen dan terealisasi 2 dokumen atau 100%
- Program Penyelnggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID) kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pada Sub Kegiatan Penetapan kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah dari target kinerja 1 dokumen yang terealisasi 1 dokumen atau 100 %
- Program Penyelnggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID)kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota pada Sub Kegiatan Penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten / kota dari target kinerja 29 perangkat daerah yang terealisasi 29 perangkat daerah atau 100 %
- Program Penyelnggaraan Persandian Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (PPID)kegiatan Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah kabupaten / kota pada Sub Kegiatan Operasionalisasi jaring komunikasi sandi pemerintah daerah kabupaten / kota dari target kinerja 29 perangkat daerah yang terealisasi 29 perangkat daerah atau 100 %

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan.

Ada Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik kegiatan Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dari target kinerja 25 dokumen dari realisasi kinerja

Berikut capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 berdasarkan sasaran RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang, dapat dijelaskan pada tabel 2.1 berikut :

Tabel II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018- 2023)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

s/d TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) S.D TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2023) YANG DI EVALUASI			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2021+2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

2	16		**1**		**Program Komunikasi dan Informasi Publik**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	100	98				98.00	**98.00**
2	16	02	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah**	100	98				98.00	98.00
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	979	1282				1,282.00	130.95
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	535	642				642.00	120.00
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	9	9				9.00	100.00
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	100.00	82				82.00	82.00
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase domain dan sub domain yang dikelolah**	100	78				78.00	78.00

2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	12	12				12.00	100.00
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	650	650				650.00	100.00
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan**	100	99				99.00	99.00
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	306	306				306.00	100.00
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	229	225				225.00	98.25

2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	15	15				15.00	100.00
2	20	03	2.01		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	100.00	38				38.00	38.00
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota**	**persentase data statistik yang tersedia**	100	38				38.00	38.00
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	15.00	15				15.00	100.00
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah**	**100.00**	93				93.00	93.00

2	21	02	2.01		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian**	**100.0**	91				91.00	91.00
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	1	4				4.00	400.00
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	9	7				7.00	77.78
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	8	5				5.00	62.50
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	33	33				33.00	100.00

2	21	02	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi**	**62.00**	62				62.00	100.00
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	87	87				87.00	100.00
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	96				96.00	96.00
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah**	**100.0**	95				95.00	95.00
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12	12				12.00	100.00
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4	4				4.00	100.00
2	16	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100.0**	97				97.00	97.00

2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	346	341				341.00	98.55
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	15	15				15.00	100.00
2	16	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**100.0**	96				96.00	96.00
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19	19				19.00	100.00
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	28	28				28.00	100.00
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	600	360				360.00	60.00
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1002	145				145.00	14.47
2	16	01	2.07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100.00	100				100.00	100.00
2	16	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	7	7				7.00	100.00

2	16	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	100.00	92				92.00	92.00
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1512	481				481.00	31.81
2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	36				36.00	100.00
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	36				36.00	100.00
2	16	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	100.00	78				78.00	78.00
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45	30				30.00	66.67
2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	12				12.00	60.00

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika

H.BACHTIAR,S.Hi,M.Si
Pangkat : pembina Tingkat I
NIP. 19710122 199203 1 003

Tabel II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

s/d TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) S.D TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (2024) YANG DI EVALUASI			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4*100)
	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								

2	16		**1**		**Program Komunikasi dan Informasi Publik**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	300					-	-
2	16	02	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah**	300					-	-
2	16	02	2.01	04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	1440		480	357	74%	357.00	24.79
2	16	02	2.01	06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	75		25	304	1216%	304.00	405.33
2	16	02	2.01	07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	9		3	1.0	33%	1.00	11.11
2	**16**	**03**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	300.00		100.00		0%	-	-
2	**16**	**03**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase domain dan sub domain yang dikelolah**	300		100	15.0	15%	15.00	5.00

2	16	03	2.01	02	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	30		10	3.0	30%	3.00	10.00
2	16	03	2.01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	150		50	25	50%	25.00	16.67
2	**16**	**03**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan**	300		100	80.0	80%	80.00	26.67
2	16	03	2.02	01	Penatalaksanaan dan Pengawasan e- government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3		1	1.0	100%	1.00	33.33
2	16	03	2.02	03	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	3		1	1.0	100%	1.00	33.33

2	16	03	2.02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	15		5	3.0	60%	3.00	20.00
2	20	03	2.01		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	300.00		100.00	70.0	70%	70.00	23.33
2	**20**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota**	**persentase data statistik yang tersedia**	300		100	70.0	70%	70.00	23.33
2	20	02	2.01	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	15.00		5.00	3.0	60%	3.00	20.00
2	**21**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)**	**Tingkat keamanan informasi pemerintah Daerah**	**300.00**		**100.00**		0%	-	-

2	**21**	**02**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian**	**300.0**		**100.0**	40.0	40%	40.00	13.33
2	21	02	2.01	01	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	3		1	1.0	100%	1.00	33.33
2	21	02	2.01	02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	6		2		0%	-	-
2	21	02	2.01	03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	12		4		0%	-	-
2	21	02	2.01	04	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	87		29	18.0	62%	18.00	20.69

2	21	02	2.02		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi**	**262.00**		**62.00**	21.0	34%	21.00	8.02
2	21	02	2.02	01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi	87		29	18.0	62%	18.00	20.69
2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**300**		**100**		0%	-	-
2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah**	**300.0**		**100.0**		0%	-	-
2	16	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12		4	1.0	25%	1.00	8.33
2	16	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	6		2	2.0	100%	2.00	33.33
2	16	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**300.0**		**100.0**		0%	-	-

2	16	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	966		322	105.0	33%	105.00	10.87
2	16	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	15		5	2.0	40%	2.00	13.33
2	16	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**300.0**		**100.0**		0%	-	-
2	16	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		4		0%	-	-
2	16	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12		4	2.00	50%	2.00	16.67
2	16	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36		12	-	0%	-	-
2	16	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36		12	6.0	50%	6.00	16.67
2	16	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	300.00		100.00		0%	-	-
2	16	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12		4	3.0	75%	3.00	25.00

2	16	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	6	50%	6.00	16.67
2	16	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	6.0	50%	6.00	16.67
2	16	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	300.00		100.00		0%	-	-
2	16	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	45		15	9	60%	9.00	20.00
2	16	01	2.03	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30		10		0%	-	-

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Komunikasi dan informatika

H.BACHTIAR,S.Hi,M.Si
Pangkat : pembina Tingkat I
NIP. 19710122 199203 1 003

2.2 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten Sidenreng Rappang

Merujuk pada berbagai hambatan dan kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dampak hambatan dan kendala terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, serta tantangan dan peluang yang berfotensi meningkatkan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika sesuai tugas pokok dan fungsinya.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD

Pada bahasan sebelumnya, telah dijelaskan bahwa secara umum kinerja pelayanan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang sudah menunjukkan hasil yang optimal, baik dari pencapaian sasaran kinerja RPJMD. Namun demikian, masih terdapat isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang terkait kinerja pelayanan OPD yaitu :

- Kondisi topologi kab.sidrap
- Kurangnya SDM bidang TIK
- Anggaran pembangunan infrastruktur TIK sangat terbatas
- Belum terpenuhinya jumlah media cetak dan media online yang bekerjasama dengan Pemda
- Kurangnya SDM bidang pengelolaan data statistik sektoral
- Kurangnya infrastruktur pendukung dalam pengelolaan dan analisis data statistik sektoral

2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya adalah :

- Penyusunan dan analisis data/informasi perencanaan pembangunan ekonomi masih minim
- Belum optimalnya pemanfaatnan TIK dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik
- Pengelolaan informasi dan komunikasi yang belum optimal
- Kurangnya sarana dan prasarana teknologi keamanan informasi

3. Dampak isu-isu strategis terhadap pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Capaian Program Nasional

Dampak yang ditumbulkan dari adanya isu-isu strategis bidang kominfo, yaitu kurang maksimalnya pelayanan pemerintah dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik, baik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih melalui implementasi e-goverment maupun dalam menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menggunakan Teknologi, informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan daya saing bangsa melalui penciptaan masyarakat informasi indonesia.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

Adapun tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dalam meningkatkan pelayanan adalah :

1. Belum optimalnya kebijakan daerah dalam pedoman penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistic dan persandian.
2. Masih tumpang tindihnya sebagian tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi publik.
3. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusi dalam penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistic dan persandian;.
4. Belum optimalnya sarana dan prasrana penunjang penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
5. Pesatnya perkembangan TIK.
6. Kesenjangan informasi di masyarakat , sehingga masyarakat belum mendapatkan informasi yang berimbang tentang pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah.

Sedangkan peluang yang bisa diambil Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang dari tantangan tersebut adalah :

1. Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik, statistik dan persandian.
2. Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan
3. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik.
4. Kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi.
5. Kesadaran perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.
6. Kebutuhan pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.

5. Formulasi isu-isu penting / rekomendasi

Dari penjabaran isu – isu penting di atas, dapat direkomendasikan hal –hal sebagai berikut sebagai alternatif /upaya pemecahan masalah, yaitu :

1. Perlunya meningkatkan sarana dan prasarana Teknologi Informasi yang dimiliki Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. peningkatan kualitas pelayanan publik.
3. perangkat daerah dan masyarakat terhadap pemanfaatan TIK untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi, sedangkan program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPD. Sedangkan kegiatan yang selanjutnya disebut kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 berisi program dan kegiatan, baik untuk mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi perangkat daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD). Rencana kerja berupa program dan kegiatan pembangunan seluruh perangkat daerah sebagai instrumen pelaksana dbaik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan table II.2 dibawah ini :

.

Tabel III.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAM SKPD :DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NO	KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
								SEBELUM PERUBAHAN				SESUDAH PERUBAHAN			
								LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
	1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2					**Urusan Wajib bukan Pelayanan Dasar**									
	2	**16**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**2,681,856,000**	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**2,697,856,000**	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat
	2	**16**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**tingkat ketepatan waktu pelaporan perencanaan, penganggaran, dan capaian kinerja perangkat daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**23,786,500**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**23,786,500**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**

	2	1 6	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	4	17,642,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4	17,642,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	2	6,144,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	2	6,144,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 2		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**2,194,302,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**2,194,302,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	1 6	0 1	2.0 2	0 1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	288	2,188,974,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	288	2,188,974,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
II	2	1 6	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem e steran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se meste SKPD	Pangkajene Sidenreng	5	5,328,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	5	5,328,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 6		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**174,519,500**	ASN Lingkup Dinas Kominfo	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**175,779,500**	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 6	0 3	Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4	1,501,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4	1,501,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	4	6,522,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4	7,782,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	1 6	0 1	2.0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	**Pangkajene Sidenreng**		-					
	2	1 6	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	350	166,496,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	350	166,496,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 7		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Pangkajene Sidenreng		-	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100.00	**32,000,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 7	0 6	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit perlatan dan mesin lainnya yang disediakan	Pangkajene Sidenreng			ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	2	32,000,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 8		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	100.00	**155,770,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo	**Pangkajene Sidenreng**	100.00	**153,810,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	**Pangkajene Sidenreng**	4	**1,000,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo	**Pangkajene Sidenreng**	4	**2,000,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12	75,000,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	12	75,000,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 8	0 3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	79,770,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo		12	76,810,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	1 6	0 1	2.0 9		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	100.00	**133,478,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo	**Pangkajene Sidenreng**	100.00	**118,178,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 9	0 1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	**Pangkajene Sidenreng**	15	124,478,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	**Pangkajene Sidenreng**	15	104,318,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 1	2.0 3	0 6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pangkajene Sidenreng	10	9,000,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	10	13,860,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6		**1**		**Program Komunikasi dan Informasi Publik**	**persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi**	Pangkajene Sidenreng	100	**535,022,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	Pangkajene Sidenreng	100	**535,022,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	1 6	0 2	**01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota**	**Persentase informasi dan komunikasi publik yang telah dikelolah**	Pangkajene Sidenreng	100	**535,022,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	Pangkajene Sidenreng	100	**535,022,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	1 6	0 2	2.0 1	0 4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Pangkajene Sidenreng	480	190,646,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	480	190,646,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 2	2.0 1	0 6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Pangkajene Sidenreng	25	34,325,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	25	34,325,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	1 6	0 2	2.0 1	0 7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Pangkajene Sidenreng	3	310,051,00 0	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	3	310,051,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	**1 6**	**0 3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Persentase Organisasi perangkat daerah (OPD) Yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo**	Pangkajene Sidenreng	100.00	1,524,515,0 00	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	100.00	1,524,515,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	**1 6**	**0 3**	**2.0 1**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase domain dan sub domain yang dikelolah**	**Pangkajen e Sidenreng**	**100**	**1,163,273,0 00**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**1,163,273,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	1 6	0 3	2.0 1	0 2	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	10	16,059,000	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	Pangkajene Sidenreng	10	16,059,000	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	1 6	0 3	2.0 1	0 3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Pangkajene Sidenreng	50	1,147,214,0 00	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	50	1,147,214,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	**1 6**	**0 3**	**2.0 2**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase aplikasi informatika yang dikelola dan dikembangkan**	**Pangkajen e Sidenreng**	**100**	**361,242,00 0**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**361,242,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**

	2	1 6	0 3	2.0 2	0 1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pangkajene Sidenreng	1	8,930,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	1	8,930,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 3	2.0 2	0 3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah pusat data pemerintahan Daerah yang dikelola	Pangkajene Sidenreng	1	107,075,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	1	107,075,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	1 6	0 3	2.0 2	0 7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah aplikasi dan proses bisnis pemeintah berbasisi elektronik yang dikembangkan	Pangkajene Sidenreng	5	245,237,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	5	245,237,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	2 0	0 3	2.0 1		**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.00**	**18,641,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.00**	**18,641,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	**2 0**	**0 2**	**2.0 1**		**Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten / kota**	**persentase data statistik yang tersedia**	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**18,641,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**18,641,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	2 0	0 2	2.0 1	0 1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	jumlah jenis buku statistik sektoral yang tersedia	Pangkajene Sidenreng	5.00	18,641,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	5.00	18,641,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	**2 1**	**0 2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAMANAN**	**Tingkat keamanan informasi**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.00**	**110,000,000**	**ASN Lingkup**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.00**	**94,000,000**	**ASN Lingkup**

						INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (PROGRAM PPIPD)	**pemerintah Daerah**				**Dinas Kominfo**				**Dinas Kominfo**
	2	2 1	0 2	2.0 1		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan informasi Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota**	**persentase perangkat daerah yang menggunakan pengamanan persandian**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**50,000,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**	**Pangkajene Sidenreng**	**100.0**	**34,000,000**	**ASN Lingkup Dinas Kominfo**
	2	2 1	0 2	2.0 1	0 1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan	Pangkajene Sidenreng	1	25,022,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	1	9,022,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	2 1	0 2	2.0 1	0 2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten /kota	Pangkajene Sidenreng	2	4,171,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	2	4,171,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo

	2	2 1	0 2	2.0 1	0 3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota Berbasis Elektronik	Pangkajene Sidenreng	4	6,006,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	4	6,006,000	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	2 1	0 2	2.0 1	0 4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang telah menggunakan layanan keamanan informasi	Pangkajene Sidenreng	29	14,800,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	29	14,800,500	ASN Lingkup Dinas Kominfo
	2	**2 1**	**0 2**	**2.0 2**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase yang telah menggunakan pola jaring komunikasi sandi**	**Pangkajene Sidenreng**	**62.00**	**60,000,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo	Pangkajene Sidenreng	**62.00**	**60,000,000**	ASN Lingkup Dinas Kominfo
I	2	2 1	0 2	2.0 2	0 1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah Perangkat yang terhubung dalam jaring komunikasi sandi		29	60,000,000	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat	Pangkajene Sidenreng	29	60,000,000	Pegawai lingkup pemkab dan seluruh lapisan masyarakat
Total										**4,870,034,000**				**4,870,034,000**	

-

Pangkajene Sidenreng, 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan informatika

H.BACHTIAR,S.Hi,M.Si

Pangkat : pembina Tingkat I

NIP. 19710122 199203 1 003

BAB IV
PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 SKPD pada Dinas Komunikasi dan Informatika ini dibuat, untuk dipergunakan sebagai pedoman bersama dalam menjalankan tugas kedinasan serta pedoman dalam penyusunan RKA Tahun 2024, yang memuat rancangan kerangka prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya.

Rencana Kerja SKPD harus tetap dijaga konsistensinya sesuai Tupoksi dinas melalui proses perencanaan pembangunan dan penganggaran setiap tahunnya. Demi terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang menyeluruh dan lebih terintegrasi dan terkendali pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dinas Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk sungguh-sungguh memperhatikan visi, misi, tujuan dan sasaran dalam program serta kegiatan SKPDnya yang akan dicapai dalam 3 Tahun ke depan sesuai waktu RPD Kabupaten Sidenreng Rappang 2024 - 2026. Dengan cara menyusun program/kegiatan yang terdapat dalam renja, mengevaluasi Renstra dan Renja yang telah berjalan serta mengakomodir usulan dari para pemangku kepentingan. Upaya ini diperlukan untuk menjaga agar hasil pembangunan daerah dapat dinikmati secara lebih merata dan berkeadilan oleh semua lapisan masyarakat. Terima kasih.

Pangkajene Sidenreng, 2024

Kepala Dinas,

H.BACHTIAR, S.Hi, M.Si
Pangkat :Pembina Tk I
Nip. 19710122 199203 1 002

D

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang.

Perencanaan yang strategis diperlukan dalam menetapkan program maupun kegiatan yang akan direalisasikan di tahun ini. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS. Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Perubahan atas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya di latar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dan perubahan ini juga turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan hukum agar kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun alasan hukum dalam penyusunan perubahan renja adalah:

a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
h) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
i) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
j) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
k) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas.
l) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor XX Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan rencana kerja di tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah di tetapkan sebelumnya, baik dari segi program, kegiatan maupun target kinerjanya, Sehingga tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup bisa terealisasi dengan optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan /bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel III.1.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksananaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 terdiri dari 3 Program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar **Rp. 11.181.758.000,-** dengan rincian belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.482.148.000,-** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 8.600.984.900,-** dan belanja modal **Rp. 1.735.746.100,-**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdiri :

1. **Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50%.
   2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 25%.
   3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%.
   4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 35%
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 40%
7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,25%
8) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
9) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 40%
10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,32%
12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 25%
13) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 24%

14) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 30%
15) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 45%
16) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
17) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 60% yang terealisasi 48%
18) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 72% yang terealisasi 45%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. **Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:**
   1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatannnya.
   2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
   3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
   4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD**

   Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yaitu :
   a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
   b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
   c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:**
   a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.

b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupuh SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja capaian program (Renstra Pertangkat Daerah) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Targer Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasii Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7)	10=9/4*100)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

2	**1 1**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan**	100	100	100	50	50	100	100
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 1**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan**	100	100	100	50	50	100	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	3	1	0.3	4	44
2	1 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	1	1	1	4	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	1	0,5	3	100

2	1 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1	1	2	33.3
2	1 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	0	0	2	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	5	1	0,2	6	40
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Administrasi Keuangan**	100	100	100	25	25	100	100

2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2800	12	14	3	0,53	15	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	7	1	0	0	7	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	13	20	5	0,25	18	30
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100	100	100	20	20	100	100

2	1 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	453	151	151	9	0,0596026 5	160	714
2	1 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerash dan keluar Daerah	600	135	200	30	0,58	165	314
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100	100	100	20	20	100	100
2	1 1	0 1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30		10	0	0	0	0
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	100	100	35	35	100	100
2	1 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050		350	50	0,143	100	28,57
2	1 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41

2	1 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	100	100	40	40	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	100	0	0	12	12
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	53	100	0	0	53	143

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	1	100	0	0	1	1
2	1 1	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	24	100	0	0	24	24
2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	**1 1**	**0 2**	**2.0 1**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH**	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	1 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	1	2	0	0	1	50

2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup**	100	40	100	40	40	80	100
2	**1 1**	**0 3**	**2.0 1**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**	100	100	100	40	40	100	100
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	1	2	0	0	1	16.6
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	6		2	0	0	1	50
2	**1 1**	**0 3**	**2.0 2**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	100	100	100	0	0	100	100

2	1 1	0 3	2.0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3	2	1	0	0	2	66
2	1 1	0 3	2.0 2	0 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6	0	1	0	0	0	181,2
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan**	20	18	18,19	0,32	1,76	18,32	100
2	**1 1**	**0 4**	**2.0 1**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	100	100	100	0,32	0,32	100	100
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24	1	8	11,75	147	12,75	42,2

					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	0	1	0	0	0	0
2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	100	100	30	49	100	100	100
2	**1 1**	**0 5**	**2.0 1**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**	100	100	0,25	25	100	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	4	5	0	0	4	26

2	**1 1**	**0 5**	**2.0 1**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah**	100	100	100	24	24	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	15		5	3	0,6	3	20

2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	100	100	100	30	30	100	100
	1 1	**0 6**	**2.0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin**	100	100	100	30	30	100	100
2	1 1	0 6	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56		24	0	0	0	0

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150	36	50	11	0,31	47	1,31
2	**11**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	100	100	100	45	45	100	100
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**	100	100	100	45	45	100	100

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3	0	1	0	0	0	0
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	100	100	100	100	100	200	100
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup**	100	100	100	0	0	100	100
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang	48	16	5	0	0	100	50

					Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							
2	**1 1**	**1 0**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**	100	100	100	48	48	100	100
2	**1 1**	**1 0**	**2.0 1**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan**	100	100	60	48	80	100	100
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	15	0	10	7	0,7	7	46

2	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Peresentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota**	100	70	73	45	61,64	100	100
2	**1 1**	**1 1**	**2.0 1**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah**	100	100	72	45	62,5	100	100
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	24	0	1	6	0,67	6	33,3
2	1 1	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	74	0	24	0	0	0	0,22

2	1 1	1 1	2.0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4	3	0	0	0	3	75

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Partisipasi/minat atau kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Kapasitas TPA sudah over
3. Terjadi Hambatan Aliran Air Buangan pada Saluran Drainase Sampah, Gulma dan Sedimen yang menghambat aliran air buangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat
4. Sosialisasi tentang kriteria penilaian adipura
5. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam program penanaman pohon
6. Kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
7. Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2024 program dan kegiatan berdasarkan pada RPJMD Perubahan 2019-2023 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel III.I adalah sebagai berikut:

1. **Program Dinas Lingkungan Hidup adalah :**
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
    e. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
    h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    j. Program Pengelolaan Persampahan

2. **Kegiatan**

    Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Lingkungan Hidup merencanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

    a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
   a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
   a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
   b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
   a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2) Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
   b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
   a) Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

j. Program Pengelolaan Persampahan

1) Pengelolaan Sampah

a) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali

b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n**	**100%**	**4.504.625.600**			**100%**	**4.562.500.600**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan**		100%	51.770.100			100%	48.259.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	

2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	

2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Dokumen	4.270.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Dokumen	4.270.100	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Laporan	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Laporan	16.489.000	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Administrasi Keuangan**		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	

2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	7 Paket	3.402.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	7 Paket	3.402.000	

							Kelurahan				Kelurahan			
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerash dan keluar Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**		100%	21.125.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	61.386.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	21.125.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	61.386.000	

2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	400 Laporan	5.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	400 Laporan	5.000.000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	74.040.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	74.040.000	

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	315.320.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	315.320.000	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		100%	204.070.000			100%	204.070.000	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	42.400.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	42.400.000	

2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 Unit	130.203.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 Unit	130.203.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	15.000.000	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan alat dan mesin lainnya		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	28 Unit	16.467.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	28 Unit	16.467.000	

2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**		100%	115.725.000	Masyarakat		100%	615.725.000	Masyarakat
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH**		100%	115.725.000			100 Persen	115.725.000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	115.725.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	115.725.000	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraa n KLHS**		100%	170.000.000			100 Persen	500.000.000	

.	1 1	0 2	2. 0 2	0 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000	
2	1 1	0 3	2. 0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000	
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup**		60%	122.959.600			60%	90.709.600	

2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**		100%	80.000.000			100%	48.594.000	
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60.000.000			2 Dokumen	28.594.000	

2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**		100%	42.959.600			100%	42.115.600	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 laporan	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 Laporan	21.612.500	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 Titik	22.959.600		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Titik	20.503.100	

2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan**		20%	1.484.781.600			20%	1.484.781.600	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		100%	1.484.781.600			100%	1.484.781.600	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100	
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	3 Lokasi	22.069.500		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	1 Lokasi	22.069.500	

							Kelurahan				Kelurahan			
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	88 Persen	30.000.100			88 Persen	30.000.100	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100%	5.000.100			100%	5.000.100	

2	11	05	2.01	01	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Laporan	5.000.100		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Laporan	5.000.100	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah**		100%	25.000.000	Usaha/Kegiat an		100%	25.000.000	Usaha/Ke giatan

2	11	05	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000	

2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**		100%	45.000.000			100%	45.000.000	
2	**1 1**	**0 6**	**2. 0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin**		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan

2	1 1	0 6	2. 0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	20.000.000	
2	1 1	0 6	2. 0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	35 Laporan	25.000.000			50 Laporan	25.000.000	

2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD**	100%	15.000.000			100%	15.000.000	
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**		100%	15.000.000	Masyarakat		100%	15.000.000	Masyarakat

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**		100%	74.937.500			100%	74.937.500	

2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup**		100%	74.937.500			100%	74.937.500	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Entitas	74.937.500		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Entitas	74.937.500	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**		60%	25.000.000			60%	25.000.000	

2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan**		100%	25.000.000	Masyarakat		100%	25.000.000	Masyarakat
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Dokumen	25.000.000	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kot a yang Ditindaklanjuti/ Ditangani**		72,50%	7.034.077.6 00			72,50%	7.029.577.6 00	

2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah**		100%	7.034.077.600			100%	7.029.577.600	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	1.695.390.700		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.529 Ton	1.676.259.700	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.673.992.900		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.688.623.900	

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Unit	1.664.694.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Unit	1.664.694.000	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan bidang LIngkungan Hidup sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19690507 199903 1 010

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang



PERUBAHAN RENJA

2024

Rencana Kerja

Dinas Perdagangan dan Perindustrian

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT., Karena atas Limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dapat terselesaikan.

Terbitnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan acuan dan langkah awal dalam pelaksanaan program dan kegiatan setiap tahunnya.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja yang disusun ini masih jauh dari kesempurnaan. Waktu, tenaga, pikiran dan kerja keras telah dicurahkan untuk terbitnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi serta sumbangsihnya dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini.

Pangkajene Sidenreng, 01 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b
Nip : 19690307 199703 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 3

1.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 6

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 6

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 21

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB IV PENUTUP 27

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.a Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra Perubahan 2018-2023) 9

Tabel II.1.b Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang (Renstra RPD 2024-2026) 17

Tabel III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Guna mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban Pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Perangkat Daerah dituntut guna ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Perangkat Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.

Perubahan Rencana Kerja (PERUBAHAN RENJA) Tahun 2023 mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena PERUBAHAN RENJA menerjemahkan perencanan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana dan program, PERUBAHAN RENJA menjembatani sinkronisasi dan harmonisasi Rencana Strategis (RENSTRA) ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih terukur. Perubahan Rencana Kerja

Perangkat Daerah merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan hukum Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 56 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perdagangan Kab Sidrap.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024, dimaksudkan untuk memberikan arah kebijakan dalam pelaksanaan kerja agar tetap berada pada koridor perencanaan pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah. Sedangkan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) bertujuan untuk melaksanakan penganggaran secara efekif, efisien dan terukur.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang, mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 antara lain: Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasii/keluaran yang direncanakan, Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, Implikasi yang timbul terhadap

target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai : Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goalds), Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah serta Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV P E N U T U P,

Berisikan uraian penutup, berupa: Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan dan Rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan hasil pelaksananaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdiri :

1. **Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;**

   Program dan Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang telah direncanakan antara lain :

   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
      a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      c. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
      e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2) Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
3) Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan
4) Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Untuk program dan kegiatan yang telah memenuhi target kinerja pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang belum ada.

3. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;

Faktor-faktor penyebab tidak/belum tercapainya target kinerja program dan kegiatan antara lain :

a. Alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2023 yaitu :

a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

5. Kebijakan/ Tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupun SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
e. Pemulihan ekonomi usaha perdagangan
f. Membuat kegiatan virtual dalam rangka pembinaan IKM
g. Peningkatan kewaspadaan aparatur/ penggunaan APD dalam melaksanakan kegiatan tera/ tera ulang

Adapun rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel II.1. a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN											
BIDANG PERDAGANGAN											
3	**30**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	**01.2**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	01.2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen	9 Dokumen				9	100
3.30	01.2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				3	100
3.30	01.2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				5	100
3.30	01.2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen	3 Dokumen				3	100
3.30	01.2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen				5	100

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	01.2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10 Laporan	10 Laporan				10	100
3.30	**01.2**	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	01.2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1188 Orang/ Bulan	1188 Orang/ Bulan				1188	100
3.30	01.2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan	3 Laporan				3	100
			Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah**	**100 Persen**						
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	24 Bulan						
3.30	**01.2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	01.2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	80 Paket	22 Paket				22	28
3.30	01.2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	65 Dokumen					0	-

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	01.2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	330 Laporan	330 Laporan				330	100
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	01.2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit						
3.30	**01.2**	**08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	01.2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	336 Laporan	245 Lembar				245	73
3.30	01.2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				36	100
3.30	01.2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	36 Laporan				36	100
3.30	**01.2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	01.2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit	3 Unit				3	100

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	01.2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 unit	26 Unit				26	48
3.30	01.2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 unit	3 Unit				3	100
3	**30**	**02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Persentase pelaku usaha yang difasilitasi dalam kepemilikan izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)**	**100 Persen**	**33,33 Persen**					
3.30	**02.2**	**01**	**Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**Persentase Penerbitan izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Swalayan**	**100 Persen**	**33,33 Persen**					
3.30	02.2.01	01	Fasilitas Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	300 Unit	100 Unit				100	33
3	**30**	**03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai**	**18,75 Persen**	**12,5 Persen**					
3.30	**03.2**	**01**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan**	**18,75 Persen**	**12,5 Persen**					

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	03.2.01	01	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit	2 Unit				2	67
3	**30**	**04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	**04.2**	**01**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar**	**100 Persen**	**100 Persen**					
3.30	04.2.01	03	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	2 Laporan	2 Laporan				2	100
3.30	**04.2**	**02**	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Usaha Perdagangan/ Usaha Informal**	**100 Persen**	**33,33 Persen**					
3.30	04.2.02	01	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	144 Laporan	48 Laporan				48	33
3.30	**04.2**	**03**	**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Intensitas Pengawasan Penyaluran Pupuk/ Pestisida Bersubsidi**	**100 Persen**	**50 Persen**					

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	04.2.03	03	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	24 Laporan	12 Laporan				12	50
3	**30**	**06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran**	**100 Persen**	**43,75 Persen**					
3.30	06.2	01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan**	**100 Persen**	**43,75 Persen**					
3.30	06.2.01	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	11.700 Alat UTTP	5119 Alat UTTP				5119	44
3.30	06.2.01	02	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang	150 Orang				150	100
3	**30**	**07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri**	**90,47 Persen**	**7,14 Persen**					
3.30	**07.2**	**01**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri**	**90,47 Persen**	**7,14 Persen**					
3.30	07.2.01	03	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah sistem informasi usaha Perdagangan	8 Kegiatan	1 Kegiatan				1	13

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
			BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	**31**	**02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan**	**51,09 Persen**	**101,33 Persen**					
3.31	**02.2**	**01**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri**	**51,09 Persen**	**101,33 Persen**					
3.31	02.2.01	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen	2 Dokumen				2	67
3.31	02.2.01	04	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen	3 Dokumen				3	100
3.31	02.2.01	05	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen	2 Dokumen				2	67
3.31	02.2.01	06	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	3 Dokumen	1 Dokumen				1	33
3	**31**	**04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Cakupan Informasi Pertumbuhan IKM**	**3 Persen**	**1,94 Persen**					

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.31	**04.2**	**01**	**Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penyediaan Sarana Informasi Industri**	**3 Persen**	**1,94 Persen**					
3.31	04.2.01	01	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	3 Laporan	2 Laporan				2	67

Pangkajene Sidenreng, 01 Juli 2024

Plt. **KEPALA DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN**
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b
Nip : 19690307 199703 1 004

Tabel II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN											
BIDANG PERDAGANGAN											
3	**30**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**				
3.30	**01.2**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**				
3.30	01.2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	33	1	11
3.30	01.2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen		-	0	-
3.30	**01.2**	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**				
3.30	01.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1188 Orang/ Bulan		396 Orang/ Bulan	198 Orang/ Bulan	50	198	17
3.30	**01.2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**				
3.30	01.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	155 Laporan		50 Laporan	10 Laporan	20,00	10	6
3.30	**01.2**	**08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	01.2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat-Menyurat	3 Laporan		1 Laporan		-	0	-
3.30	01.2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50	6	17
3.30	01.2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	42	5	14
3.30	**01.2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**				
3.30	01.2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		1 unit		-	0	-
3.30	01.2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 unit		18 unit		-	0	-
3	**30**	**03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang memadai**	**18,75 Persen**						
3.30	**03.2**	**01**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan**	**18,75 Persen**						
3.30	03.2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	3 Unit					0	-
3	**30**	**04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya**	**300 Persen**		**100 Persen**				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	**04.2**	**01**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar**	**300 Persen**		**100 Persen**				
3.30	04.2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	3 Laporan		1 Laporan		-	0	-
3	**30**	**06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran**	**100 Persen**		**60 Persen**				
3.30	06.2	0001	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan**	**100 Persen**		**60 Persen**				
3.30	06.2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2.000 Alat UTTP		1.376 Alat UTTP		-	0	-
3.30	06.2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	150 Orang		50 Orang		-	0	-
3	**30**	**07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri**	**99,99 Persen**		**22,22 Persen**				
3.30	**07.2**	**01**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri**	**99,99 Persen**		**22,22 Persen**				

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.30	07.2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	90 Orang		20 Orang			0	-
			BIDANG PERINDUSTRIAN								
3	**31**	**02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan**	**15,15 Persen**		**5,00 Persen**				
3.31	**02.2**	**01**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri**	**15,15 Persen**		**5,00 Persen**				
3.31	02.2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3 Dokumen		1 Dokumen			0	-
3.31	02.2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3 Dokumen					0	-
3.31	02.2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3 Dokumen		1 Dokumen			0	-

Pangkajene Sidenreng, 01 Juli 2024

Plt. **KEPALA DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN**
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b
Nip : 19690307 199703 1 004

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun anallisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Sumber daya yang ada dan tersedia tersebut harus dapat dimanfaatkan secara optimal guna terwujudnya pencapaian tujuan organisasi sesuai visi, misi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Beberapa permasalahan yang dihadapi memerlukan solusi penyelesaiannya. Beberapa permasalahan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terlihat dari pemetaan permasalahan seperti tabel dibawah ini:

1. Pengembangan ekonomi lokal dengan optimalisasi segenap potensi
2. Pengembangan industri dengan optimalisasi pemberdayaan industri produk unggulan daerah
3. Banyak berdirinya toko-toko modern
4. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaku usaha industri dan perdagangan
5. Peningkatan kualitas dan desain produk industri daerah
6. Peningkatan penggunaan produk daerah untuk mendorong pengembangan industri lokal
7. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dengan mendorong peningkatan kualitas dan perluasan pasar
8. Peningkatan kualitas kelembagaan usaha industri dan perdagangan
9. Penyediaan akses pembiayaan dan penjaminan bagi usaha industri dan perdagangan
10. Peningkatan daya saing pelaku usaha industri dan perdagangan
11. Peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan pelayanan tera/ tera ulang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Adapun Urusan/ bidang urusan/ program/ kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan Dinas Perdagangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2023							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN							**5.796.597.949**				**5.593.227.000**	
BIDANG PERDAGANGAN							**5.196.597.949**				**3.470.467.000**	
3	**30**	**01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**3.086.597.949**		**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**3.298.516.500**	
3.30	**01.2**	**01**	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat Ketepatan Waktu Pelaporan Perencanaan, Penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**5.000.000**		**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**5.000.000**	
3.30	01.2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene Sidenreng	3 Dokumen	3.000.000		Pangkajene Sidenreng	3 Dokumen	3.000.000	
3.30	01.2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	2.000.000		Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	2.000.000	
3.30	**01.2**	**02**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**2.747.909.949**		**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**2.856.779.000**	
3.30	01.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene Sidenreng	33/12 Orang/ Bulan	2.747.909.949		Pangkajene Sidenreng	33/12 Orang/ Bulan	2.856.779.000	
3.30	**01.2**	**06**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**50.000.000**		**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**138.800.000**	
3.30	01.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene Sidenreng	50 Kali	50.000.000		Pangkajene Sidenreng	50 Kali	138.800.000	
3.30	**01.2**	**08**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**232.760.000**		**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**251.009.500**	
3.30	01.2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	1.400.000		Pangkajene Sidenreng	1 Laporan	1.392.000	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2023							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.30	01.2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , SDA dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	56.760.000		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	56.760.000	
3.30	01.2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	174.600.000		Pangkajene Sidenreng	12 Laporan	192.857.500	
3.30	**01.2**	**09**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**50.928.000**		**Pangkajene Sidenreng**	**100 Persen**	**46.928.000**	
3.30	01.2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Pangkajene Sidenreng	1 unit	36.400.000		Pangkajene Sidenreng	1 unit	29.468.000	
3.30	01.2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkajene Sidenreng	17 unit	14.528.000		Pangkajene Sidenreng	17 unit	17.460.000	
3	**30**	**03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Persentase sarana dan prasarana Distribusi perdagangan yang memadai**	**Kab. Sidrap**	**6,2 Persen**	**2.000.000.000**		**Kab. Sidrap**	**- Persen**	**0**	
3.30	**03.2**	**01**	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Persentase Perbaikan/ Penyediaan Sarana Distrbusi Perdagangan**	**Kab. Sidrap**	**6,2 Persen**	**2.000.000.000**		**Kab. Sidrap**	**- Persen**	**0**	
3.30	03.2.01	0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	Kab. Sidrap	1 Unit	2.000.000.000		Kab. Sidrap	- Unit	0	
3	**30**	**04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Cakupan Pengawasan terhadap kebutuhan barang pokok dan barang penting lainnya**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**50.000.000**		**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**88.950.500**	
3.30	**04.2**	**01**	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Operasi Pasar**	**Kab. Sidrap**	**1 Laporan**	**50.000.000**		**Kab. Sidrap**	**1 Laporan**	**88.950.500**	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2023							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.30	04.2.01	0003	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan PasarRakyat	Kab. Sidrap	1 Laporan	50.000.000		Kab. Sidrap	1 Laporan	88.950.500	
3	**30**	**06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Persentase Alat UTTP yang Sesuai Standar Ukuran**	**Kab. Sidrap**	**60,0 Persen**	**10.000.000**		**Kab. Sidrap**	**100,0 Persen**	**60.000.000**	
3.30	**06.2**	**01**	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Cakupan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen dengan Pelayanan Tera/ Tera Ulang dan Pengawasan**	**Kab. Sidrap**	**60,0 Persen**	**10.000.000**		**Kab. Sidrap**	**60,0 Persen**	**60.000.000**	
3.30	06.2.01	0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Kab. Sidrap	1.376 Alat UTTP	5.000.000		Kab. Sidrap	1.376 Alat UTTP	33.000.000	
3.30	06.2.01	0002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Kab. Sidrap	50 Orang	5.000.000		Kab. Sidrap	50 Orang	27.000.000	
3	**30**	**07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Pelaku usaha yang terfasilitasi dalam pemasaran penggunaan produk dalam negeri**	**Kab. Sidrap**	**22,22 Persen**	**50.000.000**		**Kab. Sidrap**	**22,22 Persen**	**23.000.000**	
3.30	**07.2**	**01**	**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Cakupan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri**	**Kab. Sidrap**	**22,22 Persen**	**50.000.000**		**Kab. Sidrap**	**22,22 Persen**	**23.000.000**	
3.30	07.2.01	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kab. Sidrap	20 Orang	50.000.000		Kab. Sidrap	20 Orang	23.000.000	
BIDANG PERINDUSTRIAN							600.000.000				2.122.760.000	
3.30	**31**	**02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Cakupan kelompok dan pelaku industri yang mendapatkan pembinaan**	**Kab. Sidrap**	**5,00 Persen**	**600.000.000**		**Kab. Sidrap**	**5,00 Persen**	**2.122.760.000**	
3.31	**02.2**	**01**	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pembinaan Kelompok dan Pelaku Industri**	**Kab. Sidrap**	**5,00 Persen**	**600.000.000**		**Kab. Sidrap**	**5,00 Persen**	**2.122.760.000**	

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2023							
					SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.31	02.2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Kab. Sidrap	1 Dokumen	100.000.000		Kab. Sidrap	1 Dokumen	150.000.000	
3.31	02.2.01	0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Kab. Sidrap	1 Dokumen	300.000.000		Kab. Sidrap	- Dokumen	0	
3.31	02.2.01	0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Kab. Sidrap	1 Dokumen	200.000.000		Kab. Sidrap	- Dokumen	1.972.760.000	

Pangkajene Sidenreng, 01 Juli 2024

Plt. **KEPALA DINAS PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN**
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b
Nip : 19690307 199703 1 004

BAB IV

P E N U T U P

Dengan tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan pencapaian Visi, Misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat menjadi arahan bagi seluruh jajaran Unit Kerja yang ada di Dinas Perdagangan dan Perindustrian dalam meningkatkan kinerja Dinas.

Dalam rangka menjamin terlaksananya Program dan Kegiatan sesuai dengan perencanaan, maka perlu dirumus kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Renja yang dijadikan bahan bagi penyusunan Renja untuk periode berikutnya.
2. Perubahan Renja Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2024 sebagai landasan penyusunan Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (Perubahan DPA).

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renja SKPD 2024 selain tergantung dari dukungan anggaran yang memadai, juga sangat tergantung pada sikap mental, tekad semangat, ketaatan dan disiplin aparatur serta peran aktif masyarakat, sehingga program-program dapat memberikan hasil *(outcome)* untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2024 disusun sebagai acuan aparat dalam pelaksanaan Program/Kegiatan untuk mencapai tujuan bersama.

Pangkajene Sidenreng, 01 Juli 2024

Plt. KEPALA DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

MUHAMMAD BASRI R, S.Pi., M.Si.
Pangkat : Pembina Tingkat.I / IV.b
Nip : 19690307 199703 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

RENCANA KERJA PERUBAHAN 2024

DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

BAB I.
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD P) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mengsinergi, mengsingkronkan dan mengintegrasikan program Pembangunan nasional dengan pembangunan.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 Tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrembang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab.Sidenreng Rappang merupakan *dokumen* perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang tetap searah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2024-2026.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada pengarahan potensi sumber daya air dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan daerah terakumulasi dan berpedoman pada tema RKPD perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yaitu **"Pemantapan Pemulihan Ekonomi, Daya Saing Daerah dan Tata Kelola Pemerintah yang Baik"** dengan Prioritas Pembangunan antara lain :

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat.
2. Penguatan Sistem Agrobisnis dalam Mendukung Pengembangan Perekonomian Daerah.
3. Penguatan Infrastruktur Dasar dan Ekonomi.
4. Peningkatan Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan.
5. Perbaikan tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik.
6. Penataan Lingkungan Hidup dan Peningkatan Ketahanan Bencana.
7. Peningkatan aktiftas dan kualitas kehidupan social masyarakat yang Religius, berbudaya dan aman.

I.2 Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);

5. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024 – 2026;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;

14. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 69 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 53);

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
   b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
   c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.
2. Tujuan
   a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang.
   b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang selaras dan terpadu, komperehensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
   c. Tersedianya Rencana Kerja Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024 sampai dengan 2026.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan berisi tentang latar belakang serta maksud dan tujuan Penyusunan Perubahan Renja OPD, landasan hukum;

Bab II: Hasil Capaian Program/Kegiatan sampai Triwulan II Tahun berjalan berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024;

Bab III: Perbandingan Program/Kegiatan sebelum dan setelah Perubahan Tahun 2024;

Bab IV: Penutup

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air ini menyajikan hasil pelaksananaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 terdiri dari 2 Program, 2 kegiatan dan 3 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar **Rp. 17.169.205.000,-** dan setelah perubahan anggaran belanja bertambah menjadi sebesar **Rp. 18.664.205.000,-** dengan rincian belanja Pegawai sebesar **Rp. 8.117.149.000,-** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 3.296.440.500,-** dan belanja modal **Rp. 7.240.615.500,-** dan realisasi sampai dengan Triwulan II sebesar **Rp. 5.618.220.083,-** atau **(33,23%)** dengan rincian belanja pegawai sebesar **Rp. 4.621.963.415,- atau (56.94%)** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 162.703.137,- atau (5.49%)** dan belanja modal irigasi sebesar **Rp. 822.177.590,- atau (10.08%)** kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100%.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Tahun 2024 terdiri :

1. Realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan

1) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah dengan layanan Administrasi Perkantoran dengan sub kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor dengan target 12 bulan dengan anggaran Rp. 8.060.000,- yang yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
2) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor dengan target 12 bulan dengan anggaran Rp. 2.593.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
3) Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan target 12 bulan dengan anggaran Rp. 4.333.000,- yang belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
4) Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Rehabilitasi Embung dan Penampung Air Lainnya dengan target 3 unit dengan anggaran Rp. 180.000.000,- yang terealisasi belum ada realisasi Rp. 0,- atau 0%.
5) Program Pengelolaan sumber daya air (SDA) dengan kegiatan Pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai (WS) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya dengan target 1 Dokumen dengan anggaran Rp. 100.000.000,- yang belum ada terealisasi dengan realisasi Rp. 0,- atau 0%.

2. **Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:**

   Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatanyang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

3. **Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**

   Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. **Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:**

   1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatannnya.
   2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
   3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
   4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD**

   Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air tahun 2024 yaitu :

   a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
   b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.

c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:

a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupuh SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapu pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.a dan II.1.b :

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(outcome) /KEGIATAN(output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) S.D TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021+2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2023			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN	
										TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021 + 2023)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4	5	6	7	8= (7/6)	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1						**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**								
1	03					**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**								
1	**03**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah**							
1	**03**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**	**100**				**50**	**50%**
1	03	01	2	01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6	6				6	100%
1	03	01	2	01	06	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3	3				3	100%
1	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**100**				**50**	**42,5%**
1	03	01	2	02	01	*Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	3950	3906				42	1%
1	03	01	2	02	05	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	3	3				3	100%
1	03	01	2	02	07	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD*	*54*	*54*				54	100%
1	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**100**				**50**	**61,4%**
1	03	01	2	06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*	*36*	*36*				36	100%
1	03	01	2	06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*36*	*36*				36	100%
1	03	01	2	06	05	*Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	*36*	*36*				36	100%
1	03	01	2	06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*210*	*180*				180	86%

Page 1

1	**03**	**01**	**2**	**08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100**	**100**				**100**	**100%**
1	03	01	2	08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*36*	*36*				36	100%
1	03	01	2	08	03	*Penyedianaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	*36*	*36*				36	100%
1	03	01	2	08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*36*	*36*				36	100%
1	**03**	**01**	**2**	**09**		***Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100**	**100**				**100**	**100%**
1	03	01	2	09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya*	*35*	*30*				30	86%
1	**03**	**02**				***Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)***	***Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik***							
1	**03**	**02**	***2***	***01***		***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota***								
1	03	02	*2*	*01*	0075	*Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan*	*90*	*90*				90	100%
1	03	02	*2*	*01*	0093	*Normalisasi/ Restorasi Sungai*	*Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi*	*15*	*13*				13	87%
1	03	02	*2*	*01*	114	*Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya*	*Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi*	*10*	*8*				8	80%
1	03	02	*2*	*01*	0128	*Penyusuna Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya*	*Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untruk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya yang disusun*	*3*	*3*				3	100%
1	**03**	**02**	***2***	***02***		***Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota***								
1	03	02	*2*	*02*	08	*Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan*	*10*	*8*				8	80%
1	03	02	*2*	*02*	14	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi*	*15*	*13*				13	87%
1	03	02	*2*	*02*	21	*Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasi dan dipelihara*	*25*	*25*				25	100%

Page 2

TABEL II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

KODE						URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM(outcome) /KEGIATAN(output)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA SKPD) S.D TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TRIWULAN II TAHUN 2024				PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S.D TAHUN BERJALAN		
											TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH		TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S.D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1						2	3	4		5	6		7		8= (7/6)	10= (5+7+9)		11=(10/4)
1						**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**												
1	03					**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**												
1	**03**	**01**				**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah**											
1	**03**	**01**	**2**	**01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100**			**100**		**100**		**100%**	**50**		**50%**
1	03	01	2	01	01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	6	Dokumen		2	Dokumen	2	Dokumen	100%	3	Dokumen	50%
1	03	01	2	01	06	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	3	Laporan		1	Laporan	1	Laporan	100%	3	Laporan	100%
1	**03**	**01**	**2**	**02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**			**100**		**100**		**57**	**50**		**42,5%**
1	03	01	2	02	01	*Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	4,116	Orang/Bulan		1372	Orang/Bulan	*980*	Orang/Bulan	71%	2352	Orang/Bulan	57%
1	03	01	2	02	05	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	3	*Laporan*		1	*Laporan*	1	*Laporan*	100%	2	*Laporan*	67%
1	03	01	2	02	07	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD*	*54*	*Laporan*		*18*	*Laporan*	*9*	*Laporan*	50%	9	*Laporan*	17%
1	**03**	**01**	**2**	**06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**			**100**		**100**		**55,4%**	**50**		**61,4%**
1	03	01	2	06	01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*	*3*	*Paket*		*1*	*Paket*	*1*	*Paket*	100%	1	*Paket*	33%
1	03	01	2	06	03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	*3*	*Paket*		*1*	*Paket*	*1*	*Paket*	100%	1	*Paket*	33%
1	03	01	2	06	05	*Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	*3*	*Paket*		*1*	*Paket*	*1*	*Paket*	100%	1	*Paket*	33%
1	03	01	2	06	09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	*210*	*Laporan*		*70*	*Laporan*	*30*	*Laporan*	43%	30	*Laporan*	14%

Page 1

1	**03**	**01**	**2**	**08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100**			**100**		**100**		**50%**	**50**		**50%**
1	03	01	2	08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan*	*36*	*Laporan*		*12*	*Laporan*	*6*	*Laporan*	50%	6	*Laporan*	17%
1	03	01	2	08	03	*Penyedianaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	*3*	*Laporan*		*1*	*Laporan*	*1*	*Laporan*	100%	1	*Laporan*	33%
1	03	01	2	08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	*12*	*Laporan*		*4*	*Laporan*	*2*	*Laporan*	50%	2	*Laporan*	17%
1	**03**	**01**	**2**	**09**		***Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**100**			**100**		**100**		**50%**	**50**		**50%**
1	03	01	2	09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya*	*60*	*Unit*		*20*	*Unit*	*10*	*Unit*	50%	10	*Unit*	17%
1	**03**	**02**				***Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)***	***Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik***											
1	**03**	**02**	***2***	***01***		***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota***												
1	03	02	*2*	*01*	0075	*Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan*	*90*	*Lembaga*		*30*	*Lembaga*	*15*	*Lembaga*	50%	15	*Lembaga*	17%
1	03	02	*2*	*01*	0093	*Normalisasi/ Restorasi Sungai*	*Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi*	*15*	*Km*		*5*	*Km*	*2*	*Km*	40%	2	Km	13%
1	03	02	*2*	*01*	114	*Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya*	*Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi*	*10*	*Unit*		*1*	*Unit*	*1*	*Unit*	100%	1	Unit	10%
1	03	02	*2*	*01*	0128	*Penyusuna Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya*	*Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untruk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya yang disusun*	*3*	*Dokumen*		*1*	*Dokumen*	*1*	*Dokumen*	100%	1	*Dokumen*	33%
1	**03**	**02**	***2***	***02***		***Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota***												
1	03	02	*2*	*02*	08	*Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan*	*10*	*Km*		*3*	*Km*	*1*	*Km*	33%	1	Km	10%
1	03	02	*2*	*02*	14	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi*	*15*	*Km*		*4*	*Km*	*2*	*Km*	50%	2	Km	13%
1	03	02	*2*	*02*	21	*Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasi dan dipelihara*	*75*	*Km*		*25*	*Km*	*10*	*Km*	40%	10	Km	13%

Page 2

2.2 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah :

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek antara lain :

1. ***Kerusakan bangunan irigasi yang masih tinggi***

   Kerusakan bangunan irigasi yang masih tinggi, baik yang disebabkan oleh usia teknis bangunan dan jaringan irigasi yang relative sudah tua juga karena akibat bencana alam serta ulah/perbuatan oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan operasi jaringan irigasi tidak dapat berjalan sesuai dengan standar norma dan etika operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi berdasarkan ketentuan Permen PUPR Nomor 12/PRT/M/2015 tentang Eksplotasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang pada gilirannya menghambat suplay air irigasi sampai ke petak-petak sawah.

2. ***Deforestasi pada bagian hulu***

   Deforrestasi pada bagian hulu atau semakin berkurangnya ketertutupan hutan di sekitar wilayah tangkapan hujan sungai dan bending, telah menimbulkan tingkat sedimentasi pada bending dan saluran pembawa di setiap musim hujan sehingga meyebabkan berkurangnya daya tamping bending dan saluran pembawa secara signifikan pada semua level kewenangan Daerah Irigasi (Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah/Pusat. Daerah Irigasi Kewenangan Propinsi dan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang) menyebabkan ketersediaan air dibendung tidak Berkorelasi dengan luas areal layanan/persawahan.

3. *Explorasi Air Tanah*

Explorasi air tanah belum dapat dimaksimalkan untuk menopang air untuk usaha pertanian khususnya bagi areal persawahan tadah hujan yang tidak dapat terjangkau layanan daerah irigasi permukaan, mengingat keberadaan hamparan persawahan pada umumnya berada pada wilayah ketinggian yang secara geologis posisinya berada pada wilayah yang tingkat kesulitan eksplorasi air bawah tanahnya (elevasi) sangat tinggi.

4. *Partisipatif Masyarakat*

Partisipatif masyarakat petani yang tergabung dalam kelembagaan/kelompok, Gabungan dan Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/GP3A/IP3A) masih sangat rendah, oleh karena itu masih sangat diperlukan upaya peningkatan partisipatif kelompok P3A/GP3A/IP3A sesuai level kewenangannya masing-masing, yakni kelompok P3A pada jaringan irigasi tersier, GP3A pada jaringan Irigasi sekunder dan IP3A pada jaringan irigasi primer.

5. *Peningkatan Koordinasi*

Peningkatan Koordinasi, Integrasi dan Sikronisasi, Simplifikasi (KISS) antar lembaga pengelola irigasi, baik yang mewadai keterwakilan masyarakat, Gabungan Kelompok dan Induk P3A Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian dan Ketahan pangan, Komisi Irigasi Kabupaten, Dinas PU-PR Provinsi dan Kementerian PU-PR yang diwakili oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang serta Satker TP-OP, masih sangat diperlukan khususnya terkait denagn Konservasi Sumber Daya Air, Operasi dan Pemmeliharaan serta Pengamanan dan Pengendalian daya rusak air di wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

6. *Alih Fungsi Lahan Pertanian*

Alih fungsi lahan pertanian khususnya lahan pertanian beririgasi yang beralih fungsi menjadi lahan pemukiman dan usaha perekonomian masyarakat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kelestarian bangunan dan jaringan khusunya konservasi sumber daya air pada umumnya, mengingat tidak sedikit simpul-simpil dalam siklus jaringan

dan bangunan irigasi yang harus terputus sebagain dampak adanya alih fungsi lahan beririgasi, selain berkurangnya lahan pertanian produktif, yang pada gilirannya meyebabkan menurunnya tingkat produktifitas hasil pertanian khususnya komoditas pada diwilayah Kabupaten Sidenreng Rappang.

7. Penyediaan Data Informasi Sistem Pengelolaan Sumber Daya Air

Penyediaan data informasi system pengelolaan sumber daya air sangat perlu untuk diseragamkan khususnya terkait dengan potensi dan pemanfaatan sumber daya air, hal ini dimungkinkan mengingat data dan informasi yang berbeda-beda dikalangan pemangku kepentingan akan sangant berpengaruh terhadap kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten Sidenreng Rappang.

8. Peningkatan Pengarusutamaan Gender

Keterlibatan kaum perempuan dalam tata kelola sumber daya air secara nasional khususnya pada manajemen Komisi Irigasi Kabupaten/Kota diseluruh Indonesia, telah menjadi Variable penting dalam penilaian kinerja Komisi Irigasi Kabupaten/Kota dan Komisi Irigasi Provinsi, oleh Pemerintah Pusat dimana dalam penilaian kinerja Komisi Irigasi diharuskan untuk mengakomidir 20% kepengurusan Komisi Irigasi dari kalangan Perempuan.

.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SEBELUM DAN SETELAH PERUBAHAN TAHUN 2024

Program berdasarkan RPJMD tahun 2024 – 2026 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dapat dilihat pada Tabel III.I :

Tabel III.1.
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kab. Sidrap

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**									
1 03	**Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**Dinas PSDA**	**100%**	**17,169,205,000**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**	**18,664,205,000**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1 03 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah**	**Dinas PSDA**	**100%**	**8,871,649,900**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**	**8,855,549,900**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1 03 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**Dinas PSDA**	**100%**	**40,953,600**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**	**40,953,600**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1 03 01 2 01 01	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Dinas PSDA	2 Dokumen	20,294,500		Dinas PSDA	2 Dokumen	20,294,500	
1 03 01 2 01 06	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	Dinas PSDA	1 laporan	20,659,100		Dinas PSDA	1 laporan	20,659,100	
1 03 01 2 02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	***Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah***	**Dinas PSDA**	**100%**	**8,147,674,600**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**	**8,147,674,600**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1 03 01 2 02 01	*Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN*	Dinas PSDA	1372 bulan	8,117,149,000		Dinas PSDA	1372 bulan	8,117,149,000	
1 03 01 2 02 05	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun*	*Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	Dinas PSDA	1 laporan	15,596,600		Dinas PSDA	1 laporan	15,596,600	
1 03 01 2 02 07	*Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD*	*Jumlah laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD*	Dinas PSDA	*18* laporan	14,929,000		Dinas PSDA	*18* laporan	14,929,000	
1 03 01 2 06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**Dinas PSDA**	**100%**	**219,701,100**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**	**219,701,100**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1 03 01 2 06 01	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan*	Dinas PSDA	*1* bulan	2,593,000		Dinas PSDA	*1* bulan	2,593,000	
1 03 01 2 06 03	*Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan*	Dinas PSDA	*1* bulan	4,333,000		Dinas PSDA	*1* bulan	4,333,000	
1 03 01 2 06 05	*Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan*	*Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan*	Dinas PSDA	*1* bulan	10,535,600		Dinas PSDA	*1* bulan	10,535,600	
1 03 01 2 06 09	*Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD*	Dinas PSDA	*70* kali	202,239,500		Dinas PSDA	*70* kali	202,239,500	

Page 1

1	**03**	**01**	**2**	**08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**Dinas PSDA**	**100%**		**363,404,600**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**		**347,304,600**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1	03	01	2	08	02	*Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan*	Dinas PSDA	*12*	Laporan	55,000,000		Dinas PSDA	*12*	Laporan	55,000,000	
1	03	01	2	08	03	*Penyedianaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan*	Dinas PSDA	*1*	Laporan	8,060,000		Dinas PSDA	*1*	Laporan	8,060,000	
1	03	01	2	08	04	*Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan*	Dinas PSDA	*4*	Laporan	300,344,600		Dinas PSDA	*4*	Laporan	284,244,600	
1	**03**	**01**	**2**	**09**		***Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***		**Dinas PSDA**	**100%**		**99,916,000**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**		**99,916,000**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1	03	01	2	09	02	*Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Atau Operasional Lapangan*	*Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayar pajak dan perizinannya*	Dinas PSDA	20	unit	99,916,000		Dinas PSDA	20	unit	99,916,000	
1	**03**	**02**				***Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)***	***Persentase Jaringan Irigasi dalam kondisi baik***	**Dinas PSDA**	**100%**		**8,297,555,100**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**		**9,808,655,100**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1	**03**	**02**	***2***	***01***		***Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai Pada Wilayah Sungai (WS) Daerah Kabupaten/ Kota***		**Dinas PSDA**	**100%**		**1,966,500,000**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**		**2,014,850,000**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1	03	02	*2*	*01*	0075	*Pembinaan Dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/ Kota*	*Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA kewenangan Kabupaten/Kota yang dibina dan diberdayakan*	sidrap	*90*	*Lembaga*	100,000,000		sidrap	*90*	*Lembaga*	100,000,000	
1	03	02	*2*	*01*	0093	*Normalisasi/ Restorasi Sungai*	*Panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi*	sidrap	*15*	*Km*	180,000,000		sidrap	*15*	*Km*	180,000,000	
1	03	02	*2*	*01*	114	*Rehabilitasi Embung Dan Penampungan Air Lainnya*	*Jumlah embung dan penampung air lainnya yang direhabilitasi*	sidrap	*10*	*Unit*	1,636,500,000		sidrap	*10*	*Unit*	1,684,850,000	
1	03	02	*2*	*01*	0128	*Penyusuna Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan hidup untuk konstruksi bendungan, embung dan bangunan penampung lainnya*	*Jumlah Dokumen rencana teknis dan dokumen lingkungan hidup untruk konstruksi bendungan, danau dan bangunan penampung air lainnya yang disusun*	sidrap	*3*	*Dokumen*	50,000,000		sidrap	*3*	*Dokumen*	50,000,000	
1	**03**	**02**	***2***	***02***		***Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota***		**Dinas PSDA**	**100%**		**6,331,055,100**	**ASN lingkup Dinas PSDA**	**Dinas PSDA**	**100%**		**7,793,805,100**	**ASN lingkup Dinas PSDA**
1	03	02	*2*	*02*	08	*Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang ditingkatkan*	sidrap	3	km	3,612,340,600		sidrap	3	km	4,412,340,600	
1	03	02	*2*	*02*	14	*Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang direhabilitasi*	sidrap	4	km	1,106,858,500		sidrap	4	km	1,964,358,500	
1	03	02	*2*	*02*	21	*Operasi Dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan*	*Panjang jaringan irigasi permukaan yang dioperasi dan dipelihara*	sidrap	25	km	1,611,856,000		sidrap	25	km	1,417,106,000	
						JUMLAH PAGU					**17,169,205,000**					**18,664,205,000**	

Page 2

BAB IV.
PENUTUP

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan bidang irigasi sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Pangkajene Sidenreng, 06 Juli 2024

Kepala Dinas
Pengelolaan Sumber Daya Air
Kab. Sidenreng Rappang

A. SAFARI RENATA, S.IP., M.Si
NIP. 19730306 199202 1 002

Perubahan Rencana Kerja (Renja)

Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang

Tahun 2024

JL. Harapan Baru Kompleks SKPD No. 28C

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

2024

JL. HARAPAN BARU BLOK, C No.28

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan kinerja dan penganggaran perangkat daerah untuk tahun 2024, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Perubahan Recana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Dinas Sosial, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026.

Mengamati pelaksanaan program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan. Pada Perubahan Renja tahun 2023 disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Tersusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 ini, disamping sebagai dokumen rencana kerja, juga diharapkan dapat dijadikan bahan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan sehingga terdapat arah yang jelas dari program/ kegiatan Dinas Sosial sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam bidang sosial. Melalui Perubahan Rencana Kerja ini pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial,

WAHIDAH ALWI, S.P., MM
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.. i
DAFTAR ISI..... ii
DAFTAR TABEL..... iii
BAB I PENDAHULUAN..... 1
1.1. Latar Belakang..... 1
1.2. Landasan Hukum 1
1.3. Maksud dan Tujuan..... 3
1.4. Sistematika Penulisan 3
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024 5
2.1. Evaluasi Renja PD Sampai Triwulan II Tahun 2024 5
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD..... 14
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15
BAB IV PENUTUP 20

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.a : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun Triwulan II Tahun 2024 6

Tabel II.1.b : Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD Dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun Triwulan II Tahun 2024 10

Tabel III.1 : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, maka setiap perangkat daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024. Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Sosial berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan.. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Tahun 2024-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/Kegiatan pada Tahun 2024 dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang tentunya berdampak pada pencapaian target kinerja, sehingga dengan perubahan rencana kerja diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam rangka pencapaian indikator-indikator kinerja Dinas Sosial di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 didasarkan kepada Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Ranwal RKPD) Tahun 2024 dan RKPD-Perubahan Tahun 2024, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RKPD).

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;
4. Undang Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OI8, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagimana telah diubah dengan Peratutan Menteri Dalam Negeri Nomor 212 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012, Nomor 26);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun

2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Perencanaan Daerah (Lembaran Daerah Tahun Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2014, Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019, Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022, Nomor 24).
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 36).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang secara umum akan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan di Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Serta mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P).

Sedangkan Tujuan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial adalah:

1) Untuk menyesuaikan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah bidang sosial Tahun 2024.
2) Menyesuaikan pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Sehingga Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program dan kegiatan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai berikut :

a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, yang memenuhi target kinerja dan melampaui target kinerja yang direncanakan.
b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, penyebab tercapainya dan melebihi target kinerja yang direncanakan.
c) Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Dinas Sosial.
d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan Perubahan Renja Tahun 2024;
b) Memperhatikan keberlanjutan dalam menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.
c) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
d) Tujuan yang dikehendaki;
e) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
f) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indiaktor Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegitan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=5*	*10=(9/4*100)*
	URUSAN SOSIAL								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang dibina**	**100**	**100**				**100**	**100%**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS Yang Tertangani**	**100**	**100**				**100**	**100%**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18	6				6	33%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina**	**100**	**100**				**100**	100%
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi**	**100**	**100**				**100**	100%

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45	11				11	24%
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170	57				57	3%
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	10	17				17	170%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan verifikasi dan validasi data masyarakat miskin**	**100**	**100**				**100**	100%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Masyarakat Miskin yang diverifikasi dan validasi serta diberi bantuan sosial**	**100**	**100**				**100**	100%
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	31611	12000				12000	38%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	5000	0				0	0%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**	**100**				**100**	100%
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Sosial**	**100**	**100**				**100**	100%
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	80	0				0	0%

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kasiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**100**	**100**				**100**	100%
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	111	37				37	33%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani**	**100**	**100**				**100**	100%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100**	**100**				**100**	100%
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	9	1				1	11%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**				**100**	100%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**100**				**100**	100%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18	6				6	33%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**100**				**100**	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	12				12	33%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	12				12	33%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**100**				**100**	100%

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12				12	33%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630	210				210	33%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**100**				**100**	**100%**
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150	0				0	0%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150	50				50	33%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**100**				**100**	100%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500	1500				1500	33%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	12				12	50%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12				12	33%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**100**				**100**	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknyaa	39	12				12	31%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Dipelihara	26	0				0	0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	0				0	0%

Tabel II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Sosial

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program Kegiatan	Indiaktor Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II (2024)			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Taget Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegitan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*
	URUSAN SOSIAL								
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang dibina**	**100**		**100**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS Yang Tertangani**	**100**		**100**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	18		6	0	0%	0	0%
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina**	**100**		**100**	**111**	**111%**	**111**	**111%**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi**	**100**		**100**	**111**	**111%**	**111**	**111%**

	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	45		33	33	100%	33	73%
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	2170		2170	48	2%	48	2%
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin**	**100**		**100**	**9**	**9%**	**9**	**9%**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Masyarakat Miskin yang diverifikasi dan validasi serta diberi bantuan sosial**	**100**		**100**	**9**	**9%**	**9**	**9%**
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	31611		12951	2530	20%	2530	8%
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	165		55	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**100**		**100**	**10**	**10%**	**10**	**10%**
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Sosial**	**100**		**100**	**10**	**10%**	**10**	**10%**
	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	900		300	62	21%	62	7%

	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kasiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**100**		**100**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
	Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	111		37	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani**	**100**		**100**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**100**		**100**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	9		3	0	0%	0	0%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**100**	**39**	**39%**	**39**	**39%**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**		**100**	**27**	**27%**	**27**	**27%**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	18		6	5	83%	5	28%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		**100**	**16**	**16%**	**16**	**16%**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900		300	150	50%	150	17%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36		12	6	50%	6	17%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**		**100**	**8**	**8%**	**8**	**8%**

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36		12	0	0%	0	0%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	630		210	101	48%	101	16%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**		**100**	**11**	**11%**	**11**	**11%**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4500		1500	60	4%	60	1%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24		12	6	50%	6	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	6	50%	6	17%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**		**100**	**7**	**7%**	**7**	**7%**
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39		13	3	23%	3	8%

Melihat hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Dinas Sosial sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, tingkat capaian masih banyak kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasinya masih rendah yang dipengaruhi oleh beberapa faktor..

Dari 6 Program dan 11 kegiatan yang direncanakan, yang mencapai tingkat realisasi minimal 50% sampai akhir Triwulan II (Juni 2024) adalah 4 kegiatan, selebihnya belum terealisasi dan juga terealisasi di bawah 50%. Ada pula kegiatan yang memang belum terlaksana karena jadwal pelaksanaanya di Triwulan III dan IV. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait, dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras stakeholder dalam mendukung realisasi sejumlah kegiatan tersebut. Serta diperlukan upaya yang lebih keras, fokus, dan terarah dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan pada Tahun 2024.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dinas Sosial dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Sosial.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam Renja 2024 Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial.
3. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM dan SDG's.
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Sosial.
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat tentang pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perubahan kegiatan dan kerangka pendanaan adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian dengan RPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Pembangunan diarahkan untuk mencapai visi dan misi program prioritas daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Evaluasi pelaksanaan RPD Tahun 2024 khususnya triwulan II terdapat hal-hal mendasar baik secara teknis maupun administratif yang mengakibatkan kegiatan tidak berjalan sesuai rencana sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

Rumusan rencana program dan kegiatan Perubahan Renja Dinas Sosial tahun 2024 dan prakiraan maju Tahun 2025, sebagai berikut:

TABEL III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Darah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	URUSAN SOSIAL									
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	**Cakupan Lembaga Kesejahteraan Yang dibina**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**52,000,000**	**Lembaga**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**192,216,000**	**Lembaga**
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase PSKS Yang Tertangani**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**52,000,000**	**Lembaga**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**192,216,000**	**Lembaga**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	6 Lembaga	52,000,000	Lembaga	Kab. Sidrap	6 Lembaga	192,216,000	Lembaga
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	**Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang DiBina**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**1,200,000,000**	**Disabilitas AT Lanjut Usia Gepeng**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**200,000,000**	**Disabilitas AT Lanjut Usia Gepeng**
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial	**Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti Sosial yang Memperoleh Rehabilitasi**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**1,200,000,000**	**Disabilitas AT Lanjut Usia Gepeng**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**200,000,000**	**Disabilitas AT Lanjut Usia Gepeng**

				Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial.	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	15	Orang	500,000,000	Disabilitas AT Lanjut Usia	Kab. Sidrap	15	Orang	100,000,000	Disabilitas AT Lanjut Usia
				Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	2170	Orang	700,000,000	Gelandangan Pengemis	Kab. Sidrap	2170	Orang	100,000,000	Gelandangan Pengemis
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	**Cakupan Verifikasi dan Validasi Data Masyarakat Miskin**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**500,000,000**	**Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**376,569,000**	**Masyarakat**
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Masyarakat Miskin yang diverifikasi dan validasi serta diberi bantuan sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**500,000,000**	**Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**376,569,000**	**Masyarakat**
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	12951	Keluarga	200,000,000	Masyarakat Miskin	Kab. Sidrap	12951	Keluarga	72,005,000	Masyarakat Miskin
				Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	55	Keluarga	300,000,000	Masyarakat	Kab. Sidrap	55	Keluarga	304,564,000	Masyarakat
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	**Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**232,000,000**	**Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**198,184,500**	**Masyarakat**
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana Yang Memperoleh Perlindungan Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**200,000,000**	**Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**193,513,500**	**Masyarakat**
				Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengunsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	300	Orang	200,000,000	Masyarakat	Kab. Sidrap	300	Orang	193,513,500	Masyarakat
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kasiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	**Persentase Korban Bencana yang Dievakuasi dengan Menggunakan Sarana Prasarana Tanggap Darurat Lengkap**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**32,000,000**	**TAGANA**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**4,671,000**	**TAGANA**

				Koordinasi, Sosialisasi, Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	37	Orang	32,000,000	TAGANA	Kab. Sidrap	37	Orang	4,671,000	TAGANA
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	**Persentase Tempat-Tempat Rintisan Kemerdekaan yang Tertangani**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**20,000,000**	**TMP**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**27,419,000**	**TMP**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	**Persentase Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**20,000,000**	**TMP**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**27,419,000**	**TMP**
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	3	Makam	20,000,000	TMP	Kab. Sidrap	3	Makam	27,419,000	TMP
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**2,213,379,946**					**2,148,052,500**	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Penyusunan Laporan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**31,000,000**	**Dinas Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**50,520,000**	**Dinas Sosial**
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	6	Dokumen	31,000,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	6	Dokumen	50,520,000	Dinas Sosial
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**1,885,490,946**	**Dinas Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**1,784,215,500**	**Dinas Sosial**
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidrap	300	Org/Bln	1,881,990,946	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	300	Org/Bln	1,775,988,500	Dinas Sosial
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidrap	12	Dokumen	3,500,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Dokumen	8,227,000	Dinas Sosial
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**103,500,000**	**Dinas Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**85,436,000**	**Dinas Sosial**
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Paket	500,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Paket	2,584,000	Dinas Sosial
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	210	Laporan	103,000,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	210	Laporan	82,852,000	Dinas Sosial

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**149,000,000**	**Dinas Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**188,507,000**	**Dinas Sosial**
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidrap	1500	Laporan	500,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	1500	Laporan	994,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Laporan	28,000,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Laporan	29,015,000	Dinas Sosial
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidrap	12	Laporan	120,500,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	12	Laporan	158,498,000	Dinas Sosial
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**44,389,000**	**Dinas Sosial**	**Kab. Sidrap**	**100**	**Persen**	**39,374,000**	**Dinas Sosial**
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidrap	13	Unit	44,389,000	Dinas Sosial	Kab. Sidrap	13	Unit	39,374,000	Dinas Sosial
									4,217,379,946					**3,142,441,000**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Perubahan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 bertujuan untuk meningkatkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang sosial. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra 2024-2026 di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi. Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial tahun 2024, dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.
4. Perubahan Rencana Kerja SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024
5. Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 diharapkan menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah di bidang sosial.

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024
Kepala Dinas Sosial,

WAHIDAH ALWI, S.P., MM
Pangkat: Pembina Utama Muda
NIP. 19710315 199803 2 003

PEMERINTAH

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Rencana Kerja

PERUBAHAN

2024



DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Hidayah yang tak terhingga, sehingga penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diselesaikan.

Rancangan Awal Renja Perubahan 2024 ini menggambarkan perumusan rancangan akhir untuk mempertajam program, kegiatan, sub kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD.

Harapan Kami semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang ini bisa digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, partisipatif dan akuntabel serta diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

H. A. BAHARI PARAWANSA, S.IP
NIP. 19720605 200003 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan 6

1.4 Sistematika Penulisan 6

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 11

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan 19

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH .....

BAB V PENUTUP .....

DAFTAR TABEL

TABEL II.1.a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d Triwulan II tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang
TABEL II.1.b	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Restra Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang
TABEL III. 1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun kedepan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan Daerah. Rencana Kerja memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun kedepan, berpedoman pada Rencana Strategis. Dengan demikian Rencana Strategis pada dasarnya merupakan penjabaran dari Dokumen Renstra dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan yang memuat analisis hasil pengendalian pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II, dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus dilakukan sebelum dilaksanakannya Perubahan APBD pada tahun berjalan. Adapun perubahan rancangan renja perangkat daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil

evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja serta penyerapan anggaran pada renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dilakukan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah yang berdampak terhadap pagu yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu
2. Faktor lain yang mengakibatkan perlunya dilakukan pergeseran kegiatan, perubahan lokasi dan/atau kelompok sasaran dan penghapusan kegiatan;
3. Adanya kegiatan baru/alternatif yang harus ditampung dalam perubahan RKPD Tahun 2024;
4. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (Lima Puluh Persen).

Dengan kata lain rencana kerja perubahan perangkat daerah tahun 2024 sejatinya untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan dimulai dari hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai dengan triwulan II, masalah yang dihadapi serta usulan program serta kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2024. Renja perubahan tersebut kemudian melalui proses verifikasi dengan tujuan

untuk memastikan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah maupun program dan kegiatan prioritas pada perubahan RKPD telah sepenuhnya tercantum pada Rencana Kerja Perubahan.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah :

1. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaen/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang daerah kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 01 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan. Perubahan renja ini juga dimaksudkan untuk memperbaiki tolak ukur dan alat bantu bagi unit-unit kerja yang ada pada Dinas Perhubungan sehingga dapat secara konsekuen dan konsisten menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan posisi dan peran yang diemban dalam mencapai visi, misi dan tujuan perangkat daerah.

Tujuan penyusunan Renja Perubahan ini adalah mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dengan target dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen rancangan perubahan RKPD tahun 2024.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Adapun sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja OPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I 1. Latar belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RANJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 yang memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dengan pokok-pokok materi antara lain

a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
b. Realisasi program/kegaiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

d. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
e. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah dan;
f. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berisikan uaraian mengenai:

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs *(Suistanable Development Goals);*
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan/Bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 ini bertujuan melihat perkembangan capaian target indikator program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Perhubungan yang telah dicapai sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 untuk mendapatkan target sasaran yang direncanakan dalam tahun berjalan.

Jumlah program dan kegiatan dalam APBD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 12.032.559.000,- dengan realisasi sampai dengan Triwulan II realisasi belanja Rp. 5.977.849.867 (49,29%) dan realisasi keuangan (49,29%). Diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100% atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II (Januari-Juni) dan pencapaian Renstra Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1.a RESTRA PERUBAHAN 2018-2023

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN (outcomes)/ Kegiatan (output)	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM (RENSTRA SKPD TAHUN 2018-2023)	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2022	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA SKPD S/D TAHUN BERJALAN	
									REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2022	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
					2	3	4	5	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					

	15				**PERHUBUNGAN**					
		01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**100**	**100**
			02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Adaministrasi Keuangan	100		100	100
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	42		22	52
			06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian	100		100	100
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	7		8	114
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36		17	47
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	45.500		17000	37
				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	157		75	48

			07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	100
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	6		3	50
				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	4		6	43
			08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	100
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	432		162	38
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36		18	50
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36		18	50
			09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	100
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang mendapat Pemeliharaan rutin	1		1	100

				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang mendapat Pemeliharaan rutin	15		15	100
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yng direhabilitasi dan dipelihara	2		0	0
		02			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Persentase Prasarana dan Fasilitas LLAJ Dapat berfungsi baik**	**98**		**98**	**98**
			01		Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100		0	0
				01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Tersusunya Rencana Induk Jaringan LLAJ	1		0	0
			03		Pengelolaan Terminal Tipe C	Persentase Tingkat Keterpenuhan Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	100		0	0
				04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Fasilitas Utama dan Pendukung yang direhabilitasi dan Terpelihara	4		0	0
			05		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum	90		129	143

				01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	6		2	33
				04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	10.400		5400	52
				07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	9		10	100
			06		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	100		142	142
				02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	180		308	171
				04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pengawasan dan pengendalian jalur angkutan umum	25		26	104
			09		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Layanan Angkutan Darat	6,7		9	133

				02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah arus penumpang angkutan umum	9.000		6000	67
			14		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rasio Ijin Trayek	0,25		0,06	24
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Izin Trayek Angkutan Umum	1.800		256	14

Tabel II.1.b RENSTRA RPD 2024-2026

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

DINAS PERHUBUNGAN

Kode	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) S.D TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s.d TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (TAHUN 2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100		100	56,33	0,5633	56,33	0,56

					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**100**		**100**	**46,86**	**0,4686**	**46,86**	**0,47**
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4		5	4	**0,8**	4	**1,00**
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2		2	2	**1**	2	**1,00**
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**		100	68,10	**0,681**	68,10	**0,68**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42		14	23,00	**1,642857143**	23,00	**0,55**
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi umum yang Perangkat Daerah**	**100**		**100**	**38,61**	**0,3861**	**38,61**	**0,39**

					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20		6	0	**0**	0	**-**
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12		**0**	**0**	**0**	**0**	**-**
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	18		7	0	**0**	0	**-**
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	157		50	90	**1,8**	90	**0,57**
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dearah**	**100**		**100**	**0**	**0**	**0**	**-**
					Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	17		12	0	**0**	0	**-**

					Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5		1	**0**	**0**	**0**	**-**
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2		0	**0**	**0**	**0**	**-**
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**100**	**37,11**	**0,3711**	**37,11**	**0,37**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	485		150	207	**1,38**	207	**0,43**
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Di sediakan	12		12	6	**0,5**	6	**0,50**
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12		12	6	**0,5**	6	**0,50**

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**		**100**	**30,38**	**0,3038**	**30,38**	**0,30**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15		3	4	**1,333333333**	4	**0,27**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan	15		15	4	**0,266666667**	4	**0,27**
					Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2		0	0	**0**	0	**-**

					PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	**Rasio Konektivitas Kabupaten**	**90,45**		96	60,78	**0,633125**	60,78	**0,67**
					Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	**Persentase Pemenuhan Dokumen Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**100**		100	0	**0**	0	**-**
					Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten / Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	1		1	0	**0**	0	**-**
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia**	**100**		**100**	**62,81**	**0,6281**	**62,81**	**0,63**
					Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang tersedia	75		5	0	**0**	0	**-**
					Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan jalan yang	1710		530	264	**0,498113208**	264	**0,15**

						Terehabilitasi dan Terpelihara							
					Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	**Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**93**		**91**	59,03	**0,648681319**	59,03	**0,63**
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	11		1	**0**	**0**	**0**	**-**
					Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia engujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	3		2	0	**0**	0	**-**
					Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	8600		2000	2000	**1**	2000	**0,23**
					Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor terpelihara	9		9	0	**0**	0	**-**

					Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**100**		100	18,61	**0,1861**	18,61	**0,19**
					Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	15		10	4	**0,4**	4	**0,27**
					Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	9		2	0	**0**	0	**-**
					Penataan Manajemen dan rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan kabupaten/Kota	150		45	22	**0,488888889**	22	**0,15**

					Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	**Persentase Kelaikan Aspek LLAJ yang di Audit**	**100**		**100**	**0**	**0**	**0**	**-**
					Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5		1	0	**0**	0	**-**
					Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Layanan Angkutan Darat**	**53**		**50**	**16,36**	**0,3272**	**16,36**	**0,31**
					Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	36		2	3	**1,5**	3	**0,08**

					Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Rasio trayek**	**0,0005**		**0,07**	**33,84**	**483,4285714**	**33,84**	**67.680,00**
					Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	36		12	3	**0,25**	3	**0,08**

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 43 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Dinas Perhubungan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Tingkat Kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana yang menjadi tujuannya yaitu Meningkatkan kinerja pelayana Perhubungan. Untuk pencapaian ini telah dilaksanakan kegaiatan Strategis untuk menindaklanjuti hal yang kritis dalam tugas, wewenang dan tanggung jawab Dinas Perhubungan, kegiatan-kegiatan strategis diantaranya :

1. Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas pada titik rawan kemacetan dan kecelakaan, diantaranya persimpangan, pasar-pasar dan sekolah-sekolah.
2. Pemeliharaan perlengkapan jalan guna meningkatkan keselamatan dalam berlalu lintas.

Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perhubungan dengan fungsi:

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanannya, Dinas Perhubungan dihadapkan pada beberapa permasalahan yaitu :

1. Belum tersedianya Dokumen Teknis sebagai acuan dalam pengembangan jaringan transportasi.
2. Pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pertumbuhan jalan
3. Rendahnya wawasan, pemahaman dan kesadaran masyarakat/pengguna jalan terhadap keselamatan berlalu lintas.
4. Keterbatasan ruang parkir sehingga kendaraan menggunakan badan jalan yang mengurangi kapasitas jalan.
5. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana LLAJ maupun perlengkapan jalan.
6. Keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi dan kompetensi di Bidang Perhubungan yang masih terbatas.

Dalam menyikapi isu-isu diatas Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang menempuh beberapa hal diantaranya meningkatkan jumlah aparatur yang mengikuti Bimtek/Diklat, membangun sarana dan prasarana angkutan darat, melakukan penataan fasilitas dan rekayasa lalu lintas, meningkatkan pengendalian dan pengawasan berlalu lintas serta perparkiran.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan Rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, Pencapaian Renstra, dan visi misi Sidenreng Rappang yang tertuang dalam RPJMD.

Faktor utama disusunnya program/kegiatan dalam renja perubahan ini adalah demi pencapaian visi misi RPJMD Tahun 2024-2026 Dinas Perhubungan. Selain itu faktor penunjang lainnya pencapaian target Renstra Dinas Perhubungan dan wujud nyata pengimplementasian tupoksi Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang terdiri dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebanyak 2 Program, 16 Kegiatan dan 27 Sub Kegiatan dengan Pagu Anggaran Rp. 12.032.559.000,-. kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 dialokasikan untuk urusan Kesekretariatan sebesar Rp. 3.074.946.700,-, dan urusan Perhubungan sebesar Rp. 8.957.612.300,-.

Pada tabel berikut menyajikan Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 di Dinas Perhubungan yaitu :

TABEL III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE					URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5	6	7	4	9	6	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
	15				PERHUBUNGAN				12.032.559.000				12.102.559.000	

		01			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**3.074.946.700**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**3.132.446.700**	
	15	**01**	2.01		**Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Presentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**15.458.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**15.458.000**	
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	5 Paket	10.113.000		Kab. Sidenreng Rappang	5 Paket	10.113.000	
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Jenis	5.345.000		Kab. Sidenreng Rappang	2 Jenis	5.345.000	
			02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Adaministrasi Keuangan**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**2.077.438.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**2.077.438.000**	

				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pemenuhan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	14 bulan	2.077.438.000		Kab. Sidenreng Rappang	14 bulan	2.077.438.000	
			06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi Umum dan Kepegawaian**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**226.685.500**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**284.021.000**	
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	6 jenis	3.515.000		Kab. Sidenreng Rappang	6 jenis	3.515.000	
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	4 jenis	6.280.000		Kab. Sidenreng Rappang	0%		
				05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	7 paket	6.724.000		Kab. Sidenreng Rappang	7 paket	6.724.000	

				09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	50 kali	210.166.500		Kab. Sidenreng Rappang	50 kali	273.782.000	
			07		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**43.593.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**82.302.000**	
				06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	43.593.000		Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	58.834.000	
				05	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 unit	-		Kab. Sidenreng Rappang	12 unit	23.468.000	
				10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	0%	-		Kab. Sidenreng Rappang	0%	-	

				11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenis Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor yang diadakan	Kab. Sidenreng Rappang	0%	-		Kab. Sidenreng Rappang	0%	-	
			08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**570.958.200**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**547.327.700**	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	150 lbr	1.500.000		Kab. Sidenreng Rappang	150 lbr	1.500.000	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	49.800.000		Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	49.800.000	
				04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	519.658.200		Kab. Sidenreng Rappang	12 Bulan	496.027.700	
			09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang**	**Presentase Pemenuhan Pemeliharaan**	**Kab. Sidenreng**	**100%**	**140.814.000**		**Kab. Sidenreng**	**100%**	**125.900.000**	

					Urusan Pemerintahan Daerah	**Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Rappang**				**Rappang**			
				01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendraan Dinas Jabatan yang Dipelihra dan Dibyarkan Pajaknya	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	32.773.000		Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	17.859.000	
				02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaka dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	15 unit	108.041.000		Kab. Sidenreng Rappang	15 unit	108.041.000	
				09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yng direhabilitasi dan dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	0%	-		Kab. Sidenreng Rappang	0%	-	

		02			**Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**Razio Konektivitas Kabupaten**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**96%**	**8.957.612.300**		**Kab. Sidenreng Rappang**	96%	**8.970.112.300**	
			01		**Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Persentase Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**4.358.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**4.358.000**	
				01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana Induk Jaringan (LLAJ) Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 dok	4.358.000		Kab. Sidenreng Rappang	1 dok	4.358.000	
			02		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**	**Presentase Pemasangan Fasilitas Perlengkapan jalan di Ruas Jalan Kabupaten**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**8.351.105.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**8.421.105.000**	
				02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	32.500.000		Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	32.500.000	

				04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang di Rehabilitasi dan Terpelihara	Kab. Sidenreng Rappang	841765 unit	8.318.605.000		Kab. Sidenreng Rappang	911765 unit	8.388.605.000	
			03		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**	**Persentase Prasarana Terminal Penumpang Tipe C sesuai SPM**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**0%**	**-**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**0%**	**-**	
				04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang direhabilitasi dan Terpelihara	Kab. Sidenreng Rappang	0%	-		Kab. Sidenreng Rappang	0%	-	
			05		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**	**Persentase Kepemilikan KIR Angkutan Umum**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**91%**	**230.650.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**91%**	**230.650.000**	
	06			01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	139.000.000		Kab. Sidenreng Rappang	1 unit	139.000.000	

				02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian berkala Kendaraan Bermotor yang ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	2 Org	20.000.000		Kab. Sidenreng Rappang	2 Org	20.000.000	
				04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	2000 buah	20.000.000		Kab. Sidenreng Rappang	2000 buah	20.000.000	
				07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor dan alat pendukung yang dikalibrasi	Kab. Sidenreng Rappang	9 unit	51.650.000		Kab. Sidenreng Rappang	9 unit	51.650.000	
	16		**06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Persentase Tingkat Pemenuhan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**225.620.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**205.620.000**	

				04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Untuk Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	154.730.000		Kab. Sidenreng Rappang	10 unit	134.730.000	
				15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2 Keg	2.342.000		Kab. Sidenreng Rappang	2 Keg	2.342.000	
				17	Penataan Manjemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	45 keg	68.548.000		Kab. Sidenreng Rappang	45 keg	68.548.000	
			07		**Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)untuk Jalan Kabupaten Kota**	**Presentase Pengajuan Andalalin yang Disetujui**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**0%**	**-**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**0%**	**-**	

				05	Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	0%	-		Kab. Sidenreng Rappang	0%	-	
			08		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**	**Presentase Kelaikan Aspek LLAJ yan di Audit**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**35.000.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100%**	**35.000.000**	
				01	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ	Jumlah Auditor dan Inspektor LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 org	35.000.000		Kab. Sidenreng Rappang	1 org	35.000.000	
				02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelakasanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelakasanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Kab. Sidenreng Rappang	0%			Kab. Sidenreng Rappang	0%		
			09		**Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1**	**Persentase Layanan Angkutan Darat**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**50%**	**90.391.300**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**50%**	**52.891.300**	

					(satu) Daerah Kabupaten/Kota									
				02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten Kota	Kab. Sidenreng Rappang	2 keg	90.391.300		Kab. Sidenreng Rappang	2 keg	52.891.300	
			14		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Rasio Ijin Trayek**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**0,07%**	**20.488.000**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**0,07%**	**20.488.000**	
				02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Jumlah Laporan Koordinasai dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek	Kab. Sidenreng Rappang	12 dok	20.488.000		Kab. Sidenreng Rappang	12 dok	20.488.000	

					Kewenangan Kabupaten/Kota	Kewenangan Kabupaten/Kota								

BAB IV

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) dapat dilakukan perubahan ditahun berjalan berdasarkan ketentuan perubahan dokumen Renja yang telah diatur dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Sesuai dengan Permendagri tersebut, maka perubahan Renja Tahun 2024 selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Dinas Perhubungan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, pedoman bagi perubahan perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024, serta pedoman bagi stakeholder lainnya dalam pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan pada tahun 2024.

Berkaitan dengan hal diatas, serta menjamin terlaksananya program dan kegiatan pada tahun 2024 dengan baik, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu, Perubahan Renja Dinas Perhubungan tahun 2024 merupakan pedoman dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, Perubahan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2024 merupakan pedoman bagi perubahan perencanaan penganggaran daerah dalam bentuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2024 serta perencanaan yang baik dan dapat di jadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah. Dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini di taati oleh

seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konstensi yang tinggi serta menjadi acuan dalam proses selanjutanya.

RENCANA KERJA (RENJA)
PERUBAHAN
TAHUN 2024

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya jualah maka kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2024. Rencana Kerja (Renja) ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubhan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan rencana yang akan dilaksanakan untuk merealisasikan Perencanaan Strategis (Renstra) Tahun 2024- 2026 dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026. Rencana kerja memuat hasil yang telah dicapai pada tahun sebelumnya serta program, kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif dan prakiraan maju sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Kepada semua pihak yang telah berperan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024 ini, kami ucapkan terima kasih. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kegiatan pada 1 (satu) tahun yang akan datang.

Pangkajene Sidenreng, 01 Agustus 2024
Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan
Kabupaten Sidenreng Rappang

SUHARYA ANGRIANI, S.STP., M.Si
Pangkat, Pembina Tk. I
Nip. 19781231 199711 2 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **ii**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **iv**

BAB I. PENDAHULUAN **1**

I.1. Latar Belakang 1
I.2. Landasan Hukum 1
I.3. Maksud dan Tujuan 4
I.4. Sistematika Penulisan 4

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU **6**

II.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 6
II.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 19

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH **22**

III.1. Rencana Kerja Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 22

BAB V. PENUTUP **35**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang …….	11
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024 ……	23

BAB I.

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) SKPD, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD/RPD menjadi RKPD/RPD Perubahan harus berdasarkan hasil verifikasi renja SKPD. Sehingga antara renja SKPD dengan dokumen RKPD/RPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab.Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan yang berisi rencana program/kegiatan yang searah dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Sasaran penyusunan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Sidenreng Rappang senantiasa diletakkan pada pemanfaatan potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar semua komponen dalam pembangunan peternakan dan perikanan terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

I.2 Landasan Hukum

Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Permendagri No. 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi RKPD Tahun 2015;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan No. 10 tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan

Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 9

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daearah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 61)
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018– 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 sampai dengan 2023.

Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 74 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud
   a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Perubahan Tahun 2023 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas
   b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas
2. Tujuan
   a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang
   b. Terwujudnya pelaksanaan pembangunan yang selaras dan terpadu, komperehensif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD
   c. Tersedianya Rencana Kerja Perubahan sebagai Dokumen Perencanaan dan Rujukan dalam menetapkan Kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (Renstra) Dinas Peternakan dan Perikanan Tahun 2019 sampai dengan 2023.
   d. Terakumulasinya usulan hasil musrembang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

I.2 Landasan Hukum

I.3 Maksud dan Tujuan

I.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Thun 2023

II.2 Isu-Isu penting Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2023

BAB IV. PENUTUP

BAB II.

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Thun 2024

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun berjalan dan capaian Renstra SKPD pada Dinas Peternakan dan Perikanan, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun berkenaan (2024).

Evaluasi hasil pelaksanaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Triwulan II Tahun 2024 terdiri :

1. Program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan
   a. ***Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah*** dengan **kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** dengan sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan target 6 Dokumen tapi yang realisasi baru 4 dokumen, sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dengan target 5 laporan tapi realisasi 2 laporan. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat** Daerah, sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan dengan target 1.330 Orang/bulan dengan realisasi 791 orang/bulan. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dengan target 12 Laporan realisasi 6

laporan. **Kegiatan Adminsitraasi Umum Perangkat Daerah**, sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dengan target 50 paket dengan realisasi 11 paket, sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 1 paket tapi belum ada realisasi, sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan target 200 laporan dengn realisasi 18 laporan. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sub kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat dengan target 12 laporan, dengan realisasi 6 laporan, sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan target 12 laporan realisasi 6 laporan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan target 12 laporan realisasi 4 laporan, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 laporan, realisasi 5 laporan. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**, sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan target 6 unit realisasi 2 Unit, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan target 1 unit belum ada realisasi, sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan target 2 unit , realisasi 1 unit.

b. ***Program Pengelolaan Perikanan Tangkap*** dengan **kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap dengan target 5 unit belum ada realisasi.

c. **Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, Kegiatan Pengelolaan Pembudidaya Ikan,** Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/Kota dengan target 1 laporan, tapi belum

ada realisasi. Sub Kegiatan Penjamin ketersediaan sarana pembudidaya ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota dengan target 2 laporan, tapi belum ada realisasi.

d. ***Program Pemgawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan,*** Kegiatan **Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota,** sub kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota dengan target 4 dokumen, realisasi 2 dokumen.

e. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian, Kegiatan **Pengelolaan Sumberdaya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**, sub Kegiatan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman dengan target 12 laporan, realisasi 6 laporan. Kegiatan **Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak Yang Sumbernya Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota,** sub kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain dengan target 7.142 paket, belum ada realisasi.

f. ***Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner,*** *Kegiatan* Penjamin Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan daerah wabah Penyakit Hewan Menular dalam daerah kabupaten/Kot, Sub kegiatan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan target 12 Laporan, realisasi 6 laporan. *Kegiaan* **Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner,** sub kegiatan Pengawasn Unit Usaha Produk Hewan dengan target 4 laoran, yang realisasi 2 laporan.

g. Program Perizinan Usaha Pertanian, Kegiatan **Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasiitas Pemeliharaan Hewan,**

Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan, sub kegiatan Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan dengan target 125 dokumen, yang terealisasi 90 dokumen.

h. Program Penyuluhan Pertanian, Kegiataan **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian,** sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa dengan target 11 Unit yang terealisasi 6 Unit.

2. Program yang memenuhi target kinerja, yaitu

   a. ***Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Kegiatan*** Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/kota, sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil dengan target 40 orang, realisasi 40 orang.

   b. ***Program Penyuluhan Pertanian***, Kegiatan **Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian** sub kegiatan Pengembangan Kapasitas kelembagan Petani di Kecamatan dan Desa, dengan target 921 Unit, realisasi 921 Unit.

3. Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya dan Terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

   - Besaran persentase rencana penarikan pada Triwulan 1 s/d 2 sangat dibatasi dan persentase terbanyak berada di Triwulan 3 dan 4.
   - Terdapat beberapa SPM yang diajukan untuk pencairan namun belum terbit SP2Dnya.

4. Implikasi yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Perangkat Daerah

   Bagi program yang tidak memenuhi target maka implikasi yang timbul adalah:

a. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pada lingkup Dinas Peternakan dan Perikanan sehingga mempengaruhi kinerja perangkat daerah
b. Tidak terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana pada pelaku usaha

5. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih memungkinkan untuk dilaksanakan dan mendukung pencapaian visi misi Bupati Sidenreng Rappang.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun berjalan) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel II.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)

Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Peternakan dan Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**109**
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat ketepatan Waktu pelaporan Perencanaan, penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**150**
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	6	6	4	67%	10	167
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5	1	5	2	40%	3	60

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**150**
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.400	1.198	1.330	791	59%	1.989	142
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	1	12	6	50%	7	58
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**150**
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50	22	50	11	22%	33	66
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10	3	1	-	0%	3	30
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	112	200	18	9%	130	65
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**150**
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	6	50%	18	150

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	12	6	50%	18	150
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	12	12	4	33%	16	133
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	12	5	42%	17	142
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**150**
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6	4	6	2	33%	6	100
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	1	-	0%	1	100
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12	10	2	1	50%	11	92
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**	**2.971,60**	**2.080,5**	**2.856,27**	**998,7**	**35%**	**3.079**	**104**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)**	**100,00**	**74,3**	**100**	**665**	**665%**	**739**	**739**
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia	410	5	5	-	0%	5	1
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)**	**100**	**-**	**100**	**100**	**100%**	**100**	**100**
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	40	-	40	40	100%	40	100
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**	**1380**	**1.216,45**	**1.216,46**	**521,21**	**43%**	**1.738**	**126**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Produksi Perikanan Budidayah (%)**	**100**	**100**	**100**	**43**	**43%**	**143**	**143**
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	-	1	-	0%	-	-
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12	10	2	-	0%	10	83

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)**	**75**	**75**	**70**	**31**	**44%**	**106**	**141**
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Orang)**	**294**	**325**	**294**	129	**44%**	**454**	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	4	2	4	2	50%	4	100
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Daging (Kilogram)**	**3.570.791**	**2.139.512**	**3.212.708**	**417,715**	**0%**	**2.139.930**	**60**
		Jumlah Produksi Telur (Kilogram)	**58.717.333**	**41.843.861**	**54.997.045**	**13.804.210**	**25%**	**55.648.071**	**95**
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Akseptor yang Dilayani (%)**	**10**	**-**	**10**	**3**	**25%**	**3**	**30**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	12	-	12	6	50%	6	50
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase Ternak yang Disebar (%)**	**100**	**100**	**100**	**-**	**0%**	**100**	**100**
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	5.500	7.142	7.142	-	0%	7.142	130
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)**	**21**	**21**	**21**	**5**	**24%**	**26**	**124**
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)**	**20**	**20**	**20**	**5**	**25%**	**25**	**125**
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	11	11	12	6	50%	17	155

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)**	**75**	**75**	**75**	**18**	**24%**	**93**	**124**
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik	4	4	4	2	50%	6	150
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**61**	**61%**	**161**	**161**
3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Cakupan Penerbitan Izin usaha bidang Peternakan (%)**	**100**	**100**	**100**	**72**	**72%**	**172**	**172**
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	175	75	125	90	72%	165	94

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintahan Daerahdan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	5	*6*	*7*	*8= (7/6)*	*9=(5+7)*	*10 =(9/4*100)*
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Rasio Penyuluh Peternakan terhadap pelaku utama peternakan/kelompok ternak (Rasio)**	**1:13**	**1:11**	**1;13**	**1:13**	**100%**	**1:13**	**100**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Peningkatan Kapasitas penyuluh (%)**	**100**	**100**	**100**	**50**	**50%**	**150**	**150**
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	11	11	11	6	55%	17	155
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	921	921	921	921	100%	1.842	200

II.2 Isu-isu Penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

Dinas Peternakan dan Perikanan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan bidang Peternakan dan Perikanan. Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Peternakan dan Perikanan mempunyai fungsi merumuskan kebijakan teknis bidang peternakan dan perikanan, pemberi dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Peternakan dan Perikanan, pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Peternakan dan Perikanan dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD, Dinas Peternakan dan Perikanan mendapatkan Isu Kebijakan Strategis yang tetap menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu Peningkatan Produksi di sektor Peternakan dan Perikanan.

Sejalan dengan Isu Kebijakan tersebut maka Prioritas Program/Kegiatan, maka rancangan awal Rencana Kerja SKPD dalam mewujudkan Peningkatan Produksi di Sektor Peternakan (daging dan telur) serta Perikanan (Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap).

Namun banyak permasalahan, hambatan, tantangan dan peluang yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD antara lain :

1. Permasalahan
    a. Lemahnya kemampuan pelaku usaha dalam kemandirian berwirausaha
    b. Rendahnya legalitas berusaha bagi pelaku usaha perikanan
    c. Kurangnya kelompok tani yang melakukan pengolahan limbah ternak
    d. Jumlah akseptor IB masih rendah
    e. Ternak bibit sapi belum bersertifikat
    f. Keterbatasan sarana dan prasarana Inseminasi Buatan
    g. Kurangnya tempat pemasaran hewan
    h. Perlunya penanggulangan penyakit ternak anthrax dan rabies

i. Produktivitas dan daya saing peternakan dan perikanan masih rendah

j. Kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana peternakan dan perikanan

2. Hambatan

a. Anomali cuaca yang dapat memicu munculnya wabah penyakit menular dan gangguan kesehatan pada ternak

b. Belum adanya standar harga minimal untuk sapronak dan hasil produksi peternakan sehingga harga tidak menentu

c. Masih terbatasnya investor yang bergerak di sektor peternakan khususnya sapi potong.

d. Terbatasnya anggaran pemerintah daerah;

3. Tantangan

a. Ketersediaan bibit unggul bermutu belum cukup;

b. Menurunnya minat generasi muda untuk menjalankan usaha peternakan dan perikanan;

c. Belum optimalnya pengembangan kelembagaan peternak dan pembudidaya baik formal maupun informal;

d. Terbatasnya pemanfaatan kelembagaan penyuluhan untuk informasi dan promosi peternakan dan perikanan.

e. Adanya potensi konflik pemanfaatan ruang sumberdaya perikanan

4. Peluang

a. Ketahanan perekonomian daerah yang baik;

b. Komitmen pemerintah kabupaten dalam pengembangan peternakan dan perikanan;

c. Adopsi terknologi peternakan oleh peternak semakin meningkat;

d. Masih terbuka peluang pasar produk peternakan dan perikanan baik di tingkat regional, nasional maupun internasional;

e. Adanya kelembagaan peternakan dan perikanan baik formal maupu informal

f. Potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan HMT

g. Semakin terbukanya peluang usaha di bidang perikanan

h. Penerapan CPIB (Cara Pembenihan Ikan Yang Baik) pada BBI dan CBIB (Cara Budidaya Ikan Yang Baik) pada kelompok pembudidaya ikan

i. Potensi SDA untuk pengembangan usaha perikanan

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah. Dengan rencana kerja yang terukur, dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Perubaha rencana Kerja (Renja) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah dokumen pernencanaan unutk penyesuaian perencanaan tahun yang diawali dengan penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Penyusunan rancangan perubahan Renaj yang mengacu pada Rancangan awal perubahan RKPD Tahun 2024.

Uraian rencana program dan kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini bersifat menyeluruh yang di danai oleh APBD perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

Rumusan rencana kerja perubahan dan pendanaan Dinas Peternakan dan Perikanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel III.1

Tabel III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**										
3.25.00	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**					**2.934.000.006**				**308.000.000**	
3.25.03	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)**		**Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng**	**2.856,27**	**230.000.000**	**Kelompok Nelayan**	**Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng**	**2.856,27**	**83.000.000**	**Kelompok Nelayan**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.03.2.01	**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Produksi Perikanan Tangkap (%)**		**Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng**	**100**	**190.000.000**		**Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng**	**100**	**43.000.000**	
3.25.03.2.01.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	200	190.000.000		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	200	43.000.000	
3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Wilayah Pemberdayaan Nelayan Kecil (%)**		**Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng**	**100**	**40.000.000**		**Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng**	**100**	**40.000.000**	
3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	40	40.000.000		Kecamatan Tellu LimpoE, Panca Lautang, Pitu Riase dan Watang Sidenreng	40	40.000.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.04	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)**		**11 Kecamatan**	**1.350**	**274.000.000**	**Kelompok Pembudidaya**	**11 Kecamatan**	**1.350**	**215.000.000**	**Kelompok Pembudidaya**
3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Persentase Produksi Perikanan Budidayah (%)**		**11 Kecamatan**	**100**	**274.000.000**		**11 Kecamatan**	**100**	**215.000.000**	
3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		11 Kecamatan	15	234.000.000		11 Kecamatan	15	200.000.000	
3.25.04.2.04.0003	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		11 Kecamatan	12	40.000.000		11 Kecamatan	12	15.000.000	
3.25.05	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (%)**		**Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase**	**75**	**20.000.000**	**Pelaku Usaha Perikanan**	**Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase**	**75**	**10.000.000**	**Pelaku Usaha Perikanan**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.05.2.01	**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan (Orang)**		**Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase**	**294**	**20.000.000**		**Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase**	**294**	**10.000.000**	
3.25.05.2.01.0001	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Sumber Daya Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	4	20.000.000		Kec. Tellu LimpoE, Panca Lautang, Watang Sidenreng dan Pitu Riase	4	10.000.000	
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Jumlah Produksi Daging (Kilogram)**		**11 Kecamatan**	**3.212.708**	**200.000.000**	**Kelompok Ternak**	**11 Kecamatan**	**3.212.708**	**462.000.000**	**Kelompok Ternak**
		Jumlah Produksi Telur (Kilogram)			**54.997.045**				**54.997.045**		

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.27.02.2.02	**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Akseptor yang Dilayani (%)**		**11 Kecamatan**	**10**	**100.000.000**		**11 Kecamatan**	**10**	**40.000.000**	
3.27.02.2.02.0002	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman		11 Kecamatan	12	100.000.000		11 Kecamatan	12	40.000.000	
3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Persentase Ternak yang Disebar (%)**		**11 Kecamatan**	**100**	**100.000.000**		**11 Kecamatan**	**100**	**422.000.000**	
3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain		11 Kecamatan	2.000	100.000.000		11 Kecamatan	2.000	422.000.000	
3.27.04	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Persentase Penurunan Kejadian Dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular (%)**		**11 Kecamatan**	**21**	**253.575.000**	**Peternak**	**11 Kecamatan**	**21**	**280.575.000**	**Peternak**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengendalian Penyakit Zoonosis (%)**		**11 Kecamatan**	**20**	**250.575.000**		**11 Kecamatan**	**20**	**260.575.000**	
3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota		11 Kecamatan	11	250.575.000		11 Kecamatan	11	260.575.000	
3.27.04.2.04	**Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner**	**Persentase Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Kesmavet (%)**		**11 Kecamatan**	**75**	**3.000.000**		**11 Kecamatan**	**75**	**20.000.000**	
3.27.04.2.04.0010	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerpan cara yang baik		11 Kecamatan	4	3.000.000		11 Kecamatan	4	20.000.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Bidang Peternakan (%)**		**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**1.000.000**		**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**5.000.000**	
3.27.06.2.02	**Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan**	**Cakupan Penerbitan Izin usaha bidang Peternakan (%)**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**1.000.000**	**Pengusaha Bidang Peternakan**	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**5.000.000**	**Pengusaha Bidang Peternakan**
3.27.06.2.02.0001	Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	Jumlah Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan		Dinas Peternakan dan Perikanan	125	1.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	125	5.000.000	
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Rasio Penyuluh Peternakan terhadap pelaku utama peternakan/kelompok ternak (Rasio)**		**11 Kecamatan**	**01:11**	**6.500.000**	**Peternak dan Penyuluh Peternakan**	**11 Kecamatan**	**01:11**	**15.000.000**	**Peternak dan Penyuluh Peternakan**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Persentase Peningkatan Kapasitas penyuluh (%)**		**11 Kecamatan**	**100**	**6.500.000**		**11 Kecamatan**	**100**	**15.000.000**	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		BPP	11	3.500.000		BPP	11	10.000.000	
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya		11 Kecamatan	921	3.000.000		11 Kecamatan	921	5.000.000	
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	**CC**		**BB**				**BB**		
		Rata-rata capaian Kinerja	**81**		**88**				**88**		
		Persentase ASN dengan Nilai SAKIP Kategori Baik	**98**		**99**				**99**		
3.25.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**7.685.264.065**	**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**Pangkajene Sidenreng**	**100**	**8.976.531.000**	**Dinas Peternakan dan Perikanan**

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tingkat ketepatan Waktu pelaporan Perencanaan, penganggaran dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah (%)**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**22.000.000**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**22.000.000**	
3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	18.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	18.000.000	
3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Dinas Peternakan dan Perikanan	5	4.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	5	4.000.000	
3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat daerah (%)**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**7.292.599.059**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**8.483.466.000**	
3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Dinas Peternakan dan Perikanan	1.330	7.289.599.059		Dinas Peternakan dan Perikanan	1.330	8.480.466.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	3.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	3.000.000	
3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah (%)**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**27.000.006**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**121.484.000**	
3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		Dinas Peternakan dan Perikanan	50	1.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	50	1.000.000	
3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	5.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	20.450.000	
3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Dinas Peternakan dan Perikanan	200	21.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	200	100.034.000	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**294.165.000**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**302.196.000**	
3.25.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	500.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	490.000	
3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	48.265.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	48.265.000	
3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	1.500.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	3.440.000	
3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	243.900.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	12	250.001.000	
3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**49.500.000**		**Dinas Peternakan dan Perikanan**	**100**	**47.385.000**	

RENJA PERUBAHAN TAHUN 2024

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TAHUN ANGGARAN 2024							
				SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
				Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	43.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	6	42.985.000	
3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	3.000.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	1	3.000.000	
3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		Dinas Peternakan dan Perikanan	2	3.500.000		Dinas Peternakan dan Perikanan	2	1.400.000	
						8.680.339.059				**10.047.106.000**	

BAB V.

PENUTUP

Rencana kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu dokumen perencanaan tahunan perangkat daerah yang mengacu pada Renstra tahun 2024-2026. Program dan kegiatan yang termuat dalam dokumen Renja ini merupakan prioritas kegiatan dan mendukung program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka mencapai tujuan dari Rencana Pembagunan Daerah.

Keberhasilan pencapaian tujuan, sasaran dan target kinerja sangat ditentukan oleh alokasi pagu anggaran. Oleh karena itu, sangat diperlukan kesamaan persepsi baik di tingkat pengambil kebijakan maupun pada SKPD pelaksana. Disamping itu, dalam pelaksanaan dokumen renja ini, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak yang terkait.

Kami menyadari bahwa dokumen Renja ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen Renja ini. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu di dalam penyusunan Renja ini semoga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terlibat di dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pangkajene Sidenreng, 01 Agustus 2024

Kepala Dinas
Peternakan dan Perikanan

SUHARYA ANGRIANI, S.STP., M.Si
Pangkat : Pembina Tk I
NIP. 19781231 199711 2 001

PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAREAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024



B K A D

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat izin dan ridho-Nya sehingga penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 - 2026.

Melalui penyusunan Renja ini semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip good and clean governance, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Pangkajene Sidenreng,
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah

SAHABUDDIN, SE
NIP : 197812212002121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 4

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja 5

1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu & Capaian Restra Perangkat Daerah 8

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD 36

2.3 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan 49

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 50

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 50

3.2 Tujuan Renja BKAD 51

3.3 Sasaran Renja BKAD 51

3.4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 52

BAB IV PENUTUP 75

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Alur RKA	3
Tabel 2.1a	Evaluasi RPD 2024-2026	10
Tabel 2.1b	Renstra RPD 2024-2026	23
Tabel 2.2	Usulan Program dan Kegiatan	49
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan T.A 2024	57

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan terselenggaranya Pemerintah yang bersih (Good Government) yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara, untuk itu diperlukan pertanggung jawaban yang tepat dan jelas sehingga penyelenggaraan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, bersih dari KKN dan bertanggung jawab dan akuntabel.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensingkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Seiring dengan itu, perkembangan manajemen modern telah membuktikan bahwa keterwujudan good government dalam sebuah organisasi akan menjadi competitive advantage bagi penyelenggara dimata publik. Di sisi lain, terselenggaranya Kegiatan perlu ada sinergi antara semua stake holder dalam penyusunan Rencana Kerja sehingga Pelaksanaan Program dan Kegiatan akan berjalan secara efektif dan efisien.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) yang disusun merupakan hasil analisis dan evaluasi Program dan Kegiatan yang sangat prioritas untuk Tahun Anggaran 2024.

I.1.1 Pengertian Renja SKPD

Rencana Kerja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

I.1.2 Proses Penyusunan Renja SKPD

Dalam prosesnya, penyusunan renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra SKPD.

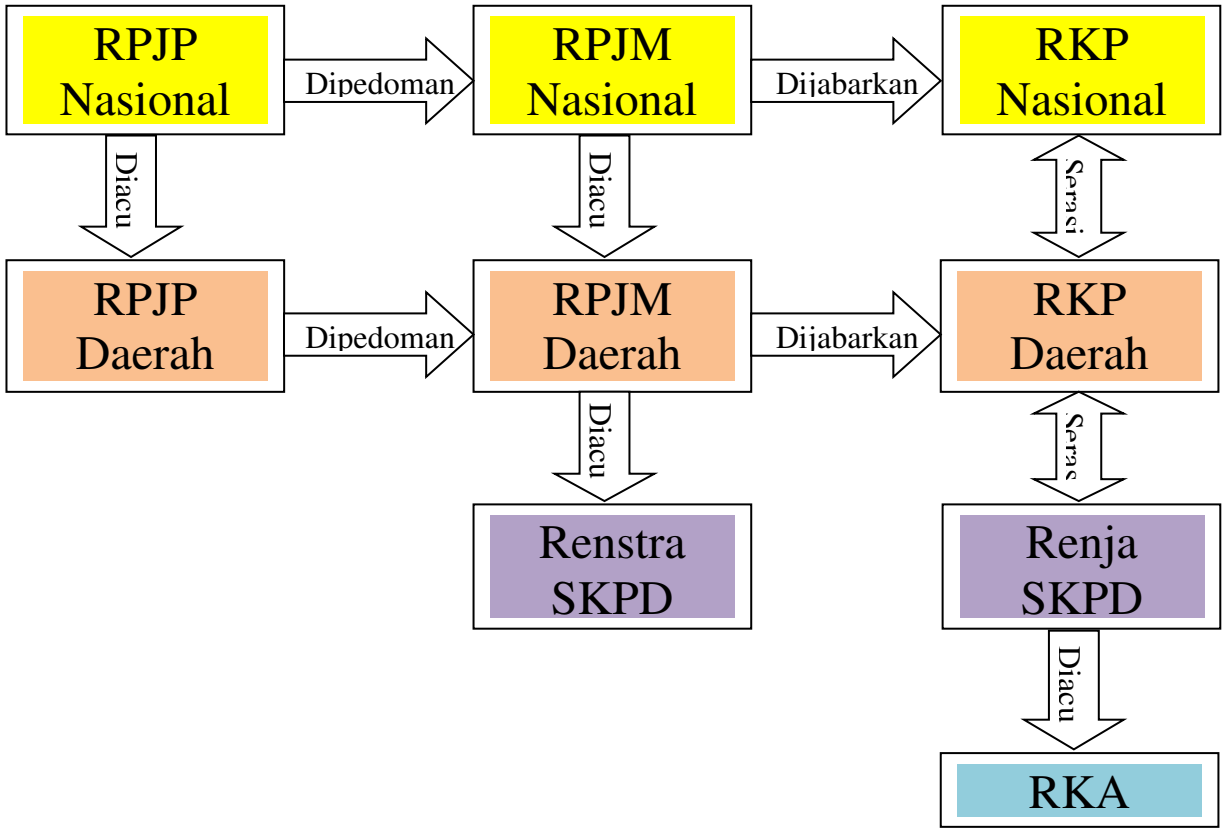
Penyusunan renja SKPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

a. Tahap perumusam rancangan renja SKPD ; dan
b. Tahap penyajian rancangan renja SKPD

I.1.3 Keterkaitan antara renja SKPD dengan dokumen RKPD

Keterkaitan antara rencana kerja SKPD dengan Dokumen RKPD dapat dilihat dalam bagan tersebut di bawah ini :

Tabel 1.1


RPJP Nasional
Dipedoman
RPJM Nasional
Dijabarkan
RKP Nasional
Diacu
Diacu
Serasi
RPJP Daerah
Dipedoman
RPJM Daerah
Dijabarkan
RKP Daerah
Diacu
Serasi
Renstra SKPD
Renja SKPD
Diacu
RKA

I.2 Landasan Hukum

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappangyang merupakan penjabaran dari PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah pengganti Undang-undang nomor 22 Tahun 1999.

Penyusunan Suatu Kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan Hukum agar supaya kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun Landasan Hukum dalam Penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1822);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indoneia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); Keangan Negara
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20114 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Peraturan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pebangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawei Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Provisnsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-20028 (Kembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);

8. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tantangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 13);
10. Peraturan Daerah Kebupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kebupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kebupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kebupaten Sidenremg Rappang Tahun 2024 Nomor 15);

I.3 Maksud dan Tujuan Perubahan RENJA

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksankan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024;
2. Mengoptimalkan peran dan fungsi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

I.4 Sistematika Penulisan

Pada dasarnya Rencana Kerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun sebelumnya sebagai tolak ukur Penyusunan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024. Analisis atas capaian kinerja terhadap Rencana Kerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja ***(Performance Gap)*** bagi perbaikan kinerja di masa datang. Dengan pola

pikir seperti itu, sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perubahan SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

I.1 Latar belakang

Mengemukakan pengertina ringkasan tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

I. 2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

I.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD

I.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan Pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab
7. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

8. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
9. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
10. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
11. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs *(Millenium Development Goals);*
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaanya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai Rencana Kerja yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun, yaitu untuk dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Selanjutnya hasil yang dicapai dalam evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun yang lalu adalah sebagai pedoman dasar dalam penyusunan draf awal Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2024.

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 belum dapat dilaksanakan secara maksimal hal tersebut disebabkan pelaksanaan anggaran 2024 sementara berlangsung, karena itu capaian pelaksanaan renstra SKPD tahun 2022 yang digunakan untuk mereview hasil pelaksanaan renja SKPD.

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis BKAD. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja

Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2024.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 3 (tiga) tahun dan tahunan.

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 terdiri dari 3 (tiga) Program, 12 (dua belas) Kegiatan dan 72 (tujuh puluh dua) Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan sebesar Rp.163.141.554.000 dengan realisasi sampai dengan Triwulan II realisasi belanja 41.142.067.437 (24.93%) dan Realiasi Fisik (24.93%) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2023, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapainnya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2024 sampai denga Triwulan II dan pencapaian Renstra Tahun 2024 Badan Keuangan dan Aset Daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.1 a

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Pencapaian Kinerja Program (Renstra Pangkat Daerah) s.d 2021-2023	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2012+2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=5*	*10=(9/4*100)*
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.01	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)**	**100,00**	**17,86%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**17,86%**	**0,18**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	5	8	5	**62,50**	**5**	**33,33**
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9	3	1	3	**300,00**	**3**	**33,33**
5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**

5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9	3	1	3	**300,00**	**3**	**33,33**
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	15	6	3	**50,00**	**15**	**25,00**
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	0	4	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**99,00**	**18,38%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**18,38%**	**0,19**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	519	348	574	174	**30,31**	**348**	**67,05**
5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**

5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	36	1	12	1	**8,33**	**1**	**2,78**
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51	13	12	10	**83,33**	**13**	**25,49**
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100,00**	**27,07%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**27,07%**	**0,27**
5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	4	12	**300,00**	**12**	**33,33**

5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	10	4	7	**175,00**	**10**	**27,78**
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	2	4	2	**50,00**	**2**	**13,33**
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	75	30	30	15	**50,00**	**30**	**40,00**
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	188	180	125	**69,44**	**188**	**31,33**
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	6	12	6	**50,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)**	**100,00**	**0,00%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6900000000	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)**	**100,00**	**72,44%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**72,44%**	**0,72**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000	0	414	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**

5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39	100	12	20	**166,67**	**100**	**256,41**
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)**	**100,00**	**4,59%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**4,59%**	**0,05**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	138	19	15	10	**66,67**	**19**	**13,77**
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45	0	15	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi (%)**	**100**		**100**		**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02 5.02.02.2.01	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana**	**Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**

	Anggaran Daerah	**Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
		Presentase Realisasi Keuangan APBD (%)	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
		Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)	**100,00**	**14,10%**	**100,00**	**10%**	**0,10**	**14,10%**	**0,14**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	9	2	3	1	**33,33**	**2**	**22,22**
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	9	1	3	0	**0,00**	**1**	**11,11**
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	9	2	3	1	**33,33**	**2**	**22,22**
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	9	1	3	0	**0,00**	**1**	**11,11**
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**

5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.02	**Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)**	**100,00**	**16,53%**	**100,00**	**25%**	**0,25**	**16,53%**	**0,17**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	36	6	12	6	**50,00**	**6**	**16,67**
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**

5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108	26	36	20	**55,56**	**26**	**24,07**
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36	9	12	0	**0,00**	**9**	**25,00**

5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.03	**Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi (%)**	**100,00**	**9,85%**	**100,00**	**25%**	**0,25**	**9,85%**	**0,10**
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	1440	460	480	410	**85,42**	**460**	**31,94**
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	54	2	18	2	**11,11**	**2**	**3,70**
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	6	2	2	1	**50,00**	**2**	**33,33**

	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	6	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.04	**Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**100,00**	**1,84%**	**100,00**	**30%**	**0,30**	**1,84%**	**0,02**
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204	15	68	15	**22,06**	**15**	**7,35**

5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.05	**Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)**	**100,00**	**9,26%**	**100,00**	**25%**	**0,25**	**9,26%**	**0,09**
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	36	4	12	4	**33,33**	**4**	**11,11**
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	36	6	12	6	**50,00**	**6**	**16,67**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi (%)**	**100**		**100**		**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03 5.02.03.2.01	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kegiatan : Pengelolaan**	**Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**

	Barang Milik Daerah	**Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi (%)**	**100,00**	**15,39%**	**100,00**	**30%**	**0,30**	**15,39%**	**0,15**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	4	4	2	**50,00**	**4**	**33,33**
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	36	12	12	0	**0,00**	**12**	**33,33**
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36	3	12	0	**0,00**	**3**	**8,33**
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	15	0	5	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	90	11	30	10	**33,33**	**11**	**12,22**
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**

5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**

Tabel 2.1 b (Renstra RPD 2024-2026)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan dan Aset Daerah s.d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d 2024-2026	Realisasi target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target RENSTRA Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=5*	*10=(9/4*100)*
5.02.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.01	**Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Dihasilkan (%)**	**100,00**	**17,86%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**17,86%**	**0,18**
5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	5	8	5	**62,50**	**5**	**33,33**
5.02.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9	3	1	3	**300,00**	**3**	**33,33**

5.02.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	9	3	1	3	**300,00**	**3**	**33,33**
5.02.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	9	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60	15	6	3	**50,00**	**15**	**25,00**
5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	0	4	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.02	**Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**99,00**	**18,38%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**18,38%**	**0,19**
5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	519	348	574	174	**30,31**	**348**	**67,05**

5.02.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	36	1	12	1	**8,33**	**1**	**2,78**
5.02.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	51	13	12	10	**83,33**	**13**	**25,49**
5.02.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.06	**Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)**	**100,00**	**27,07%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**27,07%**	**0,27**

5.02.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36	12	4	12	**300,00**	**12**	**33,33**
5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36	10	4	7	**175,00**	**10**	**27,78**
5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	15	2	4	2	**50,00**	**2**	**13,33**
5.02.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	75	30	30	15	**50,00**	**30**	**40,00**
5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	600	188	180	125	**69,44**	**188**	**31,33**
5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	36	6	12	6	**50,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.07	**Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah (%)**	**100,00**	**0,00%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
5.02.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6900000000	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.08	**Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah (%)**	**100,00**	**72,44%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**72,44%**	**0,72**
5.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3000	0	414	0	**0,00**	**0**	**0,00**

5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	39	100	12	20	**166,67**	**100**	**256,41**
5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.01.2.09	**Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (%)**	**100,00**	**4,59%**	**100,00**	**0%**	**0,00**	**4,59%**	**0,05**
5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	138	19	15	10	**66,67**	**19**	**13,77**
5.02.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	45	0	15	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**	**Persentase Laporan keuangan pemerintah daerah dengan standar akuntansi (%)**	**100**		**100**		**0,00**	**0**	**0,00**

5.02.02 5.02.02.2.01	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**	**Presentase Kesesuaian APBD dengan KUA PPAS (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
		Presentase Pelaporan Keuangan Tepat Waktu (%)	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
		Presentase Realisasi Keuangan APBD (%)	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**
		Persentase Jumlah Dokumen yang Tersusun (%)	**100,00**	**14,10%**	**100,00**	**10%**	**0,10**	**14,10%**	**0,14**
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	9	2	3	1	**33,33**	**2**	**22,22**
5.02.02.2.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	9	1	3	0	**0,00**	**1**	**11,11**
5.02.02.2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi	9	2	3	1	**33,33**	**2**	**22,22**
5.02.02.2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	9	1	3	0	**0,00**	**1**	**11,11**
5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**

5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	6	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.02	**Kegiatan : Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)**	**100,00**	**16,53%**	**100,00**	**25%**	**0,25**	**16,53%**	**0,17**
5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	36	6	12	3	**25,00**	**6**	**16,67**
5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	36	6	12	6	**50,00**	**6**	**16,67**
5.02.02.2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**

5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	108	26	36	20	**55,56**	**26**	**24,07**
5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.02.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36	9	12	0	**0,00**	**9**	**25,00**

5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.02.2.03	**Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**	**Presentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Standar Akuntansi (%)**	**100,00**	**9,85%**	**100,00**	**25%**	**0,25**	**9,85%**	**0,10**
5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.03.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan- LO, dan Beban	1440	460	480	410	**85,42**	**460**	**31,94**
5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	54	2	18	2	**11,11**	**2**	**3,70**
5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.03.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan	6	2	2	1	**50,00**	**2**	**33,33**

	Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota							
5.02.02.2.03.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	6	0	2	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.04	**Kegiatan : Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**	**100,00**	**1,84%**	**100,00**	**30%**	**0,30**	**1,84%**	**0,02**
5.02.02.2.04.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.04.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	204	15	68	15	**22,06**	**15**	**7,35**

5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3	0	1	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.02.2.05	**Kegiatan : Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**	**Terpenuhinya Administrasi Keuangan (%)**	**100,00**	**9,26%**	**100,00**	**25%**	**0,25**	**9,26%**	**0,09**
5.02.02.2.05.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	36	4	12	4	**33,33**	**4**	**11,11**
5.02.02.2.05.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	36	6	12	6	**50,00**	**6**	**16,67**
5.02.02.2.05.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**	**Persentase barang milik daerah yang terinventarisasi (%)**	**100**		**100**		**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03 5.02.03.2.01	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH Kegiatan : Pengelolaan**	**Persentase Aset Daerah yang Dikelola Dengan Baik (%)**	**100,00**		**100,00**		**0,00**	**0**	**0,00**

	Barang Milik Daerah	**Presentase Barang Milik Daerah yang Terinventarisasi (%)**	**100,00**	**15,39%**	**100,00**	**30%**	**0,30**	**15,39%**	**0,15**
5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12	4	4	2	**50,00**	**4**	**33,33**
5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	36	12	12	0	**0,00**	**12**	**33,33**
5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	36	3	12	0	**0,00**	**3**	**8,33**
5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	15	0	5	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	90	11	30	10	**33,33**	**11**	**12,22**
5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	36	0	12	0	**0,00**	**0**	**0,00**
5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**

5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6	1	2	1	**50,00**	**1**	**16,67**
5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	6	1	2	0	**0,00**	**1**	**16,67**

II.2 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

Sebelum menguraikan isu-isu penting dalam Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi SKPD kami akan menguraikan dulu Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016, tentang Pembentukan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Adapun tugas dan fungsi sesuai susunan organisasi diuraikan sebagai berikut :

1. Kepala Badan
   (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
   (2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
      a. perumusan kebijakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
      b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
      c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
      d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
      e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
   (3) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
   (4) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
   (5) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
      a. perumusan kebijakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;

b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

(6) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diuraikan sebagai berikut :
a. merumuskan program kerja dan rencana anggaran satuan kerja Badan Keungan dan Aset Daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan mengarahkan bawahan dalam melaksanakan tugas;
c. memantau, membina, dan mengawasi serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkup badan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan peraturan tata naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Badan kepada SKPD yang terkait untuk mendapatkan masukan dan informasi agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
g. melaksanakan pengendalian, penempatan dan pembinaan kepegawaian lingkup Badan Keuangan dan Aset Daerah;
h. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan pengembangan pengelolaan administrasi umum, ketatalaksanaan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, perlengkapan dan peralatan;
i. menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
j. merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan aset daerah;
k. merumuskan kebijakan bidang perencanaan anggaran daerah;
l. merumuskan kebijakan dibidang perbendaharaan daerah;
m. merumuskan kebijakan dibidang Akuntansi dan pelaporan keuangan;
n. merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
o. memantau dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah lingkup Keuangan dan Aset Daerah;

p. mengkonsultasikan dan mengordinasikan program dan kegiatan dengan pemerintah pusat dan provinsi dalam rangka terciptanya keselarasan program dan kegiatan antar tingkatan pemerintahan dalam lingkup kerja dan kewenangan Badan Keuangan dan Aset Daerah;
q. menyelenggarakan koordinasi dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah, dalam rangka menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah;
r. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Badan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
t. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.

2. Sekretaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Badan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Badan;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Badan sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
g. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan Badan;
h. mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Badan;
i. melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Badan;
j. melaksanakan pengadaan barang kebutuhan Badan;
k. melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
l. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
m. mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
n. mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga Badan;
o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
p. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
q. mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
r. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
s. mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
t. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan seauai ketentuan peraturan perundang-undangan;
u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang Perencanaan Anggaran

(1) Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
   a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan anggaran daerah;
   b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perencanaan anggaran daerah;
   c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang perencanaan anggaran daerah;
   d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan anggaran daerah;
   e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya;

(3) Urain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. menyusun rencana kegiatan Bidang perencanaan anggaran daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
   b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
   c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan Anggaran Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
   d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
   e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
   f. melaksanakan koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan;
   g. melaksanakan koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
   h. menyusun Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD;
   i. menyusun Peraturan Kepala Daerah tentang teknis penyusunan anggaran SKPD;
   j. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
   k. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;

l. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja pembiayaan;
m. menyediakan anggaran kas;
n. melaksanakan pengelolaan dana cadangan pemerintah daerah, dana darurat dan mendesak serta dana bagi hasil kabupaten/kota;
o. melaksankan penyusunan kebijakan dan alokasi subsidi;
p. melaksanakan analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan
q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan perundang-undangan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

(1) Bidang Perbendaharaan Daerah, dan Pembangunan manusia dipimpin oleh Kepala Bidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang perbendahaan daerah;

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang perbendaharaan daerah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang perbendaharaan daerah;
c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi dibidang perbendaharaan daerah;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perbendaharaan daerah;
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perbendaharaansebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Seksi sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perbendaharaanuntuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
g. mengoordinasikan pemindabukuan uang kas daerah;
h. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
i. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
j. mengoordinasikan penepatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
k. mengoordinasikan pemrosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
l. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian dan kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
m. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah,laporan aliran kas,dan pelaksanaan pemungutan dan pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga
n. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
o. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
p. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggung jawaban (SPJ);
q. mengoordinasikan pelaksanaan penertiban SPD restitusi / pengembalian kelebihan penerimaan;

r. melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintahan daerah;
s. melaksanakan analisis perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dan pemberian serta penerimaan kembali pinjaman daerah;
t. melaksanakan analisis investasi pemerintah daerah;
u. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala Subbagian melalui rapat/ pertemuan untuk menyatukan pendapat;
v. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
w. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
x. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
   (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
   (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pelaporan dan Akuntansi mempunyai fungsi :
      a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
      b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
      c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
      d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
      e. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
   (3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
      a. menyusun rencana kegiatan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
g. mengoordinasikan pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
h. menggoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban palaksanaan APBD (bulanan, triwulanan dan semester);
i. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah kabupaten;
j. mengoordinasikan kegiatan penyusunan laporan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kabupaten;
k. melaksanakan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;
l. menyusun tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
m. melaksanakan konsolidasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
n. menyusun analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
o. menyusun kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
p. menyusun sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
q. melaksanakan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
r. melaksanakan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai system akuntansi pemerintah daerah;
s. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
t. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

u. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
v. melaksanakan tugas kedinasan laian yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.

6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

(1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang bearada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan, mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan barang milik daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. penyiapan perumusan kebijakan operasional dibidang pengelolaan barang milik Daerah;
b. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional dibidang pengelolaan barang milik daerah;
c. penyiapan bimbingan teknis dan suvervisi dibidang pengelolaan barang milik daerah;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengelolaan barang milik daerah;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan tugas dan fungsinya.

(3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dirinci sebagai berikut :
a. menyusun rencana kegiatan Bidang Pengelolaan Barang milik Daerah sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
c. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengelolaan Barang milik Daerah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
f. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
g. mengoodinasikan penyaiapan bahan bahan pertimbangan persetujuan dalam menyusun rencana kebutuhan barang milik daerah dan pemeliharaan / perawatan barang milik daerah;

h. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
i. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
j. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, adminsitrasi dan hukum barang milik daerah;
k. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
l. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
m. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
n. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
o. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD;
p. mengoordinasikan dan melaksanaan pembinaan pengelolaan barang milik daerah;
q. melaksanakan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
r. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
s. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang No. 47 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 31 tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diubah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 55 Tahun

2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuagan dan Aset Daerah selaku pengelola keuangan dan aset daerah berbagai permasalahan dihadapi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang profesional, berikut daftar permasalahan yang dihadapi di seluruh bidang SKPD BPKD :

1. Kurangnya anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya aparatur pengelola keuangan
2. Rendahnya motivasi para pengelola keuangan untuk meningkatkan kualitasnya
3. Kurangnya penghargaan terhadap pengelola keuangan yang berprestasi
4. Sumber daya aparatur pengelola keuangan di SKPD masih rendah
5. Pengelola keuangan SKPD sering mengalami mutasi
6. Rendahnya pemahaman para bendahara SKPD tentang tatacara pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah
7. Kurangnya anggaran untuk peningkatan sumber daya aparatur pengelola keuangan SKPD
8. Kurangnya pemahaman para pengelola keuangan ditingkat SKPD
9. Rendahnya kualitas dan motivasi para operator Simda
10. Kualitas para perencana ditingkat SKPD masih rendah
11. Kurangnya inovasi para perencana dalam merencanakan program kegiatan baru
12. Dokumen pendukung untuk proses sertifikasi tanah milik pemerintah daerah belum lengkap
13. Kurangnya anggaran yang mendukung proses pensertifikatan
14. prosedur yang panjang untuk pelaksanaan persertifikatan seluruh aset daerah
15. Sumber daya aparatur pengelola barang milik daerah disetiap SKPD masih rendah
16. Kurangnya rekonsiliasi data antara SKPKD dengan SKPD lain
17. Tidak ada serah terima barang antara pengelola lama dengan pengelola baru
18. Kurangnya anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan kegiatan bimtek maupun diklat pengelolaan aset daerah
19. Pelaksanaan bimtek atau diklat bagi para penyimpan/pengurus barang masih rendah
20. Lemahnya evaluasi maupun pembinaan dari atasan langsung para pengelola barang di SKPD

Disamping permasalahan di atas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) juga menghadapi tantangan dan peluang diantaranya :

1. Tantangan
    1. Meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
    2. Meningkatkan kapasitas pengelola keuangan daerah
    3. Optimalisasi aset daerah yang merupakan potensi PAD
    4. Anggaran peningkatan kapasitas pengelola keuangan terbatas
2. Peluang
    a. Adanya Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah berbasis IT
    b. Tingkat pendidikan aparatur pengelola yang tinggi
    c. Kuantitas aparatur pengelola keuangan daerah
    d. Potensi optimalisasi aset tanah dan bangunan milik pemda

II.3 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Tabel 2.2

Usulan Program dan Kegiatan
Dari Para Pemangku kepentingan 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CAT

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

III.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Reformasi dibidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya berbagai undang-undang yang menyangkut keuangan negara. Reformasi juga telah mendorong masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana keuangan negara dan keuangan daerah dikelola. Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab serta dikelola oleh orang-orang yang kompeten dan profesional.

Keberhasilan penyusunan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu pencapaian dari pelaksanaan reformasi di bidang manajemen keuangan publik. Selanjutnya untuk menyempurnakan proses penyelenggaraan keuangan negara yang transparan dan akuntabel, laporan keuangan yang telah disusun akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga dapat diyakinkan bahwa LKPD bebas dari kesalahan penyajian yang magterial dan telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Audit pengelolaan keuangan oleh Pemerintah Daerah akan menghasilkan opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas sistem pengendalian intern.

Terdapat empat jenis opini hasil audit BPK yang dapat diberikan kepada obyek pemeriksaan yaitu :

1. Wajar Tanpa Pengecualian
   Opini WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material.

2. Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
   Opini WDP adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian.
3. Tidak Wajar
   Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
4. Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer)

Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) sebagaian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor tidak bisa meyakini apakah laporan wajar atau tidak.

Saat ini hampir di setiap Pemerintah Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah berupaya untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

III. 2 TUJUAN RENJA BKAD

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangkawaktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2022. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit- unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan kedalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Rumusan tujuan dengan hasil evaluasi kinerja pelayanan SKPD setelah dilaksanakan pembandingan hasilnya masih sesuai sangat sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) oleh karena itu rumusan tujuan tersebut masih digunakan dalam rencana kerja tahun 2020.

Adapun rumusan tujuan yang masih sesuai dengan kondisi nyata dan realita kebutuhan adalah :

a. Mewujudkan peningkatan kualitas aparatur pengelola keuangan dan aset daerah.
b. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib
c. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang tertib

III. 3 SASARAN RENJA BKAD

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan kedalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi.oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan rumusan yang masih sesuaidengan rumusan sasaran yang ada di dalam renstra adalah sebagai berikut :

a. Tersedianya kualitas aparatur pengelola keuagan dan aset daerah
b. Tersusunnya rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah
c. Tersusunnya anggaran berbasis kinerja
d. Terlaksananya penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan
e. Terlaksananya penatausahaan aset sesuai peraturan perundang-undangan
f. Terlaksananya pemanfaatan aset yang idle
g. Terlaksananya pengamanan dan penanganan sengketa aset
h. Tersedianya rancangan laporan keuangan daerah yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami

III. 4 PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

Sebagaimana amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2019 dan Perubahannya Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagai suatu organisasi yang bernaung di bawah pemerintah maka sebagai konsekuensi logis dalam menyusun Rencana Kerja harus berpedoman Peraturan tersebut.

Adapun Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam Renja Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA

1. KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
   d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
   e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
   f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
   c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

d. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
e. Pengelolaan dan penyiapan Bahan tanggapan pemeriksaan
f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
g. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH
a. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
b. Bimbingan Tehnis Implementasi Peratoran Perundang-undangan

4. ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
b. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
c. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
d. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
e. Penyediaan bahan material
f. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
g. Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD
h. Dukungan pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD.

5. PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan
b. Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya

6. PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
b. Pemeliharaan Aset tetap lainnya
c. Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya
d. Pemeliharaan rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya

B. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERENCANAAN ANGGARAN DAERAH
   - **a.** Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS
   - **b.** Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
   - **c.** Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD
   - **d.** Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD
   - e. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD
   - f. Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD
   - g. Koordinasi dan penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD
   - h. Koordinasi dan penyusuna Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
   - i. Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran
   - j. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan
   - k. Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah
   - l. Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan
   - m. Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota

2. KOORDINASI DAN PENGELOLAAN PERBENDAHARAAN DAERAH
   - **a.** Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
   - **b.** Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
   - **c.** Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD
   - **d.** Penatausahaan Pembiayaan Daerah
   - **e.** Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
   - **f.** Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank
   - **g.** Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah , laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)

h. Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yg timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas

i. Rekkonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP@D dengan Instansi terkait

j. Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yg berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan serta pertanggungjawaban sub kegiatan

k. Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintah Kabupaten / Kota

3. KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

a. Koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas
b. Rekonsiliasi dan verifikasi asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, penapatan LO dan beban
c. Koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran
d. Koordinasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah
e. Koordinasi dan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
f. Penyusunan tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
g. Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah
h. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
i. Penyusunan kebijakan dan panduan tehnis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah
j. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah
k. Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten/kota
l. Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten / kota
m. Koordinasi dan penyusunan statistic keuangan pemerintah daerah

4. PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah
b. Analisis dan perencanaan penyaluran antuan keuangan
c. Pengelolaan dana darurat dan mendesak
d. Pengelolaan dana bagi hasil kabupaten/kota

5. PENUNJANG URUSAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

a. Inventarisasi dan analisis data bidang keuangan daerah
b. Implementasi dan pemeliharaan system informasi daerah bidang keuangan daerah.
c. Pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten/kota

C. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

1. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
   a. Penyusunan standar harga
   b. Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah
   c. Penatausahaan barang milik daerah
   d. Inventarisasi barang milik daerah
   e. Pengamanan barang milik daerah
   f. Penilaian barang milik daerah
   g. Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah
   h. Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah
   i. Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah
   j. Penyusunan laporan barang milik daerah.

Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

KODE				URUSAN/BIDANG URUSAN PEMDA DAN PROG/KEG	INDIKATOR KINERJA PROG/KEG	TAHUN ANGGARAN 2024							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target capaia kinerja	Kebutuhan dana/pagu indikatif	Kelompok penerima manfaat
				BIDANG URUSAN KEUANGAN									
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota									
				Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			2 Dokumen	41.461.800			2 Dokumen	41.461.800	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD			2 Dokumen	35.293.000			2 Dokumen	35.293.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan			2 Dokume	35.219.600			2 Dokume	35.219.600	

				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD			n				n		
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD			2 Dokumen	30.453.600			2 Dokumen	30.453.600	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD			2 Dokumen	29.995.700			2 Dokumen	29.995.700	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			2 Dokumen	174.211.200			2 Dokumen	174.211.200	
				Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Dokumen	175.577.100			2 Dokumen	175.577.100	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
				Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN			12 bulan	32.490.260.659			12 bulan	32.490.260.659	
				Sub Kegiatan Pelaksanaan									

				penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD			12 bulan	45.000.000			12 bulan	45.000.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD			12 bulan	50.000.000			12 bulan	50.000.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD			1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	20.000.000	
				Sub Kegiatan Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan			12 bulan	30.000.000			12 bulan	30.000.000	
				Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan/semesteran SKPD			17 Dokumen	70.000.000			17 Dokumen	70.000.000	
				Sub Kegiatan Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran			1 Dokumen	60.000.000			1 Dokumen	60.000.000	
				Kegiatan Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah									

				Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan			1 kegiatan	50.000.000			1 kegiatan	50.000.000	
				Sub Kegiatan Bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan			1 kegiatan	100.000.000			1 kegiatan	100.000.000	
				Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah									
				Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor			12 bulan	16.710.000			12 bulan	16.710.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor			12 bulan	20.722.600			12 bulan	20.722.600	
				Sub Kegiatan Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan			12 bulan	36.172.800			12 bulan	36.172.800	
				Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaab dan peraturan perundang-			5 Exampla r	12.571.000			5 Exampla r	12.571.000	

				undangan									
				Sub Kegiatan Penyediaan Bahan / material			35 buah	24,.71.400			35 buah	24,.71.400	
				Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD			200 kali	823.443.000			200 kali	823.443.000	
				Sub Kegiatan Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD			12 bulan	18.945.200			12 bulan	18.945.200	
				Sub Kegiatan Dukungan pelaksanaan system pemerintahan berbasisi elektronik pada SKPD			12 bulan	50.000.000			12 bulan	50.000.000	
				Kegiatan Pengadaan barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah									
				Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan			2 dokumen	3.305.000.000			2 dokumen	3.305.000.000	
				Sub Kegiatan Pengadaan Gedung									

				kantor atau bangunan lainnya									
				Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan									
				Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				7.500.000				7.500.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				895.229.000				895.229.000	
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor									
				Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor				825.380.000				825.380.000	
				Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
				Sub Kegiatan : Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan				307.901.500				307.901.500	

				pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan									
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan asset tetap lainnya				183.897.000				183.897.000	
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya				74.600.000				74.600.000	
				Sub Kegiatan : Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya									
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH									
				Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah									
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS				74.279.400				74.279.400	
				Sub Kegiatan :									

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				61.859.400				61.859.400	
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA SKPD				498.303.000				498.303.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA SKPD				370.000.000				370.000.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA SKPD				390.000.000				390.000.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA SKPD				790.000.000				790.000.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran APBD				370.000.000				370.000.000	

				Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah ttg Penjabaran Perubahan APBD				790.000.000				790.000.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan anggaran				61.620.000				61.620.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi perencanaan anggaran pendapatan				200.000.000				200.000.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi perencanaan anggaran belanja daerah				200.000.000				200.000.000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi perencanaan anggaran pembiayaan				200.000.000				200.000.000	
				Sub Kegiatan : Pembinaan Penganggaran daerah pemerintah									

				kabupaten / kota									
				Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah									
				Sub Kegiatan : Koordinasi pengelolaan kas daerah				217.157.100				217.157.100	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan SILPA Tahun sebelumnya				140,348,000				140,348,000	
				Sub Kegiatan : Penyiapan pelaksanaan pengendalian dan penerbitan anggaran kas dan SPD				42,324,000				42,324,000	
				Sub Kegiatan : Penatausahaan pembiayaan daerah				123,380,600				123,380,600	
				Sub Kegiatan : Koordinasi, fasilitasi asistensi, supervisi, monitoring dan evaluasi pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya				223,388,300				223,388,300	
				Sub Kegiatan :									

				Koordinasi pelaksanaan kerjasama dan pemantauan transaksi non tunai dengan lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank				86,933,800				86,933,800	
				Sub Kegiatan : Koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas dan pelaksanaan pemungutan / pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga (PFK)				147,942,000				147,942,000	
				Sub Kegiatan : Koordinasi pelaksanaan piutang dan utang daerah yg timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas				89,257,000				89,257,000	

1	**20**	**17**	**21**	**Sub Kegiatan :** Rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait				99,231,900				99,231,900	
1	**20**	**17**	**22**	**Sub Kegiatan :** Penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yg berkaitan dgn penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan serta pertanggungjawab an sub kegiatan				147,843,800				147,843,800	
1	**20**	**17**	**25**	**Sub Kegiatan :** Pembinaan penatausahaan keuangan pemerintahan kabupaten / kota				569,500,000				569,500,000	
				Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah									
				Sub Kegiatan : Koordinasi									

				pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas				101,943,200				101,943,200	
				Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan LO dan beban				287,555,300				287,555,300	
1	**20**	**17**	**26**	**Sub Kegiatan :** Koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran				357,666,600				357,666,600	
1	**20**	**17**	**27**	**Sub Kegiatan :** Konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan pemerintah daerah				623,419,600				623,419,600	
1	**20**	**17**	**28**	**Sub Kegiatan :** Koordinasi dan penyusunan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan				431,315,600				431,315,600	

				APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah ttg penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota									
				Sub Kegiatan : Penyusunan tanggapan / tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				58,977,600				58,977,600	
				Sub Kegiatan : Koordinasi, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah				188,400,000				188,400,000	
1	**20**	**17**	**31**	**Sub Kegiatan :** Penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD				128,755,200				128,755,200	
1	**20**	**17**	**32**	**Sub Kegiatan :** Penyusunan kebijakan dan									

				panduan tehnis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah				142,414,000				142,414,000	
				Sub Kegiatan : Penyusunan system dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah				137,851,600				137,851,600	
				Sub Kegiatan : Pembinaan akuntansi pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah kabupaten / kota				261,055,000				261,055,000	
1	**20**	**18**		**Sub Kegiatan :** Pembinaan pengelolaan keuangan BLUD kabupaten / kota				45,968,600				45,968,600	
1	**20**	**18**	**11**	**Sub Kegiatan :** Koordinasi dan penyusunan statistic keuangan pemerintah daerah				113,607,600				113,607,600	
1	**20**	**18**	**6**	**Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan keuangan Daerah**									
				Sub Kegiatan :									

				Analisis perencanaan dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman pemerintah daerah				1,050,000,000				1,050,000,000	
1	**20**	**18**	**8**	**Sub Kegiatan :** Analisis perencanaan dan penyaluran bantuan keuangan				117,892,240,000				117,892,240,000	
				Sub Kegiatan : Pengelolaan dana darurat dan mendesak				10,000,000,000				10,000,000,000	
1	**20**	**18**	**12**	**Sub Kegiatan :** Pengelolaan dana Bagi Hasil kabupaten / kota				4,372,023,000				4,372,023,000	
1	**20**	**18**	**13**	**Kegiatan Pengelolaan data dan implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah**									
1	**20**	**20**	**10**	**Sub Kegiatan :** Inventarisasi dan analisisi data bidang keuangan daerah				154,170,000				154,170,000	
1	**20**	**18**	**14**	**Sub Kegiatan :** Implementasi dan pemeliharaan				454,066,000				454,066,000	

				system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah									
				Sub Kegiatan : Pembinaan system informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah pemerintah kabupaten / kota				391,764,000				391,764,000	
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH									
1	**20**	**20**	**6**	**Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah**									
1	**20**	**20**	**7**	**Sub Kegiatan :** Penyusunan standar harga				147,580,000				147,580,000	
				Sub Kegiatan : Penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah				11,140,000				11,140,000	
				Sub Kegiatan : Penatausahaan barang milik daerah				181,398,000				181,398,000	
				Sub Kegiatan : Inventarisasi barang milik				116,040,000				116,040,000	

				daerah									
				Sub Kegiatan : Pengamanan barang milik daerah				282,800,000				282,800,000	
				Sub Kegiatan : Penilaian barang milik daerah				100,000,000				100,000,000	
				Sub Kegiatan : Pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah									
				Sub Kegiatan : Optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan , pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah				40,490,000				40,490,000	
				Sub Kegiatan : Rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah				74,780,000				74,780,000	
				Sub Kegiatan : Penyusunan laporan barang milik daerah				80,140,000				80,140,000	

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya publik yang diamanatkan kepada organisasi. Di sisi lain, Rencana Kerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian Kinerja Badan Keuangan dan Aset Daerah sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun sebelumnya secara umum telah berhasil mencapai target kinerja sasaran. Dari 2 (dua) sasaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dengan 62 Indikator yang telah ditetapkan umumnya mencapai kinerja sasaran dengan angka rata rata capaian 90 %.

Untuk meningkatkan capaian kinerja di masa mendatang Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang akan menetapkan beberapa strategi, antara lain dengan meningkatkan kualitas perencanaan kegiatan, peningkatan kemampuan pengelola kegiatan, penyempurnaan Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan. Di samping itu perlu penyusunan perencanaan awal/Renja yang lebih komprehensif, efektif.

Semoga Penyusunan Perubahan Renja ini memberikan arti bagi peningkatan pencapaian kinerja sasaran dan lebih mendorong upaya untuk mewujudkan cita-cita, citra dan harapan pemerintah dan masyarakat. Implementasi anggaran berbasis kinerja dan perluasan jangkauan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang RI nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan disusun sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan tujuan untuk koordinasi antar pelaku, untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar ruang.

Perencanaan yang strategis diperlukan dalam menetapkan program maupun kegiatan yang akan direalisasikan di tahun ini. Rencana Kerja (Renja) disusun dengan tujuan sebagai acuan dalam memasukkan program/kegiatan ke dalam KUA dan PPAS. Renja juga merupakan salah satu instrumen untuk mengevaluasi program/kegiatan SKPD untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2024.

Perubahan atas rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup pada dasarnya di latar belakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dan perubahan ini juga turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagai mana yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian perkembangan keadaan meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, dan/atau
4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternative, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan suatu kegiatan harus dilandasi oleh kekuatan hukum agar kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan memiliki nilai validitas yang kuat. Adapun alasan hukum dalam penyusunan perubahan renja adalah:

a) Undang – undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Pemerintahan sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir =dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679):
c) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan Keuangan Partai Politik;
d) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 61 Tahun 2011 Tentang pedoman Pemantauan, Pelaporan dan Evaluasi Perkembangan Politik di Daerah;

f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan dilingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan;
h) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
i) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah 2019 Nomor 6);
j) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22a Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;
k) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 63 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan tata Kerja Dinas.
l) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor XX Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan rencana kerja di tahun 2024 ini dimaksudkan untuk menyesuaikan adanya perubahan dari rencana kerja yang telah di tetapkan sebelumnya, baik dari segi program, kegiatan maupun target kinerjanya, Sehingga tugas pokok dari Dinas Lingkungan Hidup bisa terealisasi dengan optimal.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sekurang-kurangnya dapat disusun menurut sistematika sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari Perubahan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai:

1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Suistanable* Developme*nt Goals)*;
4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan /bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan, dengan format tabel III.1.

BAB IV. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2) Kaidah-kaidah pelaksanaan.
3) Rencana tindak lanjut.

   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama Perangkat Daerah dan nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup adalah penjabaran perencanaan tahunan dan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup ini menyajikan hasil pelaksananaan rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 terdiri dari 3 Program, 5 kegiatan dan 7 Sub Kegiatan dengan anggaran belanja sebelum perubahan dan setelah perubahan sebesar **Rp. 11.181.758.000,-** dengan rincian belanja Pegawai sebesar **Rp. 3.482.148.000,-** belanja barang dan jasa sebesar **Rp. 8.600.984.900,-** dan belanja modal **Rp. 1.735.746.100,-**

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 terdiri :

1. **Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :**
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 50%.
   2) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 25%.
   3) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%.
   4) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 20%

5) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 35%
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 40%
7) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,25%
8) Program Perencanaan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
9) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 40%
10) Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dengan kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
11) Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI) dengan kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0,32%
12) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 dengan target 100% yang terealisasi 25%
13) Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dengan kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 24%

14) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dengan kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 30%
15) Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH dengan kegiatan Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH dengan target 100% yang terealisasi 45%
16) Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat dengan kegiatan Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100% yang terealisasi 0%
17) Program Penanganan Pengaduan Lingkungan hidup dengan kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota dengan target 60% yang terealisasi 48%
18) Program Pengelolaan Persampahan dengan kegiatan Pengelolaan Sampah dengan target 72% yang terealisasi 45%

2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja, yaitu:

Adapun realisasi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang dirancakan sampai triwulan II belum ada.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :

Adapun realisasi program/kegiatan/sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai triwulan II belum ada.

4. **Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:**
   1) Adanya perubahan program dan kegiatan yang berbeda sehingga tidak dapat disandingkan realisasi program/kegiatannnya.
   2) Perubahan indikator setiap tahun anggaran juga menjadikan sulit untuk disandingkan.
   3) Rasionalisasi anggaran menyebabkan beberapa program dan kegiatan ditiadakan dengan alasan skala prioritas.
   4) Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

5. **Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD**

   Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2024 yaitu :
   a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
   b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
   c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. **Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu:**
   a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.

b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupuh SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.

Adapun pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Tabel II.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2023 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Kinerja capaian program (Renstra Pertangkat Daerah) s/d Tahun 2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2023			Perkiraan Realisasi Capaian Targer Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah	Realisasii Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5+7)	10=9/4*100)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP								

2	**1 1**	**0 1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan**	100	100	100	50	50	100	100
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 1**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan**	100	100	100	50	50	100	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9	3	3	1	0.3	4	44
2	1 1	0 1	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	3	1	1	1	4	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	2	2	1	0,5	3	100

2	1 1	0 1	2.0 1	0 4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3	1	1	1	1	2	33.3
2	1 1	0 1	2.0 1	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	2	2	0	0	2	100
2	1 1	0 1	2.0 1	0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	5	5	1	0,2	6	40
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Administrasi Keuangan**	100	100	100	25	25	100	100

2	1 1	0 1	2.0 2	0 1	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2800	12	14	3	0,53	15	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3	7	1	0	0	7	233
2	1 1	0 1	2.0 2	0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	60	13	20	5	0,25	18	30
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 6**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100	100	100	20	20	100	100

2	1 1	0 1	2.0 6	0 1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	453	151	151	9	0,0596026 5	160	714
2	1 1	0 1	2.0 6	0 9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerash dan keluar Daerah	600	135	200	30	0,58	165	314
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 7**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		100	100	100	20	20	100	100
2	1 1	0 1	2.0 7	1 0	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30		10	0	0	0	0
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 8**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	100	100	35	35	100	100
2	1 1	0 1	2.0 8	0 1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1050		350	50	0,143	100	28,57
2	1 1	0 1	2.0 8	0 2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41

2	1 1	0 1	2.0 8	0 4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36	12	12	3	0,25	15	41
2	**1 1**	**0 1**	**2.0 9**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100	100	100	40	40	100	100
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	12	100	0	0	12	12
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	53	100	0	0	53	143

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	1	100	0	0	1	1
2	1 1	0 1	2.0 9	1 0	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	100	24	100	0	0	24	24
2	**1 1**	**0 2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	**1 1**	**0 2**	**2.0 1**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH**	100	100	100	0,25	0,25	100	100
2	1 1	0 2	2.0 1	0 1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	2	1	2	0	0	1	50

2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup**	100	40	100	40	40	80	100
2	**1 1**	**0 3**	**2.0 1**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**	100	100	100	40	40	100	100
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	6	1	2	0	0	1	16.6
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	6		2	0	0	1	50
2	**1 1**	**0 3**	**2.0 2**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**	100	100	100	0	0	100	100

2	1 1	0 3	2.0 2	0 1	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	3	2	1	0	0	2	66
2	1 1	0 3	2.0 2	0 3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	6	0	1	0	0	0	181,2
2	**1 1**	**0 4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan**	20	18	18,19	0,32	1,76	18,32	100
2	**1 1**	**0 4**	**2.0 1**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	100	100	100	0,32	0,32	100	100
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	24	1	8	11,75	147	12,75	42,2

					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	3	0	1	0	0	0	0
2	**1 1**	**0 5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	100	100	30	49	100	100	100
2	**1 1**	**0 5**	**2.0 1**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**	100	100	0,25	25	100	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 1	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	15	4	5	0	0	4	26

2	**1 1**	**0 5**	**2.0 1**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah**	100	100	100	24	24	100	100
2	1 1	0 5	2.0 1	0 2	Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	15		5	3	0,6	3	20

2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**	100	100	100	30	30	100	100
	1 1	**0 6**	**2.0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin**	100	100	100	30	30	100	100
2	1 1	0 6	2.0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	56		24	0	0	0	0

2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	150	36	50	11	0,31	47	1,31
2	**11**				**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	100	100	100	45	45	100	100
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**	100	100	100	45	45	100	100

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	3	0	1	0	0	0	0
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**	100	100	100	100	100	200	100
2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup**	100	100	100	0	0	100	100
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang	48	16	5	0	0	100	50

					Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH							
2	**1 1**	**1 0**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**	100	100	100	48	48	100	100
2	**1 1**	**1 0**	**2.0 1**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan**	100	100	60	48	80	100	100
2	1 1	1 0	2.0 1	0 1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	15	0	10	7	0,7	7	46

2	**1 1**	**1 1**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Peresentase Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kabupaten/Kota**	100	70	73	45	61,64	100	100
2	**1 1**	**1 1**	**2.0 1**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah**	100	100	72	45	62,5	100	100
2	1 1	1 1	2.0 1	0 2	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	24	0	1	6	0,67	6	33,3
2	1 1	1 1	2.0 1	0 3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	74	0	24	0	0	0	0,22

2	1 1	1 1	2.0 1	0 7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4	3	0	0	0	3	75

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang antara lain:

1. Partisipasi/minat atau kesadaran masyarakat rendah akan pentingnya kebersihan lingkungan
2. Kapasitas TPA sudah over
3. Terjadi Hambatan Aliran Air Buangan pada Saluran Drainase Sampah, Gulma dan Sedimen yang menghambat aliran air buangan sehingga terjadi pencemaran lingkungan yang menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat
4. Sosialisasi tentang kriteria penilaian adipura
5. Partisipasi masyarakat masih rendah dalam program penanaman pohon
6. Kurangnya tokoh masyarakat yang mengetahui hukum adat dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional
7. Penguatan Kelembagaan Berbasis Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk tahun 2024 program dan kegiatan berdasarkan pada RPJMD Perubahan 2019-2023 dan Rencana Kerja serta Pendanaan Daerah Tahun Anggaran 2024 di Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada Tabel III.I adalah sebagai berikut:

1. **Program Dinas Lingkungan Hidup adalah :**
    a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
    c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)
    e. Program Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
    f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
    g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH
    h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
    i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup
    j. Program Pengelolaan Persampahan

2. **Kegiatan**

    Untuk menunjang Program yang telah ditentukan maka Dinas Lingkungan Hidup merencanakan kegiatan yang terdiri dari beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

    a. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA
   d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
   e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
   f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
   c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
   b) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   a) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
   c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya

b. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
   a) Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota
2) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
   a) Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

c. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup

1) Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
   b) Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup
2) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
   a) Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat
   b) Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

d. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)

1) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
   a) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
   b) Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

e. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

1) Penyimpanan Sementara Limbah B3
   a) Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3
2) Pengumpulan Limbah B3 Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
   a) Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

f. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

1) Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
   a) Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH
   b) Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

g. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH

1) Pengakuan MHA, Kearifan lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH
   a) Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH

h. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat

1) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

a) Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

i. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

1) Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota

a) Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota

j. Program Pengelolaan Persampahan

1) Pengelolaan Sampah

a) Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaur Ulang dan Pemanfaatan Kembali

b) Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

c) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2022							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**									
2	**11**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan ketersiadaan pelayanan administrasi penunjang Urusan Pemerintahan**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n**	**100%**	**4.504.625.600**			**100%**	**4.562.500.600**	
2	**11**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Tersedianya Dokumen perencanaan yang di hasilkan**		100%	51.770.100			100%	48.259.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Dokumen	20.000.000	

2	11	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	
2	11	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	2.500.000	
2	11	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	2.500.000	

2	11	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Dokumen	4.270.100	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	2 Dokumen	4.270.100	
2	11	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Laporan	20.000.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	4 Laporan	16.489.000	
2	**11**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Presentase Laporan Administrasi Keuangan**		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	3.638.923.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup

2	11	01	2.02	01	Penyedian Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	560 Orang/Bulan	3.606.928.000	
2	11	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Laporan	8.359.500	

2	11	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 Laporan	23.636.000	
2	**11**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	215.502.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	7 Paket	3.402.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	7 Paket	3.402.000	

							Kelurahan				Kelurahan			
2	11	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi kedalam daerash dan keluar Daerah	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	70 Laporan	212.100.000	
2	**11**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**		100%	21.125.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	61.386.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Unit	21.125.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 Unit	61.386.000	

2	**11**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup		100%	394.360.000	ASN Dinas Lingkungan Hidup
2	11	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	400 Laporan	5.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	400 Laporan	5.000.000	
2	11	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	74.040.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	74.040.000	

2	11	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	315.320.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Laporan	315.320.000	
2	**11**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Ketersediaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		100%	204.070.000			100%	204.070.000	
2	11	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	42.400.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	42.400.000	

2	11	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 Unit	130.203.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	70 Unit	130.203.000	
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Unit	15.000.000	
2	11	01	2.09	10	Pemeliharaan alat dan mesin lainnya		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	28 Unit	16.467.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	28 Unit	16.467.000	

2	**11**	**02**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup**		100%	115.725.000	Masyarakat		100%	615.725.000	Masyarakat
2	**11**	**02**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Cakupan penyusunan dan pelaksanaan RPPLH**		100%	115.725.000			100 Persen	115.725.000	
2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	115.725.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Dokumen	115.725.000	
2	**11**	**02**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyelenggaraa n KLHS**		100%	170.000.000			100 Persen	500.000.000	

.	1 1	0 2	2. 0 2	0 1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	170.000.000	
2	1 1	0 3	2. 0 2	0 2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	330.000.000	
2	**1 1**	**0 3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengendalian Pencemaran Lingkugan Hidup**		60%	122.959.600			60%	90.709.600	

2	**11**	**03**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**		100%	80.000.000			100%	48.594.000	
					Koordinasi, Singkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	20.000.000	
					Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup	Tercapainya indeks kualitas air	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	2 Dokumen	60.000.000			2 Dokumen	28.594.000	

2	**11**	**03**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Persentase Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**		100%	42.959.600			100%	42.115.600	
2	11	03	2.02	01	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 laporan	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 Laporan	21.612.500	
2	11	03	2.02	03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	11 Titik	22.959.600		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	1 Titik	20.503.100	

2	**11**	**04**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase luasan RTH Publik dari Luas Wilayah Kota / Perkotaan**		20%	1.484.781.600			20%	1.484.781.600	
2	**11**	**04**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Cakupan Capaian Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**		100%	1.484.781.600			100%	1.484.781.600	
					Pengelolaan Ruang Terbuka Hiaju (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	47 Ha	1.462.712.100	
					Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	3 Lokasi	22.069.500		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua	1 Lokasi	22.069.500	

							Kelurahan				Kelurahan			
2	**11**	**05**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Persentase Pengurangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	88 Persen	30.000.100			88 Persen	30.000.100	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Persentase Jumlah Usaha Yang Memiliki Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan**	100%	5.000.100			100%	5.000.100	

2	11	05	2.01	01	Verifikasi Lapangan untuk memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Laporan	5.000.100		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Laporan	5.000.100	
2	**11**	**05**	**2.01**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Limbah B3 Dalam Satu Daerah**		100%	25.000.000	Usaha/Kegiat an		100%	25.000.000	Usaha/Ke giatan

2	11	05	2.01	02	Koordinasi dan Singkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Sesuai dengan Kewenangannya	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	5 Dokumen	25.000.000	

2	**1 1**	**0 6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Persentase Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PPU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota**		100%	45.000.000			100%	45.000.000	
2	**1 1**	**0 6**	**2. 0 1**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha/Kegiatan Yang Memiliki Izin**		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan		100%	45.000.000	Usaha/Kegiatan yang memiliki izin lingkungan

2	1 1	0 6	2. 0 1	0 1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	20.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	12 Dokumen	20.000.000	
2	1 1	0 6	2. 0 1	0 3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	35 Laporan	25.000.000			50 Laporan	25.000.000	

2	**11**	**07**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Cakupan Pengakuan Keberadaan MHA, Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH**	**Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD**	100%	15.000.000			100%	15.000.000	
2	**11**	**07**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Cakupan data dan informasi tentang pengakuan MHA, Kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH**		100%	15.000.000	Masyarakat		100%	15.000.000	Masyarakat

2	11	07	2.01	01	Koordinasi, Singkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	1 Dokumen	15.000.000	
2	**11**	**09**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Cakupan Penghargaan Bidang Lingkungan Hidup**		100%	74.937.500			100%	74.937.500	

2	**11**	**09**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penghargaan Lingkungan Hidup**		100%	74.937.500			100%	74.937.500	
2	11	09	2.01	01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Entitas	74.937.500		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	5 Entitas	74.937.500	
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Ditindaklanjuti**		60%	25.000.000			60%	25.000.000	

2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Persentase Pengaduan Masyarakat Yang Diselesaikan**		100%	25.000.000	Masyarakat		100%	25.000.000	Masyarakat
2	11	10	2.01	01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Atas Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Dokumen	25.000.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Dokumen	25.000.000	
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kot a yang Ditindaklanjuti/ Ditangani**		72,50%	7.034.077.6 00			72,50%	7.029.577.6 00	

2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase Pengelolaan Sampah**		100%	7.034.077.600			100%	7.029.577.600	
2	11	11	2.01	02	Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	9 Laporan	1.695.390.700		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	12.529 Ton	1.676.259.700	
2	11	11	2.01	03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.673.992.900		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	33.410 Ton	3.688.623.900	

2	11	11	2.01	07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Unit	1.664.694.000		Kab.Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha n	10 Unit	1.664.694.000	

BAB IV
P E N U T U P

Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 telah disusun dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan OPD.

Perubahan rencana kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan bidang LIngkungan Hidup sebagai wujud nyata dari tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup dalam menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

Penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Triwulan II Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup. Rencana kerja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana dimasa mendatang. Adapun rencana kerja ini apabila masih ada kekurangan maka saran dan masukan dari semua pihak senantiasa kami harapkan.

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Lingkungan Hidup

Ir. H. ANDI FAISAL RANGGONG., MT
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip 19690507 199903 1 010

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TA. 2024



BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Semoga Allah,SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19670502 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	:	**PENDAHULUAN**	**1**
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	:	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**	**5**
		2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	5
		2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	16
BAB III	:	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**18**
		3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024	18
BAB IV	:	**PENUTUP**	**24**

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.a	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel II.1.b	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD dan pencapaian Renstra PD Triwulan II Tahun 2024	16
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024	20

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018, Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 6178);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018, Nomor 1541);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 590);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 78).

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud disusunnya Renja Perubahan adalah melakukan penyesuain target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

1) Penyesuaian target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,
2) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
3) Menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2024 – 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat renca kerja perubahan dan pendanaan Badan Penanggulangan bencana Daerah

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024.

Adapun kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub-kegiatn yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 adalah :

1. Proses pelaksanaan dan realisasi kegiatan yang cukup lambat karena penggunaan aplikasi barang dan jasa yang tergolong baru memerlukan waktu lebih lama terkait pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Perencanaan yang ada fokus pada tindakan dan belum fokus pada apa yang akan dicapai.
3. Masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh kurangnya data yang valid.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan penggunaan aplikasi barang dan jasa dan penyediaan SDM yang kompoten dalam pengoperasiannya.
2. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Mengupayakan pengumpulan data lapangan yang valid melalui koordinasi dengan instansi terkait.

Rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dapat dilihat pada *Tabel 2.1 berikut :*

Tabel II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = 5*	*10 = (9/4*100)*
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**05**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)**		**100 Persen**	**100 Persen**				**100 Persen**	**100 Persen**
1	**05.01**			**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**	**93,45**				**93,45**	**93,45**
1	**05.01**	**2.01**		***Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan***	***16 Dokumen***	***10 Dokumen***				***10 Dokumen***	**62,50**
1	05.01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	13 Dokumen	9 Dokumen				9 Dokumen	69,23

1	05.01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	36 Laporan	24 Laporan				24 Laporan	66,66
1	**05.01**	**2.02**		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan***	***54 Laporan***	***36 Laporan***				***36 Laporan***	**66,66**
1	05.01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36 Bulan	24 Bulan				24 Bulan	66,66
1	05.01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	54 Laporan	36 Laporan				36 Laporan	66,66
1	**05.01**	**2.06**		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Waktu pelaksanaan administrasi umum***	***36 Bulan***	***24 Bulan***				***24 Bulan***	**66,66**
1	05.01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	90 Buah	45 Buah				45 Buah	50
1	05.01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkpan kantor yang disediakan	3 Unit	3 Unit				3 Unit	100
1	05.01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Waktu bahan logistik kantor yang disediakan	3 Bulan	3 Bulan				3 Bulan	100
1	05.01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-Undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang Undangan	4 Eksamplar	2 Eksamplar				2 Eksamplar	50
1	05.01	2.06	08	Fasilitasi kunjungan tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi	130 Orang	57 Orang				57 Orang	43,84
1	05.01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat kordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	112 Kali	72 Kali				72 Kali	64,28
1	**05.01**	**2.07**		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan***	***56 Unit***	***20 Unit***				***20 Unit***	**35,71**
1	05.01	2.07	05	Pengadaan Meubel	Jumlah Meubel yang diadakan	37 Unit	12 Unit				12 Unit	32,43
1	05.01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	19 Unit	8 Unit				8 Unit	

1	**05.01**	**2.08**		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Waktu penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah***	***36 Bulan***	***24 Bulan***				***24 Bulan***	**66,66**
1	05.01	2.08	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	800 Lembar	370 Lembar				370 Lembar	46,25
1	05.01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 Bulan	24 Bulan				24 Bulan	66,66
1	05.01	2.08	03	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36 Bulan	24 Bulan				24 Bulan	66,66
1	**05.01**	**2.09**		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang mendapat Pemeliharaan***	***54 Unit***	***30 Unit***				***30 Unit***	**55,55**
1	05.01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Waktu Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	36 Unit	21 Unit				21 Unit	58,33
1	05.01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang mendapat pemeliharaan	17 Unit	7 Unit				7 Unit	41,17
1	05.01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapat pemeliharaan/ rehabilitasi	1 Unit	1 Unit				1 Unit	100
1	**05.03**			**Program Penanggulangan Bencana**	**Persentase warga Negara yang Mendapatkan layanan Perlindungan terhadap Ancaman Bencana**	**100 Persen**	**96,78**				**96,78**	**96,78**
1	05.03	2.01		***Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota***	***Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana***	***100 Persen***	***100,00***				***100,00***	**100**
1	05.03	2.01	01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen kajian resiko bencana (KRB) yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	100
1	05.03	2.01	02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai dengan jenis ancaman bencana	360 Orang	160 Orang				160 Orang	44,44
1	**05.03**	**2.02**		***Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana***	***Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana***	***100 Persen***	***94,80***				***94,80***	**94,80**
1	05.03	2.02	01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB)yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	100

1	05.03	2.02	03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga Negara yang mendapatkan layanan Pusdalops Penanggulangan Bencana dan sarana prasarana Penanggulangan Bencana	360 Orang	240 Orang				240 Orang	66,66
1	05.03	2.02	04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah warga Negara yang mendapatkan layanan Peralatan Perlindungan	200 Jiwa	91 Jiwa				91 Jiwa	45,50
1	05.03	2.02	07	Penanganan Pasca bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kejadian dalam pasca bencana yang tertangani	80 Kejadian	37 Kejadian				37 Kejadian	46,25
1	05.03	2.02	08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana yang dilatih dalam penanganan bencana	34 Orang	16 Orang				16 Orang	47,05
1	**05.03**	**2.03**		***Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana***	***Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana***	***100 Persen***	***95,53***				***95,53***	**95,53**
1	05.03	2.03	02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status kejadian bencana	8 Kali	2 Kali				2 Kali	25
1	05.03	2.03	03	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	16 Jiwa	6 Jiwa				6 Jiwa	37,50
1	05.03	2.03	05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	330 Orang	210 Orang				210 Orang	63,63

KEPALA PELAKSANA BPBD

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 196570502 199503 1 003

Tabel II.1.b (RENSTRA RPD 2014-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s/d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja	Realisasi Renja	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = 7*	*10 = (9/4*100)*
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
1	**05**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)**		**100 Persen**		**100 Persen**	**70,50**	**70,50**	**70,50**	**70,50**
1	**05**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100 Persen**		**100 Persen**	**70,50**	**70,50**	**70,50**	**70,50**
1	**05**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan**	**12 Dokumen**		**4 Dokumen**	**2 Dokumen**	**50 ,00**	**2 Dokumen**	**16,66**

1	05	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	50,00	2 Dokumen	16,66
1	05	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00	6 Laporan	23,07
1	**05**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan**	***54 Laporan***		**18 Laporan**	**8 Laporan**	**20,25**	**8 Laporan**	**14,81**
1	05	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	**60/36 Orang/Bulan**		20 Orang/ Bulan	6 Orang/Bulan	30,00	6 Orang/Bulan	10,00
1	05	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	54 Laporan		18 Laporan	8 Laporan	44,44	8 Laporan	14,81
1	**05**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum**	**36 Bulan**		**12 Bulan**	**6 Bulan**	**50,00**	**6 Bulan**	**16,66**
1	05	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket		0	0	0	0	0
1	05	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30 Laporan		10 Laporan	0	0	0	0
1	05	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	120 Laporan		40 Laporan	20 Laporan	50,00	20 Laporan	16.66
1	**05**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah peunjang urusan pemerintahan daerah yang diadakan**	**11 Unit**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	05	01	2.07	0005	Pengadaan Meubel	Jumlah paket meubel yang disediakan	2 Unit		0	0	0	0	0

1	05	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang disediakan	8 Unit		0	0	0	0	0
1	**05**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**36 Bulan**		**12 Bualan**	**6 Laporan**	**50,00**	**6 Laporan**	**16,66**
1	05	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	54 Laporan		18 Laporan	9 Laporan	50,00	9 Laporan	**16,66**
1	05	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00	6 Laporan	**16,66**
1	05	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	50,00	6 Laporan	**16,66**
1	**05**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**43 Unit**		**13 Unit**	**0**	**0**	**0**	**0**
1	05	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	36 Unit		12 Unit	0	0	0	0
1	05	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang pemelihara	4 Unit		0	0	0	0	0
1	05	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang pemelihara/ rehabilitasi	3 Unit		1 Unit	0	0	0	0
1	**05**	**03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**89,46**	**89,46**	**89,46**	**89,46**
						Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	**100 Persen**		**100 Persen**	**89,46**	**89,46**	**89,46**	**89,46**

						Persentase warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	**100 Persen**		**100 Persen**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
1	**05**	**03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**173.799 Orang**		**57.933 Orang**	**51.827**	**89,46**	**51.827**	**29,82**
1	05	03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun	300 Orang		100 Orang	70 Orang	70,00	70 Orang	23,33
1	**05**	**03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**173.799 Orang**		**57.933 Orang**	**51.827**	**89,46**	**51.827**	**29,82**
1	05	03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	12 Kawasan		4 Kawasan	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0003	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi(pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada	2 Laporan		0	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, Maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	27 Unit		1 Unit	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kab/Kota yang tertangani	2 Kegiatan		0	0	0	0	0

1	05	03	2.02	0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	3 Kawasan		0	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya	6 Orang		0	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi yang Dilegalisasi	2 Dokumen		1 Dokumen	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0018	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	360 Orang		0	0	0	0	0
1	05	03	2.02	0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	20 Keluarga		0	0	0	0	0
1	**05**	**03**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Penyelamatan dan evakuasi korban bencana**	**3.060 Orang**		**1.100 Orang**	14.518	132	14.518	474,44
1	05	03	2.03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/ Wabah Zoonosis Prioritas	3 Laporan		1 Laporan	0	0	0	0
1	05	03	2.03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	3 Dokumen		1 Dokumen	1	100	1	33,33
1	05	03	2.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	21 Orang		7 Orang	2	28,57	2	9,52
1	05	03	2.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	3.060 Orang		1.100 Orang	4.528	411,63	4.528	147,97
1	05	03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	3 Laporan		1 Laporan	1	100	1	33,33

1	**05**	**03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**12 Dokumen**		**2 Dokumen**	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	2 Dokumen		0	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah	2 Dokumen		0	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen		0	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	2 Dokumen		1 Dokumen	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2 Laporan		0	0	0	0	0
1	05	03	2.04	0013	Penyusunan kajian kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Kab/Kota	Jumlah penyelesaian Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3 Dokumen		1 Dokumen	0	0	0	0

KEPALA PELAKSANA BPBD

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 196570502 199503 1 003

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang dibentuk pada tahun 2010, BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang pada prinsipnya masih pada tahapan untuk peningkatan sumberdaya. Sumberdaya tersebut meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, kelembagaan dan prosedur. Faktor-faktor tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dalam melaksanakan tugas pokok danfungsi dalam penanggulangan bencana dan kondisi yang berkembang secaradinamis. Optimalisasi sumberdaya yang dimiliki BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang maupun sumberdaya di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dimobilisasi atas komando BPBD Kabupaten Sidenreng Rappang harus bermanfaat untuk pencapaian tujuan organisasi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan langkah tindak lanjut yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten, Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut Badan Penanggulangan Bencana Daerah menghadapi beberapa permasalahan dan hambatan sebagai berikut :

Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi

Permasalahan	Hambatan
Kabupaten Sidenreng Rappang belum memiliki Peta rawan bencana	Kurangnya koordinasi lintas sektor dalam pencegahan, penanganan saat bencana dan pasca bencana
Masih adanya masyarakat yang tinggal di kawasan rawan	Penegakan hukum dibidang tata ruang masih perlu ditingkatkan
Masih perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pencegahan serta penanganan bencana	

Selain itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang juga menghadapi beberapa peluang dan tantangan yaitu :

Peluang dan tantangan yang dihadapi

Peluang	Tantangan
Berkembangnya teknologi di bidang kebencanaan	Peningkatan tuntutan masyarakat dalam kecepatan dan kualitas pelayanan bidang kebencanaan
Peningkatan kecepatan akses informasi	
Tingginya perhatian Dunia Usaha, LSM, Lembaga Pendidikan dan Ormas dalam bidang Penanggulangan Bencana	

Dengan memperhatikan permasalahan dan hambatan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka isu-isu penting berupa catatan dan rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui Pengurangan Resiko, Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan.
2. Peningkatan kecepatan dan kualitas penanggulangan bencana.
3. Peningkatan kualitas pemulihan pasca bencana.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Perubahan BPBD Tahun 2024 sebanyak 2 (dua) program, 9 (sembilan) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar Rp 2.744.866.000.- Sumber Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Fasilitasi Kunjungan Tamu
2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

1 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota

1) Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)

2 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
2) Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
3) Penyusunan Rencana Kontijensi

3 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

1) Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas
2) Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
3) Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
4) Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
5) Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana

4. Penataan Sistem dasar Penanggulangan Bencana

1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan
2) Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Pascabencana (R3P) Kab/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kode				*Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiata*	*Indikator Kinerja Program /Kegiatan*	*TAHUN ANGGARAN 2024*							
						SEBELUM PERUBAHAN				*SETELAH PERUBAHAN*			
						Lokasi	*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif*	*Kelompok Penerima Manfaat*	*Lokasi*	*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif*	*Kelompok Penerima Manfaat*
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**									
1	**05**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT (TRANTIBUMLINMAS)**		**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**2.744.466.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**2.744.466.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
1	**05.01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**2.294.466.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**2.304.541.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
1	**05.01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang dihasilkan**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**4 Dokumen**	**5.934.000**	**Aparatur**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**4 Dokumen**	**5.934.000**	**Aparatur**
1	05.01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	4 Dokumen	4.934.000	*Aparatur*	4 Dokumen	4 Dokumen	4.934.000	*Aparatur*

1	05.01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	1.000.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang, Watang Pulu, Batu Lappa	12 Laporan	1.000.000	*Aparatur*
1	***05.01***	***2.02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Jumlah Laporan Administrasi Keuangan***	**Kab. Sidenreng Rappang**	***18 Laporan***	**1.933.959.000**	***Aparatur***	**Kab. Sidenreng Rappang**	***18 Laporan***	**1.933.959.000**	***Aparatur***
1	05.01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	20 Orang/ Bulan	1.929.959.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang	20 Orang/ Bulan	1.929.959.000	*Aparatur*
1	05.01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Kab. Sidenreng Rappang, Makassar, Jakarta,Bandung	18 Laporan	4.000.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang, Makassar, Jakarta,Bandung	18 Laporan	4.000.000	*Aparatur*
1	**05.01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Waktu pelaksanaan adminsitrasi umum**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**12 Bulan**	**103.066.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**12 Bulan**	**113.141.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
1	05.01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kab. Sidenreng Rappang	10 Laporan	2.200.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	10 Laporan	2.200.000	*Aparatur dan Masyarakat*

1	05.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	40 Laporan	100.866.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang	40 Laporan	110.941.000	*Aparatur*
1	**05.01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan**	**Kab. Sidenreng Rappang**	-	-	-	**Kab. Sidenreng Rappang**	**2 Unit**	**10.000.000**	***Aparatur***
1	05.01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappa	-	-	-	Kab. Sidenreng Rappa	2 Unit	10.000.000	*Aparatur*
1	**05.01**	**02.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**12 Bulan**	**186.526.000**	***Aparatur***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**12 Bulan**	**177.526.000**	***Aparatur***
1	05.01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	18 Laporan	4.000.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang	18 Laporan	4.000.000	*Aparatur*
1	05.01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	26.526.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	26.526.000	*Aparatur*
1	05.01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	156.000.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	147.000.000	*Aparatur*

1	**05.01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang mendapatkan pemeliharaan**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**21 Unit**	**64.981.000**	***Aparatur***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**21 Unit**	**63.981.000**	***Aparatur***
1	05.01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Unit	46.981.000	*Aparatur*	Kab. Sidenreng Rappang	12 Unit	46.981.000	*Aparatur*
1	05.01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang pemelihara/ rehabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	18.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	17.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	**05.03**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**450.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**439.925.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
					Persentase warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		**100 Persen**				**100 Persen**		
					Persentase warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana		**100 Persen**				**100 Persen**		

1	**05.03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Orang**	**50.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**99.925.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
1	05.03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun	Kab. Sidenreng Rappang	100 Orang	50.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	100 Orang	99.925.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	**05.03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**240 Orang**	**245.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**240 Orang**	**185.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
1	05.03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	85.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	85.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	05.03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	60.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	0	*Aparatur dan Masyarakat*
1	05.03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok	Kab. Sidenreng Rappang	4 Kawasan	100.000.000	*Aparatur dan*	Kab. Sidenreng Rappang	4 Kawasan	100.000.000	*Aparatur dan*

1	**05.03**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Orang**	**50.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**100 Persen**	**99.925.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
1	05.03	2.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga Negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kab/Kota yang memperoleh Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya selama 1(satu) tahun	Kab. Sidenreng Rappang	100 Orang	50.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	100 Orang	99.925.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	**05.03**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**240 Orang**	**245.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**240 Orang**	**185.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
1	05.03	2.02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	85.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	85.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	05.03	2.02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	60.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	0	*Aparatur dan Masyarakat*
1	05.03	2.02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok	Kab. Sidenreng Rappang	4 Kawasan	100.000.000	*Aparatur dan*	Kab. Sidenreng Rappang	4 Kawasan	100.000.000	*Aparatur dan*

					Evakuasi Korban Bencana								
1	05.03	2.03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	12.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	12.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	**05.03**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Kab. Sidenreng Rappang**	**1 Dokumen**	**15.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***	**Kab. Sidenreng Rappang**	**1 Dokumen**	**15.000.000**	***Aparatur dan Masyarakat***
1	05.03	2.04	0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	6.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*
1	05.03	2.04	0013	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	9.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	9.000.000	*Aparatur dan Masyarakat*

Kepala Pelaksana BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si
Nip. 19670502 199503 1 003

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi dan misi daerah serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

4.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang dan seluruh staff Badan Penanggulangan Bencana Daerah secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
   a. Melaksanakan Perubahan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

4.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P) implementasi dari Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2018-2023 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan

Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA PELAKSANA BPBD,

H.SUDARMIN,SE.,M.Si

Nip. 19670502 199503 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024, mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kab Sidrap Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensingkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sementara itu searah dengan penyusunan dokumenRencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng

Rappang sebagai Organisasi Perangkat Daerah pada tahun 2024 ini menyusun Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024. Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan OPD yang berjangka.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dilakukan sebagai upaya pelaksanaan RPD tahun 2024. Yang tentunya tetap mengacu pada rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024–2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024–2026 yaitu

"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera",

Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk misi :

1. Memajukan dan meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industri pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan penyediaan lapangan kerja baru.
4. Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa
5. Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalitas birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan publik melalui penerapan good governance dan electronic governance.

6. Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui penerapan desa cerdas, sehat dan mandiri
7. Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya lokal sebagai basis nilai dalam menciptakan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif.

program dan kegiatan dilakukan karena adanya perubahan pagu anggaran dan adanya bergeseran belanja pada beberapa kegiatan dan renja ini akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 yang telah ditetapkan Prioritas Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah.

Rencana Kerja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam prosesnya, penyusunan renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD, oleh karena itu penyusunan rancangan renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian renstra OPD Penyusunan renja OPD yang dilakukan melalui dua tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, mencakup :

a. Tahap perumusan rancangan renja OPD

b. Tahap penyajian rancangan renja OPD

1.2. Landasan Hukum

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
7. Permendagri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014

8. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 Sampai Dengan Tahun 2025
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2024.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat adalah:

1. Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
2. Mengoptimalkan pelaksanaan dan pengawasan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN,

pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok – pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program / kegiatan yang telah melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;
4. Faktor – Faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program / kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor – faktor penyebab tersebut

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
3. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Millenium Development Goalds);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam

perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Memuat Urusan / bidang urusan / program / kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
2. Kaidah – kaidah pelaksanaan.
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan–kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selama tahun 2024 dan perkiraan target tahun 2025.

Pelaksanaan Renja tersebut terintegrasi dalam Rencana Strategis Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sebagai alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen dalam penyelenggaraan pembangunan 3 (tiga) tahun dan tahunan.

Adapun untuk perubahan tahun anggaran 2024 anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 77.305.276.000,00 (Sebelum Perubahan) dan Rp. 82.760.417.000,00 (Setelah Perubahan).

Terdapat 13 program, 15 kegiatan dan 36 Sub Kegiatan serta realisasi sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 realisasi belanja Rp. 26.025.850.897,00 (33,19 %) kegiatan diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2024, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan renja OPD tahun lalu dan pencapaian kinerja renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi bagaimana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan renstra OPD, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Renja yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan agar lebih terarah dan menjamin tercapainya sasaran strategis pembangunan tahun mendatang. Bagi manajemen Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. Renja dipandang sebagai :

- Alat bantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Gambaran visi, misi, persepsi, interprestasi serta strategi bagi Badan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi.
- Alat untuk memacu dan memicu aparat serta masyarakat dalam proses pencapaian sasaran yang ditetapkan.

Renja sebagai alat bagi manajemen, memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya

pencapaian visi, misi dan tujuan/sasaran strategis. Dalam dokumen Renja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang secara formal didefinisikan pernyataan visi, misi, tujuan/sasaran strategis serta strategi pencapainnya.

Adapun rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD Tahun 2022 dan pencapaian Renstra Tahun 2022 Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat dapat dilihat pada tabel berikut :

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat

Adapun isu strategis tersebut adalah sebagai berukut :

1). Kebutuhan prasarana jalan yang berbasiskan pada tata ruang dan memenuhi standar keselamatan jalan dan jembatan serta berwawasan lingkungan.

2). Tingginya laju pertumbuhan dan pesatnya kegiatan sosial ekonomi serta masih adanya kesenjangan antar wilayah, memerlukan pengembangan infrastruktur secara terpadu dan berkelanjutan.

3). Belum optimalnya kondisi infrastruktur perdesaan di kabupaten Sidenreng Rappang dalam mengimbangi dinamika kebutuhan dan tuntutan masyarakat serta wilayah.

4). Belum optimalnya peran masyarakat dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan.

5) Adanya kerusakan jalan akibat muatan berlebih (over loading)

6) Masih belum terpenuhinya sarana air minum terhadap seluruh masyarakat kabupaten Sidenreng Rappang.

7) Belum optimalnya bangunan drianase sehingga masih sering terjadi genangan air pada saat musim penghujan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat yang menjadi kewenangan daerah dan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan Perumahan Rakyat;
b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan Perumahan Rakyat;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, pertanahan dan Perumahan Rakyat;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga teknis daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan bidang Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat.

Apabila dikaitkan dengan pencapian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang, pada dasarnya kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai pelaksana setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi OPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya. Untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat sumber Anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum DAU Tahun 2024, Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bantuan Provinsi (Banprov) Sejalan dengan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 – 2026 yaitu **"Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera",** maka program dan kegiatan yang dirancang Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 terdiri dari :

Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator
1.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Persentase Dokumen Perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase pelaksanaan administrasi keuangan perangkat daerah**
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah**
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya
	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya
2	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Penduduk Berakses Air Minum Yang Layak**
	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun
	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan
3.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap**
	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	**Persentase Panjang jalan dalam kondisi baik**
	Pembangunan Jalan	Panjang jalan terbangun
	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang direhabilitasi
	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang dikerjakan

	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang terbangun
4.	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Persentase Tenaga Ahli Bersertifikat**
	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	**Persentase Tenaga terampil yang terlatih**
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Terlaksananya pelatihan tenaga terampil konstruksi
5.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga Berakses Sanitasi
	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana dan Prasarana pengangkutan
6.	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat**
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase Drainase dalam Kondisi baik**
	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Panjag Drainase Terbangun
7.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**	**Persentase bangunan ber- IMB per satuan bangunan**

	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan	**Persentase Bangunan Gedung yang ber IMB**
	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Jumlah Dokumen tersusun
	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung daerah yang terbangun
8.	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**	**Persentase bangunan yang tertata**
	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase bangunan yang tertata**
	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata
9.	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Jumlah Dokumen Tersusun**
	Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah	**Persentase Jumlah Dokumen Tersusun**

	Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
10.	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni bagi korban bencana**
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	**Persentase ketersediiaan rumah layak huni**
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen yang tersusun
	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang tersusun
11.	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Cakupan ketersediaan rumah layak huni**
	Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Kabupaten / Kota	**Menurunn ya luas permukima n kumuh di bawah 10 (sepuluh) Ha**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki

12.	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Cakupan Lingkungan Yang Aman dan Sehat yang Didukung dengan PSU / Lampu Jalan**
	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	**Persentase PSU perumahan**
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah PSU perumahan yang dibangun
13.	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penyelesaian kasus tanah Negara**
	Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Luas tanah yang dibebaskan
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Luas tanah yang dibebaskan / diganti rugi

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (trickle down effect) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Perubahan Rencana Kerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Program Tahunan Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang selain menjadi Evaluasi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2024, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang. RENJA

juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan dan seluruh staf Dinas Bina Marga, Cipta Karya, Tata Ruang, Pertanahan dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

Kepala Dinas,

Drs. ABDUL RASYID, M.Si

Nip. 196612301986111001

2024

Renja Perubahan

(Renja-P)

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Sidenreng Rappang

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah dokumen perubahan perencanaan kinerja dan penganggaran Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan pada tahun berjalan, meski Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pendidikan, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi.

Analisis terhadap program tahun berjalan menunjukkan bahwa pendekatan yang saat ini digunakan belum cukup efektif dalam mencapai target yang diinginkan. Perubahan kebijakan nasional, perkembangan teknologi pendidikan, dan meningkatnya tuntutan masyarakat akan kualitas pendidikan yang lebih baik mendorong perlunya rencana kerja perubahan. Dengan perubahan ini, diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat mengatasi berbagai kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja serta kualitas pendidikan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Tahun 2024 terdiri dari pendahuluan, evaluasi rencana kerja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah, penutup. Sehingga melalui Rencana Kerja perubahan ini, diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi instansi baik pemerintah, masyarakat, maupun mitra kerja.

Pangkajene Sidenreng, 2024
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M. Adm. KP
Pangkat : Pembina Tk I
NIP : 19801006 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ..... **i**
SK PENGESAHAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022 ..... **ii**
SK PENETAPAN RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2022 ..... **vi**
KATA PENGANTAR ..... **ix**
DAFTAR ISI ..... **x**
DAFTAR TABEL ..... **xi**
BAB I Pendahuluan **1**
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Landasan Hukum 2
1.3. Maksud dan Tujuan 5
1.4. Sistematika Penulisan 5
BAB II Evaluasi Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 ..... **7**
2.1. Evaluasi Renja PD Sampai Triwulan II Tahun 2024 7
2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi PD 38
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah **24**
BAB IV PENUTUP **35**

LAMPIRAN – LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Tahun 2024
Lampiran 2 SK Penetapan Renja SKPD
Lampiran 3 SK Pengesahan Rencana Kerja SKPD

DAFTAR TABEL

Tabel II.1.a : (RENSTRA RPD 2018-2023) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 9

Tabel II.1.b : (RENSTRA RPD 2024-2026) Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaPerangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 27

Tabel III. : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang.....42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan Daerah dalam Bidang Pendidikan dan Kebudayaan berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan. Rencana Kerja Dinas Pendidikan Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Program/kegiatan pada tahun 2024, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, dan adanya pergeseran anggaran Tahun 2024 yang tentunya berdampak pada pencapaian target kinerja, sehingga dengan perubahan rencana kerja diharapkan dapat memberikan dampak yang optimal dalam rangka pencapaian indikator-indikator kinerja Pendidikan dan Kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang demi meningkatkan kualitas dan akses layanan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan di Kabupaten Sidenreng Rappang.

Proses Perubahan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 berdasarkan Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024-2026 dengan tetap memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan di dalam Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD-P) Tahun 2023, agar di dalam pelaksanaan program/kegiatan terwujud sinergitas antara dokumen perencanaan di atasnya (RPJPD, RPJMD, RKPD dan Renstra).

1.2. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi Landasan Hukum Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun Rencana Kerja Perubahan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
13. Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
17. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71);
19. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah menyediakan acuan arah kebijakan pembangunan yang akan dilaksanakan pada sisa tahun berjalan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah :

1) Untuk menyesuaikan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024.
2) Menyesuaikan pergeseran pagu kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, meliputi :

BAB I Pendahuluan

Memuat/menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Berisi Latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan Renja Perubahan.

BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II tahun 2024 dan isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat Urusan/bidang, urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak.

BAB IV PENUTUP

Memuat catatan penting, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama PD dan nama dan tanda tangan kepala PD, serta cap pemerintah daerah.

BAB II
EVALUASI RENJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SAMPAI TRIWULAN II

2.1. Evaluasi Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sampai Triwulan II Tahun 2024

Setiap Dokumen Perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pendidikan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II tahun 2024 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

a) Realisasi Program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja, yang memenuhi target kinerja dan melampaui target kinerja yang direncanakan.
b) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, penyebab tercapainya dan melebihi target kinerja yang direncanakan.
c) Implikasi/dampak yang timbul terhadap target capaian Program Renstra Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan.
d) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi factor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 juga memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

a) Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan Perubahan Renja tahun 2024;
b) Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

c) Masalah – masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
d) Tujuan yang dikehendaki;
e) Sasaran – sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
f) Kebijakan – kebijakan untuk melaksanakannya serta seksi pelaksana;

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai berikut :

TABEL II. 1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Dinas Pendidikan s/d tahun berjalan 2024		Catatan
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=7/6*	*9=5+7*	*(10=9/4*100)*	*11*
	Wajib Pelayanan Dasar									
	Pendidikan									
	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	**Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan PAUD (%)**	100 %	86,45%	-	-	-	86,45%	86%	
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan DASAR (%)	100 %	97,63%	-	-	-	97,63%	98%	
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama (%)	100 %	64%	-	-	-	64,29%	64%	
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100 %	91,88%	-	-	-	91,88%	92%	
	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	**Angka Putus Sekolah SD**	0,19 %	0,18	-	-	-	0,18	106%	
		Angka Kelulusan	100 %	100	-	-	-	100	100%	

					Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik	60,30	%	46,22	-	-	-	46,22	77%	
				Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Jumlah Gedung Sekolah Baru Yang Dibangun Dan Siap Digunakan	1	Unit	-	-	-	-	-	0%	
				Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Dibangun	14	Paket	24	-	-	-	24	171%	
				Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Bangun	16	Paket	14	-	-	-	14	88%	
				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	20	Paket	7	-	-	-	7	35%	
				Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang Perpustakaan Sekolah yang Dibangun	10	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	70	Paket	85	-	-	-	85	121%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas Sekolah Yang Direhabilitasi	250	Ruang	246	-	-	-	246	98%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi	30	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Direhabilitasi	10	Ruang	-	-	-	-	-	0%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Direhabilitasi	30	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang di Rehabilitasi	60	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa yang Diadakan	0		-	-	-	-	-	0%	

					Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	15900	Siswa	10500	-	-	-	10500	66%	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang di adakan	90	Paket	45	-	-	-	45	50%	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa yang Terverifikasi	32203	Siswa	32203	-	-	-	32203	100%	
				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Lomba OSN SD	306	Peserta	-	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi	22	Siswa	-	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Sekolah Pelaksanaan Ujian Semester Genap	729	Sekolah	702	-	-	-	702	96%	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di Lombakan	48	Cabang	54	-	-	-	54	113%	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS	702	Sekolah	702	-	-	-	702	100%	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Peserta Sosialisasi	702	Sekolah	702	-	-	-	702	100%	
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	**Angka Putus Sekolah SMP**	**0,75**	**%**	**0,41**	**-**	**-**	**-**	**0,41**	**183%**	
					Angka Kelulusan	**100**	**%**	**98,67**	**-**	**-**	**-**	**98,67**	**99%**	
					Persentase Bangunan SMP/Mts Kondisi Baik	**69,00**	**%**	**63,28**	**-**	**-**	**-**	**63,28**	**92%**	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Pemb. Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir	10	Paket	-	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Sarana Air Bersih dan Sanitasi SMP yang Terbangun	40	Paket	-	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	33	Unit	22	-	-	-	22	67%	

				Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Dibangun	16	Paket	8	-	-	-	8	50%	
				Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Dibangun	14	Paket	9	-	-	-	9	64%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi	105	Ruang	73	-	-	-	73	70%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Direhabilitasi	64	Unit	-	-	-	-	-	0%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Laboratorium Sekolah yang Direhabilitasi	20	Paket	10	-	-	-	10	50%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Direhabilitasi	16	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Direhabilitasi	16	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang UKS Kondisi Baik	10	Paket	-	-	-	-	-	0%	
				Pengadaan Perlengkapan Siswa	Jumlah Buku-buku Dan Alat Tulis Siswa Yang Diadakan	0		-	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Siswa yang Mendapatkan Bantuan Baju Seragam	10000	Siswa	6500	-	-	-	6500	65%	
				Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang di adakan	50	Paket	24	-	-	-	24	48%	
				Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa Miskin yang Terverifikasi	10800	Siswa	10800	-	-	-	10800	100%	
					Jumlah Peserta Lomba OSN SMP	132	Peserta	0	-	-	-	0	0%	

				Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Pelatihan Siswa Berprestasi	22	Siswa	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Sekolah Peserta UNBK	144	Sekolah	144	-	-	-	144	100%	
				Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Cabang Minat, Bakat, dan Kreativitas Siswa Yang di Lombakan	48	Cabang	48	-	-	-	48	100%	
				Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah yang Mendapatkan Dana BOS	144	Sekolah	144	-	-	-	144	100%	
				Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Peserta Sosialisasi	146	Sekolah	145	-	-	-	145	99%	
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	**Jumlah lembaga/satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikelola (unit)**	**693**	**PAUD**	**231**	**-**	**-**	**-**	**231**	**33%**	
					Persentase PAUD Terakreditasi	**54,35**	**%**	**56,52**	**-**	**-**	**-**	**56,52**	**104%**	
				Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Yang di Adakan	6	Ruang	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Unit Sekolah Baru PAUD yang Dibangun	2	Sekolah	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun	6	Unit	1	-	-	-	1	17%	
				Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Diadakan	32	Paket	8	-	-	-	8	25%	
				Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Direhabilitasi	161	Ruang	119	-	-	-	119	74%	

				Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Gebyar PAUD	75	Peserta	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Peserta Hari Anak Nasional	176	Peserta	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	9997	Peserta	9997	-	-	-	9997	100%	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD HOLISTIK yang Dikelola	3	Paket	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Peserta Publikasi dan Sosialisasi Program dan Kebijakan PAUD	600	Peserta	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	693	PAUD	0	-	-	-	0	0%	
				Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mendapatkan Bantuan	697	PAUD	697	-	-	-	697	100%	
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang dibina**	**390**	**Lembaga**	**390**	**-**	**-**	**-**	**390**	**100%**	
				Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Porseni Dan Pameran HAI	300	Peserta	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Warga Negara Buta Huruf Yang Dibelajarkan	1821	Warga	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	766	Peserta	766	-	-	-	766	100%	
				Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Yang Dikelola Dengan Baik	420	Lembaga	140	-	-	-	140	33%	
					Jumlah Pendidikan Kursus dan Kelembagaan Yang Dibina	105	Lembaga	0	-	-	-	0	0%	

				Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Lembaga Mendapatkan BOP Kesetaraan	24	Lembaga	17	-	-	-	17	71%	
				PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	**Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**	**99,563**	**%**	**99**	**-**	**-**	**-**	**99**	**99%**	
				Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	**Jumlah PTK Yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan (orang)**	**12603**	**PTK**	**4201**	**-**	**-**	**-**	**4201**	**33%**	
				Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Terlayani Aplikasi Dapodik	36	Bulan	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Sekolah Peserta Penyusunan Profil Pendidikan	1488	Sekolah	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	24	Dokumen	24	-	-	-	24	100%	

					Jumlah Guru Yang Ikut Pendidikan Profesi Guru (PPG)	56	Guru	0	-	-	-	-	0%	
				Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta Lomba Guru Berprestasi	1701	Orang	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Peserta PPCKS	321	Orang	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Peserta Uji Kompetensi	8934	Orang	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Guru Naik Pangkat	36	Bulan	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Guru Tersertifikasi	36	Bulan	0	-	-	-	-	0%	
					Waktu Penyedian Upah PTK Honorer	12	Triwulan	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	120	Laporan	120	-	-	-	120	100%	
				Kebudayaan										
				PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	**Cakupan Kebudayaan yang Dikembangkan**	**100**	**%**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0%**	
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang dilestarikan**	**33**	**Kelompok**	**0**	**-**	**-**	**-**	**0**	**0%**	

				Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Pementasan Kelompok Paduan Suara	120	Kali	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Pementasan Tari dan Musik Tradisional	72	Pentas	0	-	-	-	0	0%	
					Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	120	Kali	7	-	-	-	7	6%	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	**Cakupan Pengembangan Kesenian Tradisional**	**100**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Kelompok Kesenian Yang Dibina**	**11**	**Kelompok**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Peserta Pelatihan Kesenian Tradisional	50	Peserta	-	-	-	-	-	0%	
				Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Kesenian Tradisional yang Tersertifikasi	10	Kesenian	-	-	-	-	-	0%	
				PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	**Cakupan Dokumen Sejarah yang direvitalisasi**	**18,753**	**%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**Jumlah Sejarah Lokal yang Didata**	**6**	**Sejarah**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Sejarah dan Tradisi yang di Inventarisir	30	Dokumen	26	-	-	-	26	87%	

					Jumlah Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah Kuno	9	Jenis	0	-	-	-	0	0%	
				Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Peserta Lomba Cerita Rakyat	0		0	-	-	-	0	0%	
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	**Persentase Cagar Budaya Yang ditetapkan**	**37,04**	**%**	**5**	**-**	**-**	**-**	**5**	**13%**	
				Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan**	**30**	**Cagar**	**30**	**-**	**-**	**-**	**30**	**100%**	
				Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya Yang Ditetapkan	30	Objek	30	-	-	-	30	100%	
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola	50	Cagar	0	-	-	-	-	0%	
				Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Dilestarikan	2	Cagar	0	-	-	-	-	0%	
				PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	**Persentase Peningkatan Pengunjung Museum**	**34,49**	**%**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	**Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten**	**456**	**Orang**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan Secara Terpadu	36	Koleksi	36	-	-	-	36,00	100%	
				Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Bangunan Cagar Budaya Dan Museum Kondisi Baik	2	Unit	0	-	-	-	-	0%	
				XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100**	**%**	**100**	**-**	**-**	**-**	**100,00**	**100%**	

				XXX Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja**	**54**	**Laporan**	**54**	**-**	**-**	**-**	**54,00**	**100%**	
				XXX Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Disusun	6	Dokumen	6	-	-	-	6,00	100%	
				XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Disusun	3	Dokumen	4	-	-	-	4,00	133%	
				XXX Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen RKAP yang Disusun	3	Dokumen	3	-	-	-	3,00	100%	
				XXX Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Disusun	3	Dokumen	4	-	-	-	4,00	133%	
				XXX Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPPA yang Disusun	3	Dokumen	3	-	-	-	3,00	100%	
				XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun	12	Laporan	7	-	-	-	7,00	58%	
				XXX Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Program Layanan Pendidikan Dimonitoring	12	Laporan	2	-	-	-	2,00	17%	
				XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Keuangan**	**90**	**Laporan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Pengelolaan Gaji dan Tunjangan	36	Bulan	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Guru Bersertifikasi Semua Jenjang Pendidikan	12	Triwulan	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	37548	Orang	37548	-	-	-	37.548,00	100%	
				XXX Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Waktu Penyediaan Administrasi Jasa Keuangan	36	Bulan	24	-	-	-	24,00	67%	

				XXX Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan yang Disusun	3	Laporan	2	-	-	-	2,00	67%	
				XXX Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan yang Disusun	90	Laporan	60	-	-	-	60,00	67%	
				XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**36**	**Bulan**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	81	Jenis	89	-	-	-	89,00	110%	
				XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	297	Kali	143	-	-	-	143,00	48%	
					Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah	225	Kali	0	-	-	-	-	0%	
				XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	3600	Lembar	3600	-	-	-	3.600,00	100%	
				XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pembayaran Listrik, Sumber Daya Air Dan Jasa Komunikasi	36	Bulan	36	-	-	-	36,00	100%	
				XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan administrasi jasa perkantoran	36	Bulan	36	-	-	-	36,00	100%	
					Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	36	Bulan	0	-	-	-	-	0%	
				XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**678**	**Unit**	**678**	**-**	**-**	**-**	**678,00**	**100%**	

				XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala	135	Unit	48	-	-	-	48,00	36%	
					Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	75	Unit	0	-	-	-	-	0%	
				XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	51	Unit	23	-	-	-	23,00	45%	
				XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	361	Unit	0	-	-	-	-	0%	
					Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala	120	Unit	0	-	-	-	-	0%	
				XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**551**	**Unit**		**-**	**-**	**-**	**-**	**0%**	
				XXX Pengadaan Mebel	Jumlah Mebeulier yang diadakan	56	Paket	1	-	-	-	1,00	2%	
				XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainya yang Diadakan	21	Unit	6	-	-	-	6,00	29%	
				XXX Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Kantor yang diadakan	8	Unit	0	-	-	-	-	0%	

TABEL II. 1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**100 %**	**20,33**	**20,33%**	**20,33**	**20,33%**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100 %**		**100 %**	**65,72**	**65,72%**	**65,72**	**65,72**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	1	**50,00%**	1	**16,67**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1	**100,00%**	1	**33,33**	
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	**0,00**	
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1	**100,00%**	1	**33,33**	
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	**0,00**	
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		1 Laporan	1	**100,00%**	1	**33,33**	
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		4 Laporan	2	**50,00%**	2	**16,67**	
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**		**100 %**	**10,42**	**10,42%**	10,42	**10,42**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	113400 Orang/bulan		37600 Orang/bulan	21486	**57,14%**	21486	18,95	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	36 Dokumen		12 Dokumen	6	**50,00%**	6	16,67	
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		1 Laporan	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	6 Dokumen		2 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**100 %**	**1,39**	**1,39%**	1,39	1,39	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket		20 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		30 Laporan	5	**16,67%**	5	5,56	
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**		**100 %**	**0**	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		6 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**100 %**	**33,33**	**33,33**	33,33	33,33	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3600 Laporan		1200 Laporan	600	**50,00%**	600	16,67	
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6	**50,00%**	6	16,67	
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6	**50,00%**	6	16,67	
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100 %**		**100 %**	**11,11**	**11,11%**	11,11	11,11	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	135 Unit		45 Unit	4	**8,89%**	4	2,96	
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	34 Unit		17 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD**	**100 %**		**100 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan SD	**100 %**		**100 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP	**100 %**		**100 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	**100 %**		**100 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Putus Sekolah SD**	**100**		**0,15 %**	**0**	**0,00%**	0	0,00	
		Angka Kelulusan SD	**100 %**		**100 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
		Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik	**80 %**		**70 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 ruang		4 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	21 Ruang		7 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	312 Unit		98 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	42 Paket		14 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	30.000 Peserta Didik		10 Peserta Didik	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	198 Peserta Didik		66 Peserta Didik	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	705 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	705 Orang		235 Orang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	16900 Paket		5,5 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	76 Ruang		26 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	705 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	39 Ruang		15 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**0,25 %**		**0,35 %**	**0**	**0,00%**	0	0,00	
		Persentase Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik	**85 %**		**75 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
		Angka Kelulusan SMP	**100 %**		**100 %**	**0%**	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	9 Ruang		3 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	15 Ruang		5 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	6 Ruang		2 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	12 Ruang		4 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	6 Unit		2 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48 Unit		16 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34 ruang		14 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	3 Ruang		1 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	3 Paket		1 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	9 Paket		3 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	10.500 Peserta Didik		3,5 Peserta Didik	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	297 Peserta Didik		99 Peserta Didik	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	147 Satuan Pendidikan		49 Satuan Pendidikan	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	147 Orang		49 Orang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	147 Orang		49 Orang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	147 Satuan Pendidikan		49 Satuan Pendidikan	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	6 Ruang		2 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	11100 Paket		3,5 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9 Ruang		3 Ruang	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola**	**235 Unit**		**235 Unit**	**26**	**11,06%**	26	11,06	
		Persentase PAUD Terakreditasi	**67,23 %**		**58,72 %**	**0**	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	96 Unit		32 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	34 Unit		14 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	12 paket		4 Paket	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	32875 Peserta Didik		10875 Peserta Didik	5438	**50,00%**	5438	16,54	
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	705 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	118	**50,21%**	118	16,74	
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	705 Satuan Pendidikan		235 Satuan Pendidikan	118	**50,21%**	118	16,74	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	705 Orang		235 Orang	118	**50,21%**	118	16,74	
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dibina**	**6 Lembaga**		**6 Lembaga**	**1**	**16,67%**	1	16,67	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	18 Satuan Pendidikan		6 Satuan Pendidikan	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	19 Satuan Pendidikan		6 Satuan Pendidikan	4	**66,67%**	4	21,05	
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	6000 Peserta Didik		2 Peserta Didik	0	**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**	**98 %**		**96 %**		**0,00%**	0	0,00	
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**14.250**		**4650 Orang**	**1162**	**24,99%**	1162	8,15	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	3 Dokumen		1 Dokumen	0	**0,00%**	0	0,00	
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	150 Laporan		50 Laporan	25	**50,00%**	25	16,67	
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan**	**100 %**		**100 %**		**0,00%**	0	0,00	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan**	**4 Komunitas**		**4 Komunitas**	**1**	**25,00%**	1	25,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	12 Objek		4 Objek	2	**50,00%**	2	16,67	
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi**	**22,5 %**		**17,5 %**		**0,00%**	0	0,00	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang Didata**	**9 Laporan/Dokumen**		**3 Laporan / Dokumen**		**0,00%**	0	0,00	
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	6 Dokumen		2 Dokumen		**0,00%**	0	0,00	
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan**	**45 %**		**40 %**		**0,00%**	0	0,00	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan**	**45 cagar Budaya**		**25 Cagar Budaya**		**0,00%**	0	0,00	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	30 Objek		10 Objek		**0,00%**	0	0,00	
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola**	**31 Cagar Budaya**		**27 Cagar Budaya**		**0,00%**	0	0,00	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	6 Objek		2 Objek		**0,00%**	0	0,00	
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Peningkatan Pengunjung Museum**	**100 %**		**50 %**		**0,00%**	0	0,00	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023 (Kosong)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan		Catatan
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*	11
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten**	**800**		**200 Orang**	**50**	**25,00%**	50	6,25	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	4230 Unit		1400 Unit	700	**50,00%**	700	16,55	
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	3 Unit		1 Unit	0	**0,00%**	0	0,00	

Melihat dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, masih banyak kegiatan yang tidak terlaksana atau realisasinya masih rendah hal ini yang perlu mendapat perhatian dan strategi pelaksanaan yang tepat sasaran.

Dari 7 Program, 16 kegiatan dan 78 Sub Kegiatam yang direncanakan, yang mencapai tingkat realisasi minimal 50% sampai akhir Triwulan II (Juni 2024) adalah 15 Sub kegiatan, selebihnya belum terealisasi dan juga terealisasi di bawah 50%. Ada pula kegiatan yang memang belum terlaksana karena jadwal pelaksanaanya di Triwulan III dan IV. Tingkat capaian ini menunjukkan pelaksanaan urusan yang terkait, dicapai melalui dukungan penganggaran dan kerja keras seluruh *stakeholder* dalam mendukung realisasi sejumlah kegiatan tersebut. Untuk sejumlah target kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang yang tingkat pencapaiannya belum mencapai minimal 50% pada triwulan II tahun 2024, dilakukan rasionalisasi sebagaimana telah dilakukan *refocusing* anggaran. Serta masih diperlukan upaya yang lebih keras, fokus, dan terarah, dengan pertimbangan sejumlah analisa yang mempengaruhi untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang diharapkan pada tahun 2024.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut :

1). SPM pendidikan di kab. Sidenreng Rappang belum terpenuhi. Termasuk belum tersedianya data pemenuhan SPM yang *valid* dan *reliable.*
2). Masih rendahnya angka rata - rata lama sekolah di Kabupaten Sidenreng Rappang. 8,20 tahun pada tahun 2023. Artinya secara rata-rata penduduk Kab. Sidenreng Rappang yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 8,20 tahun atau hampir menamatkan kelas VIII.
3). Belum optimalnya harapan lama sekolah sehingga mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) kabupaten Sidenreng Rappang. 13,02 tahun pada

tahun 2023. Artinya penduduk Kab. Sidenreng Rappang diharapkan menamatkan pendidikan sampai jenjang SMA dan kuliah sampai semester 3.

4). Masih terdapat guru yang belum berijazah S1/D4 dan masih banyak guru yang belum memenuhi Standar Kompetensi.

5). Secara umum masih terjadi kekurangan Guru PNS pada sekolah-sekolah 3T. dan juga kurangnya Tenaga Pengawas Sekolah.

6). Perlu kerja sama berkelanjutan antara Stakeholder untuk menyediakan Sarana dan Prasarana Pendidikan yang layak.

7). Pemerintah Daerah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) dan Masyarakat butuh langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan budaya lokal sehingga Program Wajib Belajar 12 tahun bisa terlaksana secara maksimal.

8). Masih ada cagar budaya yang tidak terdata dan tidak terpelihara dengan baik.

9). Masih belum tersedia data Pendidikan Non Formal yang valid.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

3.1. Perubahan Kegiatan dan Kerangka Pendanaan

Bab ini memuat tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Rumusan rencana program dan kegiatan perubahan renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, adalah :

TABEL III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan				***385.257.928.553***				***387.248.069.825***	
1.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**280.406.016.753**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**273.507.276.450**	
1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**217.686.700**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**185.016.200**	
1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	2 Dokumen	8.816.700	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	2 Dokumen	8.816.700	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	11.345.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	11.345.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	9.773.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	9.773.300	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	16.107.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	16.107.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	93.070.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Dokumen	93.074.400	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Pangkajene sidenreng	4 Dokumen	53.573.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	4 Dokumen	20.898.800	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**279.346.207.553**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**272.681.323.750**	
1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Pangkajene sidenreng	37600 Orang/bulan	279.296.207.553	ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	37600 Orang/bulan	272.628.649.250	ASN Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Pangkajene sidenreng	12 Dokumen	41.674.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	12 Dokumen	35.674.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Pangkajene sidenreng	1 Laporan	3.050.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Laporan	7.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Pangkajene sidenreng	2 Dokumen	5.275.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	2 Dokumen	10.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**133.330.500**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**35.186.500**	
1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	20 Paket	4.985.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	20 Paket	4.985.500	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pangkajene sidenreng	30 Laporan	128.345.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	30 Laporan	30.201.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**120.000.000**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**5.000.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	1 Unit	35.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Unit	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	1 Unit	5.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1 Unit	5.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	6 Unit	80.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	6 Unit	-	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**500.000.000**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**511.962.000**	
1.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pangkajene sidenreng	1200 Laporan	1.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	1200 Laporan	1.500.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	105.048.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	105.048.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	393.452.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	12 Laporan	405.414.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**88.792.000**		**Pangkajene sidenreng**	**100%**	**88.788.000**	
1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Pangkajene sidenreng	45 Unit	63.792.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	45 Unit	63.788.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pangkajene sidenreng	17 Unit	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	Pangkajene sidenreng	17 Unit	25.000.000	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
1.01.02	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**	**Persentase Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD**	**Tersebar**	**100%**	**92.563.311.800**		**Tersebar**	**100%**	**102.879.880.975**	
		Persentase Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam		**100%**				**100%**		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
		Pendidikan SD								
		Persentase Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan SMP		**100%**				**100%**		
		Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Tidak Bersekolah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan		**100%**				**100%**		
1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**	**Angka Putus Sekolah SD**	**Tersebar**	**0,15%**	**53.799.793.800**		**Tersebar**	**0,15%**	**59.466.168.675**	
		Angka Kelulusan SD		**100%**				**100%**		
		Persentase Bangunan SD/MI Kondisi Baik		**70%**				**70%**		
1.01.02.2.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Tersebar	4 Ruang	800.000.000	Sekolah	Tersebar	4 Ruang	2.280.000.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	7 Ruang	586.600.000	Sekolah	Tersebar	7 Ruang	-	Sekolah
1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	98 Ruang	10.330.314.100	Sekolah	Tersebar	98 Ruang	7.685.882.650	Sekolah
1.01.02.2.01.0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Tersebar	14 Paket	1.730.000.000	Sekolah	Tersebar	14 Paket	2.345.000.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tersebar	10000 Peserta Didik	17.110.000	Sekolah	Tersebar	10 Peserta Didik	17.110.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tersebar	66 Peserta Didik	103.175.700	Pesrta Didik	Tersebar	66 Peserta Didik	295.974.200	Pesrta Didik
1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	29.234.300.000	Sekolah	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	31.011.686.825	Sekolah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.02.2.01.0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Tersebar	235 Orang	29.181.000	Sekolah	Tersebar	235 Orang	69.192.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersebar	1 Dokumen	20.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	728.204.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0039	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	197.392.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Tersebar	5500 Paket	5.084.500.000	Pesrta Didik	Tersebar	5,5 Paket	1.944.545.000	Pesrta Didik
1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Tersebar	26 Ruang	3.737.500.000	Sekolah	Tersebar	26 Ruang	4.882.150.000	Sekolah
1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	22.000.000	Pesrta Didik	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	72.000.000	Pesrta Didik
1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tersebar	15 Ruang	2.055.113.000	Sekolah	Tersebar	15 Ruang	7.937.032.000	Sekolah
1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**	**Angka Putus Sekolah SMP**	**Tersebar**	**0,35%**	**21.572.716.000**		**Tersebar**	**0,35%**	**28.181.549.300**	
		Persentase Bangunan SMP/MTs Kondisi Baik		**75,0%**				**75,0%**		
		Angka Kelulusan SMP		**100%**				**100%**		
1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	Tersebar	3 Ruang	520.000.000	Sekolah	Tersebar	3 Ruang	840.000.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	5 Ruang	430.000.000	Sekolah	Tersebar	5 Ruang	1.050.000.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	2 Ruang	200.000.000	Sekolah	Tersebar	2 Ruang	-	Sekolah
1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	Tersebar	4 Ruang	900.000.000	Sekolah	Tersebar	4 Ruang	2.670.000.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	Tersebar	2 Unit	100.000.000	Sekolah	Tersebar	2 Unit	-	Sekolah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	Tersebar	16 Unit	1.625.844.000	Sekolah	Tersebar	16 Unit	2.816.629.100	Sekolah
1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tersebar	14 Ruang	1.349.445.900	Sekolah	Tersebar	14 Ruang	5.031.635.600	Sekolah
1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	Tersebar	1 Ruang	300.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Ruang	100.000.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	Tersebar	1 Paket	100.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Paket	-	Sekolah
1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Tersebar	3 Paket	365.000.000	Sekolah	Tersebar	3 Paket	733.475.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	Tersebar	3500 Peserta Didik	15.174.200	Sekolah	Tersebar	3,5 Peserta Didik	15.174.200	Sekolah
1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Tersebar	99 Peserta Didik	431.569.400	Pesrta Didik	Tersebar	99 Peserta Didik	434.709.000	Pesrta Didik
1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	11.633.800.000	Sekolah	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	11.884.500.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Tersebar	49 Orang	51.042.500	Sekolah	Tersebar	49 Orang	51.042.500	Sekolah
1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Tersebar	49 Orang	50.000.000	Sekolah	Tersebar	49 Orang	229.992.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersebar	1 Dokumen	20.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	233.027.500	Sekolah
1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	100.000.000	Sekolah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	24.550.000	Sekolah	Tersebar	49 Satuan Pendidikan	55.568.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	Tersebar	2 Ruang	400.000.000	Sekolah	Tersebar	2 Ruang	114.000.000	Sekolah
1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Tersebar	3500 Paket	2.581.290.000	Pesrta Didik	Tersebar	3,5 Paket	811.195.000	Pesrta Didik
1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tersebar	3 Ruang	425.000.000	Sekolah	Tersebar	3 Ruang	1.010.601.400	Sekolah
1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**	**Jumlah Lembaga/Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Yang Dikelola**	**Tersebar**	**235 Unit**	**10.985.202.000**		**Tersebar**	**235 Unit**	**9.715.910.500**	
		Persentase PAUD Terakreditasi		**58,72%**				**58,72%**		
1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	Tersebar	23 Unit	3.212.117.000	Sekolah	Tersebar	23 Unit	1.955.525.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0003	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	Tersebar	14 Unit	1.275.085.000	Sekolah	Tersebar	14 Unit	669.333.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0012	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang Tersedia	Tersebar	4 Paket	200.000.000	Sekolah	Tersebar	4 Paket	700.000.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0013	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	Tersebar	10875 Peserta didik	20.000.000	Sekolah	Tersebar	10875 Peserta didik	20.000.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	200.000.000	Sekolah	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	137.000.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	5.980.000.000	Sekolah	Tersebar	235 Satuan Pendidikan	5.973.600.000	Sekolah
1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	Tersebar	235 Orang	28.000.000	Sekolah	Tersebar	235 Orang	28.000.000	Sekolah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersebar	1 dokumen	20.000.000	Sekolah	Tersebar	1 dokumen	182.452.500	Sekolah
1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	Sekolah	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	Sekolah
1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah Lembaga (PKBM)/ Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dibina**	**Tersebar**	**6 Lembaga**	**6.205.600.000**		**Tersebar**	**6 Lembaga**	**5.516.252.500**	
1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	200.000.000	Lembaga/PKBM/ LKP	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	200.000.000	Lembaga/PKBM/ LKP
1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	1.005.600.000	Lembaga/PKBM/ LKP	Tersebar	6 Satuan Pendidikan	1.146.800.000	Lembaga/PKBM/ LKP
1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Tersebar	1 Dokumen	20.000.000	Lembaga/PKBM/ LKP	Tersebar	1 Dokumen	119.452.500	Lembaga/PKBM/ LKP
1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	Lembaga/PKBM/ LKP	Tersebar	1 Dokumen	1.100.000.000	Lembaga/PKBM/ LKP
1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	Tersebar	2 Peserta Didik	4.930.000.000	Masyarakat/Lembaga	Tersebar	2 Peserta Didik	2.950.000.000	Masyarakat/Lembaga
1.01.04	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**	**Persentase Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV**	**Tersebar**	**96%**	**11.288.600.000**		**Tersebar**	**96%**	**9.898.897.800**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	**Jumlah PTK yang Didistribusikan ke Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**	Tersebar	**4650 Orang**	**11.288.600.000**		Tersebar	**4650 Orang**	**9.898.897.800**	
1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersebar	1 Dokumen	50.000.000	PTK	Tersebar	1 Dokumen	52.200.000	PTK
1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Tersebar	50 Laporan	11.238.600.000	PTK	Tersebar	50 Laporan	9.846.697.800	PTK
2.22.02	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**	**Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dikembangkan**	**Tersebar**	**100%**	**200.000.000**		**Tersebar**	**100%**	**294.000.000**	
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Dilestarikan**	**Tersebar**	**4 Komunitas**	**200.000.000**		**Tersebar**	**4 Komunitas**	**294.000.000**	
2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Tersebar	4 objek	200.000.000	Pelaku Seni	Tersebar	4 objek	294.000.000	Pelaku Seni
2.22.04	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**	**Persentase Dokumen Sejarah yang Direvitalisasi**	**Tersebar**	**17,5%**	**150.000.000**		**Tersebar**	**17,5%**	**103.350.000**	
2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sejarah Lokal yang Didata**	**Tersebar**	**3 Dokumen/ Laporan**	**150.000.000**		**Tersebar**	**3 Dokumen/ Laporan**	**103.350.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	Tersebar	2 Dokumen	150.000.000	Masyarakat	Tersebar	2 Dokumen	103.350.000	Masyarakat
2.22.05	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**	**Persentase Cagar Budaya yang Dimanfaatkan**	**Tersebar**	**40%**	**150.000.000**		**Tersebar**	**40%**	**423.820.000**	
2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Ditetapkan**	**Tersebar**	**25 Cagar Budaya**	**50.000.000**		**Tersebar**	**25 Cagar Budaya**	**23.820.000**	
2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	Tersebar	10 Objek	50.000.000	Pemda SIDRAP	Tersebar	10 Objek	23.820.000	Pemda SIDRAP
2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota yang Dikelola**	**Tersebar**	**27 Cagar Budaya**	**100.000.000**		**Tersebar**	**27 Cagar Budaya**	**400.000.000**	
2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Tersebar	2 Objek	100.000.000	Pemda SIDRAP	Tersebar	2 Objek	400.000.000	Pemda SIDRAP
2.22.06	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**	**Persentase Peningkatan Pengunjung Museum**	**Pangkajenne sidenreng**	**50%**	**500.000.000**		**Pangkajenne sidenreng**	**50%**	**140.844.600**	
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengunjung Museum Kabupaten**	**Pangkajenne sidenreng**	**200 Orang**	**500.000.000**		**Pangkajenne sidenreng**	**200 Orang**	**140.844.600**	
2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Pangkajenne sidenreng	1400 Unit	200.000.000	Pemda SIDRAP	Pangkajenne sidenreng	1400 Unit	34.844.600	Pemda SIDRAP
2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	Pangkajenne sidenreng	1 Unit	300.000.000	Pemda SIDRAP	Pangkajenne sidenreng	1 Unit	106.000.000	Pemda SIDRAP

BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 disusun sebagai dokumen perencanaan yang meliputi program dan kegiatan yang di dalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran. Pelaksanaan penyusunan serta penetapan program dan kegiatan pembangunan di dalam Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2024 bertujuan untuk mewujudkan Perencanaan Pembangunan yang berkualitas dan profesional di bidang urusan Pendidikan Dan Kebudayaan. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2024-2026 tersebut, di dalam pelaksanaannya harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi.

Sehubungan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan yang ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Renja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2024, harus dilaksanakan secara konsisten, tertib dan terpadu melalui kerjasama dan koordinasi antar sekretariat dan bidang.
2. Dalam mempercepat perencanaan yang aspiratif upaya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan perlu terus ditingkatkan, mulai dari tahapan perencanaan sampai pelaksanaan pembangunan, sehingga diharapkan mereka mempunyai rasa memiliki dan bertanggungjawab terhadap hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024 masih belum sempurna, sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, karena pemahaman tentang aturan dan tata cara penyusunan Renja masih sering belum sepahaman.
4. Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan SKPD dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Propinsi maupun yang bersumber dari APBN.

5. Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) SKPD, di dalam proses penyusunannya harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten, RPJMD Kabupaten, RKPD Kabupaten, RKPD-Perubahan dan Renstra Dinas).
6. Renja Perubahan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Tahun 2024, harus menjadi dasar bagi pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun berikutnya

Semoga Rencana Kerja Perubahan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pemerintah dibidang Pendidikan dalam rangka ***Meningkatkan Akses dan Kualitas layanan Pendidikan serta Kualitas Budaya Lokal di Kabupaten Sidenreng Rappang.***

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan,

FAIZAL SEHUDDIN, S.STP., M.Adm.KP.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19801006 200012 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN
TAHUN 2024



DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA PERKEBUNAN DAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Kuasa atas Bimbingan dan HidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini disusun dengan harapan semoga dapat memberikan gambaran keadaan dan informasi rencana kerja untuk Tahun 2024 pada OPD Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategi (RENSTRA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 sampai dengan Tahun 2026.

Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan ini masih banyak terdapat kekurangan dan Kelemahan Baik dari segi penulisan maupun kualitas materi. Oleh sebab itu saran dan masukan yang bersifat membangun sangat kami perlukan demi penyempurnaannya.

Semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka pembangunan sektor Pertanian khususnya dan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada umumnya.

Pangkajene Sidenreng, 4 Juli 2024

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kab. Sidenreng Rappang

Ibrahim, SP
NIP. 19720223 200003 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I. PENDAHULUAN 1
I.1 Latar Belakang 1
I.2 Landasan Hukum 2
I.3 Maksud dan Tujuan 5
I.4 Sistematika Penulisan 6
BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 7
II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 7
II.2 Isu-isu Penting Penyelengggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat 34
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 43
III.1 Rencana Kerja dan Pendanaan 43
BAB IV. PENUTUP 54
IV.1 Kaidah Pelaksanaan 54
IV.2 Rencana Tindak Lanjut 54

DAFTAR TABEL

Tabel II.1a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang	14
Tabel II.1b	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang	24
Tabel III.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Sidenreng Rappang	44

BAB I.
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang bersumber dari Rencana Strategi (RENSTRA) OPD, dengan mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja OPD.

Proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi RKPD harus berdasarkan hasil verifikasi Renja OPD sehingga antara renja OPD dengan dokumen RKPD mempunyai keterkaitan yang sama-sama disusun berdasarkan program prioritas pembangunan daerah yang berpedoman pada RPJMD.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2024 Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang disusun berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026. Dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 berpedoman pada visi dan misi RPJPD Kabupaten Sidenreng Rapang Tahun 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu *"Terwujudnya Sidenreng Rappang sebagai salah satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025'*, dijabarkan pada 3 visi yang salah satunya mendukung pelaksanaan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yaitu **Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis**. Pusat pengembangan Agribisnis dimaksud mencakup 4 (empat) kegiatan utama yaitu usaha tani, pengolahan, pemasaran dan jasa-jasa.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kab. Sidenreng Rappang yang sasaran pelaksanaan senantiasa diletakkan pada pengarahan potensi sumber daya alam dan strategi pembangunan daerah yang dikembangkan dan disinergikan dengan sumber daya manusia. Pendekatan ini dilakukan secara terintegrasi dan dimaksudkan agar

semua komponen dalam pembangunan pertanian terakumulasi dan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
3) Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau
4) Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

I.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 berdasarkan pada beberapa peraturan sebagai landasan atau rujukan, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggantu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerahdan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 23 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2023 Nomor 23);
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Selatann Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);

16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13);
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor);

I.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud disusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

a. Memberikan gambaran terhadap Rencana Kerja Tahun 2024 yang akan dibahas dalam rumusan rencana Kegiatan berdasarkan Program Prioritas.
b. Pembahasan Kerangka Regulasi pembiayaan ke dalam kegiatan prioritas.
c. Sebagai bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis,komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunannya Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

a. Terciptanya sinergisitas antara bidang dalam lingkup satuan kerja perangkat daerah Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.
b. Terakumulasinya usulan hasil musrenbang dalam kerangka aspiratif masyarakat Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.
d. Mengkompilasi berbagai usulan program/kegiatan tentang pelaksanaan kegiatan urusan pertanian dan pangan berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.
e. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi hasil pembangunan.
f. Tercapainya target pembangunan dengan menggunakan sumber daya secara efesien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

I.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya;

Bab II: Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Bab ini berisi tentang review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah;

Bab III: Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Urusan/bidang urusan/program/kegiatan beserta indikator keberhasilan program serta penjelasan kegiatan beserta output dan outcome yang diinginkan, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi uraian berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II.
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.

Adapun total anggaran belanja Tahun 2024 sebesar Rp 24.171.162.000,- yang bersumber dari APBD DAU dan DAK yang terdiri dari 6 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan dengan realisasi sampai pada triwulan II yaitu realisasi keuangan Rp 5.487.835.363,- (22,70%) dan realisasi fisik 30,25%. Hal ini disebabkan adanya usulan kegiatan tambahan yang berfokus stunting, Pokok Pikiran Anggota DPRD dan kegiatan belum terealisasi 100% sampai pada triwulan II tahun 2024 dikarenakan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (Renja) Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan ini menyajikan hasil pelaksananaan rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pencapaian perencanaan strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana terdapat pada Tabel II.1.

Hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terdiri :

1. Realisasi program yang belum memenuhi target kinerja/hasil/keluaran yang direncanakan yaitu :
    1) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka

Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 1,00% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

2) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
3) Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun seusia dengan Angka Kecukupan Gizi dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
4) Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan kegiatan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan tidak dianggarkan pada tahun 2024.
5) Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan tidak dianggarkan pada tahun 2024.
6) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target kinerja capaian sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 14,29% disebabkan proses administrasi.
7) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan target target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% yang terealisasi 0,13% disebabkan proses administrasi.

8) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2024-2026 yaitu 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi.
9) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
10) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% yang terealisasi 14,29% disebabkan proses administrasi.
11) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan target 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
12) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan target 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi.
13) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target 100% yang terealiasi 10,42% disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
14) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian dengan target 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.
15) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana dengan target 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

16) Program Penyuluhan Pertanian dengan kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dengan target 100% tapi belum terealisasi disebabkan proses administrasi dan keterbatasan waktu serta regulasi.

Berdasarkan rincian kegiatan diatas yang belum melebihi target kinerja secara umum dikarenakan sisa target yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Program dan Kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan untuk target kinerja capaian program tahun 2024-2026 secara keseluruhan belum mencapai target atau melebihi target kinerja dan akan dilaksanakan sisa target kinerja pada tahun selanjutnya.

Pada target kinerja capaian program sampai dengan tahun 2021-2023 yang belum mencapai target yaitu:

1) Program Pengeloaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan target kinerja capaian program tahun 2021-2023 yaitu 7,50% yang terealisasi 7,00% disebabkan tidak dianggarkan pada tahun 2023.
2) Program Penanganan Kerawanan Pangan target kinerja capaian program tahun 2021-2023 yaitu 100% yang terealisasi 5,88% disebabkan kurangnya akses sarana transportasi, pangan, kesehatan maupun pendidikan di tingkat kelurahan/desa.
3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2021-2023 yaitu 100% yang terealisasi 19,96% disebabkan proses administrasi, keterbatasan waktu serta regulasi.
4) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2021-2023 yaitu 100% dan terealisasi 66,67% disebabkan pada tahun 2023 proses perizinan usaha pertanian di pusatkan ke dinas yang terkait dengan perizinan.
5) Program Penyuluhan Pertanian dengan target kinerja capaian program tahun 2021-2023 yaitu 1:15 dan terealisasi 1:20 atau sebesar 25% disebabkan banyaknya penyuluh pertanian yang pensiun dan masih kurang

penerimaan SDM yang baru sedangkan kelompok tani tiap waktu bertambah dan mengalami pemekaran membentuk kelompok tani baru.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
   1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan target kinerja capaian tahun 2021-2023 yaitu 100% dan terealisasi 100%.
   2) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan target kinerja capaian tahun 2021-2023 yaitu 100% dan terealisasi 100%.
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, yaitu:
   1) Program Peningkatan Diverisifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan target kinerja capaian tahun 2021-2023 yaitu 100% dan terealisasi 126,51% disebabkan ketersediaan pangan komoditi padi dan telur yang berlebih.
   2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan target kinerja capaian tahun 2021-2023 yaitu 100% dan terealisasi 139,64% disebabkan adanya usulan pokir DPRD.
4. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan, yaitu:
   a. Adanya perubahan nomenklatur program dan kegiatan sehingga sedikit menghambat pelaksanaan kegiatan dan realisasi keuangan perangkat daerah.
   b. Kurang memadainya sarana dan prasarana (peralatan komputer) sehingga mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas.
   c. Kurangnya sumber daya manusia untuk menunjang pencapaian kinerja pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidereng Rappang.
   d. Kurang maksimalnya kegiatan pembinaan akibat pembatasan gerak dan keterbatasan dana operasional.
   e. Kesalahan prediksi target dan tidak adanya tindak lanjut kegiatan juga menjadi faktor penyebab.

f. Adanya perubahan anggaran untuk dialokasikan untuk penanganan Covid-19.

5. Implikasi yang timbul terhadap target Capaian Program Renstra SKPD

Implikasi yang timbul terhadap capaian Program Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan tahun 2023 yaitu :

a. Program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan perangkat daerah.
b. Tidak tercapainya target kinerja program berimplikasi terhadap target kinerja sasaran dan kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD yang telah ditetapkan dalam Renstra.
c. Tersedianya informasi/data yang memadai dalam penyusunan dokumen perencanaan.

6. Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran yang perlu untuk mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya target yaitu alokasi dana yang tidak memadai untuk melaksanakan kegiatan agar target tercapai.

a. Untuk memaksimalkan kinerja, kegiatan yang bersifat pembinaan diperlukan biaya operasional yang cukup.
b. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para pelaksana kegiatan (PPTK) yang menangani kegiatan.
c. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di kabupaten/kota.
d. Kerja sama dengan pihak stakeholder maupuh SKPD, terkait dengan data dan informasi yang dibutuhkan hendaknya lebih ditingkatkan, sehingga ketidaksesuaian data dan informasi dapat diminimalisir, yang selanjutnya perencanaan dan pengambilan kebijakan manajemen kepegawaian semakin tepat.
e. Untuk kegiatan Infrastruktur Pertanian terutama yang sumber dananya dari APBN perlu disiapkan dana pendamping untuk desain, pengawasan dan

operasional dalam rangka mendukung program prioritas kabinet kerja bidang pertanian.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja perubahan Dinas Tanaman Pangan Perkebunan Hortikultura dan Ketahanan Pangan s/d Tahun 2023 (tahun berjalan) pada tabel II.1.

Tabel II. 1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 9 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*		*5*		*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=5*	*10=(9/4*100)*
2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**											
2.09	**Pangan**											
2.09.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**33.246.036.000**	**100,00**	**19.976.652.892**				**100,00**	**100,00**
2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**180.000.000**	**100,00**	**78.638.100**				**104,55**	**104,55**
2.09.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	16	115.000.000	17	54.547.600				17,00	106,25
2.09.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6	65.000.000	6	24.090.500				6,00	100,00
2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**28.498.517.000**	**96,60**	**17.640.915.729**				**96,60**	**96,60**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/ Bulan	317	28.370.517.000	317	17.545.945.101				317,00	100,00
2.09.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36	128.000.000	24	94.970.628				24,00	66,67
2.09.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**72.000.000**	**-**	**-**				**-**	**-**
2.09.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dan Jenis Barang Milik Daerah yang Disediakan Jasa Jaminan	Unit	16	72.000.000	-	-				-	-
2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**%**	**100**	**624.174.000**	**100**	**798.299.457**				**100,00**	**100,00**
2.09.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.412.000	3	1.960.000				3,00	100,00
2.09.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3	617.762.000	3	796.339.457				3,00	100,00
2.09.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**303.754.000**	**23,44**	**106.492.000**				**23,44**	**23,44**
2.09.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang Diadakan	Unit	35	87.654.000	-	-				-	-
2.09.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dibangun	Unit	-	-	-	-				-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	29	216.100.000	15	106.492.000				15,00	51,72
2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100**	**2.483.380.000**	**100,00**	**1.108.860.921**				**100,00**	**100,00**
2.09.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3	11.510.000	3	7.987.200				3	100,00
2.09.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36	356.826.000	36	169.735.721				36	100,00
2.09.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Laporan	3	48.060.000	3	7.040.000				3	100,00
2.09.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	2.066.984.000	3	924.098.000				3	100,00
2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah**	**%**	**100**	**1.084.211.000**	**100**	**243.446.685**				**72,65**	**72,65**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	158	210.420.000	113	208.781.685				113	71,52
2.09.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	9	22.747.000	7	20.000.000				7	77,78
2.09.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	56	33.747.000	42	14.665.000				42	75,00
2.09.02	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Penguatan Cadangan Pangan**	**%**	**7,50**	**2.000.000.000**	**7,00**	**2.409.483.600**				**93,33**	**93,33**
2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penyediaan Infrastruktur Pangan**	**%**	**100**	**2.000.000.000**	**150,00**	**2.409.483.600**				**150,00**	**150,00**
2.09.02.2.01.01	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang Dibangun	Unit	2	2.000.000.000	3	2.409.483.600				3,00	150,00
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Energi dan Protein per kapita**	**%**	**94,00**	**4.305.651.200**	**118,92**	**1.807.121.900**				**126,51**	**126,51**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Cakupan Ketersediaan Informasi Pasokan Harga dan Akses Pangan**	**%**	**100**	**1.076.302.000**	**90,70**	**68.621.900**				**90,70**	**90,70**
2.09.03.2.01.01	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Laporan	3	40.808.000	3	41.611.300				3	100,00
2.09.03.2.01.04	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Dokumen	36	25.869.000	36	27.010.600				36	100,00
2.09.03.2.01.05	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok Lumbung Pangan Desa yang Dibina	Kelompok	4	565.000.000	-	-				-	-
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Skor Pola Pangan Harapan**		**92,50**	**3.993.143.200**	**81,41**	**1.738.500.000**				**83,33**	**83,33**
2.09.03.2.04.01	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	3	89.007.200	3	69.798.900				3	100,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.04.02	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Laporan	3	3.904.136.000	2	1.668.701.100				2	66,67
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**%**	**100**	**94.146.000**	**5,88**	**34.277.900**				**5,88**	**5,88**
2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**	**Peta FSVA yang Tersusun**	**%**	**100**	**162.911.000**	**100,00**	**27.087.900**				**100,00**	**100,00**
2.09.04.2.01.01	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	Dokumen	3	162.911.000	3	27.087.900				3,00	100,00
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Lokasi Rawan Pangan yang Tertangani**	**%**	**100**	**65.000.000**	**-**	**7.190.000**				**-**	**-**
2.09.04.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Laporan	3	65.000.000	2	7.190.000				2,00	66,67
3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**											
3.27	**Pertanian**											
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Persentase Keteserdiaan Sarana Pertanian**	**%**	**100**	**468.205.738.090**	**139,64**	**10.655.217.912**				**139,64**	**139,64**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**%**	**100**	**16.348.263.000**	**25,10**	**10.655.217.912**				**25,10**	**25,10**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02.2.01.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6	14.262.514.000	6	8.793.768.062				6	100,00
3.27.02.2.01.02	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	6	2.085.749.000	6	1.861.449.850				6	100,00
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**89.400.793.625**	**19,96**	**12.882.501.775**				**19,96**	**19,96**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**94.975.000**	**100,00**	**31.887.500**				**100,00**	**100,00**
3.27.03.2.01.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	36	94.975.000	36	31.887.500				36,00	100,00
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100**	**24.534.411.000**	**40,90**	**12.850.614.275**				**40,90**	**40,90**
3.27.03.2.02.01	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi, dan Dipelihara	Unit	31	2.300.000.000	9	777.222.000				9	29,18
3.27.03.2.02.02	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	141	8.035.800.000	28	2.367.784.800				28	19,86

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02.03	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	56	9.010.000.000	47	6.042.244.300				47	83,93
3.27.03.2.02.04	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	750.000.000	5	589.549.000				5	71,43
3.27.03.2.02.05	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Long Storage	Jumlah Long Storage yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	701.200.000	5	584.330.000				5	71,43
3.27.03.2.02.08	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	7	1.805.000.000	6	1.938.679.975				6	85,71
3.27.03.2.02.09	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	3	1.932.411.000	3	550.804.200				3	100,00
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**%**	**100**	**4.211.764.000**	**100,00**	**517.182.706**				**100,00**	**100,00**
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**%**	**100**	**4.211.764.000**	**100,00**	**517.182.706**				**100,00**	**100,00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.05.2.01.01	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	2.100	1.447.646.000	2.100	517.182.706				2.100	100,00
3.27.06	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Persentase Penerbitan Izin Usaha Pertanian**	**%**	**100**	**33.150.000**	**66,67**	**13.296.600**				**66,67**	**66,67**
3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penerbitan Izin Usaha Pertanian**	**%**	**100**	**33.150.000**	**66,67**	**13.296.600**				**66,67**	**66,67**
3.27.06.2.01.02	Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian	Dokumen	3	33.150.000	2,00	13.296.600				2	66,67
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Rasio Penyuluh Pertanian terhadap Pelaku Utama Pertanian, Penyuluh/KEP**		**1:15**	**12.616.549.700**	**1:20**	**5.617.919.350**				**25,00**	**25,00**
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Pelaksanaan Penyuluh Pertanian**	**%**	**100**	**12.616.549.700**	**67,43**	**5.617.919.350**				**67,43**	**67,43**
3.27.07.2.01.01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	33	511.702.000	33	240.104.000				33	100,00
3.27.07.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	6.002	5.267.515.700	4.023	2.398.138.700				4.023	67,03

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021 - 2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021 - 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2021- 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.07.2.01.03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	33	6.338.779.000	33	2.866.856.900				33	100,00
3.27.07.2.01.04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Badan Milik Petani yang Dibentuk	Unit	2	36.790.000	2	14.248.750				2	100,00
3.27.07.2.01.05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	3	461.763.000	4	98.571.000				4	133,33

Tabel II.1. b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	*2*	*3*		*4*	*5*	*6*	*7*	*8=(7/6)*	*9=7*	*10=(9/4*100)*
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)**	**%**	**1.065,30**		**33,33**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seusia dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**	**%**	**100,00**		**3,00**	**1,00**	**33,33**	**1,00**	**1,00**
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Laporan	3,00		-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Laporan	3,00		2,00	1,00	50,00	1,00	33,33
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Laporan	10,00		-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Laporan	36,00		-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00		1,00	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Laporan	3,00		-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Dokumen	36,00		-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Dokumen	6,00		-	-	-	-	-
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**%**	**100,00**		**33,33**	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Ton	12,00		4,00	-	-	-	-
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**%**	**100,00**		**16,67**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Dokumen	6,00		1,00	-	-	-	-
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**	**%**	**20,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten**	**%**	**100,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Laporan	3,00		-	-	-	-	-
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00		-	-	-	-	-
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan yang Aman Dikomsumsi Sesuai Standar**	**%**	**85,00**		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten**	**%**	**100,00**		-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	3,00		-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Dokumen	3,00		-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Laporan	3,00		-	-	-	-	-
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,00**		**100,00**	**4,78**	**4,78**	**4,78**	**4,78**
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**		**33,33**	**14,29**	**42,86**	**14,29**	**14,29**
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	15,00		5,00	2,00	40,00	2,00	13,33

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	6,00		2,00	1,00	50,00	1,00	16,67
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**		**2,61**	**0,13**	**5,13**	**0,13**	**0,13**
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	4.452,00		105,00	-	-	-	-
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36,00		12,00	6,00	50,00	6,00	16,67
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**	**100,00**		**33,33**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100,00**		**34,04**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	37,00		10,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10,00		6,00	-	-	-	-
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**%**	**100,00**		**33,33**	**14,29**	**42,86**	**14,29**	**14,29**
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	36,00		12,00	6,00	50,00	6,00	16,67
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**%**	**100,00**		**33,33**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	**Unit**	93,00		31,00	-	-	-	-
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	81,00		27,00	-	-	-	-
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	3,00		1,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**	**%**	**100,00**		**596,06%**	**0,00%**	**-**	**-**	**-**
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**%**	**100,00**		**33,33**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Laporan	6,00		2,00	-	-	-	-
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Laporan	12,00		4,00	-	-	-	-
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**	**%**	**100,00**		**100,00**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian**	**%**	**100,00**		**33,33**	**10,42**	**31,25**	**10,42**	**10,42**
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Laporan	36,00		12,00	5,00	41,67	5,00	13,89
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	6,00		2,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Unit	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian**	**%**	**100,00**		**27,89**	**-**	**-**	**-**	**-**
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	24,00		1,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	57,00		18,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15,00		5,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	15,00		5,00	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Unit	4,00		2,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Unit	32,00		10,00	-	-	-	-
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**	**%**	**100,00**		**100,00**	-	-	-	-
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**%**	**100,00**		**33,33**	-	-	-	-
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Ha	1.500,00		500,00	-	-	-	-
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Ha	150,00		50,00	-	-	-	-
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**	**%**	**7,39**		**2,46**	-	-	-	-
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**%**	**100,00**		**27,41**	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang	Unit	33,00		11,00	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dan Desa	Ditingkatkan Kapasitasnya								
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Unit	75,00		15,00	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Unit	11,00		3,00	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Unit	9,00		5,00	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang	60,00		15,00	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Unit	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Unit	3,00		1,00	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Dokumen	3,00		3,00	-	-	-	-

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah apdalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategi adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal yang tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis dapat diperoleh melalui analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun anallisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman di masa lima tahun mendatang.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan berkedudukan sebagai unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang didasarkan pada Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 71 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan. Dalam struktur organisasi perangkat daerah baru ini setiap bidang dibedakan berdasarkan subsektor yang ditangani, yaitu Bidang Tanaman Pangan yang menangani sub sektor tanaman pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan yang menangani sub sektor Hortikulturan dan Perkebunan, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian yang menangani sub sektor Prasarana dan Sarana Pertanian, Bidang Ketahanan Pangan yang menangani sub sektor ketahanan pangan, Bidang Penyuluhan Pertanian yang menangani sub sektor penyuluhan Pertanian. Bentuk organisasi ini memungkinkan adanya penanganan yang lebih fokus terhadap masing-masing sub sektor serta mempermudah jalur koordinasi dan konsultasi dengan instansi vertikal sehingga diharapkan pencapaian tujuan organisasi lebih efektif.

Berdasarkan permasalahan dan hasil telaahan yang telah dilakukan, maka isu-isu untuk bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek seperti: 1) perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan; 2) peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan; 3) ketersediaan infrastruktur, dan sarana produksi pertanian; 4) alih fungsi lahan serta status dan kepemilikan lahan; 5) lemahnya kapasitas

kelembagaan petani dan penyuluh pertanian; 6) akses petani terhadap permodalan; 7) perbaikan citra petani dan pertanian agar kembali diminati generasi penerus; 8) peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi seimbang berbasis pada pangan lokal; 9) peningkatan distribusi, harga dan akses pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; 10) penjaminan stabilitas harga dan pasokan pangan; dan 11) dampak pandemic *covid-19*. Isu-isu strategis tersebut dapat diurai sebagai berikut:

1. ***Perubahan Iklim Global dan Meningkatnya Kerusakan Lingkungan***

   Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut serta peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celcius, sehingga diprediksi akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen per tahun.

   Di sektor pertanian dampak lanjutan dari perubahan iklim adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan keanekaragaman hayati, eksplosi hama penyakit serta pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena itu diperlukan upaya khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir dan kekeringan.Namun ditingkat lapangan kemampuan para petugas lapangan dan petani dalam memahami informasi prakiraan iklim masih sangat terbatas sehingga kurang mampu melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta melakukan langkah antisipasi dan adaptasi yang diperlukan.

2. ***Peningkatan produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang berkelanjutan***

   Kondisi produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan peningkatan produksi pertanian. Selanjutnya untuk

meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian strategis. Hilirisasi mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari pengolahan sampai penanganan dan pemasaran hasil pertanian.

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan masih belum mampu mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, melaksanakan prinsip-prinsip *Good Agriculture Practices* (GAP) dan *Good Handling Practices* (GHP), serta mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah lingkungan.

3. *Ketersediaan Infrastruktur, dan Sarana Produksi Pertanian*

a. Jaringan Irigasi

Kurangnya pembangunan waduk dan jaringan irigasi yang baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya dukung irigasi bagi petani sangat menurun. Kerusakan terutama diakibatkan banjir dan erosi serta desakan pemukinan dan campur tangan manusia menyebabkan kerusakan sumber daya alam di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan jaringan irigasi hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah aliran sungai, pemeliharaan jaringan yang sudah ada, pengembangan sumber-sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan bendungan serta pemanfaatan sumber air tanah, danau, rawa dan air hujan.

b. Jalan Usaha Tani/Jalan Pertanian/Jalan Produksi

Jalan usahan tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau ke unit pengolahan

c. Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih terbatas adalah jalan

usahatani, jalan produksi, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan *grennhouse* untuk penangkaran benih dan bibit, klinik konsultasi kesehatan tanaman dan hewan, balai informasi dan promosi pertanian, serta pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus dihadapi kedepan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana yang dibutuhkan petani ini dalam jumlah yang cukup dan berada dekat dengan sentra produksi dan biaya pelayanan yang terjangkau.

d. Di sisi sarana produksi, permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya benih/bibit unggul yang bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum berkembangnya usaha penangkaran benih/bibit secara luas disentra produksi.

Pupuk merupakan sarana produksi yang seringkali menjadi langkah pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi, dengan keterbatasan penyediaan pupuk kimia ternyata pengetahuan dan kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk organik sendiri sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang.

Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih unggul dan bermutu, menumbuh kembangkan kelembagaan penyedia jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi dan meningkatkan pemakaian pupuk organik serta mendorong petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang ramah lingkungan.

4. *Alih Fungsi Lahan Serta Status dan Luas Kepemilikan Lahan*

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut disebabkan antara lain, meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas yang kuat

dalam bentuk sertifkat, sehingga lahan belum bisa dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui perbankan.

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas garapan usahatani sehingga kegiatan ushatani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin tingkat kehidupan yang layak baginya.

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya kepemilikan dan lemahnya penguasaan lahan adalah bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas usahatani, penataan kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui perencanaan dan pengendalian tata ruang, regulasi atau peraturan, meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta pengendalian pertumbuhan penduduk.

5. ***Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Petani dan Penyuluh Pertanian***

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan sebagian besar berorientasi hanya mendapatkan fasilitas pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesbilitas terhadap berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat berintegrasi dalam koperasi yang di pedesaan.

6. ***Keterbatasan Akses Petani terhadap Permodalan***

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan pemupukan modal melalui tabungan dan investasi.Selain itu petani juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses

sumber permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan yang dipersyaratkan.

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga perbankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar di perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga mandiri milik masyarakat petani perdesaan.

7. ***Perbaikan Citra Petani dan Pertanian Agar Kembali Diminati Generasi Penerus***

Belum berkembangnya agroindustri di perdesaan, sehingga usaha tani masih dominan di aspek produksi *on-farm* dengan tingkat pendapatan yang relatif kecil dan belum berkembangnya usaha jasa pelayanan permodalan, dan teknologi, menyebabkan citra petani dan pertanian lebih sebagai aktivitas sosial budaya tradisional, bukan sosial ekonomi yang dinamis dan menantang. Kondisi ini pada akhirnya kurang menarik minat generasi muda di perdesaan untuk bekerja dan berusaha di bidang pertanian, terlebih bagi mereka yang telah mengikuti pendidikan sekolah menengah ke atas. Oleh karena itu ke depannya perlu upaya pemantapan pengembangan agroindustri di perdesaan. Selain itu, perlu juga mendorong pengembangan mekanisasi pertanian (alsintan tepat guna) agar bidang pertanian lebih menarik generasi muda selain untuk meningkatkan produktivitas, kualitas, nilai tambah, efisiensi dan daya saing produksi komoditas pertanian.

8. ***Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Konsumsi Pangan Menuju Gizi Seimbang Berbasis pada Pangan Lokal***

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami banyak perkembangan.Faktor penyebab belum berkembangnya pangan lokal adalah : (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah

ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal.

9. ***Pemantapan Ketersediaan Pangan dan Kerawanan Pangan***

Kapasitas produksi lokal/domestik, menghadapi permasalahan antara lain: (a) laju peningkatan produksi pangan cenderung melandai sedangkan laju pertambahan penduduk lebib besar dari 2% setiap tahunnya; (b) belum berkembangnya kapasitas produksi pangan daerah dengan teknlogi spesifik lokasi karena hambatan infrastruktur pertanian; (c) petani umumnya skala kecil (kurang dari 0,5 hektar), aksesibilitasnya terbatas terhadap sumber permodalan, teknologi, sarana produksi dan pasar relatif sangat kurang; (d) banyak dijumpai kasus terhambatnya distribusi sarana produksi seperti pupuk bersubsidi; dan (e) lambatnya penerapan teknologi akibat kurang insentif ekonomi dan masalah sosial petani.

Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran pertanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan) memerlukan sistem pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya: (a) sistem cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan, (b) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (c) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (d) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui optimalisasi Gapoktan dan Poktan ataupun lembaga usaha lainnya.

Timbulnya kerawanan pangan disebabkan karena produksi pangan yang kurang (tidak cukup untuk kebutuhan masyarakat) atau pangan tidak terjangkau karena daya beli masyarakat yang terbatas, anomaly iklim dan/atau karena pangan tidak terjangkau secara fisik oleh masyarakat terutama yang berada di daerah terpencil/terisolir. Antisipasi dan penanganan masalah kerawanan pagan (pra dan pasca kejadian) belum merata karena terbatasnya anggaran sarana dan prasarana serta koordinasi antara isntansi terkait belum optimal.

10. *Peningkatan Distribusi, Harga dan Akses Pangan*

Kelancaran distribusi dan akses pangan, permasalahan yang dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan pangan karena terkena bencana.

11. *Penjaminan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan*

Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang tidak merata sepanjang bulan, sehigga harga tinggi pada masa paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan masyarakat.

12. *Dampak Pandemi Covid-19*

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 dan di Indonesia, Presiden RI telah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19 dan menetapkan sebagai bencana nasional melalui Kepres 12/2020.

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020, Presiden memutuskan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagai instrumen utama untuk mencegah penularan *Covid-19*. Dengan adanya kebijakan PSBB tersebut, terdapat penutupan akses transportasi yang mengakibatkan pengurangan mobilitas dan aktivitas penduduk sehingga berakibat terhambatnya pergerakan (rantai pasok distribusi) barang dan jasa termasuk berbagai produk pertanian. Meskipun untuk angkutan komoditas pangan tetap diizinkan, namun para pelaku distribusi (pedagang) memiliki kekhawatiran atas wabah pandemi ini sehingga tetap berpengaruh terhadap pergerakan barang komoditas pangan. Jika

kendala ini terjadi dalam jangka panjang, maka dapat berdampak pada terganggunya *supply* komoditas pangan.

Perubahan dari sisi *supply* dan *demand* pangan tersebut pada gilirannya berdampak pada tingkat harga pangan. Untuk komoditas pangan utama, perubahan harga pangan akan berdampak pada perubahan konsumsi dan permintaan karena terkait daya beli pangan yang dibutuhkan. Gangguan terhadap distribusi pangan akan sangat berpengaruh terhadap kualitas, kesegaran, keamanan pangan serta akses pasar. Selain dampak pandemi *Covid-19* terhadap distribusi bahan pangan dengan terhambatnya layanan transportasi bahan pokok, juga berdampak terhadap pelaku usaha distribusi bahan pokok.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Rencana Kerja dan Pendanaan

Rencana kerja dan pendanaan pada Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 serta Renstra Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024-2026. Rencana kerja dan pendanaan tersebut juga memperhatikan sumber-sumber pendanaan (seperti APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN, DAK dan lain-lain) yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Perumusan perubahan rencana kerja program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 tersebut telah mempertimbangan beberapa faktor, dengan menyelaraskan tujuan, sasaran daerah dan sasaran perangkat daerah, visi dan misi kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 dan tema pembangunan pada tahun 2024 dalam RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Pada tahun 2024 jumlah anggaran dana/pagu indikatif pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan yang bersumber dari DAU. Rencana Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang sebelum mengalami perubahan sebesar Rp 19.791.997.976,- dan setelah mengalami perubahan anggaran menjadi sebesar Rp 24.171.162.000,-. Adapun rincian perubahan rencana kerja dan pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 dapat dilihat Tabel III.1.

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
Lembar : 1 dari 10 Halaman

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras/ Jagung Sesuai Kebutuhan)**		**750,67%**	**280.000.000**			**3,33%**	**195.000.000**	
2.09.03.2.01	**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Cakupan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya seusia dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan**		**100%**	**135.000.000**			**100%**	**110.000.000**	
2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	20.000.000	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	20.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	75.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN AGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
		lokal								
2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0013	Penyusunan Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi Prognosa Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	20.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	35.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.03.2.01.0014	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	15.000.000	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-
2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-
2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**		**100%**	**120.000.000**			**100%**	**75.000.000**	
2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	4 Ton	120.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	4 Ton	75.000.000	Masyarakat
2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Cakupan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**		**100%**	**25.000.000**			**100%**	**10.000.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Kab. Sidenreng Rappang	2 Dokumen	25.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
2.09.04	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan**		**30%**	**75.000.000**		-	-	-	-
2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten**		**100%**	**75.000.000**		-	-	-	-
2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	25.000.000	-	-	-	-	-
2.09.04.2.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	50.000.000	-	-	-	-	-
2.09.05	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Persentase Pangan yang Aman Dikomsumsi Sesuai Standar**		**50%**	**50.000.000**		-	-	-	-
2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten**		**100%**	**50.000.000**		-	-	-	-
2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-
2.09.05.2.01.0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Kab. Sidenreng Rappang	1 Dokumen	15.000.000	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
2.09.05.2.01.0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	20.000.000	-	-	-	-	-
3.27.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100%**	**9.727.644.796**			**100%**	**11.434.647.000**	
3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**		**100%**	**45.000.000**			**100%**	**46.840.000**	
3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	5 Dokumen	30.922.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	25.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	15.918.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100%**	**8.980.575.796**			**100%**	**10.654.020.000**	

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Sidenreng Rappang	105 Orang/Bulan	8.960.575.796	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	105 Orang/Bulan	10.619.002.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	20.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Dokumen	35.018.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100%**	**48.044.000**			**100%**	**147.355.000**	
3.27.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	1.764.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Paket	1.710.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	46.280.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	145.645.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**		**100 %**	**70.720.000**			**100 %**	**19.594.000**	
3.27.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	3.720.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Unit	3.594.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	6 Unit	67.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	16.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
						Ketahanan Pangan				Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100 %**	**492.967.000**			**100 %**	**473.034.000**	
3.27.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	1.400.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	66.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	425.967.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	405.634.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100 %**	**90.338.000**			**100 %**	**93.804.000**	
3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab. Sidenreng Rappang	31 Unit	65.788.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	48 Unit	69.254.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	27 Unit	14.550.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	33 Unit	14.550.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.02	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Produktivitas Pertanian Per Hektar Per Tahun**		**596,06%**	**375.000.000**	-		**596,06%**	**2.471.500.000**	
3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Cakupan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**		**100 %**	**375.000.000**	-		**100 %**	**2.471.500.000**	
3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Kab. Sidenreng Rappang	2 Laporan	315.000.000	-	Panca Lautang	1 Laporan	50.000.000	Kelompok Tani
3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	4 Laporan	60.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	1 Laporan	2.421.500.000	Kelompok Tani
3.27.03	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian**		**100%**	**8.137.853.000**			**100%**	**9.248.834.000**	
3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pengembangan Prasarana Pertanian**		**100 %**	**50.000.000**			**100 %**	**26.957.000**	
3.27.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	20.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	12 Laporan	21.957.000	Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan
3.27.03.2.01.0006	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	10.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	5.000.000	Kelompok Tani

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.03.2.01.0008	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	-	-	-	-	-
3.27.03.2.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	10.000.000	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Cakupan Pembangunan Prasarana Pertanian**		**100 %**	**8.087.853.000**			**100 %**	**9.221.877.000**	
3.27.03.2.02.0002	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	8 Unit	1.049.000.000	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	18 Unit	2.970.000.000	-	Panca Lautang, Wt. Pulu, Kulo, Pitu Riawa dan Pitu Riase	16 Unit	2.351.500.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	650.000.000	-	Kulo	1 Unit	119.990.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0008	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	1.648.853.000	-	-	-	-	-
3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	Kab. Sidenreng Rappang	2 Unit	1.000.000.000	-	Panca Lautang, Tellu Limpoe dan Baranti	3 Unit	1.509.057.000	Kelompok Tani
3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	Kab. Sidenreng Rappang	10 Unit	770.000.000	-	Panca Lautang, Tellu Limpoe, Wt. Pulu, Baranti, Panca	36 Unit	5.241.330.000	Kelompok Tani

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
							Rijang, Kulo, Maritengngae, Wt. Sidenreng, Pitu Riawa dan Pitu Riase			
3.27.05	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian Serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)**		**100 %**	**150.000.000**			**100 %**	**150.000.000**	
3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Cakupan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**		**100 %**	**150.000.000**			**100 %**	**150.000.000**	
3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	Kab. Sidenreng Rappang	500 Ha	100.000.000	Petani	Kab. Sidenreng Rappang	500 Ha	150.000.000	Petani
3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	Kab. Sidenreng Rappang	50 Ha	50.000.000	-	-	-	-	-
3.27.07	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**		**2,46%**	**996.500.000**			**2,46%**	**1.271.181.000**	
3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**		**100 %**	**996.500.000**			**100 %**	**1.271.181.000**	
3.27.07.2.01.0001	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	11 Unit	276.500.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	284.000.000	Penyuluh Pertanian

Kode	Urusan/Bidang Urusan/Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
3.27.07.2.01.0002	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	15 Unit	60.000.000	-	-	-	-	-
3.27.07.2.01.0003	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	3 Unit	50.000.000	-	Wt. Pulu, Baranti, Panca Rijang, Pitu Riawa dan Pitu Riase	5 Unit	238.681.000	Balai Penyuluh Pertanian
3.27.07.2.01.0005	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi	Kab. Sidenreng Rappang	5 Unit	500.000.000	-	Panca Lautang, Wt. Pulu, Baranti, Panca Rijang, Kulo, Pitu Riawa dan Pitu Riase	4 Unit	300.000.000	Kelompok Tani
3.27.07.2.01.0006	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	15 Unit	30.000.000	-				
3.27.07.2.01.0007	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat kabupaten/kota yang ditingkatkan kapasitasnya	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	30.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	14.500.000	Penyuluh Pertanian
3.27.07.2.01.0008	Pembentukan Kelembagaan Ekonomi Petani	Jumlah Kelembagaan Ekonomi Petani yang dibentuk	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	20.000.000	-	Kab. Sidenreng Rappang	1 Unit	5.000.000	Kelompok Tani
3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	Kab. Sidenreng Rappang	3 Dokumen	30.000.000	-	Kulo, Pitu Riawa dan Pitu Riase	1 Dokumen	429.000.000	Petani Sawit
					19.791.997.796				**24.771.162.000**	

BAB IV.
PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Rencana Kerja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 yang disusun menurut visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan. Rencana Kerja Perubahan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan disusun dengan memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana Kerja yang merupakan kebijakan program dan kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

IV.1 Catatan Penting

Catatan penting dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Produksi dan Produktivitas pada sektor Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan diharapkan dapat terjaga dan meningkat sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap ketersediaan pangan di Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Pembangunan pangan dan pertanian perlu dipastikan penganggarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi kepala daerah. Ketahanan pangan perlu dipastikan agar ketersediaan pangan tetap terjaga dan terjangkau oleh masyarakat.

IV.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Tahun 2024 ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh pejabat struktural di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar mengawal pelaksanaan Renja tahun 2024 sebaik-baiknya, sehingga dapat teranggarkan dan terlaksana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Seluruh unsur di Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan agar melaksanakan program dan kegiatan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan fungsinya, melalui proses yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Skala prioritas dalam rasionalisasi anggaran baik program/kegiatan dalam Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024 selalu disinergikan dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, baik rencana tahunan jangka menengah maupun jangka panjang.
4. Perlunya dilakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2024 agar program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja tahun 2024 dapat dipastikan berjalan dengan baik.
5. Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
    a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
    b. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
    c. Pergeseran pagu kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

IV.3 Rencana Tindak Lanjut

Dokumen Renja Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, secara normatif telah diupayakan sedemikian rupa sehingga memuat program/kegiatan selama tahun 2024. Beberapa

indikator keberhasilan juga telah ditetapkan sebagai target yang harus dicapai. Untuk implementasi Renja, tersebut dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras dedikasi, loyalitas dan integritas dari seluruh jajaran Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Rencana Kerja Perubahan ini disusun untuk dijadikan pedoman Tahun Anggaran 2024 dan diharapkan pelaksanaan seluruh kegiatan dapat berjalan dengan baik, dalam ikut serta mewujudkan tercapainya pembangunan yang lebih maju.

Pangkajene Sidenreng, 4 Juli 2024

Kepala Dinas
Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan
Ketahanan Pangan
Kab. Sidenreng Rappang

Ibrahim, SP
NIP. 19720223 200003 1 002

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Pitu Riase dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2018-2023

Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari visi,misi,tujuan, saran, kebijakan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok danfungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini mungkin ditemui data,informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Pitu Riase masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.Oleh Karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan,strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Barukku, Juli 2024
CAMAT PITU RIASE

A.MUKTI ALI, SE.M. Adm.Pemb
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP:19741231 200112 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTARISI..... ii
DAFTARTABEL..... iii
BABI. PENDAHULUAN..... 1
I.1 Latar Belakang..... 1
I.2 LandasanHukum..... 3
I.3 Maksud danTujuan 4
I.4 SistimatikaPenulisan..... 5
BABII. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 6
II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2022..... 6
II.2 Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah 14
BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAANPERANGKATDAERAH 16
III.1 ProgramdanKegiatan..... 16
BABIV. PENUTUP..... 28

DAFTAR TABEL

TabelII.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerahdan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2022 (tahun Berjalan) KecamatanPitu Riase Kabupaten Sidebreng Rappang 8

TabelIII.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2022Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang 18

BAB I

P E N D A H U L U A N

I.1 LatarBelakang

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Pitu Riase yang selanjutnya disebut RENJA Perubahan adalah dokumen perencanan pembnagunan Perangkat Daerah Kecamatan Pitu Riase, pelaksanaaan tugas pelayanan public sebagai tindak lanjut dari perumusan kebijakan strategis dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat, menetapkan program dan kegiatan untuk mewujudkan bentuk dan sifat pelayanan Perangkat Daerah yang dicapai pada masa satu tahun.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Tahun 2024 Kecamatan Pitu Riase dilandasi oleh semangat Otonomi Daerah dimana pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan. Pemberian kewenangan Kepala Daerah Kepada Camat dimaksudkan untuk mempercepat proses terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dengan adanya kewenangan diharapkan pemerintah daerah mampu meningkatkan daya saing melalui prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam pembangunan serta meningkatkan daya guna potensi kecamatan dan keanekaragaman sember dayamanusia.

Di samping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan yang meliputi:

1. Mengkoordinasikan pemberdayaanmasyarakat
2. Mengkoordinasikan upayan pengembangan keamanan dan ketertibnumum
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturanperundang-undangan
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaran dan fasilitas pelayananumum
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan diKecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahandesa
7. Melaksanakan pelayaan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplit tugas camat, maka perlu dibuat suatu polaperencanaan,pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komperehesif perencanaan pembangunan perekonomian ditingkat Kecamatan yang dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencaaan pembangunan, kemasyarakatan dan Pemerintahan Camat membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian diatas, maka perlu disusun suatu Rencana Kerja Perubahan (Renja Perubahan) yang merupakan suatu wujud dari model penyelengaraan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang

terdapat dalam UU No.23 Tahun 2014 yang meliputi Demokrasi peran dan serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sidenreng Rappang di Kecamatan Pitu Riase dalam rangka mencapai masyarakat mandiri,demokratis produktif,maju,tertib dan budaya. Selanjutnya Rencana Kerja yang telah disusun akan diimplementasikan dan merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi- fungsi pemerintahan Kecamatan Pitu Riase untuk rentang waktu Tahun 2024.

I.2 LandasanHukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lemabran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor4578);
7. Peratuan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pebangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedomam Evaluasi Peneyelenggaran Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor2815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsiKecamatan;
11. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor26);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja PemerintahDaerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan KeuanganDaerah.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025(Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor26);
16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas Pokok Dan Fungsi. Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten SidenrengRappang;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2023
18. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2023

I.3 Maksud danTujuan

1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Kecamatan Pitu Riase Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Pitu Riase adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun didalampelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pitu Riase untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

I.4 SistematikaPenulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika Sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renja ini,dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika pembahasan.

BABII EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN DENGAN TRIWULAN IITAHUN BERKENAAN

Memuat : (2.1) Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, (2.2) isi-isu penting penyelengaaran tugas dan fungsi PD,

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1 Evaluasi Renja Kecamatan Pitu Riase sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Capaian kinerja pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024 beserta capaian Renstra Kantor Kecamatan Pitu Riase dengan bidang kewenangan administrasi untuk Pemerintahan serta misi meningkatkan kinerja pemerintah kota secara profesional, efektif, efesien, akuntabel dan transparan dan sasaran misi meningkatkan sistem pelayanan publik guna mendorong pertumbuhan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran YangDirencanakan.

Realisasi program/kegiatan Triwulan II Tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah:

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah pada kegiatan berikut :

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/ KOTA
    1. Administrasi Umum PerangkatDaerah
    2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah
    3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah
    4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
    1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN
    1. Kegiatan PemberdayaanKelurahan
    2. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
D. PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2024 dan diakhir Triwulan II tidak ada yang melebihi target kinerja.

Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya,Terpenuhinya atau Melebihi Target KinerjaProgram/Kegiatan

Adapun penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja di Tahun 2024 adalah:

a. Secara Umum Program/Kegiatan tidak ada yang mencapai target kinerja disebabkan karena biaya operasional untuk kecamatan sering mengalami refocusing sehingga biaya operasional hanya digunakan untuk pembayaran rutin bulanan kantor camat dan 1 Kelurahan yang ada di Kecamatan Pitu Riase.
b. Untuk kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja karena anggaran tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Kecamatan Pitu Riase

1. Meningkatnya keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi muspika, dinas instansi, UPT Kepala Desa/Lurah Se Kecamatan Pitu Riase.
4. Terwujdunya pembangunan sarana dan prasaranain frastruktur.

Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor PenyebabTersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya sarana perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan pada tabelII.1

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang

Kecamatan : Pitu Riase

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) s/d Tahun2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2022		Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan s/d triwulan II Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	SubKegiatan							Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					-2	-3	-4		-5		-6		-7	(8)=(7/6)	9=(5+7)	10=(9/4)
7					URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA											

7	**01**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100**	**%**				
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**					**100**	**%**				
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN					294	Org/ Bulan	168	54%		
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD					12	Laporan	0	0%		
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**					**100**	**%**	**0**	**%**		
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan					12	Paket	0	0%		

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan					7	Paket	0	0%		
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah tangga Yang Diadakan					7	Paket	0	0%		
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan					12	Paket	1	7%		
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					130	Lapo ran	43	33%		
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**					**100**	**%**	**0**	**%**		
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan					3	Paket	0	0%		
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan					3	Paket	0	0%		
7	01	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Disediakan					4	Unit	4	100%		

7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah**					**100**	**%**	**0**	**%**		
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat					12	Laporan	0	0%		
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan					12	Laporan	6	50%		
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan					12	Laporan	3	25%		
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**					**100**	**%**	**0**	**%**		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya					11	Unit	2	18%		

7	01	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel Yang pelihara					3	Unit	0	0%		
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit dan Peralatan Lainnya yang dipelihara					3	Unit	0	0%		
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/Rehabilitasi					3	Unit	0	0%		
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**					**100**	**%**	**0**	**%**		
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat**					**100**	**%**	**0**	**%**		
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan					12	Laporan	0	0%		
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan kewenangan lain yang dilimpahkan					12	Laporan	0	0%		

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan					100	%	0	%		
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan					100	%	0	%		
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					12	Laporan	0	0%		
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan					100	%	0	0,2%		
7	01	03	2.02	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Masyarakat yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan					7	Lembaga Kemasyrakatan	0	0%		
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan					72	Pokmas/Ormas	2	0,2%		

7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					100	%	2	16%		
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah					100	%	2	16%		
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					12	Dokumen	2	16%		
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100	%	0	%		
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa					100	%	0	%		
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa					11	Dokumen	0	0%		

7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa					11	Dokumen	0	0%		
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					11	Dokumen	0	0%		

II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Pitu Riase

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pitu Riase bahwa ditentukan isu penting yaitu sebagaiberikut:

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan pembagian kewenangan Bupati kepada Camat maka Camat dengan mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten SidenrengRappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan company atau sosial responsibility, maka selamatan harus benar-benar memanfaatkan tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraanmasyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu OPD di pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar pelayanan yang secara non aktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Dengan pelayanan prima, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitasmasyarakat.
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secarakualitas

Lingkup analisis kinerja pelayanan di kecamatan Pitu Riase meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan

Lingkunganinternal

Peluang:

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan
4. Hanya sarana dan prasarana
5. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan

Tantangan:

1. Kualitas sdm yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan di tingkatkecamatan

Lingkungan eksternal

Peluang

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayananpublic
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakatluas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Tantangan

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pemerintahan.
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1 Program Dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Pitu Riase dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai B dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan nilai43%.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rencana Kerja Kecamatan Pitu Riase Tahun 2024 setelah dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Kantor Camat

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/ KOTA
   1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   2. Administrasi Umum PerangkatDaerah
   3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
   4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah
   5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah

B. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
   2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
   1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

E. PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA
   1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kelurahan Batu

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAHKABUPATEN/ KOTA
   1. Administrasi Umum PerangkatDaerah
   2. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahDaerah
   3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah
   4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PemerintahanDaerah

B.PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN

1. Kegiatan PemberdayaanKelurahan

Adapun Perubahan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp. **2.091.663.000**,- yang rencana akan dialokasikan melalui program kegiatan Kecamatan Pitu Riase adalah sebagai berikut

1. Kantor Camat		***1.702.863.000,-***
B. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Rp.**	**1.614.451.800,-**
1. Administrasi Keuangan PerangkatDaerah		
2. Administrasi Umum PerangkatDaerah	Rp.	1.403.018.000,-
3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp.	60.909.700,- 25.788.000,-
4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Rp.	103.391.100,-
5. Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah	Rp.	21.345.000,-
C. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM	**Rp.**	**12.303.400,-**
1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp.	12.303.400,-
C. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN	**Rp.**	**7.652.700,-**
1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	6.151.700,-
2. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	1.501.000,-
D. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		
1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Rp.**	**50.000.000,-**
D. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp.	50.000.000,-
1. Fasilitasi, Rekomendasi dan koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Rp.**	**18.455.100,-**
	Rp.	18.455.100,-
2. KelurahanBatu		
A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	***Rp.*** **Rp.**	***388.800.000,-*** **150.840.000,-**
1. Administrasi Umum PerangkatDaerah		
2. Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahDaerah	Rp. Rp.	13.741.100,- 25.027.300,-
3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan PemerintahanDaerah	Rp.	100.401.600,-
4. Pemeliharaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan PemerintahanDaerah	Rp.	11.670.000,-
B. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DANKELURAHAN	**Rp.**	**237.960.000,-**
1. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	237.960.000,-

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2024 untuk Kecamatan Pitu Riase dapat dilihat pada lampiran Tabel III.1

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN PITU RIASE

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2022								
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*7*	*9*	*10*	
	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA					**2.081.663.000**					**2.091.663.000**	
	Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Pitu Riase					***1.692.863.000***					*1.702.863.000*	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	***1.604.451.800***		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	***1.614.451.800***	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**1.403.018.000**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**1.403.018.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kec. Pitu Riase	294	Orang/Bulan	1.395.792.000	ASN	Kec. Pitu Riase	294	Orang/Bulan	1.395.792.000	ASN
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	7.226.000	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	7.226.000	ASN
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**69.483.700**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**60.909.700**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Pitu Riase	12	Paket	1.419.000	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Paket	1.419.000	ASN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riase	7	Paket	6.441.000	ASN	Kec. Pitu Riase	7	Paket	441.000	ASN
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kec. Pitu Riase	7	Paket	2.023.000	ASN	Kec. Pitu Riase	7	Paket	2.023.000	ASN

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riase	12	Paket	7.150.200	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Paket	4.576.200	ASN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Pitu Riase	130	Laporan	52.450.500	ASN	Kec. Pitu Riase	130	Laporan	52.450.500	ASN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**27.377.000**	ASN	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**25.788.000**	ASN
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kec. Pitu Riase	3	Paket	4.788.000	ASN	Kec. Pitu Riase	3	Paket	4.788.000	ASN
	Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Kec. Pitu Riase	3	Unit	15.000.000	ASN	Kec. Pitu Riase	3	Unit	21.000.000	ASN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Disediakan	Kec. Pitu Riase	4	Unit	7.589.000	ASN	Kec. Pitu Riase	-	Unit	-	ASN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**90.817.100**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**103.391.100**	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	360.000	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	360.000	ASN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	28.000.000	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	28.000.000	ASN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kec. Pitu Riase	-	Laporan	-	ASN	Kec. Pitu Riase	0	Laporan	-	ASN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	62.457.100	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	75.031.100	ASN
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**13.756.000**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**21.345.000**	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kec. Pitu Riase	11	Unit	13.756.000	ASN	Kec. Pitu Riase	11	Unit	13.756.000	ASN
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/Rehabilitasi	Kec. Pitu Riase	3	Unit	0	ASN	Kec. Pitu Riase	3	Unit	7.589.000	ASN
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**12.303.400**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**12.303.400**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**12.303.400**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**12.303.400**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan Pada Urusan Pemerintahan	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	6.151.700	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	6.151.700	ASN

	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan kewenangan lain yang dilimpahkan	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	6.151.700	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	6.151.700	ASN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**7.652.700**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**7.652.700**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**6.151.700**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**6.151.700**	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	6.151.700	ASN	Kec. Pitu Riase	12	Laporan	6.151.700	ASN
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisifasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan	Kec. Pitu Riase	100	%	1.501.000	ASN	Kec. Pitu Riase	100	%	1.501.000	ASN
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan	Kec. Pitu Riase	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.501.000	ASN	Kec. Pitu Riase	7	Lembaga Kemasyarakatan	1.501.000	

	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pembangunan di Kelurahan										
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Kec. Pitu Riase**	100	%	50.000.000		**Kec. Pitu Riase**	100	%	50.000.000	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Kec. Pitu Riase**	100	%	50.000.000		**Kec. Pitu Riase**	100	%	50.000.000	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Pitu Riase	12	Dokumen	50.000.000		Kec. Pitu Riase	12	Dokumen	50.000.000	
\	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Desa**	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**18.455.100**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**18.455.100**	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**18.455.100**		**Kec. Pitu Riase**	**100**	**%**	**18.455.100**	

	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	6.151.700	ASN	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	6.151.700	ASN
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	6.151.700	ASN	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	6.151.700	ASN
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	6.151.700	ASN	Kec. Pitu Riase	11	Dokumen	6.151.700	ASN
	Kab. Sidenreng Rappang, Kec. Pitu Riase , Kel. Batu					***388.800.000***					***388.800.000***	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**150.840.000**		**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**150.840.000**	

	KOTA											
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**13.741.100**		**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**13.741.100**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kel. Batu	1	Paket	1.636.000	ASN	Kel. Batu	1	Paket	1.636.000	ASN
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kel. Batu	0	Paket	-	ASN	Kel. Batu	0	Paket	-	ASN
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kel. Batu	1	Paket	507.600	ASN	Kel. Batu	1	Paket	507.600	ASN
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kel. Batu	5	Laporan	11.597.500	ASN	Kel. Batu	5	Laporan	11.597.500	ASN
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kel. Batu**	**100**	**%**	**25.027.300**		**Kel. Batu**	**100**	**%**	**25.027.300**	

	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	Kel. Batu	0	Paket	-	ASN	Kel. Batu	-	Paket	-	ASN
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya Yang Disediakan	Kel. Batu	1	Unit	25.027.300	ASN	Kel. Batu	1	Unit	25.027.300	ASN
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**100.401.600**		**Keluraha n Batu**	**100**	**%**	**100.401.600**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kel. Batu	12	Laporan	308.000	ASN	Kel. Batu	12	Laporan	300.000	ASN
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik yang disediakan	Kel. Batu	12	Laporan	4.000.000	ASN	Kel. Batu	12	Laporan	4.000.000	ASN
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Kel. Batu	2	Laporan	662.000	ASN	Kel. Batu	-	Laporan	-	ASN
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan	Kel. Batu	12	Laporan	95.431.600	ASN	Kel. Batu	12	Laporan	96.101.600	ASN

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**11.670.000**		**Kelurahan Batu**	**100**	**%**	**11.670.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kel. Batu	8	Unit	5.606.000	ASN	Kel. Batu	8	Unit	5.606.000	ASN
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dipelihara/Rehabilitasi	Kel. Batu	2	Unit	6.064.000	ASN	Kel. Batu	2	Unit	6.064.000	ASN
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kel. Batu**	**100**	**%**	**237.960.000**		**Kel. Batu**	**100**	**%**	**237.960.000**	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kel. Batu**	**100**	**%**	237.960.000		**Kel. Batu**	**100**	**%**	237.960.000	

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Batu	72	Pokmas/Ormas	237.960.000	Masyarakat	Kel. Batu	72	Pokmas/Ormas	237.960.000	Masyarakat

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Pitu Riase merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Pitu Riase selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA Kecamatan Pitu Riase di atas, dengan tekad menyukseskan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Barukku, Juli 2024
CAMAT PITU RIASE

A.MUKTI ALI, SE. M.Adm.Pemb
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP: 19741231200112 1 007

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA)

KECAMATAN MARITENGNGAE

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan M a r i t e n g n g a e memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. Begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Program Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang, yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari bahwa dalam penulisan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae masih memerlukan kesempurnaan dibmasa yang akan datang seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pangkajene, 05 Agustus 2024
CAMAT MARITENGNGAE

ANDI SURYA PRAJA HADININGRAT, SH, M.Si
Pangkat : Pembina
NIP : 19850419 200312 1 006

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang 1

I.2. Landasan Hukum 3

I.3. Maksud dan Tujuan . 4

I.4. Sistimatika Penulisan 4

BAB II. EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

II.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 6

II.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah 13

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

III.1. Program dan Kegiatan 15

BAB IV. PENUTUP 24

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja Perangkat Daerah dan pencapaian renstra Perangkat Daerah s/d triwulan II tahun 2024 8

Tabel III.1.Rencana kerja dan pendanaan daerah perubahan tahun anggaran 2024 15

Tabel III.2.Indikator Program dan Kegiatan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang 21

Tabel III.3. Formulasi Pengukuran Indikator Sasaran/Kinerja Program (Outcome) Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang 23

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Maritengngae mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Maritengngae dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 3 (tiga) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Maritengngae. Sejajar dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran) Kantor Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Maritengngae dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Maritengngae dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ;

10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Maritengngae adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Maritengngae untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistimatika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan

BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024, dan Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH** terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di kelurahan dan evaluasi kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 28,60%.
3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang mencakup kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN, kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 51,13%.
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum mencakup kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah terdiri atas sub kegiatan pelaksanaan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan telah mencapai tingkat realisasi target 28,50%.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada **Tabel II.1**.

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)

Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN MARITENGNGAE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=(9/4* 100)
7					Unsur Kewilayahan									
7	01				Kecamatan									
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	100				100	100
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100	%	100				100	100

7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	30	Urusan	30				30	750
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Urusan	3				3	75
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum**	**100**	**%**						
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**						
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**						
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	7.525	0rang	7.525				7.525	188.125
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**						
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Kelurahan	20				20	500

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	117	Orang	113				113	2.825
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	21	Kelurahan	21				21	525
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**				**100**	**2.500**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**				**100**	**2.500**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	15	Desa	15				15	375
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	15	Desa	15				15	375
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	15	Desa	15				15	375
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**						

X	**XX**	**01**	**2.02**		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**						
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36	Bulan	36				36	900
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**						
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	36	Bulan	36				36	900
x	xx	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	36	Bulan	36				36	900
x	xx	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	36	Bulan	36				36	900
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36	Bulan	33				33	825
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	36	Bulan	21				21	525
X	**XX**	**01**	**2.07**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**						
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	36	Bulan	36				36	900

X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	36	Bulan	35				35	875
					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**						
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai	36	Bulan	32				32	800
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36	Bulan	30				30	750
					Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36	Bulan	35				35	875
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**						
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	36	Bulan	33				33	825
X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	36	Bulan	33				33	825

Tabel II.1. b (RENSTRA RPD 2024-2026)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN MARITENGNGAE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
										Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=(9/4* 100)
7					**Unsur Kewilayahan**									
7	**01**				**Kecamatan**									
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	3	Laporan		3	0	0	0	0

7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	3	Laporan		3	0	0	0	0
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum**	**100**	**%**		**100**	**50**	**50**	**50**	**1.250**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**		**100**	**50**	**50**	**50**	**1.250**
7	01	02	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2	Dokumen		2	1	50	1	25
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**100**	**13**	**13**	**13**	**317**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5	Laporan		5	0	0	0	0

7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**		**100**	**25**	**25**	**25**	**635**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	21	Unit		21	8	38	8	200
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	210	Pokmas/Ormas		210	80	38	80	2.000
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	7	Laporan		7	0	0	0	0
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5	Dokumen		5	0	0	0	0
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	5	Dokumen		5	0	0	0	0

7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5	Dokumen		5	0	0	0	0
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**		**100**	**34**	**34**	**34**	**840**
X	**XX**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**	**0**	**0**	**0**	**0**
X	XX	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang disusun	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi pemyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	XX	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi pemyusunan dokumen perubahna DPA-SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0

X	XX	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan Laporan hasil Koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	3	Dokumen		3	0	0	0	0
X	**XX**	**01**	**2.02**		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**	**50**	**50**	**50**	**1.250**
X	XX	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	812	Bulan		812	406	50	406	10.150
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**		**100**	**40**	**40**	**40**	**990**
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	8	Paket		8	8	100	8	200
x	xx	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	8	Paket		8	0	0	0	0
x	xx	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	8	Paket		8	0	0	0	0
X	XX	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8	Paket		8	4	50	4	100
X	XX	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	8	Laporan		8	3	38	3	75
X	XX	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	8	Laporan		8	4	50	4	100

X	**XX**	**01**	**2.07**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**%**		**100**	**21**	**21**	**21**	**521**
X	XX	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	16	Unit		16	0	0	0	0
X	XX	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	24	Unit		24	10	42	10	250
X	**XX**	**01**	**2.08**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**100**	**63**	**63**	**63**	**1.563**
X	XX	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8	Laporan		8	3	38	3	75
X	XX	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	8	Laporan		8	3	38	3	75
X	XX	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8	Laporan		8	9	113	9	225
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**		**100**	**29**	**29**	**29**	**716**
X	XX	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16	Unit		16	7	44	7	175
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16	Unit		16	6	38	6	150

X	XX	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit		3	1	33	1	25
X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana PendukungGedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	3	Unit		3	0	0	0	0

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu penting yang berkaitan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah merupakan kenyataan yang menggambarkan keadaan atau realitas tentang sebuah pokok permasalahan. Agar memudahkan dalam mengorganisir isu maka dilakukan identifikasi.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kantor Kecamatan Maritengngae maka ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

a) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di Bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayahnya. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan bupati kepada camat, maka camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang;
b) Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah. Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Coorperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;
c) Peningkatan tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat. Kantor Kecamatan Dua Pitue sebagai salah satu Perangkat Daerah di Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang yang

menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika ativitas masyarakat.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Maritengngae dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai 84,22 peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan lansung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

OPD : KECAMATAN MARITENGNGAE

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024								
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
							LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1					2	3	4	5		6	7	8	9		10	11
7					**Unsur Kewilayahan**											
7	**01**				**Kecamatan**					**7.544.980.000**					**7.574.980.000**	
7	**01**	**02**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**4.000.000**	**Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**4.200.000**	**Kecamatan Maritengngae**
7	**01**	**02**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**4.000.000**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**4.200.000**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**
7	01	02	2.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	02	2.04	03	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae

7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**50.000.000**	**Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**80.000.000**	**Kecamatan Maritengngae**
7	**01**	**05**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**50.000.000**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**80.000.000**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	50.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	2	Dokumen	80.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**1.754.105.300**	**Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**1.742.514.900**	**Kecamatan Maritengngae**
7	**01**	**03**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**2.000.000**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**2.100.000**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	5	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	**01**	**03**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**1.752.105.300**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**1.740.414.900**	**Masyarakat Kecamatan Maritengngae**
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kecamatan Maritengngae	21	Unit	477.385.300	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	21	Unit	468.114.900	Masyarakat Kecamatan Maritengngae

7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	210	Pokmas/Ormas	1.272.720.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	210	Pokmas/Ormas	1.270.200.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	01	03	2.02	04	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	2.000.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	7	Laporan	2.100.000	Masyarakat Kecamatan Maritengngae
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**6.000.000**	**Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**6.300.000**	**Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae**
7	**01**	**06**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**6.000.000**	**Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**6.300.000**	**Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae**
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.100.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.100.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.000.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Dokumen	2.100.000	Aparatur Desa Kecamatan Maritengngae
X	**XX**	**01**			**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**5.730.874.700**	**ASN Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**5.741.965.100**	**ASN Kecamatan Maritengngae**

X	**XX**	**01**	**2.02**		**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**4.758.639.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**4.758.639.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**
X	XX	01	2.02	01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Maritengngae	812	Bulan	4.758.639.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	812	Bulan	4.758.639.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	**XX**	**01**	**2.06**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**274.442.700**	**ASN Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**144.102.700**	**ASN Kecamatan Maritengngae**
x	xx	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	4.538.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	2.538.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	9.756.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	-	-	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	134.564.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	-	-	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	05	XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	29.540.200	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Paket	29.780.200	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	21.966.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	23.251.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.06	09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	74.078.500	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	88.533.500	ASN Kecamatan Maritengngae
X	**XX**	**01**	**2.07**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**49.542.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**43.542.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**

X	XX	01	2.07	05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit		ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	-	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.07	06	XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	49.542.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	24	Unit	43.542.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	**XX**	**01**	**2.08**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**444.070.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**589.100.400**	**ASN Kecamatan Maritengngae**
X	XX	01	2.08	01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai yang disediakan	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	12.866.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	12.210.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	87.404.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	82.647.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.08	04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	343.800.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	8	Laporan	494.243.400	ASN Kecamatan Maritengngae
X	**XX**	**01**	**2.09**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**204.181.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**	**Kecamatan Maritengngae**	**100**	**%**	**206.581.000**	**ASN Kecamatan Maritengngae**
X	XX	01	2.09	01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	52.941.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	52.940.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	13.870.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	16	Unit	12.510.000	ASN Kecamatan Maritengngae
X	XX	01	2.09	06	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	137.370.000	ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	141.131.000	ASN Kecamatan Maritengngae

X	XX	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kecamatan Maritengngae	3	Unit		ASN Kecamatan Maritengngae	Kecamatan Maritengngae	3	Unit	-	ASN Kecamatan Maritengngae

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Maritengngae dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan Maritengngae sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Maritengngae;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan Maritengngae;
4. Kantor Kecamatan Maritengngae berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Maritengngae Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2029.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Maritengngae ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

TAHUN 2024

KECAMATAN PANCA RIJANG



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puiji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunianya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2023 ini merupakan bentuk perencanaan Kecamatan Panca Rijang dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Tahun 2018-2023

Rencana Kerja(RENJA) Perubahan Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah merupakan penjabaran dari visi,misi,tujuan, saran, kebiajkan dan Program Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Perubahan ini mungkin ditemui data,inform ai dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Renja Kecamatan Panca Rijang masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan dating seiring dengnan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan.Oleh Karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap renja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan,strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Rappang, 2024
Plt.CAMAT PANCA RIJANG

H,ZAINAL,S.Pd
Pangkat : Pembina IV/a
NIP. 19720703 199103 1 002

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR ISI iii

DAFTAR TABEL iv

BAB I. PENDAHULUAN ……..……..... 1

I.1. Latar Belakang …….…..... 1

I.2. Landasan Hukum ……..... 2

I.3. Maksud dan Tujuan 3

I.4. Sistimatika Penulisan 3

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PANCA RIJANG TAHUN LALU 5

II.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Panca Rijang Tahun Lalu dan Capaian Renstra 5

II.2. Isu - isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Panca Rijang 20

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

III.1 Program dan Kegiatan 22

BAB IV. PENUTUP 37

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang 8

Tabel III.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Panca Rijang 25

BAB I

P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi : perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan dimana setiap SKPD diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perubahan SKPD (Renja Perubahan SKPD) sebagai acuan perencanaan kegiatan SKPD untuk kurun waktu perubahan kegiatan tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Panca Rijang Tahun 2024 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan yang di tujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dengan seluruh pemangku kepentingan berbasis E-planning.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Panca Rijang Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah(Lemabran Negara Republik Indonesia tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4578);

7. Peratuan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan Rencana Pebangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006, Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4664);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang pedomam Evaluasi Peneyelenggaran Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, nomor 2815);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang organisasi Perangkat daerah Kecamatan serta Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 26);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
13. Pereturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2017 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabuapten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025(Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26);
15. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan,Tugas Pokok Dan Fungsi. Uraian Tugas Dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;

16. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022;
17. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD2024 dan Renstra Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Panca Rijang untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Panca Rijang Tahun 2024 disusun berdasarkan sistematika berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang penyusunan Renja ini,dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematikan pembahasan.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

Memuat : (2.1) Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, (2.2) isi-isu penting penyelengaaran tugas dan fungsi PD,

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indicator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN DENGAN TRIWULAN II
TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Panca Rijang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Renstra PD. OPD Kecamatan Panca Rijang telah mengevaluasi Kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, Kecamatan Panca Rijang telah mengevaluasi 4 program 10 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan

Realisasi Program/Kegiatan Yang Tidak Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Realisasi program/kegiatan Triwulan II Tahun 2024 yang tidak mencapai target kinerja sesuai yang direncanakan adalah:

Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah pada kegiatan berikut :

a. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, meliputi kegiatan
   1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub Kegiatan:
      a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan

b. Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan meliputi kegiatan :
   1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Sub Kegiatan :
      a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

c. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
    1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan:
        a. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan
d. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi kegiatan:
    1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa meliputi sub kegiatan:
        a. Fasilitasi Pegelolaan Keuangan dan Pendayagunaan Aset Desa
        b. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
        c. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
e. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan :
    1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    2. Administrasi Umum Perangkat Daerah
        a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
        b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
        c. Fasilitasi Kunjungan Tamu
        d. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
    3. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
        a. Pengadaan Mebel
    4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
        b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
        c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
    5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
        a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
        b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
        c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.1.1 Realisasi Program/Kegiatan Yang Telah Memenuhi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan.

Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target hasil/keluaran yaitu Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

2.1.2 Realisasi Program/Kegiatan Yang Melebihi Target Kinerja Hasil/Keluaran Yang Direncanakan

Realisasi program/kegiatan di tahun 2024 dan diakhir Triwulan II tidak ada yang melebihi target kinerja.

2.1.3 Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya,Terpenuhinya atau Melebihi Target Kinerja Program/Kegiatan

Adapun penyebab tidak tercapainya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja ditahun 2024 adalah:

a. Secara Umum Program/Kegiatan tidak ada yang mencapai target kinerja disebakan karena biaya operasional untuk kecamatan sering mengalami refocusing sehingga biaya operasional hanya digunakan untuk pemyaran rutin bulanan kantor camat dan 4 Kelurahan yang ada di Kecamatan Panca Rijang.
b. Untuk kegiatan Administrasi Keuangan perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja karena anggaran tersebut untuk pembayaran gaji dan tunjangan ASN.

2.1.4 Implikasi Yang Timbul Terhadap Target Capaian Program Renstra Panca Rijang

1. Meningkatnya keefektifan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik menjadi prima sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat.
3. Terwujudnya pelaksanaan rapat koordinasi muspika, dinas instansi, UPT Kepala Desa/Lurah Se Kecamatan Panca Rijang.
4. Terwujdunya pembangunan sarana dan prasarana infsrastuktur.

2.1.6 Kebijakan/Tindakan Perencanaan dan Penganggaran Yang Perlu Diambil Untuk Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan pada tabel II.1

Tabel II.1.a

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan Panca Rijang

dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2021-2023		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021+2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					-2	-3	-4		-5	-6		-7	(8)=(7/6)	9=(5)	10=(9/4*100)
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	01	02	02.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	01	02	02.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan Jenis Urusan Pemerintah an yang terkait Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	20	Urusan	0	0	Urusan	0	0%	0	0%
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERHA KABUPATEN/KOTA**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**%**		**22,00**	**%**	**22,00**	**100%**	**22,00**	**22%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	42	Bulan	42	0	Bulan	0	0%	42	100%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**%**		**0,00**	**%**	**37,61**	**0%**	**37,61**	**38%**

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Unit	60	0	Unit	-	0%	60	100%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36	Bulan	36	0	Bulan	-	0%	36	100%
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjung Tamu	36	Bulan	36	0	Bulan	-	0%	36	100%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	834	Kali	834	0	Kali	-	0%	834	100%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**%**		**0,00**	**%**	**33,33**	**0%**	**33,33**	**33%**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	15	Unit	0	0	Unit	-	0%	0	0%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**		**0,00**	**%**	**33,90**	**0%**	**33,90**	**34%**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	900	Lembar	300	0	Lembar	-	0%	300	33%
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komuniksi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Bulan	36	0	Bulan	-	0%	36	100%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	36	0	Bulan	-	0%	36	100%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**		**0,00**	**%**	**31,82**	**0%**	**31,82**	**32%**

7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	19	Unit	15	0	Unit	0	0%	15	79%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	19	Unit	19	0	Unit	0	0%	19	100%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	4	Unit	4	0	Unit	0	0%	4	100%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	**01**	**03**	**02.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
7	01	03	02.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	Bulan	0	0	Bulan	0	0%	0	0%
7	**01**	**03**	**02.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terlaksana	4	Kegiatan	0	0	Kegiatan	0	0%	0	0%
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	12	Bulan	0	0	Bulan	0	0%	0	0%

7	01	06			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		100	%		0	%	0	0%	0	0%
7	**01**	**06**	**02.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
7	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	Bulan	0	0	Bulan	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	24	Bulan	0	0	Bulan	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	Bulan	0	0	Bulan	0	0%	0	0%

Tabel II.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pekerjaan Renja Kecamatan Panca Rijang
dan Pencapaian Renstra Kecamatan Panca Rijang Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah Tahun 2024-2026		Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi kinerja Program dan Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024				Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun 2024	
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan						Target Renja Perangkat Daerah		Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
-1					-2	-3	-4		-5	-6		-7	(8)=(7/6)	9=(5)	10=(9/4*100)
7	01	02			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	01	02	02.04		**Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	01	02	02.04	02	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan Jenis Urusan Pemerintah an yang terkait Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	24	Urusan	0	2	Urusan	0	0%	0	0%
7	01	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERHA KABUPATEN/KOTA**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**		**100**	**%**		**22,00**	**%**	**22,00**	**100%**	**22,00**	**22%**
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	42	Bulan	0	14	Bulan	8	0%	8	19%
7	**01**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**		**100**	**%**		**33,33**	**%**	**37,61**	**0%**	**37,61**	**38%**
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Unit	0	4	Unit	-	0%	0	0%
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	36	Bulan	0	12	Bulan	-	0%	0	0%
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjung Tamu	36	Bulan	0	12	Bulan	-	0%	0	0%
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	834	Kali	0	278	Kali	70	0%	70	8%
7	**01**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**		**100**	**%**		**33,33**	**%**	**33,33**	**0%**	**33,33**	**33%**
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	15	Unit	0	5	Unit	-	0%	0	0%
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**		**33,33**	**%**	**33,90**	**0%**	**33,90**	**34%**
7	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	900	Lembar	0	300	Lembar	-	0%	0	0%

7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komuniksi, Sumber Daya Air dan Listrik	36	Bulan	0	12	Bulan	3	0%	3	8%
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan	0	12	Bulan	3	0%	3	8%
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**		**100**	**%**		**33,33**	**%**	**31,82**	**0%**	**31,82**	**32%**
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	57	Unit	0	19	Unit	0	0%	0	0%
7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	57	Unit	0	19	Unit	0	0%	0	0%
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit	0	2	Unit	0	0%	0	0%
7	**01**	**03**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	**01**	**03**	**02.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**		**100**	**%**		**50**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**

7	01	03	02.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	24	Bulan	0	12	Bulan	0	0%	0	0%
7	**01**	**03**	**02.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**		**100**	**%**		**100**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
7	01	03	02.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terlaksana	4	Kegiatan	0	4	Kegiatan	0	0%	0	0%
7	01	03	02.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	12	Bulan	0	12	Bulan	3	0%	3	25%
7	**01**	**05**			**PROGRAM PENYELENGAARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**
7	**01**	**05**	**02.01**		**Penyelengaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
7	01	05	02.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Penyediaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatam	0	Bulan	0	12	Bulan	1	0%	1	0%
7	**01**	**06**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**		**100**	**%**		**0**	**%**	**0**	**0%**	**0**	**0%**

7	**01**	**06**	**02.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**		**100**	**%**		**50**	**%**	**0,00**	**0%**	**0,00**	**0%**
7	01	06	02.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	24	Bulan	0	12	Bulan	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	24	Bulan	0	12	Bulan	0	0%	0	0%
7	01	06	02.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	24	Bulan	0	12	Bulan	0	0%	0	0%

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Panca Rijang

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Panca rijang bahwa ditentukan isu penting yaitu sebagai berikut

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada camat di bidang pemerintahan untuk mendayagunakan yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan pembagian kewenangan Bupati kepada Camat maka Camat dengan mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki posisi yang kuat dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada potensi wilayah dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan company atau sosial responsibility, maka selamatan harus benar-benar memanfaatkan tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu DPD di pemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat ,akurat, memiliki hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar pelayanan yang secara non aktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Dengan pelayanan prima, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas

Lingkup analisis kinerja pelayanan di kecamatan Panca rijang meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa prioritas faktor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan faktor kunci keberhasilan

2.3.1. Lingkungan internal

Peluang:

1. Visi dan misi organisasi yang jelas
2. Kekuatan hukum tentang tugas pokok dan fungsi Kecamatan
3. Adanya alokasi anggaran bagi Kecamatan
4. Hanya sarana dan prasarana
5. Kewenangan koordinasi di tingkat kecamatan

Tantangan:

1. Kualitas sdm yang belum memadai
2. Belum optimalnya pelaksanaan program pengembangan Kecamatan yang diakibatkan belum jelasnya target sasaran yang merupakan ukuran pencapaian yang ingin dicapai
3. Belum optimalnya data-data kondisi ekonomi sosial dan budaya yang menjadi bahan analisis dalam perumusan perencanaan di tingkat kecamatan

2.3.2 Lingkungan eksternal

Peluang

1. Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
2. Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas prasarana wilayah dan pelayanan public
3. Keterkaitan institusional (koordinatif) pemerintahan yang ada di wilayah dengan Kecamatan
4. Dukungan dan partisipasi masyarakat luas
5. Diklat peningkatan kualitas aparatur
6. Kehidupan sosial, budaya dan keagamaan masyarakat
7. Kebutuhan akan rasa aman, tertib dan tentram

Tantangan

1. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap fungsi pemerintahan.
2. Praktek-praktek yang merusak akuntabilitas organisasi oleh aparaturnya
3. Kebijakan instansi teknis yang kurang mendukung pemberdayaan masyarakat
4. Kecenderungan masyarakat untuk mengabaikan peraturan dan kewajiban yang mengikat
5. Kondisi ekonomi masyarakat yang mengalami penurunan kualitas

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program Dan Kegiatan

Penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kecamatan Panca Rijang dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dengan nilai B dan peningkatan partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan indikator kinerja yaitu Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan dengan nilai 40%.

Adapun Perubahan anggaran untuk tahun 2024 sebesar Rp.**5.036.876.000** ,- yang rencana akan dialokasikan melalui program kegiatan Kecamatan Panca Rijang adalah sebagai berikut :

A.	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**			
1.	**Kantor Camat**			**3.574.796.000**
	a.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	3.286.852.000
	b.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	70.219.000
	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	106.172.000
	d.	Penmeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	24.193.000
	e.	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat	Rp.	2.160.000
	f.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Rp.	1.850.000
	g.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp.	79.750.000
	h.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp.	3.600.000
2.		**Kelurahan Rappang**		**410.640.000**
	a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	15.720.600
	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	97.751.400
	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	800.000
	e.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	296.368.000
3		**Kelurahan Lalebata**		**360.720.000**
	a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	16.570.200
	b.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	85.765.800
	c.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	76.664.000
	d.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	181.720.000
4		**Kelurahan Macorawalie**	Rp.	**385.440.000**
	a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	14.324.100

	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	91.503.100
	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	260.000
	e.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	279.352.800
5		**Kelurahan Kadidi**		**305.280.000**
	a.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	17.965.000
	c.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	107.401.000
	d.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp.	53.634.000
	e.	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Rp.	126.280.000

Rumusan rencana program dan kegiatan tahun 2023 untuk Kecamatan Panca Rijang dapat dilihat pada lampiran Tabel III.1

Tabel III.1
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KANTOR KECAMATAN PANCA RIJANG

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM /KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024								
			SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA		KEBUTUHAN DANA / PAGU INDIKATIF (Rp)	KELOMPOK PENERIMA MANFAAT
1	*2*	*3*	*4*	*5*		*6*	*7*		*7*	*9*	*10*	
	KECAMATAN PANCA RIJANG					**5.006.876.000**					**5.036.876.000**	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		**Kec. Panca Rijang**			**2.160.000**		**Kec. Panca Rijang**			**2.160.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang Dilimpahkan Kepada Camat		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**2.160.000**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**2.160.000**	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintah yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan Jenis Urusan Pemerintah an yang terkait Pelayanan Non Perizinan yang dilaksanakan	Kec. Panca Rijang	12	Urusan	2.160.000		Kec. Panca Rijang	12	Urusan	2.160.000	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERHA KABUPATEN/KOTA		**Kec. Panca Rijang**			**4.065.795.200**					**4.065.795.200**	

	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**3.286.852.000**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**3.286.852.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pemberian Gaji dan Tunjangan PNS dan CPNS	Kec. Panca Rijang	14,00	Bulan	3.286.852.000		Kec. Panca Rijang	14	Bulan	3.286.852.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**134.798.900**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**134.798.900**	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Panca Rijang	4	Unit	15.000.000		Kec. Panca Rijang	4	Unit	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Waktu Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	14.932.400		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	14.932.400	
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Waktu Penyediaan Fasilitas Kunjung Tamu	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	3.297.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	3.297.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Kec. Panca Rijang	278	Kali	101.569.500		Kec. Panca Rijang	278	Kali	101.569.500	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**0**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**0**	
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis Mebeleur yang diadakan	Kec. Panca Rijang	5	Unit	0		Kec. Panca Rijang	5	Unit	0	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**488.593.300**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**488.593.300**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	Kec. Panca Rijang	300	Lembar	4.804.000		Kec. Panca Rijang	300	Lembar	4.804.000	

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Penyediaan Jasa Komuniksi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	75.412.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	75.412.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	408.377.300		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	408.377.300	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**155.551.000**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**155.551.000**	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Panca Rijang	19	Unit	22.039.000		Kec. Panca Rijang	19	Unit	22.039.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Kec. Panca Rijang	19	Unit	2.930.000		Kec. Panca Rijang	19	Unit	2.930.000	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Panca Rijang	2	Unit	130.582.000		Kec. Panca Rijang	2	Unit	130.582.000	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					**885.570.800**					**885.570.800**	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		**Kec. Panca Rijang**			**1.850.000**		**Kec. Panca Rijang**			**1.850.000**	

	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Waktu Penyediaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.850.000		Kec. Panca Rijang	12	Kel	1.850.000	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		**Kec. Panca Rijang**			**883.720.800**		**Kec. Panca Rijang**			**883.720.800**	
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terlaksana	Kec. Panca Rijang	4	Bulan	212.640.800		Kec. Panca Rijang	4	Bulan	212.640.800	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Rencana Pembangunan	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	671.080.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	671.080.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		**Kec. Panca Rijang**			**49.750.000**					**79.750.000**	
	Penyelengaraan Urusan Pemerintah Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**49.750.000**		**Kec. Panca Rijang**	**100**	**%**	**79.750.000**	
	Pelaksanaan Tuggas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Waktu Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Panca Rijang	14,00	Bulan	49.750.000		Kec. Panca Rijang	14	Bulan	79.750.000	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		**Kec. Panca Rijang**			**3.600.000**		**Kec. Panca Rijang**			**3.600.000**	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		**Kec. Panca Rijang**			**3.600.000**		**Kec. Panca Rijang**			**3.600.000**	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Waktu Penyediaan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.200.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.200.000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Waktu Penyediaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.200.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.200.000	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu Penyediaan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.200.000		Kec. Panca Rijang	12	Bulan	1.200.000	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (RENJA) Kecamatan Panca Rijang merupakan dasar pedoman bagi pelaksanaan kegiatan Kantor Kecamatan Panca Rijang selama jangka waktu 1 (satu) tahun yaitu tahun 2024 dan untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam RENJA Kecamatan Panca Rijang di atas, dengan tekad menyukseskan pembangunan di Kabupaten Sidenreng Rappang serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan di pundak kami.

Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan,untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Panca Rijang, 2024
Plt.CAMAT PANCA RIJANG

H,ZAINAL,S.Pd
Pangkat :
NIP. 19720703 199103 1 002

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN TAHUN 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun sebagai implementasi dari tahapan perencanaan tahunan. Penyusunan Renja Perubahan merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggung jawabkan. Diharapkan penyusunan Renja Perubahan ini dapat memberikan arah dan pedoman untuk rencana kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Semoga Allah,SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA DINAS PMDPPA,

H.ABBASARAS SP.,M.AP

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198711 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR			i
DAFTAR ISI			ii
DAFTAR TABEL			iii
BAB I	**:**	**PENDAHULUAN**	**1**
		1.1 Latar Belakang	1
		1.2 Landasan Hukum	2
		1.3 Maksud dan Tujuan	4
		1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II	**:**	**EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN**	**5**
		2.1 Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	5
		2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	12
BAB III	**:**	**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**	**14**
		3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024	14
BAB IV	**:**	**PENUTUP**	**24**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2024	6
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024	16

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 perlu dilakukan perubahan seiring dengan adanya Perubahan RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi :

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 Nomor 5);

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksudnya disusun Renja Perubahan adalah melakukan penyesuain target kinerja dan kerangka pendanaan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD Tahun 2024.

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja Perubahan adalah :

1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran dan berkisanmbungan;
2) Penyesuaian target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan,

3) Sebagai dasar penyusunan rencana anggaran perubahan Perangkat Daerah;
4) Mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Bab ini menguraikan evaluasi pelaksanan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat renca kerja dan pendanaan perubahan tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Dalam Dokumen Perencanaan dilakukan Evaluasi dalam pelaksanaannya, maka dari itu Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 tersebut harus dilakukan evaluasi.

Adapun yang perlu diperhatikan dalam Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mencapai target kinerja dan melampaui target kinerja yang direncanakan;
2. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhi atau melebihi target kinerja program/kegiatan yang direncanakan.
3. Dampak yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah.
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil dalam mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pemeberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
2. Memperhatikan keberlanjutan untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
3. Hasil evaluasi capaian kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan Perubahan Renja tahun 2024.
4. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan.
5. Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakan serta seksi pelaksana.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pemdes dan PPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabnel II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kagiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
	Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkenaan dengan Pelayanan Dasar								
	Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER	**Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif**	**99.00 %**						
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan organisasi pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender**	**96.01 %**						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Perbup/Perda yang dirumuskan terkait pelaksanaan PUG	1 Perbup/Perda						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi & sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten/Kota	180 Orang						
	Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Orang yang diberikan sosialisasi terkait kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG	180 Orang						

	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)**	**55.01**	**55.01**				**55.01**	**100.00**
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah organisasi yang mendapatkan informasi terkait partisipasi perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	10 Organisasi	10				10	100.00
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan**	**100.00%**						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyadia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan yng didampingi	3 Lembaga						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas yang diberikan informasi layanan pemberdayaan perempuan	60 Orang						
	PPROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	**Persentase Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**	**0.21 %**						
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan kekerasan terhadap perempuan**	**100.00%**						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan informasi pencegahan kekerasan terhadap Perempuan	60 Orang						
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan layanan rujukan lanjutan yang tersedia bagi perempuan korban kekerasan**	**100.00%**						
	Penyediaan Layanan Pengaduan	Jumlah pengaduan kasus	15 Kasus						

	Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	kekerasan perempuan yang ditangani							
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah petugas layanan rujukan yang terinformasi terhadap penanganan kasus kekerasan perempuan	50 Orang						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase lembaga dan sumber daya manusia yang mendapatkan engembangan perlindungan perempuan**	**100.00%**						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pendampingan dan memanfaatkan sarana prasarana	20 Orang						
	Penyedia Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah korban kekerasan perempuan yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan spesifik	15 Orang						
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	**Cakupan keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga**	**0.30%**						
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**100.00%**						
	Pelaksanaan Komunikasi,Informasi dan Edukuasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi teknik pembuatan media edukasi KG dan perlindugan anak	350 Orang						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah	**Persentase pengembangan layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam**	**100.00%**						

	Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	**daerah kabupaten/kota**							
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dalam rangka pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga	4 Kali						
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang diberikan informasi peningkatan kualitas keluarga	170 Orang						
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	**Cakupan Data Gender dan Anak**	**100.00%**						
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Persentase data yang dikumpulkan, diolah, dianalisis data gender dan anak dalam kelembagaan data**	**100.00%**						
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak yang dibuat	8 Dokumen						
	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga atau OPD yang memanfaatkan data gender	48 Lembaga & OPD						
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	**Persentase kekerasan terhadap anak**	**0.001%**						
	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak**	**100.00%**						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha dalam rangka pemenuhan hak anak	4 Kali						
	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah koordinasi dalam	18 Kali						

	Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	rangka pemberian informasi pemenuhan hak anak							
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	**Cakupan Latihan untuk peningkatan kualitas hidup anak**	**100.00%**						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi terkait pemenuhan kualitas hidup anak	60 Orang						
	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dan jenis media KIE yang dibuat	3 Jenis Media KIE						
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jejaring antar lembaga penyedia layanan kualitas Hidup anak	1.050 Orang						
	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	**Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten**	**100.00%**						
	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan upaya pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kabupaten/ kota**	**100.00%**						
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pendampingan dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	7 Kali						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta yang mendapatkan informasi upaya pencegahan kekerasan terhadap anak	50 Orang						
	Pemyediaan Layanan Bagi Anak	**Cakupan layanan bagi**	**100.00%**						

	yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**anak yang memerlukan perlindungan khusus**							
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan layanan pengaduan masyarakat bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100.00%						
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pengembangan Penyedia Layanan Bagi Anak**	**100.00%**						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindugan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koordinasi bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	3 Kali						
	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindugan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta ynag mendapatkan informasi terkait perlindungan khusus anak	45 Orang						
	Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
	PROGRAM PENATAAN DESA	**Persentase peningkatan perkembangan desa**	**100.00%**						
	Penyelenggaraan Penataan Desa	**Cakupan fasilitasi pembinaan dan pembentukan penataan desa**	**100.00%**						
	Pembentukan Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa	Jumlah desa terbentuk	3 Desa						
	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah perdes kewenangan desa	20 Perdes						
	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah desa baru dan kode desa terbentuk	3 Desa						
	Fasilitasi Penetapan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah penetapan kesatuan masyarakat hukum adat dan desa adat kewenagan	1 Desa Adat						

		kabupaten							
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah desa mandiri yang mendapatkan bantuan sarana dan prasarana	10 Desa						
	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama**	**100.00%**						
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa	**Cakupan kerjasama desa**	**100.00%**						
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Dalam Kabupaten/Kota	Persentase desa yang telah menjalin perjanjian kerjasama	100.00%						
	Fasilitasi Kerjasama antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang melakukan kerjasama dalam kabupaten	30 Desa						
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	3 Kawasan						
	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Pengentasan Desa Tertinggal**	**75.00%**						
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Cakupan pelaksanaan tata kelola administrasi pemerintahan desa**	**100.00%**						
	Fasilitasi Penyelenggaran Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menerapkan standar pelayanan minimal desa	20 Desa						
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah kepala desa,aparat desa dan anggota BPD mengetahui produk hukum desa	816 Orang						
		Jumlah produk hukum desa	15 Produk Hukum						
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang Melaksanakan Musrembang RKPDesa/APBDesa	204 Desa						
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah kepala desa, aparat desa dan aparat kecamatan yang ditingkatkan kapasitasnya	1.224 Orang						
	Fasilitasi Penyelenggaran Musyawarah Desa	Jumlah desa yang melaksanakan musyawarah desa	68 Desa						

	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa Membuat Perdes sesuai Peraturan Perundang-undangan	204 Desa						
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja sama antar Desa	Jumlah BUMDes yang dibina	51 BUMDes						
	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah penyelenggaraan pemilihan kepala desa	30 Desa						
	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah kepala desa yang dilantik	30 Desa						
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah profil desa yang dibuat	204 Profil Desa						
	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah aparat desa yang difasilitasi terkait manajemen pemerintahan desa	1.836 Orang						
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah laporan aset desa yang direkonsiliasi	204 Laporan Desa						
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah anggota BPD yang ditingkatkan kapasitasnya	1.020 Orang						
	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah perbup batas desa yang diterbitkan	1 Perbup						
	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah laporan pertanggungjawaban kepala desa	204 Laporan						
	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah desa yang mendapat urusan penugasan kewenangan kabupaten	30 Desa						
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah desa yang mengikuti lomba desa Tingkat Provinsi	30 Desa						
	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Persentase Desa/Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan yang Aktif**	**100.00%**						
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak	**Persentase Lembaga Kemasyarakatan**	**100.00%**						

	di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	**Desa/Kelurahan yang dibina**							
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Aparat Desa/Kelurahan yang Mengikuti Sosialisasi	318 Desa/Kelurahan						
		Jumlah Lembaga Adat Desa/Kelurahan yang di Inventarisasi	86 Lembaga Adat Desa/Kelurahan						
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah LPM Desa/Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan	87 Lembaga						
		Jumlah Lembaga Posyandu Desa/ Kelurahan yang Mendapatkan Pembinaan	106 Desa/Kelurahan						
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Pengurus BP-SPAMS Pengelolaan Air Bersih yang akan dibina	79 BP-SPAMS						
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Desa/Kelurahan yang dilatih Masyarakatnya	60 Desa/Kelurahan						

		Jumlah Kelompok UPK eks PNPM yang difasilitasi	30 Kecamatan						
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kelompok TTG yang akan dibina	58 Kelompok						
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok PKK Desa/Kelurahan yang dibina							
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100.00%**						
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah**	**100.00%**						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	7 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA yang disusun	3 Dokumen						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun	6 Dokumen						
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100.00%**						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN	36 Bulan						
	Koordinas dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang disusun	3 Laporan						
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah**	**100.00%**						

	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah barang milik daerah yang diasuransikan	4 Unit						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerrah**	**100.00%**						
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	20 Buah						
	Penyelenggaran Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	430 Kali						
		Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	210 Kali						
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pengadaan Baran Milik Daerah**	**100.00%**						
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis meubeleur yang diadakan	3 Unit						
	Penagdaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya yang diadakan	6 Unit						
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan administrasi umum perangkat daerrah**	**100.00%**						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen yang bermaterai	1.000 Lembar						
	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36 Bulan						
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	36 Bulan						
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**100.00%**						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas jabatan yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin/berkala	48 Unit						
	Pemeliharaan/Rahabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang mendapatkan pemeliharaan	1 Unit						

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	30 Unit						
		Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang mendapatkan pemeliharaan rutin/berkala	26 Unit						

Tabel II.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan
Pencapaian Renstra PD s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8 = (7/6)*	*9 = 7*	*10 = (9/4*100)*
2				**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**								
2	**13**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**13.01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**13.01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah**	**42 Bulan**		**14 Bulan**	**6 Bulan**	**50.00 Persen**	**6 Bulan**	**14,28 Persen**
2	13.01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	9 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100,00 Persen	2 Dokumen	33,33 Persen

2	13.01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen	1 Dokumen	33,33 Persen
2	13.01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 Persen	0 Dokumen	00,00 Persen
2	13.01	2.01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100,00 Persen	1 Dokumen	33,33 Persen
2	13.01	2.01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00 Persen	0 Dokumen	0,00 Persen
2	13.01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100,00 Persen	2 Laporan	33,33 Persen
2	**13.01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
5	13.01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1.610 Orang/ Bulan		490 Orang/ Bulan	210 Orang/ Bulan	42.85 Persen	210 Orang/ Bulan	13.04 Persen
2	13.01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan?Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	180 Laporan		60 Laporan	30 Laporan	50.00 Persen	30 Laporan	16.66 Persen
2	**13.01**	**2.06**		**Admnistrasi Umum Peangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	13.01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang	5 Paket		1 Paket	0 Paket	0.00 Persen	0 Paket	0.00

					disediakan							
2	13.01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	445 Laporan		145 Laporan	26 Laporan	17.93 Person	26 Laporan	5.84 Persen
2	**13.01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	13.01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Konmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36 Laporan		12 Laporan	6 Laporn	50.00 Persen	6 Laporan	16.66 Persen
2	13.01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36 Laporan		12 Lporan	6 Laporn	50.00 Persen	6 Laporan	16.66 Persen
2	**13.01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	13.01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	48 Unit		16 Unit	2 Unit	12.50 Persen	2 Unit	4.16 Persen
2	13.01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	13 Unit		3 Unit	0 Unit	0.00 Persen	0 Unit	0.00 Persen
2	**13.03**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase peningkatan kawasan kawasan perdesaan yang difasilitasi**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**13.03**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Cakupan kawasan perdesaan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	13.03	2.01	0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	10 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.00 Persen	1 Dokumen	10.00 Persen
2	**13.04**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase desa yang mampu menyelenggarakan tertib administrasi desa dan pelaporan tepat waktu**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**13.04**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**

2	13.04	2.01	0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	204 Dokumen		68 Dokumen	34 Dokumen	50.00 Peresen	34 Dokumen	16.66 Persen
2	13.04	2.01	0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	204 Dokumen		68 Dokumen	34 Dokumen	50.00 Peresen	34 Dokumen	16.66 Persen
2	13.04	2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	68 Dokumen		23 Dokumen	10 Dokumen	43.40 Persen	10 Dokumen	14.70 Persen
2	13.04	2.01	0013	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	68 Dokumen		68 Dokumen	68 Dokumen	100.00 Persen	68 Dokumen	100.00 Persen
2	13.04	2.01	0015	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	15 Desa		5 Desa	0 Desa	0.00 Persen	0 Desa	0.00 Persen
2	**13.05**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase lembaga kemasyarakatan yang mampu meningkatkan kapasitas dalam pemberdayaan masyarakat**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**13.05**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	13.05	2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan	50 Dokumen		17 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Persen	0 Dokumen	0.00 Persen

					Masyarakat Hukum Adat							
2	13.05	2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	32 Lembaga		12 Lembaga	12 Lembaga	100.00 Persen	12 Lembaga	37.50 persen
2	13.05	2.01	0004	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	49 Unit		20 Unit	10 Unit	50.00 Persen	10 Unit	20.40 Persen
2	13.05	2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	60 Laporan		20 Laporan	0 Laporan	0.00 Persen	0 Laporan	0.00 Persen
2	13.05	2.01	0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	39 Dokumen		13 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Persen	0 Dokumen	0.00 Persen
2	13.05	2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	318 Dokumen		106 Dokumen	16 Dokumen	15.00 Persen	16 Dokumen	5.03 Persen
2	**08**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**								

2	**08.02**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase ARG pada belanja operasional dan belanja modal APBD**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**08.02**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender**	**87.00 Persen**		**29 Persen**				
2	08.02	2.02	0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0.00 Persen	0 Dokumen	0.00 Persen
2	**08.04**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2	**08.04**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**
2	08.04	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	87 Perangkat Derah		29 Perangkat Daerah	29 Perangkat Daerah	100.00 Persen	29 Perangkat Daerah	33.33 Persen
2	**08.06**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**
2	**08.06**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan lembaga yang memberikan layanan untuk pemenuhan hak anak**	**100 Persen**		**100 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**	**50.00 Persen**

2	08.06	2.01	0001	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	12 Organisasi		3 Organisasi	2 Organisasi	6.66 Persen	2 Organisasi	16.66 Persen

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang didukung dengan potensi sumber daya manusia dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi, yaitu :

1. Masih Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Sarana dan Prasarana belum memadai
3. Kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi pengurus LKD
4. Kurangnya pemahaman pemerintah desa tentang peran dan fungsi lembaga usaha ekonomi desa (BUMDes, TTG dan Kawasan Perdesaan)
5. Dampak perubahan regulasi pada Lembaga Ekonomi Desa
6. Pengawasan pelestrarian asset dari program nasional sangat lemah.
7. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pengisian data profil desa yang berbasis website.
8. Kurangnya pemahaman aparat desa terhadap pembentukan produk hokum desa.
9. Belum adanya dokumen terkait penetapan dan penegasan batas desa.
10. Penataan aset desa belum maksimal.
11. Minimnya anggaran sehingga pelaksanaan pelatihan PPRG dan pelatihan pemenuhan hak anak tidak dilaksanakan.
12. Pengembangan PUSPAGA harus bias sampai ke desa.
13. Peningkatan kapasitas SDM dalam pendampingan kasus dan penanganan anak harus tetap dilakukan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024

Berdasarkan hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun berdasarkan program dan kegiatan prioritas nasional dan kebutuhan dilapangan serta disinkronisasikan dengan program dan kegiatan prioritas. Jumlah program dalam Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 sebanyak 7 (sembilan) program, 11 (sebelas) kegiatan dan 28 (dua puluh delapan). Sumber Pendanaan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renja Perubahan Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Dana Alokasi Umum Peruntukan. Berikut Rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
4) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD;
5) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD;
6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

1) Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor;
2) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
2) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.

1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
2) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

II. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA

1. Fasilitasi KerjaSama antar Desa

1) Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

III. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHANDESA

1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

1) Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
2) Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa:
3) Fasilitasi Penyusunan Profil Desa;
4) Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa.

IV. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

1. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

1) Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
2) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;
3) Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang

Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat;

4) Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
5) Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa;
6) Fasilitasi Tim Penggerak dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga.

V. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Sosilaisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi.

VI. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota.

VII. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK

1. Pelembgaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

1) Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.1. berikut :

Tabel 3.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA. 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode				Urusan/Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub-Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2023							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif*	*Kelompok Penerima Manfaat*	*Lokasi*	*Target Capaian Kinerja*	*Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif*	*Kelompok Penerima Manfaat*
1				*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
2	**13**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**		**Kab. Sidrap**		**3.305.046.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**		**3.530.516.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**13.1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**2.953.046.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**2.962.656.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**13.1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Waktu pelaporan perencanaan, penganggaran dan capaian kinerja perangkat daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**17.000.000**	**Aparatur**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**17.000.000**	**Aparatur**
2	13.1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan perangkat daerah	Kab. Sidrap	3 Dokumen	3.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	3 Dokumen	3.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur

2	13.1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan DPA-SKPD	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Dokumen	2.500.000	Aparatur
2	13.1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerjan SKPD	Kab. Sidrap	2 Laporan	3.500.000	Aparatur	Kab. Sidrap	2 Laporan	2.500.000	Aparatur
2	**13.1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan layanan administrasi keuangan perangkat daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**2.481.100.000**	**Aparatur**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**2.461.022.000**	**Aparatur**
2	13.1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kab. Sidrap	490 Orang/ Bulan	2469.100.000	Aparatur	Kab. Sidrap	490 Orang/ Bulan	2.449.022.000	Aparatur

2	13.1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kab. Sidrap	60 Laporan	12.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	60 Laporan	12.000.000	Aparatur
2	**13.1**	**2.06**		**Admnistrasi Umum Peangkat Daerah**	**Cakupan administrasi umum perangkat daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**197.261.000**	**Aparatur**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**228.552.000**	**Aparatur**
2	13.1	2.06	2	Penyediaan Perelatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kab. Sidrap	1 Paket	85.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	1 Paket	80.000.000	Aparatur
2	13.1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kab. Sidrap	145 Laporan	112.261.000	Aparatur	Kab. Sidrap	145 Laporan	148.552.000	Aparatur
2	**13.1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**203.989.000**	**Aparatur**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**177.480.000**	**Aparatur**
2	13.1	2.08	2	Penyediaan Jasa Konmunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kab. Sidrap	12 Laporan	42.000.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Laporan	31.000.000	Aparatur
2	13.1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kab. Sidrap	12 Lporan	161.989.000	Aparatur	Kab. Sidrap	12 Lporan	146.480.000	Aparatur
2	**13.1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan pemeliharaan barang milik daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**53.696.000**	**Aparatur**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**78.602.000**	**Aparatur**

2	13.1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Kab. Sidrap	16 Unit	51.946.000	Aparatur	Kab. Sidrap	16 Unit	77.552.000	Aparatur
2	13.1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kab. Sidrap	3 Unit	1.750.000	Aparatur	Kab. Sidrap	3 Unit	1.050.000	Aparatur
2	**13.3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**	**Persentase desa yang telah menjalin perkjnjian kerjasama**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**15.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**15.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**13.3**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**	**Cakupan kerja sama desa**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**15.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**15.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	13.3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah dokumen hasil fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Kab. Sidrap	2 Dokumen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Dokumen	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	**13.4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase pengentasan desa tertinggal**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**80.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**75.860.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**13.4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Cakupan pelaksanaan tatakelola administrasi pemerintahan desa**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**80.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**75.860.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	13.4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah dokumen pengelolaan keuangan desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	29.756.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	8	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pemberdayaan BUM desa dan lembaga kerja sama antar desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	30.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	30.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah dokumen profil desa	Kab. Sidrap	23 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	23 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah dokumen hasil pengelolaan asset desa	Kab. Sidrap	68 Dokumen	10.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	68 Dokumen	11.104.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Kab. Sidrap	5 Desa	15.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	5 Desa	0	Aparatur dan Masyarakat
2	**13.5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Persentase desa/ kelurahan dengan lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang aktif**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**257.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**477.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**13.5**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase lembaga kemasyarakatan desa/ kelurahan yang dibina**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**257.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**477.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**

2	13.5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	17 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	17 Dokumen	0	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu, LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kab. Sidrap	12 Lembaga	52.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	12 Lembaga	52.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	4	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT,RW,PKK,Posyandu,LPM dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Kab. Sidrap	20 Unit	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	20 Unit	20.000.000	Aparatur dan Masyarakat

2	13.5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa Dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kab. Sidrap	20 Laporan	25.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	20 Laporan	25.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Kab. Sidrap	13 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	13 Dokumen	5.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	13.5	2.01	9	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	umlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Kab. Sidrap	106 Dokumen	150.000.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	106 Dokumen	375.000.000	Aparatur dan Masyarakat
2	**8**			**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**		**Kab. Sidrap**		**610.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**		**610.000.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**8.2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan keluarga yang aktif**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**399.999.500**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**399.999.500**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	**8.2**	**2.01**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan organisai pemerintah yang ikut dalam kegiatan pengarusutamaan gender**	**Kab. Sidrap**	**30.00 Persen**	**399.999.500**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**30.00 Persen**	**399.999.500**	**Aparatur dan Masyarakat**

2	8.2	2.01	4	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan dai Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Sidrap	2 Dokumen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Dokumen	399.999.500	Aparatur dan Masyarakat
2	**8.4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**149.500.000**	**Masyarakat dan Perangkat Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**149.500.000**	**Masyarakat dan Perangkat Daerah**
2	**8.4**	**2.01**		**Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tigkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase keluarga dan lembaga penyedia layanan yang mendapatkan pengembangan kualitas keluarga**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**149.500.000**	**Masyarakat dan Perangkat Daerah**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**149.500.000**	**Masyarakat dan Perangkat Daerah**
2	8.4	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mendapat advokasi dan pendampingan keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan perlindungan anak kewenangan kabupaten/kota	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah	Kab. Sidrap	29 Perangkat Daerah	149.500.000	Masyarakat dan Perangkat Daerah
2	**8.6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Indeks Perlindungan Anak (IPA)**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**60.500.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**60.500.000**	**Aparatur dan Masyarakat**

2	**8.6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Cakupan Lembaga yang Memberikan Layanan untuk Pemenuhan Hak Anak**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**60.500.000**	**Aparatur dan Masyarakat**	**Kab. Sidrap**	**100 Persen**	**60.500.000**	**Aparatur dan Masyarakat**
2	8.6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	Kab. Sidrap	2 Organisasi	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat	Kab. Sidrap	2 Organisasi	60.500.000	Aparatur dan Masyarakat

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dan RKPD Perubahan Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan dan visi dan misi daerah serta menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.1 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang dan seluruh staff Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
    a. Melaksanakan Perubahan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

1.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKA-P). Implementasi dari Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang 2024-2026 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

KEPALA DINAS PEMDES DAN PPA,

H.ABBASARAS,SP.,M.AP

Nip. 19651231 198711 1 013

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH

PERUBAHAN RENJA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rakhmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya semata Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 ini dapat tersusun.

Penyusunan Perubahan Renja PD ini sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan arah kebijakan dan sasaran pokok Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 – 2025 sebagai ukuran tercapainya Visi Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 "Terwujudnya Sidenreng Rappang Sebagai salah satu Kabupaten Terkemuka di Indonesia Tahun 2025".

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada perubahan anggaran tahun 2024 dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah termasuk Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 disusun, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat dalam menunjang pelaksanaan kegiatan yang dapat mensejahterakan masyarakat. Amin.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH SIDENRENG RAPPANG

MUH. YUSUF, SH, M.Kn
Nip. 198201012011011006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... ii

DAFTAR TABEL..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1 Latar Belakang..... 1
1.2 Landasan Hukum..... 2
1.3 Maksud dan Tujuan 3
1.4 Sistematika Penyusunan 3

BAB II EVALUASI RENJA SAMAPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN..... 6
2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai denggan Triwulan II Tahun 2024.... 6
2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah..... 31

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 33

BAB IV PENUTUP..... 52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.a	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rapapng	9
Tabel 2.1.b	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Sidenreng Rapapng	20
Tabel 3.1	Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubaha Tahun Anggaran 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang	38

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengisyaratkan perlu adanya Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional dan Penganggarannya, baik pada aspek proses mekanismenya maupun dokumen perancanaan yang harus disusun ditingkat Pusat dan daerah. Dokumen dimaksud meliputi Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Perencanaan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahunan. Pemerintah daerah harus menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sedangkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (selanjutnya disebut SKPD) harus menyusun Rencana Strategis (selanjutnya disingkat Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) SKPD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja merupakan satu kesatuan dokumen yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024, sehingga dalam melakukan perubahan berpedoman pada Renja tersebut. Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan, Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Perangkat Daerah dan kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah ini juga tidak terlepas dari adanya penyesuan anggaran program dan kegiatan serta sub kegiatan yang difokuskan pada pencapaian tujuan Sekretariat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan Perubahan Renja ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dearah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tengang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6765);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidnereng Rappang Tahun 2000-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng RappangTahun 2007, Nomor 26);

6. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 13).

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai upaya untuk penyesuaian pelaksanaan program dan kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

1.3.1.Maksud:

Maksud dari penyusunan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah:

a. Memberikan informasi pencapaian hasil selama tahun berjalan serta kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Daerah.
b. Menjabarkan rencana program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Perubahan Renstra Sekretariat Daerah dalam bentuk rencana kerja perubahan dan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana kerja.

1.3.2. Tujuan:

Tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

a. Kerangka acuan dalam penyusunan RKAP-PD Tahun 2024;
b. Memberikan informasi permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun berjalan 2024;
c. Memberikan informasi tantangan dan peluang yang dimiliki dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024;
d. Memberikan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi;

1.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika Penulisan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan Renja Sekretariat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan Proses penyusunan Perubahan renja Sekretariat Daerah,

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan perubahan Renja Sekretariat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

Bab II : Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Bab ini memuat tentang kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

1. Realisasi program/Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi progam/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target

kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Dearah;
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah berisikan uraian :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
3. Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
4. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan stragesis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Dearah

Memuat Urusan/bidang urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidakan mengalami perubahan, dengan format tabel 3.1.

Bab IV : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa :

1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan;
3. Rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 juga harus dilakukan evaluasi.

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 sampai dengan Truwulan II untuk melihat sejauh mana realisasi program/kegiatan dalam pemenuhan target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program dan Kegiatan pada Sekretariat Daerah tersebar pada 10 Bagian yang mengelola 3 Program dan 19 Kegiatan serta 66 sub kegiatan baik itu rutin dan kegiatan teknis. Dan untuk Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Kota yang merupakan program rutin dengan indikator cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah untuk Triwulan II Tahun 2024 program ini secara umum sudah teralisasi sebesar 30 % dan kegiatan yang belum memenuhi target adalah Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dan Kegiatan Pengadaan Barang milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah serta Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.

Untuk Program Pemerintahan dan Kesejahteraan dengan indikator Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan oleh bagian Tata Pemerintahan dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan dengan capaian 55%, untuk Indikator Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan Lembaga Keagamaan yang mengajukan proposal yang dilaksanakan oleh bagian Kesejahteraan Rakyat terdiri

dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan dengan indikator Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal untuk triwulan II masih 0 %, untuk Indikator Jumlah produk hukum yang dihasilkan yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum yang terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan mencapai 73 dokumen dan terakhir untuk indikator Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan yang dilaksanakan oleh Bagian Kerjsama dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiattan diperoleh hasil sebesar 3 dokumen

Program Perekonomian dan Pembangunan dengan indikator Persentase laporan perekonomian yang dillaksanakan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang terdiri atas dua kegiatan dan enam sub kegiatan dengan capaian 60% dan untuk indikator Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan yang dilaksanakan oleh Bagian Administrasi Pembangunan dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan diperolleh hasil 25 % dan untuk persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu yang dikelola oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan satu kegiatan dan tiga sub kegiatan diperoleh nilai 2,45 %.

Dengan Demikian Program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II pada Sekretariat Daerah sudah menenuhi target akan tetapi belum ada yang melebihi target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya.

Tercapai atau tidaknya target kinerja yang direncakanan tidak terlepas dari berbagai faktor, untuk Sekretariat daerah ada beberapa faktor yang menyebabkan kurang maksimalnya capaian kinerja program dan Kegiatan untuk Tahun 2024 antara lain :

a. Terdapat beberapa Bagian yang masih kurang personil yang berstatus ASN yang disebabkan oleh Mutasi ataupun Promosi ke OPD lain.
b. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya;
c. Masih kurangnya Pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan tekhnis aparatur;

Dalam mengatasi faktor penyebab tidak tercapainya realisasi kinerja pada Sekretariat Daerah maka kebijakan yang diambil Untuk menumbuh kembangkan kegiatan Pelayanan pada Sekretariat Daerah yang selama ini berjalan yaitu dengan cara :

a. Meningkatkan kedisiplinan aparatur dengan melakukan upaya pengawasan berjenjang dimana Fungsinal Pelaksana dan Fungsinal Ahli Muda diawasi oleh pejabat eselon III dan Pejabat eselon III diawasi oleh Pejabat eselon II.
b. Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan mengikutsertakan Bimtek maupun mendukung dalam melanjutkan Pendidikan ke tingkat lebih tinggi agar kompetensi mereka meningkat.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan Evaluasi Renja Sekretariat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.a dan 2.1.b dibawah ini :

Tabel 2.1.a
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	**2**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
4	***2***	***01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen	6 dokumen				6 dokumen	100%
4	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%
4	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%
4	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%
4	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	6 laporan	6 laporan				6 laporan	100%
4	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	6 laporan				6 laporan	100%
4	***2***	***02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah***	***100 Persen***	***91 Persen***				***91 Persen***	***91%***
4	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4494 Orang/bulan	4284 Orang/bulan				4284 Orang/bulan	95%
4	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1080 dokumen	936 dokumen				936 dokumen	87%
4	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	58 dokumen	42 dokumen				42 dokumen	72%
4	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	3 laporan				3 laporan	100%
4	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	54 laporan	54 laporan				54 laporan	100%
4	***2***	***03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	***2***	***05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian peangkat daerah***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	35 Unit	35 Unit				35 Unit	100%
4	***2***	***06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah***	***100 Persen***	***92 Persen***				***92 Persen***	***92%***
4	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan	36 laporan				36 laporan	60%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.176 laporan	985 laporan				985 laporan	84%
4	***2***	***07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pengadaan barang milik daerah***	***100 Persen***	***87 Persen***				***87 Persen***	***87%***
4	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	118 unit	94 unit				94 unit	80%
4	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	19 unit	18 unit				18 unit	95%
4	***2***	***08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***100 Persen***	***83 Persen***				***83 Persen***	***83%***
4	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan				12 laporan	33%
4	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	***2***	***09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***100 Persen***	***54 Persen***				***54 Persen***	***54%***

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit	83 Unit				83 Unit	75%
4	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit	21 Unit				21 Unit	54%
4	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit	50 Unit				50 Unit	32%
4	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	12 Unit				12 Unit	57%
4	***2***	***11***		***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***100 Persen***	***61 Persen***				***61 Persen***	***61%***
4	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	84 Orang/ Bulan	84 Orang/ Bulan				84 Orang/ Bulan	100%
4	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	223 Paket	98 Paket				98 Paket	44%
4	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18 Orang	0 Orang				0 Orang	0%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Orang/ Bulan	72 Orang/ Bulan				72 Orang/ Bulan	100%
4	***2***	***12***		***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	36 Paket	36 Paket				36 Paket	100%
4	***2***	***13***		***Penataan Organisasi***	***Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 dokumen	12 dokumen				12 dokumen	100%
4	2	13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 laporan	6 laporan				6 laporan	100%
4	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%
4	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen	3 dokumen				3 dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 dokumen	6 dokumen				6 dokumen	100%
4	***2***	***14***		***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan***	***100 Persen***	***97 Persen***				***97 Persen***	***97%***
4	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	144 laporan	140 laporan				140 laporan	97%
4				**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah**	**100 Persen**	**100 Persen**				**100 Persen**	**100%**
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	**100 Persen**	**80 Persen**				**80 Persen**	**80%**
					Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan	**100 Persen**	**81 Persen**				**81 Persen**	**81%**
					Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan	**100 Persen**	**100 Persen**				**100 Persen**	**100%**
4	***2***	***01***		***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9 dokumen	9 dokumen				9 dokumen	100%
4	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 dokumen	9 dokumen				9 dokumen	100%
4	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 dokumen	12 dokumen				12 dokumen	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	***2***	***02***		***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan***	**100 Persen**	**86 Persen**				**86 Persen**	**86%**
	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	203 dokumen	141 dokumen				141 dokumen	69%
4	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	33 dokumen	33 dokumen				33 dokumen	100%
4	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	99 dokumen	88 dokumen				88 dokumen	89%
4	***2***	***03***		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan***	**100 Persen**	**81 Persen**				**81 Persen**	**81%**
4	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.190 dokumen	1740 dokumen				1740 dokumen	79%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	78 Kasus	65 Kasus				65 Kasus	83%
4	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.190 dokumen	1740 dokumen				1740 dokumen	79%
4	***2***	***04***		***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi***	***100 Persen***	***75 Persen***				***75 Persen***	***75%***
4	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 dokumen	58 dokumen				58 dokumen	97%
4	2	04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	45 dokumen	23 dokumen				23 dokumen	51%
4	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	105 laporan	81 laporan				81 laporan	77%
4				**Program Perekonimian dan Pembangunan**	**Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan**	**100 Persen**	**77,50 Persen**				**77,50 Persen**	**78%**
					Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	**100 Persen**	**45 Persen**				**45 Persen**	**45%**
					Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	**2,45 Persen**	**2,98 Persen**				**2,98 Persen**	**122%**
4	***2***	***01***		***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen	12 Dokumen				12 Dokumen	100%
4	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan	6 Laporan				6 Laporan	100%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen	12 Dokumen				12 Dokumen	100%
4	***2***	***02***		***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Persentase data pembangunan yang dilaporkan***	***100 Persen***	***100 Persen***				***100 Persen***	***100%***
4	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	36 dokumen	36 dokumen				36 dokumen	100%
4	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	36 laporan	36 laporan				36 laporan	100%
4	***2***	***03***		***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu***	**60 Persen**	**67 Persen**				**67 Persen**	**67%**
4	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang d	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36 dokumen	36 dokumen				36 dokumen	100%
4	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 dokumen	36 dokumen				36 dokumen	100%
4	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	900 Orang	850 Orang				850 Orang	94%
4	***2***	***04***		***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***	***Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam***	**100 Persen**	**100 Persen**				**100 Persen**	**100%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Tahun 2021-2023)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	48 Laporan	48 Laporan				48 Laporan	100%
4	2	04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	3 dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	100%
4	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 dokumen	3 Dokumen				3 Dokumen	100%

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

MUH. YUSUF, SH, M.Kn
NIP. 198201012011011006

Tabel 2.1.b
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	**2**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							
4	***2***	***01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran***	**100 Persen**		**100 Persen**	**57 Persen**	**57%**	**19 Persen**	**19%**
4	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	33,33%
4	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	33,33%
4	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00%
4	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 dokumen		1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	33,33%
4	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	6 laporan		2 laporan	1 laporan	50%	1 laporan	16,67%
4	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 laporan		2 laporan	1 laporan	50%	1 laporan	16,67%
4	***2***	***02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**61 Persen**	**50%**	**20 Persen**	**17%**
4	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4494 Orang/bulan		1498 Orang/bulan	856 Orang/bulan	57%	856 Orang/bulan	19,05%
4	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1080 dokumen		360 dokumen	54 dokumen	15%	54 dokumen	5,00%
4	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	42 dokumen		14 dokumen	4 dokumen	29%	4 dokumen	9,52%
4	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan		1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	33,33%
4	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	54 laporan		18 laporan	9 laporan	50%	9 laporan	16,67%
4	***2***	***03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**50 Persen**	**50%**	**17 Persen**	**17%**

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%
4	***2***	***05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian peangkat daerah***	**- Persen**				**0%**		**0%**
4	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0%	0 Unit	0,00%
4	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan h yang Disediakan	0 Paket		0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0,00%
4	***2***	***06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**47%**	**100 Persen**	**15%**
4	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	16,67%
4	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	16,67%
4	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	36 Paket		0 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0,00%
4	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	16,67%
4	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	10,00%
4	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	810 laporan		270 laporan	87 laporan	32%	87 laporan	10,74%
4	***2***	***07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pengadaan barang milik daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**- Persen**	**0%**	**- Persen**	**0%**
4	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit		25 unit	0 unit	0%	0 unit	0,00%
4	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	3 unit		1 unit	0 unit	0%	0 unit	0,00%
4	***2***	***08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**50 Persen**	**50%**	**17 Persen**	**17%**
4	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%
4	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%
4	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%
4	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	***2***	***09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**26 Persen**	**26%**	**9 Persen**	**9%**
4	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	111 Unit		37 Unit	6 Unit	16%	6 Unit	5,41%
4	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	39 Unit		15 Unit	3 Unit	20%	3 Unit	7,69%
4	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	156 Unit		52 Unit	14 Unit	27%	14 Unit	8,97%
4	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit		7 Unit	3 Unit	43%	3 Unit	14,29%
4	***2***	***11***		***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**10 Persen**	**11%**	**4 Persen**	**4%**
4	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	84 Orang/ Bulan		28 Orang/ Bulan	0 Orang/ Bulan	0%	0 Orang/ Bulan	0,00%
4	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	120 Paket		40 Paket	8 Paket	20%	8 Paket	6,67%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18 Orang		6 Orang	0 Orang	0%	0 Orang	0,00%
4	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	72 Orang/ Bulan		24 Orang/ Bulan	6 Orang/ Bulan	25%	6 Orang/ Bulan	8,33%
4	***2***	***12***		***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi***	**100 Persen**		**100 Persen**	**33 Persen**	**33%**	**11 Persen**	**11%**
4	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	16,67%
4	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	0 Paket	0%	0 Paket	0,00%
4	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	36 Paket		12 Paket	6 Paket	50%	6 Paket	16,67%
4	***2***	***13***		***Penataan Organisasi***	***Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**25 Persen**	**25%**	**8 Persen**	**8%**
4	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	12 dokumen		4 dokumen	1 dokumen	25%	1 dokumen	8,33%
4	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 dokumen		1 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00%
4	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	6 dokumen		2 dokumen	2 dokumen	100%	2 dokumen	33,33%
4	***2***	***14***		***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan***	**100 Persen**		**100 Persen**	**29 Persen**	**29%**	**10 Persen**	**10%**
4	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	216 laporan		72 laporan	21 laporan	29%	21 laporan	9,72%
4				**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**25 Persen**	**25%**	**8 Persen**	**8,00%**
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	**100 Persen**		**90 Persen**	**18 Persen**	**18%**	**5 Persen**	**5,00%**
					Jumlah produk hukum yang dihasilkan	**2190 dokumen**		**730 dokumen**	**73 dokumen**	**9%**	**73 dokumen**	**3,33%**
					Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	**105 dokumen**		**35 dokumen**	**6 dokumen**	**17%**	**6 dokumen**	**5,71%**
4	***2***	***01***		***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah***	**100 Persen**		**100 Persen**	**25 Persen**	**25%**	**8 Persen**	**8%**
4	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	9 dokumen		3 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	99 dokumen		33 dokumen	6 dokumen	18%	6 dokumen	6,06%
4	***2***	***03***		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan***	**100 Persen**		**100 Persen**	**9 Persen**	**9%**	**3 Persen**	**3%**
4	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	2.190 dokumen		730 dokumen	73 dokumen	10%	73 dokumen	3,33%
4	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	78 Kasus		26 Kasus	2 Kasus	8%	2 Kasus	2,56%
4	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2.190 dokumen		730 dokumen	73 dokumen	10%	73 dokumen	3,33%
4	***2***	***04***		***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi***	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**17%**	**100 Persen**	**6%**
4	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60 dokumen		20 dokumen	4 dokumen	20%	4 dokumen	6,67%
4	2	04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	45 dokumen		15 dokumen	2 dokumen	13%	2 dokumen	4,44%
4	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	105 laporan		35 laporan	6 laporan	17%	6 laporan	5,71%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4				**Program Perekonimian dan Pembangunan**	**Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**25 Persen**	**25%**	**8 Persen**	**8,00%**
					Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	**100 Persen**		**100 Persen**	**50 Persen**	**17%**	**17 Persen**	**17,00%**
					Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	**2,45 Persen**		**2,45 Persen**	**2,45 Persen**	**1%**	**1 Persen**	**40,82%**
4	***2***	***01***		***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian***	**100 Persen**		**100 Persen**	**33 Persen**	**33%**	**11 Persen**	**11%**
4	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	12 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	8,33%
4	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	6 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50%	1 Laporan	16,67%
4	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	12 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	25%	1 Dokumen	8,33%
4	***2***	***02***		***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Persentase data pembangunan yang dilaporkan***	**100 Persen**		**100 Persen**	**50 Persen**	**50%**	**17 Persen**	**17%**
4	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	36 dokumen		12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	16,67%
4	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	36 laporan		12 laporan	6 laporan	50%	6 laporan	16,67%
4	***2***	***03***		***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu***	**60 Persen**		**60 Persen**	**39 Persen**	**39%**	**13 Persen**	**13%**
4	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang d	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	36 dokumen		12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	16,67%
4	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	36 dokumen		12 dokumen	6 dokumen	50%	6 dokumen	16,67%
4	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	900 Orang		300 Orang	50 Orang	17%	50 Orang	5,56%
4	***2***	***04***		***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***	***Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam***	**100 Persen**		**100 Persen**	**16 Persen**	**16%**	**5 Persen**	**5%**
4	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	48 Laporan		16 Laporan	5 Laporan	31%	5 Laporan	10,42%

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	3 dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0%	0 Dokumen	0,00%

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SEKRETARIAT DAERAH

MUH. YUSUF, SH, M.Kn
NIP. 19820101201101100 6

2.2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu penting adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Berdasarkan hasil analsiis terhadap permasalahan yang dihadapi, secara umum isu-isu penting yang dihadapi oleh sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yakni:

1. Adanya tuntutan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
2. Reformasi Birokrasi, dinamika pengorganisasian dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah belum optimal;
3. Perkembangan iptek yang pesat tidak dibarengi dengan Sumber Daya Aparatur yang baik.

Dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perangkat daerah tentu tidak lepas dari tantangan dan peluang yang dihadapi. Tantangan yang dihadapi Sekretariat Daerah dalam hal ini adalah tingginya ekspenktasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik, apalagi diera serba teknologi seperti sekarang ini. Adapun peluang yang bisa dimanfaatkan oleh Sekretariat Daerah adalah adanya komitmen yang kuat dari pimpinan unit kerja untuk selalu mendukung pelaksanaan tugas dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Disamping itu dengan adanya akses intenet

yang baik juga sangat membantu kegiatan pelayanan pada Sekretariat Daerah sehari-hari.

Dengan demikian maka untuk memaksimalkan pelayanan pada Sekretariat Daerah maka perlu adanya penambahan personil yang berstatus ASN dan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas ASN lingkup Sekretariat Daerah, sehingga mampu utuk menjabarkan program-program dan kegiatan dengan baik, mulai dari pimpinan tertinggi sampai kepada fungsional pelaksana harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsingnya masing-masing, apalagi dengan ditunjang dengan peningkatan kesejahteraan bagi ASN diharapkan juga menjadi motivasi dalam meningkatkan kedisiplinan dan kinerjanya.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanan kegiatan yang telah direncanakan, Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang selalu mengacu pada misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyimpangan dari misi akan mempengaruhi perjalanan organisasi dalam mencapai visinya. Penjabaran misi dalam bentuk rencana kegiatan yang lebih realistis terlihat pada pernyataan tujuan/sasaran dan langkah strategis yang harus dilakukan dalam rencana kerja tahunan.

Rencana Kerja tahunan ini dapat berubah dengan pertimbangan berbagai faktor namun tetap tidak keluar dari koridor utama yaitu mendukung pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Adapun perubahan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2024 yang pembiayaan bersumber dari dana DAU APBD Kabupaten Sidenreng Rappang yang ada pada Sekretarit Dearah terdiri dari 3 program dan 19 kegiatan dan 63 sub kegiatan yang dilaksanakan oleh 10 (sepuluh) Bagian dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota- yang meliputi kegitan dan sub kegiatan sebagai berikut :

   Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan sub kegiatan :

   - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD
   - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

   Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

   - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
- Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
- Fasilitasi kunjungan tamu
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan asset tetap lainnya

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kegiatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kegiatan Fasilitasi Kerumah tanggaan Sekretariat Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
- Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah

Kegiatan Penataan Organisasi dengan Sub Kegiatan :

- Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
- Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
- Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Komunikasi Pimpinan

Program ini merupakan program rutin yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Administrasi Umum yang terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Umum dan Protokol, Bagian Organisasi dan Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah.

2. Program Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat yang meliputi kegiatan Sub Kegiatan sebagai berikut :

Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan dengan Sub Kegiatan :

- Penataan Administrasi Pemerintahan
- Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
- Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah

Kegiatan Pelakanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual

- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial
- Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat

Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
- Fasilitasi Bantuan Hukum
- Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Daerah dengan Sub Kegiatan :

- Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
- Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
- Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat yang terdiri dari Empat bagian yaitu Bagian Tata Pemerintahan dengan indikator Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah, selanjutnya Bagian Kesejahteraan Rakyat dengan indikator Program Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal, Untuk Bagian Hukum dengan indikator program Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan dihasilkan sedangkan Bagian Kerjasama dengan indikator Persentase kerjasama daerah yang dihasilkan.

3. Program Perekonomian Dan Pembangunan meliputi Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

   Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian dengan dengan Sub Kegiatan :

   - Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
   - Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
   - Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil

   Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan dengan Sub Kegiatan :

   - Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
   - Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
   - Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

Kegiatan pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dengan Sub Kegiatan : .

- Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
- Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik
- Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan Pemantauan Kebijakan Sumber daya Alam dengan Sub Kegiatan :

- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan
- Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air

Program ini merupakan program yang dilaksanakan oleh Jajaran Asisten Perekonomian dan Pembangunan yang terdiri dari Tiga bagian yaitu Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan Indikator program Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan untuk bagian Administrasi Pembangunan dengan indikator Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan serta Bagian Pengadaan Barang dan jasa dengan indokator Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu.

Adapun rumusan rencana kerja dan Pendanaan perubahan Tahun Anggaran 2024 pada Sekretarit Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel 3. 1 sebagai berikut :

Tabel 3.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2024

KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama Perangkat Daerah : Sekretariat Daerah Kabupaten Sidrap

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
				SEKRETARIAT DAERAH				**19.185.469.081**				**27.327.644.000**	
4	**2**	**01**		**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100 Persen**	***15.804.375.081***				***22.387.894.100***	
4	***2***	***01***		***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan penganggaran***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***15.000.000***			***100 Persen***	***28.847.000***	
4	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 dokumen	3.500.000		Pangkajene Sidenreng	2 dokumen	5.333.000	
4	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	1.450.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	2.788.000	
4	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	1.800.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	3.906.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	1.750.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	5.045.000	
4	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	2.000.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	3.288.000	
4	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 laporan	3.000.000		Pangkajene Sidenreng	2 laporan	5.621.000	
4	2	01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 laporan	1.500.000		Pangkajene Sidenreng	2 laporan	2.866.000	
4	***2***	***02***		***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***9.816.087.081***		Pangkajene Sidenreng		***10.781.100.100***	
4	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1498 Orang/bulan	9.758.587.081		Pangkajene Sidenreng	1498 Orang/bulan	10.661.872.100	
4	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	360 dokumen	18.000.000		Pangkajene Sidenreng	360 dokumen	29.662.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	24 dokumen	35.000.000		Pangkajene Sidenreng	24 dokumen	71.628.000	
4	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 laporan	2.400.000		Pangkajene Sidenreng	1 laporan	14.338.000	
4	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lapor Koordinasi Penyusunan Lapor Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	18 laporan	2.100.000		Pangkajene Sidenreng	18 laporan	3.600.000	
4	***2***	***03***		***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi barang milik daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**2.500.000**			***100 Persen***	2.500.000	
4	2	03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	2.500.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	2.500.000	
4	***2***	***05***		***Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian peangkat daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***30.000.000***				-	
4	2	05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35 Unit	10.000.000		Pangkajene Sidenreng	0 Unit	-	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan h yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	75 Paket	20000000		Pangkajene Sidenreng	0 Paket	-	
4	***2***	***06***		***Administrasi Umum Perangkat Daerah***	***Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**1.357.868.000**		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**4.348.540.500**	
4	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 Paket	80.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 Paket	131.108.000	
4	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 Paket	250.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 Paket	484.508.000	
4	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 Paket	530.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 Paket	1.550.605.000	
4	2	06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	117.868.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	286.748.500	
4	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	20 laporan	30.000.000		Pangkajene Sidenreng	20 laporan	30.000.000	
4	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	270 laporan	350.000.000		Pangkajene Sidenreng	470 laporan	1.865.571.000	
4	***2***	***07***		***Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah***	***Persentase pengadaan barang milik daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**15.000.000**		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**230.428.000**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan	Kec. Maritenggae	2 Unit	10.000.000		Pangkajene Sidenreng	11 Unit	64.972.000	
4	2	07	07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset lainnya yang diadakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 Unit	5.000.000		Pangkajene Sidenreng	16 Unit	165.456.000	
4	***2***	***08***		***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***2.111.321.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***3.473.097.500***	
4	2	08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	10.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	13.000.000	
4	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	1.001.321.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	1.054.800.000	
4	2	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	100.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	247.497.500	
4	2	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	1.000.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	2.157.800.000	
4	***2***	***09***		***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***	***Persentase pemeliharaan barang milik daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***810.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***1.258.405.000***	
4	2	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	37 Unit	300.000.000		Pangkajene Sidenreng	37 Unit	548.357.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	13 Unit	380.000.000		Pangkajene Sidenreng	13 Unit	393.448.000	
4	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	52 Unit	30.000.000		Pangkajene Sidenreng	52 Unit	116.600.000	
4	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	7 Unit	100.000.000		Pangkajene Sidenreng	7 Unit	200.000.000	
4	***2***	***11***		***Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Persentase Pemenuhan administrasi keuangan dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***945.599.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***865.862.000***	
4	2	11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	28 Orang/ Bulan	210.599.000		Pangkajene Sidenreng	28 Orang/ Bulan	131.437.000	
4	2	11	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	75 Paket	100.000.000		Pangkajene Sidenreng	75 Paket	99.425.000	
4	2	11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	6 Orang	35.000.000		Pangkajene Sidenreng	6 Orang	35.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	11	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	24 Orang/ Bulan	600.000.000		Pangkajene Sidenreng	24 Orang/ Bulan	600.000.000	
4	***2***	***12***		***Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah***	***Persentase kerumahtanggaan Sekretariat Daerah yang difasilitasi***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***396.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***636.000.000***	
4	2	12	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 Paket	180.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 Paket	420.000.000	
4	2	12	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 Paket	120.000.000		Pangkajene Sidenreng	0 Paket	-	
4	2	12	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 Paket	96.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 Paket	216.000.000	
4	***2***	***13***		***Penataan Organisasi***	***Persentase pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**125.000.000**		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**185.000.000**	
4	2	13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 dokumen	50.000.000		Pangkajene Sidenreng	4 dokumen	80.000.000	
4	2	13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	20.000.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	25.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	13	04	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 dokumen	30.000.000		Pangkajene Sidenreng	1 dokumen	38.000.000	
4	2	13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 dokumen	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	2 dokumen	42.000.000	
4	***2***	***14***		***Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan***	***Persentase pelaksanaan protokol dan komunikasi pimpinan yang dilaksanakan***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	**100%** ***Persen***	**180.000.000**		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	**100%** ***Persen***	***578.114.000***	
4	2	14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	72 laporan	180.000.000		Pangkajene Sidenreng	72 laporan	578.114.000	
4				**Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**	**Cakupan Pelaksanaan Pelaporan Pemerintahan daerah**	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100% Persen**	**183.750.000**		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100% Persen**	**300.000.000**	
					Persentase Pemberian Bantuan Tempat Ibadah dan lembaga keagamaan yang mengajukan proposal	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**90% Persen**	**2.575.000.000**		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**90% Persen**	**3.216.249.900**	
					Jumlah Produk Hukum yang dihasilkan	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**730% dokumen**	**125.000.000**		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**730% dokumen**	**436.000.000**	
					Jumlah kerjasama daerah yang dihasilkan	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**35 Dokumen**	**75.000.000**		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**35 Dokumen**	**166.000.000**	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	***2***	***01***		***Administrasi Tata Pemerintahan***	***Persentase pemanfaatan dan pelaksanaan koordinasi dalam penyusunan kebijakan daerah***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***183.750.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***300.000.000***	
4	2	01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	3 dokumen	25.965.100		Pangkajene Sidenreng	3 dokumen	107.086.000	
4	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	3 dokumen	58.946.900		Pangkajene Sidenreng	3 dokumen	66.105.500	
4	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 dokumen	98.838.000		Pangkajene Sidenreng	4 dokumen	126.808.500	
4	***2***	***02***		***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***2.575.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***3.216.249.900***	
4	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	96 dokumen	2.500.000.000		Pangkajene Sidenreng	96 dokumen	3.174.695.900	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	11 dokumen	30.000.000		Pangkajene Sidenreng	11 dokumen	21.941.500	
4	2	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	33 dokumen	45.000.000		Pangkajene Sidenreng	33 dokumen	19.612.500	
4	***2***	***03***		***Fasilitasi dan Koordinasi Hukum***	***Persentase fasilitasi dan koordinasi hukum yang dilaksanakan***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***125.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***436.000.000***	
4	2	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730 dokumen	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	730 dokumen	294.467.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	26 Kasus	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	26 Kasus	56.467.000	
4	2	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	730 dokumen	75.000.000		Pangkajene Sidenreng	730 dokumen	85.066.000	
4	***2***	***04***		***Fasilitasi Kerjasama Daerah***	***Persentase Jumlah Kerjasama yang difasilitasi***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**75.000.000,000**		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	**166.000.000,000**	
4	2	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	20 dokumen	35.000.000		Pangkajene Sidenreng	20 MoU	51.368.000	
4	2	04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	15 dokumen	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	15 MoU	73.242.000	
4	2	04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	35 laporan	15.000.000		Pangkajene Sidenreng	35 MoU	41.390.000	
4				**Program Perekonimian dan Pembangunan**	**Persentase Laporan Perekonomian yang dilaksanakan**	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100 Persen**	***222.344.000***		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100 Persen**	***238.500.000***	
					Cakupan pengendalian dan evaluasi program pembangunan	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100 Persen**	***75.000.000***		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**100 Persen**	***149.000.000***	
					Persentase efisiensi nilai kontrak terhadap pagu	**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**2,45 % 2,45%**	***125.000.000***		**Kec. Maritenggae Kab. Sidrap**	**2,45 % 2,45%**	***434.000.000***	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	***2***	***01***		***Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian***	***Persentase Pelaksanaan kebijakan Perekonomian***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***68.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***79.000.000***	
4	2	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 Dokumen	25.500.000		Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	27.000.000	
4	2	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	2 Laporan	25.000.000		Pangkajene Sidenreng.	2 Laporan	32.000.000	
4	2	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	4 Dokumen	17.500.000		Pangkajene Sidenreng	4 Dokumen	20.000.000	
4	***2***	***02***		***Pelaksanaan Administrasi Pembangunan***	***Persentase data pembangunan yang dilaporkan***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***75.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***149.000.000***	
4	2	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	80 dokumen	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	80 dokumen	44.000.000	
4	2	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	55.000.000	
4	2	02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 laporan	25.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 laporan	50.000.000	

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	***2***	***03***		***Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa***	***Persentase pelaksanaan tender/seleksi tepat waktu***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***60% Persen***	***125.000.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***60% Persen***	***434.000.000***	
4	2	03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 dokumen	45.000.000		Pangkajene Sidenreng	12 dokumen	85.938.500	
4	2	03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	12 dokumen	42.500.000		Pangkajene Sidenreng	12 dokumen	270.312.500	
4	2	03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	300 Orang	37.500.000		Pangkajene Sidenreng	300 Orang	77.749.000	
4	***2***	***04***		***Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam***	***Persentase pelaksanaan Pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam***	***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***154.344.000***		***Kec. Maritenggae Kab. Sidrap***	***100 Persen***	***159.500.000***	
4	2	04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	16 Laporan	140.844.000	Investor dan Penanaman Modal	Pangkajene Sidenreng	18 Laporan	143.500.000		

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	TAHUN ANGGARAN 2024							
						Sebelum Perubahan				Setelah Perubahan			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	2	04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kec. Maritenggae Kab. Sidrap	1 Dokumen	13.500.000	Pembina, Penyuluh Pertanian	Pangkajene Sidenreng	1 Dokumen	16.000.000	

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
PJ SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

PEMERINTAH KABUPATEN SEKRETARIAT DAERAH SIDENRENG RAPPANG

MUH. YUSUF, SH, M.Kn
NIP. 198201012011011006

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d. Tahun 2024-2026)	Realisasi target kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan s/d tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja program dan kegiatan s/d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra SKPD tahun berjalan 2024	
								Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Prog & Keg s/d Triwulan II Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
4	2	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	9 dokumen		3 dokumen	0 dokumen	0%	0 dokumen	0,00%
4	2	01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	12 dokumen		4 dokumen	3 dokumen	75%	3 dokumen	25,00%
4	***2***	***02***		***Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat***	***Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat yang dilaksanakan***	**100 Persen**		**100 Persen**	**18 Persen**	**18%**	**5 Persen**	**5%**
	2	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	288 dokumen		96 dokumen	8 dokumen	8%	8	**100 Persen**
4	2	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	33 dokumen		11 dokumen	3 dokumen	27%	3 dokumen	9,09%

BAB IV
PENUTUP

Dengan tersusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang maka Sekretariat Daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah telah memenuhi kewajiban sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang mengamanatkan pada OPD untuk membuat Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Perubahan Renja PD).

Perubahan Renja Sekretariat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini dirumuskan berdasar hasil analisis kebutuhan dan evaluasi program dan kegiatan berjalan tahun 2023. Perubahan Rencana Kerja ini merupakan salah satu upaya penyesuaian program dan Kegiatan tahun 2024 yang masih rendah realisasinya baik itu realisasi fisik maupun realisasi keuangan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah ini sebagai bahan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2024

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidrap

MUH. YUSUF, SH, M.Kn
Nip. 19820101201101100 6

PERUBAHAN

RENCANA KERJA

(PERUBAHAN RENJA)

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP

KECAMATAN KULO

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadlirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahNya, penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kulo Tahun 2024 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Perubahan RENJA ini adalah perencanaan program dan kegiatan yang akan kami lakukan pada Tahun 2024 dan merupakan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan priode sebelumnya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Kulo, 2024
Camat Kulo

M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19811209 200012 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Landasan Hukum 2

1.3 Maksud dan Tujuan 3

1.4 Sistematika Penulisan 3

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 5

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Kulo sampai dengan Triwulan II..... 5

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo 13

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 15

3.1 Rencana Kerja 15

BAB V PENUTUP 17

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten sidenreng Rappang yang merupakan penjabaran RPJMDP yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah. Rencana kerja dan pendanaan dan tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dalam rangka mensinergikan, mensingkronkan dan mengintegrasikanprogram pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Kecamatan Kulo Tahun 2024 dilandasi oleh semangat otonomi daerah dimana Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan menurut azas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 4 ayat 1. Sesuai amanat undang undang, maka pemerintah kecamatan kulo menyusun rencana kerja perubahan tahun 2024

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah

tahunan yang di tujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional dengan seluruh pemangku kepentingan berbasis E-planning.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Kulo Tahun 2024 merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (Satu) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

1.2 Landasan Hukum

1 Undang-undang No 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4815);

3 Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007, Nomor 26;

4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023;

5 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi. Uraian tugas dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidenreng Rappang;

6 Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023

7 Surat Edaran Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Nomor : 000.7.2.4/3224/Bappelitbangda tanggal 28 Juni 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kulo Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan Perubahan Renstra 2024-2026.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Kulo adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP-PD dan sebagai penuntun di dalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kulo.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Bab. I Pendahuluan.

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyususunan Renja yang berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Kulo, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

Bab. II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berkenaan

Pada bab ini memuat kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan renja sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya. Yang berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan Capaian Renstra OPD, Analisa Kinerja Pelayanan OPD, Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD, Riview terhadap awal OPD dan Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab.III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Pada bab ini memuat urusan/bidang, urusan/program/kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

Bab. IV Penutup

Pada bab ini memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah–kaidah pelaksanaan, dan rencana tidaklanjut.

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Kecamatan Kulo sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD S/D Triwulan II Tahun 2024 dan Capaian Kinerja Renstra PD. OPD Kecamatan Kulo telah mengevaluasi Kinerja tahun 2024, bahwa dalam mencapai kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi telah dilaksanakan dengan baik, meskipun masih ditemukan adanya beberapa kendala dan permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan di tahun 2024, Kecamatan Kulo telah mengevaluasi 5 program dan 8 kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
   a. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dan realisasi renstra OPD Kecamatan Kulo yang mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan sebagai berikut :

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 adalah pada kegiatan berikut :

   a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan tidak memenuhi target kinerja sampai dengan triwulan II disebabkan pembayaran Tunjangan Kinerja yang tidak terealisasi
   b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja sampai dengan Triwulan II sebagai berikut :
      b.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan bangunan
      b.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
      b.2. Penyediaan barang cetakan dan Penggandaan
      b.3. Fasilitasi Kunjungan Tamu
      b.4. Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD.
   c. Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja.
      c.1. Penyediaan jasa Surat menyurat
      c.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
      c.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
   d. Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
      d.1. Penydiaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan.
      d.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
   e. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.
      e.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan

f. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Daerah

f.1 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

g. Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa.

g.1 Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa

g.2 Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan Desa

g.3 Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan Ketertiban Umum

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja/keluaran yang direncanakan Kegiatan tersebut belum bisa dilaksanakan berhubung karena kesalahan penempatan rekening sub kegiatan

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

   Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan tidak ada.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program kegiatan.

   Faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target adalah tersendatnya pengelolaan keuangan yang diakibatkan oleh tidak lancarnya Penyediaan dana dari BKAD. Sehingga kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat terlaksana sesuai dengan target karena tidak adanya dana.

   Selain itu sub kegiatan yang telah mencapai target, karena penyediaan dana untuk kegiatan tersebut telah terakomodir sampai dengan triwulan II

   Kegiatan yang telah melebihi target kinerja, tidak ada sub kegiatan yang melebihi target.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra perangkat daerah.

Target capaian program Renstra tahun 2018 – 2023 belum tentu sama dengan target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja).

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

   Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terbatasnya saran perangkat komputer, telah dilakukan kerja lembur guna, dan untuk mengatasi keterbatasan SDM telah dilakukan tugas tambahan atau merangkap tugas lain serta menjalin kerja sama atau koordinasi yang baik antara Pimpinan, Kasi, Kasubag dan Staf .

   Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan renja perangkat daerah dan pencapaian renstra perangkat daerah s.d triwulan II Tahun 2024 (tahun berjalan) Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan pada tabel II.1

TABEL II.1 .a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)
KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d Tahun berjalam	
										Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program Kegiatan s/d Tahun berjalan (2021+2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9= 5	10= (9/4*100)
					Unsur Kewilayahan									
7	**1**				**Kecamatan**									
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**100**				**100**	**1.00**
7	**1**	**2**	**2**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**100**				**100**	**1.00**
7	1	2	2	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	1	Laporan	3				3	**3.00**
7	1	2	2	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	1	Laporan	3				3	**3.00**
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	100				100	**1.00**

7	**1**	**3**	**2**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	100				100	**100**
7	1	3	2	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	2	Laporan	322				322	**161**
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**100%**				**100%**	**0.01**
7	**1**	**5**	**2**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**	**100%**				**100%**	**0.01**
7	1	5	2	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	100%				100%	**0.25**
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**				**100**	**1.00**
7	**1**	**6**	**2**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**100**				**100**	**1.00**
7	1	6	2	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	6	Dokumen	12				12	**2.00**
7	1	6	2	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	6	Dokumen	12				12	**200**

7	1	6	2	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6	Dokumen	12				12	**200**
7	**01**													
7	**01**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**100**	**%**	**100 %**				**100 %**	**1.00**
7	**01**	**01**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100 %**				**100 %**	**1.00**
7	01	01	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	168	0rg/bulan	42				42	**25.00**
7	**01**	**1**	**2.1**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100 %**				**100 %**	**0.22**
7	01	01	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	60	Paket	38				38	**8.41**
7	01	01	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	63	Paket	346				346	**549.21**
7	01	01	2.1	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	1100 0	Paket	23,076				23,076	**209.78**
7	01	01	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	985	Laporan	2,426				2,426	**246.29**
7	01	01	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	509	Laporan	452				452	**88.80**
7	**01**	**01**	**2.1**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100 %**				**100 %**	**1.00**

7	01	01	2.1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	300	Laporan	831				831	**277.00**
7	01	01	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	Laporan	36				36	**300**
7	01	01	2.1	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	12	Laporan	36				36	**300**
7	**01**	**01**	**2.1**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100 %**				**100 %**	**1.00**
7	01	01	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	3	Unit	9				9	**300**
7	01	01	2.1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	24	Unit	48				48	**200**

CAMAT KULO

M.FASRAH NUR,S.STP,M.Si
NIP. 19811209 200012 1 001

TABEL II.1 .b (RENSTRA RPD 2024-2026)

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN

PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S.D TRIWULAN II TAHUN 2024 (TAHUN BERJALAN)

KECAMATAN KULO KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KODE	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2024-2026		Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s.d Tahun 2021+2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target Renstra PD s.d Tahun berjalam	
						Target Renja PD	Realisasi Renja PD	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4		5	6	7	8= (7/6)	9= 7	10= (9/4*100)
..01	**PROGRAM PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAN PELAYANAN PUBLIK**	**100**	**Persen**		**100**		**-**	**-**	**-**
..01.2.02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Layanan administrasi keuangan**	**100**	**Persen**		**100**	**-**	**-**	**-**	**-**
..01.2.02.01	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan nonperizinan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksnakan	3	urusan		3	0	-	-	-
..01.2.02.05	Pelaksanaan Urusan Pemetintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	jumlah dan jenis urusan pemeritahan terkait Kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	3	urusan		3	0	-	-	-
..01	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat partisipasi masyarakat desa dan kelurahaan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat**	**100**	**Persen**		**100**	**100**	**1**	**100**	**100**
..01.2.02	**Koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa**	**Tingkat Parsitipasi masyarakat desa dalam kegiatan pemberdayaan**	**100**	**Persen**		**100**	**100**	**1**	**100**	**100**
..01.2.02.01	Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kecamatan	2	laporan		2	2	1	**2**	**100**

..01	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**100**	**Persen**		**100**	0	-		
..01.2.02	**Fasilitas rekomdasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**Cakupan fasilitasi,rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintah desa**	**100**	**Persen**		**100**	0	-	-	-
..01.2.02.01	Fasilitas pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang akan difasilitasi	6	Desa		6	0	-	-	-
	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah desa yang melakukan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa yang akan difasilitasi	6	Desa		6	0	-	-	-
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	6	Desa		6	0	-	-	-
..01	**XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**100**	**Persen**		**100**		-		
..01.2.02	**XXX Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan administrasi keuangan**	**100**	**Persen**		**100**		-	-	-
..01.2.02.01	XXX Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji ASN	168	Bulan		168	66	0.39	**66**	**39**
..01.2.06	**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi umum**	**100**			**100**			-	-
..01.2.06.01	XXX Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	238	Buah		60	23	0.38	**23**	**10**
..01.2.06.08	XXX Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah makanan dan Minuman Tamu yang disediakan	2,426	Dos		985	72	0.07	**72**	**3**
..01.2.06.09	XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan Keluar Daerah	452	Kali		509	0	-	-	**0**
..01.2.07	**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah**							-	
..01.2.07.05	XXX Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebeleur yang diadakan	3	Unit/Buah		-	0	-	-	-

..01.2.08	**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan**	**100**	**Persen**		**100**			**-**	**-**
..01.2.08.01	XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah dokumen bermaterai	831	Lembar		414	0	-	-	-
..01.2.08.02	XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	36	Bulan		12	3	0.25	**3**	**8**
..01.2.08.04	XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	36	Bulan		12	3	0.25	**3**	**8**
..01.2.09	**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara**	**100**	**Persen**		**100**			**-**	**-**
..01.2.09.01	XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9	Unit		3	0	-	-	-
..01.2.09.06	XXX Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	48	Unit		24	0	-	-	-
..01.2.09.09	XXX Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	6	Unit		0	0	0	-	-

CAMAT KULO

M.FASRAH NUR,S.STP,M.Si
NIP. 19811209 200012 1 001

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Kulo

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kulo sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Kecamatan Kulo telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kulo
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Kulo antara lain :
   a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
   b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Kulo hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Kulo sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Kulo terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;

4.Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Kulo beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Kulo diantaranya :

   a. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran

b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
e. Pemohon KK, KTP dan AKTA KELAHIRAN di wilayah Kecamatan Kulo cukup banyak, sedangkan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di kecamatan belum ada sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut harus ke Kantor panca Rijang;

Tabel III.1.

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KANTOR KECAMATAN KULO

KODE					URUSAN/ BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TAHUN ANGGARAN 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
`					**Unsur Kewilayahan**									
7	**1**				**Kecamatan**				**1,387,972,000**				**1,417,972,000**	
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,620,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,620,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,620,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,620,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1 Laporan	540,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	1 Laporan	540,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	Kec. Kulo	1 Laporan	1,080,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	1 Laporan	1,080,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI WILAYAH KECAMATAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**7,020,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**7,020,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**7,020,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**7,020,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	Kec. Kulo	2 Laporan	7,020,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	2 Laporan	7,020,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pememrintahan Umum Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**50,000,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**80,000,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**

7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**50,000,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**80,000,000**	**Masyarakat Kec. Kulo**
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kec. Kulo	4 Dokumen	50,000,000	Masyarakat Kec. Kulo	Kec. Kulo	4 Dokumen	80,000,000	Masyarakat Kec. Kulo
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**4,140,000**	**Aparatur Desa Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**4,140,000**	**Aparatur Desa Kec. Kulo**
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**4,140,000**	**Aparatur Desa Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**4,140,000**	**Aparatur Desa Kec. Kulo**
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,260,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,260,000	Aparatur Desa Kec. Kulo
7	1	6	2.01	7	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,800,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,800,000	Aparatur Desa Kec. Kulo
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,080,000	Aparatur Desa Kec. Kulo	Kec. Kulo	6 Dokumen	1,080,000	Aparatur Desa Kec. Kulo
7	**01**													
7	**01**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,325,192,000**	**ASN Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,325,192,000**	**ASN Kec. Kulo**
7	**01**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,129,272,000**	**ASN Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**1,129,272,000**	**ASN Kec. Kulo**
7	01	01	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Kulo	168 Org/bulan	1,129,272,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	168 Org/bulan	1,129,272,000	ASN Kec. Kulo
7	**01**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**75,508,400**	**ASN Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**72,563,400**	**ASN Kec. Kulo**
7	01	01	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah bangunan yang disediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Kulo	60 Paket	3,290,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	60 Paket	3,290,000	ASN Kec. Kulo
7	01	01	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah dan jenis peralatan rumah tangga yang disediakan	Kec. Kulo	63 Paket	2,945,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	0	0	ASN Kec. Kulo
7	01	01	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan kantor yang disediakan	Kec. Kulo	11000 Paket	7,848,400	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	11000 Paket	7,848,400	ASN Kec. Kulo

7	01	01	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Kec. Kulo	985 Laporan	25,110,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	985 Laporan	25,110,000	ASN Kec. Kulo
7	01	01	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Kulo	509 Laporan	36,315,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	509 Laporan	36,315,000	ASN Kec. Kulo
7	**01**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**92,341,600**	**ASN Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**95,286,600**	**ASN Kec. Kulo**
7	01	01	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat	Kec. Kulo	300 Laporan	1,400,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	300 Laporan	1,400,000	ASN Kec. Kulo
7	01	01	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. Kulo	12 Laporan	18,420,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	12 Laporan	18,420,000	ASN Kec. Kulo
7	01	01	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu pelayanan administrasi perkantoran	Kec. Kulo	12 Laporan	72,521,600	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	12 Laporan	75,466,600	ASN Kec. Kulo
7	**01**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**28,070,000**	**ASN Kec. Kulo**	**Kec. Kulo**	**100 %**	**28,070,000**	**ASN Kec. Kulo**
7	01	01	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Kulo	3 Unit	23,010,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	3 Unit	23,010,000	ASN Kec. Kulo
7	01	01	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan mesin yang disediakan jasa pemeliharaan	Kec. Kulo	24 Unit	5,060,000	ASN Kec. Kulo	Kec. Kulo	24 Unit	5,060,000	ASN Kec. Kulo

Kulo, 22 Juli 2024

CAMAT KULO

M. FASRAH NUR, S.STP.,M.Si

NIP. 198112092000121001

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja

Berdasarkan Surat Edaran Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 Nomor : 000.7.2.4/3224/Bappelitbangda tanggal 28 Juni 2024 terkait penyusunan perubahan renja perangkat daerah tahun 2024, maka kantor Kecamatan Kulo melakukan penyusunan perubahan Renja 2024.

Rencana Kerja Kantor Kecamatan Kulo Tahun Anggaran 2024 dijabarkan ke dalam 5 Program yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan; Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa; Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa; dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; dengan 8 Kegiatan yaitu : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah; Administrasi Umum Perangkat Daerah; Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah; Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat;Koordinasi Kegiatan Pemberdaayaan Desa;Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah; dan Fasilitasi,Rekomendasi dan Koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa.

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 dilakukan berdasarkan adanya penyesuaian atas pengurangan anggaran di awal tahun anggaran. Sehingga semua OPD dilakukan recofusing anggaran pada anggaran makan minum harian pegawai dan belanja perjalanan dinas.

3.2 Pendanaan

Pendanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 sebesar Rp. 1.417.972.000 yang dialokasikan ke dalam 5 program sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; sebesar Rp. 1.325.192.000- yang dialokasikan kedalam 4 Kegiatan sebagai berikut :

a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Rencana Pendanaan Rp. 1.129.272.000,-
b. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Rencana Pendanaan Rp. 72.563.400,-
c. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Rencana Pendanaan Rp. 95.286.600,-
d. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan Rencana Pendanaan Rp. 28.070.000,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, yang dialokasikan kedalam kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat dengan Rencana Pendanaan Rp.1.620.000,-
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dialokasikan pada kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan Rencana Pendanaan Rp. 7.020.000,-
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dialokasikan ke dalam kegiatan Fasilitasi /Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan Rencana Pendanaan Rp. 4.140.000,-
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dialokasikan kedalam kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah dengan Rencana Pendanaan Rp. 80.000.000,-

BAB IV
PENUTUP

a. Catatan penting.

Dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan, PD Kecamatan Kulo sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi yang merupakan upaya – upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran, disamping itu juga kinerja pelayanan PD Kecamatan Kulo merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah, guna terlaksanannya dan tercapainya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari Korupsi, Kolosi, dan Nepotesme, maka sangat perlu sekali adanya program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disuatu unit kerja serta dapat dipertanggung jawabkan dalam realisasi pelaksanaannya. Sejalan dengan hal tersebut diatas Kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya .

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan

Kaidah-kaidah pelaksanaan program dan Kegiatan berdasarkan rencana kerja PD Kecamatan Kulo dan mengacu pada DPPA dengan alokasi anggaran sesuai dengan pagu APBD.

Kulo, 2024
CAMAT KULO

M. FASRAH NUR, S.STP., M.Si.
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP. 19811209 200012 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN SIDRAP
KECAMATAN WATANG SIDENRENG
TAHUN 2024

RENJA PERUBAHAN 2024

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng memiliki ruang lingkup yang sangat luas dan mencakup segala bidang, sehingga perbaikan disegala bidang merupakan kondisi yang diinginkan utamanya pada hal-hal yang bersentuhan langsung dengan masyarakat yang kondisinya saat ini belum berada pada suatu kondisi yang ideal diinginkan baik oleh pemerintah terlebih oleh masyarakat. begitupula dengan proyeksi kedepan. Harapan yang diinginkan merupakan harapan seluruh elemen masyarakat yang merupakan cita-cita ideal dari masyarakat yang tentunya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Strategis Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dijabarkan kedalam Rencana Kerja Anggaran.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan ini masih belum sempurna sehingga kritik, saran dan masukan yang konstruktif dari semua pihak sangat kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan RENJA ditahun yang akan datang.

Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan RENJA ini.

Watang Sidenreng, 06 Agustus 2024
Camat Watang Sidenreng

H.ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19730208 200802 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN 4

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Landasan Hukum 6

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 8

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 9

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II..... 12

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng 18

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 20

3.1 Rencana Kerja 20

3.2 Indikator Program dan kegiatan..... 29

BAB V PENUTUP 33

BAB I
P E N D A H U L U A N

1.1 Latar Belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Watang Sidenreng mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku

selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil proses politik, yakni bermula dari rumusan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih, tetapi dalam proses penyusunannya dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng. Sejajar dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun

anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 disusun berdasarkan hasil analisa untuk mendukung pencapaian kinerja aparatur di lingkup Pemerintah Kecamatan Watang Sidenreng dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar acuannya.

Landasan hukum dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi ;
2. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan lembaran Negara Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
6. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD
7. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

9. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005 – 2025 ;
10. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Kecamatan.
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021.
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018 – 2023
13. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 disusun dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Watang Sidenreng adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKA-PD dan RAPBD 2024 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Watang Sidenreng untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4 Sistematika Penulisan

Secara sistematis Renja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I. **PENDAHULUAN** terdiri atas beberapa bagian yaitu latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sitematika penulisan

BAB II. **EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN terdiri atas beberapa bagian yaitu Evaluasi Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan ii tahun 2024, dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah**

BAB III. **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

terdiri atas beberapa bagian yaitu Program dan Kegiatan, dan Indikator Program dan Kegiatan.

BAB IV. **PENUTUP**

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

2.2 Evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024

Rencana Kerja merupakan rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap tahunnya dan menjadi bagian dari Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II tahun 2024 yang telah dilaksanakan, dapat kita lihat pada uraian berikut :

2.2.1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terdiri atas kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan yaitu pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan non perizinan dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan mencapai tingkat realisasi 0%.

2.2.2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terdiri atas kegiatan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa dengan sub kegiatan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan, dan kegiatan pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan dan evaluasi Kelurahan telah mencapai tingkat realisasi 0%.

2.2.3 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan

Desa yang mencakup kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan Desa terdiri atas sub kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa, fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dan fasilitasi penyelenggaraan

ketenteraman dan ketertiban umum telah mencapai tingkat realisasi 0%.

2.2.4 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota mencakup kegiatan administrasi keuangan Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN dan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD, kegiatan administrasi umum Perangkat Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, fasilitasi kunjungan tamu dan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, kegiatan pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah terdiri atas sub kegiatan pengadaan mebel dan pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya, kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dan penyediaan jasa pelayanan umum kantor, dan kegiatan pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintahan Daerah terdiri atas sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan

peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya telah mencapai tingkat realisasi target 20 %.

Selanjutnya evaluasi RENJA Perangkat Daerah Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s/d TAHUN 2021-2023	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2021-2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN 2023	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=5	10=9/4*100
7	**Unsur Kewilayahan**								
7 1 .	**Kecamatan**								

7 . 1 . 2	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**						
7 1 1 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**				**100**	**6%**
7 1 1 202 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	1094	Org/Bln	350				350	11%
7 1 1 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**%**	**100**				**100**	**14%**
7 1 1 206 01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan**	13	Paket	5				**5**	**2%**
7 1 1 206 03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan**	144	Paket	65				**65**	**33%**

| | | |

	Bangunan Lainnya	Bangunan Lainnya							
7 1 1 208	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**	**100**			**100**	**35%**
7 1 1 208 01	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	243	Laporan	219			**219**	**19%**
7 1 1 208 02	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan**	72	Laporan	48			**48**	**67%**
7 1 1 208 03	**Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	25	Laporan	15			**15**	**0%**
7 1 1 208 04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**	72	Laporan	48			**48**	**56%**

7	**1**	**1**	**209**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**	**100**				**100**	**25%**
7	**1**	**1**	**209**	**01**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya**	29	Unit	8				**8**	**28%**
7	**1**	**1**	**209**	**02**	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipeliharan dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya**	26	Unit	2				**2**	**8%**
7	**1**	**1**	**209**	**03**	**Pemeliharaan Mebel**	**Jumlah Mebel yang Dipelihara**	13	Unit	2				**2**	**15%**
7	**1**	**1**	**209**	**06**	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara**	17	Unit	5				**5**	**29%**
7	**1**	**1**	**209**	**09**	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara**	11	Unit	5				**5**	**45%**

7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**	**0**				**100**	
7 1 2 204	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**	**0**				**100**	**57%**
7 1 2 204 02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan**	9	Laporan	2				**2**	**22%**
7 1 2 204 03	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan**	13	Laporan	12				**12**	**92%**
7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**100**				**100**	
7 1 3 201	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**0**				**33**	**56%**

7	**1**	**3**	**201**	**02**	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	3	Laporan	3				**3**	**100%**
7	**1**	**3**	**201**	**03**	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	8	Laporan	1				**1**	**13%**
7	**1**	**3**	**202**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**	**100**				**100**	**33%**
7	**1**	**3**	**202**	**02**	**Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	12	Paket	6				**6**	**50%**
7	**1**	**3**	**202**	**03**	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	30	Pokmas	15				**15**	**50%**
7	**1**	**3**	**202**	**04**	**Evaluasi Kelurahan**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	6	Kelurahan	0				**-**	**0%**

7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**0**				**100**	
7 1 6 201	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100**	**%**	**0**				**100**	**25%**
7 1 6 201 03	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	10	Dokumen	**5**				**5**	**50%**
7 1 6 201 07	**Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**	10	Dokumen	0				**-**	**0%**

TABEL II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 (Tahun Berjalan)

Kabupaten Sidenreng Rappang

OPD : KECAMATAN WATANG SIDENRENG

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN (OUTCOMES)/SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) s/d TAHUN 2024-2026	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2023	TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN s/d TRIWULAN II TAHUN 2024			PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA OPD S/D TAHUN BERJALAN	
					TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH	REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH	TINGKAT REALISASI (%)	REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (2024)	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9=7	10=9/4*100
7	**Unsur Kewilayahan**								

7 1 .	**Kecamatan**								
7 1 2 . .	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**					**100**	**100**
7 1 1 202	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**100 %**					**100**	**100**
7 1 1 202 01	**Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	**Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN**	135 6 Org/Bln		350	150	**42,9%**	150	1106%
7 1 1 206	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**					**100**	**100**
7 1 1 206 01	**Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**	**Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan**	105 Paket		4	2	**50,0%**	**2**	**2%**
7 1 1 206 03	**Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**	**Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan**	24 Paket		15	8	**53,3%**	**8**	**33%**

7	**1**	**1**	**206**	**08**	**Fasilitasi Kunjungan Tamu**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu**	96	Laporan		12	6	**50,0%**	**6**	**6%**
7	**1**	**1**	**206**	**09**	**Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	565	Laporan		266	150	**56,4%**	**150**	**27%**
7	**1**	**1**	**207**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**					**100**	**100**
7	**1**	**1**	**207**	**06**	**Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	4	Unit/Buah		4	4	**100,0%**	**4**	**100%**
7	**1**	**1**	**208**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	**%**					**100**	**100**
7	**1**	**1**	**208**	**01**	**Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat**	514	Laporan		220	100	**45,5%**	**100**	**19%**
7	**1**	**1**	**208**	**02**	**Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**	**Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yg disediakan**	36	Laporan		48	24	**50,0%**	**24**	**67%**

7 1 1 208 04	**Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan**	36	Laporan		48	20	**41,7%**	**20**	**56%**
7 1 1 209	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**%**					**100**	**100**
7 1 1 209 01	**Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan**	**Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipeliharan dan dibayarkan pajaknya**	27	Unit		13	6	**46,2%**	**6**	**22%**
7 1 1 209 06	**Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara**	9	Unit		18	12	**66,7%**	**12**	**133%**
7 1 1 209 09	**Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya**	**Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara**	15	Unit		5	3	**60,0%**	**3**	**20%**
7 1 2	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**	**100**	**%**					**100**	**100**

7 1 2 204	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**100**	**%**					**100**	**100**
7 1 2 204 02	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan**	**Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada Urusan Pemerintahan**	36	Laporan		12	6	**50,0%**	**6**	**17%**
7 1 3	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**					**100**	**100**
7 1 3 201	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**					**33**	**33**
7 1 3 201 03	**Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	**Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan**	36	Laporan		8	4	**50,0%**	**4**	**11%**
7 1 3 202	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan**	**100**	**%**					**100**	**100**

7 1 3 202 01	**Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan**	45	Laporan		8	8	**100,0%**	**8**	**18%**
7 1 3 202 03	**Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	**Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan**	54	Pokmas		36	16	**44,4%**	**16**	**30%**
7 1 3 202 04	**Evaluasi Kelurahan**	**Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan**	9	Kelurahan		3	1	**33,3%**	**1**	**11%**
7 1 5 . . .	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum**	**100**	**%**						
7 1 5 201 . . .	**Penyelanggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**100**	**%**						
7 1 5 201. 8 . . .	**Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan**	**12**	**Dokumen**		**12**	**6**	**50,0%**	**6**	**50%**

7 1 6	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**					**100**	**100**
7 1 6 201	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**100 %**					**100**	**100**
7 1 6 201 03	**Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	**Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa**	15 Dokumen		5	2	**40%**	**2**	**13%**
7 1 6 201 07	**Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa**	15 Dokumen		5	2	**40%**	**2**	**13%**

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kantor Kecamatan Watang Sidenreng

Isu-isu penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Watang Sidenreng sebagai berikut :

1. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan PD Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng telah melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Watang Sidenreng
2. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi PD Kecamatan Watang Sidenreng antara lain :
   a. Kurangnya sarana dan prasarana perangkat komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam melaksanakan tugas pelayanan belum maksimal .
   b. Belum semuanya terpenuhi usulan-usulan pembangunan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng hal ini disebabkan karena terbatasnya anggaran APBD Kabupaten Sidenreng Rappang. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Watang Sidenreng sudah cukup baik, namun hal ini perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga usia teknis menjadi pendek;
   c. Melemahnya ketahanan sosial ekonomi akibat pandemi covid 19 sehingga pemerintah memprioritaskan pemulihan sosial ekonomi akibat covid 19 dan trasnformasi ekonomi wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Melambatnya roda perekonomian diakibatkan oleh merebaknya wabah covid 19
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Kecamatan Watang Sidenreng beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Watang Sidenreng diantaranya :

a. Sarana dan prasarana komputer di wilayah Kecamatan masih kurang memadai sehingga memperlambat kinerja kegiatan administrasi perkantoran
b. Kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang belum diberikan kewenangan penuh untuk mengajukan dan mengelola anggaran Perangkat Daerah, kewenagan Kecamatan hanya sebatas pengelolaan Gaji pegawai dan biaya operasional Kecamatan. Sedangkan pengelolaan anggaran pembangunan masih melalui Perangkat Daerah terkait ;
c. Pemberian pelayanan kepada masyarakat secara optimal / maksimal, dan tepat waktu ;
d. Semakin dinamisnya tingkat pendidikan dan sosial ekonomi berpengaruh pada pola pikir dan pola tindak dari masyarakat ;
e. Pemohon KK, KTP dan AKTA KELAHIRAN di wilayah Kecamatan Watang Sidenreng cukup banyak, sedangkan peralatan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di kecamatan belum ada sehingga masyarakat yang ingin mendapatkan layanan tersebut harus ke tingkat Kabupaten;

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program dan Kegiatan

Penyusunan program dan kegiatan dilakukan untuk mencapai sasaran kinerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dimana pada tahun 2024 menargetkan peningkatan kualitas layanan dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), peningkatan kualitas layanan urusan pemerintahan umum dengan indikator kinerja yaitu persentase layanan urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik dengan nilai 100%, peningkatan kualitas layanan urusan koordinasi dengan indikator kinerja yaitu persentase kegiatan yang dikooordinasikan di kecamatan dengan nilai 100% dan peningkatan kualitas layanan urusan pembinaan dan pengawasan dengan indikator kinerja yaitu persentase jumlah Desa yang dibina dan diawasi dengan nilai 100%.

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan lansung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
    2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
    3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis
    1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat padatabel berikut;

Tabel III.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

KANTOR KECAMATAN WATANG SIDENRENG

Kode	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	INDIKATOR Program (Outcome), Kegiatan (Intermediate Outcome), Sub Kegiatan Output)	SEBELUM PERUBAHAN					SETELAH PERUBAHAN				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Kelompok Penerima Mamfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja		KEBUTUHA DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp)	Kelompok Penerima Mamfaat
7	UNSUR KEWILAYAHAN											
		Predikat Nilai Sakip (%)		60,20	Persen	2.622.317.000	DAU		60	Persen	2.667.370.000	DAU
7.01.01	XXX PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintah		100	Persen	2.622.317.000			100	Persen	2.667.370.000	

	DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Daerah Kabupaten/Kota**										
7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran (%)**		**0**					**0**	**0**	**-**	
7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)**		**100**	**Persen**	**2.107.760.500**			**100**	**Persen**	**2.107.760.500**	
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	Kec.Watsid	448	Bulan	2.107.760.500	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	**350**	**Bulan**	**2.107.760.500**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Layanan Administrasi**		**100**	**Persen**	**115.760.000**	ASN Ktr.Kec.Wat		**100**	**Persen**	**115.760.000**	ASN Ktr.Kec.Wats

		Umum Pernagkat Daearah (%)					sid					id
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Kec/Kel	5	Paket	11.352.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	**4**	**Paket**	**11.352.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Kec/Kel	7	Paket	12.372.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	15	**Paket**	**12.372.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Kec.Watsid	32	Laporan	18.836.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	12	**Laporan**	**18.836.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	Kec/Kel	187	Laporan	73.200.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	266	**Laporan**	**73.200.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Layanan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (%)**		**100**	**Persen**	**42.000.000**			**100**	**Persen**	**71.878.000**	
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mabel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kec/Kel	8	Unit	-			**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		4	Unit	42.000.000			4	**Unit**	**71.878.000**	

7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan PrasaranaGedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5	Unit	-			**0**	**Unit**	**-**	
7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)**		**100**	**Persen**	**289.631.500**			**100**	**Persen**	**304.806.500**	
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Kec/Kel	170	Laporan	3.080.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	220	**Laporan**	**3.080.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kec/Kel	12	Laporan	36.600.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	48	**Laporan**	**51.775.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid

		Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)										
7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kec/Kel	8	Laporan	-	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	**0**	**Laporan**	**-**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Kec/Kel	12	Laporan	249.951.500	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	48	**Laporan**	**249.951.500**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**		**100**	**Persen**	**67.165.000**			**100**	**Persen**	**67.165.000**	

		Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)										
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	Kec/Kel	9	Unit	36.529.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	13	**Unit**	**36.529.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Kec/Kel	3	Unit	10.050.000			18	**Unit**	**10.050.000**	
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Kec/Kel	5	Unit	20.586.000			5	**Unit**	**20.586.000**	

		Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)										
		Persentase urusan pemerintahan umum yang dijalankan dengan baik (%)		100	**Persen**	**50.800.000**			**100**	**Persen**	**80.800.000**	
7.01.02	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**CCakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)**		**100**	**Persen**	**800.000**			**100**	**Persen**	**800.000**	
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat (%)		**100**	**Persen**	**800.000**			**100**	**Persen**	**800.000**	

7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan (Laporan)	Kec.Watsid	8	Laporan	800.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	12	**Laporan**	**800.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.05	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (%)**		100	**Persen**	50.000.000	ASN Ktr.Kec.Watsid	Kec.Watsid	**100**	**Persen**	**80.000.000**	ASN Ktr.Kec.Watsid
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah (%)		100	Persen	50.000.000			**100**	**Persen**	**80.000.000**	
7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di	Kec.Watsid	4	Dokumen	50.000.000			12	**Dokumen**	**80.000.000**	

		Kecamatan (Dokumen)										
		Persentase urusan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan dengan baik (%)		100	**Persen**	**479.796.000**			**100**	**Persen**	**479.796.000**	
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	Persen	479.796.000			**100**	**Persen**	**479.796.000**	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	Persen	500.000			**100**	**Persen**	**500.000**	

7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)	KEC	8	Laporan	500.000			8	**Laporan**	**500.000**	
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)		100	Persen	479.296.000			**100**	**Persen**	**479.296.000**	
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah	KEC	4	lembaga	4.800.000			8	**lembaga**	**4.800.000**	

	Kelurahan	Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga Kemasyarakatan)										
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		3	Unit	-			**0**	**Unit**	**-**	
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas / Ormas)	KEL	18	Pokmas	473.896.000			36	**Pokmas**	**473.896.000**	
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	KEC	3	Laporan	600.000			3	**Laporan**	**600.000**	

		(Laporan)										
		Persentase urusan pembinaan dan pengawasan yang dijalankan dengan baik (%)		100	Persen	1.200.000			**100**	**Persen**	**1.200.000**	
7.01.06	**ROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)**		100	Persen	1.200.000			**100**	**Persen**	**1.200.000**	
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)		100	Persen	1.200.000			**100**	**Persen**	**1.200.000**	

7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa (Dokumen)	KEC	8	Dokumen	600.000			5	**Dokumen**	**600.000**	
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Dokumen)	KEC	8	Dokumen	600.000			5	**Dokumen**	**600.000**	
				JUMLAH		**3.154.113.000**					**3.229.166.000**	

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kabupaten Sidenreng Rappang untuk tahun 2024, dengan memperhatikan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perubahan Kantor Kecamatan Watang Sidenreng dan merupakan acuan bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dan catatan sebagai berikut :

1. Kantor Kecamatan watang sidenreng sebagai koordinator (fasilitator) wilayah berkewajiban untuk melaksanakan program-program Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai satuan kerja lintas sektor dengan sebaik- baiknya;
2. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan W atang Sidenreng merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kecamatan Watang Sidenreng;
3. Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan W atang Sidenreng merupakan dasar evaluasi dan laporan

pelaksanaan atas kinerja tahunan Kecamatan watang sidenreng;

4. Kantor Kecamatan Watang Sidenreng berkewajiban menjaga konsistensi antara Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis Kantor Kecamatan Watang Sidenreng Tahun 2024-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026.

Semoga dengan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Watang Sidenreng ini dapat dijadikan pedoman pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kecamatan Watang Widenreng Kabupaten Sidenreng Rappang.

Watang Sidenreng, 06 Agustus 2024
CAMAT WATANG SIDENRENG

H.ARNOL BARAMULI, ST,M.Adm.KP
Pangkat : Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 19730208 200802 1 001

RENCANA KERJA PERUBAHAN



KECAMATAN BARANTI

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karuniaNya, kita telah dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Tahun 2024 ini merupakan bentuk arah pembangunan Kecamatan Baranti dalam 1 tahun kedepan, dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah merupakan penjabaran Tujuan, Sasaran, kebijakan dan Perogram Kerja Kabupaten Sidenreng Rappang. Yang selanjutnya dituangkan kedalam Rencana Kerja Tahunan berdasarkan tugas pokok dan fungsi.

Bahwa dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) ini mungkin ditemui data, informasi dan cara penyajian yang belum optimal, untuk itu atas kekurangan dan kelemahan Perubahan Renja Kantor Camat Baranti masih memerlukan kesempurnaan dimasa yang akan datang seiring dengan dengan perkembangan situasi dan kondisi di lapangan. Oleh karena itu saran dan masukan dari semua pihak terhadap Dokumen Perubahan Rencana Kerja ini akan semakin memperkaya khasanah dalam penyempurnaan kebijakan, strategi dan program yang lebih strategis, berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Baranti

Baranti, 15 Agustus 2024
CAMAT BARANTI

Bustaman, S.Sos
NIP. 197205231992031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1
DAFTAR ISI 2
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar belakang 1
1.2. Landasan hukum 2
1.3. Maksud dan tujuan 5
1.4. Sistematika penulisan 5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAN 7
2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 7
2.1. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah 23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 25
BAB IV PENUTUP 57

Baranti

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi.

Berangkat dari pemikiran diatas, perencanaan pembangunan, baik dilihat dari sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik diharapkan juga diikuti dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, Kantor Kecamatan Baranti mengemban tugas dan tanggung jawab agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagaimana diharapkan semua pihak. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi daerah tadi, secara fungsional Kantor Kecamatan Baranti dituntut untuk mampu menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang berlaku 1 (satu) tahun.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun dan dirumuskan untuk menyesuaikan antara perencanaan dengan kebutuhan yang sesuai dengan kondisi terkini. Perencanaan Kerja ini menggambarkan tujuan, sasaran, cara pencapaian tujuan sasaran yang meliputi

kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dan mempertimbangkan usulan masyarakat. Perencanaan kerja tahunan menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Adapun cakupan perencanaan kerja tahunan meliputi tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Maka dalam proses penyusunannya tentu memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan. Perubahan Renja Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini merupakan hasil dari rumusan – rumusan Rencana Strategis periode 2024-2026 karena kabupaten Sidenreng Rappang merupakan salah satu daerah yang periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati telah habis pada tahun 2023 sehingga berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri bagi daerah yang habis masa periode kepemimpinan kepala daerahnya untuk Menyusun Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Periode 2024-2026 yang menjadi dasar penyusuna Rencana Strategis Kantor Camat Baranti.

Dalam penyusunan Perubaha Rencana Kerja (Renja P) tahun 2024 ini dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap komponen perencanaan teknokratik yakni program dan kegiatan Kantor Kecamatan Baranti. Sejajar dengan itu, muatan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan program RPD Kabupaten Sidenreng Rappang. Oleh karena itu matriks rencana program dan kegiatan pembangunan tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini telah disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam RKA (rencana kerja anggaran) Kantor Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang selama satu tahun anggaran

1.2. Landasan hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Baranti tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Baranti

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, Nomor)

Baranti

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Perubahan Renja Kantor Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang dengan maksud untuk menjabarkan RKPD 2024 dan Renstra Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024-2026 terutama yang terkait dengan urusan pemeritahan.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Baranti adalah sebagai pedoman dalam penyusunan RKAP-PD dan RAPBDP 2024 serta sebagai penuntun didalam pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Baranti untuk jangka waktu satu tahun kedepan.

1.4. Sistematika penulisan

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) mengikuti sistematika penyusunan sebagai berikut :

1. BAB 1 PENDAHULUAN
   - 1.1 Latar Belakang
     Mengemukakan tentang latar belakang dilakukannya Perubahan Renja Perangkat Daerah dan proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
   - 1.2 Landasan Hukum
     Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
   - 1.3 Maksud dan Tujuan
     Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
   - 1.4 Sistematika Penulisan
     Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen
2. BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
   - 2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah Samapai Dengan Triwulan Tahun 2024

Menguraikan realisasi program dan kegiatan serta faktor – faktor pendukung yang mempengaruhi hasil realisasi program dan kegiatan tersebut.

2.2 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Menguraiakan sejauh mana Tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dalam hal kritis yang terkait dengan pelayanan, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi sebagai tantangan dan juga peluang yang diformulasikan dalam bentuk rumusan program dan kegiatan prioritas pada tahun yang direncanakan.

3. BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menguraikan urusan,program dan kegiatan serta indicator dan pagu pendanaan dan hal-hal yang berkaitan baik yang mengalami perubahan ataupun tidak mengalami perubahan.

4. BAB IV PENUTUP

Baranti

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pelaksanaan program dan kegiatan sampai pada triwulan II tahun 2024 antara lain :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

   Sampai pada triwulan II tahun 2024 Program ini telah berjalan dan terlaksana sebesar 50% sesuai dengan jumlah laporan yang ditargetkan pada kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat yang terdiri atas 2 (Dua) Sub Kegiatan yaitu :

   a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan
   b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

   Program ini mempunyai 2 (Dua) Kegiatan dan 5 (Lima) Sub Kegiatan dengan rincian :

   a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
      a. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
   b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
      a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
      b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
      c. Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
      d. Evaluasi Kelurahan

   Program telah terlaksana sebanyak 22, 45 % dari target masing – masing dari 5 (Lima) Sub Kegiatan tersebut di atas.

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

   Program ini yang terdiri atas kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa, Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum telah mencapai realisasi sebesar 8,33 % atas target Rencana Kerja tahun 2024.

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Program yang merupakan pendukung urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada triwulan II ini telah mencapai sebesar 26,66% dengan capaian tertinggi pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

   Sebagai Gambaran realisasi rencana kerja tahun 2024 dijabarkan pada table berikut :

Baranti

Tabel II.1.a

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Kecamatan								
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	CAKUPAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100 Persen	100				100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	100 Persen	100				100	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilaksanakan	3 Urusan	3				3	100
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah dan jenis urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan yang dilaksanakan	3 Urusan	3				3	100

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	TINGKAT ARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MAMBANGUN KELURAHAN	74 Persen					-	-
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan	74 Persen					-	-
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	200 Orang					-	-
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan dalam Pembangunan	73 Persen					-	-
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Masyarakat yang berpartisipasi dalam Forum musyawarah Perencanaan Pembangunan	250 Orang					-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	250 Orang					-	-

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	250 Orang					-	-
	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	5 Kelurahan					-	-
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	CAKUPAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	100 Persen					-	-
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 Persen					-	-
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa yang difasilitasi	4 Desa					-	-
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah desa yang melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi	4 Desa					-	-

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Keteriban Umum	Jumlah desa yang menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	4 Desa					-	-
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100 Persen					-	-
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Keuangan	100 Persen					-	-
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen					-	-
	Koordinasi dn Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Realisasi Kinerja OPD yang disusun	60 Laporan					-	-
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan administrasi Keuangan	100 Persen					-	-
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	14 Bulan					-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan administrasi umum	100 Persen					-	-

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Waktu penyediakan komponen instalasi listrik/penerangan	12 Bulan					-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	20 Unit					-	-
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor	12 Bulan					-	-
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12 Bulan					-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah penyediaan fasilitasi kunjungan tamu	1095 Dos					-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi	313 Kali					-	-
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur	100 Persen					-	-
	Pengadaan Mebel	Jumlah dan Jenis mebel yang diadakan	5 Unit					-	-
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan Jenisa Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit					-	-

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen					-	-
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai yang diadakan	303 Lembar					-	-
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 Bulan					-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Bulan					-	-
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dipelihara	100 Persen					-	-
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	6 Unit					-	-
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah dan Jenis Peralatan yang dipelihara	5 Unit					-	-

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) s.d Tahun 2021-2023	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021-2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2021+2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4)*100
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah dan Jenis Peralatan Lainnya yang Dipelihara	15 Unit					-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan lain yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Gedung					-	-

Baranti

Tabel II.1.b

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan

Pencapaian Renstra sampai dengan triwulan II tahun berjalan (Tahun 2024)

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100,00		100,00	26,66	0	26,66	26,66
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (%)	100,00		100,00	391,30	391,30	391,30	391,30
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1.367		46	180	391	180,00	13,17
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah (%)	100		100	3,49	3,49	3,49	3,49
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	38		4	2	50	2,00	5,26

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	118		4	2	50	2,00	1,69
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	45		14	2	14	2,00	4,44
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	54		17	1	6	1,00	1,85
7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	104		10	1	10	1,00	0,96
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	166		180	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan layanan pengadaan barang milik daerah (%)	100,00		100,00	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	18		10	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan jasa penunjang pemerintahan daerah (%)	100,00		100,00	2,05	2,05	2,05	2,05

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	363		414	0	0	0,00	0,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36		12	5	42	5,00	13,89
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36		12	4	33	4,00	11,11
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan layanan pemeliharaan barang milik daerah (%)	100,00		100,00	17,39	17,39	17,39	17,39
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33		15	5	33	5,00	15,15
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18		30	2	7	2,00	11,11

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12		1	1	100	1,00	8,33
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (%)	100,00		100,00	50,00	0	50,00	50,00
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat (%)	100,00		100,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9		2	1	50	1,00	11,11
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	9		2	1	50	1,00	11,11
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan (%)	100,00		100,00	22,45	0	22,45	22,45

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat partisipasi masyrakat desa dan kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%)	100,00		100,00	0	0	0,00	0,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30		9	0	0	0,00	0,00
7.01.03.2.02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat partisipasi masyarakat kelurahan dalam kegiatan pemberdayaan (%)	100,00		100,00	27,50	27,50	27,50	27,50
7.01.03.2.02.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	21		7	6	86	6,00	28,57
7.01.03.2.02.0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	36		11	3	27	3,00	8,33

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.03.2.02.0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	50		14	0	0	0,00	0,00
7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	27		8	2	25	2,00	7,41
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa (%)	100,00		100,00	8,33	0	8,33	8,33
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan dan Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa (%)	100,00		100,00	8,33	8,33	8,33	8,33
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	27		8	2	25	2,00	7,41
7.01.06.2.01.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	27		8	0	0	0,00	0,00

Baranti

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2024-2026 (akhir periode Renstra OPD)	Realisasi Capaian Kinerja Renstra OPD s/d Renja OPD Tahun lalu (2023)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (Tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=7	10=(9/4*100)
7.01.06.2.01.0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	27		8	0	0	0,00	0,00

Baranti

2.1. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Baranti bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati Sidenreng Rappang kepada Camat dibidang Pemerintahan untuk mendayagunakan potensi yang ada diwilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatuhan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan, pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaran tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Optimalisasi partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha diwilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaran pembangunan, terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan company/cooperate sosial resposipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD dipemerintahan Kabupaten Sidenreng Rappang yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaran pelayanan prima tersebut, maka diperlukan standar Pelayanan yang secara nonaktif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat.
4. Peningkatan Kapasitas aparatur dan penambahan kuantitas aparatur keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan

tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sabagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.

5. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan daerah kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur.
6. Pemerintah Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai tugas menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang kewenangannya dilimpahkan oleh Bupati ke Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.
7. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Pemerintah Kecamatan Baranti mempunyai fungsi:
    a. Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
    b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa.
    c. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat.
    d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
    e. Pembinaan kesejahteraan sosial.
    f. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah.
    g. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
    h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program tahun 2024 terbagi atas dua kategori yaitu program yang berhubungan lansung dengan pencapaian sasaran dan program yang sifatnya penunjang pencapaian sasaran strategis. Pengelompokan program tersebut sebagai berikut:

a. Program pencapaian sasaran strategis

- ❖ Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- ❖ Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
- ❖ Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

b. Program penunjang pencapaian sasaran strategis

- ❖ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Perubahan program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Baranti

Tabel III.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun 2024

Kabupaten Sidenreng Rappang

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					KECAMATAN BARANTI				5.247.194.703				5.073.769.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN				5.247.194.703				5.073.769.000	
7	01				KECAMATAN				5.247.194.703				5.073.769.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.430.154.703			100 %	3.976.386.300	
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		-	1.000.000			100 %	0	-
7	01	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	1.000.000			1 Laporan	0	
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Admninistrasi Keuangan Perangkat Daerah		-	3.123.809.580			100 %	3.122.527.000	-
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN									
						Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		490 Orang/bulan	3.123.809.580			490 Orang/bulan	3.122.527.000	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	121.000.000			100 %	270.589.300	-
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	3.000.000			12 Paket	1.080.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		38 Paket	30.000.000			38 Paket	0	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		14 Paket	3.000.000			14 Paket	18.655.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		17 Paket	3.000.000			17 Paket	3.922.200	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		32 Laporan	20.000.000			32 Laporan	4.788.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		51 Laporan	62.000.000			51 Laporan	48.136.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		-	30.845.123			100 %	30.887.000	-

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
					Pemerintah Daerah									
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		5 Unit	8.000.000			5 Unit	0	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		5 Unit	22.845.123			5 Unit	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.000.000			100 %	424.246.700	-
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		115 Laporan	30.000.000			115 Laporan	2.800.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air		12 Laporan	16.000.000			12 Laporan	12.030.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						dan Listrik yang Disediakan								
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12 Laporan	50.000.000			12 Laporan	75.040.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	57.500.000			100 %	127.956.300	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		10 Unit	2.000.000			10 Unit	18.024.000	
7	01	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel									
						Jumlah Mebel yang Dipelihara		4 Unit	2.500.000			4 Unit	0	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		5 Unit	3.000.000			5 Unit	2.810.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 Unit	50.000.000			4 Unit	15.085.300	
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		-	2.000.000			100 %	51.351.500	
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Cakupan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		-	2.000.000			100 %	51.351.500	-
7	01	02	2.04	0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		2 Laporan	1.000.000			2 Laporan	50.586.500	
7	01	02	2.04	0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		2 Laporan	1.000.000			2 Laporan	765.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.760.040.000			100 %	1.015.191.200	
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.000.000			100 %	273.000	-
7	01	03	2.01	0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan									
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		9 Laporan	1.000.000			9 Laporan	273.000	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.759.040.000			100 %	1.015.098.200	-
7	01	03	2.02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		7 Lembaga Kemasyarakatan	2.000.000			7 Lembaga Kemasyarakatan	273.000	
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		11 Unit	750.000.000			11 Unit	0	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		18 Pokmas / Ormas	1.005.040.000			18 Pokmas / Ormas	0	
7	01	03	2.02	0004	Evaluasi Kelurahan									
						Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan		8 Laporan	2.000.000			8 Laporan	294.000	
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		-	50.000.000			100 %	30.000.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		-	50.000.000			100 Urusan	0	-
7	01	05	2.01	0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan									
						Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		4 Dokumen	50.000.000			4 Dokumen	30.000.000	
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	5.000.000			100 %	840.000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		-	5.000.000			100 %	840.000	-
7	01	06	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		8 Dokumen	2.000.000			8 Dokumen	273.000	
7	01	06	2.01	0007	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		8 Dokumen	2.000.000			8 Dokumen	273.000	
7	01	06	2.01	0011	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum									
						Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		8 Dokumen	1.000.000			8 Dokumen	294.000	
					KELURAHAN BARANTI								5.073.769.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.073.769.000	
7	01				KECAMATAN								5.073.769.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.430.154.703			100 %	3.976.386.300	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
					DAERAH KABUPATEN/ KOTA									
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	121.000.000			100 %	270.589.300	-
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0			2 Paket	20.000.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	0			1 Paket	3.226.800	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	0			2 Laporan	2.415.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	0			2 Laporan	13.162.500	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		-	30.845.123			100 %	30.887.000	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0			4 Unit	21.510.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.000.000			100 %	424.246.700	-
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	0			2 Laporan	1.036.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	0			4 Laporan	10.801.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	0			3 Laporan	52.439.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	57.500.000			100 %	127.956.300	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	0			4 Unit	1.632.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	0			5 Unit	1.810.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	0			1 Unit	7.824.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.760.040.000			100 %	1.015.191.200	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.759.040.000			100 %	1.015.098.200	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	0			2 Unit	61.543.700	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	0			76 Pokmas / Ormas	226.200.000	
					KELURAHAN PANRENG								5.073.769.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.073.769.000	
7	01				KECAMATAN								5.073.769.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.430.154.703			100 %	3.976.386.300	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
					KABUPATEN/ KOTA									
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	121.000.000			100 %	270.589.300	-
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	0			12 Paket	3.083.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0			12 Paket	8.585.000	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	0			12 Paket	2.778.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	0			12 Paket	2.922.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	0			12 Laporan	11.656.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	0			12 Laporan	11.595.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.000.000			100 %	424.246.700	-
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	0			12 Laporan	672.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	0			12 Laporan	11.400.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	0			12 Laporan	41.952.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	57.500.000			100 %	127.956.300	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	0			12 Unit	4.274.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	0			12 Unit	1.530.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	0			12 Unit	31.239.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.760.040.000			100 %	1.015.191.200	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.759.040.000			100 %	1.015.098.200	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	0			12 Unit	56.114.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	0			12 Pokmas / Ormas	124.200.000	
					KELURAHAN DUAMPANUA								5.073.769.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.073.769.000	
7	01				KECAMATAN								5.073.769.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.430.154.703			100 %	3.976.386.300	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
					KABUPATEN/ KOTA									
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	121.000.000			100 %	270.589.300	-
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	0			2 Paket	1.136.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0			2 Paket	11.000.000	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	0			5 Paket	846.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	0			1 Paket	2.460.600	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	0			6 Laporan	2.170.500	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	0			4 Laporan	14.227.500	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		-	30.845.123			100 %	30.887.000	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0			1 Unit	4.256.000	
7	01	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya									
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		-	0			1 Unit	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan		-	96.000.000			100 %	424.246.700	-

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
					Urusan Pemerintahan Daerah	Pemerintahan Daerah								
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	0			4 Laporan	980.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	0			12 Laporan	7.980.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	0			12 Laporan	68.413.400	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	57.500.000			100 %	127.956.300	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	0			3 Unit	1.886.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	0			6 Unit	3.060.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		-	0			1 Unit	16.988.000	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.760.040.000			100 %	1.015.191.200	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.759.040.000			100 %	1.015.098.200	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	0			3 Unit	42.296.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	0			44 Pokmas / Ormas	146.780.000	
					KELURAHAN MANISA								5.073.769.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.073.769.000	
7	01				KECAMATAN								5.073.769.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.430.154.703			100 %	3.976.386.300	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	121.000.000			100 %	270.589.300	-
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan		-	0			0 Paket	1.126.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Kantor yang Disediakan								
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0			1 Paket	11.000.000	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	0			3 Paket	1.778.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	0			1 Paket	4.299.000	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	0			2 Laporan	13.798.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	0			2 Laporan	11.295.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		-	30.845.123			100 %	30.887.000	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0			1 Unit	5.121.000	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.000.000			100 %	424.246.700	-
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	0			4 Laporan	1.000.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	0			12 Laporan	7.200.000	
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	0			12 Laporan	61.838.000	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	57.500.000			100 %	127.956.300	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	0			4 Unit	3.420.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	0			4 Unit	0	
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.760.040.000			100 %	1.015.191.200	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.759.040.000			100 %	1.015.098.200	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	0			3 Unit	66.165.000	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	0			61 Pokmas / Ormas	111.240.000	
					KELURAHAN BENTENG								5.073.769.000	
7					UNSUR KEWILAYAHAN								5.073.769.000	
7	01				KECAMATAN								5.073.769.000	
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	3.430.154.703			100 %	3.976.386.300	
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		-	121.000.000			100 %	270.589.300	-

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor									
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		-	0			2 Paket	1.588.000	
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor									
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	0			2 Paket	10.076.000	
7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga									
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		-	0			3 Paket	1.239.000	
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan									
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		-	0			1 Paket	3.268.200	
7	01	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		-	0			2 Laporan	12.360.000	
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		-	0			0 Laporan	13.195.000	
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah		-	30.845.123			100 %	30.887.000	-
7	01	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel									
						Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		-	0			1 Unit	0	
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		-	96.000.000			100 %	424.246.700	-
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		-	0			1 Laporan	2.814.000	
7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		-	0			2 Laporan	8.119.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		-	0			11 Laporan	57.514.300	
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah		-	57.500.000			100 %	127.956.300	-
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan									
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		-	0			3 Unit	3.374.000	
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		-	0			3 Unit	3.060.000	
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya									
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang		-	0			1 Unit	10.060.000	

Baranti

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Tahun Anggaran 2024							
							SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Inidkatif	Kelompok Penerima Manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Kelompok Penerima Manfaat
						Dipelihara/Direhabilitasi								
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa dan Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.760.040.000			100 %	1.015.191.200	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Kelurahan Dalam Kegiatan Pemberdayaan		-	1.759.040.000			100 %	1.015.098.200	-
7	01	03	2.02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan									
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		-	0			2 Unit	61.132.500	
7	01	03	2.02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan									
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		-	0			9 Pokmas / Ormas	118.680.000	

Baranti

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 disusun untuk mengantisipasi perubahan – perubahan yang terjadi dari pelaksanaan program dan kegiatan khususnya sebagai umpan balik dari hasil evaluasi yang telah dilakukan pada periode rencana kerja awal.

Demikianlah dokumen perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Kecamatan Baranti ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan berbagai program dan kegiatan di tahun yang akan datang. Harapan kami, dokumen ini dapat memberikan arah yang jelas serta menjadi dasar yang kuat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di Kecamatan Baranti.

Kami menyadari bahwa penyusunan rencana kerja ini masih jauh dari sempurna, untuk itu saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan guna perbaikan lebih lanjut. Semoga dengan kerja sama yang baik dari semua pihak, kita dapat mewujudkan tujuan bersama dalam membangun Kecamatan Baranti yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing.

Atas perhatian dan dukungan semua pihak, kami mengucapkan terima kasih.

Baranti, 15 Agustus 2024
CAMAT BARANTI

Baranti

Bustaman, S.Sos
NIP. 197205231992031005

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 yang disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang untuk Periode tahun 2024 disusun sebagai implementasi dan tahapan perencanaan tahunan.

Rencana kerja perubahan (RENJA-P) ini akan dirumuskan dalam bentuk Rencana kerja yang diharapkan menjadi pedoman pelaksanaan Program dan kegiatan sehingga dapat meningkatkan efesiensi sumber daya dan waktu serta kita dapat memperoleh umpan balik yang lebih baik tentang hasil dari Program dan Kegiatan yang dilaksanakan.

Semoga Allah,SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-nya kepada kita semua dalam mewujudkan kesejahteraan, kemandirian, daya saing masyarakat dan daerah Kabupaten Sidenreng Rappang guna mewujudkan tujuan yang kita cita-citakan bersama. Aamiin

Pangkajene Sidenreng, Agustus 2024
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PATRIADI, SE., M. Adm. Pemb
NIP. 197612122008011016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....1
DAFTAR ISI.....2
BAB I - PENDAHULUAN.....3
1.1 Latar belakang.....3
1.2 Landasan hukum.....4
1.3 Maksud dan tujuan.....6
1.4 Sistematika penulisan.....8
BAB II – EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN.....9
2.1 Evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2023 9
2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah... 19
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....21
BAB IV PENUTUP.....29

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode satu tahun yang memuat tentang kebijakan program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan Program dan kegiatan ditemukan berbagai hal yang dapat menjadi umpan balik bagi pelaksanaan program dan kegiatan, hasil dari umpan balik tersebut kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja yang baru atau disebut Perubahan Rencana Kerja Organisasi perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (P- RKPD) dan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah digunakan sebagai acuan dalam menyusun Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perubahan (R-RENJA) Perangkat Daerah yang mana pada Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) tahun 2024 ini memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) pada tahun berjalan.

Penyusunan Perubahan Renja Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata kabupaten Sidenreng Rappang dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah dan berpedoman pada :

a. Rancangan akhir Perubahan RKPD; dan
b. Hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas :

a. Perumusan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
b. Penyajian rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
c. Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah;
d. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
e. Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Perubahan Rencana Kerja (P-RENJA) tahun 2024 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penyusunan rencana program kerja pada tahun 2024.

1.2 Landasan hukum

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan Oahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 mengacu pada :

a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
f) Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
g) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
h) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 20l9 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Di Daerah;

k) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

l) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114);

m) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

o) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

p) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

q) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007, Nomor 26);

r) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 Nomor 1);

s) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 04 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah kabupaten (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 04);

t) Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;

u) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 22.a Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerahh Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023

v) Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 61 Tahun 2023 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang;

1.3 Maksud dan tujuan

1.3.1 Maksud

Penetapan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) tahun 2024 dimaksudkan untuk :

1. Menentukan arah dan tujuan pelaksanaan pembangunan sektor Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tahun 2024;
2. Mengidentifikasi prakiraan sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka kelancaran pelaksanaan program kegiatan.

Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) SKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan analisa kondisi obyektif permasalahan pembangunan saat ini. Analisa kondisi obyektif diharapkan dapat memberikan gambaran permasalahan yang masih dihadapi SKPD. Gambaran permasalahan tersebut dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang dihadapi SKPD saat ini serta estiminasi kondisi yang akan datang.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Perubahan (RENJA-P) adalah :

1. Penyesuaian target kinerja dan pagu program, kegiatan dan sub kegiatan (penambahan atau pengurangan), serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja program kegiatan;
3. Menjabarkan visi dan misi Daerah program dan Kegiatan Bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata;

4. Mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam memberikan yang terbaik dari Dinas Kepemudaan Olahrag dan Pariwisata;
5. Mewujudkan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab Pimpinan dan staf dengan baik dalam perumusan bersama Perubahan Rencana Kerja yang akan dilaksanankan;
6. Mewujudkan dan meningkatkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.
7. Memudahkan evaluasi kinerja dan pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Perubahan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah,serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGEN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024

Memuat Kajian tentang capaian Renja tahun berkenaan sampai pada triwulan II yang mengacu laporan kinerja atau realisasi APBD.

2.2 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Memuat permasalahan dan hambatan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

2.1 Evaluasi renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun 2024

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tercapai/tidak tercapai kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan serta implikasi yang timbul maupun tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil.

Hasil evaluasi dipergunakan untuk penyesuaian/perubahan rencana kerja dan pendanaan Tahun 2024 dengan berpedoman pada hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024'

Dinas kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata pada tahun 2024 telah melaksanakan program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam DPA SKPD keuangan. Adapun Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam Peubahan Renja Tahun 2024 adalah :

1. Proses Pelaksanaan dan realisasi kegiatan cukup lambat karena penggunaan aplikasi barang dan jasa yang tergolong baru memerlukan waktu lebih lama, perencanaan yang ada fokus pada tindakan dan belum fokus pada apa yang akan dicapai
2. Masih minimnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang. Banyak Pejabat Eselon III dan IV tidak memiliki tenaga Pelaksana dalam membantu melaksanakan tugas fokok dan fungsi di bidang masing masing sehingga sangat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
3. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang diakibatkan oleh kurangnya data yang valid.

Berdasarkan kendala yang dihadapi, Dians Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Mengotimalkan Penggunaan aplikasi Barang dan Jasa dan penyediaan SDM yang kompeten dan memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.
2. Memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM
3. Mengupayakan pengumpulan data yang valid melalui kordinasi dengan instansi terkait.

Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel II.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	**TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI MANDIRI**	**0.14**	**87**	**0,07**	**0,00**	**0.00**	**-**	**0.14**
	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Penyadaran, Pemberdayaan Dan Pengembangan Pemuda**	**90,00**	**93,00**	**90**	**9,00**	**10.00**	**10.00**	**90.00**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah wirausaha pemula Kabupaten/Kota dari seluruh Kecamatan yang ditingkatkan kapasitas daya saingnya	400	80	360	0,00	0,00	00.00	100
	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawan Pemuda	Jumlah Pemuda yang ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Keploporan dan kesukarelawan Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan	250	-	250	-	0.00	0.00	100
	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Organisasi Kepemudaan**	**90.00**	**90.00**	**90.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100**
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil peningkatan kapasitas organisasi kepemudaan	20	80.00	20.00	0.00	0.00	0.00	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	**JUMLAH PESERTA YANG BERPARTISIPASI DALAM KEGIATAN KEPRAMUKAAN YANG DILAKSANAKAN OLEH KWARCAB**	**1**	**100**	**1**	**-**	**0.00**	**1**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	**Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Pramuka**	**1**	**100**		**1**	**-**	**1**	**100**
	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi kepramukaan tingkat daerah yang meningkat kapasitasnya	1	100	-	1	-	1	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	**JUMLAH PRESTASI OLAHRAGA**	**25**	**92**	**30**	**5**	**28.00**	**5**	**100**
	Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Pendidikan**	**90.00**	**85**	**90.00**	**30.00**	**11.32**	**17.05**	**100**
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana olahraga Kabupaten/Kota yang tersedia dan termanfaatkan	53	1	15	6.00	6.00	17.05	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Kabupaten/Kota**	**90.00**	**93**	**90.00**	**30.00**	**2.27**	**26.50**	**100**
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penyelenggaraan kejuaraan dan pekan olahraga tingkat Kabupaten/Kota	12	85	12	1	1	2.27	100
	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan penyelenggaraan kejuaraan	250	100	7	1	14,29	1	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	**Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Prestasi**	**90**	**100**	**90**	**-**	**-**	**-**	**-**
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah atlet berprestasi Kabupaten/Kota yang dilakukan pembinaan dan pengembangan	250	100	10,00	-	-	-	100
	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan berprestasi Kabupaten/Kota yang menerima penghargaan	5	100	10,00	-	-	-	100
	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	**Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan Dan Pengembangan Organisasi Olahraga**	**90**	**100**		**1**	**20,00**	**1**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah dokumen hasil pengembangan organisasi keolahrgaan	3	100	5	1	20,00	1	100
	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	**Cakupan Pembinaan Dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**	**90**	**91**		**0.00**	**100,00**	**1.000**	**100**
	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan, pengembangan dan pemasalan festival dan olahraga rekreasi	10	91	10	0.00	100,00	1.000	100
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	**PRESENTASE PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA**	**24.66**	**95**					**100**
	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**90**	**95**		**2**	**20,00**	**2**	**100**
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang dikembangkan sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	95	1	1	81.91	1	100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pengadaan/Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana pengelolaan destinasi pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara	2	-	2	2	0.00	2	100
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	**JUMLAH KUNJUNGAN WISATA**	**180000**	**100**	**18000**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100**
	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	**Cakupan Penyelenggaraan Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri**	**90**	**100**	**20.00**	**-**	**0.00**	**0.00**	**100**
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah dokumen hasil penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri	3	100	1	-	0.00	-	100
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri	2		2	1	00,00	-	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	**PERSENTASE PELAKU USAHA EKONOMI KREATIF YANG BERSERTIFIKAT**	**80**	**90**	**90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	**Cakupan Penyelenggaraan Peningkatan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif**	**90**	**90**	**90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**100**
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang dikembangkan komptesensi	320	90	90	0.00	0.00	0.00	100
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**CAKUPAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH**	**100**	**79**	**100**	**0.00**			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		**100**	**100**		**2**	**66,67**		**-**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		9	100	3	2	66,67	2	6
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Administrasi Keuangan**	**100**	**96**		**12**	**33,33**		**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	60	93	12	6	50,00	30	13
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/verifikasi	60	100	12	6	50,00	30	13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Cakupan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100**	**80**		**12,00**	**10,00**		**-**
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	19	100	16,00	-	-	-	-
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	100	12,00	6,00	50,00	30	13
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	12.000	100	-	-	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang yang tersedia		-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	60	100	12,00	-	-	24	10
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	150	100	20,00	6,00	30,00	6	1
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Cakupan Penyelenggaraan Pengadaan Barang Milik Daerah dalam Rangka Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**97**		**-**	**-**		**-**
	Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	125	100	20,00	-	-	-	-
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	50	-	2,00	-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	**97**		**12,00**	**25,00**		**7**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	3.000	100	100,00	-	-	371	3
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	100	12,00	6,00	50,00	30	13
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	30	92		-	-	-	-
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	60	24	12,00	6,00	50,00	30	13
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Cakupan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**100**	**100**		**17,00**	**66,67**		**-**

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Perubahan RENSTRA Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja hasil Program dan keluaran Kegiatan Tahun 2023	Target dan realisasi Kinerja Program dan Kegiatan s.d Triwulan II Tahun 2024			Prakiraan Realisasi Capaian Target Renstra perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	60	100	16,00	16,00	100,00	29	12
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	30	-	25,00	-	-	-	-
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2	100	1,00	1,00	100,00	2	25

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah

Capaian kinerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang sampai pada triwulan II tahun 2023 sangat dipengaruhi oleh isu – isu yang terdapat pada wilayah kabupaten Sidenreng Rappang sehingga banyak Program dan Kegiatan yang belum dapat terlaksana sampai saat ini.

Isu – isu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan pada pembangunan daerah khususnya bidang kepemudaan dan olahraga serta kepariwisataan antara lain :

1. Permasalahan
    a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlet serta belum memadainya sarana dan prasarana olahraga yang ada ;
    b. Rendahnya minat olahraga dikalangan pelajar, mahasiswa dan masyarakat;
    c. Rendahnya frekuensi pembinaan dan pelatihan baris berbaris kedisiplinan dan wawasan kebangsaan bagi siswa ditingkat sekolah,
    d. Banyaknya pemuda yang berpotensi tidak sebanding dengan upaya pembinaan yang telah dilakukan;
    e. Masih kurangnya minat terhadap keikutsertaan pada kegiatan lomba olahraga khususnya penyandang cacat;
    f. Belum optimalnya pengembangan potensi pariwisita
    g. Belum Optimal Pengenalan potensi wisata kepada pihak -pihak luar;
    h. Minat masyarakat tentang pariwisata cenderung keluar daerah daripada yang masuk;
    i. Rendahnya pengenalan pelajar dan pemuda tentang potensi wisata pada wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Tantangan
    a. Luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar berkorelasi pada tingginya jumlah pemuda dan jangkauan pembinaan serta ketersediaan SDM Aparatur yang berkualitas;
    b. Belum ada sistem informasi yang memadai di Bidang Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

3. Peluang
   a. Komitmen Pemerintah terhadap pemberdayaan Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
   b. Tersedianya sarana prasarana olahraga yang memadai;
   c. Terselanggaranya kegiatan pengenalan potensi pariwisata dengan kegiatan-kegiatan pada lokasi pariwisata seperti festival ataupun karnaval;
   d. Dukungan masyarakat dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
   e. Sarana dan Prasarana olahraga yang tersedia di 11 (sebelas) Kecamatan bisa menunjang atlit-atlit di Kecamatan;

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Perubahan TA 2024

Berdasarkan Hasil review dan analisa kebutuhan terhadap target capaian indikator beserta pagu indikatif pada dokumen Perubahan RKPD Tahun 2024, maka pada dokumen Perubahan Renja ini disusun tabel perbandingan dengan memperlihatkan kenaikan target capaian dan pagu indikatif murni Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang pada saat sebelum perubahan dilaksanakan, dan target capaian indikator serta pagu indikatif setelah perubahan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata disusun berdasarkan program dan kegiatan. Jumlah program 7 (tujuh) program dan 16 (enambelas) kegiatan dengan total pagu indikatif sebesar 16.485.710.000,- sumber pendanaan pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dalam Renja Perubahan 2024 Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Berikut rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Dians Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 adalah :

I. **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
   b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
   b. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian vervikasi Keuangan SKPD.
3. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   b. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
   c. Fasilitasi Kunungan Tamu

d. Penyelenggaraan Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD
e. Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya

4. Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah
   a. Pengadaan dan Perlatan dan mesin lainnya
5. Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan daerah
   a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
   b. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan Listrik
   c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
   d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
   a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
   b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

1. Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota
2. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan Tingkat daerah kabupaten/kota

III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

1. Pembinaan dan pengembangan olahraga Pendidikan pada jenjang Pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
2. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga Tingkat daerah kabupaten/kota
3. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi

IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

1. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan

V. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

1. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten/kota

VI. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

1. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri, daya Tarik, destinasi dan Kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota

VII. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

1. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif Tingkat dasar.

Rencana kerja dan pendanaan perubahan Dinas Kepemudaan, olahraga dan pariwisata tahun 2023 dapat dilihati pada table 3.1 berikut :

Tabel III.1

MAT III.1

PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN KAB. SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN							16.812.981.803,00	15.829.516.000,00	16.395.710.000,00	-417.271.803,00							27.554.327.771,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							14.200.589.803,00	15.529.516.000,00	15.610.913.000,00	1.410.323.197,00							25.109.181.401,00	
	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							14.200.589.803,00	15.529.516.000,00	15.610.913.000,00	1.410.323.197,00							25.109.181.401,00	
1.	2.19.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-				-	-	2.500.589.803,00	2.857.608.300,00	2.837.142.800,00	12.257.898,00							2.512.847.701,00	
	2.19.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-				-	-	9.000.000,00	8.998.000,00	8.998.000,00	-2.000,00			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		9.090.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.00 Dokumen	3.00 Dokumen	9.000.000,00	8.998.000,00	8.998.000,00	-2.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.090.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-				-	-	2.257.507.803,00	2.407.033.300,00	2.383.033.300,00	125.525.497,00			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		2.280.082.881,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				350 Orang/ bulan	350 Orang/ bulan	2.248.507.803,00	2.393.316.500,00	2.369.316.500,00	120.808.697,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.270.992.881,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12.00 Dokumen	12.00 Dokumen	9.000.000,00	13.716.800,00	13.716.800,00	4.716.800,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			9.090.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

	2.19.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-				-	-	48.500.000,00	165.525.000,00	173.059.500,00	124.559.500,00			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		44.590.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	9.000.000,00	20.763.000,00	20.763.000,00	11.763.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			5.090.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2.00 Paket	2.00 Paket	2.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	15.500.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				14.00 Laporan	14.00 Laporan	12.000.000,00	26.385.000,00	26.385.000,00	14.385.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			12.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12.00 Laporan	12.00 Laporan	25.000.000,00	100.377.000,00	107.911.500,00	82.911.500,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			25.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-				-	-	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1.00 Unit	1.00 Unit	2.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			4.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	114.200.000,00	201.390.000,00	207.390.000,00	93.190.000,00			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		115.342.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12.00 Laporan	12.00 Laporan	1.200.000,00	2.800.000,00	2.800.000,00	1.600.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			1.212.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			45.450.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	2.000.000,00	9.590.000,00	9.590.000,00	7.590.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			2.020.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12.00 Laporan	12.00 Laporan	66.000.000,00	144.000.000,00	150.000.000,00	84.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			66.660.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-				-	-	69.382.000,00	68.662.000,00	58.662.000,00	-10.720.000,00			-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	-		59.742.820,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				14 Unit	14 Unit	64.082.000,00	63.362.000,00	53.362.000,00	-10.720.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			59.742.820,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	5.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**	-				-	-	**4.000.000.000,00**	**6.452.790.700,00**	**5.772.404.945,00**	**9.370.491.700,00**							**13.370.491.700,00**	
	2.19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	-				-	-	1.750.000.000,00	6.152.790.700,00	5.572.404.945,00	3.822.404.945,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		11.094.991.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor																	
			Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				5.00 Orang	5.00 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			252.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya				400.00 Orang	400.00 Orang	750.000.000,00	6.152.790.700,00	5.572.404.945,00	4.822.404.945,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			10.084.991.700,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.01.0008	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda																		
			Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan				250.00 Orang	250.00 Orang	750.000.000,00	0,00	0,00	-750.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			757.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	2.250.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-2.050.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		2.275.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan				20.00 Dokumen	20.00 Dokumen	2.250.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	-2.050.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			2.275.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
3.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**	-				-	-	**7.500.000.000,00**	**6.169.117.000,00**	**6.951.365.255,00**	**1.523.842.000,00**							**9.023.842.000,00**	
	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.900.000.000,00	4.537.107.000,00	4.621.430.800,00	721.430.800,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya	-		5.407.842.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

	2.19.03.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	3.900.000.000,00	4.537.107.000,00	4.621.430.800,00	721.430.800,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		5.407.842.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan				15 Unit	15 Unit	3.900.000.000,00	4.537.107.000,00	4.621.430.800,00	721.430.800,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			5.407.842.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-				-	-	500.000.000,00	558.415.000,00	908.624.800,00	408.624.800,00			-	- -	-		505.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02.0002	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	558.415.000,00	908.624.800,00	658.624.800,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			252.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan																	
			Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan				250 Orang	250 Orang	250.000.000,00	0,00	0,00	-250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	- -			252.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	-				-	-	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		606.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.03.0003	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pembinaan dan Pengembangan				250 Orang	250 Orang	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			505.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan				5 Orang	5 Orang	100.000.000,00	0,00	0,00	-100.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			101.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	-				-	-	2.000.000.000,00	665.000.000,00	665.000.000,00	-1.335.000.000,00			-	-	-		2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan				3 Organisasi	3 Organisasi	2.000.000.000,00	665.000.000,00	665.000.000,00	-1.335.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			2.000.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	-				-	-	500.000.000,00	408.595.000,00	756.309.655,00	256.309.655,00			-	-	-		505.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi				10 Dokumen	10 Dokumen	500.000.000,00	408.595.000,00	756.309.655,00	256.309.655,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-			505.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
4.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**	-				-	-	**200.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**2.000.000,00**							**202.000.000,00**	
	2.19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	-				-	-	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00			-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman	-		202.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	2.19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah																		
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkat Kapasitasnya				1 Organisasi	1 Organisasi	200.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-150.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman Peningkatan Aktifitas dan Kualitas Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius, Berbudaya dan Aman			202.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**							**2.612.392.000,00**	**300.000.000,00**	**784.797.000,00**	**-1.827.595.000,00**							**2.445.146.370,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**2.612.392.000,00**	**300.000.000,00**	**784.797.000,00**	**-1.827.595.000,00**							**2.445.146.370,00**	
1.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	-				-	-	**150.000.000,00**	**0,00**	**484.797.000,00**	**1.840.646.370,00**							**1.990.646.370,00**	
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	150.000.000,00	0,00	484.797.000,00	334.797.000,00			-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	-		1.990.646.370,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.03.0003	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1 Lokasi	1 Lokasi	100.000.000,00	0,00	221.063.000,00	121.063.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			995.323.185,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	0,00	263.734.000,00	213.734.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			995.323.185,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
2.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	-				-	-	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**254.500.000,00**							**454.500.000,00**	
	3.26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	-				-	-	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00			-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	-		454.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				3 Kegiatan	3 Kegiatan	175.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	-125.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			303.000.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Promosi	2 Promosi	25.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			151.500.000,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
3.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	-				-	-	**2.262.392.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**-2.262.392.000,00**							**0,00**	
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	-				-	-	2.262.392.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-2.062.392.000,00			-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat	-		0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif																		
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				320.00 Orang	320.00 Orang	2.262.392.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	-2.062.392.000,00	Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat			0,00	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN KEPARIWISATAAN
	JUMLAH								**16.812.961.803,00**	**15.829.516.000,00**	**16.395.710.000,00**	**-417.271.803,00**							**27.554.327.771,00**	

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sidenreng Rappang yang disusun sebagai dasar pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 dan bertujuan agar tercipta sinkronisasi dan sinergitas dengan program tingkat kabupaten yang telah dikonsolidasikan dengan tingkat provinsi ataupun tingkat nasional.

Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi akan dipengaruhi dengan masalah dan solusi dari masalah tersebut.

Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk penyusunan APBD-P dan jika dalam proses penyusunan APBD-P terjadi rasionalisasi anggaran berupa pengurangan atau penundaan program, maka dipilihlah program yang memiliki skala prioritas paling rendah untuk ditunda atau dihilangkan terlebih dahulu.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Sekretariat, bidang dan seluruh staff Dinas Kepemudaan Olahraga dan pariwisata secara bersama-sama mempunyai tanggungjawab untuk :
    a. Melaksanakan Perubahan Renja tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
    b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya, akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2024.

Pada dasarnya program dan kegiatan yang disusun dalam Rencana Kerja Perubahan (Renja-P) tahun 2024 ini memiliki tujuan untuk mendukung Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, Juli 2024
Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata

PATRIADI, SE., M.Adm. Pemb
NIP. 19761212120080110 16

RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
Jln Harapan Baru, Kompleks SKPD Blok B, No. 12 Pangkajene, Sidenreng

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Kerja Perubahan (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Renja merupakan kewajiban sebagai bagian dari perencanaan suatu SKPD, untuk selanjutnya dijalankan melalui program dan kegiatan sesuai pula merupakan Rangkaian Pengelolaan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 – 2026.

Penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun, demikian Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksanaan kegiatan. Semoga Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang ini telah dapat mencerminkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024.

Pangkajene,
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran

USMAN DEMMA, S.Sos
NIP. 19651231 198611 1 045

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
BAB I PENDAHULUAN 4
I.1 Latar Belakang 4
I.2 Landasan Hukum 6
I.3 Maksud dan Tujuan 7
I.4 Sistematik Penulisan 8
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN 9
II.1 Evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024..... 9
II.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas..... 23
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH..... 26
BAB IV PENUTUP 42

BAB I
PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana pembangunan tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.

Perubahan RENJA mempunyai tugas penting dalam sistim perencanaan daerah. Karena, Perubahan RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintahan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang bersama-sama DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan juga menetapkan dibentuknya Satuan Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang telah diikuti dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata KerjaSatuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Namun, seiring dengan dinamika masyarakat telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004. Maka, Satuan Polisi Pamong Praja, mempunyai tugas Penegakan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sehingga, titik berat tugas Satuan Polisi Pamong

Praja, lebih diarahkan kepada Penegak Peraturan Daerah dan ditambahkan dengan tugas Perlindungan Masyarakat.

Guna menunjang pelaksanaan tugas dan implementasi Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas. Maka, perlu kiranya ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sidenreng Rappang dalam kurun waktu 1 tahun. RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, Tahun 2024 adalah Dokumen Perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, untuk periode 2024yang memuat kebijakan, program, dan kegiatanpembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun.RENJA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang.

Rencana kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang,Tahun 2024 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidenreng Rappang, tahun 2024.

I.2. Landasan Hukum

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, disusun berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5587); sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6757);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4817);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Kerja Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan No 17 tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Propinsi sulawesi selatan tahun 2025 (Berita Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 17);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tugas Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten sidenreng Rappang.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor16Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah Kabupaten Sidenreng

9. Rappang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Tahun 2021 Nomor 1);
10. Pereraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 13 Tahun 2023 tentang rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 (Lemaran daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 30)
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng rappang Tahun 2023 Nomor 30)

I.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai pedoman dan arah bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama Tahun 2024 dan merupakan panduan, pengevaluasian pelaksanaan program/kegiatan dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan RKA Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2025

Adapun tujuan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang,untuk memperlancar tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai unsur pendukung Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

I.4. Sistematika Penulisan.

Sistematik penulisan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Pemadam Kebakaran Sidenreng Rappang Tahun 2024, meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

I. 2. Landasan Hukum

I. 3. Maksud dan Tujuan

I. 4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Renja perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 Bab ini memuat Kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Pokok –pokok materi yang disajikan dalam Bab ini, antara lain :

1. Realisasi Program/Kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi Program/Kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapanya,terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat Daerah;dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1. Evaluasi pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan polisi pamong Praja dan Damkar Kebaupaten Sidenreng Rapang sampai dengan Triwulan II tahun berkenan adalah untuk Mengetahui sejauh mana KemampuanDinas Melaksanakan program dan kegiatan sertahambatan dan permasalahan yang di hadapi

1. Realisasi program / kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

Realisasi Program yang tidak memenuhi target Kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sampai pada triwulan II tahun 2024

❖ **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat - rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD,
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah Sub Kegiatan. penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang undangan,
- Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor Jasa,
- penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik,
- Kegiatan pemeliharaan Barang Milik daerah penunjang Urusan Pemerintahan daerah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan,
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan,

❖ **Program peningkatan ketentraman dan ketertiban umum**

- Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum,
- Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
- Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan,
- Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah Tidak Memenuhi Target Kinerja
- Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini,

♦ Fakfor penyebab tidak memenuhi target : belum waktunya untuk melakukan pembayaran Jadwal tidak dapat ditentukan

- Implikasi yang timbulterhadap target capaian program Restra SKPD : tidak tercapainya target Kinerja Program
- Kebijakan/tindakan perencanaan dan penggaran yang perlu diambil untuk mengatatasi faktor-faktor penyebab tersebut : Anggaran dan target Kinerja desesuaikan dengan kebutuhan.

2. Realisasi program / kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil / keluaran yang direncanakan;

❖ **Program peningkatan ketentramandan Ketertiban Umum**

- Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia

3. Realisasi program / kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran yang direncakanan;

❖ **Program Pencegahan,Penanggulangan,Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran**

- Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024 (tahun berjalan)
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode						Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaian kinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2021-2023	Realisasi target kinerja hasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2021+2023	Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA SKPD sampai dengan tahun berjalan	
										Target Renja SKPD tahun	Realisasi Renja SKPD tahun	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dankegiatan s/d tahun berjalan (2021+2023)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
						WAJIB								
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	5	2				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA**	**100%**						372
1	5	2	2	1		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**0**				0	372
1	5	2	2	1	1	*Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	*Jumlah Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Yang Dilaksanakan*	600	225				225	0,36

1	5	2	2	1	4	*Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Personil Perlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan*	155	37				37	0,251612903
1	5	2	2	1	5	*Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia*	*Jumlah Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia Yang Terlaksana*	*3*	*35orang*				35orang	0,333333333
1	5	2	2	1	6	*Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana*	*3*	*4dokumen*				4dokumen	0,333333333
1	5	2	2	1	7	*Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan dan Terpelihara*	*75*	*9 unit*				9 unit	0,093333333
1	5	2	2	1	8	*Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*	*Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun*	*2*	*3 dokumen*				*3 dokumen*	0
1	5	2	2	1	9	*Penyediaan Layanan dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada*	*Jumla Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda*	*55*	*30*				30 laporan	0
1	5	2	2	2		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**Persentase Pengakan Perda, Perbup dan Peraturan Lainnya**	100%	**124**				124	124
1	5	2	2	2		*Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	*Jumlah Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana*	*55*	*2laporan*				2 laporan	0
1	5	2	2	2	3	*Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota*	*Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota Yang Terlaksana*	*840*	*140 laporan*				140 laporan	0,166666667
1	5	2	2	3		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase ASN Satpol PP Yang Sudah Mengikuti Pembinaan Penyidik PPNS Kab/Kota**	**100%**	0				0	0
1	5	2	2	3	1	*Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS*	*Jumlah ASN yang telah mengikuti Diklat PPNS*		*0*				0	

									0				216	0,36
1	**5**	**4**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN**	**100%**	**259**				259	259
1	**5**	**4**	2	1		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**	**36**				36	260
1	5	4	2	1	1	*Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani*	*60*	84 Dokumrn				84 Dokumen	1,4
1	5	4	2	1	6	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan*	*120*	1unit				1unit	0,158333333
1	5	4	2	1	7	*Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran*	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih*	*55*	0	0			0	0
1	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**	100				100	38121
1	**2**	**1**	**2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**	100				100	265
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat DaerahPenyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun*	*45*	3 dokumen	‘			3 dokumen	0
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana*	*45*	9 dokumen				9 dokumen	0
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana*	*45*	9 dokumen				9 dokumen	0
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD*	*45*	27 Laporan				27 laporan	0,6

1	*2*	*1*	*2*	*1*	*5*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana*	*45*	27 dokumen				27	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*6*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*25*	9 dokumen				9 dokumen	0
1	**2**	**1**	**2**	**2**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**	60	**100**				272	4,533333333
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*60*	660.Orang/bulan				660.Orang/bulan	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana*	*60*	3 dokumen				3 dokumen	0
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*5*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana*	*5*	1 dokumen				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*7*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Yang Terlaksana*	*5*	3 dokumen				3 dokumen	0
1	**2**	**1**	**2**	**3**		**XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**					0	0
1	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun*		0				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*3*	*5*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana*		1 dokumen				1 dokumen	0
1	*2*	*1*	*2*	*3*	*6*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun*		1 dokumen				1 dokumen	0
1	**2**	**1**	**2**	**5**		**XXX Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**100**	100				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*5*	*1*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan*						0	0
1	*2*	*1*	*2*	*5*	*2*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan*	*110*	130				130	1,181818182

1	*2*	*1*	*2*	*5*	*5*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana*						0	0
1	**2**	**1**	**2**	**6**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**	**285**				285	285
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*1*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan*	***0***	0				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*2*	*XXX Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*15*	15				15	1
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*3*	*XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*125*	125				173	1,384
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*5*	*XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*187.500*	262500				262500	1,4
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*6*	*XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan*	*750*	450				450	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*9*	*XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*175*	117				117	0,668571429
1	**2**	**1**	**2**	**7**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100**	193				193	1,93
1	*2*	*1*	*2*	*7*	*5*	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan*	*5*	0				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*7*	*6*	*XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*2*	0				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*7*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan*	*1*	0				0	0
1	**2**	**1**	**2**	**8**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**	296				296	296
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*1*	*XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*420*	540				540	1,285714286
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*2*	*XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*60*	36				36	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*3*	*XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*120*	0				0	0
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*4*	*XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*60*	36				36	0,6

TABEL II.1.a (RENSTRA PERUBAHAN 2018-2023)

Tabel II.1.b (RENSTRA RPD 2024-2026)

1	**2**	**1**	**2**	**9**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**	212				212	2,12
1	*2*	*1*	*2*	*9*	*1*	*XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan*	*270*	36				36	36
1	*2*	*1*	*2*	*9*	*2*	*XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan*	*20*	20				20	20
1	*2*	*1*	*2*	*9*	*9*	*Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*1*	3				3	3

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Capaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II tahun 2024 (tahun berjalan)
Kabupaten Sidenreng Rappang

Nama SKPD **: Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

Kode						Urusan/BidangUrusanPemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target capaiankinerja Program (Renstra SKPD) Tahun 2024-2026	Realisasi target kinerjahasil program dan keluaran kegiatan s/d tahun 2023	Target dan realisasikinerja program dan kegiatan s.d triwulan II tahun 2024			Perkiraan realisasi capaian target RENSTRA SKPD sampai dengan tahun berjalan	
										Target Renja SKPD tahun	Realisasi Renja SKPD tahun	Tingkat Realisasi (%)	Realisasi capaian Program dan kegiatan s/d tahun berjalan (2024)	Tingkat capaian Realisasi Target Renstra (%)
1						2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9=5	10=(9/4*100)
						WAJIB								
1	5					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
1	5	2				**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN AKIBAT DARI PENEGAKAN HUKUM PERDA**	**100%**					186	372
1	5	2	2	1		**PenangananGangguanKetenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**PersentaseGangguanKetenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**					186	372
1	5	2	2	1	1	*PencegahanGangguanKetenteraman dan Ketertiban Umum melaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, dan Pengawalan*	*JumlahPencegahanGangguanKetenteraman dan Ketertiban Umum melaluiDeteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, PelaksanaanPatroli, Pengamanan, dan Pengawalan Yang Dilaksanakan*	600		80	70	87%	216	0,36

1	5	2	2	1	4	*PemberdayaanPerlindungan Masyarakat dalamrangkaKetentraman dan Ketertiban Umum*	*JumlahPersonilPerlindungan Masyarakat Yang Diberdayakan*	155		59	27	4%	39	0,25
1	5	2	2	1	5	*PeningkatanKapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat termasukdalamPelaksanaanTugas yang Bernuansa Hak AsasiManusia*	*JumlahPeningkatanKapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan SatuanPerlindungan Masyarakat termasukdalamPelaksanaanTugas yang Bernuansa Hak AsasiManusia Yang Terlaksana*	*35*		35	35	100	1	0.3
1	5	2	2	1	6	*Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan dan PenangananGangguanKetentraman dan Ketertiban Umum*	*Jumlah Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan dan PenangananGangguanKetentraman dan Ketertiban Umum Yang Terlaksana*	*3*		0	0		1	0,3
1	5	2	2	1	7	*Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKetentraman dan Ketertiban Umum*	*JumlahPengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan PrasaranaKetentraman dan Ketertiban Umum Yang Diadakan dan Terpelihara*	*75*		17		7	0,9	
1	5	2	2	1	8	*Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat*	*JumlahDokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang Disusun*	*2*		0	0		0	0
1	5	2	2	1	9	*PenyediaanLayanandalam Rangka DampakPenegakanPerda dan Perkada*	*Jumla Warga Negara Yang MemperolehLayananAkibat Dari Penegakan Hukum Perda*	*55*		4	2		0	0
1	5	2	2	2		**PenegakanPeraturan Daerah Kabupaten/Kota dan PeraturanBupati/Wali Kota**	**PersentasePengakanPerda, Perbup dan PeraturanLainnya**	100%					124	124
1	5	2	2	2		*SosialisasiPenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota*	*JumlahSosialisasiPenegakanPeraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota Yang Terlaksana*	*55*		0	0	0	0	0
1	5	2	2	2	3	*PenangananatasPelanggaranPeraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota*	*JumlahPenangananatasPelanggaranPeraturan Daerah dan PeraturanBupati/Wali Kota Yang Terlaksana*	*840*		84	67		140	0,1
1	5	2	2	3		**PembinaanPenyidikPegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**Persentase ASN Satpol PP Yang SudahMengikutiPembinaanPenyidik PPNS Kab/Kota**	**100%**		0	0	0	0	0
1	5	2	2	3	1	*PengembanganKapasitas dan Karier PPNS*	*Jumlah ASN yang telahmengikutiDiklat PPNS*			0	0	0	0	
													216	0,36
1	**5**	**4**				**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**PERSENTASE WARGA NEGARA YANG MEMPEROLEH LAYANAN PPENYELAMATAN DAN EVAKUASI KORBAN**	**100%**					259	259

1	**5**	**4**	2	1		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan BeracunKebakarandalam Daerah Kabupaten/Kota**	**PersentasePencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**100%**					260	260
1	5	4	2	1	1	*Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota*	*Jumlah Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Yang Tertangani*	*60*		12	42	3,5%	84	1,4
1	5	4	2	1	6	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri*	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, PenanggulanganKebakaran dan Alat Pelindung Diri Yang Diadakan*	*120*		0	0	0	19	1
1	5	4	2	1	7	*PembinaanAparaturPemadamKebakaran*	*Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Dilatih*	*55*		0	0	0	0	0
1	**2**	**1**				**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**PERSENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**100%**					38121	38121
1	**2**	**1**	**2**	**1**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**100%**					265	265
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*1*	*PenyusunanDokumenPerencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Yang Disusun*	*45*		0	0	0	0	0
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*2*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD Yang Terlaksana*	*45*		0	0	0	0	0
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*3*	*Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD Yang Terlaksana*	*45*		0	0	0	0	0
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*4*	*Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD*	*45*		0	0	0	27	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*5*	*Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD Yang Terlaksana*	*45*		0	0	0	27	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*1*	*6*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD*	*25*		0	0	0	0	0
1	**2**	**1**	**2**	**2**		**AdministrasiKeuangan Perangkat Daerah**	**JumlahPenyediaanGaji dan Tunjangan ASN**	60					272	4,
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*1*	*Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN*	*60*		660	54	0.08	36	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*2*	*Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN*	*Jumlah Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Yang Terlaksana*	*60*		0	0	0	0	0
1	*2*	*1*	*2*	*2*	*5*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Yang Terlaksana*	*5*		0	0	0	0	0

1	*2*	*1*	*2*	*2*	*7*	*Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD*	*Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Yang Terlaksana*	*5*		0	0	0	0	0
1	**2**	**1**	**2**	**3**		**XXX Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**100%**					0	0
1	*2*	*1*	*2*	*3*	*1*	*Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD*	*Jumlah Laporan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Yang Disusun*						0	0
1	*2*	*1*	*2*	*3*	*5*	*Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Terlaksana*						0	0
1	*2*	*1*	*2*	*3*	*6*	*Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD*	*Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Yang Disusun*						0	0
1	**2**	**1**	**2**	**5**		**XXX AdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah**	**CakupanAdministrasiKepegawaian Perangkat Daerah**	**100**					0	0
1	*2*	*1*	*2*	*5*	*1*	*Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai*	*Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai Yang Diadakan*						0	0
1	*2*	*1*	*2*	*5*	*2*	*Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya*	*Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Yang Diadakan*	*110*		100			100	1
1	*2*	*1*	*2*	*5*	*5*	*Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai*	*Jumlah Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai Yang Terlaksana*						0	0
1	**2**	**1**	**2**	**6**		**XXX Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**CakupanAdministrasi Umum Perangkat Daerah**	**100%**					285	285
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*1*	*Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor*	*Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Yang Diadakan*						0	0
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*2*	*XXX PenyediaanPeralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*15*					15	1
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*3*	*XXX Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga*	*125*					173	1,384
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*5*	*XXX Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan*	*187.500*					262500	1,4
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*6*	*XXX Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan*	*Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan*	*750*					450	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*6*	*9*	*XXX Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD*	*175*					117	0,668571429
1	**2**	**1**	**2**	**7**		**XXX Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah**	**CakupanPengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusanPemerintah Daerah**	**100**					193	1,93
1	*2*	*1*	*2*	*7*	*5*	*Pengadaan Mebel*	*Jumlah Pengadaan Mebel Yang Diadakan*	*5*					0	0

1	*2*	*1*	*2*	*7*	*6*	*XXX Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya*	*2*					0	0
1	*2*	*1*	*2*	*7*	*10*	*Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya*	*Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Yang Diadakan*	*1*					0	0
1	**2**	**1**	**2**	**8**		**XXX Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100%**					296	296
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*1*	*XXX Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat*	*420*					540	1,285714286
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*2*	*XXX Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik*	*60*		12	7		36	0,6
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*3*	*XXX Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor*	*120*					0	0
1	*2*	*1*	*2*	*8*	*4*	*XXX Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor*	*60*					36	0,6
1	**2**	**1**	**2**	**9**		**XXX Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100**					212	2,12
1	*2*	*1*	*2*	*9*	*1*	*XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan*	*Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Diadakan*	*270*					36	0,2
1	*2*	*1*	*2*	*9*	*2*	*XXX Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan*	*Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Diadakan*	*20*					0	0
1	*2*	*1*	*2*	*9*	*9*	*Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan BangunanLainnya*	*Jumlah Pemeliharaan, Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya*	*1*					3	3

2.2. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi perangkat daerah Berisikan Uraian mengenai :

Isu-isu Penting dalam pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sangat dipengaruhi oleh luas wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, terdiri dari 11 Kecamatan, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan kantrantibmas dan kebakaran termasuk kebakaran hutan saat musim kemarau. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah, harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran dari pada pelaksanaan kegiatan patroli gangguan trantibum dan operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan funsi Perangkat

- Masih perlunya kuantitas anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- Belum optimalnya sumber daya manusia aparatur.
- Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- Masih belum mencukupi sarana dan prasarana.
- Masih perlunya penambahan anggaran.
- Rendahnya komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Permasalahan dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah berdampak terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sidenreng Rappang terutama Misi ke 7. Perubahan paradigma penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah yang sebelumnya responsive menjadi preventif, untuk itu perlu dilakukan

peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan Damkar dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah.

4. **Adapun Tantangan dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yaitu** :
   - Terbatasnya sumber daya manusia.
   - Belum adanya payung hukum yang dapat melindungi aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam menghadapi resiko umum pada setiap pelaksanaan kegiatan Penegakan Hukum (Perda dan Perbub).
   - Luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang heterogen berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.

   Sedangkan peluang dalam meningkatkan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Pemadam Kebakaran, yaitu :

a. Koordinasi yang baik antar instansi di mana dengan terjalinnya koordinasi yang baik antar dinas/badan/kantor/bagian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang akan dapat memperlancar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
b. Pemanfaatan teknologi informasi.
   Perkembangan teknologi informasi membuka peluang bagi terbentuknya akses terhadap kemungkinan memperoleh informasi guna penyempurnaan manajemen organisasi maupun pengambilan keputusan dalam pelaksanaan tugas pelayanankepada masyarakat.
c. Kerjasama dengan pihak luar
   Adanya kerjasama dengan pihak luar merupakan peluang yang sangat baik dalam rangka menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sidenreng Rappang.
d. Adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung tupoksi.
   Dengan adanya Peraturan Pemerintah yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi akan sangat membantu sebagai dasar hukum penyelenggaraan kegiatan.

5. **Rekomendasi strategis dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah di Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu :**

- Aspek regulasi, perlu dilakukan penguatan kelembagaan Satpol PP tingkat Kabupaten maupun tingkat Kecamatan yang didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2008.
- Aspek kebutuhan personil, perlu melakukan upaya pendayagunaan aparatur mengingat imposible apabila kekurangan personil dilakukan melalui rekruitmen kepegawaian. Peluang yang harus ditangkap melalui perubahan struktur Satpol PP Kabupaten, dimana setiap kecamatan harus dibentuk unit Satpol PP Kecamatan yang secara ex-officio dijabat oleh Kasi Trantib Kecamatan dan untuk anggota Satpol PP Kecamatan dengan mendayagunakan personil kecamatan. Disamping itu untuk Penegakan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan memberdayakan anggota yang ada.
- Aspek sarana prasarana, untuk mendukung kegiatan operasi dibutuhkan sarana prasarana pendukung dengan mencoba mengusulkan kebutuhan sarana prasarana pendukung untuk kegiatan patrol sesuai dengan SPM, bahwa Satpol PP melaksanakan patrol 3 kali dalam sehari.
- Aspek pembiayaan, jelas bahwa untuk mendukung kegiatan operasi dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan Penegakan Peraturan daerah dan Kepala Daerah dibutuhkan anggaran yang memadai melalui usulan anggaran dalam program dan kegiatan.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, diuraikan bahwa pada Bab III fokus perhatiannya adalah terkait dengan rencana kerja dan pendanaan dokumen rencana kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024.

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari dokumen rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Rencana Kerja (Renja) disusun untuk satu tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ditransformasikan melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUAPPAS). Rumusan program dan kegiatan pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang konkrit dalam bentuk program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Dalam Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 terdapat 3 (Tiga) program dan 12 (Dua Belas) kegiatan, baik program dan kegiatan utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam rangka pemenuhan visi dan misi kepala daerah, maupun program dan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Adapun Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam Perubahan Renja Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel III.1.
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang

Perangkat Daerah : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	TAHUN ANGGARAN 2024							
						SEBELUM PERUBAHAN				SETELAH PERUBAHAN			
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Kelompok penerima manfaat
1				***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***	***9***	***10***	***11***
1	5			**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DAERAH**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.212.714.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**14.712.714.000**	
1	5	2		**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		14.212.714.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**14.712.714.000**	
1	5			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**3.815.409.846,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**4.964.367.900**	

				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3. Dokumen	**33.672.814,00**		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3. Dokumen	0	
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	*Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah*	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	1.500.000,000		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	0	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	1.500.000,000		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	0	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	1.500.000,000		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	" 3. Dokumen "	0	
				Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	6.033.814		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	0	

				Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	8.139.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	0	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	15.000.000		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Dokumen	0	
				Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**3.474.541.000,**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**4.431.511.300**	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660. Orang/ bulan	3.464.291.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	660. Orang/ bulan	4.431.511.300	

				Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	5.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	5.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**750.000,0**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**0**	
				Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Dokumen		

				Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Dokumen	250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Dokumen	0	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**2.000.000,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**97.345.000**	
				Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	500.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	1.250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	97.345.000	
				Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Dokumen	0	

				Administrasi Umum Perangkat Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**124.058.032,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**238.671.100**	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	1.338.250,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	0	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	500.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	12.786.000	
				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	4.174.482,0		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	2.200.000	
				Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Paket	12.625.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Paket	10.599.600	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	2.727.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.00 Dokumen	1.700.000	

				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.00 Laporan	102.693.300,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	35.00 Laporan	211.376.500	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**7.000.000,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**29.000.000**	
				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	1.250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	1.500.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	250.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	1.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	29.000.000	

				Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	1.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.Unit	2.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.Unit	0	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		113.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**94.438.500**	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15. Laporan	828.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	15. Laporan	826.000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12. Laporan	47.000.000,00		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12. Laporan	48.600.000	
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1. Laporan	1.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1. Laporan	0	

				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12. Laporan	64.172.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang,semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12. Laporan	45.012.500	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**60.388.000,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**73.402.000**	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18. Unit	40.388.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	18. Unit	65.902.000	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	13.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	7.500.000	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	5.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit		
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Unit	2.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit		

				PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**2.042.279.200,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**6.194.645.600**	
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**1.737.279.200,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**5.994.645.600**	
				Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15.00 Dokumen	20.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	15.00 Dokumen	5.201.000	
				Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Dokumen	119.183.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12.00 Dokumen	170.500.000	
				Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35.00 Orang	25.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	35.00 Orang	55.000.000	
				Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Dokumen	5.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.00 Dokumen	0	

				Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Dokumen	8.950.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Dokumen	0	
				Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80.00 laporan	1.460.740.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	80.00 laporan	1.540.719.000	
				Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yangdilakukan Penindakan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55.00 Laporan	47.406.200,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	55.00 Laporan	4.200.000.000	
				Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10.00 Laporan	11.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	10.00 Laporan	0	

				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4.00 Unit	40.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	4.00 Unit	36.000.000	
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**300.000.000,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**200.000.000**	
				Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah danPeraturan Kepala Daerah	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Laporan	2.500.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	2.00 Laporan	0	
				Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	84.00 Laporan	295.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	84.00 Laporan	200.000.000	
				Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5.00 Laporan	2.500.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	5.00 Laporan	0	
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**5.000.000,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		0	

				Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.00 Laporan	5.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Laporan	0	
				PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**2.916.791.968,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**3.553.700.500**	
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		**2.916.791.968,00**		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa		**3.553.700.500**	
				Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan /Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota Setiap Tahunnya	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Dokumen	2.750.600.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12.00 Dokumen	3.553.700.500	
				Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /Kota	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12.00 Laporan	121.191.968,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	12.00 Laporan	0	
				Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng	12.00 Dokumen	20.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng	12.00 Dokumen	0	

					Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/ Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa			
				Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2.00 Orang	15.000.000,00		Sidenreng Rappang Kab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	2.00 Orang	0	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	10.000.000,00		Sidenreng RappangKab. Sidenreng Rappang, Semua Kecamatan, Semua kel/Desa	1.00 Unit	0	

Pangkajene, 06 Agustus 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran

USMAN DEMMA, S.Sos
19651231 198611 1 045

BAB IV PENUTUP

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2024 ini merupakanPerubahan Rencana Kerja yang disusun dalam rangka menunjang Rencana Strategis dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, dalam menunjang tercapainya target dan sasaran pembangunan yang dioperasionalkan melalui Peruhanan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RPJMD) pemerintah daerah Sidrap tahun 2024.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, sebagai bahan dalam penyusunan usulan penilaian program dan kegiatan dengan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD T.A 2024 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja tahun lalu sehingga pelaksanaannya dapat lebih berkualitas.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, penegakan Perda dan Perkada serta Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.

Dengan adanya Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2024. Maka, penetapan prioritas pembangunan yang diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergitas serta berkelanjutan dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Daerah Sidrap maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain

Demikian halnya Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan bahan perbandingan dalam pencapaian kinerja organisasi ke depan, terutama di dalam peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Pangkajene, 6 Agustus 2024
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran

USMAN DEMMA, S.Sos
NIP. 19651231 198611 1 045